



Mengoptimalkan **Potensi**, Memperkuat **Resiliensi**

*Optimizing Potential,
Strengthening Resilience*



LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT

2016



BANK INDONESIA

MENGOPTIMALKAN POTENSI, MEMPERKUAT RESILIENSI

Optimizing Potential, Strengthening Resilience

Kinerja positif perekonomian Indonesia di 2016 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi domestik yang besar untuk menjaga daya tahan ekonominya. Sinergi dan konsistensi kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan Pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi sambil mendorong momentum pertumbuhan mampu membawa perekonomian Indonesia keluar dari berbagai tekanan eksternal dengan tetap berada pada jalur kesinambungan yang benar.

Bank Indonesia mencatat setidaknya 3 potensi yang menopang hal tersebut. Pertama, tingkat kepercayaan dan keyakinan yang tinggi dari pelaku ekonomi terhadap Pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya. Kedua, sumber pembiayaan ekonomi dari kebijakan pengampunan pajak, dan ketiga perkembangan ekonomi digital yang maju pesat.

Untuk itu, selama 2016 Bank Indonesia merespons dengan menginisiasi berbagai kebijakan di bidang moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah. Banyak diantaranya merupakan kebijakan yang secara struktural mengubah pola hubungan antara Bank Indonesia, pelaku industri, dan masyarakat. Hal ini sebagai buah transformasi yang sedang dijalankan di Bank Indonesia untuk berinovasi dan beradaptasi dengan lingkungan yang semakin dinamis.

Bank Indonesia meyakini besarnya potensi lain yang masih dapat dimanfaatkan untuk menjaga daya tahan ekonomi Indonesia di masa mendatang. Untuk itu, Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan kebijakannya dan bersinergi dengan Pemerintah serta pemangku kebijakan lain dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan reformasi struktural.

The positive performance of Indonesia's economy in 2016 showed that Indonesia has a large domestic potential to help maintain its economic resiliency. The synergy and consistency of policies pursued by Bank Indonesia and the Government to maintain macroeconomic stability, while encouraging the momentum of growth was able to steer the Indonesian economy away from various external pressures, while remaining in the path of true sustainability.

Bank Indonesia recognizes at least 3 potentials that support economic performance. First of all, is the trust and confidence level of economic players over the Government and other stakeholders. Second, is the source of economic financing from the recent tax amnesty policy, and third is the fast-growing development in the digital economy.

To that end, during 2016 Bank Indonesia responded by initiating various policies in monetary, macroprudential, payment and Rupiah's money management system. Many of these are policies that structurally change the relationships pattern between Bank Indonesia, industry players and the public. This is as a result of transformation implemented by Bank Indonesia to innovate and adapt to an increasingly dynamic environment.

Bank Indonesia believes that other potentials can still be utilized to sustain Indonesia's economic resilience in the future. Therefore, Bank Indonesia will continue to optimize its policies and synergize with the Government and other stakeholders in maintaining the stability and sustainability of structural reformation.



Gedung Bank Indonesia dibuat dengan pondasi yang kokoh dan konstruksi yang stabil. Sebagaimana gedungnya, begitu pula kekokohan Bank Indonesia, sebagai penjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang bersama dengan Pemerintah dan otoritas lain mengoptimalkan setiap potensi untuk menopang ketahanan ekonomi Indonesia. Dengan ketahanan yang kuat, stabilitas perekonomian terjaga sehingga ekonomi tumbuh berkesinambungan.

Bank Indonesia building is built upon solid foundation and stable construction. Just as the building, so is the robustness of Bank Indonesia, as the guardian of macroeconomic stability and financial system which together with the Government and other authorities optimize every potential to sustain Indonesia's economic resilience. With strong resilience, economic stability is maintained so that the economy grows sustainably.

Gedung Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara
Bank Indonesia Building at North Sumatera Province

DAFTAR ISI

Table of Content

07 PENGANTAR GUBERNUR

Governor Foreword

18 IKHTISAR

Highlights



20 TENTANG BANK INDONESIA

About Bank Indonesia

-
- 24 Status, Tujuan, dan Tugas
Status, Objectives and Tasks
 - 26 Visi dan Misi
Vision and Mission
 - 27 Nilai-nilai Strategis
Strategic Values
 - 30 Dewan Gubernur Bank Indonesia
The Board of Governors of Bank Indonesia
 - 38 Rangkaian Peristiwa
Series of Events
 - 46 Sekilas Perjalanan
Brief History
 - 48 Organisasi Bank Indonesia
Organization of Bank Indonesia
 - 50 Peta Wilayah Kerja
Working Area Map



52 PELAKSANAAN TUGAS

Task Implementation

-
- 54 Perekonomian Global dan Domestik
serta Prospek Ke Depan
*Global and Domestic Economy and
Future Prospect*
 - 61 Menjaga Stabilitas Moneter dan Sistem
Keuangan
*Maintaining Monetary and Financial
System Stability*
 - 98 Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran
dan Efektivitas Pengelolaan Uang Rupiah
*Maintaining the Continuity of Payment
System and the Effectiveness of Rupiah
Currency Management*
 - 120 Mendorong Akses Keuangan serta
Mengembangkan Sektor Riil dan UMKM
*Promoting Financial Access and
Developing Real Sector and MSME*
 - 127 Menjaga Kualitas Layanan kepada
Pemerintah
*Maintaining Service Quality to the
Government*
 - 130 Memperkokoh Kerjasama Internasional
Strengthening International Cooperation



144 MANAJEMEN ORGANISASI

Organizational Management

-
- 146 Badan Supervisi Bank Indonesia
Bank Indonesia Supervisory Board
 - 153 Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Organization and Human Resources
 - 164 Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja
Strategic Planning and Performance Management
 - 170 Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal
Risk Management and Internal Audit
 - 177 Pengelolaan Keuangan
Financial Management
 - 180 Komunikasi, Layanan Informasi dan Edukasi Publik
Communication, Information Services and Public Education
 - 182 Program Sosial Bank Indonesia
Bank Indonesia Social Program
 - 190 Akuntabilitas
Accountability
 - 193 Tata Kelola
Governance



196 TRANSFORMASI

Transformation



206 LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Annual Financial Report

-
- 208 Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights
 - 209 Surat Pernyataan Manajemen
Management Statement
 - 210 Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan
Independent Auditor's Report on the Financial Statements
 - 212 Laporan Posisi Keuangan
Statements of Financial Position
 - 214 Laporan Surplus Defisit
Statement of Surplus Deficit
 - 215 Catatan Atas Laporan Keuangan
Notes to Financial Statements

284 LAMPIRAN

Attachment

-
- 284 Nama Pemimpin Satuan Kerja
Heads of Departments
 - 288 Daftar Istilah
List of Glossary
 - 297 Daftar Singkatan
List of Abbreviations and Acronyms
 - 300 Daftar Tabel
List of Tables
 - 300 Daftar Grafik
List of Graphics
 - 300 Daftar Infografis
List of Infographics
 - 301 Daftar Gambar
List of Pictures
 - 301 Daftar Box
List of Box

“
**OPTIMALKAN KEMAMPUAN
DAN POTENSI DIRI UNTUK MEMBANGUN
INDONESIA.**

*Optimize our ability and self potential
to build Indonesia.*

“

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Gubernur Bank Indonesia
Governor of Bank Indonesia

PENGANTAR GUBERNUR

Governor Remarks



AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Gubernur Bank Indonesia
Governor of Bank Indonesia

Laporan Tahunan Bank Indonesia (BI) tahun 2016 bertema "Mengoptimalkan Potensi, Memperkuat Resiliensi". Kami merasa tema ini cukup mencerminkan respons kami di tahun tersebut dalam menghadapi lesunya ekonomi global, yang masih belum keseluruhan pulih, serta menyikapi ekonomi domestik yang berada pada awal tren perbaikan.

Our 2016 Annual Report is entitled "Optimizing Potential, Reinforcing Resilience". We feel that this theme adequately reflects our response during that year, facing the global economic slowdown, which has not fully recovered, and responding to our domestic economy, that is just starting to pick up.

Dengan kondisi global yang masih belum menentu dan masalah struktural ekonomi yang masih bergantung pada sumber daya alam, kami dituntut untuk mencari arah kebijakan yang dapat lebih mengoptimalkan potensi negara kami, agar resiliensi ekonomi nasional terus ditingkatkan. Potensi domestik cukup variatif, dari membangun industri domestik yang dapat memberi nilai tambah dari sumber daya alam sampai menyiapkan berbagai sektor unggulan baru yang dapat bersaing dipasar global.

Satu potensi di 2016 adalah potensi sumber pembiayaan yang cukup menjanjikan. Ini terlihat dari hasil program Pengampunan Pajak yang berlangsung sejak pertengahan 2016 sampai awal 2017. Optimalisasi sumber pembiayaan ini dapat memperkuat ketahanan ekonomi, dari aspek kesinambungan fiskal, ketahanan sektor korporasi, sampai menurunkan ketergantungan terhadap utang luar negeri.

Walau sudah ada tanda-tanda pemulihan ekonomi di beberapa negara maju, dampaknya terhadap ekonomi global, termasuk negara berkembang, masih belum sepenuhnya terasa, sehingga pelemahan ekonomi dunia diperkirakan akan terus berlanjut hingga pertengahan 2017. Pertumbuhan ekonomi global di 2016 adalah 3,1% lebih rendah dari 3,2% pada tahun sebelumnya. Amerika Serikat (AS) adalah satu negara maju, yang pertumbuhan ekonominya mulai pulih kembali, sehingga Federal Reserve (the Fed) AS merasa perlu untuk menaikkan suku bunga Fed di akhir tahun 2016. Tren pemulihan juga terjadi pada beberapa negara utama di Uni Eropa, walau belum meyakinkan dan merata.

Walau kebanyakan ekonomi negara berkembang masih terlihat lesu, ekonomi Tiongkok, yang merupakan ekonomi peringkat kedua dunia dan salah satu tujuan ekspor utama Indonesia, terlihat mulai membaik, walau masih dibawah potensinya. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Tiongkok tumbuh 6,6%, lebih rendah dibanding 7-8% yang dicapai beberapa tahun sebelumnya. Berbeda dengan ekonomi India, yang pertumbuhannya dalam beberapa tahun lalu cukup mengesankan, tapi sebaliknya sekarang mulai melamban. Sementara itu, Brasil dan Rusia masih belum pulih, walau tekanan penurunan sudah berkurang.

With uncertain global conditions and economic structure that still depends on natural resources, we are required to seek a policy direction that not only optimizes our country's potential, but also increases its economic resilience. Our domestic potential is quite varied, from building local production facilities that can add value to our natural resources, to preparing a variety of new potential sectors that can compete globally.

One potential in 2016 was new sources of financing, which is quite promising. This comes from the results of the Tax Amnesty program that began in the middle of 2016 and ended in early 2017. The optimization of these financial sources can strengthen our economic resilience, from areas/aspects of fiscal sustainability, stronger corporate sector, to reducing dependence on foreign debt.

Despite early signs of economic recovery in a few developed countries, its impact on the global economy, including developing countries, has not been fully felt, so the world economic downturn is expected to continue until mid-2017. Global economic growth in 2016, was 3.1% lower than 3.2%, in the previous year. The United States is one of developed country, whose economy was starting to recover, such that the US Federal Reserve felt the need to raise the Fed interest rate by the end of the year 2016. Similar revival trends also showed in some major European Union countries, though not yet convincing and not widespread.

Although most developing economies are still weak, China's economy, which is the world's second-largest and one of Indonesia's main export destination, is starting to improve, even though it remains below its potential. In 2016, China's economy grew 6.6%, lower than the 7-8% achieved a few years earlier. In contrast, the Indian economy, whose growth in the last few years has been quite impressive, but the reverse is now slowly happening. Meanwhile, Brazil and Russia have yet to recover, although the downturn in their economies are not expected to worsen.

Dengan ekonomi dunia dan tingkat harga komoditas yang masih lemah, kami memperkirakan ekspor non-migas Indonesia di tahun 2016 hanya naik tipis dari tingkat tahun 2015. Sementara, harga minyak dunia masih lemah akibat besarnya persediaan dari OPEC dan AS. Tren harga pada batubara dan minyak nabati (CPO) mulai naik, walau masih pada tingkat yang rendah. Namun, tren harga kedua komoditi ini masih belum meyakinkan karena lebih dipengaruhi penurunan produksi, ketimbang naiknya permintaan.

Pemulihan ekonomi global yang lamban, keluarnya Inggris dari Uni Eropa, dan kenaikan Fed Rate AS sebesar 0,25% pada akhir tahun, sertaantisipasi kenaikan Fed Rate susulan di 2017, membuat ketidakpastian di pasar keuangan global tetap tinggi. Belum lagi dampak ketidakpastian kebijakan ekonomi dari pemerintah baru di AS, yang sudah mulai meredam sentimen positif di pasar AS. Ini semua membuat alur arus modal antara negara sulit untuk dipastikan.

Kami mengamati adanya permasalahan struktural di ekonomi global, yang berpengaruh ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Salah satunya adalah berkurangnya pengaruh pertumbuhan ekonomi global terhadap perdagangan dunia. Data menunjukkan hubungan PDB dunia dengan volume perdagangan dunia tidak lagi sekuat tahun-tahun sebelumnya. Masalah struktural ini tidak akan terselesaikan dalam waktu singkat, sehingga kita masih akan menghadapi kelesuan ekonomi global dalam waktu lebih lama. Pertumbuhan ekonomi global sampai dengan tahun 2020 diperkirakan masih akan dibawah 4%.

Ekonomi Indonesia di 2016 masih tumbuh 5,02%, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka tersebut ternyata lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan awal kami di awal 2015, yaitu sekitar 5,2-5,6%. Ada beberapa provinsi yang tumbuh diatas 6%, seperti di Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara. Ini akibat transisi perekonomian dari produksi komoditi mentah kepada komoditi yang bernilai tambah, misalnya dengan membangun smelter dan industrialisasi sektor pertanian. Kendati demikian, beberapa provinsi di Sumatera, Kalimantan dan Papua masih tumbuh dibawah 4%, sehingga perlu terus mendapat perhatian. Inflasi tahunan, yang berada ditingkat 3,2%, juga terjaga dan cukup stabil. Tingkat ini lebih rendah dari 3,4% di 2015.

With the world economy and level of commodity prices that remain weak, we expect Indonesia's non-oil exports in 2016 to rise only slightly from its 2015 level. Meanwhile, world oil prices are still weak due to the large supply from OPEC and the US. Price trends are better in coal and vegetable oils (CPO). However, the price trends of these two commodities are still not convincing, as it is more influenced by the decline in production, rather than an increase in demand.

The slow global economic recovery, the British Exit from the European Union, and the the increment of US Fed Rate by 0.25% at the end of the year, as well as anticipated subsequent Fed Rate increment in 2017, causing the uncertainty in global financial market remains high. Not to mention the impact of uncertain economic policies of the new US government, which has begun to dampen positive sentiment in the US market. All of these make global cross-border capital flows difficult to predict.

We also observed structural issues in the global economy, that are affecting developing countries, including Indonesia. One of the issues is the reduction of the influence of global economic growth on the world trade. Data shows the world's GDP linkage with the world trade volume is not as strong as in previous years. This structural problem will not be solved in a short period, so we will still face slow global economic growth for a longer time. Global economic growth until 2020 is expected to remain below 4%.

Indonesia's economic growth in 2016 was 5.02%, higher than the previous year. This is lower than our preliminary estimate in early 2015, which was about 5.2-5.6%. There are several provinces that grew above 6%, such as Sulawesi, Bali and Nusa Tenggara. This is due to the economic transition from producing raw commodities to value-added goods, for example through the establishment of mineral smelters and processing facilities in the agricultural sector. Nevertheless, some provinces in Sumatera, Kalimantan and Papua still grew below 4%, so it needs to keep getting attention. Annual inflation, which was at 3.2%, was well maintained and stable. This rate is lower than 3.4% in 2015.

Resiliensi perekonomian nasional dalam merespons perlambatan ekonomi global sangat dipengaruhi oleh konsistensi dan koordinasi kebijakan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Hasilnya tercermin, bukan saja pada inflasi yang rendah dan stabil, tapi juga pada nilai tukar Rupiah yang terkendali, defisit transaksi berjalan dan defisit APBN 2016, yang berada dalam tingkat wajar, serta ketahanan perbankan dan sistem keuangan yang cukup mapan menghadapi gejolak pasar.

Selain itu, stabilitas ekonomi juga dibantu oleh situasi politik dan keamanan yang stabil, berkat dukungan legislatif dan pihak keamanan. Stabilitas ekonomi yang terjaga dan tingkat risiko yang terkendali penting agar lingkungan berusaha dapat memberi keleluasaan bagi pelaku ekonomi.

Hasilnya di 2016 adalah peringkat "investment grade" dari perusahaan peringkat global dan regional, seperti Fitch Ratings, Moody's Investors Service, Japan Credit Agency serta Rating and Investment Information Inc, yang dapat dipertahankan. Dari sisi investasi, kami mengapresiasi keberhasilan upaya pemerintah untuk meningkatkan peringkat "Ease of Doing Business" Bank Dunia, dari peringkat 106 naik ke 91.

Sepanjang tahun ada beberapa langkah dan kebijakan penting yang dilakukan Bank Indonesia:

- Pertama, adalah kebijakan moneter yang menjaga kestabilan harga dan nilai tukar Rupiah.
 - o Selama 2016, Bank Indonesia melonggarkan kebijakan moneternya dengan menurunkan tingkat suku bunga Rupiah agar mendorong perbaikan permintaan domestik. Ini dilakukan Bank Indonesia dengan menurunkan suku bunga kebijakannya sebesar 150 bps dan persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) bagi sektor perbankan juga sebesar 100 bps.
 - o Inflasi bulanan di triwulan pertama 2016 berada rata-rata di tingkat 4%, tapi pada tiga triwulan berikutnya angka ini berhasil diturunkan ke tingkat 3%, sehingga inflasi tahunan dapat ditekan di 3,2%. Ini di dalam target Bank Indonesia yang berkisar antara 3-5%. Kestabilan tingkat

The resilience of the national economy in facing the global economic slowdown,, was helped by consistent and coordinated policies, that were focused on maintaining economic stability. The results are reflected not only in a low and stable inflation, but also a stable Rupiah exchange rate, a manageable current account and budget deficit, as well as a stronger banking and stable financial system, in facing market turmoil.

In addition, economic stability was aided by a stable political and security condition, thanks to legislative and government security support. A stable economy and a controlled risk level helps create a business environment that provides flexibility for business players.

The result in 2016 is Indonesia maintaining its "investment grade" rating from global and regional rating companies, such as Fitch Ratings, Moody's Investors Service, Japan Credit Agency and Rating and Investment Information Inc. For investors, we appreciate government efforts and its ability to improve the World Bank's "Ease of Doing Business" ranking, from 106th up to 91st place.

Throughout the year Bank Indonesia undertook several important initiatives and policies:

- *First, is monetary policy, which was able to maintain the stability of price and Rupiah exchange rate.*
 - o *During 2016, Bank Indonesia relaxed its monetary policy by lowering the Rupiah's interest rate to encourage a rise in domestic demand. This was done by Bank Indonesia by lowering its policy interest rate by 150 bps and the banking sector's Minimum Reserve Requirement (GWM) by also 100 bps.*
 - o *Monthly inflation, in the first quarter of 2016, averaged 4%, but in the next three quarters, it dropped to 3%, so that the annual inflation declined to 3.2%. This is below Bank Indonesia's target, which ranges between 3-5%. This price stability was helped by the consistency of our*

harga ini tidak terlepas dari konsistensi kebijakan moneter dan koordinasi dengan Pemerintah untuk mengendalikan harga pokok makanan dan komoditas strategis.

- o Nilai tukar Rupiah membuka tahun 2016 di tingkat Rp 13.898 per USD dan menutup tahun, lebih kuat 2,34% di tingkat Rp 13.436 per USD. Akibat dari program Pengampunan Pajak pemerintah nilai Rupiah cukup menguat rata-rata disekitar Rp 13.100 per USD selama periode Juni sampai Oktober. Cadangan devisa, yang pada awal 2016 sebesar USD 105,9 milyar, terjaga dan sudah berkembang menjadi USD 116,4 milyar, cukup untuk membiayai 8,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo saat itu.
- Kedua, adalah kebijakan makroprudensial yang bersinergi dengan kebijakan pemerintah agar membantu memulihkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini bersifat "countercyclical". Selain itu, ada pelonggaran persyaratan uang muka kredit properti atau yang disebut *Loan to Value* (LTV) dan *Financing to Value* (FTV) serta peningkatan *Loan to Funding Ratio* (LFR) perbankan dari semula 78% menjadi 80%.
- Ketiga, penerbitan UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) menjadi momentum untuk meningkatkan kapasitas pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan ke depan. Dalam hal ini, Bank Indonesia akan memperkuat sensitivitas dan kalibrasi *early warning indicators* dan potensi opsi kebijakan dalam konteks Protokol Manajemen Krisis Bank Indonesia di bidang moneter dan nilai tukar, sistem pembayaran, dan makroprudensial.
- Keempat, Bank Indonesia juga menempuh kebijakan reformulasi kerangka operasi kebijakan moneter. Ini dilakukan dengan mengganti suku bunga kebijakan dari BI Rate menjadi BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) pada 19 Agustus 2016. Langkah ini ditempuh untuk memperkuat efektivitas penerapan kebijakan moneter dan mendorong jumlah dan volume transaksi di pasar uang. Berkat dukungan, koordinasi, dan kepercayaan

monetary policy and close coordination with related Government entities to control the cost of food and strategic commodities.

- o *The Rupiah exchange rate opened the year at the rate of Rp 13,898 per USD and closed the year, stronger by 2.34% at Rp 13,436 per USD. As a result of the Government's Tax Amnesty program, the Rupiah's value strengthened to around Rp 13,100 per USD during June to October period. Foreign exchange reserves, which at the beginning of 2016 amounted to USD 105.9 billion, grew to USD 116.4 billion, enough to finance 8.4 month imports and service foreign debt maturing at that period.*
- *Second, is macroprudential policy that synergizes with other government policies to help revive economic growth. This policy represents a "countercyclical" policy. In addition, there is a relaxation of the down payment terms of property loan or Loan to Value (LTV) and Financing to Value (FTV) as well as increasing the banking sector's Loan to Funding Ratio (LFR) from 78% to 80%.*
- *Third, the issuance of the PPKSK Act is a critical step to strengthen our capacity to prevent and handle future financial system crises. In this regard, Bank Indonesia will strengthen the sensitivity and calibration of early warning indicators and potential policy options, including Bank Indonesia Crisis Management Protocols in the area of monetary, exchange rate, payment systems and macroprudential policies.*
- *Fourth, Bank Indonesia also issued a policy reformulation framework for our monetary policy operations. This was done by replacing the policy interest rate from the BI Rate to BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) on August 19th, 2016. This step was taken to strengthen the effectiveness of monetary policy implementation and encourage the amount and volume of transactions in the money market. Thanks to the support,*

berbagai pihak, implementasi kebijakan berjalan baik dan BI7DRR saat ini berada pada tingkat 4,75%, yang kami pandang konsisten dengan pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas makroekonomi.

Langkah dan kebijakan lain yang terus berlangsung adalah sebagai berikut:

- Bank Indonesia di tahun 2016 terus memperkuat koordinasi dalam rangka pengendalian inflasi baik di pusat maupun di seluruh daerah. Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPI/TPID) ke-VII kembali dipimpin langsung oleh Presiden RI, diikuti oleh para Gubernur/Kepala Daerah, dan berhasil menghasilkan komitmen serta kesadaran yang semakin tinggi atas pentingnya pengendalian inflasi. Sinergi erat tersebut juga diikuti upaya bersama dalam menggali sumber-sumber pertumbuhan ekonomi daerah melalui Rapat Koordinasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan setiap triwulan.
- Bank Indonesia memberi perhatian kepada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan mewajibkan Bank Umum memenuhi target rasio kredit UMKM terhadap total kredit secara bertahap. Target tersebut yaitu 10% ditahun 2016, 15% tahun 2017, dan 20% tahun 2018, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- Di sisi penguatan sektor keuangan sosial Syariah, yang diharapkan memperkuat *social safety net* maupun pemenuhan dana untuk pembiayaan infrastruktur, Bank Indonesia meningkatkan peran *Islamic Social Finance*, seperti zakat dan wakaf dan melanjutkan inisiasi pendirian Islamic Inclusive Financial Services Board (IIFSB) agar Indonesia dapat menjadi *centre of excellence* bagi keuangan syariah global.
- Terkait dengan upaya mendorong inklusi keuangan, kami terus memperluas akses keuangan dan meningkatkan efisiensi keuangan dengan mengintegrasikan ekosistem non tunai elektronik dalam program dan layanan Pemerintah. Strategi kebijakan ini kami arahkan dengan perluasan skema *Government*

coordination and trust of various institutions, policy implementation went well and the Bank Indonesia 7-day Repo Rate is currently at 4.75%, which we consider consistent with our inflation and macroeconomic stability targets.

Other ongoing actions and policies are as follows:

- *Bank Indonesia in 2016 continued to strengthen coordination in the context of controlling inflation both at the center and at the region. The 8th National Coordination Meeting of the Central and Regional Inflation Control Team (TPI / TPID) was led by the President of the Republic of Indonesia, and attended by Governors / Heads of Regions. The meeting succeeded in generating increased commitment and awareness of the importance of controlling inflation. This close synergy is then followed by efforts to explore sources of local economic growth through quarterly meetings between Bank Indonesia and Central Government and Local Governments.*
- *Bank Indonesia pays attention to the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) by requiring commercial banks to fulfill the target of MSME credit ratio to total credit gradually. The target is 10% in 2016, 15% in 2017, and 20% in 2018, without compromising prudential principles.*
- *On strengthening the Shariah financial sector, which is projected to improve the social safety net and help fulfill funding for infrastructure, Bank Indonesia enhances the role of Islamic Social Finance, such as zakat and waqf and initiates the establishment of an Islamic Inclusive Financial Services Board (IIFSB) in Indonesia to become a Center of Excellence for global sharia finance.*
- *With regard to encourage financial inclusion, we continue to expand financial access and improve efficiency by integrating non-cash electronic ecosystems within Government programs and services. This policy strategy is directed to the extension of the Government to People scheme, i.e. non-charitable social*

to *People*, yaitu bantuan sosial secara nontunai yang disalurkan melalui sistem keagenan Layanan Keuangan Digital, dan pengembangan *People to Government*, yaitu program *smart city* yang antara lain mencakup pembayaran retribusi dan layanan publik oleh masyarakat.

- Disisi pengelolaan uang Rupiah, Bank Indonesia terus mendorong *clean money policy* hingga kewilayah terpencil dan terluar melalui masterplan *Centralized Cash Network Plan*. Selanjutnya, Bank Indonesia akan memperkuat infrastruktur perkasan dan perluasan jangkauan jaringan distribusi uang agar dapat menyediakan Uang Layak Edar secara merata dan menjangkau daerah terpencil di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam tahun ini, kami juga menginisiasi penerbitan uang Rupiah emisi baru untuk seluruh denominasi secara serentak.
- Di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia senantiasa terus memperkuat pengawasan *on-site* dan *off-site* sektor Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah didaerah secara komprehensif, terarah, dan efisien. Tahun ini kami juga membangun *National Payment Gateway (NPG)* untuk memudahkan sektor perbankan menggunakan sistem pembayaran nasional dalam layanan pembayarannya.

Kami menyadari bahwa kesamaan pandang dan gerak langkah yang harmonis sangat dibutuhkan untuk mencapai cita-cita kita bersama. Senada dengan itu, berbagai kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia tentunya disinergikan dan dikoordinasikan dengan berbagai pemangku kebijakan, baik di pusat maupun di daerah.

Pada 2017, kami memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,0-5,4%, dengan struktur perekonomian yang lebih bergantung pada permintaan domestik. Pemanfaatan berbagai potensi yang kami sampaikan sebelumnya akan mempengaruhi keyakinan dan gairah swasta untuk beraktivitas. Sementara itu, inflasi diperkirakan akan berada dalam kisaran target komitmen BI sebesar 4,0±1%.

assistance channeled through the Digital Financial Services Agency, and the People to Government development program, which is a smart city program that includes the payment of user charges and public services.

- *On Rupiah note management, Bank Indonesia continues to extend its clean money policy to remote and outlying areas through its Centralized Cash Plan master plan. Furthermore, Bank Indonesia will strengthen its cash note infrastructure and expand the reach of our note distribution network to provide clean notes for circulation and reach remote areas throughout Indonesia. In the near future, we also initiated the issuance of new Rupiah note currencies in all denominations at one time.*
- *In payment systems, Bank Indonesia continues to strengthen the on-site and off-site monitoring of the Payments and Rupiah's Note Management sector in a comprehensive, directed and efficient manner. This year we also established a national payment gateway to allow the better usage of payment services among the banking sector.*

We recognize that an agreement of views is needed to achieve our shared objectives. In this regard, the various policies pursued by Bank Indonesia are synergized and closely coordinated with various stakeholders, both at the central and regional government levels.

In 2017, we project Indonesia's economic growth to reach 5.0-5.4%, with our economic structure more driven by domestic demand. The optimization of our various potentials we have previously reported will affect the private sector's confidence and the interest to move forward. Meanwhile, inflation is expected to move within BI's committed target of 4.0 ± 1%.

Dengan prospek perekonomian tersebut, kami memperkirakan pertumbuhan dana pihak ketiga (deposito) akan mencapai 9-11% serta dari sisi kredit sekitar 10-12%. Sementara itu, defisit transaksi berjalan diperkirakan sedikit meningkat sejalan dengan intensifnya proyek-proyek infrastruktur, namun tetap pada level dibawah 3%.

Kedepan, arah kebijakan akan kami tempuh dengan mengoptimalkan tiga pilar kebijakan utama Bank Indonesia, yakni kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah.

- Kebijakan moneter tetap difokuskan pada upaya memelihara stabilitas makroekonomi yang sudah tercipta.
- Kebijakan moneter ini akan kami sinergikan dengan kebijakan makroprudensial yang diarahkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.
- Kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah akan tetap kami tujukan untuk meningkatkan efisiensi perekonomian serta mendukung berjalannya transmisi kebijakan moneter dan makroprudensial dengan baik.

Dalam kaitan operasi moneter, kami akan menambah fleksibilitas pengelolaan likuiditas bank untuk membantu menyerap kejutan alur likuiditas, yang sifatnya besar, mendadak dan sementara (*liquidity shock*), supaya tidak menimbulkan fluktuasi suku bunga yang berlebihan.

- Memperkenalkan sistem Giro Wajib Minimum (GWM) *Averaging* pada tahun 2017. Berbeda dengan sistem GWM saat ini, sistem GWM *Averaging* hanya mewajibkan bank untuk memelihara rata-rata kecukupan GWM dalam satu *maintenance period*. Dengan kelonggaran ini, kami berharap transaksi antar bank akan semakin aktif, gejolak suku bunga dapat lebih terkendali, dan transmisi kebijakan moneter semakin kuat.
- Mengoptimalkan utilisasi Surat Berharga Negara (SBN) sebagai instrumen moneter dan meningkatkan partisipasi bank di pasar uang, Bank Indonesia akan mengganti Sertifikat Bank Indonesia dengan SBN sebagai instrumen moneter secara bertahap.

With this economic trend, we estimate third party funds (deposits) to grow 9-11% and from the loan side around 10-12%. Meanwhile, the current account deficit is expected to slightly rise, in line with increased infrastructure project activities, but should remain below 3%.

Going forward, policy direction will take into account improvements in Bank Indonesia's three main policy pillars, namely monetary, macroprudential as well as Rupiah's payment and currency note management policies.

- *Monetary policy will remain focused on maintaining macroeconomic stability which has been done this year.*
- *This monetary policy will be synergized with macroprudential policies and directed to maintain financial system stability.*
- *Our Rupiah payment system and currency note management policy will continue to focus on improving economic efficiency and supporting the smooth transmission of both monetary and macroprudential policies.*

In the context of monetary operations, we will increase the flexibility of bank's liquidity management to help absorb sudden flows of liquidity, which can be sizeable, sudden and temporary (liquidity shock), so as not to cause excessive interest rate fluctuation. We plan to also do the following:

- *Introduce the Averaging Minimum Giro (GWM) system by 2017. Unlike the current GWM system, the Averaging GWM system requires the bank to only maintain average GWM for one maintenance period. With this flexibility, we expect interbank transactions to become more active, interest rate fluctuations become more subdued and monetary policy transmission become more effective.*
- *Optimize the utilization of Government Securities (SBN) as a monetary instrument and to increase the participation of banks in the money market, Bank Indonesia will replace Bank Indonesia Certificates with SBN as a monetary instrument in phases.*

- Menginisiasi transaksi lindung nilai kepada Bank Indonesia yang mengakomodasi transaksi valas dalam denominasi USD dan non-USD. Upaya lain yang akan ditempuh untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS adalah melalui kerja sama bilateral, terutama dengan negara kawasan. Kerjasama bilateral tersebut ditujukan untuk mendorong penyelesaian/pembayaran transaksi di pasar keuangan domestik dengan menggunakan mata uang lokal pada transaksi perdagangan dan investasi internasional.

Kebijakan makroprudensial di 2017 akan terus diarahkan untuk menjaga resiliensi sistem keuangan. Selain pengaturan makroprudensial terhadap perbankan, Bank Indonesia akan memperkuat asesmen dan pemantauan (surveilans) terhadap seluruh pelaku sistem keuangan, tidak terbatas pada lembaga jasa keuangan namun juga pengguna jasa keuangan.

Pemantauan risiko di luar perbankan juga bertambah penting seiring perkembangan sektor *financial technology (fintech)*. Dalam hal ini, Bank Indonesia akan mendalami potensi dan mitigasi risiko dari *fintech* sebagai masukan konstruksi penilaian makroprudensial untuk mengantisipasi sumber risiko baru dari aktivitas *fintech*. Dengan demikian, diharapkan aktivitas *fintech* sebagai opsi pembiayaan masyarakat tetap berada dalam perimeter risiko yang terjaga.

Bank Indonesia mendukung program penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) skema baru yang dijalankan Pemerintah sejak Agustus 2015. Namun demikian, kami memandang masih terdapat ruang penyempurnaan untuk lebih mengarahkan KUR agar lebih tepat guna dan tepat sasaran kepada usaha mikro, yang belum memperoleh kesempatan pembiayaan dari bank.

Sebagai respon terhadap berbagai dinamika yang ada dan untuk mendukung kontribusi Bank Indonesia yang lebih optimal, Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas internal yang difokuskan pada penguatan empat aspek.

- Pertama, penyempurnaan organisasi dan sumber daya manusia antara lain melalui

- *Initiate hedging transaction to Bank Indonesia that accommodate forex transactions denominated in USD as well as non-USDS. Another effort is to reduce dependency on the US dollar through bilateral cooperation, especially with regional countries. The bilateral cooperation is aimed at encouraging the settlement of transactions in respective domestic financial markets by using local currency in international trade and investment transactions.*

In 2017, macroprudential policies will continue to maintain a resilient financial system. In addition to macroprudential arrangements for banks, Bank Indonesia will strengthen the assessment and surveillance of all financial system players, not only limited to financial services institutions, but also users of financial services.

The importance of risk monitoring outside the banking sector is also increasing with the development of the financial technology sector (fintech). In this regard, Bank Indonesia will explore the potential risk and risk mitigation on fintech as input for its macroprudential assessment and further anticipate sources of new risks from developing fintech activities. This is to ensure that fintech activity as a community financing option remains within the perimeter of acceptable risk.

Bank Indonesia supports the new Business Credit scheme (KUR) scheme run by the Government since August 2015. However, we view that there is still room for improvement in managing KUR to be targeted more to micro enterprises, which have not yet obtained bank financing.

In response to our changing environment and to optimize our contribution, Bank Indonesia has made efforts to improve internal capacity and capabilities that are focused on strengthening four aspects.

- *First, the improvement of our organization and human resources, among others, through*

pembentukan dua departemen baru, yaitu Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan Departemen Pengembangan Pasar Keuangan. Selain itu, telah dibentuk pula Departemen Operasional Treasuri dan Pinjaman yang merupakan penggabungan dari beberapa fungsi.

- Kedua, penguatan fungsi riset dan statistik serta penguatan Kantor Perwakilan Bank Indonesia didalam negeri, antara lain melalui implementasi teknologi *big data* untuk mendukung proses pengambilan keputusan, dan penyempurnaan *regional office handbook* guna mendukung peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia di dalam negeri sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah.
- Ketiga, penguatan sistem informasi dengan menetapkan *Information System-Enterprise Architecture* (IS-EA) dan memperbaiki tata kelola sistem.
- Keempat, penguatan tata kelola dan manajemen risiko.

Di tahun 2017, penguatan internal akan diarahkan untuk mendukung implementasi bauran kebijakan dan percepatan transformasi di Bank Indonesia. Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada periode 2018-2021 akan semakin menguat dengan ditopang inflasi yang rendah. Sementara itu, defisit transaksi berjalan diharapkan akan berada pada lintasan yang menurun dan tetap berada pada level yang sehat dibawah 3%. Kami berkeyakinan sinergi kebijakan dalam mempercepat transformasi ekonomi dapat membawa perekonomian tumbuh lebih sehat, berimbang, dan inklusif, serta berkelanjutan.

Selanjutnya, dengan semakin terintegrasinya sistem keuangan Indonesia dan untuk memperkecil kesenjangan *level playing field* dengan regional, Bank Indonesia memandang semakin terdapat urgensi untuk mendorong aksi korporasi perbankan agar diperoleh manfaat yang optimal dari sistem keuangan yang terintegrasi. Aksi korporasi ini kami yakini akan dapat meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi perbankan Indonesia, sehingga peran intermediasi

the establishment of two new departments, namely the Department of Economics and Islamic Finance, and the Ministry of Financial Market Development. In addition, Treasury and Loan Operations Departments have been established as a merger of several functions.

- *Second, to strengthen our research and statistical functions as well as Bank Indonesia's Representative Offices in the country, among others, through the implementation of big data technology to support the decision-making process and the improvement of our regional office handbook to support the role of the our Representative Offices in the province as strategic partners of respective Local Governments.*
- *Third, to improve our information systems by establishing an Information System-Enterprise Architecture (IS-EA) and improve our governance system.*
- *Fourth, to strengthen governance and risk management.*

In 2017, internal improvements will be directed to support the implementation of policy mixes and the acceleration of Bank Indonesia's transformation. We estimate economic growth in the period of 2018-2021 will be stronger with inflation maintained at a manageable level. Meanwhile, the current account deficit is expected to trend downward and remain at a healthy level below 3%. We believe policy synergies in accelerating economic transformation can bring our economy to grow in a healthier, more balanced, inclusive and sustainable way.

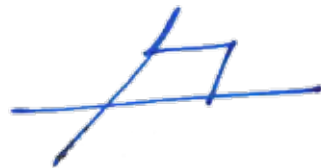
Furthermore, with the increasing integration of Indonesia's financial system and to minimize regional level playing field gaps, Bank Indonesia sees increasing urgency to encourage corporate action in the banking sector and achieve optimal benefits from more integrated financial systems. This corporate action, we believe, will improve the economics and efficiency of Indonesian banks, so that its financial intermediary role can become more optimal and that competitiveness in the national banking industry can

perbankan diharapkan dapat lebih optimal dan daya saing industri perbankan nasional dapat meningkat.

Demikian pandangan dan arah kebijakan Bank Indonesia yang dapat kami sampaikan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas jasa dan kontribusi Pak Ronald Waas dan Pak Hendar selama bertugas di Bank Indonesia. Tidak lupa kami ingin menyampaikan penghargaan, rasa terima kasih dan bangga kami kepada seluruh anggota Dewan Gubernur dan pegawai Bank Indonesia, atas segenap sumbangsih, dedikasi, dan kerja keras yang selama ini diberikan, sehingga Bank Indonesia dapat secara konsisten menjalankan mandatnya dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.

increase.

Those are the views and policy directions of Bank Indonesia. In closing, I would like to express my sincere appreciation and gratitude for the services and contributions of Mr. Ronald Waas and Mr. Hendar during their service at Bank Indonesia. I would also like to extend my appreciation and gratitude to members of the Board of Governors as well as all Bank Indonesia employees, for their contribution, dedication and hard work, so that Bank Indonesia can consistently fulfill its mandate to maintain Indonesia's economic stability .



AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Gubernur Bank Indonesia
Governor of Bank Indonesia

IKHTISAR

Highlights

FOKUS KEBIJAKAN

Kebijakan Bank Indonesia pada 2016 diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan, sekaligus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi. Ini dilakukan dengan mengoptimalkan bauran kebijakan moneter, kebijakan makropurdensial, serta kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah sebagai berikut:

- » Menurunkan suku bunga kebijakan 150bps dan Giro Wajib Minimum (GWM) Primer sebesar 1% menjadi 6,5%,
- » Mereformulasi kerangka operasional kebijakan moneter dengan mengubah suku bunga kebijakan dari BI Rate menjadi BI 7-day reverse Repo Rate,
- » Memperkuat intermediasi perbankan dengan melonggarkan aturan rasio nilai pinjaman dari aset (*Loan to Value* atau *Financing to Value*) untuk kredit properti, menaikkan batas bawah *Loan to Funding Ratio* yang dikaitkan dengan GWM, dan menetapkan *Countercyclical Buffer* sebesar 0%,
- » Memperkuat infrastruktur sistem pembayaran sesuai standar internasional untuk meningkatkan efisiensi dengan penggunaan *Central Bank Money* untuk setelmen dana,
- » Memenuhi kebutuhan uang dalam jumlah nominal yang cukup, pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan kondisi yang layak edar antara lain melalui penerapan *Centralized Cash Network Planning* (CCNP),
- » Bersinergi dengan Pemerintah dan pemangku kebijakan lain dalam pengendalian inflasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, mendorong pendalaman pasar keuangan dan keuangan inklusif, serta percepatan reformasi struktural, dan
- » Melakukan komunikasi yang efektif kepada publik dengan penggunaan berbagai media komunikasi serta penyediaan *Contact Center* Bank Indonesia.

FOCUS OF POLICY

Bank Indonesia policies in 2016 were directed to maintain macro-economy and financial system stability, as well as to encourage the momentum of economic growth. This was conducted through optimizing monetary policy mix, macro-prudential policy, and Rupiah currency management and payment system policy as follows:

- » *Cut the policy rate by 150bps and primary statutory reserve requirement by 1% to become 6,5%;*
- » *Reformulated the operational framework of monetary policy by replacing BI policy rate to BI 7-days reverse repo rate;*
- » *Strengthened the banking intermediation by loosening the ratio of Loan to Value or Financing to Value of property loan, increasing the minimum limit of Loan to Funding Ratio, and determining countercyclical buffer amounting to 0%.*
- » *Strengthened the payment system infrastructure pursuant to international standard in order to enhance business process efficiency through the use of Central Bank Money for fund settlement.*
- » *Fulfilled the needs of Rupiah currency in sufficient amount, appropriate denominations, timely manner, and fit for circulation through the implementation of Centralized Cash Network Planning.*
- » *Synergized with the Government and other institutions in order to control the inflation, maintain financial system stability, encourage financial market deepening and financial inclusion, and expedite the structural reform.*
- » *Conducted communication to the public effectively through a variety of communication channels as well as providing the Bank Indonesia Contact Center.*

HASIL YANG DICAPAI

Kondisi makroekonomi dan sistem keuangan terjaga dengan kinerja pertumbuhan ekonomi yang meningkat.

Transaksi sistem pembayaran ritel mencapai **2,50 x GDP** dan didukung dengan ketersediaan sistem pembayaran yang aman dan lancar.

*The retail payment system transaction reached **2.50 x GDP** and was supported by the availability of a secure and smooth payment system.*



Inflasi rendah **3,02%** dan dalam rentang sasaran $4,0 \pm 1\%$

*Low inflation **3.02%** and within the range of $4.0 \pm 1\%$*

PDB meningkat dari 4,9% (2015) menjadi **5,02%** (year on year)

*GDP increased from 4.9% (2015) to **5.02%** (year on year)*



Rupiah menguat **2,34%** di level **Rp13.473/USD (point to point)** dengan tingkat volatilitas yang terjaga

*Rupiah strengthened **2.34%** to **Rp13.473 / USD level (point to point)** with stable level of volatility*



THE RESULTS ACHIEVED

Macroeconomic and financial system conditions were maintained, with improved economic growth performance.



Cadangan devisa **116,4 miliar dolar AS**

*Foreign exchange reserves of **116.4 billion US dollars***



Indeks Stabilitas Sistem Keuangan berada pada zona normal, ditopang oleh: ketahanan permodalan (**CAR 22,8%**), likuiditas memadai (**Rasio Alat Likuid/DPK 20,5%**), kualitas kredit terjaga (**1,4% NPL net**).

*Financial System Stability Index was in a normal zone, supported by: capital adequacy (**CAR 22.8%**), adequate liquidity (**Ratio of Liquid Asset/Third Party Fund 20.5%**), credit quality maintained (**1.4% NPL net**).*



Layanan distribusi uang mencapai **82%**, menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia dengan standar kualitas uang layak edar yang sangat tinggi.

*Money distribution service reached **82%**, which covered almost the entire territory of Indonesia, with a high standard quality of money suitable for circulation.*



Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta
Bank Indonesia Headquarter, Jakarta



TENTANG BANK INDONESIA

About Bank Indonesia

“
PERKUAT KEPERCAYAAN DIRI
SEBAGAI MODAL UNTUK MENJADI
BANGSA YANG BESAR.

*Strengthen self confidence as a
foundation to build a great nation.*”

MIRZA ADITYASWARA

Deputi Gubernur Senior
Senior Deputy Governor

TENTANG BANK INDONESIA

About Bank Indonesia



Aktifitas Pegawai di Lobby Menara Sjafruddin Prawiranegara
Employees Activities at the Lobby of Sjafruddin Prawiranegara Tower

Keberadaan bank sentral merupakan amanat Undang Undang Dasar 1945. Selanjutnya mengenai susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur lebih lanjut dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2009.

The establishment of Indonesia's central bank is mandated by the 1945 Constitution. The central bank's structure, status, authority, responsibility, and independence were stipulated in the Bank Indonesia Act No. 23 of 1999, which has been amended a few more times, most recently by Act No. 6 of 2009.



Bank Indonesia menyadari pentingnya peranan dalam menjaga stabilisasi perekonomian dalam negeri. Karena itu, Bank Indonesia mencanangkan sebuah program transformasi untuk mencapai visi Bank Indonesia menjadi bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional pada 2024. Sementara dalam pelaksanaan tugasnya, Bank Indonesia senantiasa memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar lembaga.

Bank Indonesia realizes the importance of its role in maintaining the domestic economic stability. With its vision to become a credible and the best central bank in the region by 2024, Bank Indonesia has launched a transformation program to fulfill this objective. Meanwhile, in conducting its tasks, Bank Indonesia understands the importance of creating synergies and, thus continues to strengthen coordination and develop collaboration among institutions.

STATUS, TUJUAN, DAN TUGAS

Status, Objectives and Tasks



STATUS

Status

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan merupakan badan hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembuatan hukum. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan hukum pelaksana Undang Undang yang mengikat seluruh masyarakat luas, sesuai tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

Bank Indonesia is the Central Bank of the Republic of Indonesia and a legal entity with the authority to issue regulation. As a public legal entity, Bank Indonesia is authorized to issue legally binding subordinate regulations, in line with its duties and jurisdiction. As a civil legal entity, Bank Indonesia is entitled to act for and on behalf of itself inside and outside the court of law.

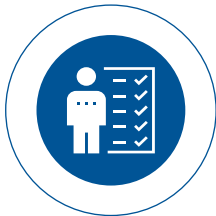


TUJUAN

Objectives

Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Kestabilan nilai Rupiah diukur dari dua aspek yaitu kestabilan nilai uang terhadap barang dan jasa yang terefleksikan pada inflasi serta kestabilan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum Pemerintah di bidang perekonomian.

Bank Indonesia has a single objective, which is to achieve and maintain the stability of the Rupiah's value. This is measured in terms of inflation or price stability of goods and services as well as stability of the Rupiah's value against other currencies. To achieve this objective, Bank Indonesia conducts monetary policy, that is sustainable, consistent and transparent in coordination with the Government's economic policies.



TUGAS

Tasks

Sesuai Undang Undang tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas: (i) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; (ii) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; (iii) mengatur dan mengawasi bank.

Selanjutnya, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam kaitan itu, Bank Indonesia mendapatkan mandat tambahan berupa tugas kebijakan, pengaturan, dan pengawasan makroprudensial. Mandat di bidang makroprudensial ini diamanatkan dalam Undang Undang tentang OJK dan dilaksanakan mulai 1 Januari 2014. Mandat tersebut guna mendukung terwujudnya stabilitas sistem keuangan Indonesia, selain tugas di bidang moneter dan sistem pembayaran, sebagai tambahan tugas yang diamanatkan Undang Undang tentang Bank Indonesia.

Bank Indonesia masih dapat memeriksa individual bank secara langsung untuk bank yang masuk kategori *systemically important bank* atau bank lainnya sesuai kewenangan Bank Indonesia, berkoordinasi dengan OJK.

In line with the Bank Indonesia Act, Bank Indonesia is authorized to conduct the following tasks: (i) formulate and execute monetary policy; (ii) regulate and maintain a smooth payment system; (iii) regulate and supervise banks.

More recently, the function of banking supervision and regulation was transferred to the Financial Services Authority (OJK). In this regard, Bank Indonesia received an additional mandate in the form of macro-prudential policy, regulation and supervision. The macro-prudential mandate is in pursuant to the OJK Act enforced on January 1st, 2014. This mandate supports financial system stability in Indonesia, and is in addition to the existing monetary and payment system tasks stipulated in the Bank Indonesia Act.

According to the authority vested in Bank Indonesia, it is still authorized to directly inspect those banks that are regarded as systemically important or other banks in conjunction with the OJK.

VISI DAN MISI

Vision and Mission



Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil.

To be a credible institution and the best central bank in the region by strengthening its strategic values as well as achieving a low inflation and a stable exchange rate.

VISI

Vision



MISI

Mission

1. Mencapai stabilitas nilai Rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/ pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.
3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional.
4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan Undang Undang.

1. *To achieve the stability of Rupiah and maintain the effectiveness of monetary policy transmission to drive quality economic growth.*
2. *To nurture an effective and efficient national financial system that can withstand internal and external shocks to support the allocation of funding/financing that contributes to national economic growth and stability.*
3. *To create a secure, efficient and smooth payment system that contributes to the economy, monetary stability, and financial system stability with regard to broadening financial access and the national interest.*
4. *To build and maintain the organization and human resources of Bank Indonesia, who are performance based and uphold the strategic values, as well as to enforce good corporate governance in order to implement tasks as mandated by prevailing laws.*

NILAI-NILAI STRATEGIS

Strategic Values



1. *Trust and Integrity*

Membangun kondisi saling menghormati dan mempercayai secara internal dan eksternal melalui keterbukaan, keandalan, dan konsistensi antara pikiran, ucapan, dan tindakan yang didasari oleh nilai-nilai moral dan etika.

1. *Trust and Integrity*

Create mutual respect and trust, in an open, reliable and consistent way, both internally and externally. And, do this in thoughts, words and actions, based on moral and ethical values.



2. *Professionalism*

Bekerja dengan tuntas dan bertanggung jawab atas dasar kompetensi terbaik yang dilakukan secara independen, antisipatif, rasional, dan obyektif.

2. *Professionalism*

Working diligently and responsibly to the best of one's ability in an independent, anticipative, rational and objective way.



3. *Excellence*

Senantiasa melakukan yang terbaik dengan mengedepankan penciptaan nilai tambah yang prima untuk mencapai keunggulan yang berkelanjutan menuju kesempurnaan.

3. *Excellence*

Always doing one's best by prioritizing the creation of value added to achieve sustainable excellence in the pursuit of perfection.



4. *Public Interest*

Senantiasa mengutamakan dan melindungi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam melaksanakan mandat dengan penuh dedikasi, adil, dan bertanggung jawab.

4. *Public Interest*

Prioritizing and protecting the national interest over personal gain when executing the mandate with dedication, fairness and accountability.



5. *Coordination dan Teamwork*

Membangun sinergi yang berkesinambungan secara internal dan eksternal melalui kolaborasi dan komunikasi yang menghasilkan komitmen yang memberikan nilai tambah dengan dasar saling percaya, saling menghargai, dan semangat interdependensi.

5. *Coordination dan Teamwork*

Creating sustainable internal and external synergy through collaboration and communication that generates commitment to provide value added based on mutual trust and appreciation as well as a spirit of independence.



SUGENG

Deputi Gubernur
Deputy Governor

MIRZA ADITYASWARA

Deputi Gubernur Senior
Senior Deputy Governor

ROSMAYA HADI

Deputi Gubernur
Deputy Governor



ERWIN RIJANTO

Deputi Gubernur
Deputy Governor

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Gubernur
Governor

PERRY WARJIYO

Deputi Gubernur
Deputy Governor

DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA

Board of Governors of Bank Indonesia

Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang sesuai Undang Undang tentang Bank Indonesia, terdiri atas Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan 4 hingga 7 Deputy Gubernur. Anggota Dewan Gubernur menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk satu periode berikutnya.

Anggota Dewan Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Untuk mendapatkan kandidat yang pantas dan layak, DPR-RI melakukan proses seleksi untuk mendalami visi, pengalaman, keahlian, dan integritas kandidat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Gubernur menetapkan kebijakan yang bersifat prinsipil dan strategis secara kolektif, yang penetapannya dilakukan melalui forum Rapat Dewan Gubernur. Dalam operasionalnya, Dewan Gubernur menetapkan pembagian tugas untuk memperjelas tanggung jawab masing-masing Anggota Dewan Gubernur. Untuk menjaga integritas, selama menjabat, Anggota Dewan Gubernur mematuhi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Bank Indonesia.

Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 2016 terdiri atas:

Gubernur: Agus D.W. Martowardojo
Deputy Gubernur Senior: Mirza Adityaswara
Deputy Gubernur: Ronald Waas, Perry Warjiyo, Hendar, Erwin Rijanto

Deputy Gubernur Ronald Waas dan Hendar berakhir masa jabatannya pada 28 Desember 2016, dan digantikan oleh Sugeng dan Rosmaya Hadi yang diangkat sebagai Deputy Gubernur untuk periode 2017-2022 pada 29 Desember 2016.

As stipulated by the Bank Indonesia Act, Bank Indonesia is led by the Board of Governors, comprised of a Governor, a Senior Deputy Governor, and 4 to 7 Deputy Governors. Each member of the Board serves for 5 years with the possibility of being reappointed for the same position in the subsequent period.

Members of the Board of Governors are nominated and appointed by the President with the approval of the House of Representatives. In order to acquire appropriate and feasible candidates, the House of Representatives conducts a selection process to gain an in-depth understanding of the candidates vision, mission, expertise and experience.

In the implementation of its duties, the Board of Governors determine principal and strategic policies collectively through the Board of Governors' meetings. In its operation, the Board of Governors determines tasks to clarify the responsibility of each respective member. To maintain the integrity, during his or her term, members of the Board of Governors must comply with the Bank Indonesia Code of Ethics and Code of Conduct.

Members of the Board of Governors of Bank Indonesia in 2016 were:

*Governor: Agus D.W. Martowardojo
Senior Deputy Governor: Mirza Adityaswara
Deputy Governors: Ronald Waas, Perry Warjiyo, Hendar, Erwin Rijanto*

Deputy Governor Ronald Waas and Deputy Governor Hendar ended their term on 28 December 2016, and replaced by Sugeng and Rosmaya Hadi who were appointed as Deputy Governors on 29 December 2016 for the 2017-2022 period.



AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Gubernur
Governor

Agus D.W. Martowardojo menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 24 Mei 2013 sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/P Tahun 2013, untuk periode lima tahun yang berakhir pada 2018. Sebelumnya, Agus D.W. Martowardojo menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia, dari Mei 2010 sampai April 2013.

Agus D.W. Martowardojo took office as Governor of Bank Indonesia on May 24th, 2013 pursuant to Presidential Decree No.45/P of 2013, for a five year term ending 2018. Previously, he served as the Minister of Finance, the Republic of Indonesia, from May 2010 to April 2013.

Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, Agus D.W. Martowardojo memegang posisi kunci di beberapa bank terkemuka di Indonesia. Menjabat sebagai Presiden Direktur dan CEO Bank Mandiri (2005 - 2010), Direktur Utama Bank Permata (2002-2005), penasihat Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (2002), Managing Director Bank Mandiri (1999-2002), Direktur Utama PT. Bank Ekspor Impor Indonesia (1998-1999), dan Presiden Direktur Bank Bumiputera (1995-1998). Di awal karirnya, Agus D.W. Martowardojo bergabung dengan Bank Niaga (1986-1994) dan Bank of America (1984-1986). Agus D.W. Martowardojo juga memimpin Dewan Penasehat Asosiasi Bank Indonesia sejak 2009.

Before serving as the Minister of Finance, Agus D.W. Martowardojo held key positions in several leading banks in Indonesia. He was the President Director and CEO of Bank Mandiri (2005 to 2010), President Director of Bank Permata (2002-2005), advisor to the Chairman of the Indonesian Bank Restructuring Agency (2002), Managing Director of Bank Mandiri (1999-2002), President Director of PT. Bank Ekspor Impor Indonesia (1998-1999), and President Director of Bank Bumiputera (1995-1998). Early in his career, he joined Bank Niaga (1986-1994) and Bank of America (1984-1986). He has been the Chair of the Advisory Board of the Indonesian Banks Association since 2009.

Agus D.W. Martowardojo juga merupakan ketua Dewan Pengurus *International Islamic Liquidity Management* (2016) dan menjabat sebagai ketua *Islamic Financial Services Board* (2015). Agus D.W. Martowardojo juga pernah memimpin Perhimpunan Bank Nasional dan Ikatan Bankir Indonesia.

Agus D.W. Martowardojo is also a chairman of the Governing Board of the International Islamic Liquidity Management (2016) and served as chairman of the Islamic Financial Services Board (2015). He also chaired the Association of State Owned Banks and chaired of the Indonesian Bankers Association.

Selama karirnya, Agus D.W. Martowardojo menerima beberapa penghargaan. Pada Agustus 2014, Agus D.W. Martowardojo dianugerahi medali Bintang Mahaputera Adipradana, penghargaan kehormatan sipil tertinggi kedua. Agus D.W. Martowardojo terpilih sebagai *Finance Minister of The Year 2012* di tingkat global dan Asia Pasifik pada Februari 2012 dari *The Banker*. Agus D.W. Martowardojo juga meraih penghargaan, antara lain, *Indonesian Banker Leadership Achievement Award 2010* dari *Asian Banker*, dan *Indonesia's Best Executive* in 2009 dari *Asiamoney*.

During his career, Agus D.W. Martowardojo has received several awards. In August 2014, he has been awarded the Bintang Mahaputera Adipradana medal, the nation's second-highest civilian honor. He was chosen as the Finance Minister of the Year 2012 on a global and Asia-Pacific level in February 2012 from The Banker. He also won, among others, the Indonesian Banker Leadership Achievement Award 2010 from the Asian Banker, and Indonesia's Best Executive in 2009 from Asiamoney.

Agus D.W. Martowardojo lahir di Belanda pada 1956. Gelar Sarjana Ekonomi diraih dari Universitas Indonesia. Agus D.W. Martowardojo juga memperluas wawasan dengan mengikuti berbagai program di State University of New York, Harvard Business School, Stanford University, dan Wharton Executive Education.

Agus D.W. Martowardojo was born in the Netherlands in 1956. He graduated from the University of Indonesia in economics. He took special programs at the State University of New York, Harvard Business School, Stanford University, and Wharton Executive Education.



MIRZA ADITYASWARA

Deputi Gubernur Senior
Senior Deputy Governor

Mirza Adityaswara, lahir di Surabaya pada 1965. Gelar Sarjana Ekonomi diraih dari Universitas Indonesia dan memperoleh gelar *Master of Applied Finance* dari Macquarie University, Sydney, Australia.

Mirza Adityaswara, born in Surabaya in 1965, graduated with a Bachelor of Economics from the University of Indonesia and subsequently received his Master of Applied Finance from Macquarie University, Sydney, Australia.

Mirza Adityaswara mengawali karir sebagai Dealer di Bank Sumitomo Niaga pada tahun 1989. Sejak tahun 2002 hingga Oktober 2005, Mirza Adityaswara menjabat sebagai *Director, Head of Securities Trading & Research*, Bahana Securities, kemudian pada November di tahun yang sama diminta menjadi *Director, Head of Equity Research & Bank Analysis* di Credit Suisse Securities Indonesia. Selama kurun waktu 2008–2010, Mirza Adityaswara menjabat sebagai *Managing Director, Head of Capital Market*, Mandiri Sekuritas, sekaligus sebagai Kepala Ekonom Bank Mandiri Group.

Mirza Adityaswara began his career as a Dealer at Bank Sumitomo Niaga in 1989. From 2002 until October 2005, however, he was appointed as Director, Head of Securities Trading & Research, Bahana Securities and then in November 2005 he was appointed as Director, Head of Equity Research & Bank Analysis at Credit Suisse Securities Indonesia. From 2008–2010, he served as Managing Director, Head of Capital Market, Mandiri Securities and simultaneously as the Chief Economist for Bank Mandiri Group.

Sebelum diangkat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara menjabat sebagai Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan sejak April 2012 ditugaskan sebagai Kepala Eksekutif LPS sekaligus Dewan Komisiner. Selanjutnya, sesuai dengan Keputusan Presiden RI No.113/P Tahun 2013 tanggal 30 September 2013, Mirza Adityaswara diambil sumpahnya sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada tanggal 3 Oktober 2013 untuk masa jabatan 2013-2014.

Prior to his appointment as Senior Deputy Governor of Bank Indonesia, Mirza Adityaswara served as the member of the Board of Commissioners of the Indonesian Deposit Insurance Corporation (LPS) and since April 2012 he has also functioned as the Chief Executive of the Indonesian Deposit Insurance Corporation and the Board of Commissioners. In accordance with Presidential Decree No. 113/P of 2013, dated September 30th of 2013, Mirza Adityaswara was sworn in as Senior Deputy Governor of Bank Indonesia on October 3rd of 2013 for the 2013–2014 period.

Jabatan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tersebut diperpanjang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 62/P Tahun 2014 untuk periode 2014-2019. Kemudian, di tahun 2015, melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2015 tanggal 23 Juli 2015, Mirza Adityaswara diberikan amanah sebagai Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) *Ex-Officio* dari Bank Indonesia.

*Under Presidential Decree Number 62/P of 2014, Mirza Adityaswara is appointed the Senior Deputy Governor of Bank Indonesia for the period from 2014–2019. Then, in 2015, through the Presidential Decree no. 61/P Year 2015 dated July 23rd of 2015, Mirza Adityaswara was granted a mandate as a member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority *Ex-Officio* from Bank Indonesia.*



PERRY WARJIYO

Deputi Gubernur
Deputy Governor

Perry Warjiyo, lahir di Sukoharjo pada 1959. Sebelum ditetapkan sebagai Deputi Gubernur, Perry Warjiyo menjabat sebagai Asisten Gubernur untuk perumusan kebijakan moneter, makroprudensial dan internasional di Bank Indonesia. Jabatan tersebut diemban setelah menjadi Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia.

Sebelum kembali ke Bank Indonesia pada 2009, Perry Warjiyo menduduki posisi penting selama dua tahun sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund, mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam *South-East Asia Voting Group*. Perry Warjiyo mempunyai karir yang panjang dan cemerlang di Bank Indonesia sejak tahun 1984, khususnya di area riset ekonomi dan kebijakan moneter, isu-isu internasional, transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter, pendidikan dan riset kebanksentralan, pengelolaan devisa dan utang luar negeri, serta kepala Biro Gubernur.

Perry Warjiyo juga sebagai dosen Pasca Sarjana di Universitas Indonesia di bidang Ekonomi Moneter dan Ekonomi Keuangan Internasional, di samping sebagai dosen tamu di sejumlah universitas di Indonesia. Gelar Master dan PhD di bidang Moneter dan Keuangan Internasional diperoleh dari Iowa State University, AS, masing-masing pada tahun 1989 dan 1991. Perry Warjiyo telah menulis dan mempublikasikan sejumlah buku, jurnal, dan makalah di bidang ekonomi, moneter, dan isu-isu internasional.

Perry Warjiyo diangkat sebagai Deputi Gubernur berdasarkan keputusan Presiden 28/P tahun 2013, dan secara resmi memulai jabatannya sejak tanggal 15 April 2013 untuk masa jabatan 2013-2018.

Perry Warjiyo currently serves as Deputy Governor, Bank Indonesia. Previously, Perry Warjiyo served as Assistant Governor for the formulation of monetary, macroprudential and international policies at Bank Indonesia, his position after being Executive Director of the Department of Economic Research and Monetary Policy, Bank Indonesia since 2009.

Prior to his return to Bank Indonesia since 2009, Perry Warjiyo held a two-year position as Executive Director of the International Monetary Fund, representing 13 member countries of the South-East Asia Voting Group. Perry Warjiyo has had a long and brilliant career at Bank Indonesia since 1984, especially in the areas of economic research and monetary policy, international issues, organizational transformation and monetary policy strategy, education and central bank research, foreign exchange and foreign debt management, as well as become the Head of Governor's Bureau.

Perry also worked as post-graduate lecturer in the University of Indonesia in monetary economics and international economic finance, as well as a guest lecturer in several universities in Indonesia. He obtained his Master's and PhD degree in Monetary and International Finance from Iowa State University, United States, subsequently in 1989 and 1991. Perry had written and published several books, journal articles, and paper in economic, monetary, and international issues.

Perry Warjiyo was appointed as Deputy Governor based on the Presidential Decree Number 28/P of 2013 and officially started his term since April 15th of 2013 for the 2013-2018 period.



ERWIN RIJANTO

Deputi Gubernur
Deputy Governor

Erwin Rijanto dilahirkan di kota Yogyakarta, pada tahun 1958. Beliau mendapat gelar Sarjana Ekonomi (S1) dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1983. Kemudian memperoleh gelar Master di bidang Ekonomi dari Illinois University di Amerika Serikat.

Setelah berkarir selama tujuh belas tahun di bidang peraturan dan pengawasan perbankan, kapasitas beliau sebagai sentral bankir yang berpengalaman luas terus berkembang dengan diangkat menjadi Deputi Kepala Biro Gubernur pada tahun 2004.

Selain pengalaman yang luas dalam bidang pengaturan dan pengawasan perbankan, Erwin Rijanto juga pernah menangani urusan internasional dan regional ketika menjabat sebagai Deputi Kepala Lembaga Restrukturisasi Hutang Indonesia dan sebagai Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Singapura.

Pencapaiannya yang gemilang lebih diperkaya lagi ketika Erwin Rijanto dipercaya menjadi Direktur Eksekutif Departemen Surveillance Sistem Keuangan di tahun 2013, sebuah Departemen baru yang dibentuk seiring dengan amanat Bank Indonesia yang baru di bidang regulasi dan pengawasan makroprudensial. Dalam kapasitas tersebut, Erwin Rijanto bertanggung jawab untuk menyusun dan mengimplementasikan kerangka pengawasan makroprudensial yang sehat dan kuat. Kinerja Erwin Rijanto yang sangat baik membawa beliau pada jabatan baru sebagai Direktur Eksekutif Kebijakan Makroprudensial di tahun 2015, tahun yang sama dimana Erwin Rijanto diangkat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Erwin Rijanto diangkat sebagai Deputi Gubernur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39/P Tahun 2015 dan secara resmi memulai jabatannya sejak tanggal 17 Juni 2015 untuk masa jabatan 2015-2020.

Erwin Rijanto was born in Yogyakarta in 1958. He obtained a Bachelor's of Economics from Gadjah Mada University in 1983. He went on to acquire a Master's Degree in Economics from the Illinois University in the United States.

Following a seventeen-year career in banking regulation and supervision, his capacity as a well-rounded central banker was further developed with his appointment as the Deputy Head of the Governor Bureau in 2004.

In addition to his extensive experiences in banking regulation and supervision, Erwin had also worked in international and regional departments when serving as the Deputy Head of Indonesian Debt Restructuring Agency and as the Director of Bank Indonesia Representative Office in Singapore.

His brilliant achievements were further enriched when Erwin was entrusted to become the Executive Director of Financial System Surveillance Department in 2013, a new Department formed following the enactment of Bank Indonesia new mandate in macroprudential regulation and supervision. In this capacity, Erwin was responsible to establish and implement sound and strong macroprudential supervisory framework. His excellent performance led him to a new position as the Executive Director of Macroprudential Policy in 2015, the same year that Erwin was appointed as Deputy Governor of Bank Indonesia.

Erwin Rijanto was appointed as Deputy Governor based on the Presidential Decree Number 39/P of 2015, and officially started his term since June 17th of 2015 for the period of 2015-2020.



SUGENG

Deputi Gubernur
Deputy Governor

Sugeng lahir di Purworejo pada tahun 1958. Gelar Sarjana Ekonomi Studi Pembangunan diraih dari Universitas Gadjah Mada pada 1984. Kemudian pada 1991, Sugeng melanjutkan pendidikan pascasarjana di William College, Massachusetts, USA dengan mengambil bidang *Development Economics*. Pada 2012, Sugeng berhasil mendapatkan gelar doktor dari Universitas Gadjah Mada di bidang ekonomi.

Perjalanan karier Sugeng dimulai di Bank Indonesia pada 1986 sebagai Asisten Ekonom Urusan Ekonomi dan Statistik. Sugeng pernah bertugas sebagai staf Gubernur Bank Indonesia (1994-1998), mewakili Bank Indonesia sebagai *Advisor Executive Director* di International Monetary Fund (1998-2001), menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di New York, Amerika Serikat (2013-2015), serta memimpin Bank Indonesia Institute sebagai Direktur Eksekutif sejak 2015 hingga 2016. Sugeng juga pernah diangkat sebagai Staf Ahli Dewan Gubernur Bank Indonesia sebelum akhirnya terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 145/P Tahun 2016, Sugeng diambil sumpahnya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 6 Januari 2017. Masa jabatan Sugeng sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia adalah untuk periode 2017-2022.

Sugeng was born in Purworejo in 1958. He obtained a Bachelor's of Economics degree in Development Study from Gadjah Mada University in 1984. Then in 1991, Sugeng continued his post-graduate study in William College, Massachusetts, United States, in Development Economics. In 2012, Sugeng obtained a Doctoral degree in Economics from Gadjah Mada University.

Sugeng career started in Bank Indonesia in 1986 as Economist Assistant in the Economic and Statistic Department. Sugeng had served as the staff of Bank Indonesia Governor (1994-1998), represented Bank Indonesia as Advisor to Executive Director in International Monetary Fund (1998-2001), held position as Head of Bank Indonesia Representative Office in New York, United States (2013-2015), and led Bank Indonesia Institute as Executive Director since 2015 until 2016. Sugeng was also appointed as Expert Staff of the Board of Governors in Bank Indonesia prior to being appointed as Deputy Governor of Bank Indonesia.

According to the Presidential Decree Number 145/P of 2016, Sugeng was sworn as Bank Indonesia Deputy Governor on January 6th of 2017. His tenure as Bank Indonesia Deputy Governor is for the periode of 2017-2022.



ROSMAYA HADI

Deputi Gubernur
Deputy Governor

Rosmaya Hadi lahir di Bandung tahun 1959 dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran pada 1984, sebelum kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia. Rosmaya Hadi kemudian mendapatkan gelar Magister Sosial Politik pada 2004.

Memulai kariernya di Bank Indonesia pada 1985, Rosmaya Hadi sempat bertugas di beberapa Departemen, termasuk sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Rosmaya Hadi sebelumnya juga berkarir sebagai Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, Deputi Direktur Departemen Keuangan Internal, dan Kepala Bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah.

Rosmaya Hadi pernah beberapa kali memegang peran di fora internasional, antara lain saat menjabat sebagai Co-Chair di *Working Committee on Payment and Settlement Systems*.

Rosmaya Hadi ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145/P Tahun 2016, dan diambil sumpahnya pada 6 Januari 2017 untuk periode 2017-2022.

Rosmaya Hadi was born in Bandung, in 1959. She obtained her Bachelor's of Law at the University Padjadjaran in 1984 and further pursued her Master's Degree in Social Politics at the University of Indonesia in 2004.

She has been assigned to various departments with the last position as the Head of Bank Indonesia Regional Office of West Java Province. Previously, Rosmaya also has been assigned in Payment System Policy and Supervision Department, Payment System Management Department, and Finance Department.

Rosmaya Hadi also remained active at an array of international forum inter alia as the Co-Chair at the Working Committee on Payment and Settlement System.

Rosmaya Hadi was appointed as the Deputy Governor of Bank Indonesia according to Presidential Decree No. 145/P of 2016, and was sworn on January 6th of 2017 for the tenure period of 2017-2022.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR YANG BERAKHIR MASA JABATANNYA DI 2016 *Members of the Board of Governors Whose Terms Ended in 2016*



RONALD WAAS

Ronald Waas, lahir di Tanjung Pinang pada 1955. Ronald Waas meraih gelar sarjananya di Jurusan Teknik Sipil pada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Bandung di tahun 1980, dan meraih gelar *Master's of International Affairs* di Columbia University pada tahun 1996.

Ronald Waas mulai bekerja di Bank Indonesia pada tahun 1981 dan selama berkarir pernah menjabat sebagai Direktur Direktorat Teknologi Informasi, Direktur Unit Khusus Manajemen Informasi dan Direktur Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran.

Ronald Waas mengakhiri masa jabatannya sebagai Deputy Gubernur pada 28 Desember 2016.

Ronald Waas was born in Tanjung Pinang in 1955. He earned his Bachelor's of Civil Engineering at the Bandung Institute of Technology in 1980, and obtained his Master's of International Affairs at Columbia University in 1996.

Ronald Waas began working at Bank Indonesia in 1981 and during his career, he had served as Director of the Information Technology Department, Director of the Information Management Special Unit and Director of the Accounting and Payment System Department.

Ronald Waas ended his term as Deputy Governor on December 28th of 2016.



HENDAR

Hendar dilahirkan pada 1957 di Bandung. Pada 1982 Hendar mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di bidang ilmu manajemen dari Universitas Padjadjaran. Hendar memperoleh gelar MA di bidang Ekonomi Pembangunan dari Center for Development Economics, Williams College, AS pada 1995. Selanjutnya, pada 2010 Hendar mendapatkan gelar Doktor di bidang ekonomi dari Universitas Padjadjaran.

Hendar memulai perjalanan karirnya di Bank Indonesia pada 1983. Hendar memperoleh berbagai penugasan pada sektor moneter. Jabatan terakhir yang disandang Hendar sebelum diangkat sebagai Anggota Dewan Gubernur adalah sebagai Asisten Gubernur Bidang Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang dan Pengelolaan Sistem Informasi.

Hendar mengakhiri masa jabatannya sebagai Deputy Gubernur pada 28 Desember 2016.

Hendar was born in 1957 in Bandung. He earned his Bachelor's of Economics in Management Science at the University of Padjajaran in 1982, and Master's of Arts in Development Economics from the Center for Development Economics, Williams College, US in 1995. Furthermore, in 2010, Hendar achieved a doctorate in economics from the University of Padjajaran.

Hendar began his career at Bank Indonesia in 1983. He was assigned to various positions in monetary sector. Before appointed as Deputy Governor of Bank Indonesia, his previous position was Assistant to the Governor in Payment Systems, Money Circulation and Management of Information Systems.

Hendar ended his term as Deputy Governor on December 28th of 2016.

RANGKAIAN PERISTIWA

Series of Events

3



JANUARI *January*

1. Bank Indonesia menyelenggarakan *Reserve Management Annual Investment Forum* untuk mengoptimalkan pengelolaan cadangan devisa ditengah semakin meningkatnya volatilitas ekonomi dan tantangan respons kebijakan global yang tidak searah.

Bank Indonesia organized the Reserve Management Annual Investment Forum to discuss optimizing reserve management in the midst of higher economic volatility and challenges of diverging global policy responses.

2. Pertemuan Bank Indonesia dengan Bank Sentral Papua Nugini guna mengevaluasi penggunaan Rupiah di wilayah perbatasan.

Coordination meeting between Bank Indonesia and Bank of Papua New Guinea to evaluate the usage of Rupiah in the border territory.

FEBRUARI *February*

3. Rapat koordinasi Bank Indonesia dengan pemerintah pusat dan daerah menyepakati 10 langkah sinergis perbaikan sistem logistik dan ketahanan pangan dalam rangka stabilisasi harga dan pengembangan ekonomi daerah.

Coordination meeting between Bank Indonesia and the central and regional governments agreed on 10 steps of synergy to improve logistic and food resiliency system in order to stabilize prices and develop regional economy.

4. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan wawasan hakim guna mendukung upaya penegakan hukum di sektor jasa keuangan.

Bank Indonesia and the Financial Services Authority strengthened coordination and cooperation with the Supreme Court of the Republic of Indonesia to increase the judiciary's understanding on supporting law enforcement efforts in the financial services sector.

4



MARET *March*

5. IMF memberikan apresiasi terhadap ketahanan perekonomian Indonesia yang didukung oleh respons bauran kebijakan makroekonomi dan reformasi struktural yang sehat.

IMF acknowledged the resiliency of the Indonesian economy that was supported by a healthy mix of macroeconomic and structural reforms policy responses.

6. Bank Indonesia dan Asian Development Bank menyelenggarakan seminar internasional "*Structural Reforms in Emerging Asia*" untuk membahas terobosan bagi percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Bank Indonesia and Asian Development Bank conducted a joint International Seminar "Structural Reforms in Emerging Asia" to discuss breakthroughs in accelerating sustainable economic growth.

8



9



APRIL April

7. Bank Indonesia menyelenggarakan lokakarya kepada auditor dan penegak hukum mengenai transaksi lindung nilai.

Bank Indonesia conducted a workshop to auditors and law enforcement officers on hedging transaction.

8. Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan menandatangani Nota Kesepahaman untuk memperkuat koordinasi dan kerjasama pengembangan ekonomi dan keuangan daerah.

Bank Indonesia, Ministry of Home Affairs, and Ministry of Finance signed a Memorandum of Understanding to strengthen coordination and cooperation of the economic development and regional finance.

9. Presiden Republik Indonesia meresmikan program ekonomi kerakyatan "Sinergi Hulu Hilir Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital" yang terwujud atas kerjasama Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Negara dan Kementerian terkait, serta BUMN dan swasta.

President of the Republic of Indonesia launched a social economic program called "Digitally Based

Synergy on the Upstream and Downstream of People's Economy" in cooperation with Bank Indonesia, Coordinating Minister of Economy, Financial Services Authority, related ministries, State Owned Enterprises as well as private corporations.

10. Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka pengembangan dan pendalaman pasar keuangan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Bank Indonesia, Ministry of Finance and Financial Services Authority signed a Memorandum of Understanding to develop and deepen the financial market to support the financing of national development.

11



MEI May

13



JUNI Juni

11. Bank Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta 4 (empat) Kementerian dalam koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain melalui elektronifikasi penyaluran bantuan.

Bank Indonesia signed a Memorandum of Understanding with the Coordinating Minister for Human Development and Culture. The cooperation aims to increase the welfare of the people, through electronification of subsidy channeling, amongst others.

12. Bank Indonesia menginisiasi peluncuran Standar Internasional Pengelolaan Zakat dalam *World Humanitarian Summit of United Nations* di Istanbul,

Turki guna meningkatkan potensi sektor zakat dalam penyelesaian masalah ketimpangan ekonomi.

Bank Indonesia initiated the launching of International Standard of Zakat Management (Zakat Core Principles) in World Humanitarian Summit of the United Nations in Istanbul, Turkey. The aim of the program is to increase the potential of zakat in solving economic imbalances.

13. Bank Indonesia berkomitmen untuk memberikan kontribusi dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dalam kegiatan *Global Forum Islamic Finance*.

Bank Indonesia committed to provide contribution in developing the sharia economic and finance in Indonesia at the Islamic Finance Global Forum.

14. Bank Indonesia senantiasa mendukung pengelolaan ekonomi daerah melalui koordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Perdagangan dan Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Walikota Makassar.

Bank Indonesia constantly supports regional economy management through coordination with Ministry of The National Development Planning Agency, Ministry of Communication and Informatics, Ministry of Trade, and Regional Government represented by Governor of Jakarta Province and Mayor of Makassar City.

15



16



JULI July

15. Bank Indonesia memberikan penghargaan Bank Pendukung UMKM 2016 sebagai bentuk apresiasi kepada pihak-pihak yang telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mendukung pengembangan UMKM.

Bank Indonesia awarded MSME Supporting Bank 2016 as an appreciation to the banks that had shown high commitment in supporting MSME development.

16. Bank Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan *Festival Smart Money Smart City* untuk mendukung Gerakan Nasional Non-tunai (GNNT).

Bank Indonesia in cooperation with the Jakarta Provincial Government conducted Smart Money Smart City Festival to support The National Non-cash Movement.

17. Bank Indonesia dan Bundesbank sepakat meningkatkan kerjasama bilateral dalam pengembangan kapasitas SDM kedua bank sentral.

Bank Indonesia and Bundesbank had agreed to increase bilateral cooperation in developing the human resources capacity of both central banks.

18. Pertemuan Gubernur Bank Sentral *Executives' Meeting of East Asia-Pacific Central Banks* (EMEAP) menyepakati perlunya peningkatan kerjasama regional untuk menentukan arah perekonomian di tengah ketidakpastian global.

Central Bank Governors Meetings on the Executives' Meeting of East Asia-Pacific Central Banks agreed upon the needs to increase regional cooperation to determine the direction of the economy in the midst of global uncertainty.

19. Bank Indonesia kembali meraih sertifikasi ISO 15489 di bidang Kearsipan.

Bank Indonesia achieved ISO 15489 certification in Archiving

20



22



AGUSTUS August

20. Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan menandatangani Nota Kesepahaman untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan tugas masing-masing lembaga, khususnya dalam pencegahan dan penanganan krisis keuangan.

Bank Indonesia and Indonesia Deposit Insurance Corporation signed a Memorandum of Understanding to improve coordination and synergy in the implementation of tasks of each institutions, especially in prevention and treatment of financial crisis.

21. Bank Indonesia mulai menerapkan BI 7-day reverse repo rate sebagai suku bunga kebijakan guna meningkatkan hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, bersifat transaksional, dan mendorong pendalaman pasar keuangan

Bank Indonesia started to implement BI 7-day reverse repo rate as a policy rate to enhance stronger relationship to money market rates, is transactional, and foster financial market deepening.

22. Sebagai wujud nyata dalam mendukung pengembangan UMKM kreatif, sekaligus penciptaan aktivitas ekonomi baru di daerah, dan pelestarian citra budaya bangsa, Bank Indonesia menyelenggarakan pameran "Karya Kreatif Indonesia" yang diikuti oleh UMKM binaan Bank Indonesia.

As a concrete endeavor in supporting the development of creative MSMEs as well as the creation of new economic activities in the region and maintaining nation's cultural image, Bank Indonesia held an exhibition of "Indonesian Creative Works" in which the participants are Bank Indonesia-led MSMEs.

23. Bank Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman dengan BNN untuk mendukung upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba serta prekursor narkoba di Indonesia.

Bank Indonesia signed a Memorandum of Understanding with National Narcotics Agency to support the prevention, eradication, and distribution of narcotics and narcotics precursor in Indonesia.

24



26



SEPTEMBER *September*

24. Bank Indonesia menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) VII di Jakarta dengan tema "Memperkuat Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah guna Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Pembenahan Tata Niaga Pangan".

Bank Indonesia organized the 7th National Coordination Meeting of Regional Inflation Control Team in Jakarta. The theme was "Strengthening the Synchronization of the Central and Regional Policies to Accelerate Infrastructure Development and Revamping the Food Trade System".

25. Bank Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk membahas sinergi pembangunan infrastruktur maritim yang mencakup beberapa sektor terkait seperti perkapalan,

perikanan, pariwisata, pelayaran dan sumber daya manusia maritim serta kelembagaannya.

Bank Indonesia coordinated with the Central and Regional Government to discuss the synergy of maritime infrastructure development such as shipping, fishing, tourism, sailing and maritime resources.

26. Bank Indonesia meresmikan Bank Indonesia Institute (BI Institute) sebagai lembaga studi dan riset ekonomi bertaraf internasional untuk meningkatkan kualitas dan keandalan sumber daya manusia di Indonesia dalam bidang ekonomi.

Bank Indonesia launched Bank Indonesia Institute as an international institutions of economic research and studies in order to enhance the quality and reliability of human resource in Indonesia.

27. Bank Indonesia meluncurkan inisiatif baru sistem pembayaran: *National Payment Gateway (NPG)*, Standar Nasional Kartu ATM/Debit, Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, *Financial Technology*, dan Bantuan Sosial: *Government to Person*.

Bank Indonesia launched new payment system initiatives: National Payment Gateway, National Standard of Indonesian Chip Card Specification, Payment Transaction Processing, Financial Technology, and Social Assistance: Government to Person.

28



29



OKTOBER *October*

NOVEMBER *November*

28. Ratu Maxima dari Belanda melakukan kunjungan kerja ke Bank Indonesia guna bertukar pandangan mengenai perkembangan program keuangan inklusif baik secara global maupun di Indonesia. Ratu Maxima menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan program keuangan inklusif yang telah meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat berpendapatan rendah.

The Queen Maxima of the Netherlands visited Bank Indonesia to exchange point of view concerning the development of inclusive financial program both in global and domestic. The Queen expressed her appreciation for the development of the inclusive financial program which has improved financial access for the low-income communities.

29. Bank Indonesia melaksanakan *The 3rd Indonesia Shari'a Economic Festival (ISEF)* di Surabaya dengan tema "*Leading Roles in The Development of Islamic Economics and Finance to Achieve Prosperity of The Nation*".

Bank Indonesia hosted the 3rd Indonesia Sharia Economic Festival in Surabaya, "Leading Roles in The Development of Islamic Economics and Finance to Achieve Prosperity of The Nation".

30. Bank Indonesia masuk dalam 20 terbaik dunia di kompetisi *Contact Center World 2016*.

Bank Indonesia voted as the top 20 world best in Contact Center World competition 2016.

31. Bank Indonesia meresmikan *Bank Indonesia Fintech Office* sebagai wadah asesmen, mitigasi risiko, dan evaluasi atas model bisnis dan produk/layanan dari Fintech, serta inisiator riset terkait kegiatan layanan keuangan berbasis teknologi.

Bank Indonesia launched Bank Indonesia - Financial Technology (FinTech) Office as a laboratory for conducting assessment, risk mitigation, and evaluating business model of FinTech, as well as a research initiator for technology based financial services.

33



34



DESEMBER *December*

32. Bank Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman dengan masing-masing Bank Negara Malaysia dan Bank of Thailand untuk mendorong penyelesaian perdagangan bilateral dan investasi langsung dalam mata uang lokal (*local currency settlement*).

Bank Indonesia signed a Memorandum of Understanding with Bank Negara Malaysia and Bank of Thailand to support bilateral trade and foreign direct investment in local currency settlement.

33. Dalam rangka mendukung rencana implementasi *National Payment Gateway* (NPG) yang disusun oleh Bank Indonesia, Bank Indonesia memfasilitasi penandatanganan Nota Kesepahaman antara 4 bank yang bertindak sebagai *acquirer* dan 3 *principal* nasional yang bertindak sebagai *switching*.

In supporting the implementation plan of National Payment Gateway, Bank Indonesia facilitated the signing of Memorandum of Understanding between 4 banks acting as acquirer and 3 national principals acting as switching.

34. Presiden Republik Indonesia meresmikan peluncuran 11 pecahan uang Rupiah Tahun Emisi (TE) 2016.

The President of Republic Indonesia officially launched 11 denomination of Rupiah currency of 2016 Emission Year.

35. Bank Indonesia dan Bank of Japan menandatangani perpanjangan kerjasama *Bilateral Swap Arrangement* (BSA) guna mendukung kebutuhan likuiditas potensial dan aktual melalui penyediaan skema pencegahan dan penanganan krisis.

Bank Indonesia and Bank of Japan signed the renewal of Bilateral Swap Arrangement in

order to support the needs of actual and potential liquidity through crisis prevention and resolution scheme.

36. Bank Indonesia masuk ke dalam peringkat 4 besar Keterbukaan Informasi Badan Publik untuk Kategori Lembaran Negara

Bank Indonesia achieved the best 4 on Disclosure Information of Public Institution on State Gazette Category

37. Bank Indonesia meraih penghargaan Laporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang dinilai mendukung aktif pemberantasan korupsi

Bank Indonesia received an award of State Officials Wealth Report from Indonesian Corruption Eradication Commission (KPK) as an institution that is actively supporting corruption eradication.

SEKILAS PERJALANAN BANK INDONESIA

A Glimpse of Bank Indonesia's Journey

1828

Sejarah Bank Indonesia dimulai dari pendirian De Javasche Bank N.V. oleh Pemerintah Hindia Belanda pada 1828. De Javasche Bank berfungsi sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang.

The history of Bank Indonesia began with the establishment of De Javasche Bank N.V. by the Government of the Dutch East Indies in 1828. De Javasche Bank functioned as a circulation bank with the duty of printing and circulating money.

1953

Setelah Indonesia merdeka, dilakukan proses nasionalisasi terhadap De Javasche Bank. Pada 15 Desember 1951, diumumkan Undang Undang tentang nasionalisasi De Javasche Bank. Selanjutnya, pada 29 Mei 1953, Presiden mengesahkan Undang Undang Pokok Bank Indonesia dan sejak 1 Juli 1953, bangsa Indonesia memiliki sebuah bank sentral dengan nama Bank Indonesia. Undang Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan tugas Bank Indonesia yakni menjaga stabilitas Rupiah, menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia, memajukan perkembangan urusan kredit dan bank, serta melakukan pengawasan pada urusan kredit.

De Javasche bank was nationalized after De Javasche bank was nationalized after Indonesia's Independence. An Act concerning the Nationalization of De Javasche Bank was issued on December 15th of 1951. Subsequently, on May 29th of 1953, the President ratified the Act of Bank Indonesia, and since July 1st of 1953, the nation has a central bank, named Bank Indonesia. Act No 11 of 1953 on Establishing the Act of Bank Indonesia specified the duties such as maintaining currency stability, conducting money circulation in Indonesia, developing credit and banks, as well as supervising credit affairs.

1968

Tahun 1968 dilakukan amandemen melalui penerbitan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Dalam Undang Undang tersebut, selain melaksanakan tiga tugas pokok, Bank Indonesia bertugas membantu pemerintah sebagai agen pembangunan dengan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank Indonesia juga memiliki fungsi yang lain yakni sebagai pemegang kas pemerintah, menyelenggarakan pemindahan uang untuk pemerintah, dan berkewajiban membantu pemerintah dalam menempatkan surat-surat utang negara.

The Bank Indonesia Act was amended in 1968. Through Act No. 13 of 1968 on the Central Bank, the status and duties of Bank Indonesia as a central bank were separated from commercial banks. Accordingly, in addition to the three basic tasks, Bank Indonesia also assisted the government as an agent of development to foster smooth production and development along with expanding employment opportunities to ameliorate national living standards. Bank Indonesia also carried the distinction as the government cash administrator, disbursing government transfers and assisting the government in the placement of government securities.

2008

Terjadinya krisis ekonomi global mendorong pemerintah untuk mengambil berbagai langkah kebijakan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Penerbitan Perpu tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global melalui perluasan akses pendanaan bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek.

The global economic crisis compelled the government to implement various policy measures to preserve public confidence in the banking industry. One such measure was to issue Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2008 on the Second Amendment of Act No. 23 of 1999 on Bank Indonesia. The new regulation aimed to enhance national bank resilience to the global crisis by broadening access to funds for banks experiencing short-term liquidity mismatch.

2009

Perpu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ditetapkan sebagai Undang Undang melalui penerbitan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2009.

Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2008, as the second amendment of Act No. 23 of 1999 of Bank Indonesia was regulated as an act through the issuance of Act No. 6 of 2009.

2011

Undang Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dengan disahkannya Undang Undang tersebut, sejak 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.

The House of Representatives of the Republic of Indonesia formally enacted the Financial Services Authority (OJK) Act. Consequently, as of December 31st of 2013, the regulation and supervision of financial services activity in the banking sector was handed over from Bank Indonesia to the OJK.

1999

Tahun 1999 merupakan babak baru dalam sejarah Bank Indonesia. Undang Undang Bank Indonesia kembali diamandemen dengan lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam Undang Undang tersebut, ditegaskan kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di luar pemerintah. Selain itu, ditetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah.

The year of 1999 was the start of a new chapter in the history of Bank Indonesia. The Bank Indonesia Act was amended by Act No. 23 of 1999, which emphasized Bank Indonesia's status as an independent state institution free from government interference in performing its duties and authority. In addition, the single objective of Bank Indonesia, namely to achieve and maintain Rupiah stability, was established.

2002

Keberadaan bank sentral sebagai otoritas moneter yang independen diperkuat melalui amandemen keempat Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Pada Pasal 24D, disebutkan bahwa "Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan Undang Undang".

The presence of an independent central bank as the monetary authority was strengthened through the fourth amendment to the 1945 Constitution. Article 24D states that "the country has a central bank, for which the structure, status, authority, responsibility and independence are regulated by virtue of law".

2004

Kedudukan Bank Indonesia kembali diperkuat melalui amandemen Undang Undang Bank Indonesia. Pada 2004, diterbitkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam Undang Undang yang baru tersebut, dipertegas kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen serta dilakukan penyempurnaan atas pengaturan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk penataan fungsi pengawasan terhadap Bank Indonesia.

The status of Bank Indonesia was strengthened through an amendment to the Bank Indonesia Act. Consequently, Act No. 3 of 2004 concerning on the amendment of Act No. 23 of 1999 on Bank Indonesia was issued. Based on this regulation, Bank Indonesia emphasized its status as an independent central bank and also refined provisions concerning duties and authority, including the supervision of Bank Indonesia.

2013

Terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013, Bank Indonesia mengalihkan tugas pengawasan dan pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan ke OJK. Dengan pengalihan tugas tersebut, Bank Indonesia melaksanakan tugas pengawasan dan pengaturan makroprudensial, sementara OJK melaksanakan tugas pengawasan dan pengaturan mikroprudensial.

On December 31st of December 2013, Bank Indonesia officially handed over the regulation and supervision of financial services activity in the banking sector to the OJK. Consequently, Bank Indonesia was responsible for macroprudential regulation and supervision, while the OJK handled microprudential regulation and supervision.

2014

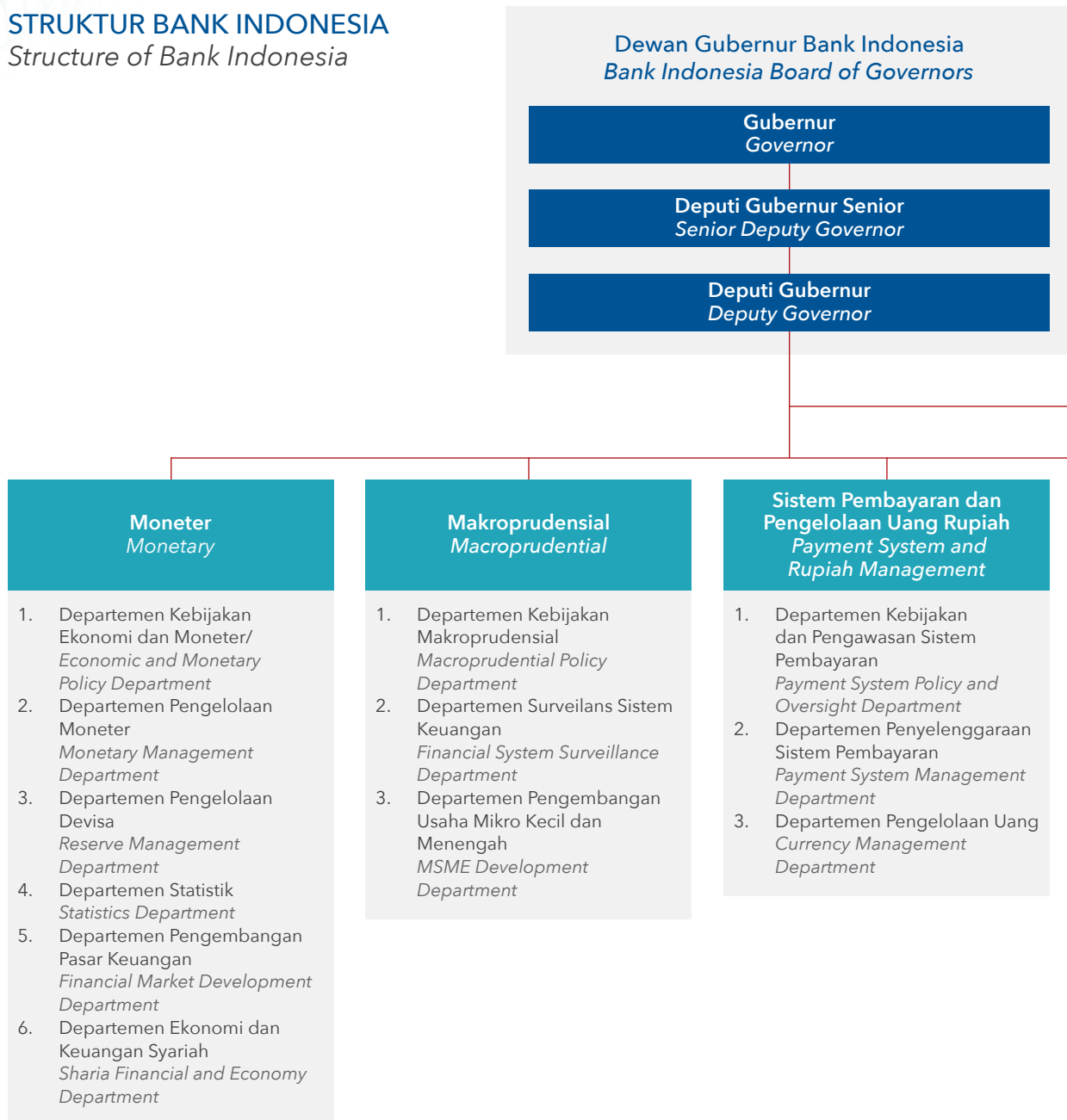
Merupakan tahun awal bagi Bank Indonesia menjalankan peran baru sebagai otoritas makroprudensial. Dengan peran tersebut, Bank Indonesia memperkuat stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran. Kebijakan Makroprudensial oleh Bank Indonesia untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik dan mendorong fungsi intermediasi yang seimbang bagi sektor perekonomian. Kebijakan makroprudensial juga untuk meningkatkan akses dan efisiensi sistem keuangan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendukung stabilitas moneter dan stabilitas sistem pembayaran.

The first year of Bank Indonesia's new duties as the macroprudential authority. In accordance with its new duties, Bank Indonesia strengthened financial system and payment system stability. The macroprudential policy of Bank Indonesia was to prevent and reduce systemic risk as well as to nurture balanced intermediation amongst economic sectors. Macroprudential policy also aims to enhance efficiency and access to the financial system in order to maintain financial system stability as well as support monetary and payment system stability.

ORGANISASI BANK INDONESIA

Organization of Bank Indonesia

STRUKTUR BANK INDONESIA Structure of Bank Indonesia



Keterangan:

*) Komite adalah organ pendukung tata kelola kebijakan Bank Indonesia untuk membantu Dewan Gubernur dalam memutuskan Kebijakan Prinsipil dan Strategis, terdiri atas: a) Komite Kebijakan Moneter; b) Komite Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan; c) Komite Kebijakan Sistem Pembayaran; d) Komite Pengelolaan Cadangan Devisa; dan e) Komite Sumber Daya Manusia

Remarks:

*) *The Committee is the organ supporting the governance of Bank Indonesia policy to assist the Board of Governors in establishing Principle and Strategic Policies. The Committee comprises a) Monetary Policy Committee; b) Financial System Stability Committee; c) Payment System Policy Committee; d) Reserves Management Committee; and e) Human Resource Committee.*

Komite*)
Committee*)Staf Ahli Dewan Gubernur
Senior Advisors to the Board of GovernorsPendukung Kebijakan
Policy Support

1. Departemen Internasional
International Department
2. Departemen Operasional
Tresuri dan Pinjaman
*Debt and Treasury Operation
Department*
3. Departemen Pengelolaan dan
Kepatuhan Laporan
*Management and Compliance
Reporting Department*
4. Departemen Riset
Kebanksentralan
*Central Banking Research
Department*
5. Departemen Komunikasi
Communications Department
6. Departemen Manajemen Risiko
Risk Management Department

Pendukung Organisasi
Organization Support

1. Departemen Manajemen
Strategis dan Tata Kelola
*Strategic Management and
Governance Department*
2. Departemen Hukum
Legal Affairs Department
3. Departemen Sumber Daya
Manusia
Human Resource Department
4. Departemen Pengelolaan
Sistem Informasi
*Information System
Management Department*
5. Departemen Keuangan
Finance Department
6. Departemen Pengadaan
Strategis
*Strategic Procurement
Department*
7. Departemen Audit Intern
Internal Audit Department
8. Departemen Pengelolaan
Logistik dan Fasilitas
*Logistic and Facilities
Management Department*
9. Institut Bank Indonesia
Bank Indonesia Institute
10. Pusat Program Transformasi
Bank Indonesia
*Bank Indonesia Transformation
Office*

Jaringan Kantor
Representative OfficesDalam Negeri
Domestic

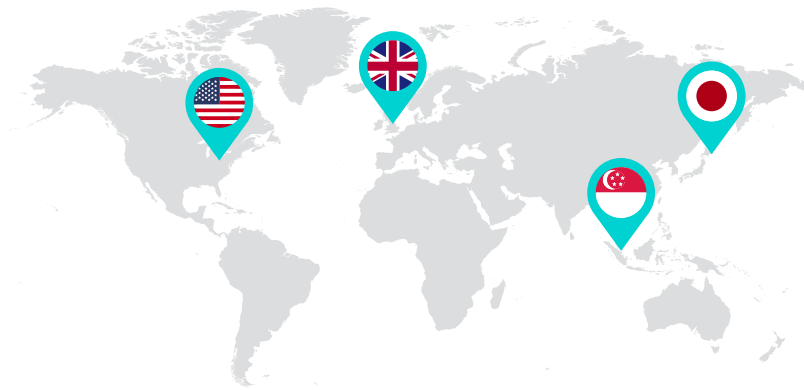
1. Departemen Regional
(berkedudukan di Kantor Pusat)
*Regional Department
(Operating at the Headquarter)*
 - a. Regional I
 - b. Regional II
 - c. Regional III
2. Kantor Perwakilan BI Provinsi
sebanyak 34
*34 Bank Indonesia Provincial
Regional Offices*
3. Kantor Perwakilan BI Kota/
Kabupaten sebanyak 12
*12 Bank Indonesia City/
Regency Regional Offices*

Luar Negeri
Overseas

1. Kantor Perwakilan BI New York
*Bank Indonesia Representative
- New York*
2. Kantor Perwakilan BI London
*Bank Indonesia Representative
- London*
3. Kantor Perwakilan BI Tokyo
*Bank Indonesia Representative
-Tokyo*
4. Kantor Perwakilan BI Singapura
*Bank Indonesia Representative
Singapore*

PETA WILAYAH KERJA Working Area Map





REGIONAL III

Kantor Perwakilan Luar Negeri
Representative Office of Bank Indonesia

- London
- New York
- Singapura / Singapore
- Tokyo



REGIONAL III : Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, Nusa Tenggara
Kantor Perwakilan Bank Indonesia/Regional Office of Bank Indonesia

- Provinsi Kalimantan Barat / West Kalimantan Province
- Provinsi Kalimantan Tengah / Central Kalimantan Province
- Provinsi Kalimantan Selatan / South Kalimantan Province
- Provinsi Kalimantan Timur / East Kalimantan Province
- Balikpapan
- Provinsi Sulawesi Utara / North Sulawesi Province
- Provinsi Gorontalo / Gorontalo Province
- Provinsi Sulawesi Tengah / Central Sulawesi Province
- Provinsi Sulawesi Barat / West Sulawesi Province
- Provinsi Sulawesi Selatan / South Sulawesi Province
- Provinsi Sulawesi Tenggara / Southeast Sulawesi
- Provinsi Maluku / Maluku Province
- Provinsi Maluku Utara / North Maluku Province
- Provinsi Papua / Papua Province
- Provinsi Papua Barat / West Papua Province
- Provinsi Bali / Bali Province
- Provinsi Nusa Tenggara Barat / West Nusa Tenggara Province
- Provinsi Nusa Tenggara Timur / East Nusa Tenggara Province



Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Barat
Regional Office of Bank Indonesia, West Java Province

PELAKSANAAN TUGAS BANK INDONESIA

2016 Bank Indonesia Task Implementation

“
BERANI BERBUAT
BAGI NEGERI
JANGAN PERNAH TAKUT
MELANGKAH MAJU.

*Have the Courage to Take a Step
Forward for Your Country.*”

PERRY WARJIYO

Deputi Gubernur
Deputy Governor



PEREKONOMIAN GLOBAL DAN DOMESTIK SERTA PROSPEK KE DEPAN

Global and Domestic Economy and Future Prospect

BREXIT

Dalam referendum 23 Juni 2016, United Kingdom (UK) memutuskan untuk keluar dari keanggotaan European Union (EU) yang lazim disebut dengan Brexit. Langkah ini kemudian memicu ketidakpastian di pasar keuangan global. Namun, volatilitas pasar tersebut bersifat temporer karena dampak Brexit ke perekonomian diperkirakan baru akan terjadi pada 2017, saat prosedur formal untuk keluar dari EU dibahas.

BREXIT

In a referendum of June 23rd, 2016, the United Kingdom (UK) decided to leave the European Union (EU) commonly referred to as Brexit. This move then triggered uncertainty in global financial markets. However, market volatility was temporary, with the impact of Brexit to UK's economy expected to occur in 2017, when formal procedures for leaving the EU are discussed.

Pada 2016, kinerja perekonomian Indonesia tetap memperlihatkan daya tahannya di tengah kondisi ekonomi global yang masih lesu. Respons kebijakan yang memadai mampu menjaga tingkat permintaan domestik agar memitigasi berbagai risiko dari perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik, didukung oleh rendahnya inflasi, turunnya defisit transaksi berjalan, dan terkendalinya nilai tukar Rupiah. Akibatnya, stabilitas sistem keuangan terjaga dengan rendahnya risiko likuiditas pada sektor perbankan. Ke depan, prospek pemulihan ekonomi diperkirakan berlanjut, meskipun beberapa risiko global dan domestik tetap perlu perhatian.

EKONOMI GLOBAL

Perekonomian global pada 2016 masih menghadapi tiga permasalahan yang serupa dengan tahun sebelumnya. Tiga permasalahan ini saling terkait dan akhirnya memperlambat pemulihan ekonomi global. Ditambah lagi, permasalahan ekonomi dunia semakin kompleks akibat meningkatnya ketidakpastian geopolitik, termasuk hasil referendum Brexit di Eropa dan Pemilu Amerika Serikat (AS) yang jauh berbeda dengan ekspektasi pelaku pasar.

In 2016, Indonesia's economy has shown its ability to maintain growth and stability notwithstanding the relatively sluggish growth of the global economy. Adequate policy responses were able to mitigate global risks and keep domestic demand stable. Indonesia's economic growth improved, supported by low inflation, declining current account deficit, and a stable Rupiah exchange rate. As a result, financial system stability was maintained and the banking sector's liquidity kept at a manageable level. Going forward, economic recovery prospects look favorable, although certain global and domestic risks still needs attention.

GLOBAL ECONOMY

The global economy during 2016, still faced the same three problems as a year ago. These are interrelated, which ultimately slows down global economic recovery. In addition, world economic problems are becoming increasingly complex, due to rising geopolitical uncertainty. These, among others, include Brexit in Europe and the United States (US) presidential elections, that turned out very different from market participants' expectations.

Permasalahan pertama adalah masih lemah dan tidak meratanya pertumbuhan ekonomi dunia. Hingga 2016, konsolidasi ekonomi dunia ternyata masih berlanjut. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dunia pada 2016 tetap lemah yakni 3,1% atau lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian 2015 sebesar 3,2%. Pada triwulan IV 2016, pertumbuhan ekonomi dunia memang meningkat, namun kemajuan tersebut belum mampu mengangkat kinerja ekonomi dunia untuk keseluruhan tahun 2016.

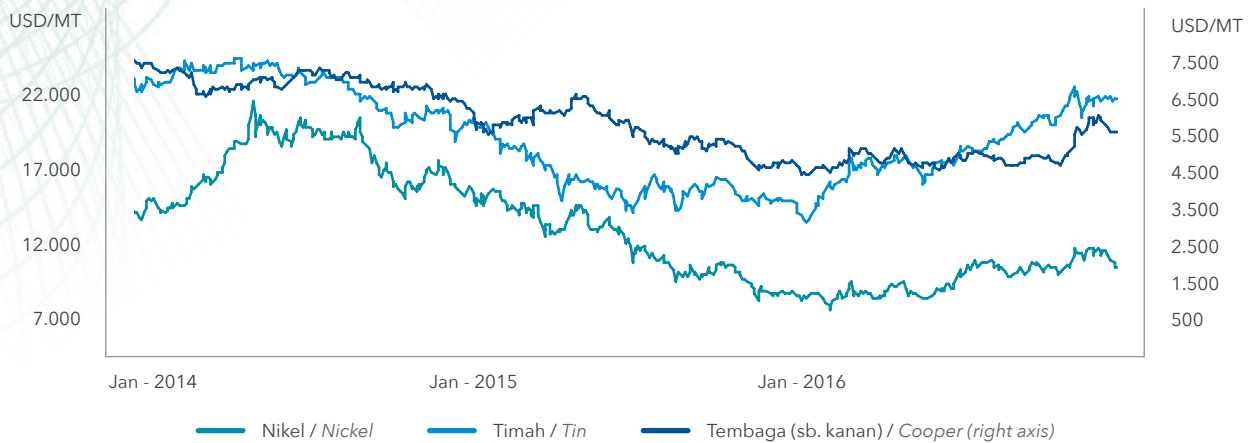
Dengan demikian, banyak negara memutuskan untuk mengalihkan strategi pertumbuhan ekonomi mereka ke pasar domestik masing-masing. Strategi tersebut akhirnya membuat volume perdagangan dunia melemah. Pada 2016, pertumbuhan volume perdagangan dunia tercatat hanya sebesar 1%, turun dari 2% pada tahun sebelumnya. Hal ini yang menurunkan kinerja ekspor banyak negara.

Permasalahan kedua di perekonomian global adalah masih rendahnya harga komoditas dunia, setidaknya sampai dengan triwulan III 2016. Harga komoditas baik energi maupun non-energi masih rendah dipengaruhi oleh permintaan yang lemah dan pasokan yang besar. Dari komoditas energi, harga minyak dunia masih belum kuat, meskipun telah melewati level terendah pada Januari 2016. Dari komoditas non-energi, berbagai harga komoditas juga tetap rendah, termasuk harga komoditas ekspor andalan Indonesia seperti batubara, kelapa sawit, dan tembaga. Harga komposit komoditas utama ekspor nonmigas Indonesia tercatat rendah sepanjang semester I 2016 dan baru meningkat pada triwulan IV 2016.

The first problem is the weak and uneven growth of the world economy. Until 2016, the consolidation of the world economy still continued. As a result, global economic growth that year remained weak at 3.1% or lower compared to the 3.2% achieved in 2015. World economic growth in the fourth quarter of 2016 did improve, but not enough to lift the world's economic performance for the whole year.

This weak global economy eventually led many countries to shift their growth strategy towards their respective domestic markets. As a result, world trade volume weakened. In 2016, world trade volume grew only 1%, down from 2% the previous year. Ultimately, the export performance of many countries declined.

The second problem is the still weak commodity prices, at least up to the third quarter of 2016. Both energy and non-energy commodity prices remained low, due to weak demand and plentiful supply. From energy commodities, oil prices remained weak, despite having passed its lowest level in January 2016. While various non-energy commodity prices also remained subdued, including the price of Indonesia's major export commodities, such as coal, palm oil and copper. The composite price of Indonesia's major non-oil and gas commodity exports was low during the first half of 2016 and only increased in the fourth quarter of 2016.



Grafik 1. Harga Komoditas
Graph. 1. Commodity Prices

Permasalahan ketiga adalah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, seperti tercermin pada *Volatility Index* (VIX) yang naik, terutama pada triwulan I 2016 dan triwulan IV 2016. Ketidakpastian di pasar keuangan global meningkat seiring rencana kenaikan *Fed Funds Rate* (FFR) oleh bank sentral AS. Kondisi tersebut mengubah pola aliran modal di pasar keuangan global yang kemudian memicu penguatan dolar AS dan sebaliknya melemahkan mata uang banyak negara, termasuk Rupiah. Perkembangan itu tergambar dari rata-rata indeks USD (DXY Index) yang meningkat pada triwulan I 2016 dan triwulan IV 2016.

Dengan lambatnya pemulihan ekonomi dunia dan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan, terjadi transisi politik di beberapa negara utama dunia. Pada akhir semester I 2016, hasil referendum Inggris yang memutuskan keluar dari Uni Eropa (Brexit), sempat memicu ketidakpastian karena berbeda dengan ekspektasi pelaku pasar. Ketidakpastian juga naik saat menyikapi hasil pemilihan Presiden AS yang juga di luar perkiraan pelaku pasar. Rencana kebijakan Presiden AS yang baru, dikhawatirkan akan mengganggu proses pemulihan ekonomi global. Rencana kebijakan tersebut antara lain adalah kebijakan pembelanjaan negara yang lebih ekspansif di tengah beban besar utang pemerintah AS, kebijakan perdagangan internasional yang lebih tertutup, dan beberapa kebijakan pengetatan di bidang imigrasi.

Merespon dinamika perekonomian dunia pada tahun 2016, kebijakan makroekonomi di banyak negara cenderung ekspansif dan didukung oleh

The third issue is the persistently high uncertainty in the global financial markets, as reflected in the rising Volatility Index (VIX), particularly in Q1 2016 and Q4 2016. Uncertainty in global financial markets increased with the rise in the US Fed Fund rate. This changed the pattern of capital flows in global financial markets, which strengthened the US dollar and conversely weakened other currencies, including the Rupiah. This trend is reflected in the average index of USD (DXY Index) which increased in the first and fourth quarter of 2016.

The slow world economic recovery keeps uncertainty in the world's financial markets high. At the same time, there is a political shift occurring in some of the world's major countries. At the end of the first semester of 2016, the results of the British referendum that breaks away from the European Union (Brexit), triggered uncertainty as it differed from market participants' expectations. Uncertainty also rose with the results of the US presidential election that also diverged from market expectations. The fear was that the policies of the new US president would disrupt the global recovery trend. These include more expansive government spending amid the huge burden of US government debt, more closed international trade policies, and tighter immigration policies.

Macroeconomic policies of many countries tend to focus on larger government spending supported by structural policies. Monetary policy of developed

kebijakan struktural. Kebijakan moneter negara maju, kecuali AS, masih longgar melalui kebijakan moneter nonkonvensional sedangkan stimulus melalui pembelanjaan negara terbatas. Di sisi lain, kebijakan moneter di AS tetap diarahkan untuk melanjutkan proses normalisasi kebijakan yang sudah ditempuh sejak 2014. Sementara itu, kelompok negara berkembang melakukan peningkatan belanja negara, memanfaatkan ruang pelonggaran kebijakan moneter, dan terus menjalankan reformasi struktural.

EKONOMI INDONESIA

Perekonomian global yang belum pulih memberi tantangan bagi perekonomian Indonesia karena dapat mengganggu proses pemulihan ekonomi. Risiko ini, bila terus berlanjut, tidak hanya menghambat perbaikan pertumbuhan, namun juga mengganggu stabilitas ekonomi dan sistem keuangan. Hubungan keduanya saling timbal balik dan berpotensi membentuk lingkaran yang buruk (*vicious circle*).

Tantangan bagi perekonomian Indonesia timbul dari risiko pertumbuhan ekonomi yang dapat kembali melemah akibat prospek ekspor yang menurun. Ini mengingatkan pertumbuhan ekonomi dunia masih lemah, sehingga permintaan terhadap produk ekspor Indonesia juga lemah. Ekspor semakin rentan karena harga komoditas juga belum pulih dan dapat menekan *terms of trade* Indonesia.

Risiko dari prospek ekspor yang menurun perlu mendapat perhatian karena dapat memengaruhi kinerja korporasi, khususnya yang memiliki pendapatan ekspor yang signifikan. Kerentanan korporasi juga bertambah, jika permintaan domestik turut melemah. Kinerja korporasi yang berisiko turun, pada akhirnya dapat berpengaruh kepada kinerja sektor keuangan, termasuk industri perbankan. Risiko kredit akan meningkat seiring berkurangnya kemampuan korporasi untuk memenuhi kewajibannya kepada perbankan.

Kinerja perbankan yang berisiko turun dapat mengganggu efektivitas transmisi kebijakan moneter, baik melalui jalur suku bunga maupun jalur kredit. Suku bunga kredit akan menjadi kurang responsif terhadap perubahan suku bunga kebijakan bank sentral jika saat bersamaan risiko kredit meningkat.

countries, excluding the US, remained loose using non-conventional methods, while government spending stimulus was limited. Further, US monetary policy was moving towards normalization of its policies pursued since 2014. Meanwhile, developing countries are expanding state spending, taking advantage of some space to ease monetary policy, and continue carrying out structural reforms.

INDONESIAN ECONOMY

The weak global economy poses challenges for the Indonesian economy, as it could hinder the country's economic recovery trend. This risk, if continues, not only slows economic growth, but also disrupts the stability of the economy and the financial system. This relationship is reciprocal and potentially could create a vicious circle.

The challenge arises from the risk of a weak economy due to declining exports. With the weak global economy, demand for Indonesian exports also remains weak. Exports are increasingly vulnerable as commodity prices have yet to recover and can suppress Indonesia's terms of trade.

The risk from declining exports need attention because they can affect corporate performance, especially those with significant export earnings. Corporate vulnerability also increases, if domestic demand also weakens. The risk from a downturn in corporate performance may ultimately affect the performance of the financial sector, including the banking industry. Credit risk will increase as corporate capacity to meet its bank obligations declines.

The risk from declining banking performance can disrupt the effectiveness of monetary policy transmission, either through the interest rate or credit channels. Credit interest rates will become less responsive to changes in central bank policy rates if, at the same time, credit risks rise. In addition,

Selain itu, risiko kredit yang meningkat juga dapat menghambat minat perbankan dalam menyalurkan kredit. Secara keseluruhan, jalur suku bunga dan jalur kredit yang terganggu pada gilirannya berisiko menurunkan peran perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

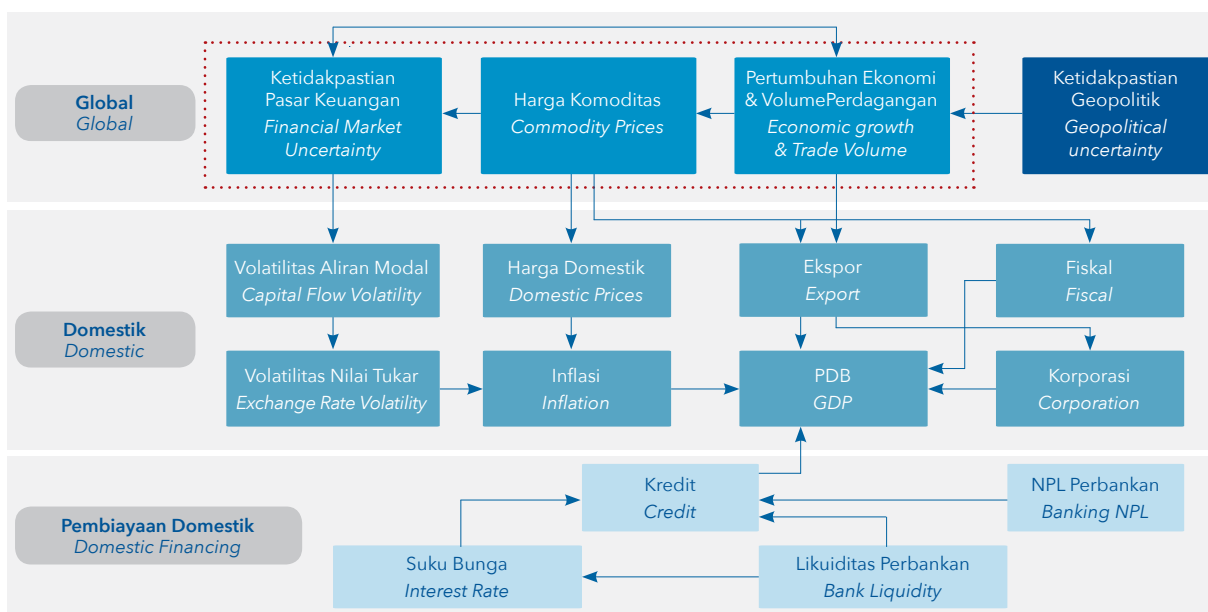
Ruang fiskal untuk mendorong perekonomian juga berisiko menyempit akibat berkurangnya potensi penerimaan pajak. Risiko penurunan pajak tidak hanya sebagai dampak langsung penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak akibat penurunan harga komoditas, tetapi juga dari dampak tidak langsung kepada penurunan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Risiko penurunan pajak secara keseluruhan membatasi kemampuan belanja pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi.

Tantangan perekonomian menjadi semakin kompleks karena dapat merambat mengganggu stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Prospek perekonomian domestik yang dianggap suram oleh investor dapat mengganggu aktivitas penanaman modal di Indonesia, termasuk investasi portofolio. Hal ini bila berlanjut berakibat pada tekanan kepada nilai tukar Rupiah dan stabilitas sistem keuangan. Pelemahan Rupiah pada gilirannya juga memberikan tekanan kepada inflasi.

increased credit risk may also hamper bank lending. Overall, the interest rate and credit channels are disrupted, risking to reduce the role of banks in supporting the economy.

Fiscal space to boost the economy is also at risk of shrinking, due to weak tax revenues. The risk of tax revenue reduction is not only a direct impact of the decline in non-tax state revenues, due to the decline in commodity prices, but also from the indirect impact of a drop in Income Tax and Value Added Tax. The overall risk of tax revenue reduction limits the ability of government spending to support economic recovery.

The economic challenge is becoming increasingly complex as it can disturb macroeconomic and financial system stability. The prospect of a domestic economy that is considered bleak by investors can disrupt investment activity in Indonesia, including portfolio investment. This may lead to pressure on the Rupiah exchange rate and financial system stability. A weak Rupiah, in turn, puts pressure on inflation.



Infografis Jalur transmisi pengaruh ekonomi global terhadap ekonomi domestic
Infographics The transmission path of global economic influence on the domestic economy

Berbagai tantangan perekonomian domestik tersebut perlu direspons dengan segera karena bila terus bergulir dapat saling memengaruhi dan menghambat proses pemulihan ekonomi.

Kebijakan makroekonomi yang ditempuh pada 2016 secara umum diarahkan untuk memitigasi risiko yang dapat mengganggu kesinambungan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Bauran kebijakan juga ditempuh Bank Indonesia dengan mengkombinasikan kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan SP-PUR. Bauran kebijakan tidak hanya diarahkan untuk memitigasi risiko siklikal jangka pendek, tetapi juga untuk memperkuat struktur perekonomian dalam jangka menengah panjang.

Untuk respons siklikal jangka pendek, respons kebijakan ditempuh guna memitigasi risiko penurunan pertumbuhan ekonomi yang bila terus berlanjut rentan kembali memberikan tekanan kepada stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Untuk struktural jangka menengah, respons ditempuh melalui berbagai langkah untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam mengendalikan stabilitas perekonomian. Langkah yang ditempuh Bank Indonesia pada 2016 merupakan bagian dari berbagai langkah transformasi Bank Indonesia yang telah dicanangkan pada 2014.

PROSPEK KE DEPAN

Ke depan, perekonomian Indonesia tetap **menghadapi tantangan**: Di sisi eksternal, tantangan utama bersumber dari tingginya ketidakpastian prospek pertumbuhan ekonomi dan pasar keuangan global, kelangsungan tren naiknya harga komoditas global dan tekanan arus keluar modal asing dari negara berkembang. Di sisi domestik, usaha peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi menghadapi sejumlah tantangan, baik jangka pendek, maupun yang bersifat struktural. Tantangan jangka pendek berupa terbatasnya peran swasta dan transmisi kebijakan moneter yang belum merata. Sedangkan tantangan struktural terkait lemahnya struktur dan daya saing produksi domestik serta struktur pembiayaan jangka panjang yang masih belum dalam dan beragam. Ditambah lagi, infrastruktur fisik yang perlu diperkuat serta iklim berusaha yang perlu diperbaiki.

Challenges to the domestic economy need to be addressed immediately as if it continues, it can impact and hinder the process of economic recovery.

Macroeconomic policies adopted in 2016 have been generally directed at mitigating risks that may disrupt the sustainability of economic growth as well as macroeconomic and financial system stability. A policy mix was also pursued by Bank Indonesia through the combination of monetary, macroprudential and payment system-note circulation policies. This policy mix is not only directed to mitigate short-term cyclical risks, but also to strengthen the economic structure in the medium to long term.

For short-term cyclical responses, policies pursued are designed to mitigate the risk of economic downturns, which if continues, could disrupt macroeconomic and financial system stability. For medium-term structural responses, policies pursued are designed to strengthen the effectiveness of monetary policy transmission in maintaining economic stability. Steps taken by Bank Indonesia in 2016 are part of the its transformation program that were launched in 2014.

FUTURE PROSPECTS

In the future, Indonesia's economy will continue to face a myriad of challenges: Externally, the main challenge arises from the highly uncertain economic and global financial market growth prospects, the rising trend of global commodity prices, and foreign capital outflows from emerging economies. Domestically, efforts to improve the quality of economic growth are facing a number of challenges, both short-term and structural. Short-term challenges include a limited private sector role and an uneven transmission of monetary policies. Meanwhile, structural challenges relate to the weak structure and the competitiveness of domestic production, and the long-term financing structure that is not deep and diverse enough. In addition, the physical infrastructure needs to be strengthened and the general business climate needs to be improved.

Berbagai tantangan perekonomian dan keuangan global serta tantangan domestik tersebut berdampak pada terbatasnya ruang pelonggaran kebijakan ekonomi Indonesia. Untuk itu, bauran kebijakan serta upaya menggali potensi sumber pertumbuhan baru yang didukung dengan fokus kebijakan reformasi struktural diharapkan dapat mendorong dan mengoptimalkan potensi pertumbuhan serta memperkuat daya saing dan daya tahan perekonomian ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas.

Prospek pemulihan di 2017 ditopang membaiknya permintaan domestik dan ekspor: Peningkatan harga komoditas global dan pendapatan ekspor akan menarik investasi, khususnya segmen non-bangunan dan menunjang tumbuhnya konsumsi rumah tangga. Inflasi yang terkendali akan menjaga daya beli masyarakat, sementara percepatan proyek infrastruktur juga akan mendorong investasi bangunan. Prospek pertumbuhan ekonomi 2017 diperkirakan naik ke kisaran 5,0-5,4% (yoy), dengan laju inflasi sesuai sasaran Bank Indonesia sebesar $4 \pm 1\%$ dan diiringi pertumbuhan kredit sebesar 10-12% (yoy). Defisit transaksi berjalan diperkirakan sedikit meningkat, meskipun masih pada level yang aman, yakni di bawah 3% terhadap PDB. Ini karena intensitas proyek infrastruktur dan kegiatan sektor riil yang meningkat.

Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi akan lebih berkelanjutan. Permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga, diperkirakan semakin kuat dalam mendorong perekonomian, didukung besarnya kelas menengah yang sebagian besar berusia produktif. Peningkatan investasi didorong implementasi reformasi struktural, khususnya perbaikan iklim investasi dan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur. Iklim investasi yang membaik dan tersedianya infrastruktur berkualitas akan mendorong peningkatan produktivitas perekonomian. Semua ini akan mendorong kemampuan perekonomian dari sisi pengadaan. Semakin kuatnya permintaan domestik akan membantu menjaga stabilitas harga serta keadaan makroekonomi. Inflasi akan berada dalam sasarnya, sementara defisit transaksi berjalan akan tetap berada pada tingkat yang sehat didukung oleh kondisi ekonomi global yang berangsur membaik. Dalam jangka menengah, stabilitas makroekonomi yang disertai stabilitas sistem keuangan yang terjaga akan mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkelanjutan.

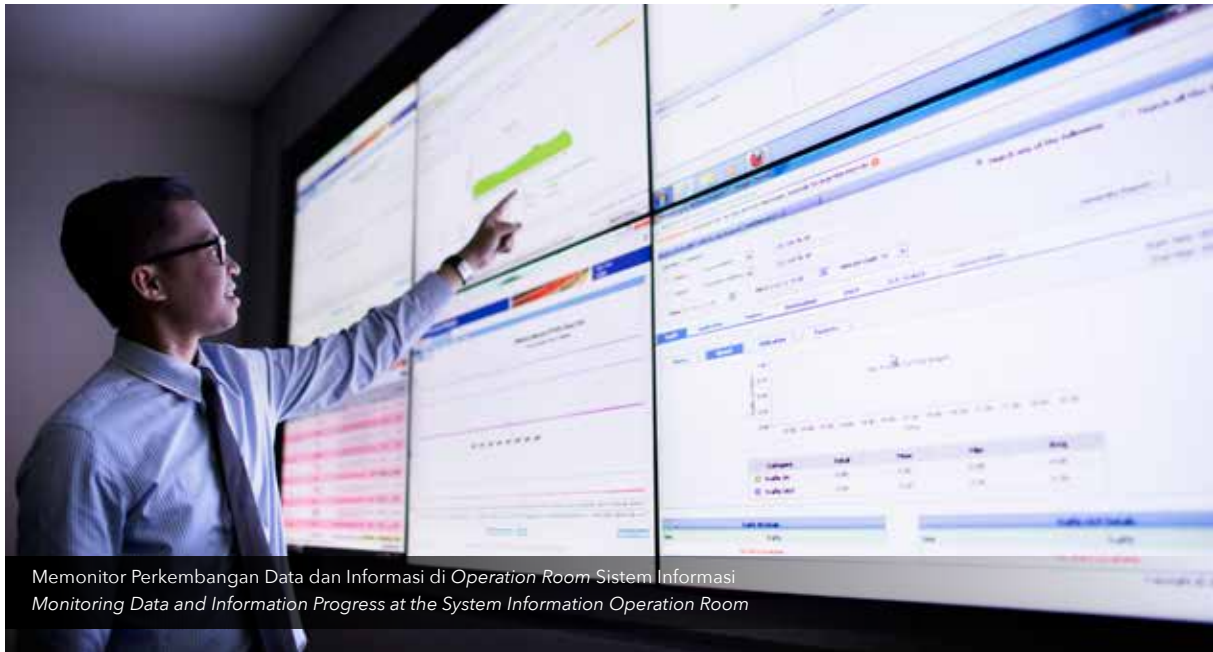
Various global economic and financial challenges as well as domestic challenges limits the room for economic policy easing. To that end, policy mix as well as efforts to explore new potential growth sources, supported by policies that focus on structural reforms, are expected to encourage and optimize growth potential and strengthen the competitiveness and durability of a sustainable and quality economy.

Outlook for recovery in 2017 is supported by improved domestic and export demand: The rise in global commodity prices and export earnings will attract investment, particularly in non-building segments and will support the growth of household consumption. Controlled inflation will keep the public's purchasing power, while the acceleration of infrastructure projects will also encourage building-related investments. Economic growth prospect in 2017 is expected to rise to a target range of 5.0-5.4% (yoy), with BI's inflation rate set at $4\% \pm 1\%$ and credit growth at 10-12% (yoy). The current account deficit is expected to widen slightly, albeit at a safe level, i.e. below 3% of GDP. This will be due to a greater intensity of infrastructure projects and real sector activities.

In the medium term, economic growth will be more sustainable. Domestic demand, particularly household consumption, is expected to play a greater role in boosting the economy, supported by the large majority of the productive middle class. Increased investment is driven by the implementation of structural reforms, in particular improvements in the investment climate and ongoing infrastructure projects. An improved investment climate and availability of quality infrastructure will boost economic productivity. All this will boost the economy's capacity to produce on the supply side. A stronger domestic demand will help maintain price and macroeconomic stability. Inflation will fall within target, while the current account deficit will remain at a healthy level supported by improving global economic conditions. In the medium term, macroeconomic stability accompanied by a stable financial system will result in a more sustainable economic growth.

MENJAGA STABILITAS MONETER DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Maintaining Monetary and Financial System Stability



Memonitor Perkembangan Data dan Informasi di *Operation Room* Sistem Informasi
Monitoring Data and Information Progress at the System Information Operation Room

Menghadapi tantangan ekonomi global yang masih lesu dan ekonomi nasional yang berada di tahap awal pemulihan Bank Indonesia berhasil mengarahkan tingkat inflasi di 2016 sesuai sasaran Bank Indonesia. Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan juga diperkuat dengan disahkannya Undang Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan serta diberlakukannya aturan turunan Undang Undang, yaitu Protokol Manajemen Krisis (PMK) dari Bank Indonesia serta setiap instansi lain yang terkait agar krisis keuangan 1997-1998 tidak terulang kembali. Dengan terciptanya stabilitas makroekonomi, memberi peluang Bank Indonesia untuk melonggarkan kebijakannya di 2016 dan membantu menggerakkan pemulihan ekonomi nasional, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi.

Facing the challenge posed by a sluggish global economy and a national economy still in the early stages of recovery, Bank Indonesia managed to control inflation rate in 2016 in line with its target. The Financial System Stability policies were also strengthened by the enactment of the Financial Crisis Prevention and Crisis Management Act and the enactment of associated bylaws, namely the Crisis Management Protocol from Bank Indonesia and other related institutions to prevent the 1997/98 financial crisis from recurring. With the achievement of macroeconomic stability, Bank Indonesia was able to relax its monetary policy in 2016 to help accelerate economic recovery, while maintaining macroeconomic stability.

STABILITAS MONETER

Kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2016 diarahkan untuk memberikan ruang gerak bagi pemulihan ekonomi di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi, dengan tetap konsisten menjaga stabilitas ekonomi. Arah kebijakan moneter ditempuh setelah mempertimbangkan stabilitas ekonomi yang tetap terjaga sebagai dampak positif konsistensi kebijakan yang ditempuh sebelumnya. Berbagai indikator stabilitas ekonomi menunjukkan perbaikan, seperti inflasi 2016 tercatat rendah dan dalam kisaran sasaran, defisit transaksi berjalan turun dan tetap di level yang sehat, serta nilai tukar Rupiah yang terkendali. Stabilitas makroekonomi yang terjaga pada gilirannya memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk melonggarkan arah kebijakan moneter guna mendukung pemulihan ekonomi.

Kebijakan moneter Bank Indonesia ditempuh melalui bauran kebijakan suku bunga, Giro Wajib Minimum (GWM), dan kebijakan nilai tukar serta penguatan ketahanan sektor eksternal. Seiring dengan ruang untuk melonggarkan kebijakan moneter, Bank Indonesia sepanjang tahun menurunkan suku bunga Rupiah sebesar 150 bps. Pada semester I, Bank Indonesia menurunkan suku bunga kebijakan masing-masing 25 bps pada Januari, Februari, Maret, dan Juni. Ruang pelonggaran kebijakan moneter pada periode tersebut cukup besar mempertimbangkan berbagai aspek stabilitas ekonomi yang tetap terjaga. Pada semester II, Bank Indonesia menurunkan kembali suku bunga kebijakan masing-masing sebesar 25 bps pada September dan Oktober. Arah kebijakan moneter juga diperkuat penurunan rasio GWM Primer Rupiah untuk perbankan pada Februari 2016 sebesar 1,0% menjadi 6,5%. Bank Indonesia menilai penurunan suku bunga kebijakan, pada satu sisi, tetap konsisten dalam mengarahkan inflasi ke depan agar tetap dalam kisaran $4,0 \pm 1\%$ pada 2016-2017 dan $3,5 \pm 1\%$ pada 2018. Di sisi lain, penurunan suku bunga kebijakan juga diharapkan menopang pemulihan ekonomi.

MONETARY STABILITY

Bank Indonesia's monetary policy during the year was aimed at providing sufficient room for economic recovery, amid high global economic uncertainty, while continuing to maintain economic stability. The direction of monetary policy was designed to extend the success of last year's policy in maintaining economic stability. Various stability indicators showed considerable improvement, such as inflation, which recorded one of the lowest level in many years and was within the target range. In addition, the current account deficit shrunk and remained at a healthy level, while the Rupiah exchange rate remained relatively stable throughout the year. Macroeconomic stability, in turn, provided room for Bank Indonesia to loosen its monetary policy to support economic recovery.

Monetary policy was pursued through a mix of interest rate, Statutory Reserves (GWM), and exchange rate policy, while strengthening external sector resilience. In line with room to loosen monetary policy, Bank Indonesia, through out the year, lowered its policy rate by 150 bps. In the first half, Bank Indonesia lowered its policy rate by 25 bps each in January, February, March and June. The space to ease monetary policy was sufficient, considering the maintenance of economic stability, during that period. In the second half, Bank Indonesia further lowered its policy rate by 25 bps each in September and October. This was reinforced by a drop in the banking sector's Primary Rupiah Primary GWM ratio by 1.0% to 6.5%, in February. On one hand, the policy rate decline remains consistent in managing inflation within the $4.0 \pm 1\%$ range for 2016-2017 and $3.5 \pm 1\%$ for 2018 and, on the other hand, it is also expected to sustain economic recovery.

Sementara itu, kebijakan nilai tukar diarahkan agar nilai tukar bergerak sesuai dengan nilai fundamental sehingga dapat mendukung ketahanan sektor eksternal sekaligus memperkuat pencapaian sasaran akhir kebijakan, yakni inflasi. Bank Indonesia melakukan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar volatilitas Rupiah tidak terjadi secara berlebihan karena berisiko kembali memberikan tekanan kepada nilai tukar dan inflasi. Kebijakan nilai tukar Rupiah juga ditopang upaya memperkuat pengelolaan permintaan dan penawaran valas, termasuk mengimplementasikan ketentuan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian terhadap utang luar negeri yang dimiliki dan memperkuat implementasi ketentuan kewajiban penggunaan uang Rupiah di wilayah Indonesia. Selain itu, strategi untuk meningkatkan ketahanan sektor eksternal guna mendukung kebijakan nilai tukar Rupiah terus dilakukan melalui upaya menjaga kecukupan cadangan devisa baik dari sisi *first line of defense* maupun sisi *second line of defense*.

Arah kebijakan moneter didukung langkah reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter yang diimplementasikan sejak 19 Agustus 2016. Reformulasi tersebut ditempuh dengan mengubah suku bunga kebijakan dari *BI Rate* menjadi *BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR)*. Strategi operasi moneter juga diperkuat dengan koridor suku bunga PUAB simetris dan lebih sempit, yaitu batas bawah koridor (*Deposit Facility Rate*) dan batas atas koridor (*Lending Facility Rate*) berada masing-masing 75 bps di bawah dan di atas BI7DRR. Reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter memiliki tiga tujuan utama, yaitu memperkuat sinyal kebijakan moneter, memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, dan mendorong pendalaman pasar keuangan.

Kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia secara umum berkontribusi positif kepada tetap terjaganya stabilitas makroekonomi dan membaiknya pertumbuhan ekonomi pada 2016. Inflasi 2016 tercatat sebesar 3,02%, atau dalam kisaran sasarannya. Defisit transaksi berjalan juga terjaga dalam level yang sehat, yaitu 1,8% dari PDB, sehingga menopang ketahanan sektor eksternal.

Meanwhile, the exchange rate policy is directed to manage the Rupiah exchange rate in line with its fundamental value to support the resilience of the external sector, while achieving the ultimate policy goal, of controlling inflation. Bank Indonesia has stabilized the Rupiah exchange rate so that Rupiah volatility is minimized as it risks putting pressure on the exchange rate as well as inflation. The Rupiah exchange rate policy is also supported by efforts to strengthen the management of the foreign currency's demand and supply, which includes implementing the Prudential Prudence Application for foreign debt and the obligation to use the Rupiah currency in the country's territory. In addition, strategies to strengthen external sector resilience and support the Rupiah exchange rate policy continues by maintaining adequate foreign exchange reserves both from the first and second line of defense.

Since August 19, 2017, the reformulation of Bank Indonesia's monetary policy operational framework was launched. This was done to better support the Bank's monetary policy. The reform comprises of changing the policy rate from the previous BI Rate to a new BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR). This operation strategy is also reinforced by making the inter-bank interest rate corridor narrower and more symmetric. The lower limit of the corridor (Deposit Facility Rate) and the Lending Facility Rate are 75 bps below and above the BI7DRR. This operational framework reform has three main objectives: strengthening monetary policy signals, strengthening the effectiveness of monetary policy transmission, and fostering deeper financial markets.

In 2016, Bank Indonesia's monetary policy contributed positively to macroeconomic stability and improved economic growth. For that year, inflation stood at 3.02%, within its target range, while the current account deficit was also maintained at a healthy 1.8% of GDP level, thus maintaining external sector resilience. The Rupiah exchange rate strengthened with volatility kept to a minimum.

PENETAPAN SASARAN INFLASI

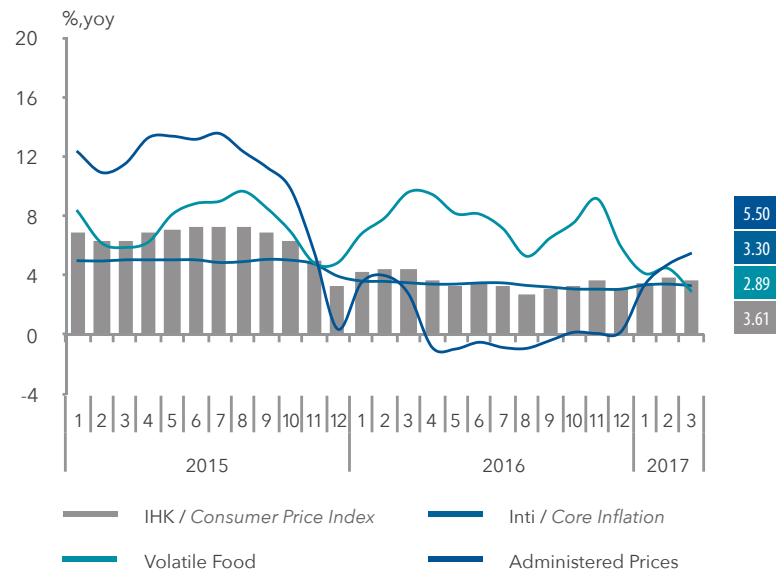
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.011/2014, sasaran inflasi IHK untuk tahun 2016, 2017, dan 2018 ditetapkan sebesar masing-masing 4%, 4%, dan 3,5% dengan deviasi sebesar 1%. Untuk menjaga inflasi dalam rentang sasaran, Bank Indonesia secara konsisten menempuh kebijakan moneter untuk mengarahkan ekspektasi inflasi dan mengelola permintaan domestik. Koordinasi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi juga terus diperkuat terutama dalam menghadapi sejumlah risiko terkait penyesuaian *administered prices* sejalan dengan reformasi subsidi energi dan kenaikan harga *volatile food*.

SETTING INFLATION TARGETS

Based on Ministry of Finance regulation in 2014, the CPI inflation target for 2016, 2017 and 2018 was set at 4%, 4% and 3.5%, respectively, and carries a 1% deviation. To keep inflation within the target range, Bank Indonesia consistently pursues a monetary policy that drives inflation expectation and manages domestic demand. Policy coordination between the Government and Bank Indonesia in controlling inflation is also strengthened, especially relating to risks from administered price adjustments, in line with energy subsidy reforms and volatile food price hikes.

Nilai tukar Rupiah dalam arah menguat dengan volatilitas yang tetap terjaga. Berbagai capaian positif di stabilitas ekonomi tersebut pada gilirannya mendukung upaya pemulihan ekonomi sehingga PDB tumbuh lebih tinggi dari 4,9% pada 2015 menjadi 5,0% pada 2016.

These positive economic stability results, in turn, helped support economic recovery efforts so that GDP trended upward from 4.9% in 2015 to 5.0% in 2016.



Grafik 2. Inflasi
Graph 2. Inflation

Terjaganya stabilitas makroekonomi pada 2016 tidak terlepas dari sinergi respons kebijakan yang semakin solid antara Bank Indonesia dan Pemerintah. Dalam upaya mengendalikan inflasi, Bank Indonesia melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah melalui Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di berbagai daerah.

In 2016, the maintenance of macroeconomic stability was inseparable from closer synergies between Bank Indonesia and the Government in their effective policy responses. To control inflation, Bank Indonesia coordinates closely with the government through the Inflation Monitoring and Control Team at the central government level and the Regional Inflation Control Team in various provinces.

Pada 2016, koordinasi pengendalian inflasi difokuskan pada upaya memitigasi potensi inflasi *volatile food* dan mengendalikan inflasi *administered prices* seiring dengan berlanjutnya reformasi

In 2016, inflation control coordination was focused on mitigating the potential for volatile food inflation and controlling increases in administered prices in line with the continuing energy subsidy reform policies. In

kebijakan subsidi energi. Dalam memitigasi potensi inflasi *volatile food*, koordinasi pengendalian inflasi diarahkan pada peningkatan produksi, perbaikan struktur pasar, perbaikan distribusi, penguatan regulasi, serta pengelolaan ekspektasi dan edukasi inflasi. Sementara itu, terkait dengan pengendalian inflasi *administered prices*, Pemerintah dan Bank Indonesia secara intensif berkoordinasi untuk merumuskan waktu penerapan dan besaran penetapan harga BBM dan komoditas energi lainnya untuk mendukung kebijakan subsidi tepat sasaran.

Momentum pemulihan ekonomi pada 2016 yang terus berlanjut perlu diperkuat melalui reformasi struktural. Dalam kaitan tersebut, Bank Indonesia melalui seluruh jaringan Kantor Perwakilan Dalam Negeri di daerah secara aktif menjalin koordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah untuk mendorong pengembangan ekonomi daerah. Beberapa hal yang menjadi fokus koordinasi dalam rangka mendorong reformasi struktural sepanjang 2016 antara lain terkait dengan pengembangan daya saing perkotaan dan penerapan kota cerdas (*smart city*), pengembangan sektor maritim sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan daya saing industri manufaktur.

Sinergi kebijakan untuk meningkatkan daya saing perkotaan menjadi salah satu prioritas koordinasi dalam mendorong reformasi struktural. Pengembangan dan pengelolaan kawasan perkotaan yang

mitigating the potential for volatile food inflation, the coordination of inflation control was directed at increasing production, improving market structure, improving distribution, strengthening regulations, managing inflation expectations and public education. Meanwhile, on controlling administered price increases, the Government and Bank Indonesia closely coordinated to formulate timing implementation and the amount of price increases for fuel and other energy commodities to support the targeted subsidy policy.

The economic recovery momentum in 2016 needs strengthening through structural reforms. In this regard, Bank Indonesia through its network of Regional Offices in the provinces actively coordinates with local stakeholders to encourage regional economic development. Some of the things that became the focus of coordination to encourage structural reforms throughout 2016 was the development of urban competitiveness, the application of smart city, the development of the maritime sector as a source of economic growth, as well as the developing the manufacturing industry's competitiveness.

Policy synergies to improve urban competitiveness becomes one of the coordination priorities to promote structural reform. The development and management of planned, integrated, and sustainable urban areas is key

LATAR BELAKANG TPID

Inisiatif pembentukan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dimulai 2008 sejalan dengan meningkatnya komitmen pemerintah daerah untuk turut serta berpartisipasi menjaga stabilitas harga. Dalam Rapat Koordinasi Nasional II TPID 2011 dibentuk Kelompok Kerja Nasional TPID yang beranggotakan Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Dalam Negeri dengan fungsi mengkoordinasikan dan sekaligus mengarahkan berbagai kegiatan TPID. Pada akhir 2016, jumlah TPID tercatat sebanyak 507, meliputi 34 TPID tingkat provinsi dan 473 TPID Kabupaten/Kota. Jumlah TPID tersebut meningkat dari 442 pada akhir 2015.

THE TPID BACKGROUND

Initiatives for establishing the Regional Inflation Monitoring and Control Team (TPID) began in 2008 in line with the rising commitment of local governments to participate in maintaining price stability. In the National Coordination Meeting II TPID 2011, National Working Group TPID was founded, to consist of Bank Indonesia, the Coordinating Ministry for Economic Affairs, and the Ministry of Home Affairs with the task of coordinating and simultaneously directing various TPID activities. By the end of 2016, the number of TPIDs grew to 507, comprising of 34 provincial TPIDs and 473 district/city TPIDs. The number of TPIDs increased from 442 by the end of 2015.

terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi kunci bagi peningkatan daya saing perkotaan untuk menumbuhkan kembangkan berbagai kegiatan ekonomi termasuk industri kreatif serta berbagai inovasi yang menciptakan keunggulan kompetitif. Dalam pertemuan koordinasi yang diselenggarakan pada 2 Juni 2016 di Jakarta, Bank Indonesia bersama dengan Kementerian dan Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah membahas inisiatif-inisiatif yang dapat dilakukan untuk mendorong peningkatan daya saing perkotaan dan pengembangan ke arah kota cerdas. Dalam kaitan pengembangan kota cerdas ini, Bank Indonesia mendorong implementasi program elektronifikasi yang diyakini dapat meningkatkan efisiensi hubungan antara masyarakat-bisnis-pemerintahan (*People-Business-Government*) dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efisien.

Potensi maritim yang besar juga perlu dioptimalkan untuk menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa keberhasilan dalam pengembangan sektor maritim memerlukan kebijakan yang integratif agar tercipta ekosistem maritim yang kuat. Untuk itu, diperlukan adanya sinergi dalam pembangunan infrastruktur maritim yang mencakup beberapa sektor terkait seperti perkapalan, perikanan, pariwisata, pelayaran dan sumber daya manusia maritim serta kelembagaannya.

Dalam pertemuan koordinasi antara Bank Indonesia bersama dengan Kementerian dan Lembaga terkait, serta Pemerintah Daerah di Batam pada 12 Agustus 2016 disepakati beberapa hal yang perlu menjadi prioritas untuk mendukung pengembangan sektor maritim. Salah satunya melalui penerapan kebijakan satu peta dan satu desain kapal (*one map and one ship design policy*) guna mendukung berkembangnya industri perkapalan. Selain itu, perlu diintegrasikan strategi pengembangan infrastruktur logistik dengan pengembangan wilayah yang mendukung pada peningkatan konektivitas antar wilayah industri, permukiman, dan simpul-simpul transportasi. Peningkatan kualitas infrastruktur kelembagaan juga perlu menjadi prioritas melalui

to improve urban competitiveness. This is critical to foster a range of economic activities, including creative industries and innovations that produce competitive advantage. In a coordination meeting, held on June 2nd, 2016 in Jakarta, Bank Indonesia together with relevant Ministries and Agencies as well as Local Governments discussed initiatives that could promote increased urban competitiveness and development towards intelligent cities. With regard to developing a smart city, Bank Indonesia encouraged the implementation of electronic digital programs to improve the efficiency of people-business-government relationships and create effective and efficient governance.

Significant maritime potential also needs to be optimized as a source of sustainable economic growth. The experience of other countries show that success in maritime sector development requires an integrative policy to create a strong maritime ecosystem. Therefore, synergies are needed in developing maritime infrastructure, that covers several related sectors, such as shipping, fishery, tourism, sailing and maritime human resources as well as its institutions.

On August 12th, 2016, In a coordination meeting in Batam, among Bank Indonesia and relevant Ministries and Agencies, as well as Regional Governments there was agreement on priority issues to support the development of the maritime sector. One of them is by implementing the one map policy and one ship design (one map and one ship design policy) to support the development of the shipping industry. In addition, it is necessary to integrate a logistics infrastructure development strategy with the development of supporting areas to increase connectivity between industrial areas, settlements, and transportation nodes. Improving the quality of institutional infrastructure also needs to be a priority through bureaucratic reforms, particularly on public

reformasi birokrasi, khususnya pada aspek layanan publik dan sistem pemerintah berbasis elektronik, serta peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara di tingkat pusat dan daerah.

Transformasi industri manufaktur merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing global Indonesia. Merespons hal tersebut, pertemuan koordinasi antara Bank Indonesia bersama dengan Kementerian dan Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah di Surabaya pada 25 November 2016 membahas strategi yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur nasional. Dalam pertemuan koordinasi tersebut disepakati bahwa transformasi industri harus dilakukan melalui pembenahan berbagai lini, mulai dari sumber daya manusia, hingga pasokan energi dan infrastruktur lainnya. Untuk itu, strategi kebijakan yang ditempuh untuk mendorong transformasi industri manufaktur harus dilakukan secara terintegrasi, bersinergi, dan secara konsisten diarahkan pada penguatan daya saing industri nasional. Transformasi industri nasional dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang difokuskan pada upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam (Tahap 1), mendorong keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan (Tahap 2), serta menjadikan Indonesia sebagai negara industri tangguh (Tahap 3).

Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Dalam Negeri juga memperkuat koordinasi dengan pemangku kebijakan di daerah untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah. Koordinasi pengembangan ekonomi daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi baru dan mendukung pemerataan ekonomi antar daerah. Selain itu, koordinasi pengembangan ekonomi daerah diarahkan untuk mendukung efektivitas implementasi kebijakan Bank Indonesia. Hal ini mengingat perbedaan karakteristik antara satu daerah dengan daerah lainnya sehingga aspek dinamika spasial menjadi perhatian dalam proses perumusan kebijakan di Bank Indonesia.

service and electronic-based government systems, as well as building the capacity of the State Civil Apparatus at the central and regional government levels.

The transformation of the manufacturing industry is one of the keys to improving Indonesia's global competitiveness. Responding to this, on November 25th, 2016, the coordination meeting between Bank Indonesia with relevant Ministries and Agencies as well as the Regional Governments in Surabaya, discussed strategies to improve the competitiveness of the national manufacturing industry. In this meeting, it was agreed that industrial transformation must be done by improving various areas, from human resources, to energy supply and other infrastructure. To that end, the policy strategy to transform the manufacturing industry must be done in an integrated, synergistic, and consistent way with the aim to strengthen national industry competitiveness. The national industry transformation will be carried out in stages, referring to the National Industrial Development Master Plan focused on enhancing the value added of natural resources (Phase 1), promoting competitive and environmentally sound value add facilities (Stage 2), and making Indonesia a strong industrial country (Stage 3).

Bank Indonesia through its Regional Offices also strengthened coordination with local stakeholders to support regional economic development. Coordination of regional economic development is directed to promote inclusive and sustainable economic growth by developing new sources of economic growth and supporting the equitable distribution of economies between regions. In addition, coordination of regional economic development is directed to support the effectiveness of Bank Indonesia policy implementation. All this is done by taking into account the different characteristics between one region to the other, so that spatial dynamic aspects becomes a concern in policy formulation at Bank Indonesia.

Penguatan peran Bank Indonesia untuk turut berkontribusi dalam pengembangan ekonomi daerah ditegaskan dalam pengaturan internal dan tetap berada dalam koridor kerangka tugas dan wewenang yang dimiliki Bank Indonesia. Komitmen terhadap penguatan peran Bank Indonesia di daerah ini ditunjukkan antara lain melalui pengembangan jaringan KPwDN di seluruh provinsi di Indonesia.

Koordinasi dengan pemangku kebijakan di daerah dalam rangka pengembangan ekonomi daerah diwujudkan dalam berbagai program kegiatan terutama terkait dengan perencanaan pembangunan. Bank Indonesia di berbagai daerah secara aktif berkontribusi dalam pembahasan dan perumusan asumsi ekonomi makro yang merupakan bagian penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Anggaran Perencanaan Belanja Daerah. Di beberapa daerah, seperti Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan beberapa daerah lainnya, Bank Indonesia juga terlibat langsung sebagai narasumber dalam diskusi publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan terkait penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Koordinasi dengan pemangku kebijakan daerah juga dilakukan dalam konteks pengembangan potensi ekonomi daerah dan UMKM. Salah satunya adalah inisiatif yang dilakukan oleh KPwDN Provinsi Maluku Utara dalam mendorong kerja sama lintas pulau bertajuk SE-HaTTI, akronim dari Segitiga Emas dan nama Kabupaten/Kota yang terlibat dalam kerja sama tersebut (Kabupaten Halmahera Barat, Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan). Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah sehingga mendorong perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga daerah ini juga melakukan promosi wisata bersama dengan membuat paket tur sejarah dan budaya di Ternate, Tidore, dan Jailolo.

Bank Indonesia turut mempromosikan obyek wisata dan kekayaan budaya ketiga daerah tersebut melalui Festival Kreasi dan Inovasi Anak Negeri pada November 2016. KPwDN Provinsi Papua bekerjasama dengan Pemerintah Kota Jayapura dalam mendorong

Strengthening the role of Bank Indonesia to assist regional development is underscored in the internal arrangements and remains within the corridor of the framework of duties and authorities of Bank Indonesia. The commitment to strengthen the role of Bank Indonesia in this area is shown through the development of the Regional Offices network in all provinces in Indonesia.

Coordination with local stakeholders in the regional development framework is embodied in various program activities, especially relating to development planning. Bank Indonesia in various regions actively contributes to the discussion and formulation of macroeconomic assumptions that are an important part in the preparation of the Local Government Work Plan and the Regional Budget Plan. In some areas, such as East Kalimantan, North Sulawesi, and several others, Bank Indonesia is also directly involved as a resource person in public discussions and Development Plan Discussions relating to the preparation of the Medium Term Development Plan.

Coordination with local stakeholders is also conducted in the context of developing regional economic potentials and Micro and Small to Medium Enterprises. One of the initiatives conducted by Regional Office of North Maluku Province in encouraging cross-island cooperation titled SE-HaTTI, which is an acronym for a Golden Triangle and name of the Regency / City involved in the cooperation (West Halmahera Regency, Ternate City and Tidore Islands City). This cooperation aims to improve connectivity between regions so as to promote the regional economy and welfare of the community. These three areas also undertakes joint tourism promotion, by creating historical and cultural tour packages in Ternate, Tidore, and Jailolo.

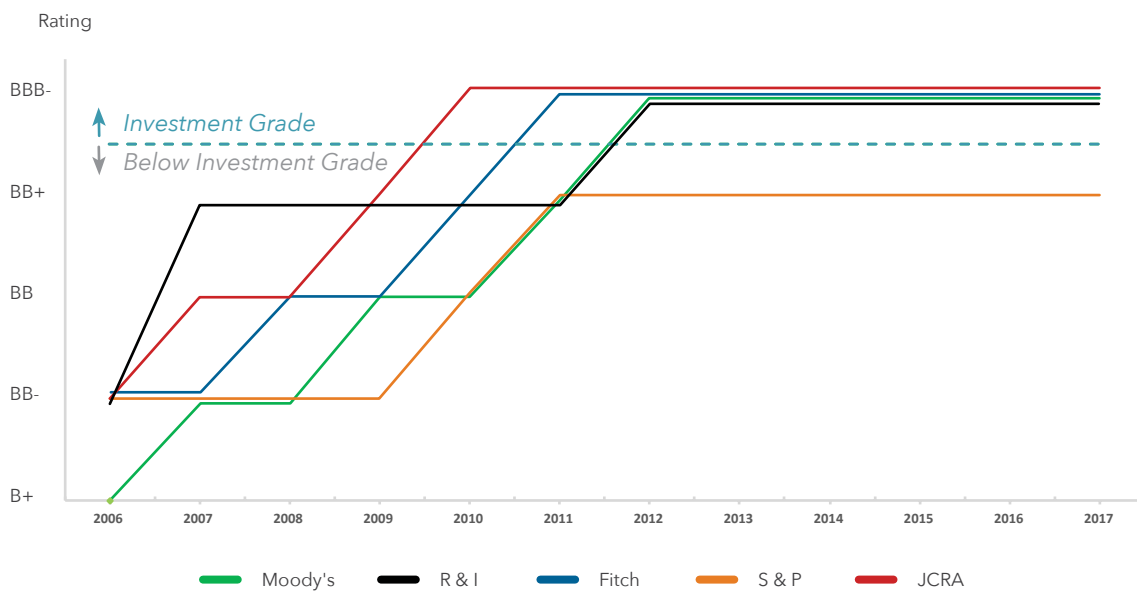
Bank Indonesia helped promote tourism and cultural diversity of the three regions through the Festival of Local's Creation and Innovation in November 2016. Regional Office of Papua Province in cooperation with the Government of Jayapura City, promotes increased

peningkatan produktivitas usaha komoditas ikan cakalang dan ikan ekor kuning melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan dan pembukuan sederhana kepada sejumlah kelompok nelayan.

productivity of the tuna and yellow tail fish business through entrepreneur training activities and simple bookkeeping courses to a number of fishermen groups.

Koordinasi yang baik antara Bank Indonesia, Pemerintah, dan otoritas lain dalam menjaga kestabilan makroekonomi dan mendorong momentum pertumbuhan diapresiasi positif oleh pelaku ekonomi dan investor. Hal ini tercermin dari hasil pemeringkatan beberapa lembaga pemeringkat internasional. Di 2016, Fitch dan Moody's serta lembaga pemeringkat Jepang (JCRA dan R&I) mempertahankan peringkat layak investasi (*investment grade*) Indonesia. Sementara Fitch meningkatkan *outlook Sovereign Credit Rating* Indonesia dari Stabil menjadi Positif.

Good coordination between Bank Indonesia, the Government, and other authorities in maintaining macroeconomic stability and encouraging growth momentum is positively acknowledged by market players and investors. This is reflected in the country's rating from several international rating agencies. In 2016, Fitch and Moody's and Japanese rating agencies (JCRA and R & I) maintained Indonesia's investment grade rating. While Fitch increased the outlook of Sovereign Credit Rating Indonesia from Stable to Positive.



Grafik 3. Pergerakan Sovereign Credit Rating Indonesia
Graph 3. The Movement of Sovereign Credit Rating Indonesia

PENGUATAN EFEKTIVITAS TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER

Strengthening the Effectiveness of Monetary Policy Transmission

Sejak Juli 2005, Bank Indonesia menggunakan BI Rate sebagai suku bunga kebijakan seiring dengan penerapan kerangka sasaran inflasi atau *Inflation Targeting Framework*. BI Rate merupakan sinyal respons kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi. BI Rate kemudian menjadi acuan bagi pergerakan suku bunga pasar uang antar bank (PUAB) *overnight* (O/N), yang dijadikan sasaran operasional kebijakan. Selanjutnya, pergerakan suku bunga PUAB O/N diharapkan mempengaruhi pergerakan suku bunga dengan tenor yang sedikit lebih panjang, yang akhirnya akan mempengaruhi kegiatan sektor riil dan tingkat inflasi.

Paska krisis keuangan global 2008/2009, kebijakan moneter menghadapi tantangan karena meningkatnya aliran masuk modal asing, sehingga terjadi eksesi likuiditas di PUAB. Hal tersebut menyebabkan suku bunga PUAB, khususnya tenor O/N, menjadi sangat rendah. Di sisi lain, penurunan BI Rate sulit ditempuh mengingat tekanan inflasi domestik dan defisit transaksi berjalan masih tinggi. Perkembangan ini mendorong melebarnya deviasi antara BI Rate dan suku bunga PUAB O/N. BI Rate tahun 2008 masih di sekitar suku bunga PUAB O/N, namun kemudian perbedaan antara kedua suku bunga ini melebar dan pada awal tahun 2016 telah setara dengan suku bunga operasi moneter tenor 12 bulan. Hal ini membuat sinyal dan transmisi kebijakan moneter tidak optimal.

Bank Indonesia merespons tantangan ini dengan melakukan reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter. Langkah reformulasi diumumkan 15 April 2016 dan berlaku 19 Agustus 2016. Reformulasi bertujuan memperkuat sinyal arah kebijakan moneter, memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui pengaruh pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan, serta mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya transaksi dan pembentukan struktur suku bunga di PUAB untuk tenor 3 bulan hingga 12 bulan.

Since July 2005, Bank Indonesia used the BI Rate as the policy interest rate in line with the implementation of its Inflation Targeting Framework. BI Rate is the monetary policy response signal in controlling inflation. BI Rate was then used as a reference for overnight (O/N) interest rate for movements in the Interbank Money Market (PUAB), which was used as the policy's operational target. Furthermore, the overnight interbank movement interest rate was expected to shift to longer-term interest rates and ultimately affecting economic activities in the real sector as well as the inflation rate.

After the global financial crisis in 2008/2009, monetary policy faced challenges due to the increase of foreign capital inflows, thus resulting in excess liquidity in the Interbank Money Market. This caused the Interbank Money Market's interest rates, particularly for overnight, to reach extremely low levels. On the other hand, slashing the BI Rate was difficult to do, due to the pressures of domestic inflation and large current account deficit. This development led to a widening deviation between the BI Rate and the overnight interbank rate. The BI Rate in 2008 was still on par with the overnight interbank rate, but then the gap between these two interest rates widened and by the beginning of 2016 this equaled the 12-month interest rate for monetary operations. This resulted in the signals and transmission of monetary policy being less optimal.

Bank Indonesia responded to the challenge by reformulating its operational framework of monetary policy. The reformulation was announced on April 15th, 2016 and implemented on August 19th, 2016. The reformulation aimed to reinforce the signalling of monetary policy direction, strengthening the efficacy of monetary policy transmission by better influencing money markets and bank interest rate movements, and promoting the deepening of financial markets, especially the transaction and establishment of the Interbank Money Market interest rate structure for periods of 3 months to 12 months.

Perlu ditekankan bahwa Implementasi kebijakan reformulasi ini tidak mengubah kerangka kebijakan moneter karena Bank Indonesia tetap menerapkan kerangka sasaran inflasi atau *Inflation Targeted Framework*. Kebijakan ini juga tidak mengubah arah atau *stance* kebijakan moneter yang sedang ditempuh. Selain itu, reformulasi ini membuat suku bunga kebijakan lebih tercermin di instrumen moneter dan bersifat transaksional serta penentuan suku bunga sasaran operasional dapat lebih dipengaruhi suku bunga kebijakan.

Reformulasi kerangka operasional moneter mulai 19 Agustus 2016 dengan mengubah suku bunga kebijakan dari *BI Rate* menjadi *BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR)*. Perbedaan hanya terlihat pada tenor instrumen operasi moneter yang menjadi acuan dan kemudian berimplikasi pada perbedaan level suku bunga. Pada hari tersebut, instrumen operasi moneter tenor 7 hari yang menjadi acuan BI7DRR tercatat sebesar 5,25% sedangkan instrumen operasi moneter tenor 12 bulan yang setara dengan *BI Rate* tercatat sebesar 6,50%.

Bank Indonesia juga memperkuat strategi operasi moneter dengan menjaga koridor suku bunga PUAB agar simetris dan lebih sempit. Batas bawah koridor (*deposit facility rate/DF rate*) dan batas atas koridor (*lending facility rate/LF*) ditetapkan masing-masing 75 bps di bawah dan di atas BI7DRR. Reformulasi turut disertai langkah-langkah percepatan pendalaman pasar uang, antara lain melalui penjarangan frekuensi lelang operasi pasar terbuka (OPT) dan penguatan komunikasi dengan pengumuman jadwal lelang OPT regular. Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan berbagai pemangku kepentingan lain untuk memastikan reformulasi kerangka operasional moneter dapat berjalan dengan baik.

It should be emphasized that the implementation of this reformulation policy does not alter the monetary policy framework, as Bank Indonesia continues to implement its Inflation Targeted Framework. This policy also does not change the direction or stance of current monetary policy. In addition, this reformulation results in policy interest rates being more readily reflected in monetary instruments and are transactional in nature, and the setting of operational targeted interest rates can be better influenced by policy rates.

The reformulation of the monetary operational framework began on August 19th, 2016 by changing the policy interest rate, from previously the BI Rate to the BI's 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR). The observable difference was only in the monetary operation instruments' tenors, which act as reference and then reflect the difference in the interest rate levels. On that day, the 7-day monetary operation instrument that became the reference for BI7DRR was recorded at 5.25%, while the 12-month monetary operation instrument, which was equivalent to the BI Rate, was recorded at 6.50%.

Bank Indonesia also strengthened its monetary operation strategy by making the Interbank Money Market rates more symmetrical, with their gaps made narrower. The lower limit (deposit facility rate–DF rate) and the upper limit (lending rate–LF rate) were set at respectively 75bps below and above the BI7DRR. The reformulation was also accompanied by measures to accelerate the deepening of the money markets, among others, through reducing the frequency of open market operation auctions and enhancing communication through the announcement of regular auction schedules. Bank Indonesia also coordinated with the Government, the OJK, the Deposit Insurance Agency, and various other stakeholders to ensure smooth implementation of the monetary operational framework's reformulation.

STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Memperkuat stabilitas sistem keuangan: Di tengah tingginya risiko global, perekonomian domestik menunjukkan ketahanan yang cukup baik sehingga memunculkan sentimen positif yang meredakan kekhawatiran investor global terhadap risiko pada perekonomian domestik. Kondisi perekonomian domestik tersebut dapat menahan peningkatan Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) lebih lanjut.

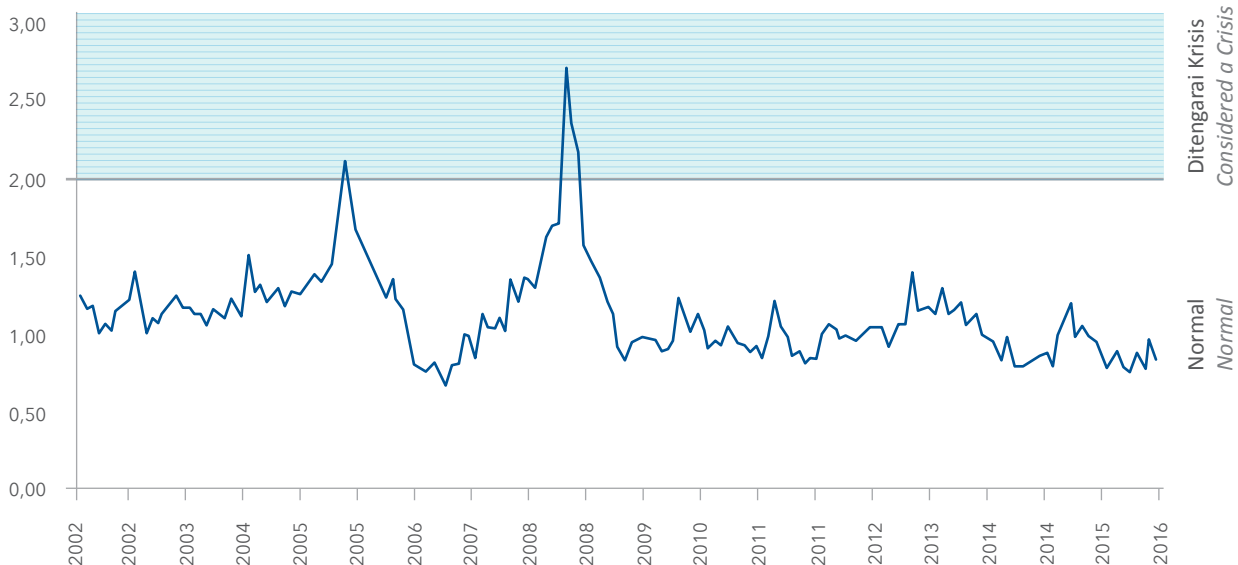
Selama 2016, Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) cenderung stabil karena didukung oleh tingginya permodalan dan cukupnya likuiditas di sektor perbankan serta relatif terjaganya volatilitas di pasar keuangan. Hal tersebut tercermin dari ISSK yang masih berada di level normal. Kondisi sistem keuangan masih terjaga dengan indeks SSK Indonesia di tingkat 0,88 dibandingkan 0,93 tahun sebelumnya. Angka ini masih jauh dibawah level krisis sebesar 2,0.

FINANCIAL SYSTEM STABILITY

Strengthening the financial system stability: Amid high global risks, the domestic economy has shown strong resilience leading to positive sentiments that ease global investors' worry related to the risks in the domestic economy. The domestic economic conditions was able to endure further increases of the Financial System Stability Index (ISSK).

Throughout 2016, the Financial System Stability tended to stabilize as it was supported by strong capital and adequate liquidity in the banking sector as well as relatively minor volatility in the financial markets. This was reflected from the ISSK which hovered around normal levels. The financial system condition was still manageable with Indonesia's ISSK held at 0.88, compared to 0.93 in the previous year. This figure was far below the level that would be considered a "crisis", i.e. 2.0.

Indeks/ Index



Grafik 4. Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK)
Graph 4. Financial System Stability Index (ISSK)

Perkembangan pasar keuangan domestik pada semester kedua 2016 sangat dipengaruhi oleh dinamika kondisi perekonomian global yang belum pulih kembali. Namun, sentimen positif investor terhadap perbaikan makroekonomi domestik mendorong peningkatan jumlah pembiayaan dari pasar modal, khususnya pasar obligasi meski Initial Public Offering (IPO) dan *right issue* di pasar saham mengalami penurunan.

The domestic financial market development in the second semester of 2016 was strongly influenced by the dynamics of global economic conditions, which were yet to recover. However, investors' positive sentiments on the domestic macroeconomic recovery led to an increase in the amount of financing from the capital market, particularly in the bond market, despite less Initial Public Offering (IPO) and rights issues conducted in the stock market.

Protokol manajemen krisis (PMK) dan pelaksanaan simulasi krisis: Sebagai tindak lanjut dari disahkannya Undang Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) pada 15 April 2016, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan ketentuan protokol manajemen krisis. Bank Indonesia menyusun pedoman dan payung hukum protokol manajemen krisis (PMK BI) guna meningkatkan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan munculnya krisis di masa datang. Cakupan PMK BI, antara lain, penyesuaian dengan dinamika perubahan dalam struktur organisasi Bank Indonesia dan penyempurnaan proses pembuatan keputusan, penyesuaian status tekanan, mekanisme tukar menukar data dan informasi, serta mekanisme koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam kerangka PMK Nasional.

PMK BI mencakup tiga tugas utama, yaitu sub-protokol Moneter-Nilai Tukar, sub-protokol Makroprudensial dan sub-protokol Sistem Pembayaran. Kegiatan pengawasan (surveilans) dan kajian atau asesmen, dalam rangka PMK BI, dilakukan oleh satuan kerja koordinator, satuan kerja konsolidator dan satuan kerja penyelenggara surveilans dan asesmen dari masing-masing subprotokol secara berkala (bulanan, mingguan dan harian), maupun sewaktu-waktu. Selain itu, dalam rangka mendukung kegiatan surveilans dan asesmen, terdapat satuan kerja pendukung yang juga dapat melakukan kegiatan surveilans dan asesmen sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Dalam rangka penyempurnaan PMK dan peningkatan kesiapan para pengambil keputusan, Bank Indonesia secara rutin melaksanakan simulasi krisis untuk menguji ketentuan PMK, koordinasi antar satuan kerja terkait PMK BI serta asesmen apakah kelengkapan instrumen kebijakan Bank Indonesia sudah cukup memadai untuk mencegah dan menangani krisis. Simulasi krisis juga dilaksanakan pada level nasional bersama otoritas yang tergabung di KSSK. Ini penting untuk menguji rancangan peraturan pelaksanaan UU PPKSK oleh keempat lembaga anggota KSSK dan meningkatkan pemahaman pejabat keempat lembaga anggota KSSK atas PMK masing-masing lembaga dan protokol pada level KSSK. Selain itu, dengan adanya simulasi ini, masing-masing otoritas mampu mendeteksi kelemahan yang perlu diperbaiki guna penyempurnaan masing-masing ketentuan otoritas PMK dan penyempurnaan peraturan pelaksanaan UU PPKSK.

Crisis Management Protocol (PMK) and crisis simulation implementation: As a follow-up to the enactment of the Financial System Crisis Prevention and Treatment Act (PPKSK Act) on April 15 th, 2016, Bank Indonesia strengthened the regulations related to its crisis management protocols. Bank Indonesia developed the guidelines and the legal umbrella to improve the early warning system against the possibility of crises emerging in the future. This includes, among others, adjustments to the dynamics of changes in Bank Indonesia's organization structure and improvement of decision making processes, adjustment of pressure status, data and information exchange mechanism, and mechanism of coordination with the Financial System Stability Committee (KSSK) within the National Crisis Management Protocol (PMK) framework.

Bank Indonesia's Crisis Management Protocol encompasses three main tasks, namely Monetary - Exchange Rate subprotocol, Macroprudential subprotocol, and Payment Systems subprotocol. Surveillance and assessment activities, in the framework of PMK BI, shall be conducted periodically (monthly, weekly and daily) or at any time, by the Coordinator Work Unit, Consolidator Work Unit, and Surveillance and Assessment Providers Work Unit from each subprotocol. In addition, to support surveillance and assessment activities, a supporting work unit is in place to also conduct surveillance and assessment activities any time as deemed necessary.

In order to improve the Crisis Management Protocol and enhance the readiness of decision-makers, Bank Indonesia regularly conducts crisis simulations to test the protocol's provisions, coordination between work units related to PMK BI, and the assessment of whether Bank Indonesia policy instruments are adequate to prevent and handle crisis. The crisis simulation is carried out at national level along with the authorities incorporated in the KSSK. This is important to assess regulatory drafts on the implementation of PPKSK Act by the four KSSK member institutions and to enhance the understanding of KSSK member institutions officials on the PMK of each agency and protocol at the KSSK level. In addition, with this simulation, each authority is able to detect weaknesses that need to be improved and improve the provisions of their respective PMK as well as refine the PPKSK Act's implementing regulations.

MEMBANGUN BENTENG KESTABILAN SISTEM KEUANGAN INDONESIA

Building Financial System Stability in Indonesia

Bank Indonesia melakukan berbagai upaya dalam membangun kestabilan sistem keuangan Indonesia, antara lain, melalui koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian Keuangan, OJK, serta Lembaga Penjamin Simpanan. Hal ini diperkuat dengan adanya Undang Undang No.9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Undang Undang PPKSK) pada 15 April 2016 sebagai tumpuan koordinasi antar keempat lembaga diatas yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Selanjutnya berdasarkan Undang Undang PPKSK, anggota KSSK menyusun peraturan pelaksana sesuai tugas dan kewenangan masing-masing institusi.

Bank Indonesia selaku otoritas moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial, akan berkontribusi aktif bersama dengan otoritas lain memantau dan memelihara SSK serta menangani krisis sistem keuangan. Pemantauan dimaksud dilakukan dengan memakai berbagai indikator, baik kuantitatif maupun kualitatif yang ditetapkan dalam Protokol Manajemen Krisis Bank Indonesia (PMK BI). Dalam kaitan ini, Bank Indonesia telah menyempurnakan ketentuan PMK BI sesuai dengan Undang Undang PPKSK yang telah dikeluarkan pada triwulan ke-empat 2016. Ketentuan PMK BI tersebut merupakan pedoman dan landasan hukum Bank Indonesia dalam melaksanakan prosedur pengambilan keputusan ketika terjadi krisis. Cakupan kegiatan PMK BI adalah kegiatan surveilans dan asesmen, proses pengambilan keputusan, koordinasi pertukaran data dan informasi serta evaluasi status tekanan untuk setiap sub protokol dalam PMK BI.

Bank Indonesia melakukan surveilans dan asesmen baik secara berkala (bulanan, mingguan dan harian) maupun sewaktu-waktu meliputi identifikasi risiko baik global dan domestik yang memicu peningkatan tekanan melalui pengumpulan dan monitoring data dan informasi; analisa kerentanan dan faktor pemicu terjadinya peningkatan tekanan; dan perumusan indikasi status tekanan moneter-nilai tukar,

Bank Indonesia has engaged in various efforts to build the stability of the Indonesian financial systems, among others through coordination and cooperation with the Ministry of Finance, OJK, and the Deposit Insurance Corporation. This was further strengthened with the enactment of Act No. 9 of 2016 on the Prevention and Mitigation of Financial System Crises (PPKSK Act) on April 15th, 2016 as a reference for coordination between the aforementioned four institutions, which make up the Financial System Stability Committee (KSSK). Furthermore, based on PPKSK Act, KSSK members prepare the implementing regulations according to the respective duties and authorities of each institution.

Bank Indonesia as the authority on monetary, payment systems, and macroprudential policies, will actively seek to contribute together with the other authorities to monitor and maintain the SSK as well as to handle financial system crises. Such monitoring is conducted using various indicators, both quantitative and qualitative as stipulated in Bank Indonesia's Crisis Management Protocol (PMK BI). In this regard, Bank Indonesia has improved the PMK BI regulations in accordance to PPKSK Act issued in the fourth quarter of 2016. The PMK BI regulations serve as the guidelines and legal basis for BI in implementing decision-making procedures in times of crisis. PMK BI's activities cover surveillance and assessment activities, decision-making processes, coordination of data and information exchange, and evaluation of pressure status for each subprotocol in the PMK BI.

Bank Indonesia conducts regular and periodic (monthly, weekly, and daily) surveillance and assessment, including identification of both global and domestic risks that could potentially trigger increased pressure, through data and information collection and monitoring; analyses of vulnerabilities and triggering factors for increased pressure; and formulation of monetary-exchange rates pressures,

makroprudensial dan sistem pembayaran. Indikasi status tekanan kemudian dibedakan, menjadi kondisi Normal dengan 3 gradasi yaitu Stabil, Waspada dan Siaga serta Ditengarai Krisis.

Surveilans dan asesmen Bank Indonesia secara rutin dipertukarkan dan dikoordinasikan dengan otoritas lainnya melalui media komunikasi *on-line* maupun pada pertemuan KSSK level teknis atau *high level*. Hasil surveilans dan asesmen juga menjadi bagian PMK Nasional bersama-sama dengan hasil surveilans dan asesmen lembaga anggota KSSK lain. Apabila terdapat perubahan status tekanan dari protokol anggota KSSK maka akan dikomunikasikan melalui sekretariat KSSK. Lebih lanjut, anggota KSSK dapat mengusulkan terselenggaranya pertemuan KSSK dalam kerangka Protokol Manajemen Krisis skala Nasional (*call for meeting*) untuk melakukan koordinasi kebijakan dan upaya penanganan secara bersama.

Tugas Bank Indonesia lainnya dalam pemeliharaan SSK terkait dengan fungsi sebagai *Lender of the Last Resort* dengan memberikan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) baik kepada bank umum konvensional maupun syariah (PLJPS) untuk bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek. Saat ini, Bank Indonesia sedang mempersiapkan aturan pemberian pinjaman dengan mengacu kepada Undang Undang PPKSK dan Undang Undang Bank Indonesia, yang akan mengatur persyaratan bank yang dapat memperoleh pinjaman, jenis dan persyaratan agunan serta mekanisme pemberian pinjaman.

Adapun bank yang dapat mengajukan PLJP/S adalah bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek dan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi bank adalah solvabilitas bank yang tercermin dari pemenuhan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) sesuai profil risiko yang dikenal juga dengan istilah *illiquid but solvent*. Selain itu, Bank Indonesia akan bekerja sama

macroprudential pressures, and payment systems pressures. Indication of pressure status is then categorized into 3 grades of Normal condition, namely Stable, Alert and Considered a Crisis.

Bank Indonesia's surveillance and assessment are routinely circulated and coordinated with other authorities through on-line communication media as well as technical level or high level KSSK meetings. Surveillance and assessment results also become part of the National PMK, together with surveillance and assessment results from other KSSK member institutions. Should there be a change in the pressure status of the KSSK member protocol, this will be communicated through the KSSK Secretariat. Furthermore, KSSK members may propose to call for KSSK meetings within the framework of the National Crisis Management Protocol to coordinate policies and joint efforts.

Bank Indonesia's other duty in maintaining the Financial Stability System is related to its function as Lender of Last Resort by providing short term liquidity loans (PLJP) to both conventional and sharia commercial banks (PLJPS) that are experiencing short-term liquidity issues. Currently, Bank Indonesia is preparing the lending regulations by referring to PPKSK Act and Bank Indonesia Act, which will regulate the requirements for banks to obtain loans, types and terms of collateral as well as lending mechanisms.

Banks that can apply for PLJP/S are banks experiencing short-term liquidity issues. One of the requirements that must be fulfilled is the bank's solvency, which is reflected by the fulfilment of the Capital Adequacy Ratio (CAR) based on the risk profile, also known as "illiquid but solvent". In addition, Bank Indonesia will cooperate with the OJK as the microprudential regulator and banking

dengan OJK selaku regulator pengawas perbankan (mikroprudensial) dalam memproses permohonan PLJP dari bank serta pemantauan dan pengawasan terhadap bank penerima PLJP.

Sebagai otoritas dalam kerangka menjaga sistem keuangan Indonesia, antara Bank Indonesia, OJK dan LPS, memiliki keterkaitan ataupun pembagian pelaksanaan tugas dan kewenangan yang cukup signifikan, terutama terkait dengan bidang perbankan. Secara bilateral, Bank Indonesia memiliki kerangka kerjasama dan koordinasi secara bilateral masing-masing dengan OJK dan LPS dalam bentuk Keputusan Bersama dan Nota Kesepahaman. Dengan disepakatinya Keputusan Bersama Bank Indonesia-OJK dan Nota Kesepahaman Bank Indonesia-LPS diharapkan dapat memperlancar dan mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing lembaga. Selain itu, diharapkan respon kebijakan yang diambil dapat diterapkan secara efektif dan sinergis demi tercapainya stabilitas sistem keuangan.

Terkait penanganan krisis sistem keuangan, Bank Indonesia mempunyai kewenangan yang mencakup: (1) *liquidity management* melalui pemberian fasilitas Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek/Syariah (PLJP/S); (2) Pembelian SBN dari LPS berdasarkan keputusan KSSK untuk penanganan permasalahan bank sistemik dan bank non-sistemik; serta (3) pemberian dukungan kepada LPS dalam pelaksanaan Program Restrukturisasi Perbankan. Dalam kaitan ini, pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antara Bank Indonesia dan LPS tersebut dituangkan pada MoU Bank Indonesia-LPS dan Surat Edaran Intern mengenai koordinasi Bank Indonesia-LPS dengan cakupan utama koordinasi dan kerjasama sebagaimana pada angka (2) dan (3) diatas.

supervisory board in processing PLJP applications from banks as well as monitoring and supervising the recipient banks.

As an authority within the framework of safeguarding Indonesia's financial system, between Bank Indonesia, OJK, and LPS, there is a significant linkage as well as segregation of duties and authorities, particularly related to the banking sector. Bank Indonesia has a bilateral cooperation and coordination framework with OJK and LPS, in the form of Joint Decisions and Memorandum of Understanding, respectively. The approval of the Bank Indonesia-OJK Joint Decrees and the Bank Indonesia-LPS Memorandum of Understanding is expected to facilitate and optimize cooperation and coordination in order to carry out the functions, duties, and authorities of the respective institutions. In addition, it is expected that the policy responses can be implemented effectively and synergistically, in order to achieve financial system stability.

In relation to the handling of financial system crisis, Bank Indonesia has the authority that covers: (1) liquidity management through the provision of Short Term/Sharia Liquidity Credit Facility; (2) SBN purchase from LPS based on KSSK's decision to handle systemic and non-systemic banking issues; and (3) provision of support to LPS in the implementation of Banking Restructuring Program. In this context, the coordination and cooperation between Bank Indonesia and LPS is set forth in the Bank Indonesia-LPS MoU and Internal Circular Letter regarding Bank Indonesia-LPS coordination, with the main scope of coordination and cooperation as mentioned in points (2) and (3) above.

Selain upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, telah dilakukan pula kerja sama untuk menjaga stabilitas secara regional. Dalam kaitan ini, telah dilakukan kerjasama dalam rangka *Crisis Management and Resolution Framework* dalam Executive's Meeting of East Asia Pacific Central Banks dan Chiang Mai Initiative Multilateralization. Kerjasama yang dilakukan dalam bentuk simulasi krisis melalui media komunikasi yang disepakati.

Bank Indonesia dan/atau Kementerian Keuangan juga dapat mengaktifkan jaring pengaman keuangan internasional (IFSN) apabila terdapat tekanan likuiditas yang bersifat eksternal dan/atau berkaitan dengan neraca pembayaran. Tujuan kerjasama melalui IFSN ini adalah untuk mencegah dan menangani krisis secara bilateral, regional, maupun multilateral dengan bank sentral, otoritas moneter, dan/atau otoritas lainnya, organisasi atau lembaga internasional, dan forum internasional dalam rangka pemenuhan kecukupan cadangan devisa dan/atau kesulitan likuiditas jangka pendek.

Bentuk kerjasama yang telah dilakukan antara lain dalam bentuk *Bilateral Swap Arrangement (BSA)* dengan Jepang untuk mendukung kebutuhan likuiditas potensial dan aktual melalui penyediaan skema pencegahan dan penanganan krisis. BSA tersebut merupakan kerjasama pertukaran cadangan devisa dolar Amerika Serikat (AS) antara Jepang dengan Indonesia. Perjanjian kerjasama ini pertama kali ditandatangani pada 17 Februari 2003 dan telah beberapa kali diamandemen dan diperpanjang. Perpanjangan perjanjian terakhir berlaku efektif tanggal 12 Desember 2016 memiliki masa berlaku 3 tahun.

In addition to the efforts to maintain the national financial system stability, other cooperation to maintain regional stability has been done. In this regard, cooperation has been made in the framework of Crisis Management and Resolution Framework in the Executive Meeting of East Asia Pacific Central Banks and Chiang Mai Initiative Multilateralization, in the form of crisis simulation via approved communication media.

Bank Indonesia and/or the Ministry of Finance may also activate the International Financial Safety Net (IFSN) should there be external liquidity pressures and/or pressures related to the balance of payments. The purpose of this IFSN cooperation is to prevent and deal with crises bilaterally, regionally, or multilaterally with the central banks, monetary authorities and/or other authorities, international organizations or institutions, and international forums, in order to meet the adequacy of foreign exchange reserves and/or to solve short-term liquidity issues.

One form of cooperation that has been made, among others, is the Bilateral Swap Arrangement (BSA) with Japan to support the needs of potential and actual liquidity through establishment of crisis prevention and handling schemes. BSA is a cooperation for the exchange of United States (US) Dollar-denominated foreign reserves between Japan and Indonesia. This cooperation agreement was first signed on February 17th, 2003 and has been amended several times and extended. The latest contract extension was effective starting on December 12th, 2016 with a validity period of 3 years.

Intermediasi sektor keuangan 2016 memadai dan perlu peningkatan: Ketahanan industri perbankan tetap terjaga didukung oleh permodalan yang kuat serta terjaganya risiko-risiko utama antara lain risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar. Ketahanan permodalan yang kuat ditopang oleh rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* industri perbankan yang meningkat menjadi 22,69% di 2016, dari 21,16% di tahun sebelumnya jauh di atas batas minimum yang dipersyaratkan.

Berdasarkan intermediasi perbankan, pertumbuhan kredit industri perbankan mengalami perlambatan namun terdapat peningkatan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga menjadi 9,60% dari 7,26% di 2015. Peningkatan tersebut disebabkan penerimaan dana amnesti pajak oleh bank yang ditunjuk sehingga terjadi penurunan pada *loan to deposit ratio* (LDR) perbankan. Kredit industri perbankan melambat ke 7,86% (yoy) dari 10,45% di 2015. Ini disebabkan rendahnya permintaan terhadap kredit baru, yang diikuti tingginya tingkat kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (*Non performing loan*) tercatat sebesar 2,93% meningkat dari 2,49% pada tahun 2015. Risiko kredit ini terutama terjadi pada sektor pertambangan, pengangkutan dan perdagangan.

Likuiditas perbankan selama 2016 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yang khususnya terjadi di akhir tahun, terkait dengan peningkatan pertumbuhan bersih atau net-ekspansi keuangan pemerintah. Meski meningkat, likuiditas perbankan sempat mengalami tekanan pada periode pengurangan bersih atau net kontraksi keuangan pemerintah, misalnya ketika program *tax amnesty* dan meningkatnya kebutuhan uang kartal. Guna mengantisipasi tekanan likuiditas pada periode tekanan, perbankan melakukan perubahan pengelolaan likuiditasnya menjadi lebih antisipatif, seperti melakukan *shortening* atau penempatan yang lebih berjangka pendek di instrumen operasi moneter.

Financial sector intermediation in 2016 was adequate and requires further improvements: The banking industry's resilience was sustained by strong capital and well-managed substantial risks including credit risk, liquidity risk, and market risk. Strong capital resilience was supported by the *Capital Adequacy Ratio* of the banking industry, which increased to 22.69% in 2016, from 21.16% in the previous year, well above the minimum requirement.

In terms of banking intermediation, credit growth in the banking industry decelerated although Third Party Fund growth rose by 9.60% from 7.26% in 2015. The increase was attributable to the receipt of tax amnesty funds by appointed banks resulting in a decrease in banking *Loan-to-Deposit Ratio* (LDR). Banking industry's lending performance slowed to a growth of 7.86% (yoy), down from 10.45% in 2015. This was due to low demand for new loans, followed by high levels of caution by lending banks. Meanwhile, *Non-Performing Loans* ratio stood at 2.93%, up from 2.49% in 2015. Credit risk mainly occurred in the mining, transportation, and trading sectors.

Banking liquidity throughout 2016 increased, compared to the previous year, which mainly took place at the end of the year, due to the increase in net growth or the government's financial expansion. Despite the increase, banking liquidity was under pressure during the net reduction or the government's financial contraction period, such as during the tax amnesty program period and during the periods of increasing demand for cash. In order to anticipate liquidity pressures during high pressure periods, banks have adjusted their liquidity management to be more anticipatory, such as by shortening, or by shorter term placements in monetary operation instruments.

Selama semester kedua 2016, Industri Keuangan Non Bank khususnya Perusahaan Pembiayaan (PP) menunjukkan kinerja yang positif, jika dibandingkan dengan semester pertama tahun yang sama. Setelah mengalami penurunan pertumbuhan sejak semester kedua pada 2013 yang lalu, kinerja PP selama semester kedua 2016 mengalami perbaikan, baik dari sisi pembiayaan maupun pendanaan, meski masih menyisakan permasalahan peningkatan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)* dibanding semester pertama 2016. Disisi lain, terbukanya risiko dari valuta asing menurun seiring dengan terus menurunnya Utang Luar Negeri. Meningkatnya pembiayaan berdampak positif terhadap kinerja profitabilitas PP sebagaimana ditunjukkan oleh *Return on Assets* yang sedikit lebih tinggi dibandingkan semester pertama 2016.

Kebijakan Makroprudensial 2016 akomodatif:

Kebijakan makroprudensial diperlukan untuk melengkapi kebijakan moneter dalam perekonomian, yang semakin kompleks dan rentan terhadap berbagai gejolak, terutama dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan siklus perekonomian. Kebijakan makroprudensial penting untuk mengatasi potensi risiko sistemik, yaitu potensi instabilitas sebagai dampak dari gangguan yang menular pada sebagian atau seluruh sistem keuangan. Ini terjadi akibat interaksi beberapa faktor, yaitu ukuran, kompleksitas usaha, keterkaitan antar institusi dan/atau pasar keuangan, serta kecenderungan perilaku yang berlebihan dari institusi keuangan untuk menghadapi siklus perekonomian.

Bank Indonesia terus berupaya untuk mencegah timbul dan meluasnya risiko yang dapat mengganggu kestabilan sistem keuangan dengan melakukan surveilans dan asesmen makroprudensial. Hasil surveilans dan asesmen tersebut kemudian dituangkan menjadi kebijakan makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan kredit perbankan, dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan.

During the second half of 2016, the Non-Bank Financial Industry, particularly financing companies (PP), showed a positive performance, compared to the first half of the same year. After experiencing a decline in growth since the second semester of 2013, PP's performance in the second half of 2016 improved, both in terms of financing and funding, although Non-Performing Financing (NPF) increased compared to the first semester of 2016. On the other hand, the exposure of risk from foreign exchange decreased with the continuing decline of foreign debt. Increased financing had a positive impact on PP's profitability, as indicated by a slightly higher Return on Assets compared to the first semester of 2016.

The 2016 Macroprudential Policies were accommodating: Macroprudential policies are needed to complement monetary policies in the economy, which is becoming increasingly complex and vulnerable to fluctuations, especially for addressing issues related to economic cycles. Macroprudential policies are important to address potential systemic risks, namely potential instability as a result of disruptions transmitted to some parts of or the entire financial system. This may occur due to the interaction of several factors, namely size, business complexity, interconnectedness between institutions and/or financial markets, as well as excessive tendencies of financial institutions' behaviors when coping with the economic cycle.

Bank Indonesia strives to prevent the emergence and spreading of risks that may disrupt financial system stability by conducting surveillances and macroprudential assessments. The surveillance and assessment results are then made manifest in the macroprudential policies that seek to encourage economic growth via banking lending growth, while maintaining the financial system stability at all times.

Di 2016, kebijakan makroprudensial Bank Indonesia bersifat akomodatif dan bersinergi dengan bauran kebijakan moneter dan kebijakan sistem pembayaran dan pengedaran uang sebagai bagian dari upaya Bank Indonesia untuk menciptakan momentum pertumbuhan ekonomi. Kebijakan makroprudensial yang dikeluarkan berupa pelonggaran ketentuan perkreditan perbankan dan pembiayaan dari lembaga non-bank, penyesuaian jasa giro wajib minimum dalam pemenuhan kredit segmen usaha mikro, kecil-menengah serta penerbitan ketentuan kewajiban pembentukan cadangan modal tambahan yaitu *countercyclical buffer* sebagai respon Bank Indonesia terhadap perkembangan ekonomi dan timbulnya risiko sistemik dari pertumbuhan kredit.

Pelonggaran kredit perbankan dan pembiayaan non-bank: Kebijakan persyaratan uang muka bagi pinjaman barang tertentu, dengan rasio pinjaman terhadap nilai barang atau *Loan to Value (LTV)* serta rasio pembiayaan atau *Financing to Value (FTV)* pertama kali diterbitkan tahun 2012. Tujuannya adalah untuk mencegah dan mengurangi potensi risiko sistemik di sistem keuangan dan sebagai upaya perlindungan konsumen yang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dengan pengembang, khususnya dalam pembelian properti dengan mekanisme inden. Pada 2016, Bank Indonesia melakukan pelonggaran ketentuan LTV/FTV seiring dengan berlanjutnya perlambatan intermediasi perbankan. Penyempurnaan ketentuan LTV/FTV ini diharapkan dapat mendorong fungsi intermediasi perbankan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen.

Penyempurnaan ketentuan LTV/FTV ini mencakup i) perubahan rasio dan *tiering* LTV/FTV untuk kredit/pembiayaan properti untuk fasilitas ke-1, 2, 3 dan seterusnya; ii) Kredit/pembiayaan properti dengan mekanisme inden diperbolehkan hingga fasilitas kredit/pembiayaan ke-2, dengan pencairan bertahap; iii) *Top up* diperlakukan sebagai kredit/pembiayaan dengan fasilitas yang sama sepanjang

In 2016, Bank Indonesia's macroprudential policies were accommodating and in synergy with the mix of monetary policies, payment system policies, and money circulation policies, as part of Bank Indonesia's efforts to create an economic growth momentum. The macroprudential policies issued took the form of relaxation of the provisions for lending by banks and financing by non-bank institutions; adjustment of the minimum reserve requirement for the fulfillment of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) lending segment; as well as the issuance of additional capital reserve requirement—the countercyclical buffer—as Bank Indonesia's response to the latest developments of the economy and the emergence of systemic risk from lending growth.

Relaxation of banking lending and non-bank financing provisions: *The policy that set the amount of down payment (advance payment) for certain goods, with the Loan-to-Value (LTV) ratio and Financing-to-Value (FTV) ratio, was originally issued in 2012. The objective was to prevent and reduce potential systemic risks in the financial system resulting from excessive lending growth in the property and automotive sectors. This provision was also issued with an aim to protect consumers who find themselves in a unfavorable position vs. the developers, especially in the purchase of property with down payment mechanism. In 2016, BI again eased the LTV/FTV provisions in line with the continuing slowdown in banking intermediary performance. The enhancement of the LTV/FTV provision was expected to encourage banking intermediary function while maintaining the principles of prudence and consumer protection.*

These LTV/FTV provisions include: i) LTV/FTV ratio changes and tiering for property loans/financing for the first, second, third facilities, and so on; ii) Property loans/financing with down payment mechanism is permitted up to the second loan/financing facility, with gradual delivery of facility; iii) Top up is treated as a loan/financing of the same facility as long as the loan/financing quality is current; iv) LTV/FTV ratio

kredit/pembiayaan memiliki kualitas lancar; iv) Persyaratan pelonggaran rasio LTV/FTV akan didasarkan pada rasio NPL/NPF total kredit/pembiayaan secara net kurang dari 5% dan NPL/NPF dari KP/KP Syariah secara gros kurang dari 5%.

Pelonggaran syarat likuiditas perbankan: Bank Indonesia juga menyempurnakan ketentuan rasio pinjaman terhadap pendanaan atau *Loan to Funding Ratio* (LFR). Penyempurnaan kebijakan LFR yang dikaitkan dengan Giro Wajib Minimum (GWM) dilakukan dengan menambahkan komponen surat-surat berharga (SSB) yang diterbitkan oleh bank yang dapat digunakan dalam perhitungan GWM-LFR. SSB yang dapat diperhitungkan dalam GWM-LFR adalah dalam bentuk *Medium Term Notes*, *Floating Rate Notes*, dan obligasi, selain obligasi subordinasi. Dengan demikian, istilah LDR dalam ketentuan tersebut disesuaikan menjadi LFR. Sementara itu, untuk komponen Dana Pihak Ketiga mencakup giro, tabungan dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank.

relaxation requirements will be based on NPL/NPF ratio with total net lending/financing less than 5% NPL/NPF, and less than 5% for gross NPL/NPF of KP/KP Sharia.

Relaxation of banking liquidity requirements: *Meanwhile, Bank Indonesia also improved the regulation regarding the Loan-to-Funding Ratio (LFR). The enhancement of the LFR policy associated with the Minimum Reserve Requirement (GWM) was performed by adding the component of Securities issued by the bank (SSB) into the Loan-to-Deposit Ratio (LDR) calculation, resulting in the GWM-LDR figure. SSB that can be included in the GWM-LFR must be in the form of Medium Term Notes, Floating Rate Notes, or bonds, in addition to subordinated bonds. Thus, the terminology "LDR" in the regulation was accordingly adjusted to "LFR". Meanwhile, components of the Third Party Funds include demand deposits, savings, and time deposits, denominated in Rupiah and foreign currencies, but excluding interbank funds.*

GIRO WAJIB MINIMUM LOAN TO FUNDING RATIO (GWM LFR)

GWM LFR adalah simpanan minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK yang dihitung berdasarkan selisih antara LFR yang dimiliki oleh Bank dengan LFR target.

MINIMUM RESERVE REQUIREMENT LOAN-TO-FUNDING RATIO (GWM LFR)

GWM LFR is the minimum reserve requirement denominated in Rupiah that must be maintained by a bank in the form of a Demand Deposit Account balance at Bank Indonesia, amounting to a certain percentage of the DPK, calculated based on the difference between said bank's LFR and the target LFR.

Kebijakan GWM LFR juga digunakan untuk mendorong penyaluran kredit UMKM. Dalam penyempurnaan ketentuan GWM tahun 2015, yang mulai berlaku sejak 1 Agustus 2015, Bank Indonesia memperlonggar batas atas LFR dari 92% menjadi 94%, bagi bank yang memenuhi pencapaian persentase tertentu kredit UMKM lebih cepat dari batas waktu yang diberikan dan dengan kualitas kredit yang baik. Sebaliknya, bagi bank yang belum memenuhi target rasio kredit UMKM sesuai tahapan yang ditetapkan, akan dikenakan pengurangan jasa giro, yang mulai berlaku sejak 1 Februari 2016. Bagi Kantor Cabang Bank Asing dan bank campuran pemenuhan kredit UMKM tersebut dapat diganti dengan pemenuhan kredit ekspor non-migas.

Dalam rangka mengoptimalkan pelonggaran kebijakan penurunan suku bunga dan kebijakan penurunan GWM primer, Bank Indonesia melanjutkan penyempurnaan kebijakan makroprudensial pada tahun 2016 sehingga merupakan perubahan keempat atas ketentuan GWM yang telah dikeluarkan pada 2013 lalu. Ini dilakukan melalui peningkatan batas bawah LFR dikaitkan dengan GWM dari 78% menjadi 80%, yang mulai diberlakukan pada 24 Agustus 2016. Ini untuk meningkatkan pertumbuhan kredit serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bauran kebijakan moneter dan makroprudensial tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya untuk meningkatkan permintaan domestik guna terus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi dalam batasan yang masih terkendali.

Persyaratan modal tambahan sebagai cadangan terhadap siklus ekonomi: Di akhir 2015, Bank Indonesia menerbitkan kebijakan makroprudensial untuk mengatasi pertumbuhan kredit yang berlebihan (prosiklialitas) berupa penerapan kebijakan *Countercyclical Buffer* (CCB). Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah peningkatan risiko sistemik yang bersumber dari pertumbuhan kredit yang berlebihan dan untuk menyerap kerugian yang dihadapi perbankan melalui pembentukan tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*).

The GWM-LFR policy is further used to encourage lending to MSMEs. In the enhancement to the 2015 GWM regulations, starting on August 1st, 2015, Bank Indonesia increased the upper limit for the LFR from 92% to 94% for banks that have achieved a certain percentage of MSME lending faster than the given deadline with satisfactory lending quality. Conversely, banks that have not yet met the target MSME lending ratio will have their demand deposit service deducted, starting from February 1st, 2016. Foreign banks' branch offices and multinational banks may replace their obligatory fulfillment of MSME lending by lending for non-oil and gas export.

In order to optimize the relaxation of interest rate reduction policy and primary minimum reserve requirement reduction policy, Bank Indonesia continued to improve its macroprudential policies in 2016, making it the fourth amendment since the requirements were issued in 2013. This was done by increasing the lower limit of the LFR associated with the GWM from 78% to 80%, starting from August 24th 2016. This was done to boost lending growth and encourage national economic growth. The monetary and macroprudential policy mix were expected to strengthen the efforts to boost domestic demand and accelerate economic growth momentum within the controllable bounds.

Additional capital requirement as a reserve in anticipation of the economic cycle: At the end of 2015, Bank Indonesia issued a macroprudential policy to overcome excessive credit growth (*procyclicality*) in the form of the *Countercyclical Buffer* (CCB) policy. This policy was intended to prevent the rise of systemic risks stemming from excessive credit growth and to absorb the losses faced by banks through the establishment of additional capital as a buffer.

Kebijakan ini mewajibkan bank untuk membentuk tambahan modal yang berfungsi sebagai *buffer* pada periode ekspansi guna pengurangan pertumbuhan kredit. Sebaliknya, di periode kontraksi, penurunan/pelepasan tambahan modal CCB, yang telah dibentuk bank, akan mendorong penyaluran kredit perbankan serta menutupi kerugian yang mungkin timbul.

Besaran (*rate*) CCB yang berlaku di berbagai negara berkisar antara 0%-2,5% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko. Bank Indonesia kembali menetapkan CCB sebesar 0% pada Mei 2016, yang merupakan penetapan kedua sejak Desember 2015. Keputusan ini didasarkan pada indikator utama, yaitu *credit-to-GDP gap* yang tidak mengindikasikan adanya risiko penyaluran kredit yang berlebihan, serta dikonfirmasi oleh indikator pelengkap, yang terdiri dari indikator makroprudensial, indikator ekonomi, indikator perbankan, dan indikator harga aset yang menunjukkan bahwa saat ini perekonomian Indonesia masih berada dalam fase perlambatan. Belum perlunya bank untuk membentuk CCB, diharapkan dapat mendukung perbankan tetap menjalankan fungsi intermediasinya guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pembentukan Neraca Keuangan Nasional dan Regional: Untuk memperkuat asesmen risiko dan identifikasi ketidakseimbangan sistem keuangan sebagai masukan perumusan opsi kebijakan, Bank Indonesia melakukan penguatan asesmen makroprudensial melalui

This policy requires banks to establish additional capital to serve as a buffer during the expansion period, which impacts on the deceleration of lending. Conversely, during a period of economic contraction, the decrease/release of additional CCB capital, which banks have previously established, will boost banking lending and cover possible losses.

The prevailing CCB rates in various countries range from 0%-2.5% of the Risk-Weighted Assets. Bank Indonesia once again set the CCB at 0% in May 2016, the second time since December 2015. This decision was based on the main indicator, the credit-to-GDP gap that did not indicate excessive credit risk, and confirmed by complementary indicators, which consist of macroprudential indicators, economic indicators, banking indicators, and asset price indicators, showing that the current economy of Indonesia is still decelerating. The need for banks to establish additional capital, in the form of CCB, is expected to support the banks to maintain their intermediary function in order to support economic growth.

Establishment of National and Regional Balance Sheets: To strengthen risk assessment and identify imbalances in the financial systems as factors in the formulation of policy options, Bank Indonesia strengthened its macroprudential assessment

PROSIKLALITAS PERTUMBUHAN KREDIT

Penyaluran kredit yang berlebihan, pada saat perekonomian dalam periode ekspansi dikhawatirkan akan berdampak menimbulkan inflasi yang terlampaui tinggi dan sebaliknya, mengurangi penyaluran kredit yang berlebihan, pada saat perekonomian sedang dalam periode kontraksi, dikhawatirkan akan melemahkan pertumbuhan perekonomian.

CREDIT GROWTH PROCYCLICALITY

Excessive banking lending, when the economy is expanding, may result in high inflation, and conversely, reducing excessive banking lending while the economy is in contraction period will weaken economic growth.

NATIONAL BALANCE SHEET (NBS)

NBS adalah statistik yang menggabungkan secara sistematis data seluruh sektor dalam perekonomian, yaitu perbankan, institusi keuangan nonbank, korporasi, rumah tangga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, bank sentral dan sektor eksternal dalam satu kesatuan data terintegrasi yang menggambarkan aktivitas finansial antar sektor. Sedangkan *Regional Balance Sheet* (RBS) adalah statistik serupa tapi pada tingkat provinsi.

THE NATIONAL BALANCE SHEET (NBS)

NBS is a statistical figure that combines systematically all the data from various economic sectors, i.e. banking, non-bank financial institutions, corporations, households, central government, regional governments, central bank, and external sectors, all in one integrated data set that describes intersectoral financial activities. Meanwhile, the Regional Balance Sheet (RBS) is a similar statistical figure that applies on the provincial level.

penggunaan pendekatan *National Balance Sheet* (NBS) and *Regional Balance Sheet* (RBS). Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat pengukuran risiko di setiap elemen sistem keuangan serta memperkuat pemetaan vulnerabilitas dan sumber gangguan sistem keuangan daerah.

Bank Indonesia memelopori NBS dengan menggunakan data NBS terintegrasi, yang dapat digunakan untuk menganalisis ketidakseimbangan keuangan antarsektor. Selain pada level nasional, Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang menginisiasi penyusunan RBS.

RBS bertujuan untuk mengidentifikasi adanya ketidakseimbangan keuangan regional yang dapat berdampak terhadap perekonomian dan keuangan nasional. Penyusunan RBS ini sangat penting mengingat Indonesia terdiri atas banyak provinsi, yang memiliki kondisi dan karakteristik ekonomi dan keuangan berbeda-beda. Saat ini, penyusunan RBS telah mencakup 33 provinsi yang dapat memberikan gambaran kondisi perekonomian dan keuangan daerah. RBS juga dapat menggambarkan interaksi antarsektor dalam suatu regional, interaksi antarregional, dan interaksi suatu regional dengan sektor luar negeri. RBS akan menjadi salah satu masukan dalam penguatan fungsi Bank Indonesia di bidang *Regional Financial Surveillance*, penguatan fungsi *advisory* kepada pemerintah daerah, dan penguatan analisis spasial.

via the national balance sheet (NBS) and regional balance sheet (RBS) approach. The approach is expected to strengthen risk assessment in each element of the financial system and strengthen the mapping of vulnerabilities and sources of disturbances in the regional financial systems.

Bank Indonesia pioneered the use of NBS using the integrated NBS data that may be used to analyze intersectoral financial imbalances. In addition to the national level, Indonesia is also the first country in the world to initiate the formulation of the RBS.

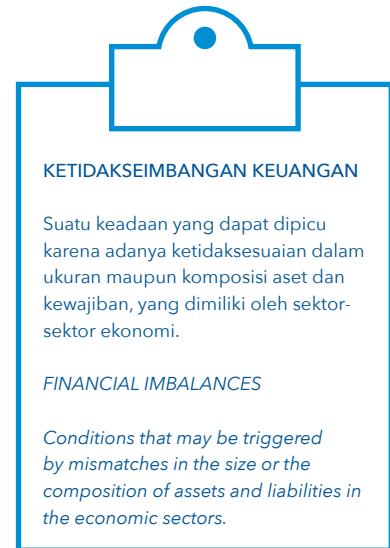
*The RBS is intended to identify imbalances in the regional financial systems that may affect the national economy and financial conditions. The formulation of the RBS is of paramount importance given that Indonesia consists of a large number of provinces, each with its own different economic and financial conditions and characteristics. Currently, the RBS has been formulated to encompass 33 provinces that may provide a snapshot of the economic and financial conditions of the regions. The RBS can also provide a picture of the intersectoral interactions within any given region, interregional interactions, and any region's interactions with foreign parties. RBS will be used as one of the many factors in the strengthening of Bank Indonesia's functions in the field of *Regional Financial Surveillance*, strengthening of the advisory function to the regional governments, and strengthening of spatial analyses.*

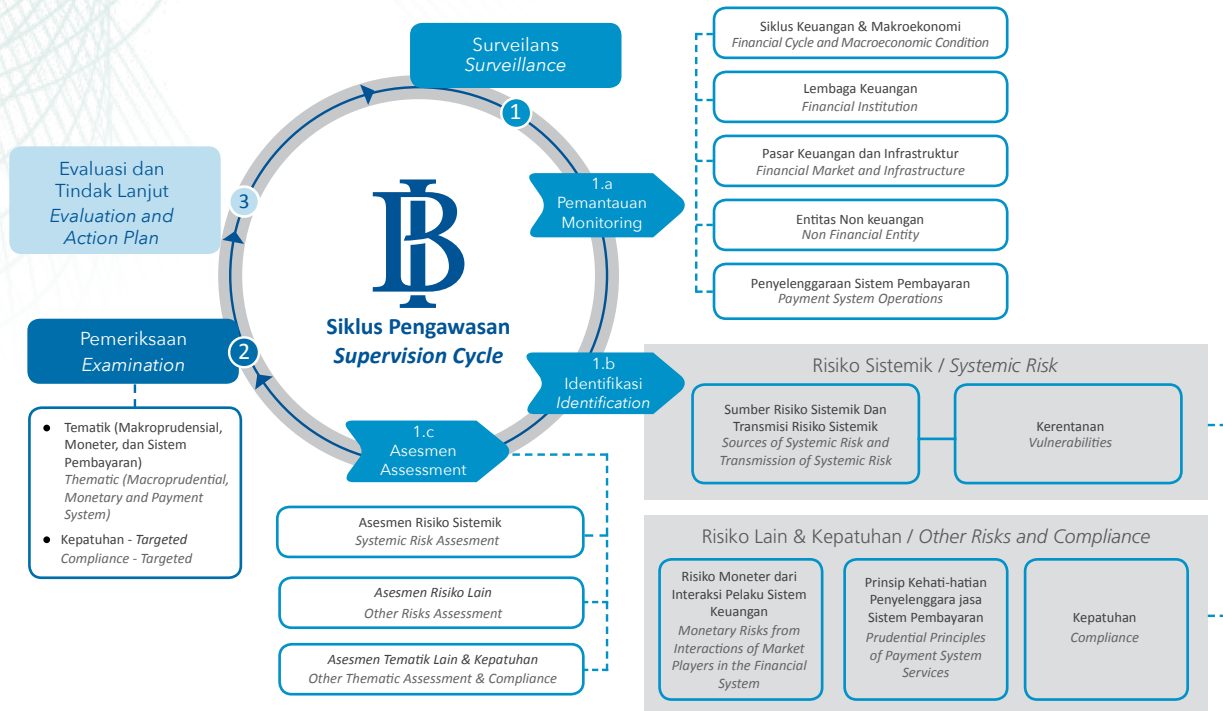
Penguatan pengawasan makroprudensial: Dalam rangka pendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia juga melakukan pengaturan dan pengawasan yang bersifat makro terhadap lembaga jasa keuangan serta memperhatikan asesmen potensi risiko sistemik industri keuangan, maupun *stress testing* ketahanan institusi keuangan. Pengaturan makroprudensial bertujuan agar fungsi dan kegiatan operasional lembaga jasa keuangan dapat mendukung kegiatan ekonomi makro secara berkelanjutan, stabil secara industri maupun sistem, serta seimbang secara sektor ekonomi dan kelompok masyarakat.

Selain itu, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengawasi bank atau lembaga jasa keuangan lainnya secara makro. Hal ini dilakukan melalui pengawasan (*surveilans*) terhadap kondisi sistem keuangan, antara lain, memantau, mengidentifikasi dan menganalisis risiko serta menilai sistem keuangan. Kegiatan *surveilans* dilakukan untuk mengidentifikasi sumber risiko sistemik dan ketidakseimbangan keuangan, yang dilakukan terutama kepada bank-bank besar. Pengawasan makroprudensial lebih fokus kepada sumber dan pemicu risiko sistemik terhadap komponen di sistem keuangan serta tidak ditujukan untuk menilai tingkat kesehatan bank secara individual.

Strengthening of macroprudential surveillance: *In order to support the execution of duties and authority of maintaining financial system stability, Bank Indonesia also regulates and conducts macroprudential surveillance on financial services institutions and pays attention to the assessment of financial industry's systemic risk potentials as well as conducts stress testing on the financial institutions' resilience. Macroprudential regulations are intended to ensure that the functions and operational activities of financial services institutions support the macroeconomic sustainability, stabilize the industries and systems, and balance the economic sectors and the components of the society.*

In fulfilling its supervisory function on a macro level, Bank Indonesia also conducts surveillance activities, among others, by monitoring, identifying, and analyzing risks and evaluating the financial systems. Surveillance is conducted to identify sources of systemic risks and financial imbalances, and is mainly performed on large banks. Macroprudential surveillance is more focused on the sources and triggers of systemic risks related to the components of the financial systems, and is not intended to evaluate individual banks' financial soundness level.





Infografis Kerangka Pengawasan Makroprudensial Bank Indonesia
Infographic Bank Indonesia Macroprudential Supervision Framework

Kebijakan ke depan akan mengoptimalkan bauran kebijakan guna menghadapi tantangan perekonomian domestik maupun global: Kebijakan moneter berupaya memelihara stabilitas makroekonomi dengan menambah fleksibilitas pengelolaan likuiditas bank. Selain itu kebijakan Bank Indonesia akan diarahkan agar memperkuat perkembangan ekonomi dan keuangan syariah serta pendalaman pasar keuangan. Dalam jangka menengah, stabilitas makroekonomi yang disertai stabilitas sistem keuangan yang terjaga akan mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkelanjutan.

Future policies will be optimizing a mix of policies in order to face challenges in the global and domestic economy: Monetary policies strive to maintain macroeconomic stability by increasing flexibility of managing banking liquidity. In addition, Bank Indonesia's policies will also be directed towards strengthening sharia financial and economic development and deepening of the financial markets. In the medium term, macroeconomic stability coupled with financial system stability will boost the economy in a sustainable manner.

PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Syariah yang konsisten: BI berupaya konsisten untuk menjaga perannya dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah. Langkah ini dimulai sejak proses pendirian Islamic Development Bank (IDB) tahun 1975, dimana Gubernur Bank Indonesia menjadi *alternate governor* Indonesia untuk IDB. Ini dilanjutkan dengan pendirian bank syariah pertama pada 1991, penyusunan Undang Undang Perbankan Syariah, hingga akhirnya fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan syariah beralih OJK pada 31 Desember 2013. Kewenangan utama Bank Indonesia, pasca pendirian OJK, adalah dalam bidang ekonomi moneter, pasar uang, makroprudensial dan sistem pembayaran. Dalam perkembangannya, Bank Indonesia juga berperan aktif dalam penyusunan *master plan* arsitektur keuangan syariah "Fajar Baru" serta kerjasama IDB dengan pemerintah RI, termasuk proses implementasi master plan dengan pendirian Komite Nasional Keuangan Syariah.

Pada 30 Maret 2016, Bank Indonesia membentuk Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah yaitu departemen khusus yang mengawal perencanaan dan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Bank Indonesia setelah Departemen Perbankan Syariah beralih ke OJK, sekaligus untuk memperkuat dan memastikan strategi maupun pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dijalankan secara konsisten, integratif, dan kolaboratif, baik di Bank Indonesia maupun secara nasional. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, antara lain, menyusun, mengembangkan, dan mengimplementasikan strategi dan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk di dalamnya upaya pendalaman pasar keuangan syariah, meningkatkan keterlibatan aktif Bank Indonesia dalam forum internasional syariah, termasuk kolaborasi dengan instansi/otoritas domestik lainnya, serta menginisiasi penyusunan database ekonomi dan keuangan syariah.

DEVELOPMENT OF SHARIA ECONOMY & FINANCES

Consistent Development of Sharia Economy & Finances: Bank Indonesia strives to consistently maintain its role in the development of Sharia economy and finances. This measure was initiated with the establishment of the Islamic Development Bank (IDB) in 1975, in which event the Bank Indonesia Governor became the alternate governor of Indonesia for IDB. This was continued with the establishment of the first sharia bank in 1991, the formulation of sharia banking laws, and finally the transition of the function for monitoring and regulating sharia banking from Bank Indonesia to the Financial Services Authority (OJK) as per December 31st, 2013. Bank Indonesia's main authority after the establishment of OJK thus lies in the monetary, money market, macroprudential, and payment systems aspects of the economy. In its ongoing development, Bank Indonesia has also played an active role in developing the sharia financial architecture masterplan "Fajar Baru" and in the cooperation between the IDB and the Indonesian government, including the processes related to the implementation of the masterplan and the establishment of the Sharia Financial National Committee.

On March 30th, 2016, Bank Indonesia established the Sharia Economic & Financial Department (DEKS), a special department tasked to guide the planning and development of sharia financial and economic programs at Bank Indonesia after the Sharia Banking Department was transferred to OJK, as well as to strengthen and ensure that the strategies and development of sharia economy and finances are pursued in a consistent, integrative, and collaborative manner, in Bank Indonesia as well as nationally. DEKS among others prepares, develops, and implements sharia economic and financial strategies and programs, including the deepening of sharia financial markets, increasing the active role of Bank Indonesia in sharia international forms, collaborating with various domestic institutions/authorities, and initiating the formulation of a sharia economic and financial database.

Dalam rangka pendalaman pasar keuangan syariah, Bank Indonesia melakukan sebagai berikut:

- Penerbitan pengaturan mengenai Transaksi Lindung Nilai Rupiah guna memitigasi risiko ketidakpastian pergerakan nilai tukar yang diperlukan pelaku ekonomi berbasis syariah, selain untuk menindaklanjuti fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami /Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar, juga merupakan dukungan Bank Indonesia terhadap industri keuangan syariah, terutama dalam ekspansi bisnis pembiayaan valas dengan mitigasi risiko yang terukur baik.
- Kegiatan sosialisasi Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) terkait transaksi repo syariah dengan instrumen sukuk dan *hedging* syariah kepada nasabah (non bank atau pelaku industri), khususnya pelaku industri halal, seperti restoran halal, travel syariah, hotel syariah, film Islam, kosmetik syariah, farmasi syariah, dan sekolah Islam. Sosialisasi ini diharapkan mencakup segmen pelaku hedging syariah dan repo syariah.
- Indonesia Islamic Global Market Association, dengan fasilitasi Bank Indonesia menerbitkan pedoman bertransaksi antarpelaku pasar keuangan syariah atau *Islamic Financial Market Code of Conduct* (iCOC) guna menciptakan tata kelola, manajemen, pengawasan yang baik, termasuk kepatuhan kepada prinsip-prinsip syariah. iCOC mencakup pedoman kepatuhan pelaku pasar keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah (fatwa DSN) dan peraturan otoritas pasar keuangan syariah (Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, dll), manajemen risiko secara umum, proses transaksi di pasar keuangan syariah, *personal conduct*, pemisahan kewenangan serta pengaduan dan arbitrase.

Bank Indonesia juga mengembangkan ekonomi dan keuangan sosial syariah, terkait zakat dan wakaf, antara lain, *pilot project* realisasi pemberian dana zakat produktif kepada usaha mikro di Jawa Barat dengan tujuan menciptakan basis debitur dengan mendorong peningkatan status para penerima zakat (*mustahik*) menjadi pemberi zakat (*muzakki*).

In order to deepen the sharia financial markets, Bank Indonesia has conducted the following:

- *Issued a regulation on Rupiah-denomination Hedging Transactions to mitigate the risk arising from uncertainties in the movement of exchange rates required by the sharia economic sector, in addition to responding to the fatwa of the National Sharia Board (DSN) on Sharia Hedging Transactions (al-Tahawwuth al-Islami or Islamic Hedging) on Foreign Exchange Rates. This is also a form of Bank Indonesia's support to the sharia financial industry, especially in the foreign exchange financing business expansion, with a relatively measurable risk mitigation.*
- *Disseminating activities of sharia interbank money market in relation to sharia repo using sukuk and sharia hedging instruments, to stakeholders (non-bank and industries), in particular stakeholders in the halal industries, such as halal restaurants, sharia travel agents, sharia hotels, Islamic films, sharia cosmetics, sharia pharmacies, and Islamic schools. This is expected to encompass all parties that may engage in sharia repo and hedging mechanisms.*
- *Indonesia Islamic Global Market Association, which is facilitated by Bank Indonesia issued the Islamic Financial Market Code of Conduct (iCOC) to prescribe the governance, management, supervision of, and compliance with, the sharia principles. The iCOC encompasses the guidelines for parties engaged in the sharia financial markets to comply with the sharia principles (fatwa of the DSN) and the regulations of the sharia financial market authorities (Bank Indonesia, Ministry of Finance, OJK, etc.), general risk management, transactional processes in the sharia financial markets, personal conduct, segregation of authorities, as well as complaints and arbitrage.*

Bank Indonesia has also developed sharia social economic and financial aspects related to zakat and wakaf, among others, the pilot project where productive zakat funding was awarded to microbusinesses in West Java aimed at creating a base of debtors by encouraging the upgrading of status of the zakat recipients (mustahik) to zakat



Ini diharapkan menjadi cikal bakal wirausaha baru, yang siap diakses sektor keuangan formal dan dalam jangka menengah- panjang diharapkan tercipta basis debitur yang lebih luas, sehingga tingkat konsentrasi debitur pada institusi keuangan syariah dapat terdiversifikasi dan selanjutnya akan meredam potensi risiko sistemik.

Beberapa kajian yang dilakukan oleh Bank Indonesia selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- Penelitian "Merancang Model-Model Wakaf Uang untuk *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)."
- Kajian Pengembangan Model Sukuk Linked Wakaf, Bank Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengembangkan dan merumuskan model sukuk *linked* wakaf untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf.
- Kajian Pendukung Pengaturan untuk Sertifikat Deposito Syariah (NCD syariah)
- Kajian Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat
- Kajian Aplikasi Model Sukuk Islamic Liquidity Management (IILM) untuk Pasar Sukuk Indonesia

donors (muzakki). This is expected to engender new entrepreneurial initiatives that can be readily accessed by the formal financial sector and in the medium to long term is expected to create a more extensive base of debtors so that the concentration of debtors' in the sharia financial institutions become more diversified, and thus reducing the systemic risk potentials.

Various reviews conducted by Bank Indonesia in 2016 include:

- *Research titled "Designing Money Wakaf Models for Baitul Maal wa Tamwil (BMT) and Development of Micro and Small Businesses".*
- *Development of Sukuk Linked Wakaf Models where BI cooperated with the Ministry of Finance and the Indonesian Wakaf Association (BWI) to develop and formulate sukuk linked wakaf models to optimize the utilization of wakaf-related assets.*
- *Supporting Research to the Regulations for Negotiable Certificate of Deposit (NCD) Sharia.*
- *Risk Management Research in Zakat Management.*
- *Research on Application of Islamic Liquidity Management Sukuk Model for Indonesian Sukuk Market.*

MEMPERKUAT SINERGI PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Strengthening the Synergy for Sharia Economic & Financial Development

Dalam rangka mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan sektor keuangan syariah untuk berkontribusi lebih signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional, Bank Indonesia terlibat aktif dengan berbagai otoritas dalam pembentukan komite nasional pengembangan keuangan syariah agar kebijakan dan implementasi pengembangan keuangan syariah nasional lebih sinergis dan terintegrasi. Pada 3 November 2016 telah ditandatangani Peraturan Presiden tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Komite berfungsi sebagai wadah untuk saling berkoordinasi, melakukan sinkronisasi dan menciptakan sinergi antar otoritas terkait dalam menyusun arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah. Tujuannya adalah untuk mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional. Komite ini dipimpin langsung oleh Presiden RI serta terdapat Dewan Pengarah KNKS yang beranggotakan 6 menteri dan 4 pimpinan otoritas/lembaga terkait, termasuk diantaranya adalah Gubernur Bank Indonesia.

Terkait dengan sektor keuangan sosial syariah, Bank Indonesia menginisiasi penyusunan *Zakat Core Principles* (ZCP), sebuah panduan bagi pengelolaan zakat secara efektif di forum internasional. bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Islamic Research and Training Institute-Islamic Development Bank (IRTI-IDB) dan negara-negara lainnya yang tergabung dalam International Working Group (IWG-ZCP), dan ZCP telah diluncurkan pada *World Humanitarian Summit of United Nations* di Istanbul, Turki, pada tanggal 23 Mei 2016. Bank Indonesia juga menginisiasi penyusunan *Waqaf Core Principles* (WCP) bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI), IRTI-IDB dan negara-negara lainnya yang tergabung dalam IWG-WCP.

Pada 2016 Bank Indonesia melakukan kerja sama dengan beberapa universitas seperti Universitas Padjadjaran, Universitas Airlangga dan Universitas

In order to strengthen, expand, and advance the development of the sharia economic and financial sector, so as to contribute more significantly to the national economic development, Bank Indonesia is actively involved with a number of authorities to establish a sharia financial development national committee, so that the policies and implementation of the national sharia financial development can be performed with greater synergy and in a more integrated manner. On November 3rd, 2016, the Presidential Decree on the Sharia Financial National Committee (KNKS) was signed. The Committee serves as a forum for mutual coordination, synchronization and create synergies among relevant authorities in formulating the direction of national development strategic policies and programs in the sharia financial sector. The aim is to accelerate, expand and advance the development of Islamic finance to support national economic development. The Committee was directly chaired by the President of the Republic of Indonesia, aided by the KNKS Steering Committee that consists of 6 ministers and 4 chairpersons of related authorities/institutions, including the Governor of Bank Indonesia.

In relation to the sharia social financial sector, Bank Indonesia initiated the formulation of the Zakat Core Principles (ZCP), a guideline for managing zakat effectively in the international forums, in collaboration with National Amil Zakat Association (BAZNAS), Islamic Research and Training Institute - Islamic Development Bank (IRTI-IDB), and countries that are members of the International Working Group (IWG-ZCP). The ZCP was launched at the World Humanitarian Summit of United Nations in Istanbul, Turkey, on May 23rd, 2016. Bank Indonesia also initiated the formulation of the Wakaf Core Principles (WCP) in collaboration with the Indonesian Wakaf Association (BWI), IRTI-IDB, and the countries that are members of the IWG-WCP.

In 2016, Bank Indonesia collaborated with several universities, such as, Padjajaran University, Airlangga University, and Indonesian Islamic University to



Islam Indonesia dalam penyusunan materi pengajaran modul ekonomi syariah. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi sumberdaya insani khususnya di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Bank Indonesia juga melakukan kegiatan Indonesia Shari'a Economic Festival (ISEF) yang ketiga kalinya dengan peserta sekitar 5.000 orang, dan Shari'a Fair yang dihadiri sekitar 11.600 pengunjung. ISEF 2016 dengan tema "Leading Rules in the Development of Islamic Economic and Finance to Achieve Prosperity of the Nation" pada 25 - 30 Oktober 2016. Dalam acara ini dilakukan pencaanangan Komitmen Bersama Akselerasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah antara Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Badan Ekonomi Kreatif, Komisi XI DPR RI, Wakil Gubernur Jawa Timur, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, BAZNAS, BWI, serta Pimpinan 17 Pondok Pesantren di Jawa Timur.

prepare teaching materials on sharia economy. This collaboration is expected to increase the competency of our human resource in sharia finance and economy.

Bank Indonesia also conducted the Indonesia Shari'a Economic Festival (ISEF) for the third time, attended by about 5,000 participants, and the Shari'a Fair, attended by about 11,600 participants. Themed "Leading Rules in the Development of Islamic Economic and Finance to Achieve Prosperity of the Nation", the ISEF 2016 took place at the Convention Hall of Grandcity Surabaya on 25 to 30 October 2016. This event hosted the enactment of the Joint Commitment for the Acceleration of Sharia Financial & Economic Development, between BI, the Coordinating Ministry of Economic Affairs, the Ministry of National Development Planning, the Ministry of Finance, LPS, Creative Economic Agency, Commission XI of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI), Vice Governor of East Java, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, BAZNAS, BWI, and leaders of 17 Islamic boarding schools in East Java.

PENDALAMAN PASAR KEUANGAN

Pendalaman Pasar Keuangan melalui optimalisasi peran pasar keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi pembiayaan pembangunan dan mitigasi risiko. Pasar uang berperan dalam menyediakan instrumen pengelolaan likuiditas jangka pendek di pasar keuangan, sekaligus sebagai poros yang menghubungkan antara pasar valas, pasar saham, dan pasar obligasi. Pasar uang mendukung terciptanya kurva imbal hasil efisien, yang dapat mendukung penurunan biaya pendanaan bagi penerbitan instrumen keuangan dari otoritas fiskal maupun korporasi. Sementara itu, pasar valas berperan penting dalam memitigasi risiko pergerakan nilai tukar melalui penyediaan instrumen lindung nilai (*hedging*), penyediaan likuiditas, serta pelaksanaan transaksi internasional.

DEEPENING OF FINANCIAL MARKETS

Deepening of Financial Markets through the optimization of financial markets' role to support a sustainable economic development has been performed by optimizing the function of development financing and risk mitigation. Money markets play a role in providing instruments for managing short-term liquidity in the financial markets, as well as serving as an axis that connects the foreign exchange markets, stock market, and bonds market. The money markets support the creation of an efficient return curve, which will help reduce cost of funding related with the issuance of financial instruments by fiscal authorities as well as by corporations. Meanwhile, the foreign exchange markets play an important role in mitigating the risks related to exchange rates via provision of hedging instruments, provision of liquidity, and international transactions.



Gambar 1. Segmen Pasar Keuangan
Picture 1. Segments in a Financial Market

Pengaturan pasar uang, pasar valas, pasar saham dan pasar obligasi di Indonesia dilakukan oleh beberapa otoritas. Pasar uang dan pasar valas berada dibawah kewenangan Bank Indonesia, sedangkan pasar saham dan pasar obligasi korporasi berada dalam kewenangan OJK dan selanjutnya pasar obligasi

The regulation over money markets, foreign exchange markets, stock market and bonds market in Indonesia is performed by a number of authorities. The money markets and foreign exchange markets are within the scope of Bank Indonesia's authority, while the stock market and the corporate bonds market are within the

pemerintah berada dalam kewenangan Kementerian Keuangan. Untuk itu diperlukan kerja sama yang baik lintas otoritas dalam mengembangkan pasar keuangan agar dapat berjalan searah dan dapat berperan lebih efektif dalam pembiayaan pembangunan.

Akselerasi pengembangan pasar keuangan melalui 7 ekosistem. Pertama, memperbanyak keragaman instrumen pasar keuangan agar lebih dalam dan efisien, termasuk memperkaya instrumen pengelolaan risiko (*hedging instrument*) dan instrumen pasar uang. Kedua, memperkuat basis investor domestik, baik investor institusional, seperti dana pensiun dan asuransi, maupun investor ritel. Ketiga, penguatan peran lembaga perantara di pasar keuangan (*primary dealer/brokers*) dalam meningkatkan likuiditas dan efisiensi transaksi di pasar keuangan. Keempat, pengembangan infrastruktur pasar keuangan untuk meningkatkan volume dan menurunkan biaya transaksi seperti *electronic trading platform* (ETP), sentralisasi kliring dan penjaminan (*Central Clearing Counterparty/CCP*), penatausahaan surat berharga (*custody*), dan otomasi proses settlement yang terintegrasi dan efisien. Kelima, penguatan kerangka pengaturan, dimana Bank Indonesia secara bertahap dan terukur mengeluarkan ketentuan tentang instrumen derivatif untuk memenuhi kebutuhan *hedging* dan menampung dana-dana dari luar negeri. Keenam, meningkatkan kredibilitas *benchmark rate* pasar keuangan antara lain JIBOR, JISDOR, dan BI 7-Day Reverse Repo Rate. Ketujuh, koordinasi dan harmonisasi kebijakan antara otoritas yang berwenang di Indonesia.

Komitmen Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan mengembangkan pasar keuangan nasional melalui Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK). Keterkaitan wewenang antara otoritas terkait memberi tantangan tersendiri dalam mewujudkan pasar keuangan yang dalam, likuid, inklusif dan efisien. Untuk menyatukan misi, visi, dan prioritas antar otoritas, pada 8 April 2016 ketiga otoritas diatas menandatangani Nota Kesepahaman tentang Koordinasi dalam rangka Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan Untuk Mendukung Pembiayaan Pembangunan Nasional. Ruang lingkup kesepahaman ini meliputi pembentukan FK-PPPK; kerja sama perencanaan dan percepatan

scope of the OJK's authority, and the government bonds market is under the remit of the Ministry of Finance. Therefore, a strong cooperation between each authority is of paramount importance in order to successfully develop the financial markets in a more effective alignment with the overarching target of development financing.

Acceleration of financial market development through seven ecosystems. First: Diversifying the varieties of financial market instruments to allow deeper and more efficient processes, including diversifying hedging instruments and money market instruments. Second: Strengthening the base of domestic investors, both institutional investors such as pension funds and insurance companies, as well as retail investors. Third: Strengthening the role of intermediary institutions in the financial markets (*primary dealers/brokers*) in increasing liquidity and transactional efficiency in the financial markets. Fourth: Developing financial market infrastructure to expand the volume and reduce transactional fees, such as *electronic trading platform* (ETP), *Central Clearing Counterparty* (CCP) for clearing and guarantees, administration and custody of securities, and integrated and efficient automation of settlements. Fifth: Strengthening the regulatory framework, whereby BI gradually and in a measured manner issue regulations on derivative instruments to fulfill hedging needs and to receive overseas funds. Sixth: Increasing the credibility of the financial markets' benchmark rates, among others JIBOR, JISDOR, and BI 7-Day Reverse Repo rates. Seventh: Coordinating and harmonizing the policies between the authorities in Indonesia.

The commitment of Bank Indonesia, the Ministry of Finance, and the OJK to developing the national financial markets through the Financial Market Development Financing Coordination Forum (FK-PPPK). The linkage of authority between relevant authorities poses a certain challenge to the achievement of a vision of a deep, liquid, inclusive, and efficient financial market. To unify the missions, visions, and priorities of these authorities, on April 8th, 2016 the abovementioned three authorities signed a Memorandum of Understanding on the Coordination for Financial Market Deepening and Development to Support the Funding for National Development. The scope of this MoU encompasses the establishment of the FK-PPPK; cooperation in the planning and acceleration

implementasi kebijakan terkait; dan pertukaran data dan informasi. Dari forum diharapkan konsep Strategi Nasional Pengembangan Pasar Keuangan dapat terwujud, yang akan menjadi rujukan dalam merumuskan dan implementasi kebijakan nasional.

Beberapa kebijakan Bank Indonesia dalam mengembangkan pasar keuangan selama 2016, antara lain:

- 1) **Kebijakan Pengaturan di Pasar Uang:** Untuk meningkatkan tata kelola dan mitigasi risiko di pasar uang, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pasar Uang sebagai pedoman bagi pelaku pasar dalam bertransaksi di pasar uang. Ketentuan tersebut mencakup, antara lain, karakteristik instrumen pasar uang, penerapan manajemen risiko, serta prinsip kehati-hatian dan peningkatan integritas pelaku pasar dalam bertransaksi di pasar uang. Sebagai tindak lanjut, Bank Indonesia tengah mempersiapkan ketentuan terkait instrumen baru, seperti *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD) dan *Commercial Paper* (CP).
- 2) **Pengembangan Pasar Repo:** Bank Indonesia memfasilitasi agar pelaku pasar, terutama perbankan, dapat bertransaksi *Repurchases Agreement* (Repo) dengan mengadopsi kontrak *Global Master Repo Agreement* (GMRA). Sejalan dengan implementasi *BI 7-day Reverse Repo Rate* sebagai suku bunga kebijakan, Bank Indonesia secara aktif mendorong pelaku pasar, khususnya perbankan, untuk melakukan transaksi Repo. Berbeda dengan transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) yang bersifat tanpa jaminan, transaksi Repo bersifat dengan jaminan karena menggunakan surat berharga sebagai jaminan dukungan atau *underlying* transaksi. Transaksi repo diharapkan menjadi solusi permasalahan segmentasi, yang menjadi salah satu kendala pengembangan pasar uang. Dengan ini risiko kredit yang timbul dari pelaksanaan transaksi dapat diminimalkan dengan adanya *collateral*. Selama 2016, tercatat 74 bank telah menandatangani kontrak GMRA Indonesia, dan 44 bank diantaranya telah bertransaksi di pasar Repo. Volume rata-rata harian repo meningkat lebih dari dua kali lipat dari Rp412 miliar, pada semester pertama 2016, menjadi Rp1.064 miliar, pada akhir 2016.

of related policies' implementation; and exchange of data and information. From this forum it is expected that the National Strategy for Financial Market Development can be created, which will then serve as a reference in the formulation and implementation of national policies.

Bank Indonesia implemented a number of policies in 2016 aimed at developing the financial markets in 2016, among others:

- 1) **Money Market Regulatory Policies:** *To enhance governance and risk mitigation in the money markets, Bank Indonesia issued the Bank Indonesia Regulation on Money Markets to serve as a guideline for performing money market transactions. The regulation covers, among others, characteristics of money market instruments, risk management implementation, principle of prudence, and enhancement of integrity of all parties engaged in money market transactions. As a follow up, Bank Indonesia is drafting a regulation related to new instruments, such as Negotiable Certificate of Deposit (NCD) and Commercial Paper (CP).*
- 2) **Development of Repo Market:** *Bank Indonesia facilitates parties in the market, especially the banking industry, to perform transactions of Repurchases Agreement (Repo) by adopting the Global Master Repo Agreement (GMRA) contract. In line with the implementation of BI's 7-Day Reverse Repo rate as the policy interest rate, Bank Indonesia actively encourages all parties in the market, especially the banking industry, to perform Repo transactions. In contrast to the Interbank Money Market (PUAB) transactions that are uncollateralized, Repo transactions are collateralized, as they use securities as collateral as underlying instrument for the transactions. Repo transactions are expected to be the solution to issues in segmentation, which currently undermine the development of money markets. With it, the credit risk arising from transactions can be minimized with the availability of collaterals. In 2016, 74 banks signed the GMRA Indonesia contract and 44 banks performed transactions in the Repo market. The daily average of repo transactions in rose by more than twofold, from Rp412 billion in the first semester of 2016 to Rp1,064 billion by the end of 2016.*

- 3) **Penguatan kredibilitas JIBOR:** Bank Indonesia meningkatkan penggunaan JIBOR sebagai suku bunga acuan di pasar uang. Penyempurnaan dilakukan dengan memperpanjang periode (*window*) mekanisme kuotasi yang dapat ditransaksikan (*tradable*), memperpanjang tenor untuk menciptakan likuiditas dalam periode (*term*) yang lebih panjang, serta meningkatkan jumlah nominal yang dapat ditransaksikan. Ini untuk meningkatkan likuiditas dan frekuensi perdagangan sehingga JIBOR lebih sering dipakai sebagai suku bunga acuan di pasar uang.
 - 4) **Penguatan Infrastruktur Pasar Uang Melalui Penyempurnaan Sistem Transaksi:** Pengembangan infrastruktur ini diawali dengan melakukan analisis dan pengembangan *Central Counterparty Clearing*. Hal ini untuk meminimalkan risiko transaksi di pasar keuangan dengan mencegah kegagalan pelaksanaan/ penyelesaian transaksi (*default*). Kegagalan ini dapat menyebabkan dampak sistemik dan mencegah penerapan margin tarif dalam skema margining rule yang diterapkan negara maju.
 - 5) **Perluasan instrumen transaksi valas melalui instrumen call spread option:** Upaya memitigasi risiko dengan memperkaya ragam instrumen *hedging* (lindung nilai) dilakukan melalui penerbitan peraturan yang merelaksasi instrumen *structured product*. Pasca krisis keuangan 1998, penggunaan instrumen *structured product* dibatasi untuk prinsip kehati-hatian. Sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan pasar, Bank Indonesia memberikan pengecualian untuk beberapa jenis transaksi *structured product*, namun tetap dibatasi agar tidak menjadi instrumen spekulasi. Salah satu pengecualian dimaksud adalah jenis transaksi *call spread option*. Relaksasi ketentuan ditujukan untuk mendorong transaksi lindung nilai atas eksposur valas, sekaligus mendukung ketentuan yang mewajibkan perusahaan domestik melakukan lindung nilai atas eksposur kewajiban dalam valasnya, di pasar domestik. Transaksi *call spread option* wajib didasari oleh kebutuhan nyata atau adanya *underlying* transaksi, agar tidak menjadi instrumen spekulasi.
- 3) **Strengthening of JIBOR's Credibility:** Bank Indonesia is enhancing the use of JIBOR as the reference interest rate in the money markets. The enhancement was done by lengthening the window for tradable quotation mechanism, extending the tenor for allowing for liquidity in the longer term, and increasing the nominal amount that can be involved in the transactions. As the purpose is to increase liquidity and frequency of trading, JIBOR is more frequently used as the reference interest rate in money markets.
 - 4) **Strengthening of Money Market Infrastructure through Enhancement of Transactional Systems:** The development of such infrastructure was begun by performing analysis and development of Central Counterparty Clearing. This is to minimize the risk of transactions in financial markets by preventing default of transaction settlement. Defaults may result in a systemic domino effect and prevent the application of margin in the margining rule scheme implemented by advanced economies.
 - 5) **Expansion of foreign exchange transaction instruments via call spread option instrument:** To mitigate risk, hedging instruments have been diversified through the issuance of a regulation that relaxed the structured product instruments. Post the 1998 financial crisis, the use of structured product instruments was limited for the sake of the prudential principles. In line with the market needs and developments, Bank Indonesia allowed the exception for the transactions of certain structured products, albeit still limiting the scope to ensure that these instruments are not utilized for speculative purposes. One of the exceptions is the call spread option transaction. The relaxation of provisions was intended to boost foreign exchange hedging transactions, while also supporting the provisions that oblige domestic companies to hedge against exposure to liabilities in foreign currencies, in the domestic market. The call spread option transaction must have real underlying instrument so as not to be used for speculative purposes.

Pembentukan Central Clearing Counterparty (CCP) di Indonesia. Krisis keuangan global memberikan pelajaran mengenai perlunya pengelolaan *counterparty credit risk* dan transparansi di pasar *Over The Counter* (OTC Derivatif) untuk mengurangi dampak sistemik akibat kegagalan *counterparty*. Krisis juga mendorong perlunya analisis untuk mencari lembaga/institusi yang dapat mengurangi dampak negatif dari krisis di masa datang.

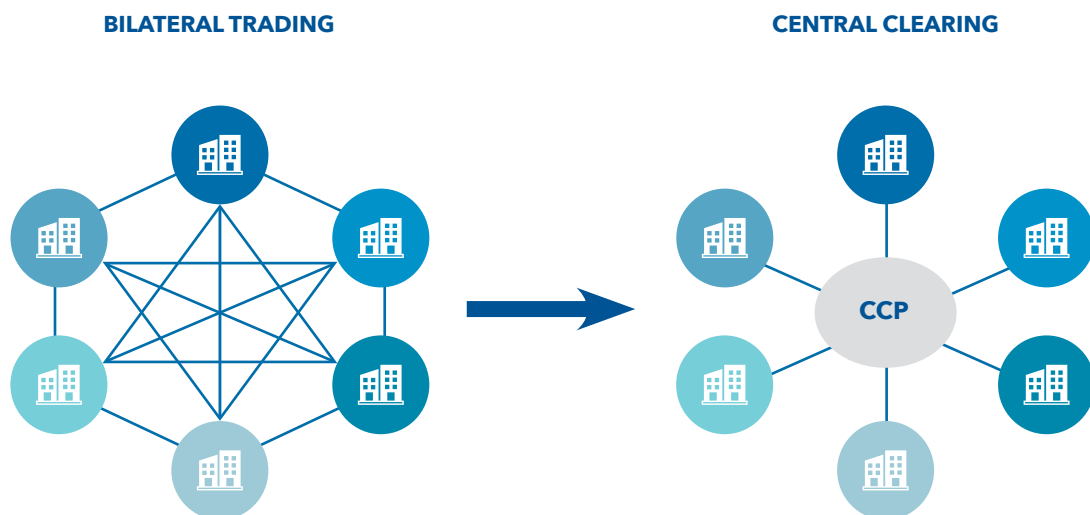
Pada Juli 2010, terdapat beberapa proposal untuk memitigasi risiko krisis di masa datang digabung dalam legislasi di Amerika Serikat terkait The Dodd-Frank Act, khususnya yang mewajibkan transaksi OTC Derivatif dilakukan melalui suatu lembaga kliring yang disebut CCP. CCP adalah lembaga yang melakukan proses kliring dan penjaminan transaksi antar pelaku pasar. CCP melakukan proses novasi, yakni pengambilalihan hak dan kewajiban atas transaksi yang dilakukan antar pelaku pasar, sehingga CCP merupakan pembeli bagi setiap penjual dan penjual bagi setiap pembeli.

Mekanisme novasi memitigasi risiko interconnectedness dan menyederhanakan eksposur bilateral kepada beberapa pihak lawan menjadi satu net exposure kepada CCP.

Establishment of the Central Clearing Counterparty (CCP) in Indonesia. The global financial crisis gave a lesson on the need for managing *counterparty credit risk* and transparency in the *Over The Counter* (OTC) Derivatives market, to dampen the systemic effects arising from *counterparty defaults*. The crisis also brought about the need of analyses to seek institutions that may reduce the negative effects of subsequent future crises.

In July 2010, various proposals to mitigate future crises were included in the United States legislation called the Dodd-Frank Act, in particular obliging OTC Derivative transactions to be performed via a clearing institution called the CCP. The CCP is an institution that conducts the processes of clearing and providing guarantee for transactions between parties in the market. The CCP conducts a novation process of acquisition over rights and liabilities for transactions conducted amongst market participants, thereby the CCP is a buyer for each seller and a seller for each buyer.

The novation mechanism mitigates interconnectedness risk and simplify bilateral exposure to a number of opponents into the CCP as one net exposure.



Gambar 2. Mekanisme Central Clearing Counterparty (CCP)
Picture 2. Central Clearing Counterparty Mechanism

Secara umum keberadaan CCP berfungsi sebagai:

- (i) Penyelenggara Kliring, dimana CCP melakukan multilateral *netting* dengan melakukan perhitungan bilateral net position atas setiap anggota CCP sehingga terdapat multilateral net position atas seluruh anggota CCP. Dengan adanya proses novasi, transaksi beralih dan menjadi tanggung jawab CCP;
- (ii) Penjamin, yaitu CCP memberikan jaminan atas penyelesaian kontrak yang masih outstanding dan melakukan *collateral management*, penilaian *mark-to-market* atas kontrak derivatif, margin management, dan evaluasi eksposur atas para anggota CCP;
- (iii) Pengelola Risiko Pasar Keuangan, dimana CCP dapat mengurangi risiko sistemik dengan membatasi eksposur risiko agar tidak terlalu besar, mengurangi *interconnectedness*, serta memiliki instrumen untuk mitigasi jika terjadi *default*.

Keberadaan CCP di Indonesia dapat mengurangi risiko *counterparty*, menjadi solusi atas segmentasi pelaku pasar serta meningkatkan efisiensi transaksi. Untuk itu, Bank Indonesia berkoordinasi dengan otoritas terkait lain untuk mengembangkan CCP di Indonesia. Hal ini juga sebagai wujud pemenuhan komitmen Indonesia terhadap rekomendasi *Financial Stability Board*.

In general, the CCP runs the functions as:

- (i) Administrator of Clearing, whereby the CCP conducts multilateral netting by calculating the bilateral net position of each member of the CCP, so the multilateral net position of all members of the CCP is obtained. With the novation process, the transactions are transferred to and thus become the responsibility of the CCP;*
- (ii) Guarantor, whereby the CCP provides guarantee for the settlement of outstanding contracts and performs collateral management, evaluation of mark-to-market for derivative contracts, margin management, and evaluation of exposure of each member of the CCP;*
- (iii) Financial Market Risk Manager, whereby the CCP reduces systemic risks by limiting risk exposure at a manageable level, reducing interconnectedness, and possessing instruments for mitigation should a default occur.*

The presence of the CCP in Indonesia can be the solution to the segmentation of parties in the market, reduce counterparty risk, and increase efficiency of transactions. For that matter, Bank Indonesia coordinates closely with other related authority to develop CCP in Indonesia. This also shows a manifestation of Indonesia's commitment to the recommendation from Financial Stability Board's.

MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN DAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Maintaining the Continuity of the Payment System and the Effectiveness of Rupiah Currency Management



Memonitor Proses Kliring, Ruang Operasional Kliring
Monitoring Clearing Process, Clearing Operational Room

Bank Indonesia terus berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kelancaran, keamanan, keandalan dan efisiensi sistem pembayaran serta pengelolaan uang Rupiah yang sesuai, tepat waktu dan layak edar. Berbagai upaya dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mengembangkan dan memperkuat layanan sistem pembayaran Indonesia. Disamping itu, Bank Indonesia juga turut aktif dalam implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Di sisi pengelolaan uang Rupiah, Bank Indonesia terus mengoptimalkan upaya untuk memenuhi kebutuhan uang yang layak edar.

SISTEM PEMBAYARAN

Menguatkan layanan Sistem Pembayaran: Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (Sistem BI-RTGS) merupakan layanan transfer dana elektronik seketika. Sejak dimulai pada 17 November 2000,

Bank Indonesia continues to commit in maintaining and improving the smooth, safe, reliable and efficient payment system as well as timely and feasible management of Rupiah distribution. Various efforts were undertaken by Bank Indonesia in developing and strengthening Indonesia's payment system services. In addition, Bank Indonesia is also actively involved in the implementation of the National Strategy for Inclusive Finance. On the other side of the money circulation management, Bank Indonesia continues to optimize efforts to meet the needs of decent circulation money.

PAYMENT SYSTEM

Strengthening Bank Indonesia's Payment System services: The Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement System* (BI-RTGS System) is a real-time electronic data transfer service. Since the beginning

BI-RTGS berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran bernilai besar yaitu transaksi Rp100 juta ke atas dan bersifat segera. Di 2016, sistem BI-RTGS Generasi II (Gen II) mampu menyelesaikan transaksi mencapai 7,6 juta transaksi dengan nilai nominal sebesar Rp111,9 ribu triliun. Dibandingkan tahun sebelumnya, volume dan nilai transaksi BI-RTGS Gen II mengalami penurunan, masing-masing sebesar 35,0% dan 0,8%. Penurunan ini karena adanya kebijakan peningkatan pembatasan transaksi (maksimum Rp500 juta) melalui sistem BI-RTGS Gen II. Setelah implementasi BI-RTGS Gen II berjalan lancar, pada Juni 2016 pembatasan transaksi BI-RTGS Gen II ditetapkan kembali ke batas semula (maksimum Rp100 juta). Penurunan transaksi di sistem BI-RTGS Gen II berdampak terhadap kenaikan transaksi sistem pembayaran retail yang diselenggarakan BI melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Dengan kebijakan pembatasan di sistem BI-RTGS Gen II terjadi perpindahan dana transaksi ke SKNBI. Sepanjang 2016, terjadi kenaikan transaksi SKNBI mencapai 124,5 juta transaksi, dengan nilai sebesar Rp4,1 triliun atau meningkat, masing-masing sebesar 9,7% dan 28,5%.

Dalam mendukung kelancaran penatausahaan Surat Berharga Bank Indonesia dan Surat Utang Negara, Bank Indonesia juga memastikan sistem Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS) berjalan baik. Sepanjang tahun 2016, sistem BI-SSSS dapat menyelesaikan transaksi surat berharga sebesar 289,1 ribu transaksi dengan nilai Rp52,5 ribu triliun. Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan transaksi surat berharga, baik volume maupun nilai, masing-masing mencapai 57,4% dan 50,4%. Meski kenaikan transaksi cukup signifikan, namun secara teknis operasional, sistem BI-SSSS tetap berjalan dengan baik dan lancar.

Untuk menjaga dan meningkatkan layanan sistem pembayaran sepanjang tahun 2016, Bank Indonesia secara periodik melakukan uji coba *back up* sistem dan audit terhadap jaringan. Selain itu, untuk mendukung kebijakan pengampunan pajak Bank Indonesia melakukan perpanjangan waktu (*window time*) sistem BI-RTGS untuk memberikan keleluasan

of its service on the 17th of November 2000, BI-RTGS has played an important role in the settlement of payment transaction activities, particularly for high value payment transactions covering above Rp100 million urgent transactions. In 2016, BI-RTGS Gen II processed 7.6 million transactions with nominal value of Rp111.9 thousand trillion. Compared to the previous year, BI-RTGS Gen II's total transaction volume and value declined by 35.0% and 0.8% respectively. This decline was attributed to a policy that increases the transaction cap through BI-RTGS Gen II to a maximum of Rp500 million. After the successful implementation of BI-RTGS Gen II, starting in June 2016 transaction capping of BI-RTGS Gen II is set to its previous limit (maximum Rp100 million). The decline in BI-RTGS Gen II transactions has generated higher retail payment system activities through Bank Indonesia National Clearing System (SKNBI). The application of the capping policy for BI-RTGS Gen II shifted fund transactions to SKNBI. During 2016, SKNBI transactions increased to 124.5 million transactions, with nominal value reaching Rp4.1 trillion, growing by 9.7% and 28.5% respectively.

To support the administration of Bank Indonesia Securities and Government Bonds, Bank Indonesia strives for the smooth operation of its Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System (BI-SSSS). During the course of 2016, BI-SSSS served a total of 289.1 thousand securities transactions with transaction value reaching Rp52.5 thousand trillion. Compared to the previous year, total securities transaction volume and value increased by 57.4% and 50.4% respectively. Despite significant transaction increase, technically BI-SSSS continued to operate smoothly and reliably.

To maintain and improve the payment system service in 2016, Bank Indonesia conducted periodic back up system trials and network audits. On top of that, to support the Government's tax amnesty policy, Bank Indonesia has extended the window time of BI-RTGS to provide more time flexibility for taxpayers. Window time extensions were implemented on September

waktu bagi pembayaran pajak. Perpanjangan *window time* dilakukan pada tanggal 29 dan 30 September 2016, dengan durasi selama 60 menit dan 300 menit. Selain itu ada tambahan pembukaan layanan pada 31 Desember 2016.

Mengembangkan Sistem Pembayaran: Pada 2 Mei 2016, Bank Indonesia meningkatkan layanan SKNBI Generasi II dengan mengimplementasikan fitur *bulk payment*. Penambahan fitur ini dalam SKNBI terdiri dari Layanan Pembayaran Reguler (kredit) dan Layanan Penagihan Reguler (debit). Inisiatif ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran yang dilakukan secara berkala secara mudah dan efisien. Volume transaksi *bulk payment* SKNBI tahun 2016 tercatat sebesar 104.530 transaksi dengan nominal mencapai Rp1.078,27 milyar. Fitur ini umumnya dimanfaatkan untuk pembayaran gaji karyawan serta bantuan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah daerah.

Sepanjang 2016, Bank Indonesia melakukan pengembangan terhadap Sistem Bank Indonesia Government electronic Banking (BIG-eB) yang meliputi:

- (i) Perluasan fitur transaksi interkoneksi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Kementerian Keuangan, antara lain: transfer valuta asing, kliring dan *future date*;
- (ii) Penyediaan fitur informasi kurs khusus secara elektronik untuk mendukung kebijakan penerapan kurs khusus transaksi valuta asing Kemenkeu;
- (iii) Penambahan fitur pembatalan transaksi untuk mendukung pelaksanaan *Business Contingency Plan* layanan perbankan; dan (iv)
- (iv) Implementasi infrastruktur *Data Center* baru dan *Data Recovery Center*.

Kedepan, bisnis layanan jasa perbankan dan Sistem BIG-eB akan dikembangkan secara komprehensif melalui pengembangan *Core Banking System* Bank Indonesia.

29th and 30th, 2016 with 60 minutes and 300 minutes extensions respectively. Service extensions were also implemented during December 31st, 2016.

Developing Bank Indonesia's Payment System: On May 2nd, 2016, Bank Indonesia has increased the service of SKNBI Generation II through the implementation of *bulk payment* feature. The new feature of SKNBI consists of Regular Payment (credit) and Regular Billing (debit) Services. This initiative was launched to meet public needs for a convenient and efficient periodic payment service. During 2016, total SKNBI *bulk payment* transaction volume was recorded at 104,530 transactions, with transaction value reaching Rp1,078.27 billion. This feature is mainly used to facilitate payroll payments, as well as Regional Budget assistance and realization by regional governments.

During 2016, Bank Indonesia conducted the following development initiatives for its Bank Indonesia Government-electronic Banking (BIG-eB) System:

- (i) Extension of interconnection transaction feature for the Ministry of Finance's State Budget and Treasury System, covering: foreign currency transfers, clearing and *future date*;
- (ii) Electronic special rate information feature to support the implementation of policy on special rates for the Ministry of Finance's foreign currency transactions;
- (iii) Additional feature for transaction cancellations to support the implementation of *Business Contingency Plan* for banking services; and
- (iv) Implementation of a new *Data Center* infrastructure and *Data Recovery Center*.

Going forward, the banking service business and BIG-eB system will be developed comprehensively through the development of Bank Indonesia's *Core Banking System*.

Bank Indonesia mendorong penggunaan Central Bank Money (CeBM): CeBM merupakan sistem setelmen atau penyelesaian dana yang dilakukan dengan menggunakan dana pada rekening giro di bank sentral. Satu prinsip yang harus dipenuhi menurut *Principles for Financial Market Infrastructures*, yang ditetapkan oleh Bank for International Settlement dan International Organization of Securities Commissions, adalah penyelenggaraan setelmen menggunakan rekening giro pada bank sentral (CeBM) apabila memungkinkan dan tersedia. Bank Indonesia mendorong penggunaan CeBM untuk pengiriman dana subscriptions transaksi reksadana melalui Sistem Investasi Terpadu (S-INVEST) yang dilakukan pertama kali pada 15 Agustus 2016. Dengan mekanisme tersebut, *Selling Agents* akan mengirimkan dana yang dikumpulkan dari investor reksadana kepada bank kustodi. Rata-rata harian penggunaan CeBM untuk setelmen dana di pasar modal selama 2016 adalah sebesar Rp7,4 triliun atau sebanyak 65% dari nominal transaksi di pasar modal.

Mengembangkan, Mengatur Dan Menjaga Sistem Pembayaran Nasional: BI mendorong pengembangan infrastruktur pembayaran retail dan edukasi penggunaan pembayaran non tunai. Pengembangan *National Payment Gateway* (NPG) merupakan salah satu pengembangan infrastuktur untuk memastikan terjadinya interkoneksi dan interoperabilitas dalam sistem pembayaran ritel nasional. Konsep NPG yang

Bank Indonesia encourages the utilization of Central Bank Money (CeBM): CeBM is a settlement system using checking account funds in the central bank. According to the Principles for Financial Market Infrastructures regulated by the Bank for International Settlement and International Organization of Securities Commissions, one of the principles to be fulfilled is the implementation of settlements through checking accounts in the Central Bank (central bank money/CeBM) whenever possible or available. Bank Indonesia encourages the utilization of CeBM for subscription fund transfer mutual fund transactions through the Integrated Investment System (S-INVEST), conducted for the first time on 15 August 2016. Through this mechanism, Selling Agents transfer funds collected from mutual fund investors to custodian banks. During 2016, the daily average utilization of CeBM for fund settlements in the capital market reached Rp7.4 trillion or accounting to 65% of total nominal transactions in the capital market.

Developing, Regulating and Maintaining the National Payment System: Bank Indonesia supports the development of a retail payment infrastructure and the education on the utilization of non-cash payments. The development of a National Payment Gateway (NPG) is one of the infrastructure development initiatives to ensure the achievement of interconnectivity and interoperability in the national retail payment. The

NATIONAL PAYMENT GATEWAY (NPG)

NPG adalah suatu sistem yang mengintegrasikan berbagai *channel* pembayaran (kartu ATM/debit, uang elektronik, dan kartu kredit) untuk memfasilitasi transaksi pembayaran secara elektronik dari sumber dana ke penerima dana. Dengan adanya NPG, diharapkan mampu mengatasi permasalahan efisiensi, keamanan, serta kedaulatan negara.

NATIONAL PAYMENT GATEWAY (NPG)

NPG is a system that integrates various payment channels (ATM debit cards, e-money and credit cards) to facilitate payment transactions electronically from sources of funds to the users of funds. With the NPG, the problem of efficiency, security and national sovereignty can be addressed.

diadopsi oleh Bank Indonesia merupakan *institutional arrangement* dari lembaga standar, *switching*, dan *services* yang diperuntukkan untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional. Dalam mengimplementasikan NPG, Bank Indonesia telah menyelenggarakan serangkaian *High Level Meetings, Proof of Concept* dan pada 21 Desember 2016, telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman mengenai interkoneksi dan interoperabilitas antar para pelaku industri pembayaran retail nasional yaitu Bank yang mewakili 75% transaksi debit dalam negeri dan tiga prinsipal nasional. Nota Kesepahaman ini merupakan wujud komitmen dari industri terhadap pengembangan NPG di Indonesia, diharapkan melalui interkoneksi dan interoperabilitas, akan meningkatkan efisiensi, memperluas akses dan mendorong penggunaan pembayaran non tunai dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Sejalan dengan pengembangan NPG, Bank Indonesia juga menginisiasi standarisasi penggunaan teknologi *chip* pada kartu debit/kredit untuk mengurangi risiko terjadinya pemalsuan kartu, pencurian data identitas pada kartu (*skimming*) serta memastikan interkoneksi dan interoperabilitas.

Untuk itu, Bank Indonesia telah mengatur dan menetapkan *National Standar Indonesia Chip Card Specification (NSICCS)* sebagai standar nasional teknologi *chip* pada kartu ATM/Debet. Di samping penggunaan *chip* untuk kepentingan keamanan, pemrosesan juga dilakukan secara domestik untuk mengedepankan kepentingan nasional yang dapat mendukung efisiensi ekonomi dan kemandirian nasional.

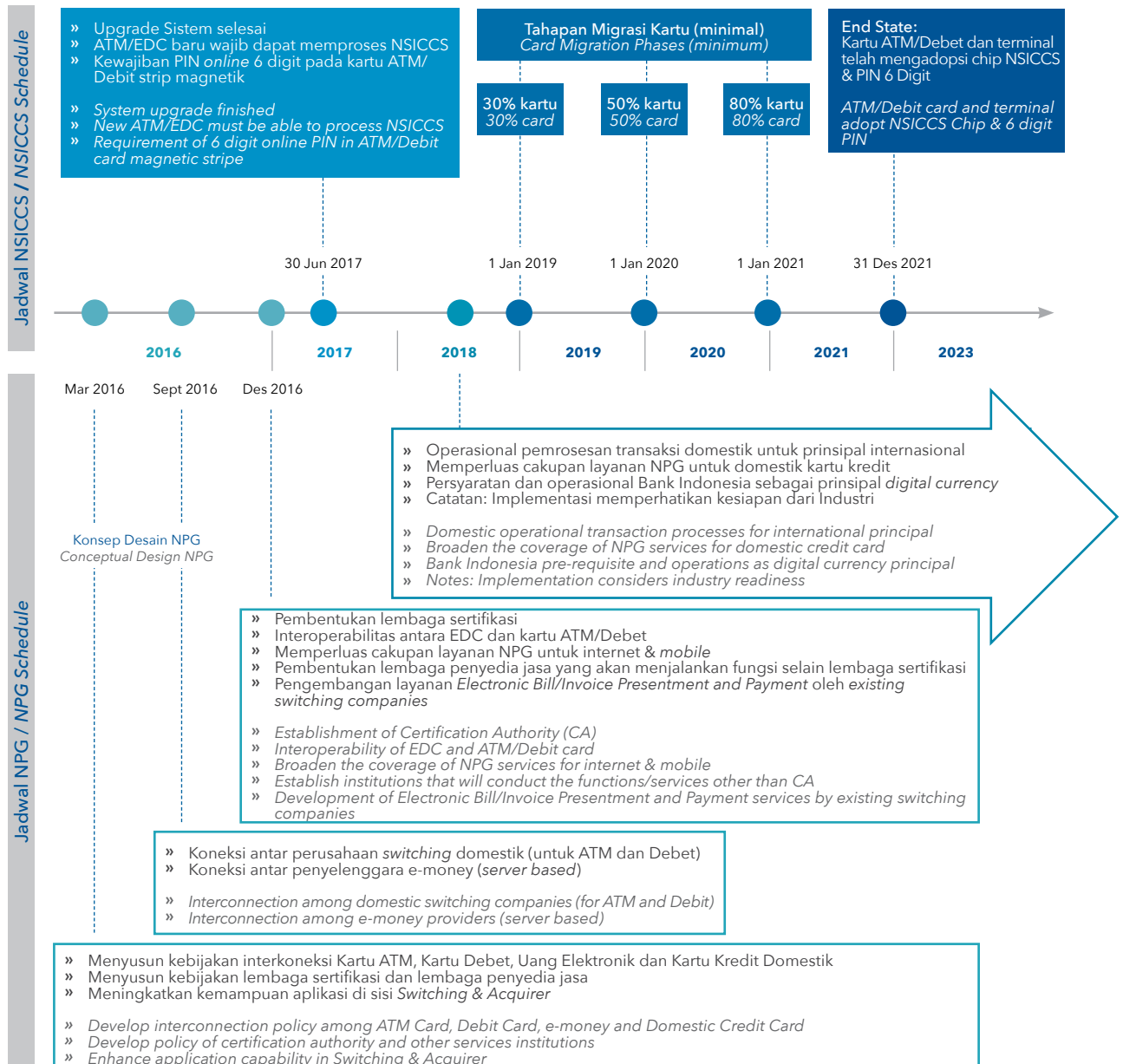
Selain menetapkan standar nasional teknologi *chip*, Bank Indonesia juga mewajibkan penggunaan *personal identification number online 6 digit* untuk kartu ATM dan/atau Debet yang diterbitkan di Indonesia secara bertahap sesuai *roadmap* yang telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

NPG concept adopted by Bank Indonesia is an institutional arrangement comprising of standards, switching and services institutions to nationally integrate various instruments and payment channels. In its implementation, Bank Indonesia has organized High Level Meetings, Proof of Concepts and the signing of Memorandum of Understanding (MOU) regarding interconnectivity and interoperability among participants in the national retail payment industry, which are banks that represent 75% debit transactions domestically and three national principals on December 21st, 2016. This MOU reflects the commitment from the industry regarding NPG development in Indonesia. It is expected that through interconnectivity and interoperability, NPG can increase efficiency, extend its access and promote the utilization of non-cash payments with taking into account national interest.

In line with the development of NPG, it is necessary to initiate standards on the utilization of chip technology for debit/credit cards to reduce risks of fraudulent cards, card identity theft (skimming) and ensure ensure interconnectivity and interoperability.

As such, Bank Indonesia has regulated and defined the National Standard Indonesia Chip Card Specification (NSICCS) as a nationwide chip technology standard for ATM/Debit cards. In addition, the use of chips for security and processing is also done domestically to ensure national interest that can support economic efficiency and national capabilities.

On top of setting the national standard of chip technology, Bank Indonesia also regulates the application of 6 digit online personal identification number for ATM and/or Debit cards issued in Indonesia, implemented in phases in accordance with the roadmap outlined in Bank Indonesia Circulation Letter.



Infografis/Infographic Roadmap on The National Standard Indonesia Chip Card Specification (NSICCS) and National Payment Gateway (NPG)

Strategi Nasional Keuangan Inklusif: Keuangan inklusif telah menjadi salah satu fokus kebijakan nasional pemerintah dengan tersusunnya Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang diresmikan oleh Presiden pada tanggal 18 November 2016. SNKI merupakan sebuah cara komprehensif yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan indeks keuangan inklusif Indonesia. Strategi tersebut disusun pemerintah melalui koordinasi antara Bank Indonesia, OJK, Bappenas, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Kementerian

National Strategy of Financial Inclusion: Inclusive finance has become one of the focus of the National Governments policy with the development of National strategy for inclusive finance (SNKI) which was inaugurated by the President on November 18th, 2016. SNKI is a comprehensive way by the Government who improve Indonesia's inclusive financial index. The strategy was formulated by the Government through coordination between Bank Indonesia, OJK, Bappenas, the National Team for Accelerating Poverty Reduction, and the Ministry

Keuangan. SNKI dibangun atas dasar 5 pilar yakni edukasi keuangan, hak properti masyarakat, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi, layanan keuangan pada sektor Pemerintah, dan perlindungan konsumen.

Pemerintah menargetkan pada 2019 indeks keuangan inklusif Indonesia telah berada pada angka 75 persen dimana hingga 2014 indeks keuangan inklusif masih berada pada angka 36 persen. Peningkatan keuangan inklusif Indonesia merupakan bagian upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Peningkatan akses kepada sistem keuangan terutama difokuskan bagi para pelaku usaha kecil seperti petani, nelayan, buruh, dan UMKM.

Kebijakan keuangan inklusif Bank Indonesia selama 2016 difokuskan pada perluasan akses keuangan melalui integrasi ekosistem non tunai dengan program/layanan Pemerintah. Program yang dikembangkan antara lain penyaluran bantuan sosial secara non tunai, optimalisasi pemanfaatan dana desa secara non tunai, digitalisasi layanan keuangan di pondok pesantren, remitansi pembentukan poros sentra pelatihan dan pemberdayaan daerah perbatasan serta elektronifikasi sistem pembayaran ritel seperti pengembangan konsep *smart city* melalui kartu *Jakarta One*, *Smart Card Makassar*, kartu Sumatera Utara *Electronic Payment and Purchase* serta Kartu Lentera.

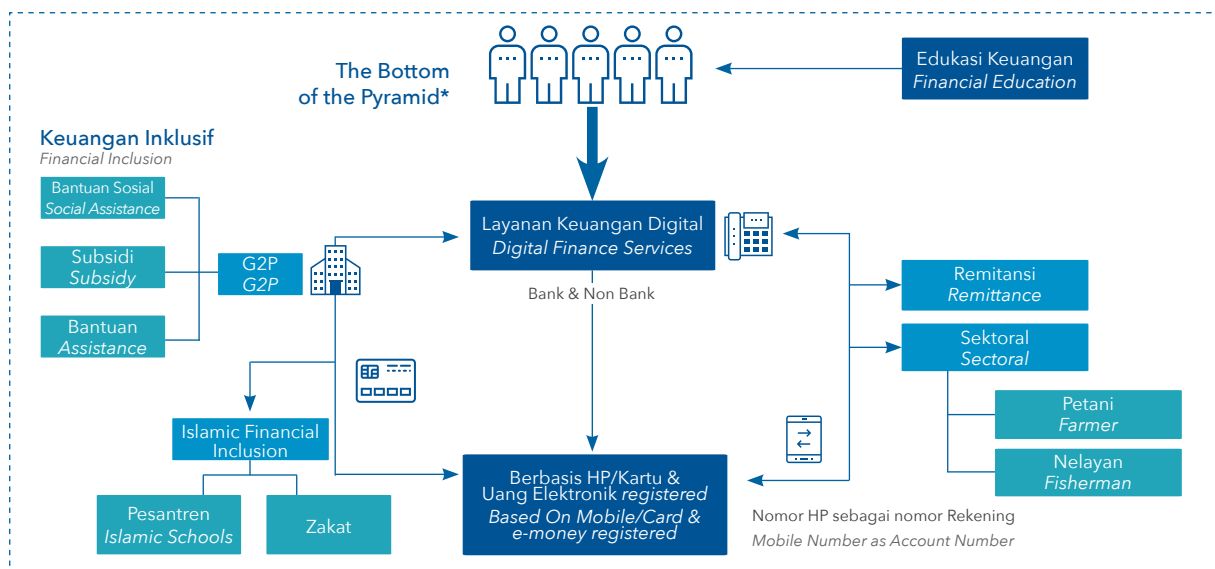
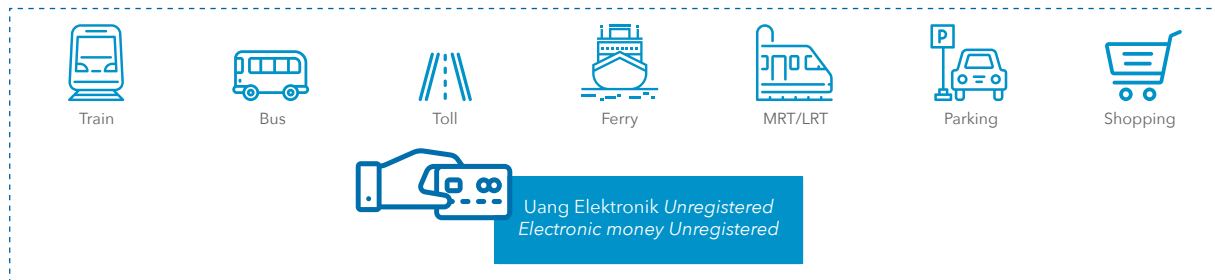
Dalam rangka mendukung upaya keuangan inklusif, Bank Indonesia pada 27 September 2016 mengeluarkan Peraturan Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD) yang mengatur mengenai penyelenggaraan LKD dalam rangka perluasan ekosistem LKD dan penyaluran bantuan sosial (program pemerintah) secara non tunai.

of Finance. SNKBI is built upon 5 pillars of financial education, community property rights, intermediation facilities and distribution channels, financial services to the government sectors and consumer protection.

The Government target by 2019 Indonesia inclusion financial index will be at 75 percent, where up to 2014 the inclusive financial index remained at 36 percent. Increasing Indonesia inclusive finance is part of the Government effort to eradicate poverty. Improve access to the financial system is mainly focus on small business players such as farmers, fishermen, laborers, and MSMEs.

Bank Indonesia inclusive financial policies during 2016 focused on expanding access to finance through the integration of non-cash ecosystem with Government program/services. The program develop include the non-cash channeling of social assistance, optimizing the utilization of non-cash fund village, the digitalization of financial services in religious boarding school, the remittance of training center and the empowerment of the border areas and the electronification of retail payment system such as the development of smart city concept through Jakarta One Card, Smart Card Makassar, North Sumatera Electronic Payment and Purchase card, and Lentera card.

To support efforts towards financial inclusion, on September 27th, 2016 Bank Indonesia issued Regulation on Digital Financial Service Administration (LKD) that regulates the administration of LKD to expand LKD ecosystem and the disbursement of non-cash social assistance (government program).



* Masyarakat dengan biaya hidup < USD 2 per hari

* Citizen with living cost < USD 2 per day

Infografis Program Elektronifikasi dan Keuangan Inklusif
Infographic Electronification and Financial Inclusion Program

Penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT): Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap aspek kepatuhan dalam penerapan program APU dan PPT terhadap penyelenggara Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing (KUPVA). Pengawasan tersebut dilaksanakan secara desentralisasi oleh masing-masing Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah berdasarkan lokasi kantor pusat penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

Pada 2016, Bank Indonesia menegaskan adanya kewajiban bagi penyelenggara KUPVA Bukan Bank untuk memperoleh izin beroperasi. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, KUPVA Bukan Bank yang saat ini belum memperoleh izin dari Bank Indonesia memiliki kesempatan untuk segera mengajukan izin paling lambat 7 April 2017. Setelah berakhirnya batas waktu tersebut, Bank Indonesia akan mendukung pelaksanaan operasi penertiban

Implementation of Anti Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT) Programs: Bank Indonesia conducts supervision activities on the compliance of the implementation of AML and CFT programs by Foreign Exchange Trade Business Activity (KUPVA) operators. The supervision activities were conducted in a decentralized manner by each respective Bank Indonesia Regional Office based on the location of the head office of each Non-Bank KUPVA operator.

In 2016, Bank Indonesia confirmed the obligation of Non-Bank KUPVA operators to obtain their operation licenses. Based on Bank Indonesia Regulation on Non-Bank Foreign Exchange Trade Business Activity, Non-Bank KUPVA operators operating without Bank Indonesia licenses have the opportunity to submit their license requests no later than April 7th, 2017. After the deadline, Bank Indonesia will support the implementation of control operations conducted in partnership with Indonesian National Police, Center

melalui kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi, dan Badan Narkotika Nasional.

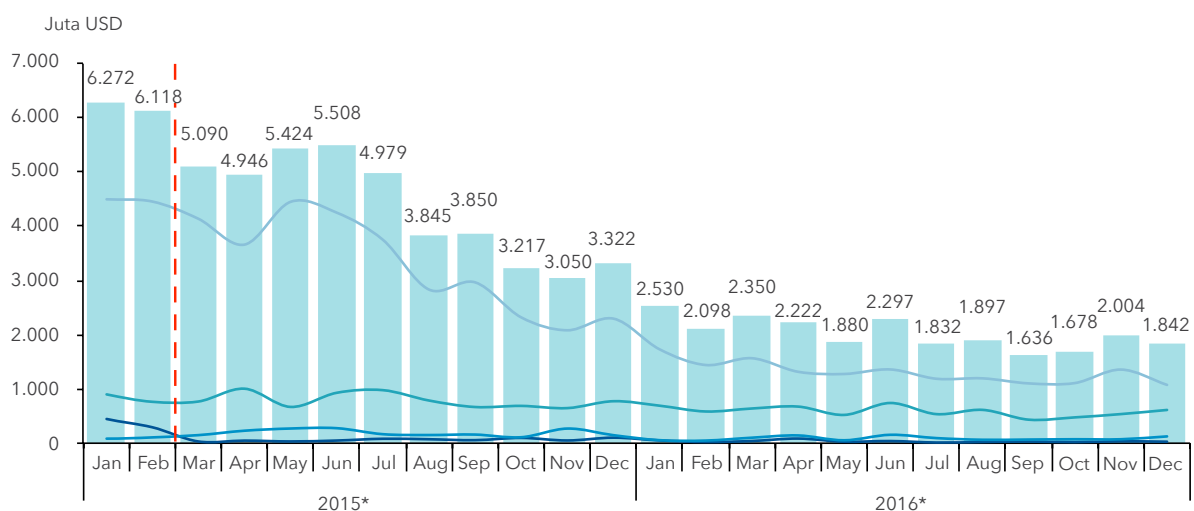
Pemenuhan Kewajiban Penggunaan Rupiah: Bank Indonesia juga melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam rangka pemenuhan kewajiban penggunaan Rupiah, sebagai mandat Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan terhadap transaksi keuangan di Indonesia, secara umum 91% pelaku usaha yang disampling sudah taat terhadap ketentuan kewajiban penggunaan Rupiah. Upaya yang dilakukan Bank Indonesia untuk mendorong implementasi kewajiban penggunaan Rupiah dengan melakukan sosialisasi dan kampanye. Implementasi kewajiban penggunaan Rupiah ini dilaksanakan Bank Indonesia melalui koordinasi dengan kementerian/ otoritas dan asosiasi terkait.

Setelah penerapan Peraturan Bank Indonesia kewajiban penggunaan Rupiah, tercatat penurunan transaksi valas antar penduduk sebesar 44,56% (yoy) pada Desember 2016. Nominal transaksi valas turun dari USD3,32 miliar menjadi USD1,84 miliar. Rata-rata bulanan transaksi valas antara penduduk pada Januari-Desember 2016 sebesar USD2,02 miliar, jauh di bawah rata-rata bulanan transaksi valas satu tahun sebelum implementasi kewajiban penggunaan Rupiah (Maret 2014 - Februari 2015), yang mencapai USD6,62 miliar.

for Financial Transaction Reporting and Analysis, and National Narcotics Agency.

Implementation of the Obligation to Use Rupiah: Bank Indonesia also conducted supervision on business entities regarding the obligation to use Rupiah, as mandated by Law Number 7 of 2011 on Currency. Based on the supervision on financial transactions in Indonesia, in general 91% of businesses sampled have complied with the obligation to use Rupiah currency. This initiative was conducted to promote the implementation to use Rupiah currency through socialization and campaign activities. The implementation of the obligation to use Rupiah was executed by Bank Indonesia through close coordination with relevant ministries, authorities and associations.

Following the implementation of Bank Indonesia regulation on the obligation to use the Rupiah currency, foreign currency transaction among citizen declined by 44.56% (yoy) in December 2016. Total foreign currency transaction nominal decreased from USD3.32 billion to USD1.84 billion. Foreign currency transaction monthly average among residents between January-December 2016 was recorded at USD2.02 billion, significantly below the monthly average of foreign currency transactions a year before implementing the obligation to use Rupiah (March 2014 - February 2015) that reached USD6.62 billion.



*) Angka Sementara / Temporary data

Grafik 5. Transaksi Valas Antar Penduduk Per Jenis Transaksi
Graphic 5. Foreign Exchange Transaction by Type of Transaction

Perlindungan Konsumen Pada Jasa Sistem

Pembayaran: Sebagai upaya memperkuat fungsi perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan di tahun 2014. Selanjutnya, guna mengimplementasikan ketentuan tersebut secara efektif dan meningkatkan pemahaman terhadap aspek perlindungan konsumen terhadap jasa sistem pembayaran, Bank Indonesia senantiasa melakukan edukasi kepada stakeholder di berbagai wilayah di Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Edukasi tersebut antara lain, Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), *Launching Program Ekonomi Kerakyatan*, peringatan Hari Konsumen Nasional (Harkornas) serta Edukasi Sistem Pembayaran.

Sepanjang 2016, Bank Indonesia menerima pengaduan konsumen sejumlah 1.950 atau meningkat 4,3% dari tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut tercatat pengaduan terbanyak mengenai kartu kredit (1.481 pengaduan), selanjutnya kartu ATM/Debet (204 pengaduan) dan transfer dana (184 pengaduan). Pengaduan yang disampaikan, antara lain, mengenai produk sistem pembayaran yang digunakan oleh pihak lain, penyalahgunaan data dan etika penagihan kartu kredit.

Perkembangan Inovasi Sistem Pembayaran:

Dalam merespon dan mengantisipasi laju inovasi sistem pembayaran terutama dengan semakin berkembangnya transaksi e-dagang dan *Financial Technology (fintech)*, Bank Indonesia menerbitkan aturan mengenai Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP). Ketentuan ini sekaligus mendukung inisiatif lintas kementerian dan otoritas terkait dengan peta jalan dan Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) e-dagang.

Aturan ini mengatur mengenai pemrosesan sistem pembayaran dan juga sarana pendukung penyelenggara *fintech*, yang meliputi antara lain institusi diharuskan berbadan hukum Indonesia, melakukan pemrosesan secara domestik, berkewajiban menggunakan Rupiah dan melakukan transaksi melalui perbankan nasional.

Customer Protection on Payment System Services:

as an effort to strengthen consumer protection of payment system, Bank Indonesia has issued related regulations in 2014. Further, to implement such regulations effectively and to enhance the understanding of consumer protection on payment system, Bank Indonesia constantly educates stakeholders in Indonesia. Such education programs are National Less Cash Movement (GNNT), People Economy Program, National Consumer Day, and other Payment System Education programs.

During the course of 2016, Bank Indonesia has received 1,950 customer complaints, a 4.3% increase from a year earlier. Out of these total complaints, most complaints were related to credit cards (1,481 complaints), followed by ATM/Debit card complaints (204 complaints) and fund transfer complaints (184 complaints). Complaints submitted, among others, are related to payment system products used by other parties, abuse of data as well as ethics on credit card debt collection.

Development of Payment System Innovation:

Responding and anticipating the pace of payment system innovation, especially with the growing development of e-commerce and Financial Technology (fintech) transactions, Bank Indonesia issued rules on the Implementation of Payment Transaction Processing (PTP). This provision also supports cross-ministerial and other authority initiatives related to the e-commerce roadmap and the Government Regulatory Plan (RPP).

This regulation governs the processing of payment system as well as supporting facilities for fintech players, including, among others, the requirement to be Indonesian legal entities, conduct processing domestically, the obligation to use the Rupiah currency and conduct their transactions through national banks.

FINANCIAL TECHNOLOGY

Integrasi layanan keuangan dan teknologi yang mengubah model bisnis keuangan konvensional dengan menggunakan teknologi baru dan inovasi guna bersaing dalam pasar keuangan

REGULATORY SANDBOX

Sebuah laboratorium yang digunakan bersama oleh pelaku FinTech dan Bank Indonesia untuk menguji produk, layanan, model bisnis atau teknologi yang bersifat inovatif, khususnya sebelum masuk ke dalam rezim perizinan secara penuh.

FINANCIAL TECHNOLOGY

Integration of financial services and technology that transforms the conventional financial business model with new technology and innovation to compete in the financial market.

REGULATORY SANBOX

A laboratory used jointly by FinTech players and Bank Indonesia to verify innovative products, services, business models or technologies, especially before entering into the licensing regime in full.

Bank Indonesia FinTech Office:

Bank Indonesia memandang perlu untuk secara langsung mendukung tumbuhnya inovasi dari pelaku *fintech* terutama *start-up*. Hal ini untuk menciptakan ekosistem sistem pembayaran yang aman, efisien dan handal dengan tetap mempertimbangkan kepentingan nasional, mengedepankan prinsip kehati-hatian serta memperhatikan perlindungan konsumen. Untuk itu, pada 14 November 2016 Bank Indonesia membentuk *FinTech Office* (BI-FTO) yang bertujuan untuk menjaga agar inovasi *fintech* di Indonesia dapat tumbuh berkembang secara inovatif dan sehat. Melalui pembentukan BI-FTO, diharapkan dapat mendorong perkembangan *fintech* di Indonesia dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan layanan *fintech*.

Bank Indonesia Fintech Office:

Bank Indonesia considers it is important to directly support the innovation growth among Fintech players, especially start-up. This is to create an ecosystem of payment systems that is safe, efficient and reliable, while maintaining the national interest, adhering to prudential principles and taking into account the protection of customers. On November 14th, 2016, Bank Indonesia formed its Fintech Office (BI-FTO), with an objective to protect the innovation drive in Indonesia's FinTech sector to ensure a healthy growth. The formation of the BI-FTO is expected to promote the development of a robust ecosystem for the development of Fintech in Indonesia and grow public trust to use fintech services.

BANK INDONESIA FINANCIAL TECHNOLOGY OFFICE (BI-FTO)

Bank Indonesia Financial Technology Office (BI-FTO)

Perkembangan inovasi teknologi layanan keuangan yang semula lebih banyak disediakan oleh lembaga institusi keuangan formal, kini berada semakin dekat bahkan hadir di dalam genggam tangan konsumen melalui media atau *platform* baru yang biasa dikenal dengan sebutan *Financial Technology* atau *fintech*. *Financial Stability Board* (2016), mendefinisikan *fintech* sebagai integrasi dari layanan keuangan dan teknologi yang dapat mentransformasi model bisnis keuangan konvensional. Secara umum, definisi yang ada tersebut merujuk kepada penggunaan teknologi untuk mengefisienkan dan mengubah layanan keuangan yang ada saat ini.

Berdasarkan area dari aktivitas layanan *FinTech*, terdapat 4 kategori, yaitu (i) *Payments, Clearing, and Settlements*, (ii) *Deposits, Lending, and Capital Raising*, (iii) *Market Provisioning*, (iv) *Investment Management*.

Payments, Clearing, and Settlements merupakan layanan *fintech* yang paling erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia. Inovasi dalam kategori ini bertumpu pada peningkatan kecepatan dan efisiensi pembayaran, kliring dan penyelesaian akhir, mengurangi biaya, dan mengubah tata cara dalam mengakses layanan keuangan serta melaksanakan transaksi keuangan.

Pada 2016, aktivitas *fintech* di Indonesia untuk *payment, clearing, and settlement* memiliki pangsa sebesar 42%, dan secara keseluruhan total nilai transaksi *fintech* di Indonesia pada tahun 2016 diperkirakan telah menembus angka USD15,02 miliar.²

Dengan pesatnya perkembangan, Bank Indonesia berupaya senantiasa mengikuti dan mendalami perkembangan inovasi teknologi pada layanan jasa keuangan yang ditawarkan segmen *fintech*.

Innovation in financial service technology that previously dominated by conventional financial institutions, is now moving closer to the hands of consumers through new media or platforms, commonly known as Financial Technology or FinTech. The Financial Stability Board (2016) defines FinTech as the integration of financial services and technology that is capable of transforming the conventional financial business model. Generally, the definition emphasizes the use of technology to generate greater efficiency and transform existing financial services.

Based on Fintech activities, there are 4 categories, which are Payments, Clearing and Settlements, Deposits, Lending and Capital Raising, Market Provisioning and Investment Management.

Payment, clearing and settlement is the Fintech service which is closest to Bank Indonesia's role and responsibilities. Innovation in this category focuses on improving the speed and efficiency of payments, clearing and settlements, reducing cost and changing the way users access financial services and execute financial transactions.

Indonesia's fintech activities in 2016 for payments, clearing and settlements commanded a market share of 42% market share and a transaction value during the year reaching beyond USD15.02 billion².

With this rapid development, Bank Indonesia strives to stay abreast with the development of technology innovation in financial services provided by the fintech. The operation of Bank Indonesia Financial

² Data Statista 2016 (www.statista.com)

Beroperasinya BI-FTO pada 14 November 2016, merupakan wujud dukungan Bank Indonesia terhadap perkembangan *fintech* dan diharapkan dapat mendorong terbentuknya ekosistem yang baik dan sehat.

Dalam menjalankan fungsinya, BI-FTO telah melakukan komunikasi intensif dengan Asosiasi *FinTech* Indonesia dan pelaku *fintech* di Indonesia. Jejaring dan sinergi pelaku *fintech* semakin diperkuat melalui berbagai kegiatan *forum group discussion*, *talk show*, serta seminar nasional *fintech* yang membedah isu-isu terkini dan terpenting dari *fintech*.

Tak hanya melakukan komunikasi dengan industri, BI-FTO juga secara rutin melakukan koordinasi dengan otoritas terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, OJK, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Keuangan. Dalam skala internasional, BI-FTO juga terlibat aktif di forum dan/atau kelompok kerja terkait *fintech* di antaranya melalui program *joint-research* dengan beberapa negara di regional yang tergabung dalam EMEAP WGPSS (Working Group on Payment and Settlement System) di dalam *Study Group on Digital Innovation*.

Pembentukan BI-FTO dilengkapi pula dengan *regulatory sandbox* yang merupakan upaya Bank Indonesia untuk terus mendorong inovasi transaksi *fintech* dalam tahap pengembangan dengan tetap menerapkan mitigasi risiko secara tepat. Keberadaan *regulatory sandbox* memungkinkan unit usaha *fintech* melakukan kegiatan secara terbatas, setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dengan demikian, perusahaan *startup* dengan skala kecil mendapatkan kesempatan untuk mematangkan konsep yang berkembang dengan sehat serta pada waktunya mampu menyediakan layanan finansial yang aman kepada masyarakat.

Technology Office (BI-FTO) starting on November 14th, 2016, is expected to promote the creation of a healthy ecosystem for Indonesia's Fintech development.

In conducting its function as a facilitator/catalyst, during 2016 BI-FTO has engaged with the Indonesian Fintech Association as well as fintech players in Indonesia. Network and synergies among fintech players are strengthened through various forum group discussions, talk shows, and national fintech seminars discussing current and relevant issues in fintech.

On top of conducting engagements with the industry, BI-FTO regularly coordinates with relevant authorities such as the Coordinating Ministry of Economics, OJK, Ministry of Communication and Informatics, and the Ministry of Finance. Internationally, BI-FTO actively participates in fintech forums and/or working groups, among others through joint-research programs with various countries in the region within the EMEAP WGPSS (Working Group on Payment and Settlement System) in Study Group on Digital Innovation.

The forming of BI-FTO includes a regulatory sandbox, which is Bank Indonesia's effort to promote the innovation of fintech transactions in the early stages, while maintaining appropriate risk mitigation. Having a regulatory sandbox enables the fintech players to carry out their activity on a limited basis, after meeting criteria set by Bank Indonesia. This allows small scale start-up companies to grow into a better developed concept and in time provide secure financial services to the public.

PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Pengelolaan Uang Rupiah yang sesuai, tepat waktu dan layak edar: Selama 2016, kinerja Pengelolaan Uang Rupiah dapat tercermin dalam upaya Bank Indonesia memenuhi kebutuhan uang Rupiah di masyarakat dengan jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi yang layak edar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini terus dilakukan dengan memenuhi ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya; melakukan distribusi dan pengolahan uang yang aman dan optimal; serta memberi layanan kas yang prima.

Pemenuhan Kebutuhan Uang: Bank Indonesia melakukan Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan Uang serta Perencanaan dan Pemenuhan Kebutuhan Uang sesuai kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan juga perkembangan instrumen non-tunai. Kemudian, Sejak 2016, Bank Indonesia melakukan transformasi pengelolaan uang Rupiah melalui komitmen untuk melakukan perencanaan dan pengadaan bahan uang maupun pencetakan uang Rupiah secara multiyears untuk jangka dua tahun. Hal ini diyakini akan lebih menjaga tata kelola dan mengefisienkan proses pemenuhan kebutuhan uang.

Tingkat Uang Yang Diedarkan: Dari sisi Uang Yang Diedarkan (UYD), pada akhir 2016 tercatat sebesar Rp612,5 triliun atau tumbuh 4,4% jika dibandingkan dengan posisi akhir 2015 sebesar Rp586,8 triliun. Pertumbuhan UYD tersebut lebih rendah dibanding 2015 yang mencapai 11,0%. Pelambatan pertumbuhan UYD terutama dipengaruhi oleh menurunnya posisi *cash in vault* (CiV) dari sebesar Rp117,3 triliun pada 2015 menjadi Rp104,5 triliun pada akhir 2016. Penurunan CiV seiring dengan menurunnya kebutuhan uang kartal perbankan untuk berjaga-jaga selama periode libur Natal dan akhir tahun 2016 yang lebih pendek dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan pola UYD secara harian, posisi UYD dipengaruhi oleh faktor musiman masyarakat pada periode tertentu khususnya hari raya keagamaan (periode Ramadhan dan Natal/akhir tahun) dan liburan. Posisi UYD tertinggi terjadi pada akhir Ramadhan 2016 sebesar Rp662,0 triliun atau tumbuh 9,7% dibandingkan dengan periode Ramadhan 2015 yang mencapai Rp603,5 triliun.

RUPIAH CURRENCY MANAGEMENT

Rupiah Currency management that is accurate, timely and fit for circulation: During 2016, the performance of Rupiah Currency Management was reflected in Bank Indonesia's efforts to meet the public's Rupiah currency needs in sufficient amount, appropriate denomination, timely manner and fit for circulation across the territory of Indonesia. This was done by fulfilling the availability of quality and credible Rupiah currency; conducting a secure and optimum currency distribution and administration; and providing premium cash management.

Fulfilling Currency Needs: Bank Indonesia conducted Optimum Currency Need Fulfillment initiatives, as well as Currency Need Fulfillment Planning in line with the public needs and by taking into account the economic growth and development in non-cash instruments. Since 2016, Bank Indonesia has initiated Rupiah currency management transformation through its commitment to perform multiyear, two year period currency material planning, procurement and printing. This will increase the governance and efficiency of currency fulfillment process.

Currency in Circulation: As of end 2016, total Currency in Circulation (UYD) reached Rp612.5 trillion, or growing by 4.4% from Rp586.8 trillion as of end 2015. The UYD growth was lower than the 11.0% growth recorded in 2015. The lower UYD growth was mainly due to lower cash in vault (CiV) position from Rp117.3 trillion in 2015 to Rp104.5 trillion in 2016. This lower CiV is in line with lower banking currency needs during the shorter Christmas and end of year holiday period in 2016 as compared to the previous year. Based on the daily UYD pattern, the UYD position is affected by seasonal factors during certain periods, particularly religious holidays (Ramadhan and Christmas/end of year) and holiday seasons. The highest UYD position was recorded during the end of Ramadhan 2016, reaching Rp662.0 trillion or growing by 9.7% from Rp603.5 trillion during 2015 Ramadhan period.



Pemenuhan uang layak edar melalui kas keliling
Fit for circulation money distribution through mobile cash

Bank Indonesia juga terus menjaga ketersediaan uang kartal sepanjang 2016. Hal ini tercermin dari rasio kecukupan kas Bank Indonesia yang mencapai rata-rata 5,1 bulan *outflow* sepanjang 2016 atau sama dengan tahun sebelumnya.

Pencegahan dan Penanggulangan Uang Palsu: Upaya preemptif dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi publik mengenai ciri keaslian uang Rupiah (CIKUR), serta publikasi melalui media massa maupun media sosial. Upaya preventif dilakukan melalui penguatan unsur pengaman (*security features*) sesuai *best practices* sehingga uang Rupiah sulit dipalsukan namun tetap mudah dikenali ciri keasliannya oleh masyarakat umum. Sementara itu, Bank Indonesia juga secara aktif memberikan dukungan terhadap upaya represif aparat penegak hukum dalam menanggulangi dan memberantas kejahatan pemalsuan uang Rupiah. Upaya represif disertai dengan dukungan untuk pengenaan sanksi pidana yang berat, yang diharapkan mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi para pelaku kejahatan pemalsuan uang Rupiah. Dari sisi internal, Bank Indonesia terus menguatkan fungsi Laboratorium dan Sistem Informasi untuk analisis uang palsu yang dikenal dengan nama Bank Indonesia Counterfeit Analytic Center (BI-CAC).

During the course of 2016, Bank Indonesia continued to maintain the availability of Rupiah currency. This is reflected in Bank Indonesia's cash adequacy ratio that reached an average of 5.1 months outflows during 2016, roughly the same as the previous year.

Counterfeit Money Prevention and Countermeasures: Preventive measures are conducted through socialization and public education campaigns on characteristics of authentic Rupiah currencies (CIKUR), as well as publications through mass and social media. Preventive measures are also conducted by strengthening the security features according to best practices to limit currency forgeries while facilitating easy identification of currency authenticities by the public. Bank Indonesia actively provides support to repressive actions by the law enforcement to overcome and counter Rupiah forgery crimes. These repressive actions were supported by considerable criminal sanctions to create deterrent effects for Rupiah forgery offenders. Internally, Bank Indonesia continues to enhance its Laboratories and Information System functions, known as Bank Indonesia Counterfeit Analytic Center (BI-CAC), responsible for analyzing forged currencies.

Distribusi Uang yang Optimal dan Aman: Ada beberapa hal yang menjadi perhatian Bank Indonesia, yaitu Jaringan Distribusi Uang, Moda Transportasi, Keterlibatan Pihak Ketiga serta kualitas Uang Rupiah terutama di daerah terpencil dan terdepan. Melihat kondisi geografis Indonesia, sampai dengan 2015, Bank Indonesia hanya mampu menjangkau 66% dari keseluruhan wilayah Indonesia. Oleh karena itu sejak 2016, Bank Indonesia menerapkan konsep *Centralized Cash Network Planning (CCNP)* dimana Pengelolaan Uang terutama Distribusi dilakukan secara terpusat dan memiliki *command center*. Tujuan dari CCNP adalah Rupiah dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil pemetaan dan karakteristik daerah, maka untuk mencapai 100% cakupan distribusi uang diperlukan 152 titik distribusi baik yang dilakukan oleh internal Bank Indonesia maupun bekerjasama dengan perbankan. Sampai dengan 2015 terdapat 77 titik distribusi uang, dan pada 2016, Bank Indonesia menambah 27 titik distribusi dengan membuka Kas Titipan. Dengan penambahan tersebut, jangkauan layanan kas Bank Indonesia meningkat menjadi 82% pada 2016, dan akan mencapai 100% pada 2018.

Optimum and Secure Currency Distribution: *Currency Distribution Network, Transportation Mode, Third Party Participation and Currency Quality are factors that Bank Indonesia pays attention to, especially in the remote regions. Given Indonesia's geographic characteristics, until 2015, Bank Indonesia could only reached 66% of the entire nation region. To address this condition, since 2016 Bank Indonesia has implemented the Centralized Cash Network Planning (CCNP) concept that administers Currency Management, particularly its Distribution, centrally through a command center. CCNP aims at ensuring that Rupiah currencies can reach Indonesia's entire region. Based on results from regional mapping and their respective characteristic studies, a total of 152 cash distribution points are needed to attain 100% currency distribution coverage, performed both internally by Bank Indonesia and in cooperation with the banking sector. 77 currency distribution points were available until 2015 and during 2016, Bank Indonesia has added 27 distribution points through the opening of Cash Custody services. With the addition of new distribution points, Bank Indonesia has extended its currency service reach to 82% in 2016 and expected to reach 100% by 2018.*

KAS TITIPAN

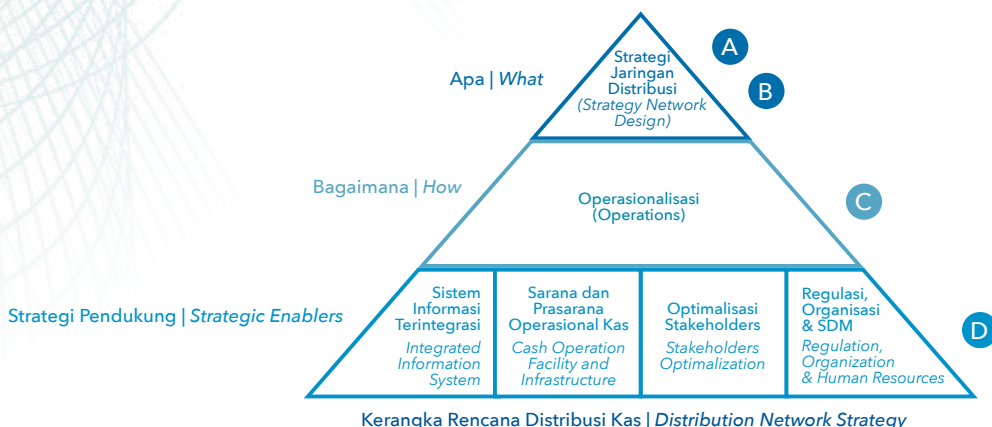
Kas Titipan adalah titik distribusi uang yang dilaksanakan oleh Bank Umum yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Ruang Lingkup yang dilakukan Kas Titipan adalah:

- Setoran dan penarikan Bank di wilayah kerjanya
- Penukaran uang di loket Bank
- Sortasi uang yang akan disetorkan ke Bank Indonesia, khususnya Uang Tidak Layak Edar (UTLE),
- Kas Keliling di luar wilayah kerjanya, dan
- Penyimpanan uang

CASH CUSTODY

Cash Custody is a cash distribution point operated by a commercial bank, that is appointed by Bank Indonesia. The scope of work of Cash Custody is as follows:

- *Bank deposits and withdrawals in their surrounding locations*
- *Money changers at bank counters*
- *Cash sorted to be deposited with Bank Indonesia, especially for unfit or soiled notes*
- *Mobile cash outside the surrounding locations*
- *Cash banking*



A. Perluasan cakupan jaringan distribusi uang

1. Menjangkau dan melayani seluruh wilayah NKRI melalui penambahan titik distribusi secara bertahap memperhatikan karakteristik daerah.
2. Titik distribusi baru akan dioperasikan oleh Bank Indonesia/ bekerjasama dengan pihak eksternal

B. Penguatan kerjasama dengan pihak eksternal

1. Penyempurnaan *Service Level Agreement (SLA)* layanan kas oleh eksternal
2. Pemberian skema finansial dalam rangka mendukung penyempurnaan SLA dan peningkatan *governance* pengembangan jaringan distribusi uang/layanan kas

C. Penyempurnaan struktur jaringan distribusi melalui perluasan cash points

1. Penyempurnaan struktur Kantor Depo Kas (KDK) dan jaringan distribusi di bawahnya dengan mempertimbangkan ketersediaan moda transportasi serta pengembangan kebijakan ke depan (termasuk Tol Laut)
2. Struktur jaringan distribusi dimaksud akan didukung oleh keberadaan KDK Utama Barat dan Timur sebagai pusat distribusi (termasuk Makassar sebagai KDK Utama di wilayah Timur selain di Surabaya)

D. Penetapan Departemen Pengelolaan Uang (DPU) sebagai *Command Center*

DPU bertanggung jawab untuk mengendalikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan uang Rupiah di seluruh titik distribusi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah sebagai *Distribution Channel*

A. Broaden the coverage of currency distribution network

1. Reach and serve all areas throughout Indonesia by adding distribution point according to regional characteristics
2. New distribution point operated by BI or in cooperation with external partner

B. Strengthening of cooperation with external partner

1. Improvement of the *Service Level Agreement (SLA)* of cash services provided by external partner
2. Implement financial schemes to support SLA improvement and increased *governance* in developing cash distribution network/cash services

C. Distribution network structure improvement through extended cash points

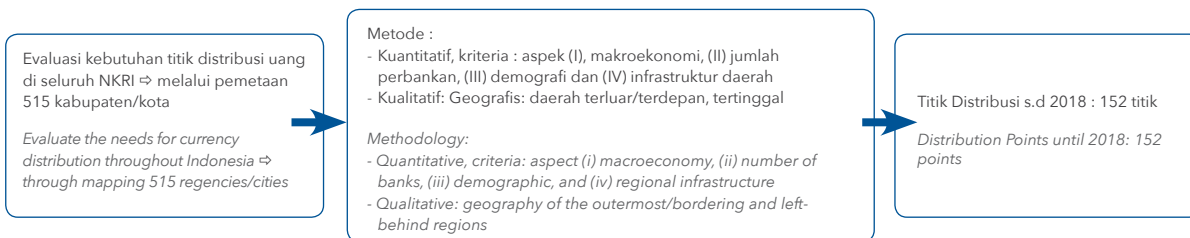
1. Improvement of *Regional Cash Vault (KDK)* structure and its distribution network in consideration of the availability of transportation mode and future policy development (including sea tollway)
2. The distribution network structure will be supported by the *Primary Cash Vault* in the West and East as the centre of distribution (including Makassar as the *Primary Cash Vault* in the East other than in Surabaya)

D. Currency Management Department as a *Command Center*

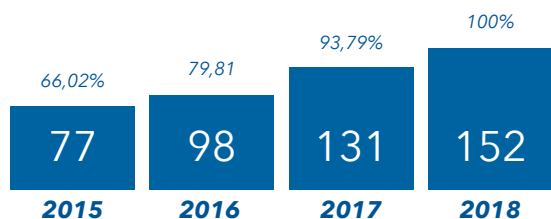
The headquarter office is responsible to monitor and control the implementation of Rupiah currency management of all distribution points in Bank Indonesia regional offices as the *distribution channels*.

**Distribusi Uang Rupiah
Distribution of Rupiah Currency**

**Metodologi
Methodology**

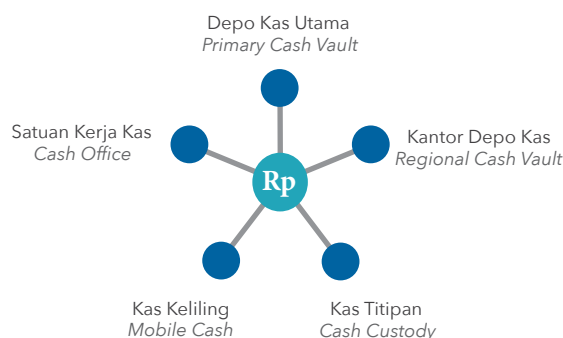


**Wilayah Distribusi
Area Coverage**



■ titik distribusi | distribution points

**Bentuk Jaringan Distribusi
Forms of Distribution Network**



Infografis Sentralisasi Jaringan Distribusi Uang
Infographic Centralized Cash Network Planning

Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas uang Rupiah secara nasional, Bank Indonesia aktif melakukan kegiatan kas keliling melalui jaringan kantor yang tersebar di seluruh Indonesia. Kegiatan kas keliling cenderung mengalami peningkatan baik dari sisi nominal maupun frekuensinya. Dalam melakukan kas keliling, Bank Indonesia bersinergi dengan TNI-AL, Polisi Air serta perbankan yang mengelola kas titipan. Target utama dari kas keliling ini adalah terutama untuk memastikan masyarakat di daerah terpencil, terluar dan terdepan menggunakan uang Rupiah layak edar dalam bertransaksi.

Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah:

Dalam rangka mendorong berkembangnya industri jasa pengolahan uang Rupiah, Bank Indonesia mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan jasa pengolahan uang Rupiah atau yang dikenal dengan *cash in transit/cash management company*.

Jenis kegiatan tersebut terdiri dari distribusi uang Rupiah, pemrosesan uang Rupiah, penyimpanan uang Rupiah di khazanah, serta pengisian, pengambilan dan/atau pemantauan kecukupan uang Rupiah. Pengaturan ini bertujuan guna menjaga keamanan, kepentingan nasional, dan efisiensi. Salah satu bentuk pengamanan antara lain diatur bahwa penyelenggara wajib berbadan hukum Indonesia dan telah memperoleh izin dari kepolisian Republik Indonesia.

To accelerate the improvement of the quality of Rupiah money nationwide, Bank Indonesia actively conducts cash activities through a network of offices throughout Indonesia. Mobile cash activities tend to increase both in terms of nominal amounts and frequency usage. In conducting cash banking, Bank Indonesia works together with the Navy, Water Police and banks that manage cash custody. The main target of this mobile cash is primarily to ensure people in remote and outlying areas use fit for circulation Rupiah money for their transactions.

Rupiah Currency Processing Service Providers:

To support the growth of Rupiah currency processing service, Bank Indonesia issued regulations concerning the provider of Rupiah currency processing service or known as cash in transit/cash management company. The services consist of Rupiah currency distribution, Rupiah currency process, Rupiah currency deposit in vault, as well as filling, retrieval and/or monitoring the adequacy of Rupiah currency. The objective of the regulation is to protect the security, national interest and efficiency. One of the security protection is by regulating the provider incorporated in Indonesia and already obtained license from Indonesian National Police.

MENEGASKAN KEDAULATAN UANG RUPIAH

Asserting the Sovereignty of Rupiah Currency

PENERBITAN UANG RUPIAH TAHUN EMISI 2016

Rupiah adalah simbol kedaulatan negara yang wajib dihormati dan dihargai oleh setiap warga negara Indonesia. Undang Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang menetapkan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran serta pengelolaan uang Rupiah, diamanatkan oleh Undang Undang Mata Uang untuk mengeluarkan, mengedarkan, dan mencabut serta menarik uang Rupiah.

Pada 2016, Bank Indonesia menerbitkan Uang Rupiah Tahun Emisi 2016 untuk seluruh denominasi yang terdiri dari 7 pecahan Uang Kertas dan 4 pecahan Uang Logam. Pengeluaran dan pagedaran uang Rupiah Tahun Emisi 2016 merupakan amanat Undang Undang Mata Uang. Undang Undang tersebut antara lain mengatur mengenai ciri-ciri umum dan khusus yang dimuat dalam uang Rupiah seperti pencantuman tanda tangan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan serta frasa "Negara Kesatuan Republik Indonesia" pada uang Rupiah kertas dan frasa "Republik Indonesia" pada uang Rupiah logam.

Pada 19 Desember 2016, bertepatan dengan Hari Bela Negara, Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo meresmikan pengeluaran dan pagedaran uang Rupiah 2016 di Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden RI mengajak setiap insan di tanah air untuk terus mencintai Rupiah dengan cara-cara yang nyata. Selalu menggunakan Rupiah untuk setiap transaksi keuangan di dalam negeri dan menyimpan tabungan kita dalam bentuk Rupiah.

Pahlawan Nasional dan Tema Uang Rupiah:
Sesuai dengan amanat Undang Undang Mata Uang, uang Rupiah harus mencantumkan gambar pahlawan nasional sebagai gambar utama bagian

ISSUANCE OF RUPIAH CURRENCY EMISSION YEAR 2016

Rupiah is a symbol of the country's sovereignty that must be respected by every Indonesian citizen. Act Number 7 of 2011 on Currency declares Rupiah as the recognized payment instrument to be used in the entire region of the Republic of Indonesia. As the monetary, macroprudential, payment system and Rupiah administration authority, Bank Indonesia is authorized by the Currency Act to issue, distribute and revoke Rupiah currencies.

In 2016, Bank Indonesia issued Rupiah Currency Emission Year 2016 for all denominations, comprising of 7 Bank Notes and 4 Coins denomination. The issuance and distribution of Emission Year 2016 Rupiah currencies is mandated by the Currency Law. The Act among others regulates the general and specific characteristics of Rupiah Currencies, such as signatures of Bank Indonesia Governor and Indonesian Minister of Finance, as well as the "Negara Kesatuan Republik Indonesia" phrase in Rupiah bank notes and the "Republik Indonesia" phrase in Rupiah coins.

On December 19th, 2016 and in commemoration of the National Defense Day, President of Republic of Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, officially issued and distributed 2016 Rupiah currencies in Jakarta. In his speech, President invites all citizens to always love Rupiah through concrete actions, as well as to always use Rupiah for every domestic financial transaction and save your money in Rupiah.

National Hero and Theme of Rupiah Currency: As stipulated by the Currency Law, Rupiah currencies to display images of national heroes as the foreground. The display of images of national

depan. Pencantuman gambar pahlawan nasional tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah mempertahankan dan mengukuhkan NKRI. Dalam penentuan mengenai tokoh yang dimuat dalam uang Rupiah, Bank Indonesia telah berkonsultasi dengan Pemerintah baik pusat maupun daerah, sejarawan, akademisi, serta tokoh masyarakat. Beberapa kriteria pemilihan gambar pahlawan nasional, yaitu belum pernah digunakan dalam uang Rupiah (kecuali proklamator), keterwakilan daerah, keterwakilan gender, dan dapat diterima oleh seluruh pihak (tidak menimbulkan kontroversi).

Semua gambar pahlawan nasional yang dicantumkan pada uang Rupiah kertas dan logam diperoleh dari instansi yang berwenang menatausahakan pahlawan nasional dan telah disetujui oleh ahli waris pahlawan nasional. Selanjutnya, gambar pahlawan nasional yang digunakan dalam uang Rupiah Tahun Emisi 2016 ditetapkan dalam surat Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penetapan Gambar Pahlawan Nasional Sebagai Gambar Utama Pada Bagian Depan Rupiah Kertas dan Rupiah Logam Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 5 September 2016.

heroes aims at honoring our heroes' contribution in defending and strengthening the Republic of Indonesia. The selection process of national heroes is conducted in consultation with the central and regional governments, historians, academicians and public leaders. Some of the election criteria include heroes that have never been selected (except the Independence Proclamator), regional representativeness, gender representativeness and acceptance by all parties (to avoid any controversies).

National hero images displayed in Rupiah bank notes and coins come from agencies authorized to administer the national heroes that have received approvals from heirs of the respective heroes. Images used in Emission Year 2016 Rupiah currencies are stipulated through the Presidential Decree Number 31 of 2016 on The Use of National Hero Images as the foreground in Rupiah Bank Notes and Coins of the Republic of Indonesia, dated September 5th, 2016.



Selain gambar pahlawan nasional, untuk uang Rupiah kertas menampilkan pula gambar tari nusantara dan pemandangan alam Indonesia untuk lebih memperkenalkan keragaman seni, budaya, dan kekayaan alam Indonesia. Pencantuman gambar pahlawan nasional, tari nusantara dan pemandangan alam Indonesia dapat mendukung program revolusi karakter bangsa melalui aspek pengenalan sejarah dan nilai-nilai patriotisme serta cinta tanah air, selaras dengan salah satu program Nawa Cita yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia.

In addition to displaying national hero images, Rupiah bank notes also display images of nusantara dances and Indonesian sceneries to introduce the country's diverse arts, cultures and natural wealth. The display of national heroes, nusantara dances and Indonesia's sceneries supports the nation character revolution program by introducing the country's history and patriotism values, in line with one of the Nawa Cita programs outlined by the President of Republic of Indonesia.

Pecahan Denomination	Gambar Depan Front Image		Gambar Belakang Back Image	
		Pahlawan Nasional National Hero	Tari Nusantara Traditional Dance	Pemandangan Alam Natural Scenery
Uang kertas Banknotes	Rp100.000	Dr. (H.C.) Ir. Soekarno - Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta	Topeng Betawi	Raja Ampat
	Rp50.000	Ir. H. Djuanda Kartawidjaja	Legong	Pulau Komodo
	Rp20.000	Dr. G.S.S.J. Ratulangi	Gong	Derawan
	Rp10.000	Frans Kaisiepo	Pakarena	Wakatobi
	Rp5.000	Dr. K.H. Idham Chalid	Gambyong	Gunung Bromo
	Rp2.000	Mohammad Hoesni Thamrin	Piring	Ngarai Sianok
	Rp1.000	Tjut Meutia	Tifa	Banda Neira
Uang logam Coins	Rp1.000	Mr. I Gusti Ketut Pudja		
	Rp500	Letnan Jenderal TNI (Purn) Tahi Bonar Simatupang		
	Rp200	Dr. Tjiptomangunkusumo		
	Rp100	Prof. Dr. Ir. Herman Johannes		

Ciri Keaslian Uang Rupiah TE 2016: Dalam rangka memudahkan masyarakat mengenali keaslian uang dan mempersulit upaya pemalsuan uang, uang Rupiah TE 2016 dilengkapi dengan 9-12 unsur pengaman. Secara umum, unsur pengaman uang Rupiah terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu terbuka, semi tertutup dan tertutup. Unsur pengaman bersifat terbuka adalah unsur pengaman yang dapat dideteksi tanpa bantuan alat. Unsur pengaman bersifat semi tertutup adalah unsur pengaman yang dapat dideteksi dengan menggunakan alat

Authenticity of Emission Year 2016 Rupiah Currencies: To make it easier for the public to determine the authenticity of Rupiah currencies and to minimize forgery efforts, Emission Year 2016 Rupiah currencies feature 9-12 security measures. In general, there are 3 levels of security measures in Rupiah currencies, namely overt, semi covert and cover/forensic. Overt security measures are measures detectable without the use of any detection devices. Semi covert measures are measures detectable using simple devices such as magnifying glasses and ultraviolet

yang sederhana seperti kaca pembesar dan lampu ultraviolet. Sementara itu, unsur pengaman bersifat tertutup adalah unsur pengaman yang hanya dapat dideteksi dengan menggunakan peralatan laboratorium/forensik.

Unsur pengaman yang bersifat terbuka diperuntukkan bagi masyarakat biasa agar dapat dengan mudah mengenali keaslian uang Rupiah dengan cara 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang).

Penerbitan uang Rupiah TE 2016 diharapkan mendorong masyarakat untuk semakin menjaga martabat dan kedaulatan Rupiah di Indonesia.

lights. Cover/forensic measures are security measures detectable only using laboratories/forensic devices.

Overt security measures target the wide community comprising of features easily detected through the 3D approach (Look, Touch, Viewed Under Light).

The issuance of Rupiah currency emission year 2016 is expected to foster the dignity and sovereignty of Rupiah across Indonesian territory.

MENDORONG AKSES KEUANGAN SERTA MENGEMBANGKAN SEKTOR RIIL DAN UMKM

Promoting Financial Access and Real Sector and Small Medium Enterprise Sectors

UMKM memegang peranan penting dalam struktur perekonomian Indonesia dimana sekitar 99,9% unit bisnis di Indonesia merupakan UMKM dan menyerap hampir 97% tenaga kerja Indonesia (Kementerian Koperasi dan UKM, 2014), namun dukungan pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM di Indonesia hanya mencapai 7,2% dari PDB. Dukungan pembiayaan ini paling rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Thailand, Korea, dan Kamboja (Asian Development Bank, 2014).

Pentingnya kontribusi sektor riil dan UMKM terhadap perekonomian dan stabilitas sistem keuangan tersebut telah mendorong Bank Indonesia untuk turut aktif memperkuat sektor riil dan memberdayakan UMKM. Hal ini dilakukan sebagai upaya mendukung pencapaian tugas Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi dari sisi penawaran. Untuk itu Bank Indonesia melakukan strategi pengembangan UMKM yakni peningkatan kapasitas ekonomi UMKM, dan meningkatkan pembiayaan dan akses keuangan UMKM. Pelaksanaan kedua pendekatan tersebut didasari oleh hasil penelitian/kajian yang mendukung terkait pengembangan UMKM serta didukung pula dengan kerjasama dan koordinasi baik pada lingkup domestik maupun internasional.

Pendekatan Peningkatan Kapasitas Ekonomi UMKM:

Sejalan dengan fungsi Bank Indonesia dalam pengendalian harga, Bank Indonesia berupaya mendorong peningkatan kapasitas ekonomi UMKM dengan tujuan utama meningkatkan daya beli masyarakat dan pasokan komoditas *volatile food*. Upaya tersebut diwujudkan melalui program-program antara lain pengembangan ekonomi lokal, pameran produk UMKM, pengembangan wirausaha, dan peningkatan daya saing UMKM.

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) sector holds an important role in Indonesia's economy sector given that 99.9% of business units in Indonesia are of MSMEs category, absorbing almost 97% of the country's labor force (Ministry of Cooperatives Micro Small and Medium Enterprises, 2014). However, financial support to MSMEs only reached 7.2% of GDP, the lowest compared to other ASEAN countries such as Malaysia, Thailand, Korea and Cambodia (Asian Development Bank, 2014).

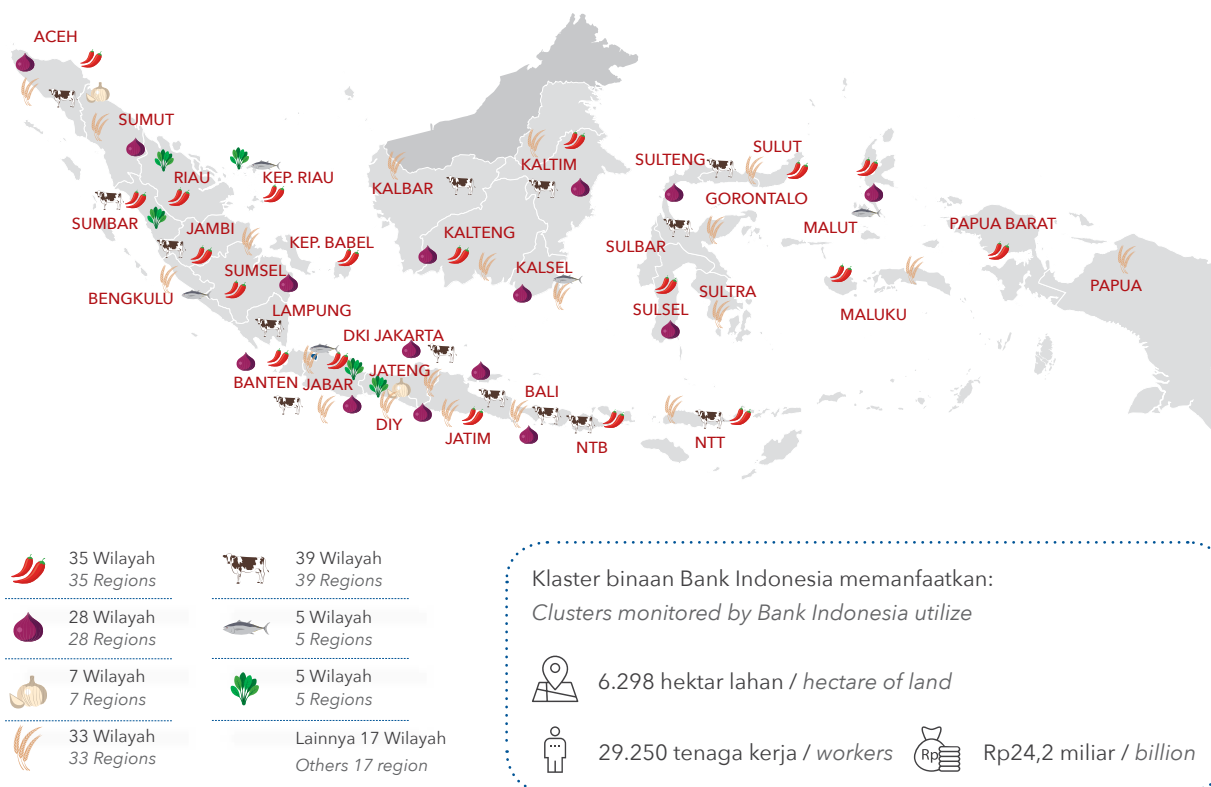
The significant contribution of real sector as well as MSMEs to the economy and financial system stability has driven Bank Indonesia to actively strengthen both sectors. This effort is to support the task achievement of Bank Indonesia in controlling the inflation from the supply side. Therefore Bank Indonesia formulated development strategy of MSMEs such as economic capacity enhancement and increasing financial access and funding to MSMEs. The implementation of the two approaches is based on research results on MSMEs development, combined with close coordination at the domestic and international levels.

Approach in Enhancing MSMEs Economy Capacity:

In line with Bank Indonesia's role in price control, Bank Indonesia strives to promote MSMEs economy capacity to enhance people's buying power and increase supplies of volatile foods. Efforts were implemented through various programs, including local economic development, MSMEs product expo, entrepreneurship development, and MSMEs competitiveness enhancement.

(i) Program Pengendalian Inflasi dalam bentuk kluster Komoditas *Volatile Food*: Hingga akhir 2016, Bank Indonesia telah mengembangkan 169 kluster di seluruh Indonesia, yaitu di 44 wilayah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri. Untuk kluster ketahanan pangan, telah dikembangkan 142 kluster terutama untuk komoditas cabai, bawang merah, bawang putih, padi, dan sapi potong, serta kluster pangan lainnya telah dikembangkan sebanyak 27 kluster diantaranya perikanan, sayuran, ayam, kedelai, sagu, jagung, itik, tebu, kakao, moka.

(i) *Inflation Control Program through Volatile Food Clusters*: By end of 2016, Bank Indonesia has established 169 clusters across Indonesia, in 44 regions of Bank Indonesia's Regional Offices. Regarding food security cluster, 142 clusters have been developed, namely for chili, red and white onion, rice commodities and beef cattle breeding, as well as 27 clusters for other food commodities such as fisheries, vegetable, poultry farms, soya beans, sago, corn, duck farms, sugar canes, cacao, mocha and other types of commodities.



Infografis Peta Wilayah Kluster UMKM Binaan Bank Indonesia
Infographic Map of MSMEs Cluster of Bank Indonesia-led

Pengembangan kluster tersebut dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir, dimulai dari penyediaan benih dan pupuk sampai dengan akses pemasaran hasil panen, termasuk akses pembiayaan. Pengembangan ini disertai pengkayaan berupa penyediaan informasi harga, digitalisasi, dan elektronifikasi untuk transaksi pada setiap rantai nilai.

Di samping itu, Bank Indonesia juga bersinergi dengan pemerintah dan *stakeholder* terkait lainnya memperluas implementasi program-program yang telah dikembangkan, antara lain:

- a) Pendampingan pengembangan kluster Bawang Putih di Kabupaten Tegal,
- b) Pengembangan Kluster Bawang Putih terintegrasi di 8 Kabupaten di Jawa Tengah
- c) *Pilot project* hilirisasi kluster Bawang Merah yang bertujuan membangun model bisnis kluster dengan fokus pada pengolahan komoditas pasca panen menjadi produk turunan yang memiliki nilai tambah.

Dalam rangka mendorong pengembangan kluster di daerah, Bank Indonesia memberikan Apresiasi Kinerja Program Pengendalian Inflasi kepada 13 kluster. Apresiasi diberikan untuk agar mendorong, menginspirasi, dan mempercepat replikasi program pengembangan komoditas penyumbang inflasi dengan pendekatan kluster.

- (ii) **Program Pengembangan Ekonomi Lokal (Local Economic Development/LED):** Di 2016, telah dilaksanakan program LED di 2 wilayah dengan tema industri kreatif dan pemberdayaan perempuan. Tema industri kreatif dilakukan dengan komitmen bersama antara Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah kabupaten Polewali Mandar dalam rangka pengembangan produk Tenun Mandar. Sementara tema pemberdayaan perempuan dilakukan dengan kesepakatan kerjasama antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah Manokwari untuk pengembangan UMKM unggulan dengan fokus pada pelaku usaha dan pekerja wanita.

Cluster development is implemented comprehensively from upstream to downstream, starting from the provision of seeds and fertilizers, extending to access to markets for harvest yields, including access to financing services. These initiatives are supported by enrichment efforts in the form of access to price information, digitization and electronification of transactions along the entire supply chain.

Furthermore, Bank Indonesia also pursued synergies with the Government and related stakeholders to extend the implementation of its programs, among others with the following initiatives:

- a) *Supervision for the development of white onion clusters in Tegal District,*
- b) *Development of integrated White Onion Clusters in 8 Districts located in Central Java*
- c) *Pilot project for the development of Red Onion downstream clusters to establish downstream cluster business models through post-harvest processing to produce byproducts with added values.*

To increase the development of clusters in the regions, Bank Indonesia has awarded Performance Appreciation on Inflation Control Programs to 13 clusters. Appreciation was given to promote, inspire and accelerate the replication of inflation contributing commodity development program through the clustering approach.

- (ii) **Local Economic Development Program (LED):** *In 2016, LED program has been implemented in 2 regions, carrying creative industry and woman empowerment themes. The creative industry theme was selected based on commitment between Bank Indonesia, West Sulawesi Provincial government and Polewali Mandar District government in the development of Tenun Mandar products. Meanwhile, the woman empowerment theme was selected based on partnership agreement between Bank Indonesia and Manokwari regional government to develop the MSMEs businesses, focusing on woman entrepreneurs and workforce.*

(iii) **Penyelenggaraan Pameran Produk UMKM:** Sebagai upaya mendorong peningkatan akses pasar UMKM, Bank Indonesia menginisiasi penyelenggaraan pameran produk UMKM Binaan Bank Indonesia serta aktif berpartisipasi pada berbagai kegiatan pameran produk UMKM antara lain Pameran Karya Kreatif Indonesia.

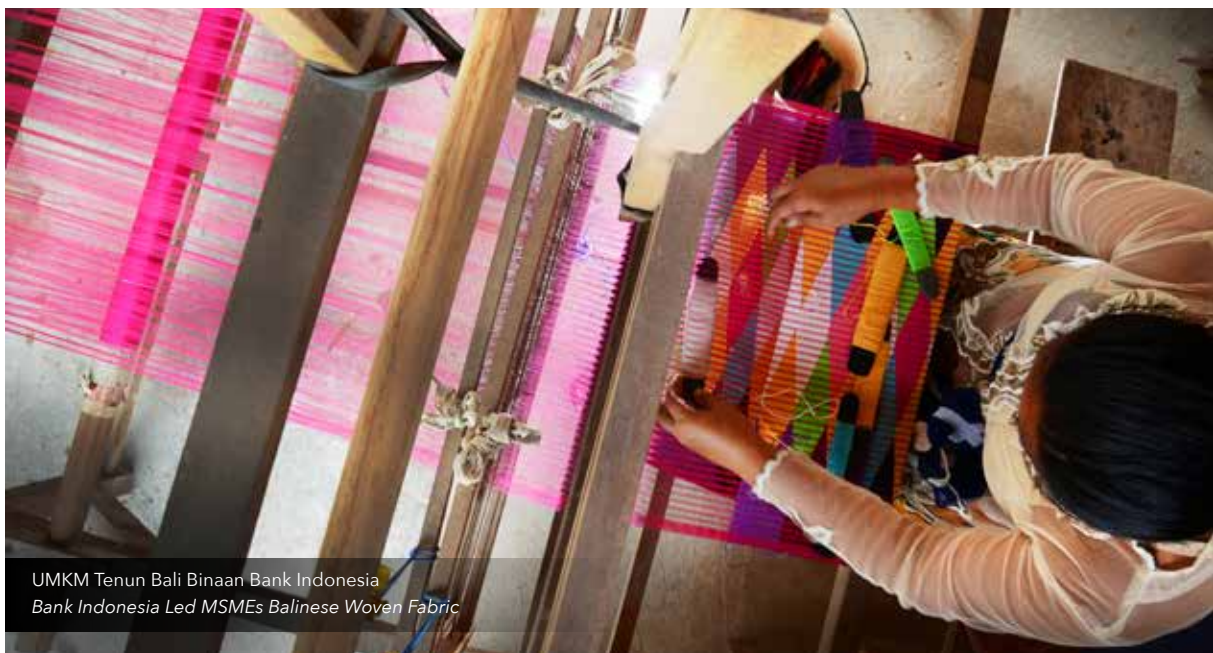
(iv) **Program Pengembangan Wirausaha:** Pelatihan dan seminar secara umum dilakukan oleh Bank Indonesia kepada seluruh wirausaha binaan Bank Indonesia. Pengembangan wirausaha juga dilakukan melalui fasilitasi produk wirausaha Bank Indonesia dalam pameran UMKM antara lain pameran Kementerian Koperasi dan UMKM "Gebyar UMKM Membangun Kewirausahaan Lokal".

(v) **Peningkatan Daya Saing UMKM Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA):** Dalam rangka turut aktif di kegiatan internasional, Bank Indonesia menyampaikan rekomendasi terkait strategi peningkatan daya saing UMKM guna menghadapi MEA kepada Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Rekomendasi tersebut mencakup sumber daya manusia (produktivitas dan inovasi), kemudahan berusaha, akses permodalan, akses pasar, infrastruktur, logistik, dan telekomunikasi, serta siklus bisnis.

(iii) **Exhibition on Products of Bank Indonesia Led MSMEs:** To increase MSMEs market access, Bank Indonesia initiated an event exhibiting products of Bank Indonesia led MSMEs, and participated in various MSMEs product exhibitions such as Indonesia Creative Product Exhibition.

(iv) **Bank Indonesia's Entrepreneurship Development Program:** Training and seminars were provided from Bank Indonesia to the most of Bank Indonesia led MSMEs. Entrepreneurship development also conducted through expo facilitation of Bank Indonesia led MSMEs such as expo of Ministry Cooperative and MSMEs "MSMEs Building Local Entrepreneurship".

(v) **MSMEs Competitiveness Enhancements to Face the ASEAN Economic Community:** In order to actively participate in international activities, Bank Indonesia has submitted recommendations to the Ministry of Foreign Affairs and Indonesian Ministry of National Development Planning on the strategy to enhance the competitiveness of MSMEs businesses to face ASEAN Economic Community. The recommendation covers human resources (productivity and innovation), ease of doing business, capital and market access, infrastructure, logistics, telecommunication and business cycle.



UMKM Tenun Bali Binaan Bank Indonesia
Bank Indonesia Led MSMEs Balinese Woven Fabric

Pendekatan Peningkatan Pembiayaan dan Akses Keuangan UMKM:

Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM, Bank Indonesia di 2013 telah menerbitkan ketentuan mengenai kewajiban rasio kredit UMKM dan pemberian insentif/disinsentif UMKM yang diberlakukan kepada Bank Umum. Secara bertahap Bank Umum diwajibkan memenuhi target rasio kredit UMKM dibanding total kredit yaitu 10% di tahun 2016, 15% tahun 2017, dan 20% tahun 2018. Bank Indonesia juga melanjutkan program perluasan dan pendalaman infrastruktur kredit UMKM untuk mengurangi kendala asimetris informasi yang disebabkan adanya kesenjangan antara kapasitas UMKM dan pembiayaan perbankan. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan skema pembiayaan kepada unbanked people menggunakan pendekatan konsep *Value Chain Financing*, meningkatkan pemanfaatan Sistem Resi Gudang, dan melaksanakan pelatihan Pencatatan Transaksi Keuangan dan Aplikasi Pencatatan Transaksi Keuangan. Sementara itu, kebijakan insentif/disinsentif UMKM dikaitkan dengan pemenuhan ketentuan Giro Wajib Minimum *Loan to Funding Ratio*.

Approaches to Increase MSMEs Financing and Financial Access:

To increase financial access to MSMEs, in 2013 Bank Indonesia issued regulation concerning MSMEs credit ratio and the application of incentive/disincentive mechanism on Commercial Banks. Gradually Commercial Bank obliged to comply to the target of minimum MSMEs credit ratio comparing to total credit: 10%, 15%, and 20% in 2016, 2017, 2018 respectively. In this regards Bank Indonesia continued its program to extend and deepen the MSMEs loan infrastructure addressing the asymmetric information constraint due to the gaps between MSMEs capacity and the banking industry's financing capacity. This programs were conducted through development of financing schemes for unbanked communities through the Value Chain Financing concept, Increasing the utilization of Warehouse Receipt System, training programs on Financial Transaction Recording and Financial Transaction Recording Application. Meanwhile, the incentive/disincentive mechanism is linked to the fulfillment of Minimum Reserve Requirement on Loan to Funding Ratio.

INOVASI USAHA TANI SEBAGAI FAKTOR SUKSES KLASTER SAPI PEDAGING BINAAN BANK INDONESIA

*Innovation of Farming Venture as the Successful Factor of
Bank Indonesia-led Cattle Breeding Cluster*

Pada 2016, klaster Sapi Pedaging berhasil memberikan kontribusi terhadap ekonomi masyarakat di Kalimantan Selatan melalui pengembangan bisnis desa wisata. Dengan pengembangan desa wisata ini, masyarakat sekitar memiliki kesempatan untuk bekerja dan memperoleh keuntungan dari desa wisata tersebut.

Kesuksesan klaster Sapi Pedaging merupakan hasil dari produktivitas dan kinerja klaster yang sangat baik. Berbagai inovasi dilakukan melalui penerapan integrasi usaha peternakan sapi dengan usaha tanaman sawit. Limbah sawit digunakan sebagai pakan sapi dan kotoran sapi digunakan sebagai bahan pupuk organik, sehingga tercapai *zero-waste agro-industri*.

Klaster ini mampu mengembangkan sistem komunikasi dan pembelajaran dengan membangun stasiun radio pedesaan yang digunakan sebagai media interaksi para anggota klaster. Selain itu, telah terdapat pengembangan produksi sampingan yaitu produksi madu, olahan makanan ringan, dan budidaya tanaman jamur. Berbagai fasilitas penting meliputi kandang ternak, kantor pengurus, ruang pertemuan, stasiun radio, peralatan dan permesinan terus dikembangkan secara swadaya oleh anggota klaster.

Pengelolaan manajemen klaster dan kelembagaan yang baik juga menjadi faktor kunci suksesnya pengembangan klaster ini. Dengan peran aktif manajemen klaster dalam membangun *networking* dengan berbagai *stakeholder*, saat ini cukup banyak aktor penggerak klaster lainnya yang menjadi mitra pengembangan klaster. Selain itu, pada klaster ini telah terbangun kemandirian serta inisiatif yang tinggi untuk membangun pusat pelatihan ekonomi pertanian, dengan tujuan untuk berbagi pengetahuan dengan peternak dan petani lain.

In 2016, the Cattle Breeding Cluster succeeded in contributing to the community in South Kalimantan through the development of village tourism. With this development, the surrounding community got the opportunity to work and profit from the village tourism project.

The success of the cluster was a result of productivity gains and the cluster's favourable performance. Several innovations were made in integrating the cattle breeding with palm oil planting activity. Palm oil waste is used as cattle feed, while cattle manure is then utilized as organic fertilizer to achieve zero-waste agro-industry practice.

This cluster was able to develop a communication and education system by developing a village radio station as an interaction media among cluster members. The cluster has also produced various byproducts, namely honey, snack food and mushroom cultivation. Various facilities, such as cattle stalls, administrative office, meeting rooms, radio station, equipment and machineries continued to be developed independently by cluster members.

Proper cluster management and institutionalization are key factors for the successful cluster development. Along with the active cluster involvement in network development with various stakeholders, increasing number of cluster drivers have participated as partners in cluster development. These clusters have increasingly become more independent and driven to develop a training center for agriculture economy aiming at sharing their knowledge with other breeders and farmers.



UMKM Sapi Pedaging Binaan Bank Indonesia
Bank Indonesia-Led Cattle Breeding Cluster

Kelembagaan klaster juga telah berkembang dengan baik dan dinilai dapat dipertahankan. Hal tersebut didukung oleh aturan organisasi yang dinamis, penerapan sistem manajemen yang efisien, dan pola pemupukan modal dari anggota untuk mendorong investasi.

Sebagai bentuk apresiasi, klaster Sapi Pedaging berhasil memperoleh predikat Pemenang II Subsektor Peternakan/Perikanan pada Kegiatan Apresiasi Kinerja Program Pengendalian Inflasi 2016.

The cluster has developed a well-run and sustained organization. It has dynamic organization rules, efficient management system and a capital accumulation system from its members to drive investment.

As a token of appreciation, the Cattle Breeding cluster won the second prize in the Husbandry/Fisheries Subsector during the Appreciation Activities of the Controlling Inflation Performance Program for 2016.

MENJAGA KUALITAS LAYANAN KEPADA PEMERINTAH

Maintaining Quality Service for the Government

Disamping menjalankan tugas utama dalam menjaga kestabilan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta efektifitas pengelolaan uang Rupiah, Bank Indonesia juga memberikan layanan kepada pemerintah antara lain berupa pengelolaan rekening pemerintah, layanan jasa perbankan kepada pemerintah dan penatausahaan pinjaman luar negeri pemerintah.

- **Pengelolaan Kas Rekening Pemerintah yang didukung oleh implementasi Treasury Single Account (TSA):** Sesuai Undang Undang tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah yang melakukan penatausahaan seluruh Rekening Pemerintah. Penatausahaan rekening Pemerintah dilakukan baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing. Rekening digunakan untuk menampung penerimaan Pemerintah antara lain Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan penerimaan Migas serta dana dari Penerbitan Surat Berharga Negara, Pinjaman dan Hibah. Rekening juga digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah dalam Rupiah dan valuta asing antara lain untuk belanja pemerintah, pembayaran pelunasan pokok/kupon/*buyback* Surat Berharga Negara, dan pembayaran utang luar negeri.
- **Layanan Perbankan bagi Pemerintah:** Bank Indonesia telah menyediakan layanan Bank Indonesia Government electronic Banking (BIG-eB) kepada Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sejak 2007. Pada 2010 BIG-eB terhubung dengan Sistem Pembendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang dioperasikan oleh Kementerian Keuangan. Tujuan penyediaan fasilitas BIG-eB antara lain adalah menyediakan informasi/data keuangan Rekening Pemerintah di Bank Indonesia secara *online* dan *real-time* dalam rangka mendukung implementasi TSA, mempercepat proses penyusunan laporan di Kementerian Keuangan dan membantu

Aside from executing its main task in maintaining monetary stability, as well as administering and protecting the continuity of the payment system, Bank Indonesia also provides various services to the government, among others, administering the government accounts, providing banking services for the government and administering the government's foreign loans.

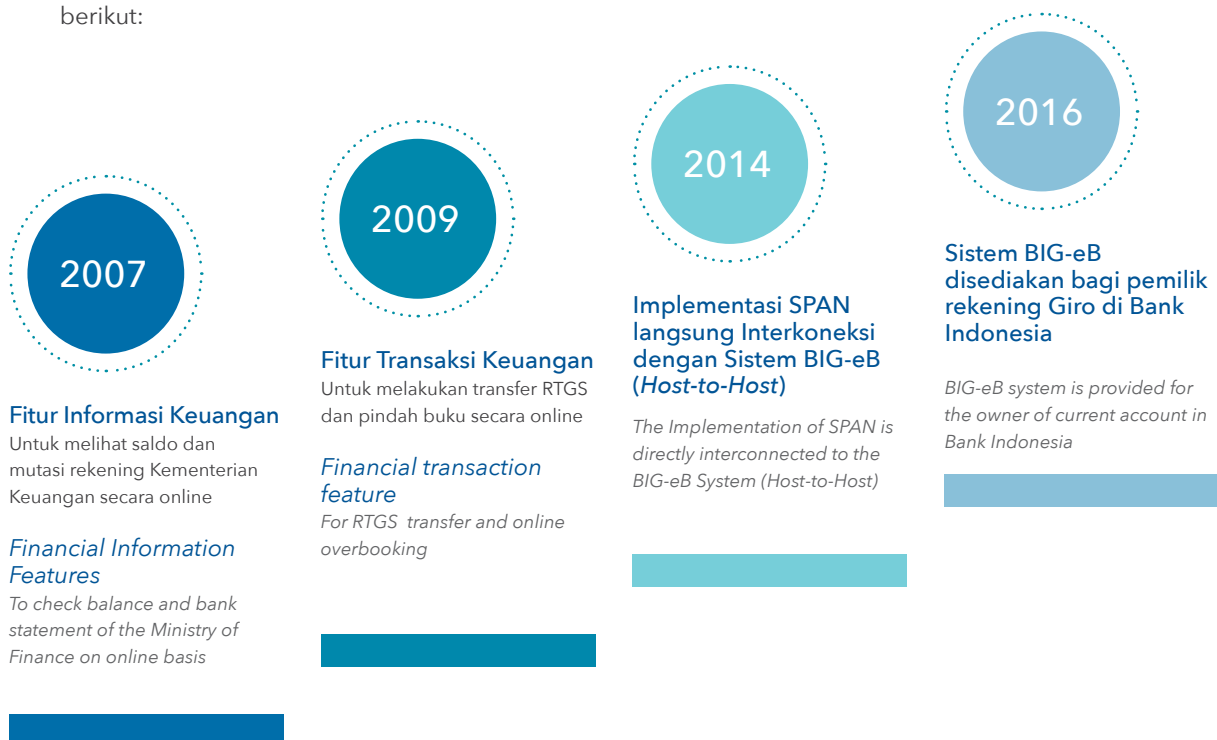
- **Managing the Government's Cash Account supported by implementing the Treasury Single Account (TSA):** In accordance with the Law on Bank Indonesia, Bank Indonesia acts as the Government's cash holder, administering all Government Accounts. Administration of government accounts is conducted in both Rupiah and Foreign Currency. Accounts are used to receive Government revenue including Taxes, Non-Tax State Revenue and oil and gas revenues as well as funds from Government Bond Issuance, Loans and Grants. Accounts are also used to finance Government expenditures in Rupiah and Foreign Currency, among others, for government expenditures, Government Bond redemption / coupon / *buyback* payments, and foreign debt repayment.
- **Banking Services for the Government:** Bank Indonesia provides the Bank Indonesia Government Electronic Banking (BIG-eB) services for the Government, through the Ministry of Finance, since 2007. In 2010, BIG-eB was connected with State Owned and Treasury System (SPAN) operated by the Ministry of Finance. The objective of providing the BIG-eB facility is to provide financial information / financial data of Government Accounts in Bank Indonesia online and real-time to support TSA implementation, accelerate the process of preparing reports at the Ministry of Finance and assist the Ministry of Finance in conducting its

Kementerian Keuangan melakukan *cash management, forecasting*, dan pengelolaan keuangan lain secara lebih baik dan akurat serta mendukung penguatan koordinasi kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan dan moneter di Bank Indonesia.

cash management, forecasting and managing its other finances more efficiently and accurately as well as supporting closer fiscal policy coordination at the Ministry of Finance and monetary policy at Bank Indonesia.

Pengembangan BIG-eB dilakukan secara bertahap sejak 2007 hingga 2016 oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Keuangan. Pentahapan pengembangan BIG-eB disesuaikan dengan perkembangan bisnis transaksi dan informasi keuangan sebagai berikut:

The development of BIG-eB is done gradually from 2007 to 2016 by Bank Indonesia in cooperation with the Ministry of Finance. The stages of BIG-eB development are adjusted to the business transaction trends and financial information as follows:



Gambar 3. Tahapan Pengembangan sistem BIG-eB
Picture 3. Stages of BIG-eB System Development

- **Penatausahaan Utang dan/atau Hibah Luar Negeri Pemerintah:** Sesuai amanat Undang Undang Bank Indonesia, Bank Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah menerima Pinjaman Luar Negeri (PLN), menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap pihak luar negeri.
- **Administering Government Debt and/or Foreign Grants:** As mandated by the Bank Indonesia Act, Bank Indonesia for and on behalf of the Government receives Foreign Borrowings (PLN), administers and settles the Government's financial bills and obligations to foreign parties.

Dalam melaksanakan hal tersebut, Bank Indonesia melakukan koordinasi dan/ atau konsultasi, penarikan, pembayaran,

In doing so, Bank Indonesia coordinates and / or consults, withdraws, pay, administer, publicize and act as the Government's Administration

penatausahaan, publikasi serta bertindak sebagai Agen Penatausahaan Pemerintah. Terkait dengan kegiatan koordinasi dan/atau konsultasi, atas permintaan Pemerintah, Bank Indonesia dapat memberikan rekomendasi/masukan untuk melaksanakan fungsi *advisory* atas draf *Loan Agreement* PLN Pemerintah. Guna meningkatkan kualitas pencatatan data, penatausahaan ini didukung dengan penggunaan *Debt Management and Financial Analysis System* serta proses rekonsiliasi yang dilakukan secara rutin.

Disamping memberikan layanan penatausahaan PLN, Bank Indonesia juga melaksanakan fungsi sebagai agen penatausahaan *global bonds*. Kegiatan tersebut meliputi pencatatan kepemilikan, termasuk kepemilikan di pasar sekunder untuk *global bonds* USD dan EUR, kliring dan setelmen serta sebagai agen pembayaran pokok dan bunga Surat Utang Negara/agen pembayar Surat Berharga Syariah Negara. Kegiatan penatausahaan ini dilaporkan secara triwulanan kepada Kementerian Keuangan.

- **Layanan Sub-Registry Surat Berharga Negara:** Dalam rangka membantu Kementerian Keuangan melakukan Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam bentuk SBN, Bank Indonesia memberikan layanan *sub-registry* kepada Pemerintah Daerah.

Sebagai upaya untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pemerintah, Bank Indonesia secara berkala melakukan pemantauan atas kepuasan pemerintah c.q. Kementerian Keuangan, terhadap layanan yang diberikan oleh Bank Indonesia. Pemantauan dilakukan dengan menggunakan survei oleh pihak eksternal independen. Hasil survei 2016 menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi mencapai angka 5,19 dari skala 6.

Agent. With regard to coordination and / or consultation activities, at the request of the Government, Bank Indonesia may provide recommendations, as an advisor, on the Government's draft Loan Agreement with PLN. To improve the quality of data recording, this service is supported by using a Debt Management and Financial Analysis System as well as a routine reconciliation process.

In addition to providing PLN administration services, Bank Indonesia also performs the function of administering global bonds. Such activities include ownership records, including ownership in the secondary market for USD and EUR global bonds, clearing and settlement as well as principal payments and Government debt interest/Sharia Government Bond paying agents. This administrative activity is reported quarterly to the Ministry of Finance.

- **State Securities Sub-Registry Service:** In order to assist the Ministry of Finance in converting the Distribution of Funds and/or General Allocation Fund in the form of SBN, Bank Indonesia provides *sub-registry* services to the Regional Government.

In an effort to continue providing the best service to the government, Bank Indonesia regularly monitors the satisfaction of the government c.q. Ministry of Finance, on the services provided by Bank Indonesia. Monitoring is conducted using a survey by an independent external party. The 2016 survey results show a very high level of satisfaction index reached 5.19 on a scale of 6.

MEMPERKOKOH KERJA SAMA INTERNASIONAL

Strengthening International Cooperation

Pemulihan ekonomi global yang lamban masih menjadi fokus perhatian kegiatan kerjasama internasional. Ekonomi dunia saat ini menghadapi sejumlah tantangan dan risiko, antara lain, volatilitas pasar keuangan, lemahnya ekonomi beberapa negara berkembang, meningkatnya kebijakan yang berorientasi domestik, dan faktor non ekonomi seperti tekanan geopolitik dan terorisme. Sebagai respons, kerjasama internasional perlu diperkuat serta saling memberikan rekomendasi dan komitmen untuk mendorong pertumbuhan, agar pemulihan ekonomi dipercepat, serta resiliensi ekonomi dan sistem keuangan global terus ditingkatkan.

Selama 2016, Bank Indonesia aktif menghadiri berbagai pertemuan internasional, khususnya forum G20, International Monetary Fund (IMF), Bank for International Settlements (BIS), ASEAN dan Pertemuan Tingkat Eksekutif Bank Sentral Negara Asia Pasifik (EMEAP). Dalam berbagai pertemuan tersebut, Bank Indonesia aktif menyampaikan pentingnya sinergi untuk mendorong pertumbuhan dan pemulihan ekonomi global serta meningkatkan resiliensi ekonomi dan sistem keuangan.

Salah satu yang perlu diperkuat adalah jaring pengaman keuangan global di G20 dan IMF serta menunjukkan kepemimpinan di kawasan dengan menjadi pimpinan dalam penyusunan cetak biru ASEAN *Financial Integration 2025*, merumuskan *Strategic Action Plan ASEAN Financial Integration 2025*, sebagai *Chair* dalam Executive Meeting of East Asia Pacific (EMEAP) Central Banks, memastikan kepemimpinan Bank Indonesia di IMF. Selain itu, Bank Indonesia juga mensinergikan posisi nasional dalam integrasi ekonomi dan keuangan serta melaksanakan *Pilot Project Investor Relation Unit - Regional Investor Relation Unit - Global Investor Relation Unit (IRU-RIRU-GIRU)*.

The slow global recovery is still the focus of international cooperation activities. Currently, the world economy faces a number of challenges and risks, including financial market volatility, the still weak economies of several developing countries, the rise of inward-looking policies, and non-economic factors, such as, geo-political tension and terrorism. In response, international cooperation needs to come up with recommendations and commitments to boost growth, accelerate economic recovery, as well as, strengthen economic resilience and the global financial system.

In 2016, Bank Indonesia attended various international meetings, among others, the G20 forum, meetings held by the International Monetary Fund (IMF), the Bank for International Settlements (BIS) as well as the ASEAN and Executive Summit of the Asia Pacific Regional Central Banks (EMEAP). In these meetings, Bank Indonesia actively conveyed the importance of synergies to achieve growth and stability for the global economy and its financial systems, respectively.

One area that needs strengthening is the G20 and IMF's global financial safety net and the need for Bank Indonesia to take the lead in drafting the ASEAN 2025 Financial Integration blueprint, formulating the Strategic Action Plan, as a Chair of the Executive Meeting of East Asia Pacific (EMEAP) Central Banks, and to ensure the chairing of the IMF Office. In addition, Bank Indonesia also synergizes with related national institutions to promote economic and financial integration and implement a Pilot Project Investor Relation Unit (IRU-RIRU-GIRU).

A. KERJA SAMA FORUM MULTILATERAL

Dalam kancah internasional, Bank Indonesia turut aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dunia: Bank Indonesia dan delegasi Republik Indonesia menunjukkan kepemimpinan dan kesungguhan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menerapkan bauran kebijakan. Hal ini sejalan dengan kesepakatan para Pemimpin G20 sebagaimana tercantum dalam *Hangzhou Leaders Communique* antara lain menjalin sinergi antara kebijakan fiskal, moneter dan struktural.

Indonesia juga memperlihatkan kesungguhan dalam implementasi Strategi Pertumbuhan dengan hasil asesmen yang menunjukkan bahwa reformasi struktural Indonesia diperkirakan akan memberikan dampak pada tambahan pertumbuhan ekonomi.

Indonesia juga berperan mendorong resiliensi melalui G20 dan IMF. Delegasi Bank Indonesia aktif menyuarakan pentingnya mitigasi risiko aliran modal untuk mengurangi volatilitas pasar keuangan yang selama ini dapat mengganggu stabilitas nilai tukar di negara berkembang. Sebagai hasilnya, IMF menyampaikan kajian mengenai pengalaman negara-negara dalam melakukan kebijakan manajemen aliran modal (*Capital Flows Management Measures*). Selain itu, Delegasi Bank Indonesia juga aktif menyuarakan pentingnya penguatan jaring pengaman keuangan global (*Global Financial Safety Net - GFSN*) melalui pembentukan fasilitas baru dari IMF. Secara konkret, Bank Indonesia mendorong IMF untuk menyediakan fasilitas likuiditas jangka pendek yang tidak berbasis pinjaman, namun menyerupai swap dan dapat ditarik oleh negara dengan perekonomian yang kuat.

A. MULTILATERAL FORUM COOPERATION

In the International forum, Bank Indonesia actively boost the global economic growth: Bank Indonesia and the Indonesian delegation showed its leadership and commitment in stimulating economic growth through a mix of policies. This is in line with the agreement of G20 leaders, as stated in the Hangzhou Leaders Communique such as synergizing the fiscal, monetary and structural policy.

Indonesia also showed its commitment in implementing Growth Strategies with the assessment result that Indonesia's structural reforms are expected to have an impact on additional economic growth.

Indonesia also played a role in promoting resilience through the G20 and IMF. The Bank Indonesia delegation actively promoted the importance of capital flow risk mitigation to reduce financial market volatility that could disrupt the developing countries' exchange rate stability. As a result, the IMF is reviewing the experience of countries implementing the Capital Flows Management Measures. In addition, the Bank Indonesia delegation also actively voiced the importance of strengthening the global financial safety net (GFSN) through the establishment of new IMF facilities. Specifically, Bank Indonesia encourages the IMF to provide short-term non-lender-based liquidity facilities, resembling swaps that can be withdrawn.

Bank Indonesia aktif mendorong peningkatan resiliensi sektor keuangan melalui forum Financial Stability Board (FSB). Selama 2016, Bank Indonesia mendorong FSB untuk meningkatkan ketahanan atau resiliensi lembaga keuangan. Sebagai hasilnya, FSB mewajibkan lembaga keuangan untuk memiliki permodalan dan likuiditas pada tingkat yang memadai untuk menyerap potensi risiko yang timbul. FSB juga berupaya mencegah terbentuknya lembaga keuangan yang bersifat 'too-big-to-fail' melalui implementasi standar *Total Loss Absorbing Capacity*. Hal tersebut ditujukan untuk mempersiapkan kecukupan kemampuan lembaga keuangan global yang sistemik (*Global Systemically Important Financial Institutions*) untuk menyerap kerugian sehingga mekanisme *bail-out* Pemerintah dapat dihindari.

Article IV Consultation: Pada 8 - 18 November 2016 tim IMF melakukan asesmen terhadap perekonomian Indonesia dalam kerangka *Article IV Consultation for Indonesia 2016*. Bank Indonesia aktif melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait agar K/L dapat menyampaikan pencapaian pembangunan ekonomi di Indonesia kepada Tim IMF sehingga persepsi positif atas perekonomian Indonesia tetap terjaga. Hal ini penting karena hasil asesmen IMF akan menjadi rujukan bagi institusi keuangan internasional lainnya termasuk lembaga pemeringkat dan investor dalam menilai perekonomian Indonesia.

Kinerja ekonomi Indonesia secara umum dinilai baik dan berhasil menjaga stabilitas makroekonomi serta menyesuaikan diri dengan kondisi perekonomian global. Bauran kebijakan makro ekonomi dengan reformasi struktural dinilai telah membantu Indonesia dalam menghadapi beberapa tantangan, seperti siklus turunnya harga komoditas dunia, lambatnya pertumbuhan ekonomi global, serta beberapa episode gejolak keuangan yang berpengaruh kepada negara berkembang. Selain itu, Indonesia juga dinilai telah melangkah maju dalam upaya pendalaman pasar keuangan.

Kerja sama forum Bank for International Settlement (BIS) menekankan pentingnya menjaga resiliensi perekonomian: Pada 2016, Bank Indonesia bersama dengan anggota BIS lainnya membahas upaya bersama dalam meredam dampak hasil referendum keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit). Untuk

Bank Indonesia actively encouraged increasing financial sector resilience through the Financial Stability Board (FSB) forum. In 2016, Bank Indonesia encouraged the FSB to increase the resilience of financial institutions. As a result, the FSB requires financial institutions to have adequate capital and liquidity to absorb potential risks. The FSB also seeks to prevent the formation of 'too-big-to-fail' financial institutions through the implementation of the Total Loss Absorbing Capacity standards. This is intended to adequately prepare global systemically Important Financial Institutions to have the capability to absorb losses to avoid using the Government's bail-out mechanism.

Article IV Consultation: On November 8th - 18th 2016 the IMF team conducted an assessment of the Indonesian economy within the framework of *Article IV Consultation for Indonesia 2016*. Bank Indonesia is actively coordinating with related ministries and agencies so that they can perform adequately. The IMF Team acknowledgement of Indonesia's economic development achievement helps maintain positive market sentiment. This is important as IMF's assessment results is often a reference for other international financial institutions, including rating agencies and investors, in assessing Indonesia's economy.

The performance of Indonesia's economy is considered good and it is managed to maintain macroeconomic stability in line with global economic trends. The macroeconomic policy mix with structural reforms is considered to have helped Indonesia face of several challenges, such as, the drop in world commodity price, the slow global recovery, and several episodes of financial turmoil affecting developing countries. In addition, Indonesia is also regarded to have progressed in deepening its financial markets.

The cooperation of the Bank for International Settlement (BIS) forum emphasizes the importance of maintaining economic resilience: In 2016, Bank Indonesia along with other BIS members discussed joint efforts to curb the impact from UK's referendum result to exit from the European Union (Brexit). To

meredam dampak Brexit, bank sentral negara anggota BIS menekankan perlunya kesiapan dan kerjasama yang erat untuk mengamankan keberlangsungan fungsi pasar uang, melalui penyediaan likuiditas dalam rangka meredam gejolak di financial market dan melakukan monitoring secara seksama untuk memastikan keberlangsungan fungsi dan stabilitas pasar uang. Selain itu, BIS juga menyoroti perkembangan teknologi informasi pada sektor keuangan (*fintech*) dengan menekankan pentingnya monitoring dan mitigasi risiko yang muncul dengan tetap mendorong perkembangan *fintech* untuk kepentingan inklusi keuangan.

Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan menyelenggarakan Sidang Tahunan International Development Bank (IDB) pada Mei 2016: Sidang tersebut membahas koordinasi serta kerja sama teknis untuk pembangunan antarnegara anggota dan ketahanan ekonomi bagi negara anggota. Selain itu, dibahas pula pengembangan investasi syariah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pengembangan memusatkan perhatian pada pembiayaan syariah yang inovatif untuk pengentasan kemiskinan, pengembangan pasar syariah mikro bagi keuangan inklusif, dan pendanaan syariah di sektor infrastruktur.

B. KERJA SAMA FORUM REGIONAL

Rencana aksi strategis untuk integrasi keuangan ASEAN 2025: Sebagai tindak lanjut visi integrasi sektor keuangan ASEAN paska 2015, yang menjadi bagian dari ASEAN Economic Community Blueprint 2025, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN telah menyepakati Rencana aksi strategis untuk integrasi keuangan ASEAN 2025 pada pertemuan April 2016 di Vientiane, Laos. Rencana aksi tersebut merupakan rencana kerja yang berisi inisiatif integrasi keuangan di area perbankan, asuransi, pasar modal, keuangan inklusif, sistem pembayaran, dan aliran modal.

Rencana aksi strategis terdiri dari tiga pilar, yaitu integrasi keuangan, inklusi keuangan, dan stabilitas keuangan. Inisiatif integrasi keuangan ini dilakukan dalam periode 10 tahun (2016-2025). Sebagai langkah lanjutan, kini sedang disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat evaluasi kinerja

mitigate the impact from this, BIS member country central banks emphasized the need for better readiness and closer cooperation to sustain their respective money market's function and stability, by providing sufficient liquidity. This is to mitigate financial market volatility and to closely monitor to keep their respective money markets functioning normally. In addition, BIS also highlighted the development of information technology in the financial sector (fintech). In this area, BIS emphasized the importance of monitoring and mitigating risks that may arise, while still fostering the development of fintech to promote financial inclusion.

In May 2016, Bank Indonesia, with the Ministry of Finance, held the International Development Bank (IDB) Annual Session: The session discussed coordination and technical cooperation for the development and economic resilience for member countries. In addition, the session also discussed the development of sharia investment to achieve sustainable development goals. Discussion focused on innovative sharia financing for poverty alleviation, the development of a sharia market for inclusive finance, and sharia financing for infrastructure.

B. REGIONAL FORUM COOPERATION

Strategic action plan for ASEAN financial integration 2025: As a follow-up to the vision of ASEAN's financial sector integration post-2015, which is part of the ASEAN Economic Community Blueprint 2025, the Finance Ministers and the Governors of ASEAN's central banks have agreed on the Strategic Action Plan (SAP) for Financial Integration 2025, at the April 2016 meeting in Vientiane, Laos. The SAP is a work plan that contains financial integration initiatives in the areas of banking, insurance, capital markets, inclusive finance, payment systems, and capital flows.

The SAP consist of three pillars, namely financial integration, financial inclusion, and financial stability. This financial integration initiative will be conducted in 10-years (2016-2025). As a follow-up, Key Performance Indicators (KPIs) are now being formulated as an evaluation tool for achieving the

pencapaian visi ASEAN Economic Community 2025 untuk sektor keuangan. Bank Indonesia aktif berpartisipasi dalam penyusunan rencana aksi strategis dan IKU integrasi keuangan ASEAN 2025.

Kerja sama ASEAN+3: Bank Indonesia juga aktif dalam kerjasama ASEAN+3 yang difokuskan pada upaya penguatan resiliensi kawasan dalam menghadapi risiko ketidakpastian global yang terus berlanjut, diantaranya melalui penguatan Chiang Mai Initiatives Multilateralization (CMIM) dan peningkatan peran ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO). AMRO memiliki peran penting sebagai lembaga surveilans regional dalam mendukung operasionalisasi CMIM. CMIM dan AMRO merupakan bagian penting dari jaring pengaman keuangan regional di tengah meningkatnya tantangan global.

Di 2016, penguatan CMIM difokuskan pada peningkatan fasilitas CMIM yang tidak terkait dengan IMF (CMIM-IMF *Delinked Portion*). Selain itu, kerjasama juga dilakukan untuk memperkuat koordinasi antara CMIM dengan *Global Financial Safety Net* (GFSN) dan upaya peningkatan kesiapan operasionalisasi CMIM.

Executive Meeting of East Asia Pacific (EMEAP)

Central Banks: Bank Indonesia bersama Monetary Authority of Singapore dan Reserve Bank of New Zealand sebagai pemimpin diskusi menyampaikan semakin tingginya risiko pembalikan modal di negara *emerging* paska hasil pemilihan umum di Amerika Serikat. Implementasi kebijakan AS yang baru diperkirakan akan berdampak pada peningkatan inflasi AS yang lebih cepat dari perkiraan pasar dan kenaikan *Fed Fund Rate* yang akan mempengaruhi kondisi global yang masih rentan. Terkait hal ini, Bank Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia secara fleksibel dapat menyesuaikan dan merespon risiko global, yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang tetap terjaga. Ke depan, EMEAP sepakat untuk memperkuat komunikasi dan kerjasama regional dengan negara lain di luar kawasan EMEAP guna menghadapi tantangan ekonomi global.

vision of ASEAN Economic Community 2025 for the financial sector. Bank Indonesia actively participates in the preparation of SAP for Financial Integration 2025 and related KPIs.

ASEAN + 3 Cooperation: Bank Indonesia is also active in ASEAN + 3 cooperation focused on strengthening regional resilience in the face of continued global uncertainty risks, such as strengthening Chiang Mai Initiatives Multilateralization (CMIM) and enhancing the role of ASEAN + 3 Macroeconomic Research Office (AMRO). AMRO plays a significant role as a regional surveillance agent in supporting the operation of CMIM. Both CMIM and AMRO are important parts of regional financial safety net in the midst of the rise of the global challenge.

In 2016, the strengthening of CMIM is focused on upgrading CMIM facilities unrelated to IMF (CMIM IMF Delinked Portion). In addition, cooperation is also underway to strengthen coordination between CMIM and the Global Financial Safety Net (GFSN) and efforts to improve CMIM operational readiness.

Executive Meeting of East Asia Pacific (EMEAP)

Central Banks: Bank Indonesia along with the Monetary Authority of Singapore and Reserve Bank of New Zealand as a lead discussant conveyed the risks of capital reversal, especially in emerging countries post the result of US election. Implementation of the new US policy is expected to have an impact in rising US inflation faster than market forecasts and an increase in the *Fed Fund Rate*, that will affect the still fragile global condition. In this regard, Bank Indonesia noted that the Indonesian economy can flexibly adjust and respond to global risks, which should be reflected in sustained economic growth and inflation. In confronting the global economy challenges, EMEAP agreed to strengthen communication and regional cooperation with non EMEAP countries.

C. KERJA SAMA PENGUATAN CADANGAN DEvisa DAN PENGGUNAAN MATA UANG LOKAL

Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, Indonesia telah memiliki fasilitas *second line of defense* dalam bentuk kerja sama ketahanan sistem keuangan regional (*Regional Financial Arrangement*) dan kerja sama bilateral dengan negara mitra. Fasilitas tersebut meliputi ASEAN Swap Arrangement (ASA), the Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM), dan *Bilateral Swap Arrangement* (BSA), dan *Bilateral Currency Swap Agreement* (BCSA). Fasilitas ini diharapkan dapat berkontribusi positif pada upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan pada akhirnya dapat menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah.

Selain itu, Bank Indonesia juga telah menjalin kerja sama bilateral dengan Bank Negara Malaysia dan Bank of Thailand yang ditujukan untuk membentuk kerangka kerjasama dalam penyelesaian perdagangan bilateral dan investasi langsung dengan menggunakan mata uang lokal (*local currency settlement - LCS*), yaitu Rupiah, Baht maupun Ringgit.







C. COOPERATION OF STRENGTHENING FOREIGN EXCHANGE RESERVES AND THE USE OF LOCAL CURRENCY

To maintain financial system stability, Indonesia manages its second line of defense facilities, through regional financial system resilience (regional financial arrangement) cooperation and bilateral cooperation with partner countries. These facilities include the ASEAN Swap Arrangement (ASA), the Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM), and the Bilateral Swap Arrangement (BSA), and Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA). These facilities are expected to positively contribute in reducing the dependency to USD which will lead to Rupiah currency stability.

In addition, Bank Indonesia has also established bilateral cooperation with Bank Negara Malaysia and Bank of Thailand to establish a framework for cooperation in bilateral trade settlements and direct investment, using local currency settlement (LCS), namely Rupiah, Baht or Ringgit.



Penandatanganan Kerja Sama LCS
Signing of LCS Cooperation

No	Jenis Fasilitas Type of Facilities	Nilai Fasilitas Nominal of Facilities
1	 ASEAN Swap Arrangement	Swap antara USD/Yen/Euro dengan mata uang domestik 10 negara ASEAN. Dalam perjanjian ini, Indonesia dapat melakukan swap sampai dengan USD2 miliar <i>Swap between USD/Yen/Euro and domestic currency of 10 ASEAN countries. Under this agreement, Indonesia can swap up to USD2 billion.</i>
2	 Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM)	Swap antara USD dengan mata uang domestik negara anggota ASEAN+3. Dalam perjanjian ini, Indonesia dapat melakukan swap sampai dengan USD240 miliar. <i>Swap between USD and domestic currency of ASEAN+3 countries. Under this agreement, Indonesia can swap up to USD 240 billion.</i>
3	 Bilateral Swap Arrangement Bank Indonesia-Bank Of Japan	Swap antara USD dengan Rupiah dengan nilai fasilitas sebesar USD22,76 miliar. <i>Swap between USD and Rupiah with nominal facility of USD22,76 billion.</i>
4	 Bilateral Currency Swap Arrangement Bank Indonesia-People Bank of China	Swap antara mata uang lokal CNY dengan Rupiah dengan nilai fasilitas sebesar CNY100 miliar/IDR17.5 triliun. <i>Swap between local domestic currency CNY and Rupiah with nominal facility of CNY100 billion/IDR175 trillion.</i>
5	 Bilateral Currency Swap Arrangement Bank Indonesia-Bank Of Korea	Swap antara KRW dengan Rupiah dengan nilai fasilitas sebesar KRW10,7 triliun/IDR115 triliun. <i>Swap between KRW and Rupiah with nominal facility of KRW10,7 trillion/IDR115 trillion.</i>
6	 Bilateral Currency Swap Arrangement Bank Indonesia-Reserve Bank of Australia	Swap AUD dengan Rupiah dengan nilai fasilitas sebesar AUD10 miliar/IDR100 triliun. <i>Swap between AUD and Rupiah with nominal facility of AUD10 billion/IDR100 billion.</i>

Tabel 1. Kerjasama Swap Arrangement
Table 1. Swap Arrangement Cooperation

D. KOMUNIKASI DENGAN INVESTOR DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Investor Relations Unit (IRU): Sepanjang 2016, IRU-Bank Indonesia telah melaksanakan sejumlah kegiatan hubungan investor dalam rangka mengelola persepsi positif perekonomian Indonesia dalam bentuk *investor briefing*, *investor conference call*, pertemuan IRU Korporasi, serta penguatan koordinasi IRU - RIRU - GIRU. IRU juga telah memfasilitasi pelaksanaan asesmen tahunan empat lembaga pemeringkat (Standard & Poor's - S&P, Moody's, Fitch, dan Japan Credit Rating Agency - JCRA) dan membantu proses penerbitan Surat Utang Negara Valuta Asing Pemerintah untuk Global Bond, Euro Bond, Global Sukuk, dan Samurai Bond.

D. COMMUNICATION WITH INVESTORS AND INTERNATIONAL AGENCIES

Investor Relations Unit (IRU): Throughout 2016, Bank Indonesia's IRU has conducted a number of investor relations activities to manage positive perceptions of the Indonesian economy through investor briefings, investor conference calls, Corporate IRU meetings, and strengthening the linkage among IRU, the Regional RIRU and the GIRU. The IRU has also facilitated the implementation of the annual assessment of four rating agencies (Standard & Poor's - S & P, Moody's, Fitch and Japan Credit Rating Agency - JCRA) and assisted with the issuance of Global Government Bonds, Euro Bond, Global Sukuk, and Samurai Bond.

Pelaksanaan kegiatan hubungan investor oleh IRU tersebut mendapat penilaian yang memuaskan dari Institute of International Finance, yakni lembaga yang selama ini melakukan penilaian atas praktik hubungan investor di *emerging market*. Di 2016 IRU kembali memperoleh nilai tertinggi untuk kategori *Investor Relations Practices Criteria*.

Pada akhir 2016, IRU Bank Indonesia telah memfasilitasi asesmen tahunan lembaga pemeringkat (Moody's dan Fitch), *investor briefing*, *investor conference call*, serta penguatan IRU-RIRU-GIRU. Koordinasi yang erat antara Bank Indonesia dengan kementerian dan lembaga lain dalam persiapan asesmen lembaga pemeringkat, membuahkan hasil yang sangat baik, dimana Indonesia berhasil meningkatkan *outlook sovereign rating* dari stabil menjadi positif. Perbaikan *outlook* ini ditopang:

- (i) rekam jejak stabilitas makroekonomi yang dapat dijaga dengan baik oleh otoritas dalam beberapa tahun terakhir di tengah tantangan ekonomi global;
- (ii) kebijakan moneter dan nilai tukar yang ditempuh Bank Indonesia telah efektif meredam gejolak di pasar keuangan; serta
- (iii) dorongan reformasi struktural yang kuat sejak September 2015 yang mampu memperbaiki iklim investasi secara bertahap dan diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

Upaya peningkatan persepsi positif perekonomian Indonesia juga didukung oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Luar Negeri (KPwLN) baik di Singapura, Tokyo, London, dan New York. KPwLN telah melakukan sejumlah pertemuan baik dengan investor maupun mitra strategis di wilayah kerja KPwLN, serta bekerjasama dengan perwakilan kementerian dan lembaga dalam penyelenggaraan kegiatan promosi investasi seperti The ASEAN Business Forum di Barcelona, Spanyol (Oktober 2016) dan Business Forum on Energy and Infrastructure Sectors di Alberta, Kanada (November 2016). Selanjutnya, sebagai bagian dari upaya penguatan sinergi IRU-RIRU-GIRU dan pelaksanaan kerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait, telah difasilitasi 2 (dua) kali promosi investasi daerah di Kanada, yaitu promosi yang dilakukan oleh RIRU Jawa Barat (Mei 2016) dan RIRU Kalimantan Timur (November 2016).

Implementation of investor relations activities by IRU received a satisfactory assessment from the Institute of International Finance (IIF), the institution that has been assessing the practice of investor relations in emerging markets. In 2016 IRU got the highest score for the category Investor Relations Practices Criteria.

At the end of 2016, IRU Bank Indonesia has facilitated the annual assessment of rating agencies (Moody's and Fitch), investor briefings, conference call investors, and the strengthening of IRU-RIRU-GIRU. Close coordination between Bank Indonesia and Ministries as well as Agencies in the preparation of assessment of rating agencies yielded excellent results, with Indonesia succeeding in increasing the rating outlook from stable to positive. This outlook improvement is sustained:

- (i) a track record of macroeconomic stability that is well maintained, by authorities in recent years, amid global economic challenges;*
- (ii) the monetary and exchange rate policies adopted by Bank Indonesia have effectively mitigated fluctuations in financial markets; and*
- (iii) a strong structural reform drive since September 2015, that is able to improve the investment climate gradually and is expected to boost economic growth in the medium term.*

Efforts to increase positive perceptions of the Indonesian economy are also supported by the Representative Offices of Bank Indonesia (KPwLN) in Singapore, Tokyo, London and New York. KPwLN has conducted a number of meetings with both investors and strategic partners in the KPwLN working area, and in cooperation with other government representatives in organizing investment promotion activities, such as the ASEAN Business Forum in Barcelona, Spain (October 2016) and the Business Forum on Energy and Infrastructure Sectors in Alberta, Canada (November 2016). Furthermore, as part of efforts to strengthen the synergy of IRU-RIRU-GIRU and the implementation of cooperation with related government institutions, Bank Indonesia has twice facilitated local investment promotions in Canada, i.e. the promotion by RIRU West Java (May 2016) and RIRU East Kalimantan (November 2016).

KERJASAMA PENYELESAIAN TRANSAKSI PERDAGANGAN BILATERAL

Bilateral Trade Deal Settlement Cooperation

Bank Indonesia menjalin kerja sama bilateral dengan Bank Negara Malaysia dan Bank of Thailand melalui penandatanganan Nota Kesepahaman bilateral pada 23 Desember 2016 di Bangkok, Thailand. Nota kesepahaman bilateral tersebut ditujukan untuk membentuk kerangka kerjasama dalam penyelesaian perdagangan bilateral dan investasi langsung dengan menggunakan mata uang lokal, yaitu Rupiah, Baht dan Ringgit.

Kerja sama ini dilatarbelakangi kuatnya hubungan perdagangan Indonesia dengan kedua negara. Thailand dan Malaysia termasuk dalam sepuluh besar mitra dagang utama Indonesia. Pada sisi impor, Malaysia dan Thailand merupakan negara asal impor Indonesia kelima dan keenam. Rata-rata pangsa impor Indonesia dari kedua negara tersebut terhadap total impor Indonesia pada periode 2010-2015 masing-masing sekitar 6,5% dan 5,8%. Sementara itu, pada periode yang sama, Malaysia dan Thailand merupakan negara tujuan ekspor Indonesia ketujuh dan kesembilan dengan rata-rata pangsa ekspor Indonesia ke negara tersebut terhadap total ekspor Indonesia masing-masing sekitar 5,6% dan 3,2%.

Keterkaitan perdagangan yang tinggi tersebut belum disertai penggunaan mata uang ketiga negara (Rupiah, Baht maupun Ringgit) dan masih didominasi oleh USD. Penggunaan mata uang Ringgit dalam impor Indonesia sekitar 0,3% dan di sisi ekspor sekitar 0,07%. Sejalan dengan itu, dari rata-rata total transaksi Indonesia dengan berbagai negara pada periode 2010-2015, penggunaan Baht juga masih sangat terbatas, yakni 0,2% di sisi impor dan 0,04% di sisi ekspor. Guna mengurangi ketergantungan yang masih tinggi terhadap USD tersebut diperlukan upaya untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam setelmen perdagangan antar negara di kawasan.

Implementasi kerja sama ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap USD, sehingga membantu menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah.

Bank Indonesia established bilateral cooperation with Bank Negara Malaysia and Bank of Thailand through the signing of a bilateral Memorandum of Understanding on December 23rd, 2016 in Bangkok, Thailand. The bilateral memorandum of understanding is aimed at establishing a framework for cooperation in bilateral trade settlement and direct investment using local currency settlement, namely Rupiah, Baht and Ringgit.

This cooperation is motivated by strong Indonesian trade relations with both countries. Thailand and Malaysia are among the top ten major trading partners of Indonesia. On the import side, Malaysia and Thailand are Indonesia's fifth and sixth largest import countries. The average share of Indonesian imports from both countries to Indonesia's total imports, for the 2010-2015 period, was approximately 6.5% and 5.8% (Table 1), respectively. During the same period, Malaysia and Thailand were Indonesia's seventh and ninth largest export destination countries with an average share of Indonesia's exports to these countries against Indonesia's total exports, of about 5.6% and 3.2%, respectively.

The large trade linkages has not been accompanied by the use of the currencies of the three countries (Rupiah, Baht and Ringgit), which is still dominated by the USD. The use of Ringgit currency in imports of Indonesia was about 0.3% and, on the export side, about 0.07%. Correspondingly, from the average of total Indonesian transactions with various countries during the same 2010-2015 period, the use of Baht was still very limited, i.e. 0.2%, on the import side, and 0.04%, on the export side. To reduce the high dependence on the USD, efforts are underway to encourage the use of local currency in regional cross-border trade settlements.

Implementation of a bilateral cooperation framework between Bank Indonesia and Bank Negara Malaysia and Bank of Thailand is expected to reduce dependence on USD, thus helping maintain the stability of the Rupiah exchange rate.

"VOYAGE TO INDONESIA"

Persiapan Sidang Tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank di Bali, 12-14 Oktober 2018. Indonesia mendapatkan kepercayaan sebagai tuan rumah Sidang Tahunan IMF dan World Bank 2018. Sidang tersebut merupakan pertemuan tahunan gubernur, menteri keuangan, sektor swasta, investor dan akademisi, untuk membahas isu-isu utama perekonomian global. Sidang dilaksanakan setiap tahun sekali di bulan Oktober di kantor pusat IMF-World Bank di Washington DC selama 2 tahun berturut-turut. Sementara untuk tahun berikutnya dilaksanakan di negara anggota terpilih. Diplomasi Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan di forum IMF dan World Bank pada tahun 2015 telah mendorong Dewan Gubernur IMF untuk memilih Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan sidang tahun 2018. Terpilihnya Indonesia ini menunjukkan kepercayaan lembaga internasional kepada Indonesia.

Sebagai tuan rumah, Indonesia memiliki beberapa peran strategis. Pertama, jumlah peserta dari berbagai rangkaian pertemuan ini diperkirakan mencapai 15.000 orang dari berbagai negara. Kedua, peserta pertemuan merupakan pejabat pembuat kebijakan dari 189 negara anggota IMF dan World Bank serta pimpinan perusahaan dan investor terkemuka, sehingga menjadi ajang yang sangat strategis untuk mendorong dialog, promosi dan keputusan investasi bagi Indonesia. Selain itu, seluruh perhatian dunia ekonomi akan bertumpu pada Indonesia, sehingga menjadi kesempatan untuk meningkatkan persepsi positif Indonesia dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia merupakan negara yang aman, mempunyai infrastruktur dan fasilitas yang baik, serta stabilitas makroekonomi yang terjaga.

Sebagai tuan rumah, sejak 2016, Indonesia telah menyusun program kerja yang terstruktur dan komprehensif sebagai bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka menuju penyelenggaraan sidang tahunan dengan tema "Voyage to Indonesia". Pesan utama yang ingin disampaikan dalam program *Voyage to Indonesia* adalah Indonesia sebagai negara yang selalu mereformasi, berdaya tahan, dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Program ini akan terdiri

"VOYAGE TO INDONESIA"

Preparation of the IMF and World Bank Annual Session in Bali, October 12th-14th, 2018. Indonesia received the honour to host the IMF and World Bank Annual Meeting 2018. The participants of the annual meeting are governors of central bank, minister of finance, private sector, investors and academics, to discuss major global economic issues. The meeting is held annually in October at IMF-World Bank headquarters in Washington DC, for 2 consecutive years. In the following year, the meeting will be held in selected member countries. In 2015, efforts by Bank Indonesia and the Ministry of Finance, at the IMF and World Bank forums, has prompted the IMF Board of Governors to choose Indonesia as the host of the meeting in 2018. This choice reflects the growing trust of international institutions in Indonesia.

As the host, Indonesia has several strategic roles. First, the number of participants from various series of meetings is estimated to reach 15,000 people from various countries. Secondly, the meeting participants are policy-making officers from 189 IMF and World Bank member countries as well as leaders of leading companies and investors, making it a very strategic platform to encourage dialogue, promotion and investment decisions for Indonesia. In addition, all the world's attention will focus on Indonesia, which is an opportunity to increase Indonesia's positive perception and show the world that Indonesia is a safe country, has adequate infrastructure and facilities, as well as macroeconomic stability.

As a host, Indonesia has been preparing a comprehensive program since 2016. The event is titled "Voyage to Indonesia". The main message is to deliver Indonesia as a country that continuously reforms, endures, and adapts to technological advances to support the achievement of sustainable and inclusive economic growth. The program will consist of various seminars and exhibitions aimed at promoting Indonesia's continuing reforms, endurance, and adaptability to technological advancements. The program also promotes sharia

dari berbagai kegiatan seminar dan pameran yang bertujuan untuk mempromosikan ekonomi Indonesia yang terus melakukan reformasi, memiliki daya tahan, dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Program ini juga mempromosikan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan iklim investasi dan pariwisata, serta peningkatan peran wanita sebagai sumber pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan kewirausahaan dan akses keuangan.

economic and financial development in Indonesia as a source of sustainable economic growth, improved investment and tourism climate, and enhancement of women's role as a source of economic growth through entrepreneurship development and access to finance.



Infografis / Infographic Voyage to Indonesia

Kerja Sama Internasional Bidang Syariah: Dalam forum kelembagaan internasional syariah seperti Islamic Development Bank (IDB), terdapat Sidang Tahunan IDB ke-41 yang diselenggarakan di Indonesia di 2016. Dalam rangkaian sidang tersebut telah dilaksanakan penandatanganan kerja sama antara Indonesia dan IDB yang diwakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Presiden IDB. Penandatanganan tersebut meliputi 3 tema:

- Mengurangi kesenjangan antar daerah melalui pengembangan sektor energi, transportasi, pengembangan perdesaan, pengembangan pendidikan dan keterampilan, serta pengembangan sektor swasta.

International Cooperation Sharia Division: In the international Islamic institutional forum such as Islamic Development Bank (IDB), the 41st Annual Session of IDB was held in Indonesia in 2016. In the series of meetings, there was the signing of cooperation between Indonesia and IDB, represented by the Minister of National Development Planning / Head of Bappenas, and IDB President. The signing covers 3 themes:

- Reducing inequalities across regions through the development of the energy sector, transportation, rural development, education and skills development, and private sector development.

- Pendalaman industri keuangan syariah dengan mendorong keuangan inklusif dan keuangan syariah.
- Penguatan *Reverse Linkage*.

Adapun nilai komitmen pembiayaan dari IDB untuk Indonesia periode 2016-2020 adalah sebesar 5,2 miliar dolar AS. Keterlibatan Bank Indonesia dalam kegiatan sidang IDB, antara lain, dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Bank Indonesia bersama dengan *Islamic Research and Training Institute-Islamic Development Bank* menyelenggarakan seminar *Human Capital Development* dengan tema "*Producing Competitive Human Capital for Economic Empowerment*". Forum ini juga membahas penyusunan *roadmap* menghasilkan SDM yang kompetitif dan strategi menyelaraskan pengembangan SDM guna memenuhi kebutuhan industri keuangan syariah. Dalam sidang IDB juga dibahas Pemberdayaan Masyarakat melalui Penguatan Kerangka Kerja Sama berupa Global Forum Islamic Finance. Dalam hal ini, Bank Indonesia bekerjasama dengan IDB melaksanakan forum dengan tema "*Role of Islamic Finance in Achieving Sustainable Development Goals*". Harapannya, industri keuangan syariah dapat berkontribusi terhadap *Sustainable Development Goals* yang berfokus terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan, penurunan pengangguran, dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Selain itu, dalam rangka pelaksanaan kerjasama kelembagaan internasional keuangan syariah, telah dilaksanakan pula *International Islamic Liquidity Management (IILM) Governing Board Meeting* di Jakarta pada Mei dan Desember 2016. Dalam kegiatan ini, Bank Indonesia menjadi *IILM Chairperson* dan bertindak sebagai *host*. Pertemuan ini membahas bisnis model yang optimal bagi *IILM* untuk penerbitan *Sukuk* jangka pendek *cross border* dan peningkatan tata kelola *IILM* sebagai lembaga internasional.

Disamping *IILM*, terdapat pula *International Islamic Financial Market*, yaitu *standard setting organization* terkait pasar keuangan syariah, yang berkedudukan di Bahrain, dimana Bank Indonesia sebagai "*founding member*".

- *The deepening of the Islamic finance industry by encouraging inclusive and sharia finance.*
- *Reinforcement of Reverse Linkages.*

The IDB financing commitments for Indonesia for the period 2016-2020 amounted to 5.2 billion US dollars. The involvement of Bank Indonesia in IDB session activities, among others, is in the development of human resources. Bank Indonesia, along with Islamic Research and Training Institute-Islamic Development Bank, held a Human Capital Development seminar with the theme "Producing Competitive Human Capital for Economic Empowerment". The forum also discussed the preparation of a roadmap to produce competitive human resources and a strategy of harmonizing human resource development to meet the needs of the sharia financial industry. The IDB session also discussed Community Empowerment through Strengthening the Framework of Global Islamic Finance Forum. In this area, Bank Indonesia, in cooperation with IDB, held a forum entitled "Role of Islamic Finance in Achieving Sustainable Development Goals". The hope is that the Islamic finance industry can contribute to Sustainable Development Goals that focuses on inclusive and sustainable economic growth, lower unemployment and reduced poverty.

As part of the implementation of cooperation among international Islamic financial institutions, the International Islamic Liquidity Management (IILM) Governing Board Meeting was held in Jakarta, in May and December 2016. In this meeting, Bank Indonesia became the IILM Chairperson and acted as host. This meeting discussed IILM's optimal business model for issuing short-term Sukuk cross border bonds and improved IILM governance as an international institution.

In addition to IILM, there is also International Islamic Financial Markets, a standard setting organization relating to sharia financial markets, domiciled in Bahrain, where Bank Indonesia is a "founding member".



IILM Governing Board Meeting

Sejak pertengahan 2014, Bank Indonesia telah menginisiasi penyusunan *zakat core principles* dalam *working group* secara internasional, dengan melibatkan tujuh otoritas zakat dunia termasuk Indonesia (Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS) dan lembaga internasional yaitu IDB. *Zakat Core Principles* telah diluncurkan di forum PBB di Istanbul, Turki, pada tanggal 23 Mei 2016. Forum ini membahas potensi kekuatan sektor zakat untuk dapat berkontribusi dalam penyelesaian masalah ketimpangan ekonomi. Lebih jauh, untuk melengkapi tata kelola di sektor sosial, Bank Indonesia juga telah melakukan pembahasan dalam rangka penyusunan *wakaf core principles*, yang melibatkan 3 otoritas wakaf dunia yaitu New Zealand, Afrika Selatan, dan Indonesia.

Arah kebijakan Bank Indonesia dalam tatanan internasional juga diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai *centre of excellence* sektor keuangan syariah global antara lain melalui peningkatan peran *Islamic Social Finance* seperti zakat dan wakaf, serta melanjutkan inisiasi pendirian lembaga standarisasi regulasi dan perumusan kebijakannya pada tataran internasional.

Since mid 2014, Bank Indonesia has initiated the preparation of Zakat core principles in an international working group, involving seven world zakat authorities including Indonesia (Badan Amil Zakat Nasional / BAZNAS) and IDB. Zakat Core Principles was launched at the United Nations forum in Istanbul, Turkey, on May 23rd, 2016. The forum discussed the potential strength of the zakat sector to contribute in solving the problems of economic inequality. Furthermore, to complement governance in the social sector, Bank Indonesia has also undertaken discussions on preparing world core principles, which involves three world endowment authorities, namely New Zealand, South Africa and Indonesia.

The international policy direction of Bank Indonesia is to make Indonesia the center of excellence for the global sharia financial sector, by increasing the role of Islamic Social Finance, such as zakat and waqf, and continuing the establishment of regulatory standardization and policy formulation at the international level.



BANK INDONESIA



Museum Bank Indonesia, Jakarta
Bank Indonesia Museum, Jakarta



MANAJEMEN ORGANISASI

Organization Management

“

UNTUK KEBERHASILAN INDONESIA
DIPERLUKAN KEBERANIAN DALAM
BERKARYA DAN PERJUANGAN
YANG BERKELANJUTAN.

*To be successful requires courage in
work and sustainable struggle.*

”

ERWIN RIJANTO

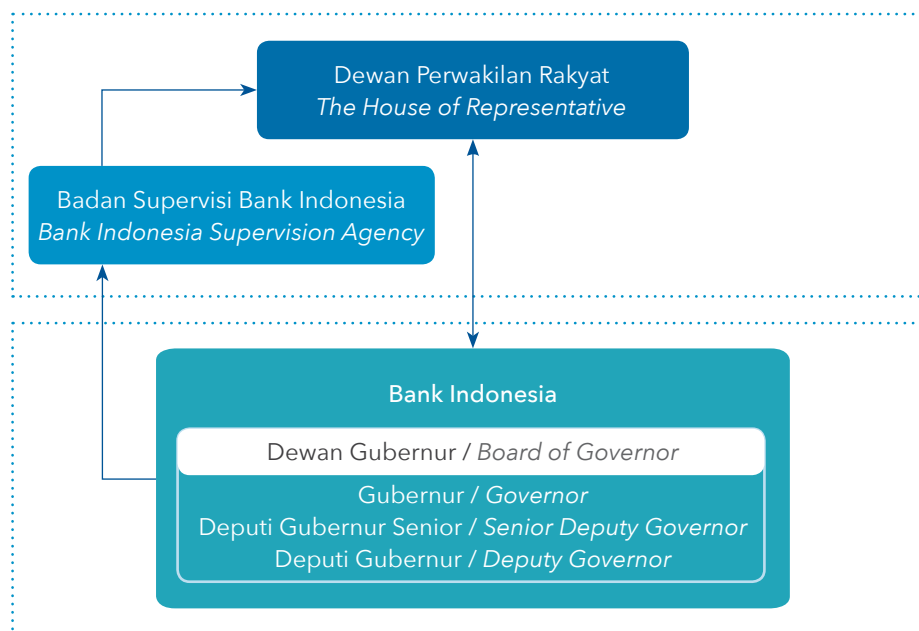
Deputi Gubernur
Deputy Governor

BADAN SUPERVISI BANK INDONESIA

Bank Indonesia Supervision Board

Organisasi BSBI: Sesuai dengan amanat Undang Undang tentang Bank Indonesia, dalam rangka membantu DPR-RI untuk melakukan pengawasan di bidang tertentu serta untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi dan kredibilitas, maka dibentuk Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI).

The BSBI Organization: The Bank Indonesia Bank Supervision Board was established to assist parliament (DPR-RI) to conduct supervision in certain areas and strive to improve accountability, independence, transparency and credibility of Bank Indonesia, in line with the mandate of the Bank Indonesia Act.



Gambar 4. Hubungan Bank Indonesia, DPR dan BSBI

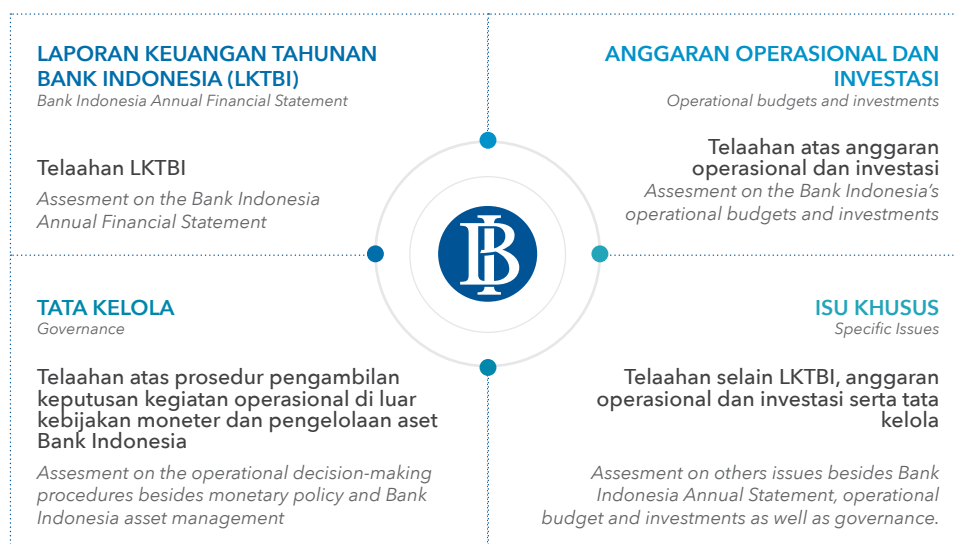
Picture 4. Relationship between Bank Indonesia, House of Representative and Bank Indonesia Supervisory Board

Keanggotaan BSBI terdiri dari 5 orang yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan empat anggota yang dipilih oleh DPR-RI dan diangkat oleh Presiden. Keanggotaan dipilih dari orang-orang yang memiliki integritas, moralitas, keahlian, profesionalisme dan berpengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan atau hukum untuk masa jabatan 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Keanggotaan BSBI periode 2013-2016 adalah Umar Juoro sebagai Ketua, serta Ahmad Erani Yustika, Chaerul Djusman Djakman, Moh. Fadhil Hasan, dan Sri Adiningsih masing-masing sebagai anggota.

BSBI membership consists of 5 people, consisting of a chairman, concurrently a member, and four members elected by DPR-RI and appointed by the President. Membership is selected from persons who have integrity, morality, expertise, professionalism and experience in economics, finance, banking or law for a term of 3 years and may be re-elected for the next term of office. The membership of BSBI for the period of 2013-2016 comprises of Umar Juoro as Chairman, and Ahmad Erani Yustika, Chaerul Djusman Djakman, Moh. Fadhil Hasan and Sri Adiningsih, respectively, as members.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BSBI mencakup telaahan atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia, anggaran operasional, dan investasi. Cakupan lainnya adalah prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan pengelolaan aset Bank Indonesia. Hasil telaahan dilaporkan kepada DPR-RI secara triwulanan atau setiap saat apabila diminta.

The supervisory functions undertaken by BSBI include an assesment on the Bank Indonesia Annual Report, operational budgets, and investments. Others include procedures for decision-making of operational activities besides Bank Indonesia's monetary policy and asset management. The results of the review are reported to the House of Representative on a quarterly basis or at any time if requested.



Infografis Pengawasan BSBI terhadap Bank Indonesia
Infographic BSBI Supervision to Bank Indonesia

Terhadap hasil telaahan BSBI yang disampaikan tahun 2016, Bank Indonesia memberikan tanggapan secara tertulis dan/atau melalui pertemuan antara Dewan Gubernur dengan anggota BSBI. Selain membahas hasil telaahan BSBI, dalam pertemuan juga membahas hal-hal lain yang mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

With regard to BSBI review submitted in 2016, Bank Indonesia shall respond in writing and / or through meetings between the Board of Governors and the members of BSBI. In addition to discussing the results of BSBI's review, the meeting also discussed other matters that support the effectiveness of Bank Indonesia's task implementation.

SAMBUTAN KETUA BADAN SUPERVISI BANK INDONESIA

Remarks from the Chairman of Bank Indonesia Supervision Board



UMAR JUORO

Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia
Chairman of Bank Indonesia Supervision Board

Kondisi perekonomian global 2016 yang dinamis merupakan periode yang menantang dalam pengelolaan kebijakan ekonomi. Sejak krisis global 2008, ekonomi dunia masih belum tumbuh secepat yang diharapkan. Meski perekonomian Amerika Serikat menunjukkan tanda perbaikan, pertumbuhan ekonomi negara maju di Eropa dan Tiongkok justru menunjukkan perlambatan.

Kondisi yang terjadi di negara maju berdampak kurang menguntungkan bagi negara-negara berkembang, khususnya pengekspor komoditas sumber daya alam, termasuk Indonesia. Belum kuatnya permintaan dan merosotnya harga komoditas global mempengaruhi perlambatan kinerja ekspor. Sementara di pasar keuangan, arus modal bergerak dinamis, menyikapi respons kebijakan negara utama, serta gejolak geopolitik yang terjadi di beberapa

The dynamic global economic condition on 2016 was a challenging period in managing economic policy. Since the global crisis of 2008, the world economy has not grown as fast as expected. Although the United States economy showed signs of improvement, economic growth in developed countries, such as, Europe and China, in contrast, showed a slowdown.

These conditions are unfavorable for developing countries, especially exporters of natural resource commodities, including Indonesia. The lack of demand and the decline in global commodity prices have affected the slowdown in export performance. While in the financial market, capital flows were dynamic, responding to major country's policy responses, as well as geopolitical turmoil occurring in some countries. In the midst of such unfavorable global situation, the Indonesian economy is facing

negara. Di tengah situasi global yang tidak menguntungkan tersebut, perekonomian Indonesia dihadapkan pada reformasi struktural yang masih berjalan dan tantangan konsolidasi fiskal yang harus ditempuh oleh Pemerintah.

Berbagai situasi tersebut membutuhkan kebijakan ekonomi yang tepat dan kredibel. Dalam kaitan ini, kami mengapresiasi upaya yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan pemerintah untuk memberikan ruang pelonggaran, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Kebijakan yang ditempuh mampu memitigasi risiko kerentanan, sekaligus menjaga keyakinan pelaku ekonomi terhadap daya tahan perekonomian Indonesia, sehingga kesinambungan ekonomi dapat dipertahankan.

Kinerja ekonomi Indonesia di 2016 merefleksikan capaian tersebut. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,02% (yoy) lebih tinggi dari tahun sebelumnya (4,88% ,yoy), dengan neraca perdagangan yang mencatatkan surplus. Hal ini diimbangi kestabilan harga dengan level inflasi sebesar 3,02% (yoy), terendah sejak 2010 dan nilai tukar Rupiah yang menguat dengan volatilitas yang terjaga. Industri keuangan juga menunjukkan ketahanan dan kinerja positif pada level yang moderat.

Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) sebagai organ yang dibentuk berdasarkan Undang Undang tentang Bank Indonesia untuk melakukan fungsi pengawasan di bidang tertentu, memandang bahwa pencapaian kinerja perekonomian Indonesia 2016 tidak dapat dilepaskan dari komitmen dan hasil kerja Dewan Gubernur Bank Indonesia dan jajarannya.

Dalam upaya mendukung terwujudnya akuntabilitas Bank Indonesia, selama 2016 BSBI telah memberikan telaahan dan berbagai masukan kepada Bank Indonesia. BSBI juga menjembatani terjalinnya koordinasi yang baik antara Bank Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya Komisi XI yang membawahkan pengawasan terhadap Bank Indonesia, dan kerjasama dengan pemangku kepentingan yang lain.

an ongoing structural reforms and the fiscal consolidation challenges that the Government has to take.

These conditions require appropriate and credible economic policies. In this regard, we appreciate the efforts undertaken by Bank Indonesia and the Government to provide space for easing, while maintaining macroeconomic stability. The policies pursued are able to mitigate vulnerability risks, while maintaining economic confidence among economic players in Indonesia, so that economic sustainability can be maintained.

Indonesia's economic performance in 2016 reflects that achievement. Indonesia's economy grew 5.02% (yoy) higher than the previous year (4.88%, yoy), with a trade balance registering a surplus. This is accompanied by price stability, with an inflation rate of 3.02% (yoy), the lowest since 2010 and a stronger Rupiah exchange rate with manageable volatility. The financial industry also showed resilience and performed moderately positive.

The Bank Indonesia Supervisory Board (BSBI), as an institution formed under the on Bank Indonesia Act to perform a supervisory function in certain areas, considers the achievement of Indonesia's 2016 economic performance can not be separated from the commitment and the work of the Board of Governors of Bank Indonesia and its staff.

To support the realization of Bank Indonesia's accountability for 2016, BSBI has provided a review and input to Bank Indonesia. BSBI also established good coordination between Bank Indonesia and the House of Representatives, especially Commission XI, which oversees Bank Indonesia, as well as cooperation with other stakeholders.

Kami memandang bahwa kinerja yang dicapai Bank Indonesia didukung dengan penerapan tata kelola organisasi yang baik. Dalam aspek pengelolaan keuangan, situasi perekonomian dan bauran kebijakan yang ditempuh selama 2016 mempengaruhi kondisi keuangan Bank Indonesia. Upaya untuk menjaga kestabilan dan nilai tukar di 2016 telah mempengaruhi peningkatan aset dan liabilitas untuk melaksanakan kebijakan moneter. Nilai aset yang berasal dari Surat Utang Negara meningkat seiring dengan optimalisasi penggunaan instrumen tersebut dalam operasi moneter Bank Indonesia. Dari sisi liabilitas terdapat peningkatan liabilitas transaksi repo seiring dengan perubahan suku kebijakan BI Rate menjadi 7-day Reverse Repo Rate. Sementara itu, menguatnya nilai tukar Rupiah juga mempengaruhi penerimaan Bank Indonesia yang berasal dari selisih revaluasi.

Sebagai bank sentral, capaian dari aspek kinerja keuangan bukan merupakan tujuan akhir, namun lebih sebagai konsekuensi pelaksanaan tugasnya. Dalam kaitan ini, BSBI meyakini bahwa pengelolaan keuangan Bank Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik. Bank Indonesia mendasarkan pengelolaan keuangannya pada kebijakan akuntansi, didukung dengan sistem perencanaan dan pemantauan yang baik. Opini audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Wajar Tanpa Pengecualian terhadap laporan keuangan Bank Indonesia selama 14 tahun berturut-turut merupakan capaian yang patut diapresiasi dan harus mampu dipertahankan di masa mendatang.

Dari sisi pelaksanaan anggaran operasional dan investasi, Bank Indonesia mampu menjaga kesinambungan pengelolaan aset valuta asing, dengan tetap memperhatikan prinsip likuiditas dan keamanan. Dari sisi pengeluaran, realisasi anggaran kegiatan pendukung yang belum optimal menjadi catatan ruang perbaikan ke depan. Sejalan dengan berbagai inisiatif penguatan fungsi Bank Indonesia yang dilakukan dalam kerangka program transformasi, kinerja anggaran operasional dan investasi Bank Indonesia diharapkan dapat dilakukan semakin baik.

We consider the performance achieved by Bank Indonesia is supported by the implementation of good governance. In the aspect of financial management, the economic situation and policy mix adopted during 2016 affected the financial condition of Bank Indonesia. Efforts to maintain stability and exchange rates in 2016 have affected the improvement of assets and liabilities to implement monetary policy. The value of assets derived from Sovereign Debt Instruments increased in line with the optimization of the use of such instruments in the monetary operations of Bank Indonesia. In terms of liabilities, there was an increase in repo liabilities, in line with the change in BI Rate policy rate to BI 7-day Reverse Repo Rate. Meanwhile, the strengthening of the Rupiah exchange rate also affected Bank Indonesia's revenues from the revaluation difference.

As a central bank, the achievement of the financial performance aspect is not an end goal, but rather as a consequence of the implementation of its duties. In this regard, BSBI believes that the financial management of Bank Indonesia was implemented properly. Bank Indonesia bases its financial management on accounting policies, supported by good planning and monitoring systems. Audit opinion by the Supreme Audit Agency, was Unqualified over the financial statements of Bank Indonesia for 14 consecutive years, which is an achievement that should be appreciated and should be sustained in the future.

In terms of implementation of operational and investment budgets, Bank Indonesia was able to maintain the sustainability of its foreign currency asset management, while maintaining the principles of liquidity and security. From the expenditure side, budget realization of supporting activities that has not been optimum has become a record of future room for improvement. In line with various initiatives to strengthen Bank Indonesia's function, within the framework of its transformation program, the performance of Bank Indonesia's operational and investment budget is expected to improve.

Dari sisi tata kelola organisasi, Bank Indonesia telah melakukan upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas internal melalui program transformasi Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia (AFSBI). Sejak dilaksanakan di 2014, program tersebut telah menghasilkan berbagai inisiatif dan penguatan fungsi Bank Indonesia. Ditinjau dari capaiannya dalam 2 tahun terakhir, program tersebut patut diapresiasi. Ke depan, diharapkan program AFSBI dilaksanakan sesuai dengan peta jalan yang telah disusun. Untuk meningkatkan tata kelola, Bank Indonesia juga perlu memantau dan mengevaluasi implementasi berbagai program yang telah dijalankan.

Dalam kesempatan ini, kami memberikan penghargaan kepada Dewan Gubernur dan para pegawai Bank Indonesia atas performa tugas dan kinerja yang diraih di 2016. Dalam kesempatan ini pula, mewakili seluruh Anggota BSBI periode 2013-2016, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerjasama yang telah dilakukan selama periode jabatan kami. Kami memandang baik kerjasama Bank Indonesia dalam mendukung berbagai upaya yang dilakukan oleh BSBI. Kami juga mengapresiasi respons Bank Indonesia yang telah melakukan berbagai upaya perbaikan sejalan dengan hasil telaahan BSBI.

Belajar dari pengalaman, salah satu kekuatan yang menopang keuletan dan daya tahan ekonomi Indonesia adalah sinergi yang baik antar pemangku kebijakan. Untuk itu, kami meyakini bahwa dengan kerjasama yang semakin baik di masa mendatang, Bank Indonesia mampu mewujudkan visinya sebagai bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional.

In terms of organizational governance, Bank Indonesia has made efforts to strengthen the internal capacity and capabilities through its transformation program in line with the Bank Indonesia Strategic Function Architecture (AFSBI). Since its implementation in 2014, the program has resulted in various initiatives and strengthened functions of Bank Indonesia. Judging from its achievements in the last 2 years, the program should be appreciated. In the future, it is expected that the AFSBI program will be implemented in accordance with the prepared road map. To improve governance, Bank Indonesia also needs to monitor and evaluate various programs that have been implemented.

On this occasion, we would like to convey our appreciation to the Board of Governors and employees of Bank Indonesia for the performance of their duties and performance achieved in 2016. On this occasion, representing all Members of BSBI for the period 2013-2016, we express our deepest gratitude for the cooperation that has been given during our term of office. We look forward to the cooperation of Bank Indonesia in supporting the efforts made by BSBI. We also appreciate the response of Bank Indonesia that has made various improvement efforts in line with the results of BSBI's review.

Learning from experience, one of the strengths that underpins the resilience of the Indonesian economy is good synergy among stakeholders. To that end, we believe that with better cooperation in the future, Bank Indonesia will be able to realize its vision as a credible and best central bank in the region.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



UMAR JUORO

Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia
Chairman of Bank Indonesia Supervision Board

ANGGOTA BSBI PERIODE 2013-2016

MEMBERS OF BSBI PERIOD 2013-2016



1

UMAR JUORO

Ketua | *Chairman*

PENDIDIKAN | *EDUCATION*

Master of Arts di bidang Ekonomi Politik
dari Boston University, USA
*Master of Arts in Political Economy
from Boston University, USA*

4

AHMAD ERANI YUSTIKA

Anggota | *Member*

PENDIDIKAN | *EDUCATION*

Ph.D dari Institute fuer Rurale Entwicklung,
Universitaet Göttingen, Jerman
*Ph.D from Institute fuer Rurale Entwicklung,
Universitaet Göttingen, Jerman*

2

SRI ADININGSIH

Anggota | *Member*

PENDIDIKAN | *EDUCATION*

Ph.D di bidang Ekonomi
dari University of Illinois, USA
*Ph.D in Economics
from University of Illinois, USA*

5

CHAERUL DJUSMAN DJAKMAN

Anggota | *Member*

PENDIDIKAN | *EDUCATION*

Doktor di bidang Akuntansi
dari Universitas Indonesia
*Ph.D in Accounting
from Universitas Indonesia*

3

MOH. FADHIL HASAN

Anggota | *Member*

PENDIDIKAN | *EDUCATION*

Ph.D di bidang Ekonomi Agrikultur
dari University of Kentucky, USA
*Ph.D in Agricultural Economics
from University of Kentucky, USA*

ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Organization and Human Resources

PENATAAN ORGANISASI

Sejalan dengan pelaksanaan program transformasi bertema *motivated organization*, proses penyempurnaan organisasi Bank Indonesia berlanjut di 2016. Untuk memperkuat kapabilitas organisasi dalam menjawab tantangan tugas ke depan, Bank Indonesia telah membentuk 2 satuan kerja baru, yaitu Departemen Pengembangan Pasar Keuangan dan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Selain itu, Bank Indonesia juga memperkuat tata kelola dari fungsi pengadaan barang dan jasa dengan menyempurnakan Departemen Pengelolaan Logistik dan Departemen Pengelolaan Aset menjadi Departemen Pengadaan Strategis dan Departemen Pengelolaan Logistik dan Fasilitas. Penguatan fungsi *checks and balances* juga dilakukan dengan memisahkan fungsi *front office*, *middle office* dan *back office* dengan melakukan sentralisasi *back office* dari Departemen Pengelolaan Moneter dan Departemen Pengelolaan Devisa ke Departemen Pengelolaan Transaksi dan Pinjaman yang kemudian disempurnakan menjadi Departemen Operasional Treasury dan Pinjaman.

Dalam rangka memperkuat kebijakan di sistem pembayaran, khususnya untuk mendukung perkembangan transaksi keuangan berbasis teknologi yang sehat dengan tetap menjaga perlindungan konsumen serta mitigasi risiko, Bank Indonesia mendirikan unit kerja Fintech Office di dalam Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran dengan empat tujuan utama. Pertama, memfasilitasi perkembangan inovasi dalam ekosistem keuangan berbasis teknologi di Indonesia. Kedua, mempersiapkan Indonesia untuk mengoptimalkan perkembangan teknologi dalam rangka pengembangan perekonomian. Ketiga, meningkatkan daya saing industri keuangan berbasis teknologi Indonesia. Keempat, menyerap informasi dan memberikan umpan balik untuk mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia, sebagai respons terhadap perkembangan berbasis teknologi.

ORGANIZATIONAL STRUCTURING

In line with the implementation of the Motivated Organization themed transformation program, the process of enhancing/improving Bank Indonesia's organization continued in 2016. To strengthen the organizational capability in responding to future work challenges, Bank Indonesia has established 2 new working units, the Financial Market Development Department and the Sharia Economy and Finance Department.

In addition, Bank Indonesia also strengthened the governance of the procurement function of goods and services by enhancing the Logistics Management Department and the Asset Management Department into the Strategic Procurement Department and the Logistics and Facilities Management Department. The strengthening of checks and balances mechanism was undertaken by separating between the front office, middle office and back office functions by centralizing the back office from the Department of Monetary Management and the Department of Foreign Exchange Management to the Transaction and Loan Management Department, which was then enhanced to become the Treasury and Loan Operations Department.

To strengthen payment system policies, particularly to support the development of healthy technology-based financial transactions, while maintaining consumer protection and risk mitigation, Bank Indonesia established the Fintech Office work unit, within the Payment System Policy Department with four key objectives. First, to facilitate the development of innovations in technology-based financial ecosystems in Indonesia. Second, to prepare Indonesia to optimize the development of technology in the framework of economic development. Third, to improve the competitiveness of Indonesia's financial technology-based industry. Fourth, to absorb information and provide feedback to support the formulation of Bank Indonesia policy, in response to technology-based developments.



Memperkuat Kapabilitas Sumber Daya Manusia - Bank Indonesia Institute
Strengthening the Capability of Human Resources - Bank Indonesia Institute

Penyempurnaan organisasi juga dilakukan di daerah dengan melakukan persiapan awal pembentukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara yang rencananya akan beroperasi pada 2017. Hal ini merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia untuk hadir di seluruh provinsi di Indonesia. Kantor perwakilan di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga juga dimaksudkan untuk menjaga kedaulatan negara melalui penguatan ekonomi regional di wilayah tersebut. Dengan terbentuknya kantor perwakilan ini, maka Bank Indonesia memiliki kantor perwakilan di seluruh provinsi di Indonesia yakni sebanyak 46 kantor pada 2017.

Selanjutnya, penyempurnaan organisasi juga dilakukan terhadap fungsi manajemen intern di setiap satuan kerja dengan mengadopsi pola kerja *modern office*. Hal ini bertujuan agar fungsi pendukung di setiap satuan kerja terkait fungsi administrasi sumber daya manusia, arsip, kesekretariatan, anggaran dan logistik menjadi lebih efisien. Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut dilakukan dalam sebuah Satuan Layanan dan Administrasi yang ada di setiap Satker. Selain itu, dibentuk pula jabatan *Performance Manager* dan *Internal Control Officer* yang bersifat *individual contributor* untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi kinerja dan serta tata kelola dari pengendalian internal setiap satuan kerja.

Organizational enhancements were also conducted in the region by preparing the early establishment of Bank Indonesia Regional Office of the North Kalimantan Province, which is planned to operate in 2017. This reflects Bank Indonesia's commitment to be present in all the country's provinces. Regional offices in border areas adjacent to neighboring countries are also intended to safeguard the sovereignty of the state through strengthening regional economies along the borders. With the establishment of this regional office, Bank Indonesia has 46 regional offices in all Indonesian provinces by 2017.

Furthermore, organization improvements were also done to the internal management function in each business unit by adopting a modern office work pattern. It aims to support the functions in each work unit related to the administrative function of Human Resources, archives, secretarial, budget and logistics to become more efficient. Implementation of these functions was carried out in a Service and Administration Unit within each work unit. In addition, a Performance Manager and Internal Control Officer were also appointed as an individual contributor to improve the effectiveness of monitoring and performance evaluation and also the governance of the internal control of each work unit.

MENJADI ORGANISASI YANG ANDAL

Becoming a Reliable Organization

Bank Indonesia sangat memperhatikan keseimbangan antara pengukuran kinerja dan pengukuran kesehatan organisasi. Bank Indonesia tidak hanya fokus pada ukuran-ukuran finansial dan operasional saja, namun juga mempertimbangkan pengukuran pada bagaimana tingkat kemampuan institusi dalam melakukan penyesuaian organisasi; pelaksanaan eksekusi proses kerja yang optimal, serta melakukan pembaruan dan inovasi.

Oleh karena itu pada 2014 Bank Indonesia melakukan survei pengukuran *Organizational Health Index* (OHI). Pada 2016 dilakukan kembali survei OHI yang diambil dari 2.960 respon pegawai dan diperoleh skor OHI sebesar 88. Hasil tersebut meningkat hingga 12 poin dibandingkan survei OHI di tahun 2014 dengan skor sebelumnya 76.

Hasil nilai kesehatan organisasi Bank Indonesia pada 2016 berada pada desil teratas dibanding dengan *benchmark* institusi lain se-Asia Tenggara. Skor yang didapatkan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2014 ke 2016 tercermin pada semua hasil skor.

Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa pelaksanaan transformasi berada dalam jalur yang tepat untuk mengembangkan Bank Indonesia menjadi organisasi yang berkinerja tinggi. Bank Indonesia diharapkan mampu menjadi organisasi yang andal dalam mencapai misi dan visi yang diamanahkan negara dan mampu mengatasi ketidakpastian serta bertindak dengan penuh integritas.

Bank Indonesia pays close attention to the balance between performance measurement and measurement of the organization's health. Bank Indonesia not only focuses on financial and operational measures alone, but also considers measurement on how the institution's level of ability in aligning the organization; Execution of optimal work processes as well as renewal and innovation.

Therefore, in 2014, Bank Indonesia conducted a survey on measuring the Organization's Health Index (OHI). In 2016, another OHI survey was conducted from 2,960 employee responses and an OHI score of 88 was obtained. The results increased by 12 points compared to the previous OHI survey in 2014 with score of 76.

Bank Indonesia's OHI score in 2016 is in the top decile compared to other institutions' benchmark in South East Asia. Score significantly increased from 2014 to 2016. This is reflected in all score results.

This is one of the indicators that show transformation implemented by Bank Indonesia is on the right track to develop Bank Indonesia into a high performing organization. Bank Indonesia is expected to be a reliable organization in achieving its mission and vision mandated by the state, able to overcome uncertainty, and act with integrity.

2014

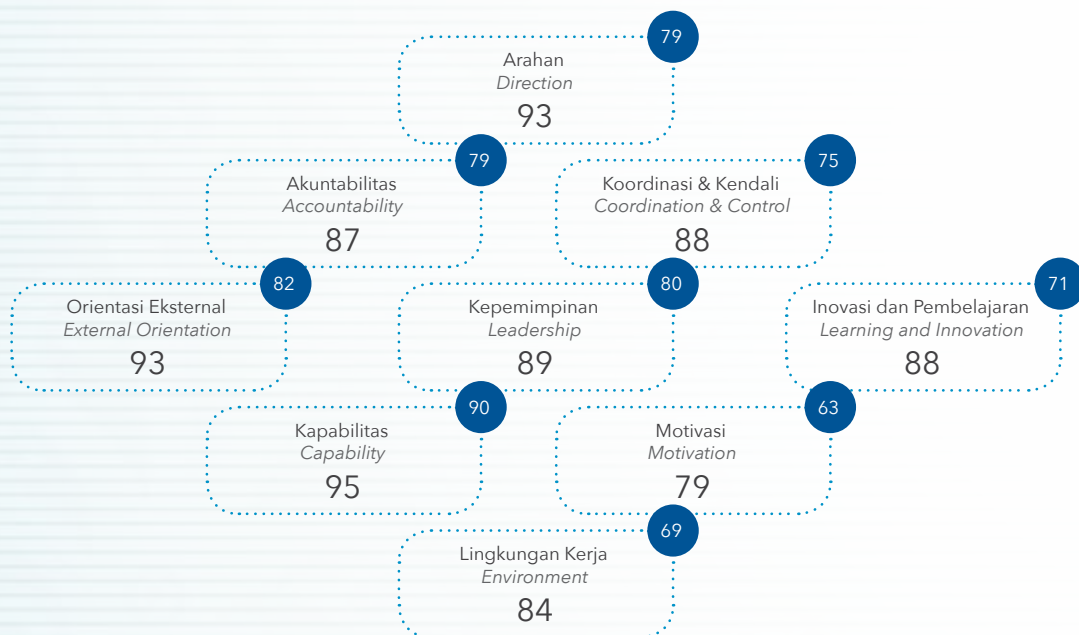
2016



76

Nilai OHI
OHI Score

88

Elemen Pembentuk OHI
OHI Elements



 Nilai / Score 2016
 Nilai / Score 2014

Nilai dan Elemen Pembentuk OHI
OHI Score and Elements

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Pengelolaan SDM Bank Indonesia dilakukan untuk meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM itu sendiri, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja. Pengelolaan SDM dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek perencanaan hingga pengembangan, dengan memperhatikan perkembangan lingkungan.

Pada aspek perencanaan, Bank Indonesia melakukan penajaman perencanaan SDM untuk periode 2016-2019. Hal ini dilakukan untuk merespon proses reorganisasi yang tengah dilakukan, antara lain terkait pembentukan beberapa satuan kerja baru pada 2015 dan 2016 seperti Pusat Program Transformasi Bank Indonesia, Departemen Manajemen Risiko, Departemen Regional, Bank Indonesia Institute, serta Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Papua Barat, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Kalimantan Utara.

Untuk memenuhi kebutuhan SDM, Bank Indonesia melakukan perekrutan pegawai di berbagai level melalui jalur Pendidikan Calon Pegawai Muda, rekrutmen *experienced-hire* pada level atas dan menengah, dan rekrutmen *general-hire* pada level pelaksana.

Pada 2016, menuju terciptanya organisasi berbasis kinerja, Bank Indonesia juga melakukan penyempurnaan *job grade* untuk jabatan yang ada pada struktur organisasi, memperjelas pengaturan kepangkatan, dan eselonisasi.

Bank Indonesia juga mulai mengatur secara sistematis program pengelolaan Kelompok Pegawai Potensial untuk mendukung kesuksesan proses perencanaan kepemimpinan Bank Indonesia.

Untuk meningkatkan kapasitas SDM-nya, Bank Indonesia melakukan program pengembangan yang meliputi 3 aspek kompetensi yaitu *leadership*, *general management*, dan substansi (*technical knowledge*) yang dilakukan melalui program: *On Boarding*; *Leadership Development Program*; *Competency Development Program*; *Career Transition Program*; Program Tugas Belajar; dan *Attachment/ Technical Assistance and Assignment Program*.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Human Resource (HR) Management in Bank Indonesia is designed to enhance and nurture the organization and human resources itself, by upholding strategic and performance-based values. HR management is done in a thorough way, from the aspect of planning to development, with due attention to the development of the environment.

On the planning aspect, Bank Indonesia sharpened its HR planning for the 2016-2019 period. This was done to respond the ongoing reorganization process, which is related to the establishment of several new work units in 2015 and 2016, such as the Bank Indonesia Transformation Program Center, Risk Management Department, Regional Department, Bank Indonesia Institute, and Regional Office of Bank Indonesia Bangka Belitung Province, West Papua Province, West Sulawesi Province and North Kalimantan Province.

To meet its human resource needs, Bank Indonesia recruits employees at various levels through the Young Candidates Education, recruitment of experienced-hire at upper and middle levels, and general-hire recruitment at the implementing level.

In 2016, to create a high performing organization, Bank Indonesia also improved its job grade positions in the organizational structure, clarified the organization titles, and echelonization.

Bank Indonesia also began to systematically organize its Potential Employees Group management programs to support Bank Indonesia's succession planning process.

To improve its human resource capacity, Bank Indonesia conducts development programs covering 3 aspects of competence, namely leadership, general management, and technical knowledge conducted through: On Boarding; Leadership Development Program; Competency Development Program; Career Transition Program; Program Task Learning; And the Attachment/Technical Assistance and Assignment Program.

Pangkat Title	Total
Asisten Gubernur / Assistant Governor	2
Direktur Eksekutif / Executive Director	41
Direktur / Director	103
Deputi Direktur / Deputy Director	401
Asisten Direktur / Assistant Director	718
Manajer / Manager	1309
Asisten Manajer / Assistant Manager	1442
Staf / Staff	1284
Asisten / Assistant	453
TOTAL	5753

Tabel 2. Komposisi SDM berdasarkan pangkat
Table 2. Human Resource Composition Based on Position

Pengembangan pegawai dilakukan dengan berbagai program pembelajaran melalui skema 10-6-4-3 dimana setiap pegawai mulai dari level Asisten Manajer hingga Deputi Direktur, berturut-turut harus menyelesaikan 10 modul, 6 modul, 4 modul, dan 3 modul pembelajaran dalam bentuk program sertifikasi. Program sertifikasi mencakup Sertifikasi Kebanksentralan, Sertifikasi Sektor Kebijakan Utama (Moneter, Stabilitas Sistem Keuangan, dan Sistem Pembayaran-Pengelolaan Uang Rupiah), Sertifikasi Leadership dan General Management, dan Sertifikasi Enablers.

Salah satu program unggulan Bank Indonesia dalam pengembangan pegawai adalah Presidential Lecture yang dilakukan dalam bentuk *high level lecture series* dengan menghadirkan narasumber *prominent* yaitu Presiden dan Wakil Presiden, baik yang sedang aktif maupun yang telah menjabat pada periode-periode sebelumnya. Presidential Lecture diharapkan menjadi *platform* strategis dalam mendapatkan *intellectual sharing* dari tokoh pemimpin bangsa terkait pandangan mereka mengenai topik-topik terkini atau isu strategis nasional lainnya di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan-keamanan dan sumber daya manusia.

Pandangan-pandangan berharga dari hasil pemaparan tokoh pemimpin bangsa dalam Presidential Lecture dikodifikasi menjadi sebuah

Gender	Total
Laki-Laki / Male	3893
Perempuan / Female	1860
TOTAL	5753

Tabel 3. Komposisi SDM berdasarkan gender
Table 3. Human Resource Composition based on gender

Rentang Jenjang Pendidikan Range of Education	Total
<Strata 1 / Diploma	1107
Strata 1 / Bachelor	3246
Strata 2 / Magister	1324
Strata 3 / Doctorate	76
TOTAL	5753

Tabel 4. Komposisi SDM berdasarkan jenjang pendidikan
Table 4. Human Resource Composition Based on Education

Employee development is carried out with various learning programs through the 10-6-4-3 scheme where each employee ranging from Assistant Manager level to Deputy Director must consecutively complete 10 modules, 6 modules, 4 modules, and 3 learning modules, with certification. The certification program includes Certification of Censorship, Core Sector Certification (Monetary, Financial System Stability, Payment System, Rupiah Currency Management), Leadership & General Management Certification, and Enablers Certification.

One of the flagship program held by Bank Indonesia in its staff development is Presidential Lecture conducted in the form of a high level lecture series by presenting prominent speakers (President and Vice President), both active and those who have served in previous periods. Presidential Lecture is expected to be a strategic platform to get intellectual sharing from national leaders regarding their views on current topics or other national strategic issues in the economic, political, social, cultural, defense-security and human resources fields.

The valuable insights of the results of the nation's leaders' exposure in the Presidential Lecture are codified into a series of books which will then be

buku seri yang selanjutnya akan disebarluaskan kepada masyarakat Indonesia. Hal ini sebagai salah satu bentuk dedikasi Bank Indonesia dalam pembangunan intelektualitas dan kapabilitas SDM dalam menjawab tantangan global untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang kuat, seimbang, berkesinambungan dan inklusif.

Untuk memantau efektivitas program pembelajarannya, Bank Indonesia melakukan evaluasi secara berkala dengan menggunakan metode sesuai praktek terbaik (*Kirkpatrick's Four Level Training Evaluation Model*). Dari hasil evaluasi tersebut, program pembelajaran mencapai hasil yang memuaskan.

Selain meningkatkan kompetensi pegawai Bank Indonesia, dalam konteks pelaksanaan *public exposure* dan sebagai perwujudan *partnership* dengan institusi-institusi terkemuka, Bank Indonesia menyelenggarakan program-program pembelajaran yang diikuti pihak-pihak eksternal. Program-program tersebut mencakup seminar/program *flagship*, kuliah umum/*training of trainer* (TOT), dan *study visit* dari bank-bank sentral lain. Jumlah peserta eksternal pada 2016 mencapai 3.288 orang.

Bank Indonesia juga telah memanfaatkan dunia maya (*internet/cyberspace*) sebagai sarana untuk memperluas eksposur publiknya. Bank Indonesia juga mengembangkan *e-library* di kantor pusat dan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia, sehingga masyarakat dapat mengakses koleksi buku/*e-book* dan jurnal-jurnal ilmiah nasional/internasional. Bank Indonesia juga menginformasikan berbagai kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan dan akses terhadap *working paper* serta hasil riset lain yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui situs web Bank Indonesia www.bi.go.id.

Pada 2016, Bank Indonesia terus menambah jumlah kemitraannya dengan 6 lembaga prominen. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman mengenai kebanksentralan dan isu-isu strategis yang beredar baik domestik maupun internasional. Dari dalam negeri, telah dijalin kemitraan dengan Badan Narkotika Nasional, Institut Pertanian Bogor dan Perpustakaan Nasional. Sedangkan dari luar negeri, Bank Indonesia menambah jalinan kemitraannya dengan Central Bank of Hungary, Banque de France, dan Bank of Finland.

disseminated to the Indonesian people. This is a form of Bank Indonesia's dedication to the development of human resources' intellectual and capabilities in response to global challenges, by creating a strong, balanced, sustainable and inclusive Indonesian economy.

Bank Indonesia regularly monitors the effectiveness of its learning program by using the best practice method (Kirkpatrick's Four Level Training Evaluation Model). From the results of the evaluation, the learning program achieved satisfactory results.

In addition to increase the competence of Bank Indonesia employees, in the context of complying with Public Exposure standards and as a manifestation of partnerships with prominent institutions, Bank Indonesia held training programs participated by the public. Such programs included Bank Indonesia Institute flagship seminars/programs, Training the Trainer (ToT)/public lectures, and study visits from other central banks. The number of external participants in 2016 reached 3,288 persons.

Bank Indonesia has also utilized cyberspace as a mean to widen its public exposure. Bank Indonesia has developed an e-library at its head office and all of its regional offices to provide the public with access to its book/e-book collections and national/international academic journals in the Bank Indonesia library. Bank Indonesia has also announced various learning activities held, including access to the working papers and other results of research conducted by Bank Indonesia via its website www.bi.go.id.

In 2016, Bank Indonesia has established partnerships with 6 prominent institutions. The purpose of this partnership is to enhance competency and understanding of central bank knowledge and strategic issues both domestic and international. Domestically, it has established partnerships with the National Narcotics Agencies, Bogor Agricultural University, and the National Library. While internationally, it has developed partnerships with the Central Bank of Hungary, Banque de France, and the Bank of Finland.

Selain menyelenggarakan program-program pembelajaran sendiri dan/atau bekerja sama dengan bank sentral/lembaga lain, SDM Bank Indonesia juga diberikan kesempatan untuk mengikuti kursus, seminar, *workshop*, dan lain-lain baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara eksternal atau bank sentral lain.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku: Untuk memastikan SDM Bank Indonesia menjalankan tugasnya dengan integritas yang tinggi dan menjunjung nilai-nilai etika yang baik, Bank Indonesia menerapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Bank Indonesia. Agar mampu merespons tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan menjamin perilaku SDM Bank Indonesia tidak menyimpang dari nilai-nilai strategis organisasi, Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap penerapan aturan Kode Etik dan Pedoman Perilaku nya. Di 2015, Bank Indonesia memperkuat aturan dengan menerapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang baru, berlaku menyeluruh bagi seluruh insan Bank Indonesia mulai dari pegawai, pihak yang dipekerjakan oleh Bank Indonesia, dan Anggota Dewan Gubernur. Pada 2016, Bank Indonesia kembali melakukan penyempurnaan yakni dengan mengubah mekanisme pengendalian internal terhadap kegiatan usaha eksternal pegawai.

Secara garis besar, terdapat 5 aspek yang diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Bank Indonesia yakni terkait dengan: (i) Menegakkan Integritas dan Profesionalisme, (ii) Menghindari Konflik Kepentingan, (iii) Menjaga Kemandirian dan Ketidakberpihakan, (iv) Bersikap Adil, dan (v) Menjaga Kesusilaan, Kesopanan, dan Perilaku Bermasyarakat.

Untuk memastikan kepatuhan aturan tersebut, setiap insan Bank Indonesia diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pernyataan Kepatuhan dan mendeklarasikan Surat Pernyataan Tahunan. Selain itu, terdapat pula beberapa kewajiban lain seperti penyampaian Surat Pernyataan Kepatuhan Aturan *Cooling-Off Period* bagi pegawai dengan pangkat paling kurang Direktur, kewajiban untuk mengajukan izin melakukan kegiatan usaha eksternal, dan deklarasi potensi konflik kepentingan.

Sebagai penyelenggara negara, pegawai Bank Indonesia juga dilarang untuk menerima hadiah yang terkait dengan pelaksanaan tugas. Untuk itu sebagai

In addition to organizing its own learning programs and/or in cooperation with other central banks/ institutions, Bank Indonesia's HR were also given the opportunity to join courses, seminars, workshops, and other activities both domestically and internationally.

Code of Ethics and Code of Conduct: To ensure the human resources of Bank Indonesia perform their duties with high integrity. and in a way that upholds ethical values, Bank Indonesia has applied its Code of Ethics and Code of Conduct. To enable Bank Indonesia's HR to respond to any challenges they encounter in performing their duties and to ensure that their behavior does not deviate from the organization's strategic values, Bank Indonesia performed evaluation on the implementation of its Code of Ethics and Code of Conduct. In 2015, Bank Indonesia has tightened up its rules by implementing the new Code of Ethics and Code of Conduct, which apply to all individuals in Bank Indonesia from its employees, parties hired, to the Members of the Board of Governors. In 2016, Bank Indonesia has once again made improvements to tighten up its organizational control by changing its internal control mechanism on employees' external activities.

In general, there were 5 aspects regulated in Bank Indonesia Code of Ethics and Code of Conduct, that are related to obligations/restrictions to: (i) Enforce the Integrity and Professionalism; (ii) Avoid any Conflict of Interest; (iii) Maintain Independency and Impartiality; (iv) Be Fair; and (v) Maintain Morality, Politeness, and Social Behavior.

To ensure compliance with the rules, every individual in Bank Indonesia is required to submit a Statement of Compliance and Annual Declaration. In addition, other obligations were imposed, such as submitting the Statement of Compliance with the Cooling-Off Period Rule for employees with a minimum rank of a Director, requesting permission for employees who want to run external businesses, and submitting declaration of potential conflict of interest.

As state administrators, employees of Bank Indonesia were also prohibited from receiving any gifts related to the performance of their duties. On that account,



Menanamkan Etika dan Perilaku yang baik kepada pegawai
Implanting Ethics and Good Behavior to employees

turunan dari Kode Etik dan Pedoman Perilaku, Bank Indonesia memiliki aturan mengenai pengendalian gratifikasi dan membentuk Unit Pengendali Gratifikasi. Hal ini sejalan dengan himbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aturan mengenai pengendalian gratifikasi memuat secara rinci larangan penerimaan hadiah, mekanisme penanganan penerimaan hadiah yang patut diduga terkait dengan jabatan, termasuk pelaporannya kepada KPK dalam kondisi yang tidak dapat dihindari.

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan aturan, Bank Indonesia melakukan internalisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Bank Indonesia serta aturan pengendalian gratifikasi kepada seluruh pegawai di berbagai jenjang. Internalisasi juga dilakukan dengan mengintegrasikan materi tersebut dalam program pendidikan bagi pegawai mulai dari *on boarding program* hingga program pengembangan kepemimpinan di berbagai level kepangkatan.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN): Sebagai bentuk komitmen Bank Indonesia untuk mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Bank Indonesia juga menerapkan aturan pelaporan LHKPN kepada KPK. Kewajiban penyampaian LHKPN di Bank Indonesia tidak hanya berlaku untuk pimpinan Bank Indonesia saja, namun diperluas hingga pegawai level

as a derivative of the Code of Ethics and the Code of Conduct, Bank Indonesia has also issued a rule concerning gratification control and established the Gratification Control Unit. This was in accordance with the appeal from the Corruption Eradication Commission (KPK). The rule on gratification control specifies in details the prohibition against receiving gifts, mechanism of receiving gifts that are allegedly related to any promotion, including the mechanism of reporting to KPK in exceptional conditions.

To improve the effectiveness of implementation of the rules, Bank Indonesia has internalized its Code of Ethics and Code of Conduct along with gratification control rules to all employees at all levels. Internalization has also been conducted by integrating materials in educational programs from the on boarding programs to the leadership development programs for all employees across all ranks and levels.

State Officers Wealth Report (LHKPN): *As a commitment to create a clean work environment that is free from corruption, collusion, and nepotism, Bank Indonesia has also imposed a rule on state officers wealth reporting (LHKPN) to KPK. The obligation to submit the wealth report in Bank Indonesia is not only applicable to Bank Indonesia leaders, but also its employees at the operational level, starting from*

pelaksana mulai dari pangkat Asisten Manajer ke atas dan pangkat Staf untuk jabatan-jabatan tertentu.

Atas komitmen untuk mendukung aktif pemberantasan korupsi melalui pemenuhan penyampaian LHKPN, dalam acara Hari Anti Korupsi Internasional, Bank Indonesia meraih penghargaan LHKPN 2016 dari KPK.

Whistle Blowing System (WBS): Sebagai upaya kontrol terhadap perilaku SDM Bank Indonesia guna mendeteksi potensi kecurangan (*fraud*) dan perilaku yang tidak sejalan dengan etika yang baik, Bank Indonesia menerapkan WBS. Di 2015, Bank Indonesia melakukan pembaharuan terhadap WBS untuk memperluas akses penyampaian informasi oleh pihak internal dan masyarakat, serta mekanisme penanganannya di Bank Indonesia yakni melalui

Website : <https://www.bi.go.id/wbsbi>;

Surat : WBS-BI, Jl. M. H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350;

Faximile : (+62) 21 2310 689;

E-mail : wbsbi@bi.go.id;

SMS : (+62) 8118 6927 24;

Telepon : (+62) 21 2981 7752;

Informasi yang disampaikan oleh pelapor WBS dijamin kerahasiannya. Pada 2016, telah diterima dan diproses sebanyak 46 laporan melalui WBS. Laporan ini disampaikan melalui *website* (31 laporan), surat (1 laporan), email (11 laporan), telepon (1 laporan) dan SMS (2 laporan). Dari jumlah tersebut, 9 laporan memenuhi syarat dan kriteria pelaporan WBS BI untuk ditindaklanjuti penegakan disiplinnya. Sementara sisanya, tidak memenuhi persyaratan, antara lain, laporan tidak terkait dengan insan Bank Indonesia atau kegiatan operasional Bank Indonesia.

Penegakan Disiplin Bank Indonesia: Untuk memastikan adanya tindakan organisasi terhadap pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku serta mekanisme dan prosedur kerja, Bank Indonesia menerapkan aturan penegakan disiplin. Aturan tersebut menjabarkan mengenai mekanisme penanganan terhadap dugaan pelanggaran hingga pemberian sanksi.

Assistant Managers to senior and also Staff for certain positions.

For its commitment to actively support corruption eradication activities through the submission of wealth reports, at an event celebrating the International Anti-Corruption Day, Bank Indonesia was awarded the LHKPN 2016 Award by KPK.

Whistle Blowing System (WBS): *To control HR behavior and detect any potential frauds and any unethical behaviors, Bank Indonesia has implemented the WBS. In 2015, Bank Indonesia has upgraded its WBS to widen the access for reporting by internal parties and the public, including its handling mechanism, through:*

Website : <https://www.bi.go.id/wbsbi>;

Mail : WBS-BI, Jl. M. H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350;

Facsimile: (+62) 21 2310 689;

Email : wbsbi@bi.go.id;

SMS : (+62) 8118 6927 24;

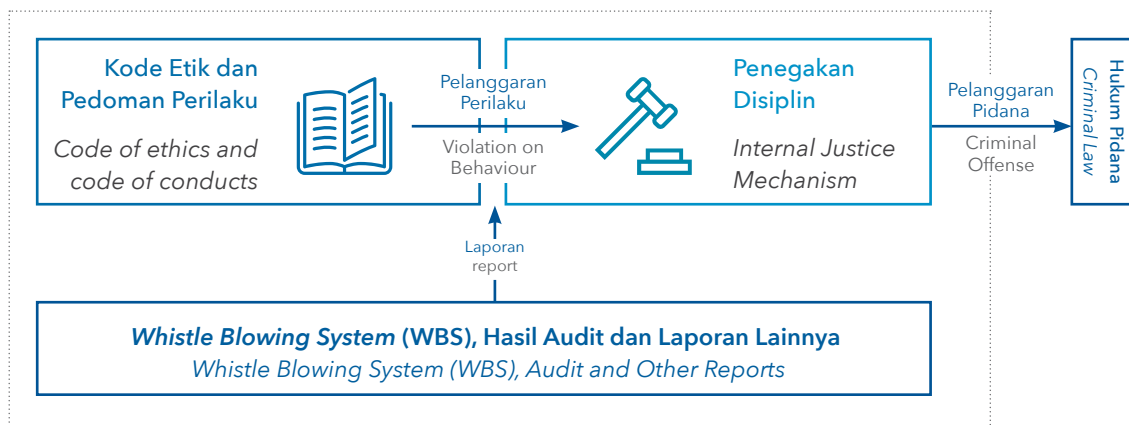
Phone : (+62) 21 2981 7752;

The confidentiality of any information provided by any whistle blower is guaranteed. In 2016, 46 reports have been received and processed through Bank Indonesia's WBS. These reports were submitted via website (31 reports), letter (1 report), email (11 reports), phone (1 report) and SMS (2 reports). From that number, 9 reports were considered qualified to meet the terms and criteria of whistle blowing for disciplinary follow-ups. The rest of the reports were considered unqualified due to, among others, its irrelevance with Bank Indonesia's individuals or operations.

Disciplinary Enforcement of Bank Indonesia: *To ensure that organizational actions are taken against any Code of Ethics and Code of Conduct violation as well as the mechanism and work procedure, Bank Indonesia has implemented a rule on disciplinary enforcement. The rule sets out in detail the mechanism of disciplinary enforcement from handling any potential violations to imposing sanctions.*

Pengenaan sanksi disesuaikan dengan jenis pelanggarannya yang terbagi dalam 3 (tiga) kategori yakni sanksi ringan, sedang, dan berat. Selain mengenakan sanksi sesuai kategorinya, pengenaan sanksi juga akan berdampak terhadap fasilitas yang diberikan kepada pegawai antara lain penundaan keikutsertaan dalam program pendidikan dan promosi, serta penerimaan fasilitas yang lain. Jangka waktu dampak sanksi juga disesuaikan dengan kategori sanksinya. Semakin berat kategori sanksi, maka semakin lama dampak pengenaan sanksi tersebut. Hal ini merupakan komitmen Bank Indonesia untuk tidak mentoleransi penyimpangan yang dilakukan oleh SDM nya.

The imposition of sanction shall be adjusted to the type of violation, which is classified into three categories: light, medium, and heavy. In addition to imposing sanctions based on these categories, any sanction imposed shall also affect the facilities provided to the relevant employees, such as postponing their participation in an educational program and promotion, and other types of facilities. The term of sanction shall also be adjusted according to the sanction category. The heavier the violation, the longer the term of the sanction. This is a form of Bank Indonesia's commitment not to tolerate any violation by its Human Resources.



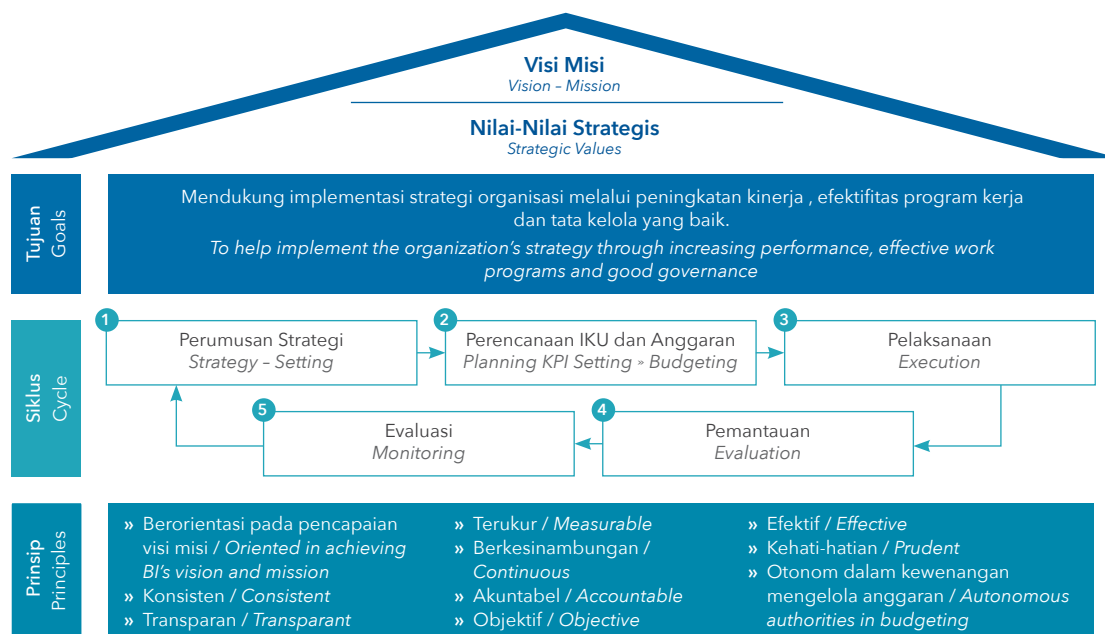
Infografis Keterkaitan Kode Etik, Disiplin Pegawai dan WBS
Infographic Linkages between Code of Ethics, Employee Discipline and WBS

PERENCANAAN STRATEGIS DAN MANAJEMEN KINERJA

Strategic Planning and Performance Management

Untuk memastikan seluruh kegiatan Bank Indonesia dan alokasi sumber daya diarahkan untuk mencapai Visi tahun 2024, Bank Indonesia menerapkan proses manajemen strategis melalui Sistem Perencanaan, Anggaran, dan Manajemen Kinerja (SPAMK). SPAMK mencakup aturan, perangkat, dan mekanisme dalam manajemen strategis dan anggaran untuk mencapai visi dan misi Bank Indonesia secara terintegrasi, sistematis, seimbang, dan berkelanjutan.

To ensure that Bank Indonesia's activities and resources are focused to achieve the Vision of 2024, Bank Indonesia has implemented a strategic management process through a Planning, Budgeting, and Performance Management System (SPAMK). SPAMK includes rules, tools, and mechanisms in strategic and management and budgeting to achieve BI's vision and mission in an integrated, systematic, balanced, and sustainable way.



Gambar 5. Kerangka Perencanaan Strategis, Anggaran, dan Manajemen Kinerja
Picture 5. Framework on Strategic Planning, Budget, and Performance Management

Proses perencanaan dilakukan dalam dua tahap, yaitu perencanaan lima tahunan (jangka menengah) dan perencanaan tahunan (jangka pendek). Proses perencanaan lima tahunan mencakup analisa lingkungan strategis, penetapan sasaran strategis, dan penyusunan roadmap program kerja strategis selama lima tahun ke depan. Rencana strategis yang dihasilkan selanjutnya dikomunikasikan kepada seluruh Satuan Kerja dalam Forum Strategis (FORSTRA) yang diselenggarakan secara 5 tahunan.

The planning is carried out in two stages, namely five-year planning (medium term) and annual planning (short-term). The five-year planning includes analysis on strategic environment, determination of strategic objectives, and formulation of the roadmap of strategic work program for the next five years. The strategic plans developed will further be communicated to all Work Units in the Strategic Forum (FORSTRA) that is held every 5 years.

Sedangkan pada perencanaan tahunan (jangka pendek) dilakukan evaluasi pelaksanaan program kerja strategis, pengkinian analisa lingkungan strategis, rencana kerja tahunan, dan penyusunan anggaran program kerja strategis tahunan. Pembahasan Program Kerja Anggaran dan Rencana Investasi (PKARI) Bank Indonesia dilakukan dalam forum Rapat Kerja Tahunan. Selanjutnya, dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia untuk disampaikan kepada DPR.

Sepanjang 2016, Bank Indonesia telah melalui tahapan proses manajemen strategis sebagai berikut:

- a. Dalam Board Retreat, Dewan Gubernur melakukan penajaman arah strategis. Penajaman dilakukan berdasarkan identifikasi isu strategis yang diperoleh melalui analisis lingkungan strategis dan evaluasi implementasi strategi tahun sebelumnya. Pembahasan oleh Dewan Gubernur ini menghasilkan arahan-arahan yang dituangkan dalam Arahan Tahunan Gubernur Bank Indonesia sebagai pedoman umum dalam penyusunan program kerja, anggaran dan rencana investasi.
- b. Bank Indonesia merumuskan strategi dan sasaran strategis yang menjadi acuan indikator kinerja utama Bank Indonesia. Indikator tersebut selanjutnya diturunkan dan diselaraskan kepada seluruh satuan kerja sebagai komitmen pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tahun mendatang.
- c. Bank Indonesia melakukan pemantauan/review dan pengendalian atas pelaksanaan program strategis Bank Indonesia secara periodik melalui Evaluasi Kinerja Bulanan. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa strategi yang disusun dapat dilaksanakan secara tepat, terukur, dan terfokus. Dalam hal terdapat permasalahan, dibahas alternatif solusi guna mendorong pencapaian kinerja yang optimal dan mengatasi

Meanwhile, the annual planning (short-term) includes evaluation on the execution of strategic work plans, update of the analysis on strategic environment, annual work plan, and allocation of the annual strategic work program budget. Discussion on Work Program Budget and Investment Plan (PKARI) of Bank Indonesia is held at the Annual Work Meeting. Further, Bank Indonesia's Annual Budget Plan is formulated for submission to DPR.

Throughout 2016, Bank Indonesia has completed the following stages of strategic management process:

- a. *During the Board Retreat, the Board of Governors has focused on strategic directives. This was carried out based on strategic issues from the analysis of the strategic environment and the evaluation of previous year's strategy implementation. This discussion resulted in directives that were listed in the Annual Directives of the Board of Governors of Bank Indonesia as the general guidelines in formulating work programs, the budget, and investment plan.*
- b. *Bank Indonesia formulated its strategy and strategy target as a reference for Bank Indonesia key performance indicator. Such indicators were cascaded and aligned to all business unit as a commitment of tasks and responsibilities for upcoming year.*
- c. *Bank Indonesia performed periodic reviews and supervision on the implementation of Bank Indonesia's strategic programs through Monthly Performance Evaluation. These reviews were performed to ensure that the formulated strategies could be implemented in a proper, measurable, and focused manner. In case of any issues, alternative resolutions were discussed to optimize performance and to face any challenges*



Monitoring Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Monitoring the Achievement of Key Performance Indicator

tantangan yang dihadapi dalam implementasi program kerja. Adapun pemantauan realisasi anggaran program kerja juga dilakukan untuk memastikan penyerapan anggaran sesuai dengan Anggaran Tahunan Bank Indonesia.

Untuk strategi 2016 telah ditetapkan 6 Sasaran Strategis dan 10 Indikator Kinerja Utama Bank Indonesia sebagai alat ukur keberhasilan kinerja Bank Indonesia. Terdapat 2 perspektif utama yang digunakan untuk mengukur pencapaian tersebut yaitu perspektif *stakeholder* dan perspektif internal.

A. Perspektif *stakeholder* merupakan indikator utama untuk menunjukkan pentingnya kepuasan *stakeholder* eksternal terhadap Bank Indonesia. Di dalam perspektif ini terdapat 4 Sasaran Strategis dan 7 IKU dengan detail sebagai berikut:

1. Stabilitas Nilai Rupiah
 - a. Inflasi inti (Target (T) = $4\% \pm 1\%$; Realisasi (R) = 3,23%)
IKU ini tercapai dengan realisasi inflasi inti pada akhir 2016 sebesar 3,23%. Secara tahunan, inflasi inti melambat terutama bersumber dari kelompok komoditas yang diperdagangkan (inflasi inti *traded*), sementara inflasi kelompok komoditas yang tidak diperdagangkan (inflasi inti *non-traded*) relatif stabil.

encountered in implementing the work programs. Meanwhile, the realization of the work plan budget was also monitored to ensure that the budget absorption was in accordance with the Annual Budget of Bank Indonesia.

For the 2016 strategy, 6 Strategic Target and 10 Key Performance Indicators of Bank Indonesia have been established as a measure of Bank Indonesia's performance success. There are 2 main perspectives used to measure the achievement: stakeholder perspectives and internal perspectives.

A. A stakeholder perspective is a key indicator to demonstrate the importance of external stakeholders' satisfaction toward Bank Indonesia. In this perspective there are 4 Strategic Targets and 7 KPIs with the following details:

1. *Stability of Rupiah*
 - a. *Core inflation (Target (T) = $4\% \pm 1\%$, Realization (R) = 3.23%)
This KPI is achieved towards the realization of core inflation at end-2016 at 3.23%. Annually, core inflation slowed mainly from the traded commodity group (traded core inflation), while non-traded commodity inflation (non-traded core inflation) was relatively stable.*

- b. % Rata-rata volatilitas nilai tukar Rp/ USD (R=8,45%)
Pergerakan volatilitas nilai tukar Rupiah sepanjang 2016 masih dapat terjaga di bawah batas maksimal. Upaya stabilisasi yang dilakukan Bank Indonesia di pasar valuta asing dapat menjaga volatilitas dalam kisaran target, *confidence* pasar, dan pergerakan nilai tukar yang mendekati nilai fundamentalnya.
2. Sistem Keuangan Stabil (Indeks Stabilitas Sistem Keuangan T=max 2; R=0,94)
Pencapaian sasaran strategis ini tercermin pada IKU Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK). Di 2016, realisasi ISSK jauh berada di bawah ambang batas (*threshold*) yang dapat ditoleransi. Rendahnya ISSK ditopang oleh kondisi institusi keuangan dan pasar keuangan Indonesia yang tetap terjaga ditengah kondisi pasar keuangan global yang belum kondusif.
3. Sistem Pembayaran aman, efisien, inovatif, dan lancar
- a. % Ketersediaan layanan jasa sistem pembayaran Bank Indonesia (*High Value Payment System, Securities Settlement, Retail Value Payment System, Banking Services*). [T=99,97%; R=99,16]
Secara keseluruhan 2016, penyelenggaraan sistem pembayaran Bank Indonesia berjalan dengan aman dan lancar. Meskipun terdapat sedikit gangguan infrastruktur eksternal, namun masih terkendali. Bank Indonesia juga terus melakukan perbaikan baik dari sisi infrastruktur maupun sistem informasi, sehingga seluruh transaksi sistem pembayaran dapat berjalan dengan lancar dan aman.
- b. Peningkatan transaksi sistem pembayaran ritel (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, uang elektronik, *Internet Payment, Mobile Payment, Transfer Kredit*). (T=Min. 2,05 x *Gross Domestic Product* ; R=2,50 x GDP).
Pada akhir 2016, transaksi sistem pembayaran ritel mencapai 2,50
- b. % Average exchange rate volatility Rp / USD (R = 8.45%)
The movement of Rupiah exchange rate volatility throughout 2016 was maintained below the maximum limit. Stabilization efforts by Bank Indonesia in the foreign exchange market was able to maintain volatility in the targeted range, raise market confidence, and keep the exchange rate movement close to its fundamental value.
2. *Stable Financial System (Financial System Stability Index T = max 2; R = 0.94)*
The achievement of this strategic goal is reflected in the Financial System Stability Index (ISSK). In 2016, ISSK realization is well below the tolerable threshold. The low ISSK is underpinned by the condition of Indonesia's financial institutions and financial markets that remain intact amidst unfavorable global financial market conditions.
3. *Payment system is safe, efficient, innovative, and smooth*
- a. % Availability of Bank Indonesia payment system (*High Value Payment System, Securities Settlement, Retail Value Payment System, Banking Services*) services. [T = 99.97%; R = 99.16]
Overall, in 2016, the operation of Bank Indonesia payment system ran safely and smoothly. Although there was a minor external infrastructure interruption, it was promptly kept under control. Bank Indonesia also continues to improve both in terms of infrastructure and information systems, so that all payment system transactions can run smoothly and safely.
- b. *Increased transaction of retail payment system (Card-Based Payment Instrument, electronic money, Internet Payment, Mobile Payment, Credit Transfer). (T = Min. 2.05 x Gross Domestic Product; R = 2.50 x Gross Domestic Product). By the end of 2016, payment system retail transactions*

x GDP, melampaui target yang ditetapkan sebesar 2,05 x GDP. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh kebijakan sistem pembayaran non tunai yang dilaksanakan selama 2016 serta koordinasi yang baik dengan stakeholder internal dan eksternal.

4. Ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah cukup dan denominasi sesuai di seluruh wilayah Indonesia
 - a. % peningkatan jangkauan dan layanan distribusi uang (T=12%; R=16,12%)
Selama 2016, Bank Indonesia mampu melebihi target tingkat jangkauan dan layanan distribusi uang yang ditetapkan. Hal ini didukung dengan realisasi jumlah kas titipan yang meningkat dibanding target awal. Dengan capaian ini, Bank Indonesia mampu memberikan layanan distribusi uang yang lebih baik.
 - b. *Soil level* Uang Layak Edar Nasional (T: Uang Pecahan Besar=8 & Uang Pecahan Kecil=6 ; R: Uang Pecahan Besar=10 & Uang Pecahan Kecil=7)
Bank Indonesia berkomitmen untuk menyediakan uang layak edar bagi masyarakat, yaitu uang Rupiah yang memenuhi persyaratan untuk diedarkan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Di 2016, Bank Indonesia mampu mencapai target *soil level* uang layak edar Nasional baik untuk Uang Pecahan Besar maupun Uang Pecahan Kecil.

- B. Perspektif internal mengacu pada proses bisnis yang dijalankan oleh internal di Bank Indonesia untuk mendukung pencapaian di perspektif stakeholder.
 1. Tata Kelola dan Kestinambungan Keuangan Bank Indonesia
 - a. Predikat Laporan Tahunan Keuangan Bank Indonesia/LKTBI (T=Wajar Tanpa Pengecualian ; R=Wajar Tanpa Pengecualian)
Untuk memastikan akuntabilitas keuangan Bank Indonesia, DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan melakukan

reached 2.50 x GDP, exceeding the target set at 2.05 x GDP. The increase is influenced by the non-cash payment system policy implemented during 2016 as well as good coordination with internal and external stakeholders.

4. *The availability of Rupiah in sufficient quantity and denomination across all regions of Indonesia*
 - a. *% Increased coverage and money distribution service (T = 12%; R = 16.12%)
During 2016, Bank Indonesia was able to exceed the target level of coverage and defined money distribution services. This is supported by the realization of the increasing amount of cash deposits compared to the initial target. With this achievement, Bank Indonesia is able to provide better money distribution services.*
 - b. *Cash fit for circulation's soil level (T: Large Denomination=8 & Small Denomination=6; R: Large Denomination=10 & Small Denomination=7)
Bank Indonesia is committed to provide money that is suitable for circulation throughout Indonesia, which is the Rupiah currency that meets circulation requirements based on quality standards stipulated by Bank Indonesia. In 2016, Bank Indonesia was able to achieve the target of national cash fit for circulation's soil levels for both the Large and Small Denominations.*

- B. *Internal perspective refers to internal business processes operated at Bank Indonesia to support achievement on the internal stakeholder's perspective.*
 1. *Governance and Financial Sustainability of Bank Indonesia*
 - a. *Predicate of Bank Indonesia's Annual Financial Report/LKTBI (T = Unqualified Opinion; R = Unqualified Opinion)
To ensure the financial accountability of Bank Indonesia, the House of Representatives and the State Audit Board supervise Bank Indonesia. Based*

pengawasan terhadap Bank Indonesia. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian.

- b. Indeks *Good Governance* (T=5 (skala 1-6); R=5,07
Guna memberikan umpan balik terhadap penerapan tata kelola di Bank Indonesia dan sebagai upaya perbaikan ke depan, Bank Indonesia melakukan survei tingkat keyakinan *stakeholders* terhadap implementasi tata kelola Bank Indonesia meliputi aspek independensi, akuntabilitas, dan transparansi. Hasil survei *governance* Bank Indonesia di 2016 adalah 5,07 dari skala 6. Dengan pencapaian ini, *stakeholders* menyakini Bank Indonesia telah menerapkan aspek tata kelola yang baik dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Transformasi yang berkelanjutan (T=Min. 85%; R=92%)
Keberhasilan pengelolaan program transformasi tercermin pada pencapaian IKU terkait penyelesaian deliverables yang mencapai 92 % di akhir tahun 2016, melebihi target yang ditetapkan. Kuatnya komitmen dan *ownership* program transformasi menjadi faktor pendorong keberhasilan tersebut.

on audit results of Bank Indonesia Annual Report 2016 by the Supreme Audit Board, Bank Indonesia received Unqualified Opinion once again.

- b. *Good Governance Index* (T = 5 (scale 1-6), R = 5.07
In order to provide feedback on the implementation of governance at Bank Indonesia and as an improvement effort for the future, Bank Indonesia conducted stakeholder confidence surveys on the implementation of Bank Indonesia governance including independence, accountability and transparency aspects. The score of Bank Indonesia's governance survey in 2016 is 5.07 out of 6. With this achievement, stakeholders believe that Bank Indonesia has done an excellent job on applying/implementing aspects of good governance when performing its tasks/duties.

2. *Continuous transformation* (T = Min 85%, R = 92%)
The success of the transformation program management is reflected in the achievement of IKU related to the completion of deliverables, which reached 92% by the end of 2016, exceeded the target. The strong commitment and ownership of the transformation program have been the key drivers of this success.

MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERNAL

Risk Management and Internal Control



Membangun Budaya Sadar Risiko Bank Indonesia
Establishing the Risk Culture in Bank Indonesia

Manajemen Risiko: Penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal di Bank Indonesia merupakan bagian terpadu dalam proses perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta kegiatan operasional Bank Indonesia. Bank Indonesia perlu memastikan bahwa seluruh pengambilan keputusan serta kegiatan operasional telah dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan berdampak positif terhadap kinerja, kesinambungan keuangan, dan kredibilitas Bank Indonesia dalam menjaga kepercayaan dan melindungi kepentingan publik.

Sebagai acuan dalam pelaksanaan manajemen risiko yang konsisten di seluruh tingkatan organisasi, Bank Indonesia menetapkan 5 prinsip manajemen risiko, yaitu:

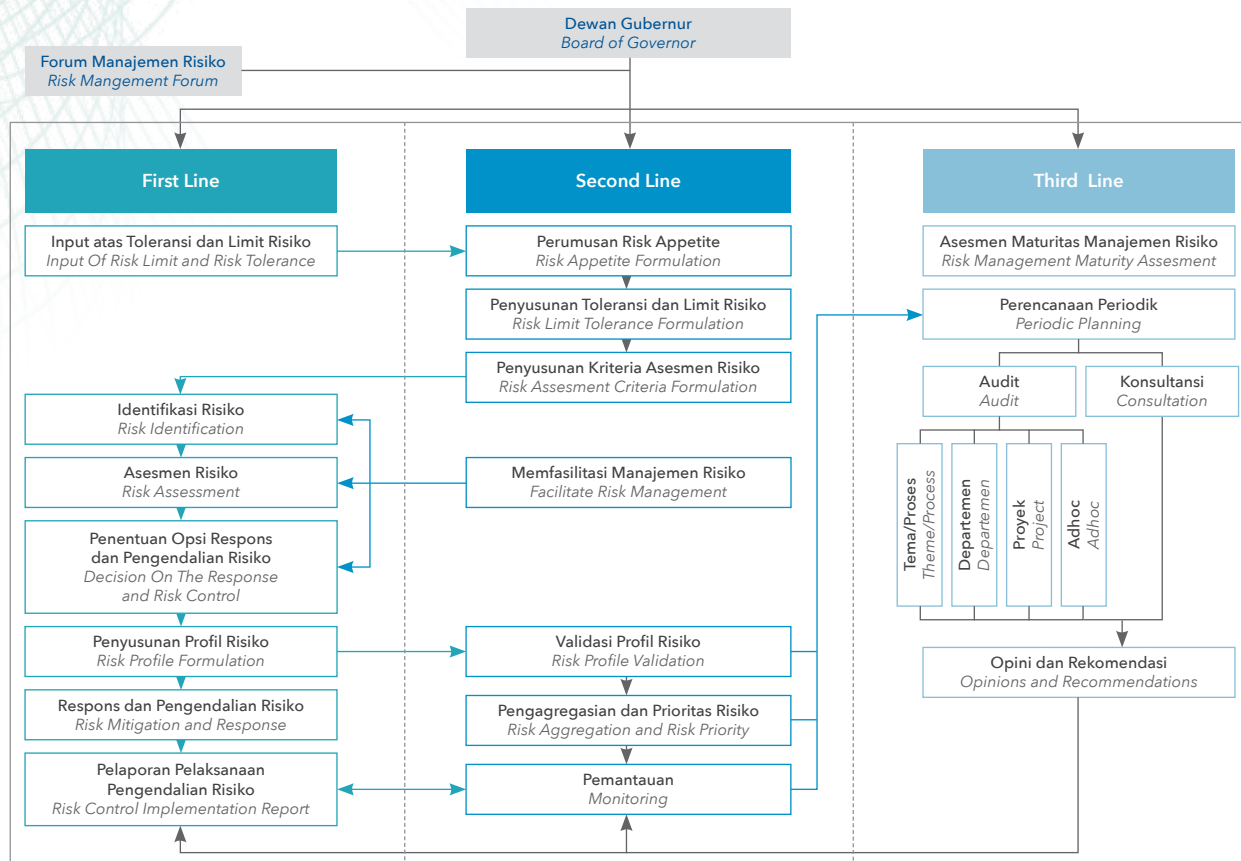
Risk Management: *The implementation of risk management and internal control in Bank Indonesia is an integral part of the formulation, stipulation, and implementation of policies and operations in Bank Indonesia. Bank Indonesia needs to ensure that all decision making and operations have been carried out in accordance with good governance practices and would positively impact the performance, financial sustainability, and credibility of Bank Indonesia to maintain public trust and protect public interest.*

As a reference in implementing a consistent risk management across all levels of the organization, Bank Indonesia has established 5 principles of risk management:

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Terintegrasi yaitu pelaksanaan manajemen risiko terpadu dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan prinsipil dan strategis, kebijakan operasional, dan kegiatan operasional Bank Indonesia 2. Terukur yaitu pengelolaan risiko dapat mengantisipasi ketidakpastian secara sistematis dan dilakukan berdasarkan analisis biaya dan manfaat serta menggunakan informasi terbaik 3. Dinamis yaitu manajemen risiko selalu tanggap terhadap perubahan dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan 4. Objektif yaitu manajemen risiko dilaksanakan secara independen dan didukung oleh kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan tanggung jawab 5. Menciptakan nilai tambah yaitu manajemen risiko berkontribusi dan memberi jaminan yang wajar dalam pencapaian visi dan misi dalam rangka melindungi kepentingan Bank Indonesia dan publik | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Integrated which means that the risk management is implemented in an integrated manner from the formulation, stipulation, to the implementation of principal and strategic policies, implementation of operational policies, and operations of Bank Indonesia</i> 2. <i>Measurable which means that the risk management should be able to systematically anticipate any uncertainties and implemented on the basis of cost-benefit analysis using the best information</i> 3. <i>Dynamic which means that the risk management should be responsive to any changes and easy to adjust to any circumstances</i> 4. <i>Objective which means that the risk management should be implemented independently and supported by clarities in function, structure, system, and responsibilities</i> 5. <i>Values-added creation which means that the risk management should make contribution and provide reasonable guarantee in achieving Bank Indonesia's visions and missions in order to protect the interest of Bank Indonesia and the public</i> |
|--|--|

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia menerapkan pendekatan tiga lini pengendalian. Konsep ini membagi pelaksana manajemen risiko dalam tiga kelompok yaitu pengendalian risiko di lini pertama dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan proses bisnis, pengendalian risiko di lini kedua dilakukan oleh satuan kerja yang mengelola risiko, dan pengendalian risiko di lini ketiga dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan fungsi audit. Pengendalian risiko di lini ketiga memberikan jaminan terhadap efektivitas pengendalian risiko yang dilakukan oleh lini pertama dan lini kedua.

In its implementation, Bank Indonesia has applied three lines of defense. This concept classifies risk management into three groups, namely the first line of defense by business units dealing with business processes, the second line of defense by business units managing risks, and the third line of defense by business units that serve audit functions. The third line of defense provides assurance about the effectiveness of risk management carried out by the first and second line of defenses.



Gambar 6. Konsep Tiga Lini Pengendalian
Picture 6. Three Lines of Defense

Selama 2016, Bank Indonesia menghadapi risiko sebagai berikut:

- Risiko Kebijakan:** yaitu risiko atas penetapan dan pernyataan kebijakan serta pengaturan Bank Indonesia.

Risiko kebijakan, terkait bauran kebijakan, dipengaruhi tekanan eksternal yang berasal dari faktor geopolitik global, turunnya harga komoditas dunia, masih lambatnya pertumbuhan global, dan potensi gejolak keuangan yang berdampak pada negara berkembang. Namun demikian, bauran kebijakan Bank Indonesia sepanjang 2016 mampu menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan inflasi.

- Risiko Pasar:** yaitu risiko akibat pergerakan variabel pasar berupa suku bunga, nilai tukar, ekuitas, dan komoditas, yang berpengaruh pada kinerja portofolio surat-surat berharga yang dimiliki Bank Indonesia.

Throughout 2016, Bank Indonesia encountered risks as follows:

- Policy Risks:** refers to any risks arising during the stipulation and introduction of Bank Indonesia policies and arrangements.

Policy risks, related to policy mix, are affected by external pressure originated from global geopolitical factors, decrease in global commodity prices, slow global growth, potential financial turmoil that affects developing countries. However, Bank Indonesia policy mix throughout 2016 was able to maintain the stability of the Rupiah exchange rate and inflation.

- Market Risks:** refers to any risks arising as a result from the movement of market variables such as interest rate, exchange rate, equity prices, and commodity prices, which all affect the performance of security portfolios owned by Bank Indonesia.

Risiko pasar yang dihadapi selama tahun 2016 relatif meningkat, dipengaruhi oleh dampak pemilihan presiden Amerika Serikat, ekspektasi kebijakan moneter The Federal Reserve, perkembangan geopolitik di kawasan Eropa, serta kondisi perekonomian di Tiongkok.

- c. **Risiko Kredit:** yaitu risiko akibat kegagalan satu atau beberapa pihak yang memiliki kewajiban membayar sesuai dengan kesepakatan, perjanjian, atau kontrak.

Risiko kredit di tahun 2016 relatif terjaga sebagaimana ditunjukkan oleh rata-rata tertimbang peringkat kredit dari penerbit surat-surat berharga investasi cadangan devisa yang stabil pada peringkat AA+ dan mayoritas peringkat kredit lawan transaksi cadangan devisa yang stabil pada peringkat A.

- d. **Risiko Likuiditas:** yaitu risiko berupa ketidakmampuan memenuhi kewajiban keuangan jatuh tempo dan mentransaksikan aset secara segera pada harga wajar.

Risiko likuiditas di 2016 relatif terjaga. Kemampuan Bank Indonesia dalam menyediakan likuiditas, didukung oleh strategi pengelolaan portofolio cadangan devisa yang sebagian besar berupa Aset Likuid Berkualitas Tinggi dan memiliki maturitas jangka pendek.

- e. **Risiko Operasional:** yaitu risiko yang berasal dari faktor internal (proses, sumber daya manusia, teknologi) dan faktor eksternal, yang mempengaruhi kebijakan dan/atau kegiatan operasional.

Secara umum, eksposur risiko operasional relatif terkendali. Proses bisnis yang terpapar risiko operasional berhubungan dengan pemangku kepentingan eksternal antara lain terkait penyelenggaraan sistem pembayaran, pengedaran uang Rupiah, dan penyelesaian transaksi pemerintah. Sebagai bagian dari pengendalian risiko operasional, Bank Indonesia menerapkan *Business Continuity Plan* dan *Disaster Recovery Plan*, untuk memastikan

Market risks encountered during 2016 relatively increased, which were driven by the impact of US President Election, expectation of monetary policies of the Federal Reserve, development of European geopolitics, and China's economic condition.

- c. **Credit Risks:** refers to any risks arising from the failure of one or more parties who are obligated to pay in accordance with the deal, agreement, or contract.

Credit risks in 2016 were relatively under control as evident from the weighted average of credit ratings of the issuers of foreign exchange reserve that was stable at the AA+ rate and the majority of credit ratings for foreign exchange reserves transactions that were stable at the A rate.

- d. **Liquidity Risks:** refers to any risks of the inability to pay any maturing financial liabilities and to liquidate assets immediately at reasonable prices.

Liquidity risks in 2016 were relatively under control. Bank Indonesia's ability to provide liquidity, was supported by its strategies in managing foreign exchange reserve portfolios, which are mostly in the form of High Quality Liquid Assets with short-term maturity.

- e. **Operational Risks:** refers to any risks arising from both internal factors (process, human resources, technology) and external factors that affect policies or operations.

In general, the exposure of operational risks was relatively under control. Business processes exposed to operational risks, related to stakeholders were, among others the operation of payment systems, Rupiah currency circulation, and operation of government transactions. As a part of operational risk management, Bank Indonesia has implemented a Business Continuity Plan and Disaster Recovery Plan, to ensure the preparedness of every work unit in

kesiapan setiap satuan kerja dalam menghadapi setiap peristiwa yang dapat mengakibatkan terhentinya tugas kritikal melalui penguatan manajemen keberlangsungan tugas. Fokus kegiatan 2016 adalah pada penyiapan infrastruktur *Business Resumption Site* serta *Alternate Command Center* sebagai lokasi kerja dan garis komando dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan lokasi kantor pusat Bank Indonesia tidak dapat beroperasi.

- f. **Risiko Hukum:** yaitu risiko yang berasal dari suatu tindakan yang secara signifikan berpotensi menimbulkan tuntutan dan pertanggungjawaban hukum, antara lain, disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis seperti ketiadaan, ketidakjelasan, perubahan peraturan perundangan, dan/atau kelemahan dokumen pembuktian hukum.

Bank Indonesia memastikan terjaganya risiko hukum di dalam setiap kegiatan operasional maupun pengambilan dan penetapan kebijakan serta pengaturan. Dalam mengeluarkan suatu peraturan, Bank Indonesia melakukan analisis pemenuhan aspek hukum. Sepanjang 2016, eksposur risiko hukum relatif terjaga.

- g. **Risiko Reputasi:** yaitu risiko yang disebabkan oleh opini, persepsi, atau pemberitaan negatif, yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap Bank Indonesia.

Risiko reputasi yang dihadapi Bank Indonesia di 2016 terkait dengan pemberitaan uang Rupiah Tahun Emisi 2016 dapat dimitigasi dengan komunikasi dan sosialisasi kepada berbagai pihak. Dengan demikian, sepanjang 2016, risiko reputasi terjaga dengan baik.

Dalam rangka penguatan independensi fungsi manajemen risiko serta penyempurnaan kerangka kerja dan kebijakan manajemen risiko, Bank Indonesia menyempurnakan struktur organisasi Departemen Manajemen Risiko. Hal ini dilakukan dengan menambahkan fungsi fasilitasi, konsultasi, dan pengembangan manajemen risiko.

facing any incident that may stop any critical task, by improving sustainable performance management. The focus in 2016 was on preparing the infrastructures of the Business Resumption Site and the Alternate Command Center as an emergency work site and command line in case of any disturbance occur, that will cause the head office of Bank Indonesia can not operate.

- f. **Legal Risks:** refers to any risk arising from any action that significantly and potentially leads to a lawsuit and legal liability caused by, among others, any weaknesses in juridical aspects, such as the inexistence, unclarity, and/or any amendment to the laws and regulations, and/or any loopholes in related legal documents.

Bank Indonesia has ensured that any legal risks were under control in every operation and in the making and stipulation of any policy and arrangements. In issuing a regulation, Bank Indonesia ensures that the analysis related to the fulfillment of legal aspects has been conducted. Throughout 2016, the exposure to legal risks is relatively under control.

- g. **Reputational Risks:** refers to any risk arising from any negative opinion, perception, or communication that may damage public trust in Bank Indonesia.

Throughout 2016, reputational risks were under control, except for a case relating to the issuance of Rupiah currency for the emission year of 2016 that was mitigated with appropriate information and socialization to various parties. As such, Bank Indonesia's reputation risk was under control.

To strengthen the independency of the risk management function as well as improving the framework and risk management policies, Bank Indonesia has enhanced the organization structure of the Risk Management Department. This was done by adding the function of facilitating, consulting and developing risk management.

Dalam rangka penguatan pengendalian intern dan peningkatan koordinasi pelaksanaan manajemen risiko di satuan kerja, Bank Indonesia juga melakukan penguatan struktur manajemen risiko di lini pengendalian pertama dengan menetapkan posisi *Internal Control Officer*.

Hasil penguatan manajemen risiko sepanjang tahun 2016 tercermin dari hasil asesmen yang disampaikan oleh konsultan independen terkait dengan maturitas penerapan manajemen risiko. Hasil asesmen maturitas menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan penilaian sebelumnya di tahun 2013. Beberapa pencapaian positif meliputi aspek: (i) tata kelola dan budaya risiko, (ii) manajemen risiko dan strategi, (iii) manual manajemen risiko, (iv) infrastruktur, (v) praktik manajemen risiko, serta (vi) pelaporan dan pemantauan risiko.

Sebagai bagian dari perencanaan strategis penerapan manajemen risiko, Bank Indonesia telah menyusun rencana bisnis penguatan manajemen risiko periode 2016-2021. Saat ini tengah dilaksanakan Transformasi Audit Intern dan Manajemen Risiko yang Terintegrasi.

Pelaksanaan Fungsi Audit Internal: Sebagai salah satu elemen tata kelola bank sentral yang baik, Bank Indonesia melaksanakan fungsi audit internal dengan misi memberikan opini dan rekomendasi terhadap proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian melalui kegiatan audit dan konsultasi. Dalam melaksanakan misi tersebut, auditor internal menjalankan tugasnya secara independen dan profesional sesuai standar internal audit.

Bank Indonesia menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam melakukan audit. Semakin tinggi risiko sasaran audit, maka semakin tinggi frekuensi pelaksanaan audit internal. Pelaksanaan audit berbasis risiko ini memperkuat kapabilitas audit internal dan manajemen risiko Bank Indonesia sesuai dengan praktek terbaik internasional. Berdasarkan profil risikonya, selama 2016, telah dilakukan audit internal terhadap 33 satuan kerja yang terdiri dari 17 satuan kerja di Kantor Pusat Bank Indonesia, 14 satuan kerja di Kantor Perwakilan Bank Indonesia

To improve internal controls and improve coordination of risk management implementation at work units, Bank Indonesia has also strengthened the structure of risk management at the first line of defence by assigning the position of an Internal Control Officer.

The results of risk management improvement throughout 2016 were shown from the result of the assessment reported by an independent consultant relating the maturity of risk management implementation. Several positive achievements cover the following aspects: (i) governance and risk culture, (ii) risk management and strategy, (iii) risk management manual, (iv) infrastructure, (v) risk management practices, and (vi) risk reporting and monitoring.

As part of strategic planning of risk management implementation, Bank Indonesia has designed a business plan to improve risk management for the period of 2016-2021. As an implementation of such business plan, the Integrated Transformation of Internal Audit and Risk Management is being carried out at this time.

Implementation of Internal Audit Function: As an element of central bank good governance, Bank Indonesia has implemented the function of internal audit with a mission to provide opinions and recommendations on the governance, risk management, and controls through audits and consultations to achieve Bank Indonesia's objectives. In achieving this mission, the internal auditor should be independent in nature, and perform its duties professionally in accordance with international standards.

Bank Indonesia implements risk based internal audit approach. The higher the targeted audit risk, the higher the frequency of internal audit. The risk based internal audit strengthens the capability of internal audit and risk management in accordance with international best practices. According to the risk profile, throughout 2016 internal audits were performed on 33 business units, which consisted of 17 business units in Bank Indonesia Head Office, 14 Regional Offices, and 2 Representative Offices. In order to ensure the compliance and adequacy of

Dalam Negeri, dan 2 satuan kerja di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Luar Negeri. Untuk memastikan kepatuhan dan kecukupan pengendalian internal, selain melakukan audit yang bersifat rutin, dilakukan pula beberapa audit terhadap aplikasi kritikal, sistem pengamanan, dan pengelolaan kas.

Untuk meningkatkan kapabilitas auditor internal dilakukan berbagai pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi nasional dan internasional. Saat ini terdapat 11 sertifikasi internasional dan 38 sertifikasi nasional yang dimiliki oleh auditor Bank Indonesia.

Untuk memastikan kualitas dan mutu hasil audit, pelaksanaan audit internal Bank Indonesia dievaluasi internal setiap semester oleh *quality assurance unit* dan eksternal setiap 5 tahun oleh konsultan independen. Penilaian dilakukan sesuai standar *The Institute of Internal Auditor*.

Sebagai bagian dari penerapan pendekatan 3 lini pengendalian, audit internal Bank Indonesia melakukan fungsi pendampingan terhadap pelaksanaan tugas *Internal Control Officer* (ICO) sebagai pengendalian lini pertama. Untuk peningkatan kapabilitas ICO, dilakukan berbagai program pembekalan, pelatihan, dan sosialisasi kepada para ICO.

Selain melakukan fungsi audit internal, auditor internal Bank Indonesia juga bekerjasama dengan auditor eksternal Bank Indonesia yakni Badan Pemeriksa Keuangan. Terkait hal ini, auditor internal Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa keuangan.

internal controls, in addition to routine audits, some other audits have also been performed, such as audits on critical applications, audits on security system implementation, and cash management.

To improve the capacity of the internal auditor, various educations and trainings were conducted, including national and international certifications. Currently, 11 international certificates and 38 national certificates were held by Bank Indonesia's internal auditor.

To ensure the quality of audit results, Bank Indonesia's internal audit performance was evaluated internally by the quality assurance unit each semester and externally every five years by an independent consultant. The evaluation was conducted according to the standard of Institute of Internal Auditor.

As part of the implementation of three-lines-of-defenses approach, Bank Indonesia's internal audit provides assistance to the Internal Control Officer (ICO) in performing their duties at the first line of defense. To improve the capacity of the ICO, various training and socialization programs for ICOs were carried out.

In addition to performing internal audit functions, Bank Indonesia's internal auditor also cooperating with Bank Indonesia's external auditor, namely the Audit Board of the Republic of Indonesia. In this regard, Bank Indonesia's internal auditor routinely monitors the follow-ups to the Audit Board's results.

PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN BANK INDONESIA

Management of Bank Indonesia Financial Report

Pengelolaan laporan keuangan Bank Indonesia telah dilakukan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai landasan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, sejak 1 Januari 2014 Bank Indonesia menerapkan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI) sebagai acuan. KAKBI merupakan standar akuntansi keuangan yang disusun secara khusus berdasarkan keunikan tujuan maupun karakteristik transaksi Bank Indonesia sebagai bank sentral, yang berbeda dari entitas komersial ataupun lembaga publik lainnya. KAKBI juga menjadi acuan bagi auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan Bank Indonesia serta pengguna untuk memahami laporan keuangan Bank Indonesia.

Proses penyusunan standar akuntansi Bank Indonesia dirintis melalui proses yang panjang sejak 2008. Dari diskusi dan kajian, disimpulkan bahwa dengan keunikan tujuan Bank Indonesia sebagai bank sentral, sehingga Bank Indonesia tidak dapat sepenuhnya menerapkan standar akuntansi komersial. Oleh karenanya, Bank Indonesia memerlukan standar akuntansi yang sesuai dengan karakteristik bank sentral.

Untuk menghasilkan standar akuntansi tersebut, Bank Indonesia membentuk komite independen beranggotakan pakar akuntansi yang berasal dari organisasi profesi (Ikatan Akuntan Indonesia), akademisi, praktisi akuntansi, perwakilan anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) dan Bank Indonesia. Komite ini telah menyelesaikan 1 (satu) set standar akuntansi Bank Indonesia (KAKBI) yang terdiri dari Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Indonesia (PDP2LK-BI) dan Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (PKAK-BI).

Dengan adanya suatu standar akuntansi yang disusun oleh suatu komite independen dan tahapan yang komprehensif sesuai dengan praktik terbaik, maka diyakini akan meningkatkan kualitas laporan

The Management of Bank Indonesia Financial Report was performed in a responsible and accountable way. As a basis for the preparation and presentation of financial statements, since January 1 st, 2014 Bank Indonesia has implemented the Financial Accounting Policy of Bank Indonesia (KAKBI) as a reference. KAKBI is the financial accounting standard that is specifically designed in accordance with the specialty of the objectives and characteristics of Bank Indonesia as a central bank, which differs from other commercial entities or public institutions. KAKBI has also become the reference for auditor(s) to perform audit on Bank Indonesia's financial statements and for the users to understand Bank Indonesia's financial report.

Bank Indonesia's accounting standard was formulated after a long and thoughtful process since 2008. From various discussions and studies, it was concluded that Bank Indonesia has unique objectives as a central bank, thus the commercial accounting standards could not fully apply to Bank Indonesia. Consequently, Bank Indonesia needed a new accounting standard suitable for the characteristics of a central bank.

To formulate the accounting standard as mentioned above, Bank Indonesia established an independent committee of accounting experts that came from the professional accounting organization (Institute of Indonesia Chartered Accountants), academicians, accounting practitioners, member of the Bank Indonesia Supervisory Board, and representatives of Bank Indonesia. This committee has completed 1 set of Bank Indonesia accounting standard that consists of the Fundamental Principles for the Preparation and Presentation of Bank Indonesia Financial Report and the Statements of Financial Accounting Policies.

By having an accounting standard formulated by an independent committee and through a comprehensive process based on best practices, it is believed that the accounting standard will improve the quality of Bank

keuangan Bank Indonesia melalui penyajian laporan keuangan yang lebih relevan, akuntabel, dan transparan.

Hingga saat ini, belum ada standar akuntansi khusus bank sentral yang berlaku secara global. Beberapa bank sentral memiliki standar/kebijakan akuntansi sendiri, sementara itu terdapat pula bank sentral yang menggunakan referensi standar akuntansi komersial seperti International Financial Reporting Standards (IFRS). Bank Indonesia merupakan salah satu bank sentral yang memiliki kebijakan akuntansi sendiri (KAKBI) yang disusun dengan mempertimbangkan keunikan dari bank sentral dan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola.

Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan bank sentral, Bank Indonesia bersama The South East Asian Central Banks (SEACEN) telah mengadakan penelitian bersama pada 2015 dengan topik "*Central Bank Financial Reporting: A Preliminary Study in SEACEN Economies*". Penelitian diinisiasi oleh SEACEN dengan Bank Indonesia sebagai pemimpin proyek bekerjasama dengan anggota tim proyek yaitu Bank of Thailand, Reserve Bank of India, Banko Sentral Ng Philipinas, Central Bank of Srilanka, dan National Bank of Cambodia. Hasil penelitian menunjukkan perlunya pengembangan disain kerangka laporan keuangan bank sentral yang dapat mengakomodasi keunikan transaksi bank sentral serta menunjang transparansi atas dampak keuangan tersebut.

Menindaklanjuti penelitian tersebut, di 2016 Bank Indonesia bersama SEACEN menyelenggarakan seminar internasional dengan tema "*Central Bank Finance: Issues, Challenges, And Impact Of Dynamic Changes*". Seminar ini dimaksudkan untuk menjalin komunikasi dan tukar pandangan di antara bank-bank sentral di kawasan SEACEN. Seminar ini dihadiri oleh sejumlah pakar di bidang keuangan bank sentral, International Monetary Fund, Reserve Bank of New Zealand, lembaga penyusun standar akuntansi internasional (seperti International Accounting Standards Board/IASB dan International Public Sector Accounting Standards Board/IPSASB), World Bank, KPMG, Komite Penyusun KAKBI, dan tim peneliti SEACEN.

Indonesia financial report through a more relevant, accountable, and transparent presentation.

To date, there is no accounting standard that applies to all central banks globally. Some central banks have their own accounting policy and standards, while others apply commercial accounting standards as reference, such as the International Financial Reporting Standards. Bank Indonesia is one of the central banks that has its own accounting policy and standard, which formulated pursuant to governance principles and the uniqueness of central bank.

*In line with efforts to improve the quality and accountability of the central bank financial management, Bank Indonesia, together with the South East Asian Central Banks (SEACEN) has conducted a collective research in 2015 entitled "*Central Bank Financial Reporting: A Preliminary Study in SEACEN Economies*". This research was initiated by the SEACEN, with Bank Indonesia was assigned as the project leader, working together with project team members, namely the Bank of Thailand, Reserve Bank of India, Banko Sental Ng Philipinas, Central Bank of Srilanka, and National Bank of Cambodia. The research showed the necessity to develop a framework for bank central financial statements that is capable of accommodating the uniqueness of central bank transactions and supporting the transparency of its financial impact.*

*Following up the research, in 2016, Bank Indonesia with SEACEN held an international seminar on central bank finance, themed "*Issues, Challenges, and Impact of Dynamic Changes*". This seminar was intended to establish communication and discussion between central banks under the SEACEN. This seminar was attended by a number of speakers that are experts in the field of central bank finance, International Monetary Fund, Reserve Bank of New Zealand, international accounting standards formulating institutions (such as the International Accounting Standards Board and the International Public Sector Accounting Standards Board), World Bank, Committee of Bank Indonesia financial accounting, and SEACEN research team.*

BANK INDONESIA SEBAGAI WAJIB PAJAK PATUH

Bank Indonesia merupakan lembaga negara di Indonesia yang memiliki kedudukan sebagai Wajib Pajak (WP) Badan sejak tahun 2009 sesuai dengan Undang Undang Pajak Penghasilan yang mengatur bahwa Surplus Bank Indonesia merupakan objek Pajak Penghasilan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan perpajakan, Bank Indonesia senantiasa mengedepankan kepatuhan dengan menetapkan sasaran strategis menjadi Wajib Pajak Patuh yang merupakan perwujudan pengakuan Direktorat Jendral Pajak atas tata kelola perpajakan di Bank Indonesia. Direktorat Jendral Pajak menetapkan WP yang memenuhi persyaratan sebagai WP Patuh setiap bulan Januari yang berlaku untuk jangka waktu 2 tahun.

Syarat menjadi WP Patuh antara lain tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, tidak mempunyai tunggakan pajak, dan laporan Keuangan yang diaudit memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Adanya keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak berisiko penerbitan sanksi administrasi dan pencabutan predikat Bank Indonesia sebagai WP Patuh.

Bank Indonesia pertama kali ditetapkan sebagai WP Patuh pada 16 Februari 2015 untuk periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2016. Disamping itu, Bank Indonesia juga menerima beberapa apresiasi berupa penghargaan sebagai Wajib Pajak yang berkontribusi terhadap penerimaan pajak 2015 dan 2016. Predikat dan penghargaan tersebut tentunya dicapai berkat kerja sama dan partisipasi seluruh pegawai Bank Indonesia dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara patuh dan tepat waktu sepanjang 2015 sampai 2016.

BANK INDONESIA AS A COMPLIANT TAXPAYER

Bank Indonesia is a state institution in Indonesia which has a status as a Tax Payer since 2009. This is in accordance with the Income Tax Law, stipulating that Bank Indonesia's Surplus is the object of Income Tax.

In implementing taxation management, Bank Indonesia continues to prioritize compliance by establishing the strategic objective of becoming a Compliant Taxpayer. This follows the realization of the Directorate General of Taxes' recognition of Bank Indonesia's taxation governance. The Directorate General of Taxation stipulates that a taxpayer that meets the requirements is designated as a Compliant Taxpayer. This is done every January and is valid for a period of 2 years.

The conditions to be a Compliant Taxpayer, among others, are timely submission of a Notice Letter, not having any tax arrears, and audited Financial Statements, carrying an Unqualified Opinion for 3 consecutive years. Any delay in depositing and reporting its taxes, risks getting an administrative sanction and revocation of Bank Indonesia's designation as a Compliant Taxpayer.

Bank Indonesia was first established as a Compliant Taxpayer on February 16th, 2015 for the period January 1st, 2015 until December 31st, 2016. In addition, Bank Indonesia also received appreciation as a taxpayer contributing to tax revenues in 2015 and 2016. This predicate and award was achieved thanks to the cooperation and participation of all Bank Indonesia employees in carrying out their tax obligations dutifully and on time throughout 2015 until 2016.

KOMUNIKASI, LAYANAN INFORMASI, DAN EDUKASI PUBLIK

Communications, Information Services, and Public Education



Layanan Contact Center Bank Indonesia (BICARA)
Bank Indonesia Contact Center Services

Bank Indonesia sebagai lembaga negara perumus kebijakan menyadari pentingnya peran komunikasi sebagai elemen penentu suksesnya implementasi suatu kebijakan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan segmen *stakeholders* yang beragam, penggunaan teknologi komunikasi menjadi media yang penting digunakan oleh Bank Indonesia dalam penyampaian kebijakan.

Dalam melakukan komunikasi kebijakan Bank Indonesia menggunakan prinsip RACE (*Research, Action Plan, Communication, dan Evaluation*). Dengan prinsip tersebut, setiap kegiatan komunikasi yang dilakukan selalu mengedepankan riset dan perencanaan agar kegiatan komunikasi berjalan efektif. Evaluasi juga dilakukan untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kegiatan komunikasi selanjutnya.

Media komunikasi kebijakan yang digunakan beragam dengan memanfaatkan media konvensional dan digital seperti Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, Flipboard, Channel Youtube Bank Indonesia, iklan digital, majalah digital, dan aplikasi mobile. Bank Indonesia secara konsisten menjalin komunikasi

Bank Indonesia as a state institution that formulate policies, acknowledge the critical importance of the role of communication in successfully implementing policy. Along with the diverse technological developments and stakeholder segments, the use of communication technology becomes an important medium used by Bank Indonesia in its policy delivery.

In conducting communication about its policies, Bank Indonesia uses RACE principles (Research, Action Plan, Communication, and Evaluation). With these principles, every communication activity undertaken always prioritizes research and planning for communication activities to run effectively. Evaluation is also conducted to provide recommendations for improving future communication activities

Policies communication media vary, by utilizing conventional and digital media, such as Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, Flipboard, Youtube Bank Indonesia Channel, digital ads, digital magazines and mobile apps. Bank Indonesia consistently communicates with the media, through media

dengan media melalui *briefing* dan pelatihan media kepada wartawan. Selain itu, Bank Indonesia melakukan edukasi publik seperti sharing dengan lembaga negara dan pemangku kebijakan serta memberikan kesempatan kepada publik untuk melakukan kunjungan pembelajaran kebanksentralan dan akses terhadap Museum Bank Indonesia.

Sebagai upaya untuk memberikan layanan informasi kepada publik, Bank Indonesia menyediakan *contact center* Bank Indonesia (BICARA 131). Melalui BICARA, publik dimudahkan dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Pembentukan *contact center* ini sejalan dengan era keterbukaan informasi di lingkungan pemerintahan dengan disahkannya UU tentang Keterbukaan Informasi Publik. BICARA 131 telah memenuhi standar ISO 9001:2015 terhadap kualitas layanan kepada publik dan berdasarkan survei kepuasan pelanggan menunjukkan nilai CSI (Customer Satisfaction Index) yang baik (96,63% responden menyatakan puas).

Terhadap layanan kualitasnya, BICARA memperoleh beberapa penghargaan berskala nasional (Indonesia Contact Center Association/ICCA) dan internasional (Contact Center World/CCW).

briefings and training for journalists. In addition, Bank Indonesia conducts public education, such as sharing with state institutions and stakeholders as well as providing opportunities for the public to undertake study visits about central bank activities and access to the Bank Indonesia Museum.

In providing information services to the public, Bank Indonesia provides Bank Indonesia contact center, called BICARA 131. Through BICARA, the public will easily obtain data and information needed related to the implementation of Bank Indonesia duties. The establishment of the contact center is in line with the era of information disclosure within the government environment with the issuance of the Public Information Disclosure act BICARA 131 has fulfilled the ISO 9001: 2015 standard on its quality of service to the public and based on customer satisfaction surveys it showed an excellence score of CSI (Customer Satisfaction Index) (96.63% respondents stated satisfied).

With regard to quality of service, BICARA has received several national and international Contact Center (CCCA) awards.

Penghargaan Nasional National Awards (ICCA)

Korporat / Corporate

- The Best Employee Engagement (Platinum)
- The Best Operations (Gold)
- The Best Social Media (Gold)
- The Best IT Innovation (Silver)
- The Best Quality Team (Bronze)

Individu / Individual

- The Best Agent Regular (Platinum)
- The Best Agent Regular (Gold)
- Best of The Best Customer Service (Silver)
- The Best Quality Assurance (Silver)
- The Best Agent English (Bronze)
- Best of The Best Supervisor (Bronze)

Penghargaan Internasional International Awards (CCW-Asia Pacific)

Korporat / Corporate

- The Best Community Spirit (Gold)
- The Best Social Media (Silver)
- The Best Direct Campaign (Silver)
- The Best Contact Center (Bronze)
- The Best IT Innovation (Runner Up)

Individu / Individual

- The Best Quality Auditor (Runner Up)

Penghargaan Internasional International Awards (CCW-World)

Korporat / Corporate

- The Best Social Media (Gold)
- The Best Direct Campaign (Silver)
- The Best Community Spirit (Bronze)

Tabel 5. Penghargaan BICARA
Table 5. BICARA Achievement Award

PROGRAM SOSIAL BANK INDONESIA

Bank Indonesia Social Program

Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) merupakan bentuk tanggung jawab sosial Bank Indonesia untuk berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi rumah tangga yang merupakan pilar penyangga utama ekonomi nasional, bersama dengan sektor swasta dan pemerintah. Rumah tangga yang kuat secara ekonomi dan edukasi secara agregat mendukung stabilitas ekonomi, khususnya melalui pencapaian inflasi yang rendah dan terkendali.

Jenis Program dan Ruang Lingkup PSBI: terdapat 2 jenis program PSBI:

- Program Pengembangan Ekonomi dan Peningkatan Pengetahuan serta Pemahaman Masyarakat,
- Program Kepedulian Sosial termasuk penyaluran beasiswa.

Program pertama mencakup Program Strategis PSBI dan Program Unggulan PSBI. Sementara itu, program kedua merupakan kegiatan kepedulian atau empati terhadap permasalahan masyarakat yang meliputi enam aspek yaitu pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, kebudayaan, keagamaan serta penanganan musibah dan bencana alam, serta termasuk juga di dalamnya penyaluran beasiswa kepada mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri di seluruh Indonesia.

Kebijakan dan Metode PSBI: Dalam pelaksanaan program, PSBI melakukan proses survei dan penilaian kelayakan untuk mempertimbangkan potensi pemberdayaan dan kemanfaatan sebelum dilakukan penyaluran bantuan. Dalam proses survei ini, Bank Indonesia melibatkan pihak eksternal agar hasil penilaian tetap obyektif dan independen.

Selanjutnya untuk memastikan agar program yang dilakukan dapat memberikan dampak yang luas, maka dalam pelaksanaannya selalu memperhatikan pedoman yang terdiri dari :

The Bank Indonesia Social Program (PSBI) is a form of Bank Indonesia's social responsibility that contributes to household economic empowerment, which is the main pillar of the national economy, along with the private sector and government. Economically strong and educated households in aggregate support economic stability, especially through the achievement of low and controlled inflation.

Types of Program and Scope of PSBI: There are two types of PSBI Program:

- Economic Development and Knowledge Improvement as well as Understanding Community Program,
- Social Concern Program, including scholarship disbursement.

The first program covers the PSBI Strategic Program and the PSBI Superior Program. Meanwhile, the second program is an activity of concern or empathy towards the problems of society which includes six aspects, namely education, health, environment, culture, religion and handling of natural disasters, as well as the distribution of scholarships to public university students throughout Indonesia.

PSBI Policy and Methods: In implementing the program, PSBI conducts a survey and feasibility assessment to consider potential empowerment and benefits opportunities prior to disbursement of assistance. In the process of this survey, Bank Indonesia involves external parties so that assessment results remain objective and independent.

Furthermore, to ensure that the program performs and has a broad impact, its implementation always pay attention to the following guidelines:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Kemitraan, dimana PSBI bermitra dengan lembaga kredibel dan bereputasi baik. b. Keberlanjutan, dimana program didesain untuk menciptakan kemandirian dan berkelanjutan. c. Pemanfaatan Biaya, dimana program memberikan nilai tambah bagi Bank Indonesia dan masyarakat. d. Multi Fungsi, dimana program bermanfaat untuk berbagai aspek atau ruang lingkup penyaluran. e. Terfokus, dimana program dilakukan terfokus kepada penerima dan bentuk program. | <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Partnership, where PSBI partners with credible and reputable institutions.</i> b. <i>Sustainability, where programs are designed to create self-reliance and sustainability.</i> c. <i>Utilization of Costs, where the program creates value added for Bank Indonesia and the community.</i> d. <i>Multi-Function, where the program is useful for various aspects or scope of distribution.</i> e. <i>Focused, where the program is focused on the recipient and type of program.</i> |
|---|--|



Panen padi di desa binaan Bank Indonesia provinsi Bali
Rice paddy harvest in Bank Indonesia-led village in Bali province

Sejalan dengan semangat "Dedikasi untuk Negeri", PSBI 2016 dikemas dengan tema "Mendukung Pemulihan dan Penguatan Ekonomi melalui Program Sosial Bank Indonesia yang Berkesinambungan dan Inklusif" dengan cakupan kegiatan:

- **Ketahanan Pangan** yakni PSBI yang diarahkan untuk mengembangkan kelompok usaha budidaya tanaman pangan penyumbang inflasi dengan harapan dapat mewujudkan kestabilan harga komoditas pangan.

In line with "Dedication for the Country" spirit, PSBI 2016 carries the theme "Supporting Economic Recovery and Empowerment through a Sustainable and Inclusive Bank Indonesia Social Program" with activities covering as follows:

- **Food Resillience**, which is the PSBI directed to develop a variety of food crop cultivation business, that contributes to the country's inflation, with the hope of achieving food price stability.

- **Komoditas Unggulan** berupa program untuk memberdayakan kelompok masyarakat yang memproduksi produk khas daerah maupun produk kreatif lainnya sehingga diharapkan mampu menembus pasar di seluruh nusantara dan bahkan global.
- **Indonesia Cerdas** menaungi program-program inisiatif di bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing generasi muda. Program yang dilaksanakan berupa penyediaan fasilitas *BI Corner* di universitas, perpustakaan daerah dan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta Pojok Baca dan Dongeng Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Program *BI Corner* berupa perpustakaan yang menyediakan buku-buku dan informasi digital mengenai ekonomi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kebanksentralan. Sementara itu Program Pojok Baca dan Dongeng PAUD berupa perpustakaan mini dengan buku-buku pengetahuan dan dongeng anak-anak untuk melatih agar anak gemar membaca sejak usia dini. Sepanjang 2016 telah dibangun sebanyak 156 *BI Corner* di perguruan tinggi, perpustakaan daerah, dan SMA, serta 50 Pojok Baca dan Dongeng PAUD di seluruh Indonesia, sehingga sejak 2015 sampai dengan akhir 2016 tercatat 262 *BI Corner* dan 133 Pojok Baca dan Dongeng PAUD dengan berbagai kegiatan aktivasinya di seluruh Indonesia. Program ini telah meraih juara *Gold - Excellence in Provision*
- **Superior Commodities** in the form of programs to empower community groups that produce regional products and other creative products, that could penetrate to domestic and global market.
- **Indonesia Cerdas** oversees initiative programs in the field of education to improve the quality and competitiveness of the young generation. The programs implemented include the provision of *BI Corner* facilities at the university, regional and Senior High School library, and Reading Corner and Tales of Early Childhood Education. The *BI Corner* program is a library that provides books and digital information about the economy to improve people's understanding of central banking activities. Meanwhile, the Reading Corner and Early Childhood Education Programs are mini libraries with children's books of knowledge and fairy tales to train children to read from early ages. Throughout 2016, 156 *BI Corners* have been established in universities, regional libraries, and Senior High Schools, as well as 50 Reading Corners and Fairytale for Early Childhood Education throughout Indonesia, so that from 2015 until the end of 2016, there were 262 *BI Corners* and 133 Reading Corners and Fairytale of Early Childhood Education with various activities throughout Indonesia. This program has won the Gold - Excellence Provision of Literacy and Education Award in The 2016



of Literacy and Education Award dalam *The Global Corporate Social Responsibility (CSR) Summit and Award 2016*, ajang konferensi tahunan bagi para pelaku CSR di kawasan Asia.

- **Pemberdayaan Perempuan** berupa kegiatan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas perempuan yang dikemas dalam Program "Perempuan Bagi Bangsa". Program ini memberdayakan 2.000 pengusaha mikro perempuan dan 1.000 remaja putri *youthpreneur*. Program inklusif dan berkesinambungan ini dilakukan dalam bentuk bantuan aspek pemberdayaan usaha, literasi keuangan, lingkungan hidup, ketahanan pangan, edukasi kebanksentralan dan melatih jiwa kewirausahaan sejak dini. Program ini juga telah meraih juara *Gold - Empowerment of Women Award* dalam *The Global CSR Summit and Award 2016*.

Sepanjang tahun 2016, terdapat berbagai program yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia dengan melibatkan jaringan kantornya di daerah.

Bank Indonesia juga melaksanakan program inisiatif baru, yakni Bina Desa Bangun Indonesia (BINDESIA) dalam bentuk pemberdayaan masyarakat yang holistik, dengan basis pengelolaan sampah terpadu, *urban farming*, *aquaponic*, dan peningkatan kesehatan masyarakat di sekitar Setu Cilangkap.

Program Kepedulian Sosial: Meskipun PSBI lebih berfokus pada program pemberdayaan yang berkelanjutan untuk penguatan ekonomi rumah tangga, namun tidak melupakan kondisi nyata terkait adanya berbagai penanggulangan permasalahan sosial di masyarakat. Melalui PSBI, Bank Indonesia memberikan kontribusi yang menunjukkan empati dan kepeduliannya terhadap berbagai aspek meliputi pendidikan, keagamaan, kebudayaan, lingkungan hidup, kesehatan dan bencana alam.

Corporate Social Responsibility (CSR) Summit and Award, an annual conference for CSR players in Asia.

- **Women Empowerment** comprises of activities that increase the capacity and productivity of women through the "Women For the Nation" program. This program empowers 2,000 female micro-entrepreneurs and 1,000 young *youthpreneur* teenagers. This inclusive and sustainable program is conducted through assisting several areas, such as, business empowerment, financial literacy, environment, food resilience, education on central banking and developing the entrepreneurial spirit from an early age. This program has also won the *Gold - Empowerment of Women Award* in *The Global CSR Summit and Award 2016*.

Throughout 2016 there are various programs implemented by Bank Indonesia involving its regional office network.

Bank Indonesia also implements a new initiative program, *Develop and Nurture the Village Indonesia (BINDESIA)*. This program is in the form of a holistic community empowerment program, based on integrated waste management, *urban farming*, *aquaponics*, and improving public health around Setu Cilangkap.

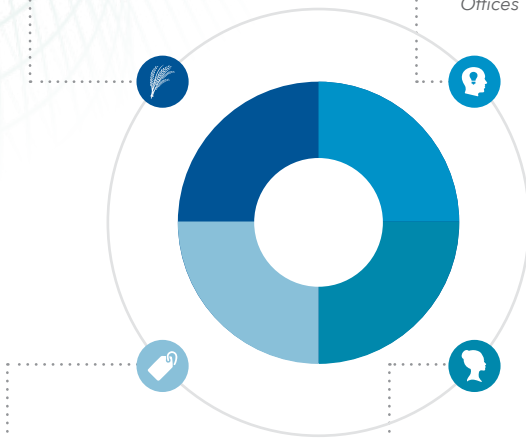
Social Concern Program: Although PSBI focuses more on sustainable empowerment programs for strengthening the household economy, it does not forget the real condition of preventing various social problems in society. Through PSBI, Bank Indonesia reflects its empathy and concern over various areas, including education, religion, culture, environment, health and natural disasters.

KETAHANAN PANGAN STRATEGIS
Strategic Food Resilience

- 79 program di 41 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah
79 programs in 41 Regional Offices

INDONESIA CERDAS
Smart Indonesia

- Telah terbangun sebanyak 156 unit BI Corner di seluruh Kantor Perwakilan sesuai target
156 units of BI Corner has been established in all of the Regional Offices

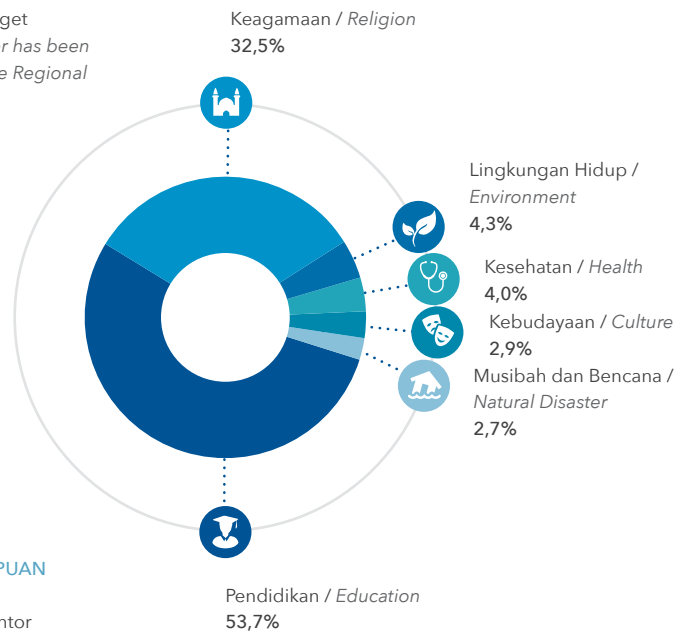


KOMODITAS UNGGULAN
Leading Commodities

- 34 program di 29 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah
34 programs in 29 Regional Offices

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Women Empowerment

- 22 Program di 18 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah
22 programs in 18 Regional Offices



Infografis Proporsi Program Kepedulian Sosial
Infographic Proportion of Social Care Program

Program Beasiswa Bank Indonesia: Melalui PSBI, Bank Indonesia memiliki program beasiswa yang ditujukan kepada mahasiswa berprestasi dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di seluruh Indonesia.

- Beasiswa diberikan kepada mahasiswa jenjang sarjana (S1) di Perguruan Tinggi Negeri yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas namun berprestasi akademik baik serta aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Pada 2016, jumlah penerima beasiswa Bank Indonesia mencapai 3.120 mahasiswa dari 84 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di seluruh Indonesia. Sejak 2011, penerima beasiswa Bank Indonesia telah mencapai 17.854 mahasiswa.

Jenis beasiswa terdiri dari beasiswa reguler dan beasiswa unggulan. Beasiswa reguler ditujukan untuk membantu pembiayaan studi mahasiswa dari 84 PTN, sedangkan beasiswa unggulan diberikan kepada mahasiswa dari 10 PTN terbaik yang memiliki prestasi cemerlang.

Bank Indonesia Scholarship Program: Through PSBI, Bank Indonesia has a scholarship program aimed at outstanding students from State Universities throughout Indonesia.

- Scholarships are awarded to undergraduate students (S1) in State Universities, focusing on those who have limited economic ability but good academic achievement and are active in social activities. In 2016, the number of Bank Indonesia scholarship recipients reached 3,120 students from 84 State Universities (PTN) throughout Indonesia. Since 2011, the recipients of Bank Indonesia scholarship have reached 17,854 students.

This type of scholarship consists of regular scholarships and excellent scholarships. Regular scholarships are aimed at assisting financing students studying at 84 state universities, while excellent scholarships are awarded to students from the 10 best universities with brilliant achievements.

- **Generasi Baru Indonesia (GenBI):** Para penerima beasiswa dibina di dalam sebuah komunitas Generasi Baru Indonesia (GenBI) yang dibentuk pada 11 November 2011. GenBI diharapkan menjadi: (1) *frontliner*, yang membantu mengkomunikasikan kebijakan Bank Indonesia kepada komunitas mahasiswa dan masyarakat; (2) *agent of change*, sebagai *role model* bagi kalangan pelajar dan mahasiswa serta masyarakat sekitar; dan (3) *future leader*, menjadi pemimpin masa depan di berbagai bidang. Pengembangan komunitas ini dimaksudkan untuk mempersiapkan GenBI sebagai calon-calon pemimpin masa depan melalui berbagai bentuk kegiatan yang membangun jiwa kepedulian sosial maupun pengembangan kompetensi, seperti pelatihan kewirausahaan, bedah buku, edukasi kebanksentralan, pelatihan penulisan, *public speaking*, *training for trainers* mengenai kebanksentralan, pelatihan kepemimpinan dan *capacity building* melalui *Leadership Camp*. Sepanjang 2016, terdapat 412 kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai bentuk wujud kepedulian anggota GenBI kepada masyarakat sekitar, antara lain, bakti sosial, pelestarian lingkungan hidup dengan tema Bersih Indonesia, penyediaan pemeriksaan kesehatan secara gratis, serta pelatihan kewirausahaan.
- **The New Generation of Indonesia (GenBI):** The recipients of these scholarships are fostered in a community of New Generation Indonesia (GenBI) established on November 11th, 2011. GenBI is expected to be: (1) *frontliner*, which helps communicate Bank Indonesia policies to students and communities; (2) *agent of change*, as a *role model* for students and surrounding communities; and (3) *becoming future leaders* in various fields. The development of this community is intended to prepare GenBI as future leaders through various forms of activities that build social awareness and develop competence, such as entrepreneurship training, book review, health education, writing training, public speaking, training for trainers on central banking, training leaders and capacity building through Leadership Camps. Throughout 2016, there were 412 community social activities as a form of awareness for GenBI members with surrounding communities. These covered, among others, social service, environmental conservation with the theme of Clean Indonesia, providing free medical examination and entrepreneurship training.



Deklarasi Generasi Baru Indonesia (GenBI), Universitas Indonesia
Declaration of New Generation Indonesia (GenBI), University of Indonesia

AKTUALISASI POTENSI PEREMPUAN MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI

Actualization of Women's Potential Towards Economic Independence

Bagi beberapa perusahaan dan institusi, "pemberdayaan perempuan" hanya berarti menyerahkan dana untuk lokakarya yang lambat laun dilupakan, bahkan dimulainya pun terkadang tidak berjalan dengan baik. Bank Indonesia melalui program sosial telah mengubah paradigma filantropi jangka pendek dengan memusatkan perhatiannya pada pemberdayaan berkelanjutan yang menghasilkan nilai ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi kaum perempuan.

Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) kini difokuskan pada program pemberdayaan yang bertujuan pada penguatan ekonomi rumah tangga, yang mana turut berperan penting dalam pilar ekonomi nasional, seperti halnya sektor swasta dan pemerintah. Program tersebut merupakan respon sekaligus dukungan kepada pencapaian *Sustainable Development Goals* untuk kesetaraan gender, ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Bank Indonesia menyusun rancangan program secara terencana dan terstruktur. Dalam mendukung keberhasilan program, Bank Indonesia bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga yang kredibel dibidangnya.

Meremajakan Tenun untuk Tradisi Turun Temurun

Tenun merupakan salah satu warisan tradisi kebudayaan Bali yang memerlukan perhatian untuk menjaga keberlangsungannya. Berkurangnya generasi penerus yang pada umumnya adalah wanita serta persoalan pengembangan usaha seperti kendala permodalan dan pemasaran, telah menyebabkan usaha tenun Bali belum berkembang secara optimal.

Melihat kondisi tersebut, Bank Indonesia pada 2014 meluncurkan sebuah program pemberdayaan perempuan pengrajin kain tenun tradisional di Bali, dengan memberikan perlengkapan, pelatihan dan perluasan akses ke pasar, sehingga mereka dapat

For some companies and institutions, "women's empowerment" simply means handing over funds for workshops that are slowly forgotten, and even sometimes does not work out. Bank Indonesia through its social program has changed the paradigm of short-term philanthropy by focusing its attention on sustainable empowerment that generates sustainable economic and social value for women.

The Bank Indonesia Social Program (PSBI) is now focused on empowerment programs aimed at strengthening the household economy, which plays an important role in the pillars of the national economy, as well as the private and government sectors. The program is a response as well as support to the achievement of Sustainable Development Goals for gender equality, food security and sustainable economic growth in Indonesia.

Bank Indonesia designed the program in a planned and structured manner. To support the success of the program, Bank Indonesia cooperates with relevant governments and institutions in their fields.

Rejuvenating woven fabrics for heritage preservation

Balinese weaving is one of the traditional heritages that needs to be preserved. The reduction of skilled female workers as successors in this business, as well as constraints in business development, such as access to finance and market, have caused the heritage business not to develop optimally.

In view of these conditions, Bank Indonesia in 2014 launched a women's empowerment program for traditional woven fabrics in Bali, providing equipment, training and expanding access to markets, thus they can receive a better revenue. The program covers 4

menikmati pendapatan yang lebih baik. Program ini dilaksanakan di 4 kabupaten yaitu; Jembrana, Gianyar, Klungkung dan Buleleng.

Bank Indonesia memberikan peralatan baru dengan kelopak mekanis, yang telah meningkatkan efisiensi produksi. Para pengrajin tenun juga menerima berbagai pelatihan mulai dari manajemen bisnis dan keuangan hingga pengendalian kualitas produk, desain dan motif, dan diversifikasi produk. Hal ini turut membantu meningkatkan kapasitas pengrajin tenun Bali dalam memenuhi tren *fashion* dan inovasi, sekaligus meningkatkan profitabilitas.

Salah satu aspek dari program ini telah memberi manfaat bagi lingkungan. Pengembangan tenun Bali dilakukan dengan menggunakan proses pencelupan warna alam dan penguatan warna pada tenun tanpa merusak lingkungan melalui penggunaan pewarna nabati alami. Indonesia adalah rumah bagi puluhan spesies tanaman pewarna, yang bisa dicampur untuk menghasilkan aneka warna yang spesial. Metode ini menjadi nilai tambah bagi tenun Bali.

Dalam meningkatkan pengembangan pemasaran, Bank Indonesia mendorong sinergi antara seluruh kelompok tenun dengan pasar, sehingga setiap kabupaten kini memiliki desain unik tersendiri yang dapat dipasarkan melalui upaya dan promosi bersama. Untuk meningkatkan kualitas, para penenun berbakat diberikan beasiswa di International Garment Training School di Sentul, Jawa Barat.

Selain pemberdayaan tenun Bali, Bank Indonesia membantu usaha pemberdayaan perempuan di Jawa Barat melalui pelatihan menjahit. Bank Indonesia bekerjasama dengan mitra lokal membentuk sekolah jahit kreatif bagi perempuan setempat. Bank Indonesia memfasilitasi dengan menyediakan peralatan, bahan baku, dan pelatihan. Melalui pelatihan tersebut, peserta dibimbing untuk menjadi pengusaha mandiri sehingga mampu menopang ekonomi rumah tangganya.

districts namely; Jembrana, Gianyar, Klungkung and Buleleng.

Bank Indonesia provides new equipment with mechanical petals, which has increased production efficiency. Women also receive various trainings ranging from business and financial management to product quality control, design, patterns, and product diversification. This helps increase the capacity of Balinese weaving craftsmen to fulfill fashion and innovation trends, while increasing profitability.

One aspect of this program has benefited the environment. The program introduced a process of dyeing using natural colors and color reinforcement on weaving, without damaging the environment. This is done through the usage of natural plant-based dyes for the weavers. Indonesia is home to dozens of species of dye plants, which can be blended to produce a variety of special colors. This method creates value added for Bali weaving.

In enhancing marketing development, Bank Indonesia encourages synergies between all weaving groups and markets, so each district now has its own unique design that can be marketed through joint effort and promotion. To increase the quality of the product, the talented young weavers with aspirations for fashion design were awarded a scholarship at the International Garment Training School in Sentul, West Java.

Moreover, in an attempt to empower women in west Java through creative sewing program, Bank Indonesia cooperates with local partners to establish creative sewing school for the local women. Bank Indonesia provides equipment, raw materials, and training. The participants are then guided to become independent entrepreneur so as to sustain the economic life of the household.

AKUNTABILITAS

Accountability

Pengawasan terhadap Bank Indonesia: Sebagai lembaga yang independen, pelaksanaan tugas Bank Indonesia dilakukan dalam koridor akuntabilitas dan transparansi, sehingga proses dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Undang Undang tentang Bank Indonesia secara jelas mengatur mekanisme akuntabilitas dan transparansi tersebut, demikian pula dengan aturan tata kelola. Bank Indonesia juga telah mengadopsi tiga prinsip *good central bank governance* yakni independensi, akuntabilitas, dan transparansi sebagai pilar pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia.

Sesuai struktur tata kelolanya, Bank Indonesia mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Terkait hal ini, Bank Indonesia menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR setiap triwulan dan tahunan. Selain itu, Bank Indonesia juga menghadiri berbagai rapat kerja DPR untuk memberikan penjelasan terhadap kebijakan yang ditempuh maupun hal-hal terkait tugas Bank Indonesia. Bank Indonesia juga mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada DPR dengan menyampaikan laporan evaluasi anggaran tahunan dan diwajibkan mendapatkan persetujuan terhadap anggaran operasional tahun mendatang. Selama 2016, Bank Indonesia memenuhi penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, serta laporan evaluasi anggaran tahunan 2016 dan rencana anggaran tahunan Bank Indonesia 2017 secara tepat waktu.

Selain melalui rapat kerja dengan Bank Indonesia, fungsi pengawasan DPR dilaksanakan melalui berbagai kegiatan. Selama 2016, komisi yang membidangi pengawasan terhadap Bank Indonesia (Komisi XI DPR-RI) telah melaksanakan 10 kali kunjungan kerja. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan hasil pemantauan secara langsung terhadap implementasi kegiatan Bank Indonesia di lapangan dan masukan terhadap perbaikan ke

Supervision of Bank Indonesia: As an independent institution, Bank Indonesia's tasks are conducted within the corridors of accountability and transparency, so that the process and results are accountable. The Bank Indonesia act clearly regulates such accountability and transparency process, as well as governance rules. Bank Indonesia has also adopted three principles of good central bank governance, namely independence, accountability and transparency as pillars for implementing its duties and authorities.

In accordance with its governance structure, Bank Indonesia is responsible for the implementation of its duties and authorities to the House of Representatives (DPR). In relation to this, Bank Indonesia submits reports on the implementation of its duties and authorities to the parliament quarterly and yearly. In addition, Bank Indonesia also attends various working meetings of the House of Representatives to provide explanations on policies pursued as well as matters relating to the duties of Bank Indonesia. Bank Indonesia is also accountable of its financial management to the House of Representatives by submitting an annual budget evaluation report and is required to obtain approval on its operational budget for the coming year. Throughout 2016, Bank Indonesia complied with the submission of the report on the implementation of its duties and authorities, as well as the annual budget evaluation report 2016 and the Bank Indonesia 2017 annual budget plan in a timely manner.

In addition to working meetings with Bank Indonesia, the DPR's oversight function is carried out through various activities. During 2016, a commission overseeing Bank Indonesia (Commission XI DPR-RI) has conducted 10 working visits. This activity is conducted to directly monitor the implementation of Bank Indonesia activities in the field and its results as well as getting feedback on future improvements.

depan. Di 2016, juga telah diselenggarakan 7 *focus group discussion* antara Bank Indonesia dengan pimpinan dan anggota Komisi XI DPR-RI untuk membahas hal-hal yang terkait dengan tugas dan kebijakan Bank Indonesia, antara lain terkait dengan pengelolaan moneter, devisa, sistem pembayaran, makroprudensial, anggaran tahunan, BI 7-days reverse repo rate, pengembangan transaksi lindung nilai dan redenominasi.

Untuk membantu tugas DPR dalam melakukan pengawasan terhadap Bank Indonesia, dilakukan pengawasan oleh Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) pada bidang-bidang tertentu terkait dengan anggaran dan kegiatan operasional Bank Indonesia. Selama 2016 BSBI telah menyampaikan hasil telaahan pada bidang pengawasannya. Terhadap hasil telaahan tersebut, Bank Indonesia menyampaikan paparan pandangannya kepada BSBI dan menjadikan rekomendasi BSBI tersebut sebagai bagian dari penyempurnaan ke depan.

Dari aspek pengelolaan keuangan, pengawasan terhadap Bank Indonesia dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terkait hal ini, setiap awal tahun Bank Indonesia diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BPK untuk dilakukan audit. Selain itu, atas permintaan DPR, BPK juga dapat melakukan audit terhadap hal-hal lain terkait dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia 2016 oleh BPK, Bank Indonesia memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perolehan opini WTP ini, yang mengafirmasi pendapat auditor eksternal bahwa pengelolaan keuangan Bank Indonesia telah dilakukan dengan baik, sesuai standar akuntansi, merupakan perolehan WTP selama 14 kali berturut-turut.

Rapat Dewan Gubernur: RDG merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam menetapkan atau melakukan evaluasi kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang bersifat prinsipil dan strategis dan/atau menerima laporan atas kebijakan yang wajib diketahui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, RDG Bulanan sekurang-kurangnya diselenggarakan sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter

In 2016, 7 focus group discussions have been held between Bank Indonesia and the leader and members of the House of Representatives Commission XI to discuss matters relating to Bank Indonesia's tasks and policies, among others on the management of monetary, foreign exchange, payment system, macroprudential, annual budget, BI 7-days reverse repo rate, development of hedging transaction and redenomination policies.

To assist the duties of the the House of Representative in conducting supervision over Bank Indonesia, the Supervisory Board of Bank Indonesia (BSBI) supervises and monitors certain areas relating to the budget and operational activities of Bank Indonesia. During 2016, BSBI has submitted the results of its review in its supervision activities. On the results of the study, Bank Indonesia presented its views to BSBI and made BSBI recommendations as part of its improvement in the future.

On financial management aspect, the supervision over Bank Indonesia is conducted by the Audit Board of Republic Indonesia (BPK). In this regard, at the beginning of each year Bank Indonesia is required to submit annual financial report to BPK for audit. In addition, at the request of the DPR, BPK may also audit other matters relating to the performance of the duties of Bank Indonesia. Based on audit results of Bank Indonesia's 2016 Annual Financial Report by BPK, Bank Indonesia obtained an Unqualified Opinion (WTP). This WTP opinion, affirms the opinion of the external auditor that the financial management of Bank Indonesia has been conducted well, according to the accounting standard. Bank Indonesia has been able to get an Unqualified Opinion on its financial statements for 14 times consecutively.

Board of Governors Meetings (RDG): *The RDG is the highest decision-making forum for establishing or evaluating Bank Indonesia's principal and strategic policies and/or receiving reports on policies that are required in line with applicable regulations. As stipulated in the Act of Bank Indonesia, the Monthly RDG shall be held at least once a month to establish a general monetary policy, which may be attended by a minister or more, as a government representative with the right to speak without a vote.*

yang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang merupakan wakil pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara. Sementara RDG Mingguan sekurang-kurangnya diselenggarakan sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter sebagaimana atau menetapkan kebijakan lain yang bersifat prinsipil dan strategis.

Dalam rangka meningkatkan kualitas asesmen kondisi makro-mikroekonomi terkini dan perkiraan ke depannya, serta memperkuat perumusan bauran kebijakan, pada 2016 Bank Indonesia menyempurnakan format penyelenggaraan RDG Bulanan, dari 1 hari setiap bulannya, menjadi 2 hari. RDG Bulanan hari pertama diselenggarakan dalam rangka memperdalam hasil asesmen sektor moneter, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah, serta merumuskan dan mengintegrasikan opsi bauran kebijakan, sementara RDG Bulanan hari kedua diselenggarakan untuk menetapkan bauran kebijakan dan kebijakan umum di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah. Penyelenggaraan RDG Bulanan selama 2 hari juga dilaksanakan di beberapa bank sentral, antara lain Bank of England, Federal Reserves, Bank of Japan, Banco Central do Brasil, dan South African Reserve Bank.

Sepanjang 2016, kehadiran Dewan Gubernur pada RDG senantiasa diselaraskan dengan agenda kegiatan Anggota Dewan Gubernur dalam rangka menjalankan tugas Bank Indonesia baik dalam forum nasional maupun internasional, serta dengan menimbang prioritas topik dan pendelegasian wewenang masing-masing Anggota Dewan Gubernur. Kehadiran masing-masing Anggota Dewan Gubernur rata-rata tercatat di atas 65% baik untuk RDG Mingguan atau RDG Bulanan.

While Weekly RDG is held at least once a week to evaluate the implementation of monetary policy or to establish other policies that are critical and strategic.

To improve the quality of assessing the current macro-microeconomic condition and future forecasts, and strengthen the formulation of its policy mix, by 2016 Bank Indonesia has improved the format of its monthly RDG implementation, from 1 day per month to 2 days. The first day of monthly RDG is organized in order to deepen the assessment result of monetary, financial system stability, payment system and Rupiah currency management sector, as well as to formulate and integrate the policy mix options, while the second day of monthly RDG is set to establish the general policy and policy mix in the monetary, macroprudential and payment systems and Management of Rupiah money. The implementation of the two-days monthly RDG is also conducted in several other central banks, including the Bank of England, Federal Reserves, Bank of Japan, Banco Central do Brasil and South African Reserve Bank.

Throughout 2016, the presence of the Board of Governors at the RDG is always aligned with the agenda of the Board of Governors' activities in the framework of carrying out the tasks of Bank Indonesia both in national and international forums, and by considering the priorities of the topics and delegation of authority of each Member of the Board of Governors. The attendance of each Member of the Board of Governors is on average recorded above 65% either for Weekly RDG or Monthly RDG.

Kehadiran Attendance	Agus D.W. Martowardojo	Mirza Adityaswara	Ronald Waas	Perry Warjiyo	Hendar	Erwin Rijanto
RDG Mingguan Weekly BOG meeting	135 topik/topics	157 topik/topics	162 topik/topics	154 topik/topics	150 topik/topics	151 topik/topics
RDG Bulanan Monthly BOG meeting	19 topik/topics	21 topik/topics	16 topik/topics	19 topik/topics	16 topik/topics	19 topik/topics

Tabel 6. Kehadiran Anggota Dewan Gubernur dalam RDG Bulanan dan Mingguan
Table 6. Attendance of Board of Governors Members in Monthly and Weekly Board of Governors Meeting

TATA KELOLA

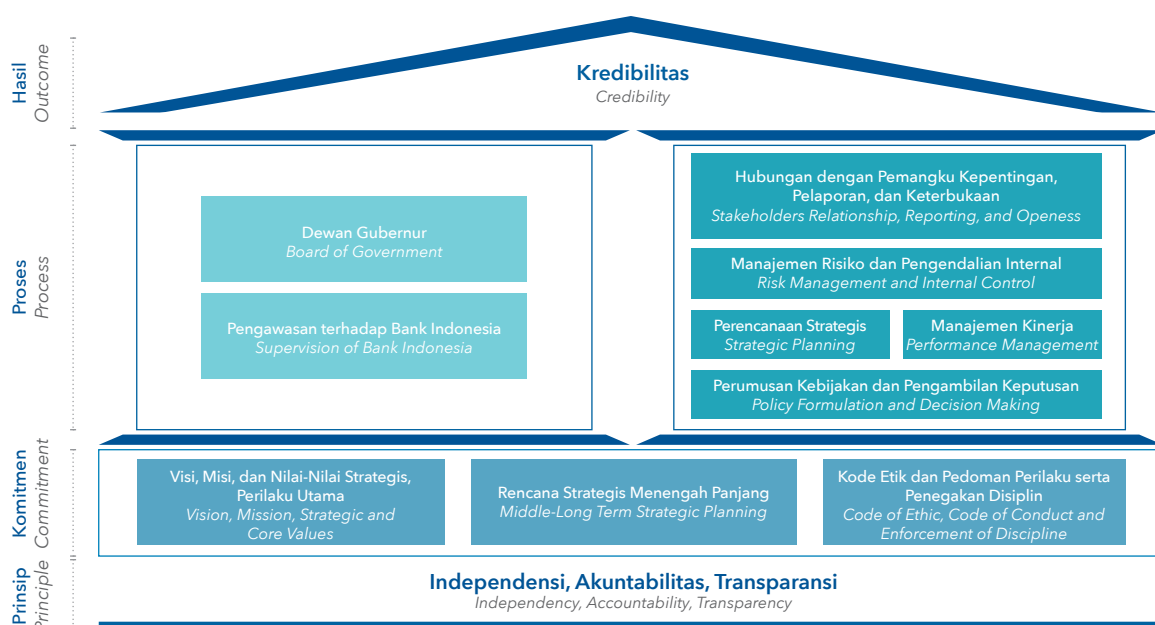
Governance

Penerapan *governance* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan eksistensi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen, akuntabel, dan transparan. Penerapan *governance* dirumuskan dalam satu kerangka kerja terintegrasi (*governance framework*) dan digunakan sebagai acuan untuk memastikan pencapaian tujuan dilaksanakan dengan cara yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai sebuah bangunan yang solid, *governance* di Bank Indonesia ditopang oleh 5 elemen pokok yang saling menunjang yakni prinsip tata kelola, komitmen tata kelola, struktur tata kelola, proses tata kelola, dan hasil tata kelola. Sebagai lembaga publik, hasil akhir yang hendak diwujudkan dari penerapan *governance* adalah terciptanya kredibilitas lembaga. Bagi bank sentral, kredibilitas menjadi faktor penting, mengingat efektivitas kebijakannya akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat. Untuk itu, penerapan *governance* tidak hanya menekankan pencapaian kinerja, namun juga proses yang kredibel yakni yang didasarkan pada aspek integritas dan pemenuhan terhadap peraturan per-Undang Undangan.

The implementation of governance is an integral part of the existence of Bank Indonesia as an independent, accountable, and transparent central bank, which is accountable and transparent. The implementation of governance is formulated in an integrated framework and is used as a reference to ensure the achievement of objectives is conducted in an effective and accountable manner.

Governance at Bank Indonesia is supported by 5 main elements that support each other, which are governance principles, governance commitment, governance structure, governance process, and governance outcomes. As a public institution, the final result that will be realized from the implementation of governance is the creation of institutional credibility. For the central bank, credibility becomes an important factor, given the effectiveness of its policy will be greatly influenced by the level of public confidence. To that end, the implementation of governance not only emphasizes the achievement of performance, but also a credible process that is based on aspects of integrity and compliance with the rules and regulations.



Gambar 7. Kerangka Tata Kelola Bank Indonesia
Picture 7. Bank Indonesia Governance Framework

Sebagai sebuah sistem yang dinamis, penerapan *governance* di Bank Indonesia dituntut mampu beradaptasi dengan lingkungan strategisnya. Untuk itu, Bank Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan *governance*, melalui survei *stakeholders* dan asesmen *governance*.

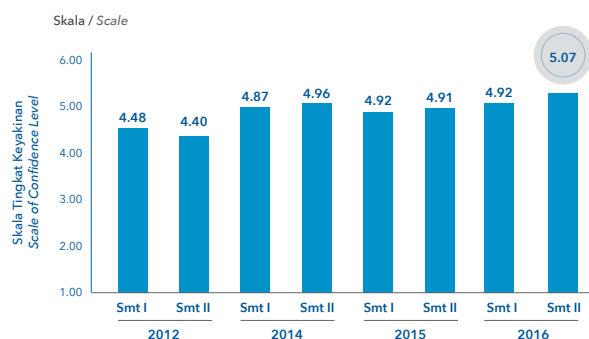
As a dynamic system, the application of governance in Bank Indonesia is required to adapt to its strategic environment. To that end, Bank Indonesia regularly monitors and evaluates the implementation of governance, through stakeholder surveys and governance assessments.

Survei *stakeholders* dilakukan untuk mengukur tingkat keyakinan *stakeholders* terhadap kredibilitas implementasi *governance* di Bank Indonesia. Responden survei beragam dan mencakup seluruh pemangku kepentingan yakni anggota parlemen, lembaga negara, auditor, pengamat dan akademisi, kalangan pengusaha, jurnalis, dan masyarakat umum. Guna melengkapi hasil survei, Bank Indonesia juga melakukan asesmen untuk memastikan seluruh elemen *governance* berjalan dengan baik, diimplementasikan secara konsisten, dan sesuai dengan praktek terbaik.

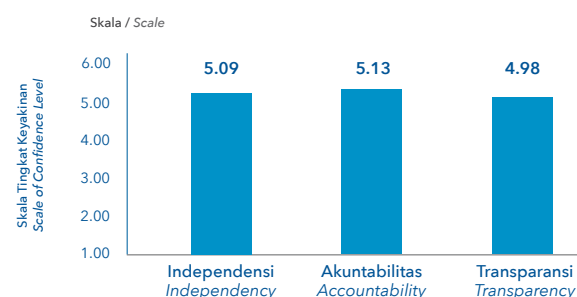
A stakeholder survey was conducted to measure stakeholders' confidence in the credibility of governance implementation at Bank Indonesia. The survey respondents are diverse and include all stakeholders, i.e. parliamentarians, state institutions, auditors, observers and academics, businessmen, journalists and the general public. To complement the survey results, Bank Indonesia also conducts assessments to ensure that all governance elements are in place, implemented consistently, and in accordance with best practices.

Hasil survei *stakeholders* di 2016 menunjukkan tingkat keyakinan *stakeholder* yang tinggi terhadap implementasi *governance*. Indeks *good governance* Bank Indonesia mencapai angka 5,07 dari skala 6. Pencapaian ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 4,91 terutama didorong perbaikan pada dimensi Independensi dan Akuntabilitas. Beberapa faktor yang dinilai dalam survei tersebut antara lain terkait dengan integritas sumber daya manusia, proses perumusan kebijakan, rencana kerja, dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, serta keterbukaan dan kemudahan akses informasi Bank Indonesia.

The results of stakeholder surveys in 2016 showed high levels of stakeholder confidence in the implementation of governance. The Bank Indonesia good governance index reached 5.07 out of 6. This achievement increased from the previous year, which amounted to 4.91 mainly driven by improvements in the dimensions of Independence and Accountability. Some of the factors assessed in the survey are related to human resource integrity, policy formulation process, work plan, and accountable financial management, as well as openness and ease of access to Bank Indonesia information.



Grafik 6. Tingkat Keyakinan terhadap Governance Bank Indonesia
Graph 6. Confidence Level on Bank Indonesia Governance



Grafik 7. Tingkat Keyakinan terhadap Bank Indonesia Berdasarkan Prinsip Tata Kelola
Graph 7. Confidence Level on Bank Indonesia Based on Governance Principles



Bank Indonesia senantiasa mengedepankan tatakelola yang baik dalam pelaksanaan tugasnya
Bank Indonesia prioritizes good governance in the performance of its duties

Sementara itu, asesmen *governance* yang dilakukan oleh *independent external assessor* mengkonfirmasi tingkat maturitas *governance* pada level tertinggi yakni *Enhanced*, dengan nilai 81,29 dari nilai 100 (level maturitas *governance* dari skala terendah hingga tertinggi adalah *Unaware, Fragmented, Implemented, Embedded, dan Enhanced*). Asesmen dilakukan terhadap seluruh elemen *governance framework* yang mencakup penerapan komitmen, struktur, dan proses *governance*.

Hasil yang diperoleh melalui survei maupun asesmen tentunya bukan merupakan sasaran akhir dari penerapan *governance*. Lebih dari itu, upaya perbaikan yang berkelanjutan dan komitmen untuk terus mewujudkan *good governance* menjadi bagian terpenting dari penerapan *governance* di Bank Indonesia.

Meanwhile, the governance assessment conducted by an independent external assessor confirms the level of maturity of governance at the highest category level of "Enhanced", with a score of 81.29 out of 100 (maturity governance level from lowest to highest is Unaware, Fragmented, Implemented, Embedded and Enhanced). Assessment was conducted to all elements of the governance framework that includes the implementation of commitment, structure, and governance process.

The results obtained through surveys or assessments are certainly not the ultimate goal of implementing governance. Moreover, continuous efforts to improve and commitment to continue realizing good governance, becomes the most important part of implementing governance at Bank Indonesia.



*Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Bank Indonesia Regional Office, Special Region of Yogyakarta Province*

TRANSFORMASI BANK INDONESIA

The Transformation of Bank Indonesia

“

GUNA MENGHASILKAN
KONTRIBUSI YANG LEBIH OPTIMAL,
BANK INDONESIA MELAKUKAN
PERCEPATAN TRANSFORMASI
DI SETIAP LINI PROSES BANK
INDONESIA.

*The transformation of Bank Indonesia
is accelerated across all process line
to maximize its contribution.*

“

SUGENG

Deputi Gubernur
Deputy Governor



Bank Indonesia melakukan penancangan program transformasi melalui Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia (AFSBI) 2024. Ini dilandasi oleh dinamika perubahan dan tantangan jangka menengah panjang di bidang moneter, keuangan dan perekonomian baik global, regional dan nasional. Bank Indonesia menyikapi hal tersebut dengan mempersiapkan fungsi strategis dan kapabilitas Bank Indonesia baru yang maju, kuat, berorientasi ke depan guna menghasilkan kebijakan yang tepat dan mengacu pada praktik-praktik terbaik. Oleh karenanya Bank Indonesia mencanangkan visi baru sebagai bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional.

Penyusunan arsitektur didahului dengan melakukan diagnosa, menyusun rancangan arsitektur dan strategi dalam jangka menengah panjang 2014-2024, pemberian tahapan penerapannya beserta *quick wins* dan inisiatif-inisiatif penting untuk pencapaian visi Bank Indonesia. Area-area substansi penting yang menjadi cakupan transformasi meliputi fungsi moneter, fungsi stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial, dan fungsi sistem pembayaran serta fungsi kapabilitas internal pendukung. Transformasi ini juga mencakup penguatan mekanisme koordinasi dengan lembaga mitra dalam pengendalian inflasi, stabilitas sistem keuangan, pengembangan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, serta koordinasi penting lainnya.

AFSBI menerjemahkan transformasi ke dalam 5 tema, yaitu:

- *Policy Excellence,*
- *Outstanding Execution,*
- *Institutional Leadership,*
- *Motivated Organization dan*
- *State of The Art Technology,*

Jalannya transformasi dibagi menjadi dua fase yakni: Fase I *restructuring and enhancing* (2014-2019) dan Fase II *shaping the end state* (2019-2024).

Di tahun 2016, dari lima tema transformasi Dewan Gubernur menetapkan 29 program strategis. Sebelumnya, di 2015 jumlah program strategis yang dilaksanakan sebanyak 25 program.

Bank Indonesia has launched a transformation program through its Bank Indonesia Strategic Function Architecture (AFSBI) 2024. It is based on changing dynamics, including mid and long-term challenges globally, regionally and nationally within monetary, financial and economic field. Bank Indonesia responds to the dynamic changes and challenges by establishing a new strategic function and capability that is more advance, stronger, forward-looking that Bank Indonesia can produce appropriate policies that refer to best practices. Hence, Bank Indonesia launched its new vision to become a credible and the best central bank in the region.

This architectural forming is preceded by diagnosing and drawing up plans and strategies for both medium to long term covering a 2014-2024 period. This includes phasing implementation plans with quick wins and prioritizing critical initiatives to achieve Bank Indonesia's vision. Substantial areas of transformation coverage include include monetary, financial system stability, including macroprudential, and payment system functions as well as supportive internal capability functions. It also includes strengthening coordination mechanisms with partner institutions in controlling inflation, financial system stability, development of payment systems, deepening financial markets, and other important coordination activities.

AFSBI translates Bank Indonesia's transformation into 5 themes, namely:

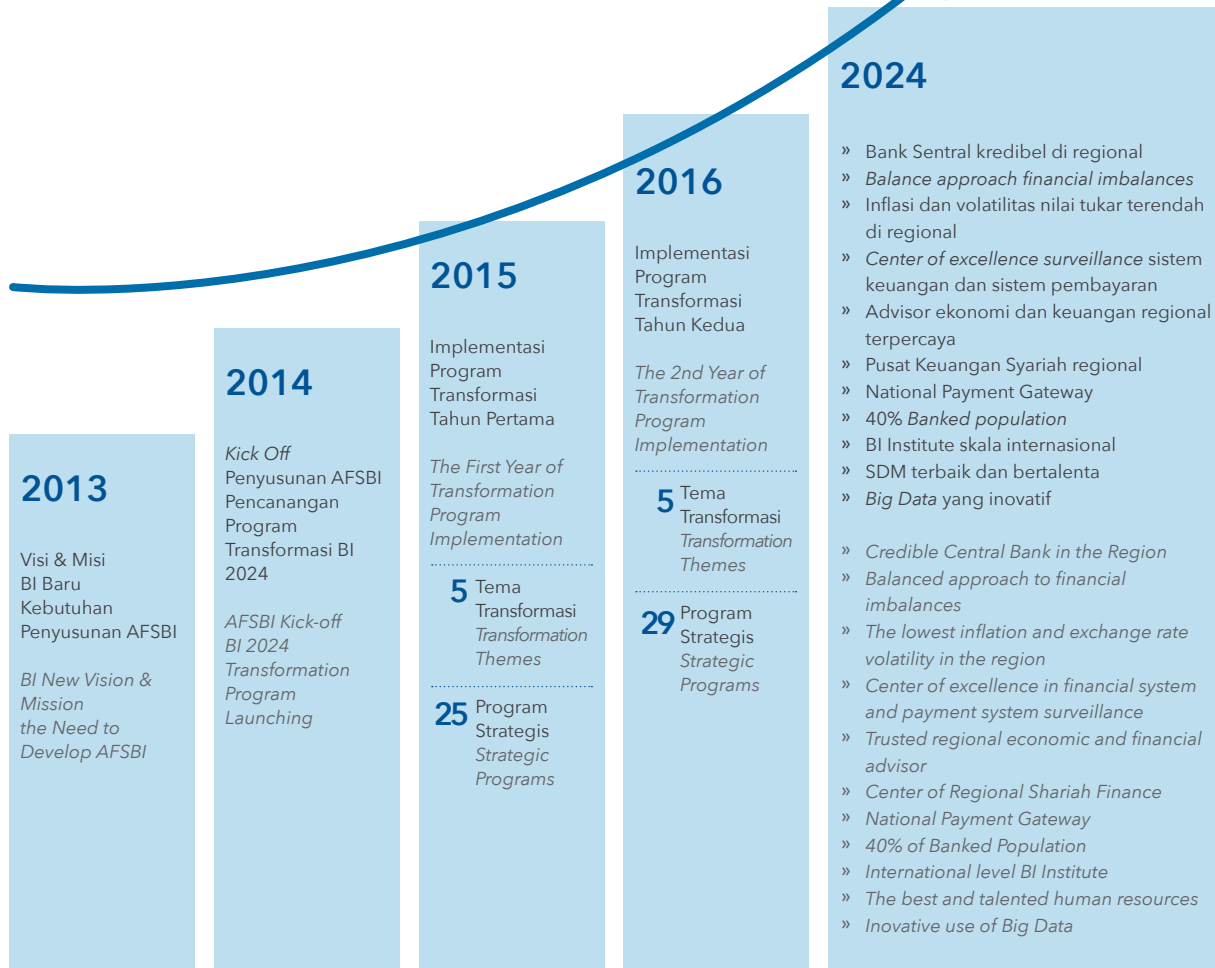
- *Policy Excellence,*
- *Outstanding Execution,*
- *Institutional Leadership,*
- *Motivated Organization and*
- *State of The Art Technology,*

The course of transformation is divided into two phases: Phase I covers Restructuring and Enhancing (2014-2019) and Phase II covers Shaping the End State (2019-2024).

In 2016, from the five themes of the Board of Governors' transformation, 29 strategic programs have been established. In 2015, the number of strategic programs implemented totaled 25 programs.

JOURNEY OF TRANSFORMATION

Menuju Bank Sentral yang Kredibel dan Terbaik di Regional
Toward a Credible and the Best Central Bank in the Region



Infografis Perjalanan Program Transformasi Bank Indonesia
Infographic Journey of Bank Indonesia Transformation Program

Melalui program transformasi, Bank Indonesia berevolusi dengan mewujudkan berbagai kapabilitas baru di level organisasi.

I. Policy Excellence

Tema ini menerapkan program/inisiatif peningkatan kualitas dan efektivitas kebijakan Bank Indonesia. Program yang dilakukan antara lain dengan penguatan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran-pengelolaan uang Rupiah, pengembangan *National and Regional Financial Balance Sheet*, serta peningkatan koordinasi dengan *stakeholders* dan transparansi komunikasi.

Through the transformation program, Bank Indonesia evolves by bringing new capabilities at the organizational level

I. Policy Excellence

This theme covers the implementation of programs and initiatives that focus on improving Bank Indonesia's policies in terms of quality and effectiveness. These programs include strengthening the monetary policy mix and macroprudential policy as well as Rupiah currency management systems. It also covers the development of *National and Regional Financial Balance Sheets*, establishing closer coordination with *stakeholders* and more transparent communication.

Policy Excellence	
Restructuring & Enhancing (2014-2019)	Shaping the End State (2019-2024)
<ul style="list-style-type: none"> Menjadi bank sentral yang ahli dalam perumusan koordinasi kebijakan moneter-makroprudensial di regional <i>Become an expert in formulating regional central bank monetary-macroprudential policy coordination</i> Memitigasi secara aktif 10-20 jenis risiko prioritas, risiko sistemik dan <i>financial imbalances</i> <i>Actively mitigate 10-20 priority risks, systemic risk and financial imbalances</i> Menjadi salah satu negara dengan tingkat inflasi dan volatilitas nilai tukar di tingkat rata-rata regional <i>Become a country with an average inflation and exchange rate volatility in the region</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Menjadi bank sentral yang kredibel di regional <i>Become a credible central bank in the region</i> Memiliki balance approach dalam menangani <i>financial imbalances</i> <i>Have a balanced approach in handling financial imbalances</i> Menjadi salah satu negara dengan tingkat inflasi dan volatilitas nilai tukar yang terendah di regional. <i>Become a country with the lowest inflation rate and exchange rate volatility in the region.</i>
Capaian 2015 - 2016 / Achievements 2015 - 2016	
<ul style="list-style-type: none"> Penyempurnaan proses bisnis pengambilan keputusan di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran <i>Improved business decision-making processes in monetary, financial system stability and payment systems</i> Penyempurnaan ketentuan nilai tukar, ketentuan keuangan daerah dan kebijakan internasional, dan ketentuan strategi kebijakan Bank Indonesia <i>Completion of exchange rate terms, regional financial and international policy provisions, Bank Indonesia policy strategy</i> Implementasi sistem informasi sebagai media diseminasi harga pangan strategis kepada masyarakat (Pusat Informasi Harga Pangan Strategis - PIHPS) <i>Implementation of information systems as a medium of strategic food price dissemination to the community (Strategic Food Price Information Center - PIHPS)</i> Currency Swap Arrangement dengan bank sentral/fora internasional lain <i>Cooperative Bilateral Currency Swap Arrangement with other international central banks</i> Penyusunan National Balance Sheet <i>Preparation of a National Balance Sheet</i> Penerapan aturan Counter Cyclical Buffer bagi perbankan <i>Application of Counter Cyclical Buffer rules for banks</i> 	

II. Outstanding Execution

Agar berbagai kebijakan dan ketentuan Bank Indonesia terimplementasi dengan baik, Bank Indonesia melaksanakan program-program peningkatan efisiensi, ketepatan waktu, dan kualitas proses kerja melalui tema outstanding execution.

Melalui tema ini Bank Indonesia akan memperkuat kantor perwakilan Bank Indonesia di daerah, membangun *Center of Excellence* (pengawasan yang komprehensif, terarah, dan efisien) di area sistem keuangan dan sistem pembayaran, serta manajemen risiko dan manajemen kelangsungan tugas Bank Indonesia.

II. Outstanding Execution

To ensure that the various policies and provisions issued by Bank Indonesia are well implemented, Bank Indonesia implements programs to improve efficiency, timeliness and quality of work processes through outstanding execution.

Through this theme, Bank Indonesia will strengthen its regional offices, establish a *Center of Excellence* in the area of the financial and payment systems, as well as risk management and sustainable management of Bank Indonesia's activities.

Outstanding Execution	
Restructuring & Enhancing (2014-2019)	Shaping the End State (2019-2024)
<ul style="list-style-type: none"> Mengedarkan uang Rupiah dengan kualitas tinggi dalam seluruh denominasi/pecahan di wilayah Indonesia <i>Circulate high quality Rupiah notes in all denominations / denominations in Indonesian territory</i> Menjadikan jaringan Kantor Perwakilan Dalam Negeri dengan footprint yang jelas dan tata kelola yang efisien <i>Make Regional Office network with a clear footprint and efficient governance</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki <i>center of excellence</i> bertaraf regional untuk surveilans sistem keuangan dan sistem pembayaran <i>Have a regional center of excellence for financial system surveillance and payment system</i> Menjadikan Kantor Perwakilan Dalam Negeri sebagai advisor ekonomi dan keuangan yang terpercaya bagi pemerintah daerah. <i>Make Regional Office a trusted economic and financial advisor for local government.</i>
Capaian 2015 - 2016 / Achievements 2015 - 2016	
<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian rencana induk sentralisasi jaringan distribusi uang <i>The completion Masterplan Centralized Cash Network Planing</i> Pembukaan 27 Kas Titipan baru untuk memperluas jangkauan distribusi pengedaran uang Rupiah <i>Launching of 27 New Cash Custody to enlarge currency distribution coverage</i> Penambahan jaringan Kantor Perwakilan Wilayah DKI Jakarta, Bangka Belitung, Papua Barat, Sulawesi Barat <i>Additional network of Regional Representative Offices: Jakarta, Bangka Belitung, West Papua, West Sulawesi</i> Penyusunan Regional Office Handbook <i>Preparation of the Regional Office Handbook</i> Penyiapan <i>Business Resumption Site</i> dan <i>Alternate Command Center</i> <i>Preparing Business Resumption Site and Alternate Command Center</i> Kerangka kerja pengawasan terintegrasi Moneter, Stabilitas Sistem Keuangan, dan Sistem Pembayaran (<i>center of excellence</i>) <i>Integrated Monetary Monitoring Framework, Financial System and Payment System Stability (Center of Excellence)</i> Penyempurnaan Ketentuan Manajemen Keberlangsungan Tugas <i>Improvement on Business Continuity Management policy</i> Penetapan <i>Risk Appetite</i> BI Wide <i>Determination of BI-wide Risk Appetite</i> Implementasi <i>Whistle Blowing System</i> <i>Implementation of a Whistle Blowing System</i> 	

III. Institutional Leadership

Melalui tema ini Bank Indonesia akan memelopori program-program yang *leading* dan *proactive* di area pengembangan pasar keuangan, ekonomi syariah, sistem pembayaran, akses keuangan, keuangan inklusif, dan UMKM.

III. Institutional Leadership

Through this theme, Bank Indonesia aims to pioneer *leading* and *proactive* programs in the area of financial market development, sharia economy, payment system, financial access, financial inclusion and MSME.

Institutional Leadership	
Restructuring & Enhancing (2014-2019)	Shaping the End State (2019-2024)
<ul style="list-style-type: none"> Memiliki pasar uang yang dalam dan likuid di berbagai <i>asset classes</i>, dan volume pasar valuta asing s.d 2,5% dari <i>trade flows</i>. <i>Have a deep and liquid money market in asset classes, and forex market volume - 2.5% of trade flows.</i> Mendirikan <i>National Payment Gateway</i> (NPG) sebagai <i>platform</i> pembayaran kartu dan elektronifikasi <i>Establish a National Payment Gateway (NPG) for card payments and becoming an digital platform</i> Proporsi <i>banked people</i> meningkat dari 20% ke 30% <i>Proportion of banked people increases from 20% to 30%</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki Pasar uang yang dalam dan likuid di berbagai <i>asset class</i>, volume pasar valuta asing ~4% dari <i>trade flows</i>. <i>Have a deep and liquid money market in various asset classes, forex market volume - 4% of trade flows.</i> Menjadikan Indonesia diakui sebagai pusat keuangan syariah di regional <i>Make Indonesia recognized as the center of sharia finance in the region</i> Membuat interkoneksi sistem dan instrumen pembayaran melalui NPG <i>Make interconnectivity of payment systems and instruments through NPG</i> Proporsi <i>banked population</i> meningkat dari 30% ke 40% <i>The proportion of banked population increases from 30% to 40%</i>

Capaian 2015 - 2016 / Achievements 2015 - 2016

- Pemberlakuan ketentuan mengenai transaksi valas terhadap Rupiah antar bank dengan pihak asing dan domestik
Enactment of provisions concerning forex transactions over Rupiah between banks with foreign and domestic parties
- Pemberlakuan aturan *hedging* transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah
Enactment of hedging account of hedging transactions based on sharia principles
- Implementasi bantuan sosial secara non tunai, hasil kerjasama dengan 5 Kementerian RI, Himpunan Bank-Bank Negara (HIMBARA) dan agen e-warong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (Kube PKH)
The distribution of non-cash social assistance, the result of cooperation with 5 Ministries, the Association of State Banks (HIMBARA) and e-warong Agent of Joint Family Hope Program (KUBE PKH)
- *Islamic Financial Sector Assesment Program*
Islamic Financial Sector Assessment Program
- Penyelesaian *Blueprint* Pendalaman pasar keuangan
Blueprint Settlement to deepen financial markets
- Inisiasi koordinasi lembaga syariah
Initiated Sharia Institution Coordination
- Framework Kebijakan Internasional Bank Indonesia
International Policy Framework of Bank Indonesia
- Pemberlakuan aturan Suku Bunga Penawaran Antarbank (Jakarta Interbank Offered Rate/JIBOR)
Implementation of Jakarta Interbank Offering Rate (JIBOR)
- Capaian proporsi *banked people* sebesar 36%
Achieve proportion of banked people at 36%

IV. *Motivated Organization*

Untuk menjadi bank sentral yang terbaik di regional, tidak mungkin dicapai tanpa sumber daya manusia yang kompeten. Program transformasi mengusung tema *motivated organization* untuk menyeimbangkan dengan perbaikan proses bisnis, kebijakan dan ketentuan yang dilakukan. Tema ini berisi program untuk meningkatkan keterampilan, kapabilitas, dan motivasi pegawai.

IV. *Motivated Organization*

To be the premier central bank in the region, is impossible without capable human resources. The transformation program carries a motivated organization theme to balance improvements in business processes, policies and provisions. This theme contains programs to improve the skills, capabilities, and motivation of employees.

<i>Motivated Organization</i>	
<i>Restructuring & Enhancing (2014-2019)</i>	<i>Shaping the End State (2019-2024)</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Mendirikan Bank Indonesia Institute dan menjadi pusat pembelajaran pegawai Bank Indonesia <i>Established the Bank Indonesia Institute to become the center of learning for Bank Indonesia employees</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk Bank Indonesia Institute bertaraf internasional sebagai garis depan pemikiran ekonomi yang ditopang dengan kemitraan kuat dengan lembaga riset dan pendidikan berkelas dunia <i>Establish an international Bank Indonesia Institute as the frontline of economic thinking supported by strong partnerships with world-class research and education institutions</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki system jalur karir yang <i>robust</i>, selaras dengan <i>job grades</i> dan <i>job value</i> <i>Have a robust career path program, aligned with job grades and job value</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki SDM terbaik dan bertalenta dengan kapabilitas kepemimpinan dan kompetensi yang tinggi. <i>Have the best and talented human resources with high leadership and competence.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki budaya dan praktek <i>end-to-end performance management</i> yang kuat. <i>Have a strong end-to-end culture and practice of performance management.</i> 	

Capaian 2015 - 2016 / Achievements 2015 - 2016

- Pendirian Bank Indonesia Institute
Establishment of Bank Indonesia Institute
- Edukasi Publik melibatkan Pemimpin Daerah
Public Education involving Regional Leaders
- Pembentukan kapabilitas baru Departemen Ekonomi Syariah, Departemen Pendalaman Pasar, Departemen Pengadaan Strategis, Departemen Pengelolaan Logistik dan Fasilitas, Departemen Operasional Tresuri dan Pinjaman
Establishment of Sharia Economic Department, Market Deepening Department, Strategic Procurement Department, Logistics and Facilities Management Department, Treasury Operations and Loan Facility Department
- Pengembangan kapabilitas Bank Indonesia di pengembangan pasar keuangan syariah, operasional tresuri terintegrasi
Capacity development of Bank Indonesia in developing sharia financial market and integrated treasury operation
- Penguatan sistem manajemen kinerja Bank Indonesia
Strengthening of Bank Indonesia's performance management system



Terus berkomitmen menjaga program transformasi untuk Bank Indonesia yang lebih baik
Continue commitment to maintain the transformation program for a better Bank Indonesia

V. *State of The Art Technology*

Perkembangan teknologi banyak mempengaruhi proses kerja bank sentral di berbagai belahan dunia. Peningkatan dan penguatan sistem Informasi dibutuhkan agar Bank Indonesia dapat mengakselerasi berbagai inovasi dan mempercepat respon terhadap kondisi ekonomi. Tema *State of the Art of Technology* berpijak pada pemanfaatan teknologi dan pendekatan yang mutakhir yang membantu mencapai visi dan misi Bank Indonesia secara efektif dan efisien.

V. *State of The Art Technology*

Technological developments affect the central bank's work processes globally. Improvement and strengthening of Information Systems is needed so that BI can accelerate various innovations as well as better respond to changing economic conditions. The State of the Art of Technology theme is based on the use of cutting edge technologies and approaches that will help Bank Indonesia achieve its vision and mission more effectively and efficiently.

State of The Art Technology	
Restructuring & Enhancing (2014-2019)	Shaping the End State (2019-2024)
<ul style="list-style-type: none"> Memiliki <i>Big Data</i> yang terintegrasi dengan proses pengambilan keputusan kebijakan moneter dan makroprudensial <i>Having Big Data integrated with monetary and macroprudential decision making process</i> Menyusun <i>enterprise architecture</i> yang efisien dengan aplikasi kurang dari 40 dengan kapabilitas terbaik di kelasnya <i>Prepare an efficient Enterprise architecture with less than 40 applications with the best capabilities in its classroom</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan <i>Big Data</i> secara inovatif <i>Using Big Data innovatively</i> Memiliki kapabilitas pengelolaan data dan layanan yang <i>excellent</i> dalam mendukung riset, pengambilan kebijakan, operasional. <i>Have excellent data management capabilities and services in support of research, policy making, operations.</i>
Capaian 2015 - 2016 / Achievements 2015 - 2016	
<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan <i>Big Data</i> dalam proses pengambilan keputusan strategis <i>Big Data Utilization in strategic decision making process</i> Penerapan <i>Vendor Management Office</i> sebagai media pengelolaan dan evaluasi data penyedia jasa sistem informasi <i>Implementation of Vendor Management Office as media of management and evaluation of data service provider of information system</i> Penyelesaian <i>Information System Enterprise Architecture</i> sebagai strategi pengembangan sistem informasi di Bank Indonesia <i>Completion of Information System Enterprise Architecture as information system development strategy at Bank Indonesia</i> 	

PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS DI TAHUN 2017

Program transformasi Bank Indonesia masih akan berlangsung di 2017. Memperhatikan tantangan lingkungan strategisnya, program transformasi di 2017 akan lebih difokuskan pada pengukuran implementasi kebijakan yang telah dilaksanakan sejak program transformasi dimulai di 2014, pembangunan infrastruktur dan pengembangan dukungan proses bisnis berbentuk fisik.

Untuk menjaga konsistensi, program transformasi tetap akan dilakukan di bawah 5 tema transformasi dengan jumlah program strategis sebanyak 29 program sebagaimana yang dilakukan di 2016.

IMPLEMENTATION OF STRATEGIC PROGRAMS IN 2017

Bank Indonesia's transformation program will continue in 2017. Taking into account strategic environmental challenges, the 2017 transformation program will focus on measuring policy implementation done since its start in 2014, developing further infrastructure and developing the physical business process support.

To maintain consistency, the transformation program will keep its 5 transformation themes and 29 strategic programs as set out in 2016.



Komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendorong program transformasi
Strong commitment from the leaders in promoting the transformation program



BANK INDONESIA



Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali
Bank Indonesia Regional Office, Bali Province

LAPORAN KEUANGAN BANK INDONESIA

Bank Indonesia Financial Statement

“ BANK INDONESIA TERUS BERUPAYA
MENINGKATKAN KUALITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN SEBAGAI
BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN
TERHADAP PUBLIK.

*Bank Indonesia constantly enhances
the quality of its financial management
as a form of its accountability
to the public.* “

ROSMAYA HADI

Deputi Gubernur
Deputy Governor

IKHTISAR KEUANGAN

Financial Highlights

Tujuan laporan keuangan Bank Indonesia adalah untuk menunjukkan pencapaian manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya keuangan dalam mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah, yang meliputi informasi tentang dampak keuangan dari kebijakan Bank Indonesia terhadap posisi keuangan dan surplus/defisit Bank Indonesia.

The objective of the financial statements of Bank Indonesia is to demonstrate the achievements of the management and the fulfillment of management's responsibilities on the usage of financial resources in achieving and maintaining the stability of the Rupiah, which includes information on the impact of policies on Bank Indonesia's surplus/deficit and financial position.

Memaknai laporan keuangan Bank Indonesia hendaknya berangkat dari tujuan Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang Undang tentang Bank Indonesia, yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan di Bank Indonesia agar tidak dipandang sebagaimana layaknya pengelolaan keuangan entitas komersial yang menjalankan usahanya dengan tujuan mencapai keuntungan. Bagi Bank Indonesia, surplus/defisit bukan merupakan tujuan melainkan dampak dari pelaksanaan tugasnya. Dengan demikian, surplus/defisit Bank Indonesia adalah sebuah konsekuensi dan dampak dari pelaksanaan kebijakan guna mencapai tujuan Bank Indonesia.

Interpreting the financial statements of Bank Indonesia should begin with its overarching goal as mandated by the Bank Indonesia Act, namely to achieve and maintain Rupiah stability. Therefore, Bank Indonesia's financial management should not be regarded in the same light as that of commercial entities which aim to maximize profits. For Bank Indonesia, a surplus/deficit is not the goal, but merely a result of policy implementation. Therefore, Bank Indonesia's surplus/deficit is a consequence of policy execution to achieve its goal.

(Dalam Jutaan Rupiah)		(in IDR Million)			
Uraian Description	2016	2015	2014 (Disajikan Kembali) (As Restated)	2013	2012
Jumlah Aset/Liabilitas Total Assets/Liabilities	1.955.850.192	1.906.193.817	1.812.788.971	1.648.675.453	1.519.526.148
Modal *) Capital	3.726.346	3.726.346	2.948.029	2.948.029	2.948.029
Jumlah Penghasilan Revenue	60.509.678	121.181.386	93.100.472	71.113.428	40.035.595
Jumlah Beban Expenses	37.098.325	38.827.508	37.674.170	28.915.937	31.939.365
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan Surplus (Deficit) Ongoing Year	17.076.885	61.325.477	41.485.699	37.407.095	5.819.693

Keterangan Notes

*) Modal sebagaimana ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan / Capital as stipulated within the regulations

OPINI AUDITOR EKSTERNAL (Badan Pemeriksa Keuangan)

External Audit Opinion by The Audit Board of the Republic of Indonesia



Tahun Berturut-turut "Wajar Tanpa Pengecualian"
Years in a Row "Unqualified Opinion"

SURAT PERNYATAAN MANAJEMEN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN BANK INDONESIA PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2016

Management Statement Regarding the Responsibilities for Financial Statement of Bank Indonesia as at and for the Year Ended 31 December 2016

Sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Bank Indonesia;
2. Laporan Keuangan Bank Indonesia telah disusun dan disajikan dengan wajar sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia;
3. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Bank Indonesia yang didesain untuk memperoleh keyakinan yang memadai terhadap integritas dan reliabilitas Laporan Keuangan Bank Indonesia.

Pursuant to the article 61 of Act Number 23 of 1999 on Bank Indonesia, with several amendments prior to the latest adjustment of Act Number 6 of 2009, we hereby declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of financial statements of Bank Indonesia;*
2. *The financial statements of Bank Indonesia have been prepared and presented fairly in accordance with Bank Indonesia Financial Accounting Policy;*
3. *We are responsible for Bank Indonesia's internal control system designed to provide reasonable assurance as to the integrity and reliability of Bank Indonesia's financial statements.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

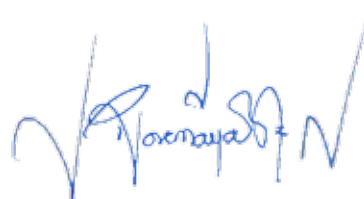
Thus this statement is made truthfully.

Jakarta, 28 April 2017 | Jakarta, 28 April 2017



AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Gubernur
Governor



ROSMAYA HADI

Deputi Gubernur
Deputy Governor



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT ON THE FINANCIAL STATEMENTS

Berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2009, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Posisi Keuangan Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Laporan Surplus Defisit untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Bank Indonesia atas Laporan Keuangan

Bank Indonesia bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Bank Indonesia untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Bank

Pursuant to Law No. 15/2004 on Audit of State Financial Management and Responsibilities, Law No. 15/2006 on the State Audit Board and Law No. 23/1999 on Bank Indonesia as most recently amended by the Law No. 6/2009, the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) has audited Bank Indonesia's Statement of Financial Position as per December 31, 2016 and 2015 and Statement of Surplus (Deficit) for the years ended on those dates as well as the Notes to the Financial Statements.

Bank Indonesia's Responsibility for the Financial Statements

It is Bank Indonesia's responsibility to prepare and present the financial statements in a fair manner which subscribe to Bank Indonesia Financial Accounting Policy and Internal Control deemed necessary by Bank Indonesia so that the preparation of the financial statements are free of material misstatements that may have been caused by dishonesties or errors.

The State Audit Board's Responsibility

BPK's responsibility is to express an opinion on the financial statements based on State Financial Audit Standards. By this standard, BPK has to plan and implement an audit so that BPK can obtain reasonable assurances that the statements are free of material misstatements. An audit includes examining evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. The audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimations made by Bank Indonesia, evaluating the compliance with laws, the reliability of internal control system which have material impacts on the

Indonesia, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, dan surplus defisit untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia.

Hal Lain

Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK melakukan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan hasil pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 48/01.b/LHP/XV/04/2017 dan Nomor 48/01.c/LHP/XV/04/2017 tanggal 28 April 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

financial statements, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. BPK believes that this audit provide a reasonable basis for our opinion.

Opinion

In our opinion, the financial statements as mentioned above presents fairly, in all material respects, the financial position of Bank Indonesia as on December 31, 2016 and 2015, and the statements of surplus (deficit) of the years ended on those dates are in conformity with Bank Indonesia Financial Accounting Policy.

Other Notes

To obtain reasonable assurances that the financial statements is fairly presented, BPK conducted a compliance audit on internal control systems as well as laws and regulations. The report on finding of our test on the compliance with Bank Indonesia's internal control system and the report on findings of our test on the compliance with laws and regulations in effect, are presented in reports Number 48/01.b/LHP/XV/04/2017 and 48/01.c/LHP/XV/04/2017, both dated April 28, 2017 which are integral parts of these statements.

Jakarta, 28 April 2017

Jakarta, April 28, 2017

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Penanggung Jawab Pemeriksaan
Auditor in Charge

Bahtiar Arif

Register Negara Akuntan Nomor RNA-14789
Accountant State Register Number RNA-14789

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Statement of Financial Position

Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 (Dalam Jutaan Rupiah)		As of December 31, 2016 and Desember 31, 2015 (in IDR Million)		
	Catatan Notes	2016	2015	
ASET				ASSETS
1. Emas	B.8, D.1	39,090,228	36,781,172	1. Gold
2. Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter	B.10, D.2	1,657,786,926	1,573,395,660	2. Financial Assets Related to Monetary Policy Implementation
2.1 Surat Berharga dan Tagihan dalam Rupiah	B.10.2, D.2.1	159,559,984	153,628,086	2.1 Securities Held and Claims Denominated in Rupiah
2.2 Surat Berharga dan Tagihan berbasis Syariah dalam Rupiah	B.11.1, D.2.2	4,472,827	2,327,535	2.2 Sharia-based Securities Held and Claims Denominated in Rupiah
2.3 Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing	B.10.3, D.2.3	1,493,754,115	1,417,440,039	2.3 Securities Held and Claims Denominated in Foreign Currency
3. Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional	B.12, D.3	34,323,368	36,473,988	3. Receivables from the IMF
4. Tagihan	D.4	197,920,303	223,129,030	4. Claims
4.1 Kepada Pemerintah	B.13.1, D.4.1	197,613,683	222,720,114	4.1 Claims on the Government
4.2 Kepada Bank	B.14, D.4.2	306,620	408,916	4.2 Claims on Banks
5. Aset Non Kebijakan	D.5	26,729,367	36,413,967	5. Other Assets
5.1 Penyertaan	B.15, D.5.1	824,381	873,541	5.1 Participating Interest in Domestic and International Institutions
5.2 Aset Keuangan	B.16, D.5.2	1,655,046	2,107,250	5.2 Other Financial Assets
5.3 Aset Tetap dan Lainnya	B.7, D.5.3	24,249,940	33,433,176	5.3 Property and Equipment
TOTAL ASET		1,955,850,192	1,906,193,817	TOTAL ASSETS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

See accompanying Notes to Financial Statements which are integral part of the Financial Statements.

Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 (Dalam Jutaan Rupiah)		As of December 31, 2016 and Desember 31, 2015 (in IDR Million)		
	Catatan Notes	2016	2015	
LIABILITAS		LIABILITIES		
1. Uang Dalam Peredaran	B.9, D.6	612,557,609	586,775,262	1. Currency in Circulations
2. Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter	B.10, D.7	923,674,447	800,877,864	2. Financial Liabilities Related to Monetary Policy Implementation
2.1 Giro Bank	B.10.2, D.7.1	369,392,400	392,784,697	2.1 Banks Demand Deposits
2.2 Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Rupiah	B.10.2, D.7.2	375,818,124	171,340,038	2.2 Securities Issued and Liabilities Denominated in Rupiah
2.3 Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang berbasis Syariah dalam Rupiah	B.11.2, D.7.3	38,895,196	24,650,570	2.3 Sharia-based Securities Issued and Liabilities Denominated in Rupiah
2.4 Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Valuta Asing	B.10.3, D.7.4	139,152,054	207,260,164	2.4 Securities Issued and Liabilities Denominated in Foreign Currency
2.5 Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang berbasis Syariah dalam Valuta Asing	B.11.2, D.7.5	416,673	4,842,395	2.5 Sharia-based Securities Issued and Liabilities Denominated in Foreign Currency
3. Alokasi Hak Tarik Khusus dari Lembaga Keuangan Internasional	B.12, D.8	35,658,690	37,889,219	3. Counterpart of Special Drawing Rights Allocated by the IMF
4. Liabilitas Keuangan kepada Pemerintah	B.13.2, D.9	127,621,299	151,106,418	4. Liabilities to the Government
4.1 Giro	B.13, D.9.1	127,586,419	151,057,586	4.1 Demand Deposits
4.2 Pinjaman	B.13, D.9.2	34,880	48,832	4.2 Borrowings from the Government
5. Kewajiban Non Kebijakan	B.18, B.29, B.30, D.10	14,612,775	29,589,632	5. Other Liabilities
6. Selisih Revaluasi	B.19, D.11	62,726,901	119,877,899	6. Revaluation Reserves
7. Modal	B.20, D.12	3,726,349	3,726,349	7. Capital
8. Akumulasi Surplus (Defisit)	B.20, D.13	175,272,122	176,351,174	8. Accumulated Surplus (Deficit)
8.1 Cadangan Umum	D.13	134,072,619	95,818,968	8.1 General Reserves
8.2 Cadangan Tujuan	D.13	24,122,618	19,206,729	8.2 Statutory Reserves
8.3 Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	D.13	17,076,885	61,325,477	8.3 Current Year Surplus (Deficit)
TOTAL LIABILITAS		1,955,850,192	1,906,193,817	TOTAL LIABILITIES

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

See accompanying Notes to Financial Statements which are integral part of the Financial Statements.

LAPORAN SURPLUS DEFISIT

Statement of Surplus Deficit

Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 (Dalam Jutaan Rupiah)		As of December 31, 2016 and Desember 31, 2015 (in IDR Million)		
	Catatan Notes	2016	2015	
PENGHASILAN		REVENUES		
1. Pelaksanaan Kebijakan Moneter	D.15	59,777,371	117,569,508	1. Monetary Policy Implementation
1.1. Pendapatan Bunga	B.21, D.15	32,143,213	31,754,228	1.1. Interest Income
1.2. Pendapatan Imbalan	B.22, D.15	53,453	36,271	1.2. Income from Sharia-based Transactions
1.3. Transaksi Aset Keuangan	B.23, D.15	15,695,930	4,792,850	1.3. Net Result of Financial Transactions
1.4. Selisih Kurs Transaksi Valuta Asing	B.24, D.15	11,614,826	80,670,317	1.4. Net Result of Foreign Currency Transactions
1.5. Lainnya	D.15	269,949	315,842	1.5. Others
2. Pengelolaan Sistem Pembayaran	B.25, D.16	338,911	329,836	2. Payment System Services
3. Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial	B.26, D.17	173	268	3. Macroprudential Regulation and Supervision
4. Pendapatan dari Penyediaan Pendanaan	B.27, D.18	214,022	245,175	4. Income from Providing Fund
5. Pendapatan Lainnya	D.19	179,201	3,036,599	5. Other Income
JUMLAH PENGHASILAN		60,509,678	121,181,386	TOTAL REVENUES
BEBAN		EXPENSES		
1. Pelaksanaan Kebijakan Moneter	D.20	21,473,855	22,346,172	1. Monetary Policy Implementation
1.1. Beban Bunga	B.21, D.20	19,548,880	20,424,692	1.1. Interest Expenses
1.2. Beban Imbalan	B.22, D.20	1,306,137	1,391,901	1.2. Sharia-based Transaction Expenses
1.3. Lainnya	D.20	618,838	529,579	1.3. Other Expenses
2. Pengelolaan Sistem Pembayaran	B.25, D.21	3,096,033	3,742,082	2. Payment System Services
3. Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial	B.26, D.22	138,466	113,531	3. Macroprudential Regulation and Supervision
4. Remunerasi kepada Pemerintah	B.28, D.23	4,177,108	4,253,586	4. Remuneration on Government General Deposits
5. Beban Umum dan Lainnya	D.24	8,212,863	8,372,137	5. General and Administrative Expenses
JUMLAH BEBAN		37,098,325	38,827,508	TOTAL EXPENSES
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM PAJAK		23,411,353	82,353,878	SURPLUS (DEFICIT) BEFORE TAXES
PAJAK	B.30, D.14	(6,334,468)	(21,028,401)	TAXES
SURPLUS (DEFISIT) SETELAH PAJAK		17,076,885	61,325,477	SURPLUS (DEFICIT) AFTER TAXES

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

See accompanying Notes to Financial Statements which are integral part of the Financial Statements.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Notes to Financial Statements

A. INFORMASI UMUM

A.1. Pendirian, Status dan Kedudukan Bank Indonesia

Nasionalisasi De Javasche Bank NV pada bulan Desember 1951 ditindaklanjuti dengan pembentukan Bank Indonesia berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang Undang Pokok Bank Indonesia tanggal 2 Juni 1953 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1953. Dalam Undang Undang tersebut dinyatakan bahwa pendirian Bank Indonesia dimaksudkan untuk bertindak sebagai bank sentral Indonesia.

Dinamika kondisi ekonomi, sosial, khususnya politik, berpengaruh terhadap peran Bank Indonesia sebagai bank sentral yang ditandai dengan penggantian maupun perubahan Undang Undang mengenai Bank Indonesia, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang Undang, yang selanjutnya disebut Undang Undang Bank Indonesia. Tidak hanya pada tataran Undang Undang, ihwal bank sentral juga menjadi substansi Perubahan Keempat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23D bahwa Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan Undang Undang.

Dengan landasan konstitusional yang jelas dan kuat tersebut maka sebagai implementasi dari amanat UUD 45 Pasal 23D, selain statusnya sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, juga diatur bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugasnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, serta dinyatakan sebagai badan hukum agar terdapat kejelasan wewenang Bank Indonesia

A. GENERAL INFORMATION

A.1. Establishment, Status and Domicile of Bank Indonesia

Bank Indonesia was established following the nationalization of the De Javasche Bank NV in December 1951, based on Act Number 11 of 1953 on the Establishment of the Principal Act of Bank Indonesia dated June 2, 1953 and came into effect on July 1, 1953. The Act stipulated Bank Indonesia's role as Indonesia's central bank.

The role of Bank Indonesia as the Central Bank had eventually developed due to economic, social, and particularly political dynamics, marked by several substitutes and amendments to the Bank Indonesia Act prior to the latest adjustment of Act Number 6 of 2009 on Government Regulation in Lieu of Act Number 2 of 2008 on the Second Amendment to Act Number 23 of 1999 on Bank Indonesia as Act, hereinafter referred to as Bank Indonesia Act. In addition to the Act amendment, the Central Bank's substance were also included in the substance of the Fourth Amendment of the Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) as stipulated in Article 23D that the State has a Central Bank with structure, status, authority, responsibility, and independence regulated by Law.

With clear-cut constitutional basis, the implementation of Article 23D of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 45), in addition to its status as the Central Bank of the Republic of Indonesia, stipulates that Bank Indonesia is an independent State institution that carries out its duties, free from government and/or other parties' interference, and it was established as a legal entity with distinct authority to manage its own

dalam mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Agar independensi dalam melaksanakan tugasnya dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, Bank Indonesia dituntut untuk transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik serta terbuka bagi pengawasan oleh masyarakat, termasuk kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) guna dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut wajib diumumkan kepada publik melalui media massa.

Adapun kedudukan Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Bank Indonesia tersebut di atas adalah di Ibukota Negara Republik Indonesia.

A.2. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

Sesuai Undang Undang Bank Indonesia, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Untuk mencapai tujuan dimaksud, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
3. Mengatur dan mengawasi bank.

Sejalan dengan diundangkannya Undang Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang didalamnya mengatur tentang pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia kepada OJK, maka sejak tanggal 31 Desember 2013 tugas mengatur dan mengawasi bank sebagaimana dimaksud pada huruf c, telah dialihkan dari Bank Indonesia kepada OJK. Selain mengatur tentang pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan mikroprudensial dari Bank Indonesia kepada OJK, Undang Undang OJK juga menegaskan mengenai tugas dan kewenangan Bank Indonesia terkait pengaturan dan pengawasan makroprudensial, yaitu pengaturan dan pengawasan selain mikroprudensial.

assets excluded from the State Budget. To perform duties independently with utmost responsibility, Bank Indonesia is required to be transparent and in compliance with the principles of public accountability and open for public control, including the obligation to prepare financial statements for an audit by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK-RI). The audit results must subsequently be publicly announced through the mass media.

As stipulated in the Bank Indonesia Act, the domicile of Bank Indonesia is in the capital city of the Republic of Indonesia.

A.2. Objectives and Duties of Bank Indonesia

Pursuant to the Bank Indonesia Act, the objective of Bank Indonesia is to achieve and maintain the stability of the Rupiah's value. To achieve this objective, Bank Indonesia has the following duties:

1. *Formulating and implementing monetary policy;*
2. *Regulating and safeguarding uninterrupted operation of payment system;*
3. *Regulating and supervising the banking sector.*

Following the promulgation of the Financial Services Authority Act through Act Number 21 of 2011, which regulates the transfer of functions, duties, and authority for regulating and supervising financial services in the banking sector from Bank Indonesia to the Financial Services Authority (OJK), as of December 31, 2013 the duties for regulating and supervising banks as stipulated in letter c, was transferred from Bank Indonesia to OJK. In addition to regulating the transfer of functions, duties, and authority for micro-prudential regulation and supervision from Bank Indonesia to OJK, the OJK Act also affirms the duties and authority of Bank Indonesia relating to macro-prudential regulation and supervision, namely the regulation and supervision non-micro-prudential. In regards to the separation of duties and authority pertaining to macro-prudential and micro-

Berkenaan dengan adanya pembagian tugas dan wewenang terkait pengaturan dan pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial, Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 telah mengatur tentang koordinasi dan kerjasama antara otoritas makroprudensial dan mikroprudensial, yaitu diantaranya mencakup: (i) koordinasi dan kerjasama dalam penyusunan peraturan pengawasan di bidang perbankan yang meliputi pengaturan tentang kewajiban pemenuhan modal minimum bank, produk perbankan, transaksi derivatif dan kegiatan usaha bank lainnya, serta penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important bank*; (ii) koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pemeriksaan bank oleh Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, dan (iii) koordinasi dan kerjasama dalam rangka pertukaran informasi.

Bank Indonesia memiliki urgensi yang penting untuk tetap dapat memiliki tugas dan kewenangan mengatur bank meskipun telah dibentuk OJK, mengingat peranan strategis bank sebagai sarana transmisi kebijakan moneter, pelaku jasa sistem pembayaran, dan lembaga yang memengaruhi stabilitas sistem keuangan. Selain itu, tugas dan kewenangan Bank Indonesia untuk mengatur bank juga dilandaskan pada Undang Undang lain yaitu Undang Undang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Undang Undang Transfer Dana, Undang Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang Undang Mata Uang. Pengaturan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia dilakukan semata-mata dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial dan tidak mengatur hal-hal yang menjadi kewenangan OJK.

A.3. Dewan Gubernur Bank Indonesia

Sesuai dengan Undang Undang Bank Indonesia, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang Gubernur dan seorang Deputi Gubernur Senior, serta sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputi Gubernur. Adapun susunan Dewan Gubernur pada posisi tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

prudential regulation and supervision, Act Number 21 of 2011 on coordination and cooperation between macro-prudential and micro-prudential authorities stipulates as follows: (i) coordination and cooperation in formulating banking supervisory regulations on minimum capital requirements for banks, banking products, derivative transactions and other banking activities, as well as determining banking institutions that fit into the category of a systemically important bank; (ii) coordination and cooperation in implementing bank supervision by Bank Indonesia related to function, duty, and authority, and (iii) coordination and cooperation on information exchange.

Bank Indonesia has a vital importance to continuously hold the duties and authority to regulate banks despite the OJK's establishment, in view of banks strategic role as a means for transmitting monetary policy, enactor of payment services, and institution that influences financial system stability. Moreover, Bank Indonesia's duties and authorities to regulate banks are also based on other Acts, particularly those of Foreign Exchange Flow and Exchange Rate System Law, Funds Transfer Law, Prevention and Eradication of Money Laundering Law, and Currency Law. Whereby the regulation and supervision of banks by Bank Indonesia is carried out solely within the framework of Bank Indonesia's duties in the monetary, payment systems, and macroprudential fields, and not on matters under OJK's authorization.

A.3. The Board of Governors of Bank Indonesia

Pursuant to the Bank Indonesia Act, Bank Indonesia is led by the Board of Governors comprising one Governor and one Senior Deputy Governor, with at least 4 (four) or maximum of 7 (seven) Deputy Governors. As of December 31, 2016, the Board of Governor's members are:

Gubernur : Agus D.W. Martowardojo
Deputi Gubernur Senior : Mirza Adityaswara
Deputi Gubernur : 1. Perry Warjiyo
2. Erwin Rijanto

Governor : Agus D.W. Martowardojo
Senior Deputy Governor : Mirza Adityaswara
Deputy Governor : 1. Perry Warjiyo
2. Erwin Rijanto

Berdasarkan Pasal 41 Undang Undang Bank Indonesia, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), sedangkan calon Deputi Gubernur diusulkan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Gubernur.

Under Article 41 of the Bank Indonesia Act, the Governor, Senior Deputy Governor, and Deputy Governors are nominated and appointed by the President upon approval of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR-RI), while as the Deputy Governor candidates are proposed by the President on the recommendation from the Governor.

Deputi Gubernur, Sdr. Ronald Waas dan Sdr. Hendar berakhir masa jabatannya pada tanggal 29 Desember 2016 dan digantikan dengan Sdr. Sugeng dan Sdri. Rosmaya Hadi melalui Keputusan Presiden Nomor 145/P Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 dan dilantik pada tanggal 6 Januari 2017.

The Deputy Governors, Ronald Waas and Hendar, concluded their tenure on December 29, 2016 and subsequently replaced by Sugeng and Rosmaya Hadi by virtue of Presidential Decree Number 145/P of 2016 dated December 29, 2016. Sugeng and Rosmaya Hadi was subsequently sworn in on January 6, 2017.

A.4. Jumlah Kantor dan Jumlah Pegawai Bank Indonesia

Bank Indonesia berkantor pusat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta. Satuan kerja di Bank Indonesia per 31 Desember 2016 terdiri dari 31 (tiga puluh satu) satuan kerja di Kantor Pusat, dan 45 (empat puluh lima) Kantor Perwakilan Bank Indonesia, yang terdiri atas 33 (tiga puluh tiga) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi, dan 12 (dua belas) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota/Kabupaten, serta 4 (empat) Kantor Perwakilan Bank Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia. Jumlah pegawai Bank Indonesia per 31 Desember 2016 sebanyak 5.820 pegawai, termasuk diantaranya 1.044 pegawai yang ditugaskan pada OJK. Dari ke 1.044 pegawai penugasan di OJK, 697 orang memutuskan untuk beralih kerja ke OJK dengan pelaksanaan pengalihan per 1 Januari 2017. Adapun Organisasi Bank Indonesia sebagaimana lampiran 1.

A.4. Number of Offices and Employees of Bank Indonesia

Bank Indonesia's head office is located on Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta. As of December 31, 2016, Bank Indonesia has 31 (thirty one) Departments at the Head Office, and 45 (forty five) Domestic Representative Offices, comprising 33 (thirty three) Provincial Representative Offices, and 12 (twelve) City/Regency Offices, as well as 4 (four) Foreign Representative Offices. Bank Indonesia has 5,820 employees as of December 31, 2016, including 1,044 employees assigned to the Financial Services Authority (OJK), where 697 of them have decided to permanently move to OJK as of January 1, 2017. The Organization of Bank Indonesia is presented in Appendix 1.

A.5. Modal Bank Indonesia

Berdasarkan Undang Undang Bank Indonesia, modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah). Modal ini harus ditambah sehingga menjadi 10% (sepuluh persen) dari seluruh kewajiban moneter, yang dananya berasal dari Cadangan Umum atau Hasil Revaluasi Aset.

A.5. The Capital of Bank Indonesia

Pursuant to the Bank Indonesia Act, Bank Indonesia's capital is set at a minimum of IDR 2,000,000,000,000.00 (two trillion Rupiah). This capital must be increased up to 10% (ten percent) of the total monetary liabilities and funded by the General Reserve or Asset Revaluation.

Selanjutnya, diatur bahwa surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut:

1. 30% untuk Cadangan Tujuan; dan
2. Sisanya dipupuk sebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal dan Cadangan Umum menjadi 10% dari seluruh kewajiban moneter.

Selama penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) belum berakhir, Cadangan Tujuan ditetapkan sebesar 10%.

Cadangan Umum dipergunakan untuk menambah modal atau menutup defisit Bank Indonesia, sedangkan Cadangan Tujuan dipergunakan antara lain untuk biaya penggantian dan atau pembaruan aset tetap, pengadaan perlengkapan yang diperlukan, serta pengembangan organisasi dan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia serta penyertaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

A.6. Dasar Hukum dan Tujuan Laporan Keuangan Bank Indonesia

Berdasarkan Undang Undang Bank Indonesia, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun anggaran, Bank Indonesia telah menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia.

Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada BPK-RI untuk dilakukan pemeriksaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan tersebut selesai disusun. Hasil pemeriksaan BPK-RI tersebut disampaikan kepada DPR-RI.

Tujuan laporan keuangan Bank Indonesia adalah untuk menunjukkan pencapaian manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya keuangan dalam mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah, yang meliputi informasi tentang dampak keuangan dari kebijakan Bank Indonesia terhadap posisi keuangan dan surplus/defisit Bank Indonesia.

It is also stipulated that the surplus from Bank Indonesia's activities will be allocated as follows:

- 1. 30% for the Statutory Reserves; and*
- 2. The remaining balance for the General Reserves, which is to be used for raising the Capital and General Reserves to meet the 10% minimum requirement of the total liabilities.*

During the settlement of Bank Indonesia Liquidity Assistance (BLBI), the Allocation for Statutory Reserves is set at 10%.

The General Reserves is used to increase capital or to cover for Bank Indonesia's deficit, while the Statutory Reserves is used for replacing or revitalizing fixed assets, equipment procurement, and organizational and human resources development to support the duties and authority of Bank Indonesia, as well as the participating interest related to Bank Indonesia's duties.

A.6. Legal Basis and Purpose of Bank Indonesia's Financial Statements

Pursuant to the Bank Indonesia Act, Bank Indonesia must complete Bank Indonesia's Annual Financial Statements within 30 (thirty) days after the end of the financial year.

Bank Indonesia is obliged to submitting Bank Indonesia's Annual Financial Statements to BPK-RI for an audit, within 7 (seven) days after the statements are completed. The audit result will subsequently be presented to the DPR-RI.

The objective of Bank Indonesia's financial statements is to demonstrate management's achievements and the fulfillment of management's responsibilities for the financial resources used to achieve and maintain Rupiah stability, which includes information on the impacts of Bank Indonesia's policies on the financial position and the surplus/deficit of Bank Indonesia.

Penyajian laporan keuangan Bank Indonesia:

1. Tidak dimaksudkan untuk mengukur pencapaian tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, karena stabilitas nilai Rupiah tidak dapat diukur dalam satuan mata uang.
2. Tidak dimaksudkan untuk menyajikan informasi tentang efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan Bank Indonesia. Meskipun penggunaan sumber daya oleh Bank Indonesia dapat diukur dalam satuan mata uang tetapi pencapaian tujuannya tidak dapat diukur dalam satuan mata uang. Oleh sebab itu, tidak dapat dilakukan perhitungan efisiensi dalam ukuran perbandingan nilai keuangan dari tujuan terhadap biaya untuk mencapai tujuan tersebut.

Adapun dampak keuangan dari upaya Bank Indonesia untuk mencapai tujuannya dapat diukur dalam satuan mata uang, sehingga Laporan Keuangan Bank Indonesia dapat digunakan untuk mengukur dampak keuangan dari upaya pencapaian tujuan Bank Indonesia tersebut.

A.7. Kebijakan Utama Bank Indonesia yang Berdampak Signifikan pada Keuangan Bank Indonesia

Di tengah berlanjutnya ketidakpastian global, kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2016 difokuskan pada upaya mengoptimalkan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dengan tetap mendorong momentum pertumbuhan ekonomi. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan bauran kebijakan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Di bidang moneter, kebijakan secara konsisten diarahkan untuk mengendalikan inflasi menuju sasarannya dan menjaga defisit transaksi berjalan pada tingkat yang sehat, melalui penguatan strategi operasi moneter dan kebijakan nilai tukar serta pendalaman pasar keuangan.

Implementasi kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2016 yang berdampak signifikan pada keuangan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

The presentation of Bank Indonesia financial statements:

1. *Is not intended to assess the level of achievement of Bank Indonesia's objective, namely Rupiah stability, since it is incapable of being assessed solely in monetary terms.*
2. *Is not intended to provide information on efficient resources use in achieving Bank Indonesia's objectives. Although the use of resources by Bank Indonesia may be measured in monetary terms, but the achievement of its objective cannot be assessed by monetary terms. Consequently, efficiency was not assessed by comparing the monetary value from the objective towards costs incurred in achieving the objective.*

Nevertheless, the financial effects on the bulk of endeavours undertaken by Bank Indonesia's in achieving its objective may be measured in monetary terms so that Bank Indonesia's financial statements can be used to assess the financial impact of efforts to achieve its objective.

A.7. Bank Indonesia's Prime Policy that Significantly Impact Its Financial Statements

Amidst the ongoing global uncertainty, Bank Indonesia's policy in 2016 was focused on efforts to optimize the policy mix to maintain macroeconomic and financial system stability by continuously promoting the momentum of economic growth. These efforts were carried out by strengthening the policy mix in monetary, macroprudential, and payment system. In the monetary sector, the policy was consistently geared to control inflation towards its target and maintain the current account deficit at a healthier level, by strengthening monetary operations strategy and exchange rate policy as well as intensifying financial market deepening.

The followings are Bank Indonesia's policy implementations with significant impacts on its financial position in 2016:

1. Pada Januari hingga Maret 2016, Bank Indonesia secara gradual menurunkan BI Rate sebesar 75 bps dari 7,5% pada Desember 2015 menjadi 6,75% pada Maret 2016. Penurunan BI Rate ini diikuti dengan penurunan suku bunga *Deposit Facility* dan *Lending Facility*, masing-masing dari 5,50% dan 8,00% pada Desember 2015 menjadi 4,75% dan 7,25% pada Maret 2016. Keputusan ini sejalan dengan ruang pelonggaran kebijakan moneter yang semakin terbuka dengan semakin terjaganya stabilitas makroekonomi, serta meredanya ketidakpastian pasar keuangan global pasca kenaikan *Fed Fund Rate* (FFR) pada Desember 2015.
 2. Bank Indonesia juga memutuskan untuk menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) Primer dalam Rupiah sebesar 1%, dari 7,50% ke level 6,50%, berlaku efektif sejak 16 Maret 2016. Pelonggaran ini merupakan bagian dari pelonggaran kebijakan moneter yang diputuskan pada Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada bulan Februari 2016. Pelonggaran ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas dan kapasitas pembiayaan perbankan untuk mendukung kegiatan ekonomi.
 3. Pada 15 April 2016, Bank Indonesia mengumumkan rencana reformulasi suku bunga kebijakan, dari BI Rate menjadi BI 7-day Reverse Repo Rate (BI 7-day RR Rate). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Penguatan operasi moneter ini tidak mengubah stance kebijakan moneter yang sedang diterapkan. Perubahan suku bunga kebijakan ini berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016. Dalam masa transisi sampai dengan sebelum 19 Agustus 2016, Bank Indonesia tetap menggunakan BI Rate sebagai suku bunga kebijakan. Dalam periode yang sama, BI juga mengumumkan BI 7-day RR Rate sebagai bagian dari suku bunga operasi moneter (*term structure*). Penguatan kerangka operasi moneter tersebut memiliki tiga tujuan utama. Pertama, memperkuat sinyal kebijakan moneter dengan suku bunga (*Reverse*) Repo Rate 7 hari sebagai acuan utama di pasar keuangan. Kedua, memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan. Ketiga, mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya transaksi dan
1. *From January to March 2016, Bank Indonesia gradually reduced the BI Rate by 75 bps from 7.5% in December 2015 to 6.75% in March 2016. This reduction was followed by a reduction in the Deposit Facility and Lending Facility rates, respectively from 5.50% and 8.00% in December 2015 to 4.75% and 7.25% in March 2016. This decision was aligned with the monetary policy relaxation as a result of enhanced ability in maintaining macroeconomic stability, as well as the dissipating concerns in the global financial market uncertainty following the Fed Fund Rate (FFR) increase in December 2015.*
 2. *Bank Indonesia also decided to reduce the Primary Minimum Reserve Requirements (GWM) in Rupiah by 1%, from 7.50% to the 6.50% level, which took effect on March 16, 2016. This relaxation was part of the monetary policy relaxation as decided by the Board of Governors Meeting in February 2016. This relaxaton seeked to improve banking liquidity and capacity needed to support economic activities.*
 3. *On April 15, 2016, Bank Indonesia announced plans to reformulate the interest rate policy, from BI Rate to the BI 7-day Reverse Repo Rate (BI 7-day RR Rate). This was aimed to improve effective monetary policy transmission. This monetary operation strengthening did not change the ongoing monetary policy stance. The policy change on interest rate took effect on August 19, 2016. Prior to August 19, 2016, Bank Indonesia used the BI Rate as the policy rate. During that period, BI also announced the BI 7-day RR Rate as part of the monetary operations rate (term structure). This strengthened monetary operations framework came with three main objectives. The first, to strengthen monetary policy signals with the 7-day (Reverse) Repo Rate as the main benchmark for the financial market. Secondly, to strengthen the effectiveness of monetary policy transmission through its influence on the movements in financial market rates and bank interest rates. Third, to promote increased involvement in the financial markets, particularly in transactions and creating interest rate structure in the the interbank financial market for 3 month to 12 month-tenor. For that purpose,*

pembentukan struktur suku bunga di pasar uang antarbank untuk tenor 3 bulan hingga 12 bulan. Untuk itu, penguatan operasi moneter akan disertai dengan langkah-langkah untuk percepatan pendalaman pasar uang.

4. Sejalan dengan penguatan kerangka operasi moneter tersebut, Bank Indonesia akan mempercepat pelaksanaan program pendalaman pasar keuangan. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain mencakup: (i) memperkuat peran suku bunga *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR) bagi terbentuknya struktur suku bunga di pasar uang untuk tenor dari *overnight* sampai dengan 12 bulan; (ii) mempercepat transaksi Repo dengan mendorong bank-bank berpartisipasi ke dalam *General Master Repo Agreement* (GMRA); (iii) mengurangi segmentasi dan meningkatkan kapasitas transaksi pasar uang dengan mendorong perbankan untuk lebih membuka akses *counterparty*.
5. Pada periode April hingga Mei 2016, Bank Indonesia mempertahankan BI Rate sebesar 6,75%, dengan suku bunga *Deposit Facility* sebesar 4,75% dan *Lending Facility* sebesar 7,25%. BI Rate tersebut setara dengan suku bunga operasi moneter tenor 12 bulan. Sejalan dengan rencana reformulasi suku bunga kebijakan yang diumumkan pada tanggal 15 April 2016, Bank Indonesia juga menetapkan BI 7-day RR Rate sebesar 5,50%. Dengan demikian, struktur suku bunga atau *term structure* operasi moneter Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

the strengthening of monetary operations will also be accelerated by financial market involvement.

4. *In line with the framework strengthening on monetary operations, Bank Indonesia accelerates the implementation of the program aimed at enhancing participation in the financial market deepening, which include: (i) strengthening the role of the Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) rates to set an interest rate structure in the financial market for tenor ranging between overnight up to 12 months; (ii) accelerating Repo transactions by encouraging banks to participate in General Master Repo Agreement (GMRA); (iii) reducing segmentation and improve financial market transaction capacity by driving banks to increase counterparty access.*
5. *From April to May 2016, Bank Indonesia maintained BI Rate at 6.75%, with Deposit Facility rate at 4.75% and Lending Facility at 7.25%. This BI Rate was in line with 12-month tenor monetary operation rates. In line with interest rate policy reformulation plans announced on April 15, 2016, Bank Indonesia also set the BI 7-day RR Rate at 5.50%. As a result, the interest rate structure or Bank Indonesia's monetary operations term structure was as follows:*

Tenor Tenure	7-Hari 7-Day	2 Minggu 2 Weeks	1 Bulan 1 Month	3 Bulan 3 Month	6 Bulan 6 Month	9 bulan 9 Month	12 Bulan 12 Month
<i>Term Structure Operasi moneter Monetary Operations Rate</i>	5,50%	5,60%	5,80%	6,20%	6,45%	6,60%	6,75%

Keputusan tersebut sejalan dengan upaya untuk mencapai sasaran inflasi 2016 sebesar 4±1% dan tetap konsisten dengan upaya mendorong momentum pemulihan ekonomi domestik, di tengah masih lemahnya pertumbuhan ekonomi global. Transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga berjalan semakin baik, demikian pula persiapan implementasi reformulasi suku bunga acuan.

This decision was in line with efforts to achieve the 2016 inflation target of 4±1% and remains consistent with efforts to drive domestic economic recovery amidst the continuing slowdown of global economic growth. Monetary policy transmission through the current rate path continued to progress, along with preparations towards implementing benchmark rate reformulation.

6. Pada Juni 2016, Bank Indonesia kembali menurunkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 6,50%, dengan suku bunga *Deposit Facility* turun sebesar 25 bps menjadi 4,50% dan *Lending Facility* turun sebesar 25 bps menjadi 7,00%. Pada periode bulan ini, Bank Indonesia juga memutuskan BI 7-day RR Rate turun 25 bps dari 5,50% menjadi sebesar 5,25%. Dengan demikian, struktur suku bunga atau *term structure* operasi moneter Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

Tenor Tenure	7-Hari 7-Day	2 Minggu 2 Weeks	1 Bulan 1 Month	3 Bulan 3 Month	6 Bulan 6 Month	9 bulan 9 Month	12 Bulan 12 Month
<i>Term Structure</i> Operasi moneter <i>Monetary Operations Rate</i>	5,25%	5,45%	5,70%	6,10%	6,30%	6,40%	6,50%

Di samping itu, Bank Indonesia menetapkan pelonggaran kebijakan makroprudensial dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yakni dengan merelaksasi ketentuan terkait *Loan to Value Ratio* (LTV) dan *Financing to Value Ratio* (FTV). Bank Indonesia juga menaikkan batas bawah *Loan to Funding Ratio* terkait Giro Wajib Minimum (GWM-LFR) dari 78% menjadi 80%, dengan batas atas tetap sebesar 92%.

Penetapan bauran kebijakan tersebut diarahkan untuk semakin memperkuat upaya untuk meningkatkan permintaan domestik guna terus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi, di tengah masih lemahnya perekonomian global. Bank Indonesia meyakini bahwa pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial akan memperkuat kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui penguatan stimulus pertumbuhan dan percepatan implementasi reformasi struktural.

7. Pada 2016, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6,50%, dengan suku bunga *Deposit Facility* sebesar 4,50% dan *Lending Facility* sebesar 7,00%. Bank Indonesia juga memutuskan BI 7-day RR Rate tetap sebesar 5,25%. Keputusan tersebut sejalan dengan upaya untuk mencapai sasaran inflasi 2016

6. In June 2016, Bank Indonesia reduced the BI Rate by 25 bps to 6.50%, with *Deposit Facility* rates down by 25 bps to 4.50% and lower *Lending Facility* by 25 bps to 7.00%. Within this month period, Bank Indonesia also decided to lower the BI 7-day RR Rate by 25 bps from 5.50% to 5.25%. As a result, Bank Indonesia's monetary operations rate or term structure was as follows:

Moreover, Bank Indonesia relaxed macroprudential policy by relaxing provisions related to *Loan to Value Ratio* (LTV) and *Financing to Value Ratio* (FTV) while Bank Indonesia also raised the floor of *Loan to Funding Ratio* in line with the Bank Minimum Reserve Requirements (GWM-LFR) from 78% to 80%, with maximum limits remained at 92%.

This policy mix was geared to strengthen domestic demand improvements needed to sustain economic growth momentum by maintaining macroeconomic stability. Bank Indonesia believes that the monetary and macroprudential policy relaxation will strengthen policies implemented by the Government to drive sustainable economic growth by strengthening growth stimulus and accelerating the implementation of structural reforms.

7. In 2016, Bank Indonesia set to maintain the BI Rate at 6.50%, with the *Deposit Facility* rate at 4.50% and *Lending Facility* rate at 7.00%. Bank Indonesia also determined the BI 7-day RR Rate to remain at 5.25%. This decision was aligned with efforts to achieve the 2016 inflation targets of 4±1% and remained consistent with efforts to

sebesar 4±1% dan tetap konsisten dengan upaya mendorong momentum pemulihan ekonomi domestik, di tengah ekonomi global yang diperkirakan tumbuh lebih lambat sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian pasca-referendum keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit).

8. Sebagaimana telah diumumkan pada 15 April 2016, maka sejak 19 Agustus 2016 Bank Indonesia menggunakan BI 7-day RR Rate sebagai suku bunga kebijakan menggantikan BI Rate. Bank Indonesia juga menjaga koridor suku bunga yang simetris dan lebih sempit, yaitu batas bawah koridor (*Deposit Facility Rate*) dan batas atas koridor (*Lending Facility Rate*) berada masing-masing 75 bps di bawah dan di atas BI 7-day RR Rate. Pada bulan Agustus 2016 ini, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day RR Rate sebesar 5,25%, dengan Suku bunga *Deposit Facility* (DF) sebesar 4,50% dan *Lending Facility* (LF) diturunkan sebesar 100 bps dari 7,00% menjadi sebesar 6,00%.

Keputusan tersebut sejalan dengan upaya untuk menjaga stabilitas makroekonomi dengan tetap memelihara momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah masih melemahnya pertumbuhan ekonomi global. Bank Indonesia memandang bahwa dengan terjaganya stabilitas makroekonomi, khususnya inflasi yang terkendali pada kisaran sasaran, defisit transaksi berjalan yang membaik, dan nilai tukar yang relatif stabil, maka ruang bagi pelonggaran moneter masih terbuka.

9. Pada September dan Oktober 2016, Bank Indonesia secara berturut-turut memutuskan penurunan BI 7-day RR Rate masing-masing sebesar 25 bps. Pada September 2016, BI 7-day RR Rate ditetapkan turun dari 5,25% menjadi 5,00%, dengan suku bunga DF turun sebesar 25 bps menjadi 4,25% dan LF turun sebesar 25 bps menjadi 5,75%. Sementara pada Oktober 2016, BI 7-day RR Rate kembali turun dari 5,00% menjadi 4,75%, dengan suku bunga DF turun sebesar 25 bps menjadi 4,00% dan LF turun sebesar 25 bps menjadi 5,50%.

promote domestic economic recovery, amidst the slowdown in global economic recovery due to increased uncertainty post-Brexit referendum.

8. *As announced on April 15, 2016, since August 19, 2016, Bank Indonesia introduced the BI 7-day RR Rate as the policy rate that replaced the BI Rate. Bank Indonesia also maintains the rate corridor in both symmetrical and narrower manner, namely the low limit corridor (*Deposit Facility Rate*) and upper limit corridor (*Lending Facility Rate*) which was set at 75 bps below and above the BI 7-day RR Rate respectively. In August 2016, Bank Indonesia set to maintain the BI 7-day RR Rate at 5.25%, with *Deposit Facility* (DF) rates of 4.50% and *Lending Facility* (LF) lowered by 100 bps from 7.00% to 6.00%.*

This decision was aligned with efforts to maintain macroeconomic stability by continuously maintained domestic economic growth momentum amidst the looming weakness in global economic growth. Bank Indonesia perceived that by maintaining macroeconomic stability, particularly controlling inflation within the targeted range, improving current account deficit, as well as maintaining a relatively stable exchange rate will give room for monetary relaxation.

9. *In September and October 2016, Bank Indonesia lowered the BI 7-day RR Rate by 25 bps respectively. On September 2016, the BI 7-day RR Rate was lowered from 5.25% to 5.00%, with DF rates lowered by 25 bps to 4.25% and LF lowered by 25 bps to 5.75%. Meanwhile, in October 2016, the BI 7-day RR Rate was lowered from 5.00% to 4.75%, with the DF rate lowered by 25 bps to 4.00% and LF lower by 25 bps to 5.50%.*

Bank Indonesia meyakini bahwa pelonggaran kebijakan moneter tersebut sejalan dengan tetap terjaganya stabilitas makroekonomi, khususnya inflasi tahun 2016 yang diperkirakan mendekati batas bawah kisaran sasaran, defisit transaksi berjalan yang lebih baik dari perkiraan, surplus neraca pembayaran yang lebih besar, dan nilai tukar yang relatif stabil. Di tengah masih lemahnya perekonomian global, pelonggaran kebijakan moneter tersebut diyakini semakin memperkuat upaya untuk mendorong permintaan domestik, termasuk permintaan kredit, sehingga dapat terus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia believed that this monetary policy relaxation was aligned with efforts to continuously maintain macroeconomic stability, particularly inflation in 2016 that was projected to touch the low limits of the targeted range, improved current account deficit that was better than expected, a larger balance of payment surplus, and a relatively stable exchange rate. Amidst the continued weak global economic conditions, this monetary policy relaxation was expected to further strengthen efforts to drive domestic demand, including the demand for loan, thereby continuing to drive the momentum for economic growth.

10. Pada November dan Desember 2016, Bank Indonesia secara berturut-turut mempertahankan BI 7-day RR Rate tetap sebesar 4,75%, dengan suku bunga DF tetap sebesar 4,00% dan LF tetap sebesar 5,50%. Kebijakan tersebut konsisten dengan upaya mengoptimalkan pemulihan ekonomi domestik dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Bank Indonesia memandang pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang telah dilakukan sebelumnya dapat terus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi domestik.

10. *On November and December 2016, Bank Indonesia succesively maintained the BI 7-day RR Rate to remain at 4.75%, with DF rate stayed at 4.00% and LF remained at 5.50%. This policy was consistent with efforts to opitimize domestic economic recovery by continuously maintaining macroeconomic and the financial system's stability amidst the global financial market uncertainty. Bank Indonesia believed the macroeconomic and monetary policy relaxation that was previously implemented would drive the domestic economic growth momentum further.*

11. Di sisi nilai tukar, Bank Indonesia terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya sehingga dapat mendukung terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Sampai dengan 30 Desember 2016, nilai tukar Rupiah secara *point to point* yang *diquote* dari *Reuters* menguat sebesar 2,32% (ytd) ke level Rp13.473,00/USD dari Rp13.785,00/USD pada akhir tahun 2015.

11. *On the exchange rate, Bank Indonesia continuously strived to maintain the exchange rate's stability to align with its fundamentals thereby supporting macroeconomic and the financial system's stability. As of December 30, 2016, on a point to point basis which was quoted from Reuters, the Rupiah's exchange rate strengthened by 2.32% (ytd) to the Rp13.473,00/USD level from Rp13.785,00/ USD at the end of 2015.*

12. Di bidang pengedaran uang, untuk mendukung kelancaran kegiatan ekonomi, Bank Indonesia menjaga ketersediaan uang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di samping itu, untuk menjaga kualitas uang yang ada di masyarakat, Bank Indonesia melakukan pemusnahan uang Rupiah yang sudah tidak layak edar, dan diganti dengan uang layak edar (*clean money policy*).

12. *On currency circulation, to support economic activity, Bank Indonesia maintained the availability of currency suitable for circulation throughout Indonesia. Additionally, to maintain the quality of currency circulation, Bank Indonesia has culled currency that were no longer suitable for circulation and replaced them with the suitable ones for circulation (clean money policy).*

Berbagai kebijakan Bank Indonesia tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Bank Indonesia yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan khususnya pada pos Aset dan Liabilitas untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter, dan pos Uang Dalam Peredaran. Sedangkan dalam Laporan Surplus Defisit, tercermin dalam pos Pendapatan/Beban Bunga, pos Pendapatan/Beban Imbalan, pos Pendapatan/Beban Transaksi Aset Keuangan, pos Pendapatan/Beban Selisih Kurs Transaksi Valuta Asing, dan pos Pendapatan/Beban Pengelolaan Sistem Pembayaran.

Selain kebijakan yang dilakukan pada tahun 2016 tersebut di atas, Bank Indonesia juga melanjutkan berbagai kebijakan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, antara lain kebijakan pembelian Surat berharga Negara (SBN) - Building Stock, dan lelang Swap valas (FX Swap).

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Bank Indonesia mengacu pada standar akuntansi yang berlaku bagi Bank Indonesia yang disebut Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI).

KAKBI disusun oleh Komite Penyusun KAKBI yang independen. KAKBI disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dengan penyesuaian untuk mengakomodasi keunikan bisnis entitas Bank Indonesia sebagai bank sentral yang tidak berorientasi mencari keuntungan, dan mengacu pada konvensi dan praktek akuntansi yang lazim di bank sentral.

B.1. Pernyataan Kepatuhan Terhadap KAKBI
Bank Indonesia menyusun Laporan Keuangan per 31 Desember 2016 berdasarkan KAKBI.

B.2. Penerapan Teori Entitas
Bank Indonesia menerapkan konsep teori entitas. Berdasarkan teori tersebut, laporan keuangan tidak memisahkan dengan tegas unsur liabilitas dan ekuitas. Bank Indonesia menempatkan seluruh pemangku kepentingan pada prioritas yang setara.

These policies are reflected in Bank Indonesia's Financial Statements and presented in the Statement of Financial Position, particularly on Financial Assets/Liabilities Related to Monetary Policy Implementation, and Currency in Circulation. Meanwhile, Interest Revenue/Expense, Revenue/Expense from Sharia-based Transactions, Net Revenue/Expense of Financial Transactions, Net Revenue/Expense of Foreign Currency Transactions, and Payment System Services Revenue/Expense are reflected in the Statement of Surplus Deficit.

In addition to the policy implemented in 2016, Bank Indonesia also continued to apply policies from the previous years, including those on the purchase of Government Marketable Securities (SBN) - Building Stock, and foreign exchange Swap auctions (FX swap).

B. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Bank Indonesia's financial statements are prepared in compliance with the prevailing accounting standard referred to as Bank Indonesia Financial Accounting Policies (KAKBI).

KAKBI was prepared by the independent KAKBI Drafting Committee, based on prevailing Financial Accounting Standards and adjusted to accommodate Bank Indonesia's uniqueness as a non-profit entity, also in compliance with generally accepted accounting conventions and practices for central banks.

B.1. KAKBI Compliance Statement
Bank Indonesia prepares its Financial Statement as of December 31, 2016 based on KAKBI.

B.2. Entity Theory Concept
Bank Indonesia applies the concept of entity theory. Based on this theory, the financial statements do not definitively separate the elements of liabilities and equities. Bank Indonesia places all of its stakeholders on an equal priority. Moreover, as a non-profit entity,

Selain itu, Bank Indonesia beraktivitas bukan untuk memperoleh keuntungan atau laba, sehingga penyusunan laporan keuangan Bank Indonesia bukan ditujukan untuk mengetahui kekayaan bersih (*net worth*) Pemerintah.

Oleh sebab itu, Bank Indonesia tidak menyajikan subklasifikasi ekuitas di Laporan Posisi Keuangan dan tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen laporan keuangan.

B.3. Konsep Pengakuan Penghasilan dan Beban
Pengakuan maupun pengukuran penghasilan dan beban mempertimbangkan kesesuaian dengan upaya pencapaian tujuan Bank Indonesia.

Bank Indonesia mengakui penghasilan dan beban yang berasal dari transaksi yang telah direalisasikan dan transaksi unik Bank Indonesia yang telah mencapai tujuan akhir dari pelaksanaan transaksi.

B.4. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah. Kecuali dinyatakan lain, informasi keuangan yang disajikan telah dibulatkan menjadi jutaan Rupiah yang terdekat.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep historis, kecuali untuk pos:

1. Emas yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi;
2. Instrumen keuangan pelaksanaan kebijakan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi;
3. Instrumen derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi;
4. Liabilitas imbalan kerja yang diukur sebesar nilai kini imbalan kerja dikurangi nilai bersih aset program.

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual.

B.5. Penggunaan Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan KAKBI mengharuskan manajemen membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang memengaruhi jumlah aset, liabilitas, penghasilan dan beban yang dilaporkan.

Bank Indonesia's financial statements are not aimed at determining the net worth of Bank Indonesia.

Therefore, Bank Indonesia do not present the equity sub-classification in the Statement of Financial Position and exclude the change in equity as a component of this financial statements.

B.3. Concept of Revenue and Expense Recognition
The measurement and recognition of revenue and expense are made aligned with Bank Indonesia's objectives.

The recognition is derived from transactions that have been realized and and met the ultimate objectives for unique transactions.

B.4. Financial Statements Preparation
The financial statements are presented in Rupiah. Unless otherwise stated, the financial information presented is rounded off in the nearest million Rupiah.

The financial statements are prepared based on a historical concept, except:

1. *Gold is measured at its fair value through revaluation reserves;*
2. *Policy-related financial instruments are measured at fair value through revaluation reserves;*
3. *Derivative instruments are measured at fair value through revaluation reserves;*
4. *Post employment benefit liabilities are measured at the present value of the post-employment benefit minus the pension fund's net asset value.*

The financial statement is prepared based on accrual basis.

B.5. Use of Determination, Estimation, and Assumptions

The preparation of financial statements in accordance with KAKBI requires the management to establish determination, estimation, and assumption, which may impact the reported assets, liabilities, revenues, and expenses.

B.6. Penjabaran Posisi dan Transaksi Dalam Valuta Asing, dan Penjabaran Posisi dan Transaksi Emas

Pada tanggal pelaporan, saldo pos moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang berlaku pada tanggal pelaporan. Selisih yang timbul dari penjabaran saldo pos moneter dalam valuta asing yang terkait dengan transaksi Bank Indonesia yang bersifat unik, disajikan sebagai selisih revaluasi pada kelompok liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan. Untuk selisih yang timbul dari penjabaran saldo pos moneter dalam valuta asing yang tidak terkait dengan transaksi Bank Indonesia yang bersifat unik, disajikan sebagai selisih kurs valuta asing dalam Laporan Surplus Defisit. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi valuta asing yang telah mencapai tujuan akhir kepemilikan aset dan liabilitas valuta asing, diakui sebagai surplus defisit tahun berjalan. Transaksi dalam valuta asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan kurs pada tanggal transaksi. Kurs tengah beberapa valuta asing utama terhadap Rupiah per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015:

B.6. Translating Foreign Currency Position and Transaction, and Translating Gold Position and Transaction

On the reporting date, the monetary-related balance posts denominated in foreign currency are translated to Rupiah using the prevailing Bank Indonesia's middle rate at the time of reporting. The discrepancies arising from Bank Indonesia's unique transactions are presented as revaluation reserves on liability groups in the Statement of Financial Position. The other discrepancies are presented as net result of foreign currency transactions within the Statement of Surplus Deficit. In addition, gains and losses arising from foreign currency transactions, which have achieved the substantive economic objective, are recognized as current surplus deficit. Foreign currency transactions are converted to Rupiah at the prevailing exchange rate on the date of the transaction. The middle rates for currencies against the Rupiah as of December 31, 2016 and December 31, 2015 were:

Uraian Valuta Asing	31 Desember 2016 (Rp Penuh) December 31, 2016 (IDR Full Amount)	31 Desember 2015 (Rp Penuh) December 31, 2015 (IDR Full Amount)	Description Foreign Currency
1 EUR	14,161.55	15,069.67	1 EUR
1 GBP	16,507.50	20,451.11	1 GBP
1 AUD	9,724.31	10,064.16	1 AUD
1 SDR	18,005.45	19,131.73	1 SDR
1 NZD	9,359.53	9,441.99	1 NZD
1 USD	13,436.00	13,795.00	1 USD
1 CAD	9,971.43	9,948.09	1 CAD
100 JPY	11,540.48	11,452.42	100 JPY

B.7. Transaksi Dengan Pihak Berelasi

Transaksi dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat harga, persyaratan, dan kondisi yang sama dengan pihak lain, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B.7. Transactions with Related Parties

Transactions with related parties, either conducted with or without the same level of prices, terms, and conditions of other parties, are stated in the Notes to the Financial Statement.

B.8. Emas

Emas adalah bagian dari cadangan devisa yang ditujukan antara lain sebagai penyangga likuiditas dalam mendukung pelaksanaan kebijakan moneter dan atau pemenuhan kewajiban dalam valuta asing.

B.8. Gold

Gold is Bank Indonesia's foreign reserves and is intended to serve as liquidity buffer in supporting monetary policy implementation and/or fulfilling obligations in foreign currency.

Emas yang dimiliki Bank Indonesia terdiri dari emas batangan dan hak kontraktual atas emas batangan.

Pada saat perolehan, emas diukur berdasarkan biaya perolehan. Pada tanggal pelaporan, saldo emas diukur berdasarkan nilai wajar yaitu harga emas yang tersedia di pasar London, yang dihitung ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah pada akhir periode pelaporan. Selisih yang timbul antara jumlah tercatat sebelumnya dengan jumlah hasil penjabaran saldo tersebut diakui sebagai selisih revaluasi pada kelompok liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan.

Keuntungan dan kerugian karena penghentian pengakuan diakui dalam Laporan Surplus Defisit pada tahun berjalan.

Transaksi emas dijabarkan ke Rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

B.9. Uang Dalam Peredaran

Uang dalam peredaran adalah uang Rupiah yang berada di luar penguasaan Bank Indonesia. Uang dalam peredaran merupakan salah satu transaksi unik yang hanya terdapat di Bank Indonesia dan tidak terdapat di entitas lain. Sesuai amanat Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga di Indonesia yang berwenang untuk mencetak dan mengedarkan Uang Rupiah. Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah dalam kegiatan perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan uang Rupiah yang pelaksanaannya didasarkan pada Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14/1/GBI/DPU/NK/MOU-5/MK.05/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka Perencanaan dan Pencetakan, serta Pemusnahan Uang Rupiah.

Kewenangan Bank Indonesia untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah, menyebabkan uang Rupiah yang dalam penguasaan Bank Indonesia memiliki fungsi yang berbeda dengan entitas lain. Bagi Bank Indonesia, uang Rupiah yang dimiliki merupakan salah satu alat untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Bank Indonesia's gold consists of gold bullion and contractual rights to gold bullion.

Upon acquisition, gold was measured based on its acquisition costs. On the reporting date, the balance of gold is measured based on its fair value, specifically the gold price at the London market, and then calculated into Rupiah using the middle rate at the end of the reporting period. The discrepancies between the previous carrying amount and the amount that resulted from the conversion of the balance is recognized as revaluation reserves derived from the liability group within the Statement of Financial Position.

Gains and losses derived from de-recognition are recognized within the current year's Statement of Surplus Deficit.

Gold transactions are translated to Rupiah using the exchange rate on the transaction date.

B.9 Currency in Circulation

Currency in circulation is the Rupiah currency that is beyond the control of Bank Indonesia. Currency in circulation is a unique transaction found only in no other entity except in Bank Indonesia. In accordance with the mandate stipulated within the Bank Indonesia Act and Act Number 7 of 2011 on Currency, Bank Indonesia is the sole institution in Indonesia that is authorized to print and circulate the Rupiah currency. For planning, printing, and culling of Rupiah currency, Bank Indonesia coordinates with the Government. The coordination is based on the Memorandum of Understanding between Bank Indonesia and the Government of the Republic of Indonesia Number 14/1/GBI/DPU/NK/MOU-5/MK.05/2012 dated June 27, 2012 pertaining to the Coordination of Planning, Printing, and Culling of the Rupiah currency.

Bank Indonesia's authority to issue and circulate Rupiah currency has put the control of Rupiah currency under Bank Indonesia as a function that set Bank Indonesia distinct from other entities. For Bank Indonesia, Rupiah currency is one of the tools used to maintain the payment system.

Ketika uang Rupiah berada di luar penguasaan Bank Indonesia maka muncul liabilitas Bank Indonesia kepada pemegang uang Rupiah. Namun liabilitas tersebut tidak menunjukkan klaim terhadap aset spesifik di Bank Indonesia dan tidak memiliki jatuh tempo. Uang dalam peredaran diakui sebagai liabilitas sebesar nilai nominal yang tercantum pada pecahan uang Rupiah.

When the Rupiah currency is beyond Bank Indonesia's control, liabilities will appear on holders of the Rupiah currency. However, this liability does not show claim to a specific asset in Bank Indonesia and does not have a maturity period. Currency in circulation is recognized as a liability amounting to the nominal value as specified on the Rupiah currency.

Uang dalam peredaran dihentikan pengakuannya jika dan hanya jika uang Rupiah: (a) dikuasai kembali oleh Bank Indonesia; atau (b) telah dinyatakan tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah akibat pencabutan dan penarikan uang Rupiah dari peredaran dan tidak dikuasai kembali Bank Indonesia setelah jangka waktu tertentu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Currency in circulation is de-recognized if, and only if, the Rupiah currency are: (a) taken over by Bank Indonesia; or (b) declared invalid as legal tender as a result of its revocation and is pulled out of circulation and is no longer under the control of Bank Indonesia beyond a given period, in accordance with the regulation.

B.10. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter

B.10. Financial Instruments Related to Policy

Bank Indonesia memiliki aset dan liabilitas keuangan yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan.

Some Bank Indonesia's assets and liabilities are used for implementing its policies.

B.10.1. Klasifikasi

Bank Indonesia mengklasifikasikan aset keuangan kebijakan setelah pengakuan awal ke dalam kategori sebagai berikut:

1. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi; atau
2. Diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.

B.10.1. Classification

Bank Indonesia classifies its financial assets into the following categories upon initial recognition:

1. *Measured at amortized cost; or*
2. *Measured at fair value through revaluation reserves.*

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kondisi berikut terpenuhi:

1. Aset dimiliki dengan model bisnis yang tujuannya untuk memperoleh arus kas kontraktual; dan
2. Arus kas kontraktual dari aset keuangan tersebut mengakibatkan pembayaran arus kas pada tanggal tertentu yang hanya terdiri atas pembayaran pokok dan bunga atas pokok yang belum dilunasi.

Financial assets are measured at amortized cost only if the following two conditions are met:

1. *The asset is held based upon a business model that is aimed at obtaining a contractual cash flow; and*
2. *The contractual cash flow from the financial asset with payments on specific dates that solely consist of principal repayments and interest on outstanding principal.*

Bank Indonesia mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan kebijakan setelah

Bank Indonesia classifies liabilities related to policy at amortized cost using the effective

pengakuan awal untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif, kecuali untuk derivatif yang diakui sebagai liabilitas diukur pada nilai wajarnya.

- B.10.2. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan dalam Rupiah**
- Aset dan liabilitas keuangan untuk pelaksanaan kebijakan dalam Rupiah bertujuan sebagai instrumen moneter dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Aset dan liabilitas dalam Rupiah yang digunakan Bank Indonesia untuk pelaksanaan kebijakan moneter terdiri dari:
1. SBN yang berbasis konvensional atau Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
 2. Tagihan kepada bank umum karena transaksi pembelian Surat-Surat Berharga dengan Janji untuk Dijual Kembali (*Reverse Repo*) sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
 3. Penempatan dana bank umum dalam rangka simpanan GWM yang harus dipenuhi oleh bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/14/PBI/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional.

interest method, except for derivatives which are recognized at fair value.

- B.10.2. Financial Assets and Liabilities Related to Policy Implementation denominated in Rupiah**
- Financial assets and liabilities related to policy implementation denominated in Rupiah seek to serve as monetary instruments within the context of implementing monetary policies to achieve and maintain the stability of Rupiah's value in accordance to the Central Bank Act. Assets and liabilities denominated in Rupiah used by Bank Indonesia to implement monetary policies, consist of:*
1. *Government Bond (SUN) are marketable securities denominated in Rupiah which are guaranteed by the Government of Indonesia.*
 2. *Claim on banks arising from securities sold under repurchase agreements (Reverse Repo) subject to the agreed price and tenor.*
 3. *Minimum Reserve Requirements that banks are required to fulfill in accordance with Bank Indonesia Regulation Number 15/15/PBI/2013 dated December 24, 2013 on Minimum Reserve Requirements for Banks in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Banks that was amended with Bank Indonesia Regulation Number 18/14/PBI/2016 dated August 22, 2016 on Fourth Amendment to Bank Indonesia Regulation Number 15/15/PBI/2013 dated December 24, 2013 on Minimum Reserve Requirement in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Commercial Banks.*

4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
 5. Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar bank.
 6. Penempatan Berjangka Rupiah (Term Deposit Rupiah) adalah penempatan dana Rupiah milik peserta Operasi Pasar Terbuka secara berjangka di Bank Indonesia.
 7. Penempatan Dana (DF) adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Indonesia bagi peserta Operasi Moneter yang akan menempatkan dananya di Bank Indonesia. Penempatan Dana memiliki jangka waktu satu hari kerja.
 8. Liabilitas karena transaksi penjualan Surat-Surat Berharga dengan Janji untuk Dibeli Kembali (repo) sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
 9. Instrumen derivatif valuta asing terhadap Rupiah, antara lain *swap* valuta asing dan *forward* valuta asing:
 - a. Transaksi *swap* valuta asing adalah transaksi pertukaran dua valas melalui pembelian atau penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan dengan bank yang sama dan pada kurs yang disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
 - b. Transaksi *forward* valuta asing terhadap Rupiah adalah transaksi jual/beli valuta asing terhadap Rupiah pada kurs yang telah disepakati dengan penyerahan valutanya dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
-
4. *Bank Indonesia Certificates (SBI) are marketable securities denominated in Rupiah, with a discount system, issued by Bank Indonesia as recognition of short-term debt.*
 5. *Bank Indonesia Certificates of Deposits (SDBI) are marketable securities denominated in Rupiah issued by Bank Indonesia as recognition of short-term debt and they can only be traded between banks.*
 6. *Term Deposits denominated in Rupiah are placements in Bank Indonesia denominated in Rupiah owned by Open Market Operations participants.*
 7. *Deposit Facilities (DF) are facilities provided by Bank Indonesia for Monetary Operations participants who intend to place their funds in Bank Indonesia. Deposit Facility has a tenor of one working day.*
 8. *Liabilities derived from securities sold under repurchase agreement (repo).*
 9. *Foreign Currency derivative instruments against Rupiah includes foreign currency swap and forward:*
 - a. *Foreign currency swap exchange transactions through cash buying or selling (spot) with periodic selling or repo (forward), simultaneously carried out with the same bank and at the agreed rate on the the transaction date.*
 - b. *Foreign currency forward transactions against Rupiah are foreign currency buying/selling transactions against Rupiah at the agreed rate with the handover of the foreign currencies more than 2 (two) working days after the transaction date.*

Aset dan liabilitas dalam Rupiah dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali untuk SBN dan instrumen derivatif yang diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.

Assets and liabilities related to policy denominated in Rupiah are classified as instruments and are measured by amortized cost, with the exception of T-bond and derivative instruments which are measured at fair value through revaluation reserves.

B.10.3. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan dalam Valuta Asing

Aset dan liabilitas dalam valuta asing yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk pelaksanaan kebijakan terdiri dari:

1. Penempatan dana bank umum dalam rangka simpanan GWM yang harus dipenuhi oleh bank sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/14/PBI/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional.
2. Penempatan Berjangka Valuta Asing (*Term Deposit Valas*) adalah penempatan dana dalam valuta asing milik peserta Operasi Pasar Terbuka secara berjangka di Bank Indonesia.
3. Aset dan liabilitas dalam valuta asing dalam rangka pengelolaan cadangan devisa, antara lain:
 - a. Penempatan dana pada bank di luar negeri dalam bentuk giro dan deposito.
 - b. Surat-Surat Berharga dalam valuta asing.
 - c. Surat Berharga Bank Indonesia dalam valuta asing.

B.10.3 *Financial Assets and Liabilities Related to Policy Implementation - Denominated in Foreign Currency*

Assets and liabilities denominated in foreign currency used by Bank Indonesia to implement policy, as follows:

1. *Minimum Reserve Requirements denominated in foreign currency that must be met by banks in accordance with Bank Indonesia Regulation Number 15/15/PBI/2013 dated December 24, 2013 on Minimum Reserve Requirement for Conventional Banks denominated in Rupiah and Foreign Currency as amended with Bank Indonesia Regulation Number 18/14/PBI/2016 dated August 22, 2016 on the Fourth Amendment to Bank Indonesia Regulation Number 15/15/PBI/2013 dated December 24, 2013 on Minimum Reserve Requirement in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Banks.*
2. *Term Deposits denominated in Foreign Currency are periodic placement of funds denominated in foreign currency owned by participants of Open Market Operations in Bank Indonesia.*
3. *Assets and liabilities denominated in foreign currency related to foreign exchange reserves, include:*
 - a. *Balances with banks outside of Indonesia in the form of demand and term deposits.*
 - b. *Marketable Securities denominated in foreign currency.*
 - c. *Bank Indonesia Marketable Securities denominated in foreign currency.*

- d. Liabilitas karena transaksi penjualan surat-surat berharga dengan janji untuk dibeli kembali (*repo*).
- e. Pinjaman Luar Negeri Bank Indonesia adalah setiap penerimaan yang diperoleh Bank Indonesia dalam rangka pengelolaan cadangan devisa untuk memperkuat neraca pembayaran yang diikat dengan suatu perjanjian pinjaman yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, atas nama dan menjadi tanggung jawab Bank Indonesia sebagai badan hukum.

- d. *Liabilities from repurchase agreement (repo) of marketable securities*
- e. *Bank Indonesia's Foreign Loans are any proceeds received by Bank Indonesia to be used for maintaining foreign exchange reserves and strengthening the balance of payments that are tied through an agreement, which must be repaid with certain conditions, on behalf of and for the responsibility of Bank Indonesia as the legal entity.*

Aset dan liabilitas dalam valuta asing dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali untuk aset Surat-Surat Berharga (SSB) dalam valuta asing yang diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.

Assets and liabilities denominated in foreign currency related to monetary policy are classified as instruments to be measured at amortized cost, except for foreign currency-denominated Marketable Securities (SSB) assets which are measured at fair value through revaluation reserves.

B.10.4. Pengakuan Awal

Pada saat pengakuan awal, Bank Indonesia mengakui aset dan liabilitas keuangan kebijakan pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

B.10.4 Initial Recognition

As its initial recognition, Bank Indonesia recognizes its assets and liabilities at fair value. In the event where the financial assets and liabilities are not measured at fair value through revaluation reserves, the value shall include the transaction value that can be directly attributed to the acquisition or issuance of these financial assets or financial liabilities.

B.10.5. Penghentian Pengakuan

Bank Indonesia menghentikan pengakuan aset keuangan kebijakan jika dan hanya jika:

1. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
2. Bank Indonesia mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas yang

B.10.5 De-recognition

Bank Indonesia derecognizes financial asset related to policy, if and only if:

1. *Contractual rights over the cash flow derived from these assets are terminated; or*
2. *Bank Indonesia transfers its contractual rights to accept cash flow or continues to possess the contractual rights and accept cash flow derived from the financial assets, but at the same time*

berasal dari aset keuangan tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan.

bearing the contractual liabilities to pass on the cash flow to one or more recipients as agreed upon.

Penghentian pengakuan aset termasuk karena penghapusbukuan.

Asset derecognition includes a write-off.

Penghentian pengakuan liabilitas dari laporan posisi keuangan dilakukan jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Bank Indonesia removes liabilities from the financial statements, if and only if, the financial liability is terminated, specifically when the liability established within the contract is released or cancelled or has expired.

B.10.6. Pengukuran Biaya Perolehan Diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan pada pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai aset.

B.10.6. Measurement at Amortized Cost

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount of financial assets or liabilities at initial recognition deducted by principal payments, added or deducted by cumulative amortization using the effective interest rate applied to the difference between the initial value and at maturity value, minus asset impairments.

Pengukuran berdasarkan biaya perolehan diamortisasi memperhitungkan penurunan nilai berdasarkan bukti objektif yang terjadi.

The measurement is based on the amortized cost and takes into account the impairment based on objective evidence that occurs.

B.10.7. Pengukuran Nilai Wajar Melalui Selisih Revaluasi

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

B.10.7. Fair Value Measurement Through Revaluation Reserves

Fair value is the price for selling an asset or transferring a liability in a transaction between the market players at the date of measurement.

Bank Indonesia menggunakan harga kuotasi di pasar aktif sebagai acuan nilai wajar aset keuangan. Jika pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Bank Indonesia menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan ketersediaan data yang memadai. Teknik penilaian mencakup penggunaan referensi harga pasar terkini untuk transaksi atau instrumen yang

Bank Indonesia uses active market quoted prices as financial asset's fair value benchmark. For inactive market, Bank Indonesia will use a valuation technique corresponding to situation and availability of appropriate data. The valuation technique uses the latest market price reference for similar transaction or instrument, the assumptions and the estimates which are

sejenis, penggunaan asumsi dan estimasi yang memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Pengukuran berdasarkan nilai wajar melalui selisih revaluasi memperhitungkan penurunan nilai berdasarkan bukti objektif yang terjadi.

B.10.8. Penyajian

Instrumen keuangan disajikan *netto* setelah memperhitungkan bunga yang masih harus dibayar atau yang akan diterima.

B.11. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan Berbasis Syariah

Bank Indonesia memiliki aset keuangan dan liabilitas keuangan berbasis syariah yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan.

B.11.1. Aset Keuangan Berbasis Syariah

Aset keuangan berbasis syariah yang dimiliki antara lain:

1. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) SBSN atau disebut Sukuk Negara merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing.
Bank Indonesia memiliki SBSN yang dapat diperjualbelikan dalam rangka *building stock*, untuk digunakan sebagai instrumen moneter yang akan menggantikan SBI sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SBSN jangka pendek atau Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS) diperoleh di pasar perdana sejak bulan Agustus 2011.
2. Tagihan dari transaksi repo syariah
Tagihan dari transaksi repo adalah tagihan Bank Indonesia yang timbul dari transaksi pembelian surat

relevant and can be observed and minimize the use of input that cannot be observed.

Fair value measurement through revaluation reserves takes into account the impairment based on the evidence.

B.10.8. Presentation

Financial instruments presentation considers both accrued and deferred interests.

B.11. Sharia-based Financial Assets and Liabilities

Bank Indonesia also uses its Sharia-based financial asset and liabilities for implementing its monetary policy.

B.11.1. Sharia-based financial assets

Sharia-based financial assets consist of:

1. *Sharia-based Government Marketable Securities (SBSN) or referred to as Sukuk Negara represents Government marketable securities which are issued on the basis of Sharia principles, as proof of ownership in an SBSN asset, both in Rupiah as well as in foreign currency.*

Bank Indonesia accumulates SBSN for building stock, to be used as a monetary instruments which will replace SBI in accordance with Act Number 1 of 2004 on State Treasury. Short-term SBSN or Sharia Treasury Notes (SPNS) is bought from the primary market since August 2011.
2. *Claims from repo transactions are claims arising from Sharia-based marketable securities purchase transactions with reverse repo*

berharga dengan kewajiban penjualan kembali (*reverse repo*) sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

B.11.2. Liabilitas keuangan berbasis syariah yang dimiliki Bank Indonesia

Liabilitas keuangan berbasis syariah yang dimiliki Bank Indonesia antara lain:

1. Penempatan dana bank dalam Rupiah maupun valuta asing dalam rangka simpanan GWM sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/16/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia.
3. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) adalah fasilitas simpanan yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada bank untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia dalam rangka standing facilities Syariah. FASBIS memiliki jangka waktu satu hari kerja.
4. Liabilitas karena penjualan surat berharga dengan perjanjian untuk dibeli kembali secara syariah.
5. Liabilitas karena penempatan berjangka berbasis syariah dalam valuta asing.

Liabilitas keuangan berbasis syariah diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada harga perolehan sesuai dengan perjanjian (syariah).

Sesuai dengan PKAK 01 tentang Kebijakan Akuntansi, penetapan perlakuan akuntansi transaksi Bank Indonesia yang bersifat syariah dan unik ditempuh dengan mempertimbangkan secara komprehensif: (i) tujuan Bank Indonesia; (ii) substansi ekonomi dan hukum dari transaksi; (iii) perlakuan akuntansi menurut standar akuntansi atas

obligations in accordance with the agreed price and terms.

B.11.2. Bank Indonesia's Sharia-based financial liabilities

Bank Indonesia's sharia-based financial liabilities consist of:

1. Placement of bank funds in Rupiah and foreign currency within the context of Minimum Reserve Requirements deposits as prescribed in Bank Indonesia Regulation Number 15/16/PBI/2013 dated December 24, 2013 on Rupiah and Foreign Currency Minimum Reserve Requirements for Sharia Banks and Sharia Business Units.
2. Sharia-based Bank Indonesia Certificates (SBIS) is a short-term Rupiah-denominated marketable security that is based on Sharia principles issued by Bank Indonesia.
3. Sharia-based Bank Indonesia Deposit Facilities (FASBIS) is a deposit facility provided by Bank Indonesia for banks to place their funds in Bank Indonesia in line with Sharia standing facilities. FASBIS has a tenor of one working day.
4. Liability arising from the sale of marketable securities sale with a repo agreement based on a Sharia basis.
5. Liability arising from Sharia-based foreign currency time deposits.

Sharia-based financial liability are recognized at the acquisition price in accordance with the (sharia) agreement.

In accordance with PKAK 01 on Accounting Policy, the accounting treatment for Bank Indonesia's unique and Sharia-based transactions was carried out by comprehensively assessing: (i) Bank Indonesia's objective; (ii) economic and legal substance from the transactions; (iii) accounting treatment for similar transactions

transaksi yang sejenis pada entitas lain; (iv) bisnis model transaksi syariah; (v) prinsip-prinsip akuntansi syariah yang diterima umum; dan (vi) pendapat pihak yang berwenang untuk menilai transaksi syariah.

Mempertimbangkan model bisnis transaksi dan kepemilikan instrumen keuangan kebijakan berbasis syariah oleh Bank Indonesia, maka transaksi syariah Bank Indonesia adalah transaksi unik, dan sesuai dengan Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (PDP2LK) maka perlakuan akuntansi instrumen keuangan syariah merujuk pada PKAK 06 tentang Instrumen Keuangan Kebijakan.

Aset dan liabilitas berbasis syariah dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali untuk SBSN yang diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.

B.12. Transaksi dengan *International Monetary Funds* (IMF)

Mengacu pada ketentuan perundang-undangan, Bank Indonesia mewakili NKRI sebagai anggota pada IMF, sehingga Bank Indonesia memiliki beberapa transaksi dengan IMF antara lain sebagai berikut:

B.12.1. Klaim Partisipasi Keanggotaan (*Quota*)
Klaim Partisipasi Keanggotaan (*Quota*) merupakan klaim Bank Indonesia kepada IMF yang terdiri dari setoran dalam valuta asing (*Reserve Tranche Position*) dan partisipasi dalam Rupiah (*Quota Subscription*). Partisipasi dalam Rupiah dilakukan dengan:

1. menerbitkan surat utang dalam Rupiah (*Promissory Notes*); dan
2. menyetor ke rekening IMF Nomor 1 (IMF Account Number 1) yang berada di Bank Indonesia.

Selain itu, Bank Indonesia menatausahakan rekening IMF Nomor 2 yang digunakan IMF untuk pembayaran beban operasional dalam Rupiah.

in other entities; (iv) Sharia-based transaction model; (v) generally-accepted Sharia accounting principles; and (vi) authorized opinion to evaluate Sharia transactions.

Provided that the Sharia-based transaction model and ownership of policy-related financial instrument by Bank Indonesia, Bank Indonesia's Sharia-based transactions are considered unique and are in compliance with Fundamental Principles for the Preparation and Presentation of Bank Indonesia Financial Statements (PDP2LK). Therefore, the accounting treatment refers to PKAK 06 on Policy Financial Instrument.

Sharia-based assets and liabilities related to monetary policy are measured at amortized cost, except for SSBSN which is measured at fair value through revaluation reserves.

B.12. Transaction with the *International Monetary Fund* (IMF)

According to the Act, Bank Indonesia represents the Republic of Indonesia as a member at the International Monetary Fund (IMF), whereby Bank Indonesia has a number of transactions with IMF that includes:

B.12.1. Membership Participation Claim (*Quota*)
Membership Participation Claim (*Quota*) is Bank Indonesia's claims to the IMF that consists of foreign currency deposits (*Reserve Tranche Position*) and participation in Rupiah (*Quota Subscription*). Participation in Rupiah is carried out by:

1. Issuing debt securities (*Promissory Notes*) denominated in Rupiah; and
2. Depositing in IMF Account Number 1 in Bank Indonesia.

Moreover, Bank Indonesia manages IMF Account Number 2 that is used by IMF to pay its operational expenses denominated in Rupiah.

Klaim partisipasi keanggotaan dan rekening milik IMF didenominasikan dalam SDR, sehingga Bank Indonesia melakukan penyesuaian nilai (*currency revaluation adjustment*) atas klaim partisipasi keanggotaan dalam Rupiah, *Promissory Notes* dan rekening IMF Nomor 1 dan 2 berdasarkan kurs yang ditetapkan IMF, sekurang-kurangnya setiap tanggal 30 April.

Claim on membership participation and IMF's account are denominated in SDR, thereby Bank Indonesia applies a currency revaluation adjustment on membership participation claims denominated in Rupiah, Promissory Notes and IMF Number 1 and 2 accounts based on the exchange rate determined by IMF, as of April 30 at the latest.

B.12.2. Hak Tarik Khusus (*Special Drawing Rights/SDR*)

Bank Indonesia memiliki Hak Tarik Khusus di IMF (*SDR Holdings*) yang merupakan potensi klaim Indonesia atas *freely usable currencies* (*SDR basket*) milik anggota IMF lainnya dan pemegang SDR lainnya yang telah ditetapkan. *SDR Holdings* tersebut timbul karena adanya alokasi Hak Tarik Khusus (*SDR Allocations*) atau pembelian SDR.

Aset dan liabilitas terkait alokasi Hak Tarik Khusus memperoleh/dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga yang sama. Atas pengelolaan Hak Tarik Khusus tersebut, IMF mengenakan biaya administrasi.

Pada saat perolehan, aset dan liabilitas karena partisipasi keanggotaan dan alokasi Hak Tarik Khusus diakui pada nilai wajar. Setelah pengakuan awal, aset dan liabilitas terkait dengan IMF diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal pelaporan:

1. Saldo aset dan liabilitas dalam valuta asing terkait dengan IMF dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Selisih antara jumlah tercatat sebelumnya dengan jumlah hasil penjabaran saldo tersebut diakui sebagai selisih revaluasi pada kelompok liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan.
2. Saldo partisipasi keanggotaan dalam Rupiah, *Promissory Notes* dan rekening IMF Nomor 1 dan 2 direvaluasi sesuai perubahan nilai tukar Rupiah secara relatif terhadap SDR pada tanggal laporan. Selisih antara jumlah tercatat

B.12.2 *Special Drawing Rights/SDR*

Bank Indonesia has Special Drawing Rights (SDR Holdings) at the IMF which represents potential claim on freely usable currencies (SDR basket) owned by other IMF members and other SDR holders. These SDR Holdings are due to Special Drawing Rights Allocations (SDR Allocations) or SDR purchases.

Asset and liabilities associated with Special Drawing Rights Allocations receives/bears interest at the same rate. The IMF also applies an administration fee on these Special Drawing Rights.

Upon acquisition, asset and liability related to membership participation and SDR Allocations is recognized at its fair value. After the initial recognition, these assets and liabilities are measured with the amortized acquisition cost.

At the end of the reporting period:

1. *The balance of assets and liabilities denominated in foreign currency related to the IMF is converted to Rupiah by using Bank Indonesia middle rate. The discrepancy over previously registered amounts with the balance amount is recognized as revaluation reserves within the Liabilities in the Statement of Financial Position.*
2. *The balance of membership participation in Rupiah, Promissory Notes, and IMF Number 1 and 2 account are revalued in accordance with changes in the Rupiah's exchange rate relative to the SDR at the reporting*

sebelumnya dengan jumlah hasil penyesuaian disajikan sebagai estimasi penyesuaian nilai.

Aset terkait dengan IMF dihentikan pengakuannya pada saat Bank Indonesia menarik dana atau membayar kewajiban, IMF memutuskan pembatalan atas keseluruhan atau sebagian alokasi SDR, atau saat NKRI keluar dari keanggotaan di IMF.

Liabilitas terkait dengan IMF dihentikan pengakuannya pada saat IMF menarik dana atau memutuskan pembatalan atas keseluruhan atau sebagian alokasi SDR, atau saat NKRI keluar dari keanggotaan di IMF.

Partisipasi keanggotaan disajikan di aset sebagai bagian pos "Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional" sebesar nilai bersih dari *Quota* dikurangi dengan *Promissory Notes* dan Rekening IMF Nomor 1 yang telah memperhitungkan estimasi penyesuaian nilai.

Hak Tarik Khusus di IMF disajikan di aset sebagai bagian pos "Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional" sebesar nilai tercatat yang telah memperhitungkan akrualisasi pendapatan dan beban bunga dalam SDR.

Alokasi Hak Tarik Khusus disajikan di liabilitas pada pos "Alokasi Hak Tarik Khusus dari Lembaga Keuangan Internasional" sebesar nilai tercatat.

Rekening IMF Nomor 2 disajikan di liabilitas sebagai bagian pos "Kewajiban Non Kebijakan" sebesar nilai tercatat yang telah memperhitungkan estimasi penyesuaian nilai.

B.13. Tagihan dan Liabilitas kepada Pemerintah

B.13.1. Tagihan kepada Pemerintah

Tagihan kepada Pemerintah merupakan tagihan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

date. The difference over previous registered amount is presented as the estimated adjusted value.

Assets related to the IMF are derecognized when Bank Indonesia withdraws the funds or pays off its liabilities, IMF terminates all or part of the SDR Allocations, or when Indonesia withdraws its IMF membership.

Liabilities related with the IMF are derecognized if the IMF withdraws or decides to cancel all or part of Indonesia's SDR allocations, or when Indonesia withdraws its IMF membership.

Membership participation is presented in assets as "Special Drawing Rights in International Financial Institutions" representing net value of the Quota, value-adjusted Promissory Notes and IMF Number.

The Special Drawing Rights at the IMF is presented in assets as "Special Drawing Rights in International Financial Institutions" post amounting to the registered value corresponding accrued income and interest expense in the SDR.

Special Drawing Rights allocation is presented in liabilities as "Special Drawing Rights Allocation from International Financial Institutions" amounting to the registered value.

IMF Number 2 account is presented in liabilities as "Non Policy Liabilities" with adjusted value.

B.13. Claims and Liabilities to the Government

B.13.1. Claims on the Government

Claims on the Government are claims that occurred prior to Bank Indonesia Act No 23, 1999.

Tagihan tersebut terutama berupa Surat Utang Pemerintah (SUP) yang merupakan surat pengakuan utang jangka panjang Pemerintah kepada Bank Indonesia, yang tidak dapat dipindahtangankan dan/atau diperjualbelikan kepada pihak lain dan pembayaran pokok beserta bunganya sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan.

Pada pengakuan awal, Bank Indonesia mengakui tagihan kepada Pemerintah sebesar nilai nominal. Setelah pengakuan awal, tagihan kepada Pemerintah diukur pada nilai tercatat. Bank Indonesia menghentikan pengakuan tagihan kepada Pemerintah pada saat diterima angsuran atau pelunasan.

B.13.2. Liabilitas Keuangan kepada Pemerintah

Bank Indonesia memiliki liabilitas kepada Pemerintah berupa:

1. Penempatan dana dalam Rupiah dan valuta asing milik Pemerintah di Bank Indonesia dalam bentuk giro sehubungan dengan fungsi Bank Indonesia sebagai pemegang kas Pemerintah. Bank Indonesia menerima dan mengirimkan transfer Rupiah dan valuta asing untuk dan atas nama Pemerintah.
Bank Indonesia memberikan remunerasi atas penempatan dana Pemerintah di Bank Indonesia. Tingkat bunga atas Rekening Kas Umum Negara (RKUN) Rupiah, RKUN valuta USD, dan RKUN valuta asing non USD per tahun adalah 0,1%. Sementara itu tingkat bunga atas rekening penempatan dalam Rupiah, rekening penempatan dalam valuta USD, dan rekening penempatan valas non USD per tahun adalah 65% dari suku bunga acuan. Tingkat bunga atas Rekening Pemerintah tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Bersama

Claims on the Government are claims that occurred prior to Bank Indonesia Act No 23, 1999 within the context of implementing the duties of Bank Indonesia. The claim is specifically in the form of a Government Bond (SUP) that represented the Government's long-term obligation to Bank Indonesia, which cannot be transferred and/or sold to other parties, whereby the principal and interest payment was made in accordance with the agreed terms.

Upon initial recognition, Bank Indonesia's claims to the government are equal to their nominal value. After its initial recognition, claims to the government are calculated based on its recorded value. Bank Indonesia derecognize claims to the Government once they are partially or fully settled.

B.13.2. Liabilities to the Government

Bank Indonesia has liabilities to the Government which include:

1. Government's demand deposit denominated in Rupiah and foreign currency in Bank Indonesia which validates Bank Indonesia as the Government's cashier. On behalf of Government, Bank Indonesia receives and transfers Government's funds.

Bank Indonesia bears a remuneration on the balance of Government's fund. The annual interest rate on Rupiah State General Cash Account (RKUN), USD RKUN, and non-USD RKUN is 0.1% p.a. Meanwhile, the interest rate on other Rupiah accounts, USD accounts, and non-USD accounts are 65% of the benchmark rate. The interest rate on the Government account is set based on the Minister of Finance and the Governor of Bank Indonesia's Joint Decree that regulates coordination of State Funds and for the first time, based on the Minister of Finance and

Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang mengatur mengenai koordinasi pengelolaan Uang Negara dan untuk pertama kali berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 17/KMK.05/2009 dan Nomor 11/3/KEP.GBI/2009 tanggal 30 Januari 2009 perihal Koordinasi Pengelolaan Uang Negara.

Pada pengakuan awal, Bank Indonesia mengakui giro milik Pemerintah sebagai liabilitas sebesar nilai nominal. Setelah pengakuan awal, giro milik Pemerintah diukur pada nilai nominal. Bank Indonesia menghentikan pengakuan giro milik Pemerintah pada saat terdapat penarikan dana.

2. Pinjaman yang diterima oleh Bank Indonesia dari Pemerintah c.q. Kemenkeu berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Pada pengakuan awal, Bank Indonesia mengakui pinjaman dari Pemerintah sebagai liabilitas sebesar nilai nominal. Setelah pengakuan awal, pinjaman dari Pemerintah diukur pada nilai nominal dikurangi angsuran.

Bank Indonesia menghentikan pengakuan pinjaman dari Pemerintah pada saat terdapat angsuran atau pelunasan.

B.14. Tagihan kepada Bank

Tagihan kepada bank merupakan tagihan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Terdapat beberapa jenis kredit yang diberikan, antara lain:

1. Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) adalah kredit atau pembiayaan kepada bank yang sumber dananya berasal dari Bank Indonesia untuk mendukung pelaksanaan program Pemerintah.
2. Pinjaman Subordinasi (*subordinated loan*) selanjutnya disebut SOL merupakan kredit yang diberikan kepada bank dalam rangka penyehatan bank.

the Governor of Bank Indonesia's Joint Decree Number 17/KMK.05/2009 and Number 11/3/KEP.GBI/2009 dated January 30, 2009 on Coordinated Management of State Funds.

Upon initial recognition, Bank Indonesia recognizes the Government's demand deposits as a liability at its nominal value.

Bank Indonesia derecognizes the Government's demand deposits once the funds are withdrawn.

2. *Bank Indonesia's borrowings from the Government c.q. Ministry of Finance are based on Act Number 13 of 1968 on the Central Bank.*

Upon initial recognition, Bank Indonesia recognizes borrowings from the Government as liabilities at their nominal value. After their initial recognition, borrowings from the Government are calculated by their nominal value less installments. Bank Indonesia derecognizes borrowings from the Government once they are partially or fully settled.

B.14. Claims on Banks

Claims on Banks represent claims on loans that occurred prior to Bank Indonesia Act enactment within. There are a number of loans, which include:

1. *Bank Indonesia Liquidity Credit (KLBI) is a loan or financing for banks from Bank Indonesia to support the implementation of the Government's program.*
2. *Subordinated Loan or referred to as SOL is a loan extended to banks for bank restructuring programs.*

Sejak diterbitkan Undang Undang Bank Indonesia, Bank Indonesia tidak diperbolehkan memberikan kredit berupa SOL dan KLBI.

Namun demikian, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan untuk menjalankan fungsinya sebagai *lender of the last resort*, antara lain:

1. Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) adalah penyediaan pendanaan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam kedudukan bank sebagai peserta Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dan peserta Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), yang dilakukan dengan cara *Repurchase Agreement* (Repo) surat berharga yang harus diselesaikan pada hari yang sama dengan penggunaan.
2. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) adalah fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek yang dialami oleh bank.
3. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) adalah fasilitas pendanaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek yang dialami oleh bank. Tagihan kepada bank yang berasal dari pelaksanaan kebijakan moneter, misalnya tagihan karena transaksi pembelian surat-surat berharga dengan janji untuk dijual kembali (*reverse repo*) tidak termasuk ruang lingkup pos ini. Akuntansi untuk tagihan kepada bank karena pelaksanaan kebijakan moneter diatur sebagaimana poin B.10 dan B.11.

Pada pengakuan awal, Bank Indonesia mengakui tagihan kepada bank sebesar nilai nominal. Setelah pengakuan awal, tagihan kepada bank diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Bank Indonesia menghentikan pengakuan tagihan kepada bank pada saat diterima angsuran atau pelunasan.

B.15. Penyertaan

Bank Indonesia melakukan penyertaan modal pada lembaga domestik dan internasional. Bank Indonesia hanya dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan dengan persetujuan DPR-RI.

According to new Bank Indonesia Act, Bank Indonesia can no longer extend the loans in SOL and KLBI.

However, Bank Indonesia may provide financing facilities in the term of lender of the last resort, which includes:

1. *Intraday Liquidity Facility (FLI) is a funding facility from Bank Indonesia to banks which participate in the Bank Indonesia Real Time Gross Settlement System (BI-RTGS) and the Bank Indonesia National Clearing System (SKNBI), carried out through marketable securities Repurchase Agreement (Repo) that must be settled within the same day.*
2. *Short-Term Funding Facility (FPJP) is a funding facility from Bank Indonesia for banks to overcome their short-term funding needs.*
3. *Short-Term Sharia Funding Facility (FPJPS) is a Sharia-based funding facility from Bank Indonesia for banks to overcome their short-term funding needs.*

Claims on banks related to monetary policy such as claims from securities sold under repurchase agreement (reverse repo) are excluded from this post. Accounting for claims on banks related to monetary policy is prescribed in number B.10 and B.11.

Upon its initial recognition, Bank Indonesia recognizes claims on banks at nominal value. Following initial recognition, the claims are measured at its amortized cost. Bank Indonesia derecognizes claims on banks once they are partially or fully paid off.

B.15. Participating Interest in Domestic and International Institutions

Bank Indonesia places participating interest in domestic and international institutions. Bank Indonesia only places participating interest in a legal entity or other entities which can support its tasks and subjects to prior approval from the House of Representatives (DPR).

Pada pengakuan awal, Bank Indonesia mencatat penyertaan sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, Bank Indonesia mengukur penyertaan pada biaya perolehan. Bank Indonesia menghentikan pengakuan penyertaan pada saat Bank Indonesia melepaskan kepemilikan penyertaan.

B.16. Aset Keuangan Non Kebijakan Lainnya

Bank Indonesia memiliki aset keuangan non kebijakan lainnya yang tidak secara langsung digunakan dalam pelaksanaan kebijakan atau yang berasal dari transaksi yang dilaksanakan berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, antara lain: uang asing, dan berbagai tagihan kepada pihak selain bank dan Pemerintah.

Pada pengakuan awal, Bank Indonesia mencatat aset keuangan non kebijakan lainnya sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, Bank Indonesia mengukur aset keuangan lain pada biaya perolehan.

Bank Indonesia menghentikan pengakuan aset keuangan non kebijakan lainnya pada saat Bank Indonesia melepaskan kepemilikan aset keuangan atau penerimaan angsuran/pelunasan tagihan.

B.17. Aset Tetap dan Lainnya

Bank Indonesia memiliki tanah, gedung, kendaraan dan berbagai peralatan teknologi informasi yang dikelompokkan sebagai aset tetap dan aset tidak berwujud.

Pada pengakuan awal, Bank Indonesia mencatat aset tetap dan aset tidak berwujud sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, Bank Indonesia menggunakan model biaya untuk mengukur aset tetap dan aset tidak berwujud.

Atas aset tetap dan aset tidak berwujud dilakukan penyusutan dan amortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang masa manfaatnya. Pengeluaran yang menambah masa manfaat aset diakui sebagai penambah biaya perolehan aset.

Bank Indonesia menghentikan pengakuan aset tetap dan aset tidak berwujud pada saat aset dimaksud telah habis masa manfaatnya, dijual, dihibahkan, ditukar, ditarik dari pemakaian atau hilang.

Bank Indonesia records its placements at acquisition cost and derecognizes them once it ceased its participation in the interest.

B.16. Other Financial Assets

Bank Indonesia has financial assets that are not related to policy or derived from transaction conducted in accordance with Act Number 13 of 1968 on the Central Bank, including: gold coins, foreign currency, and various claims from parties other than banks and the Government.

Bank Indonesia records other financial assets at acquisition cost. Following initial recognition, Bank Indonesia measures other financial assets at acquisition cost.

Bank Indonesia derecognizes other financial assets by releasing its ownership or upon receiving installment of paid off.

B.17. Tangible and Intangible Assets

Bank Indonesia has lands, buildings, vehicles, and a number of information technology hardware and software that are categorized as fixed assets.

Upon its initial recognition, Bank Indonesia records fixed assets at acquisition cost. Following initial recognition, Bank Indonesia adopts cost models to calculate tangible and intangible fixed assets.

Depreciation and amortization are applied to fixed assets by using a straight-line method throughout their useful life. Expenditures that extend the useful life of the assets are recorded as additional asset acquisition cost.

Bank Indonesia derecognizes fixed assets when the useful life of these assets expire or when they are sold, donated, replaced, withdrawn from use, or lost.

B.18. Kewajiban Non Kebijakan

Bank Indonesia memiliki berbagai kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, antara lain: rekening giro milik lembaga keuangan internasional, kewajiban pajak, dan kewajiban imbalan pascakerja.

B.19. Selisih Revaluasi

Selisih revaluasi mencerminkan perubahan kumulatif nilai wajar aset dan liabilitas Bank Indonesia atau dampak keuangan dari transaksi unik Bank Indonesia yang belum mencapai tujuan akhir pelaksanaan transaksi tersebut.

Selisih revaluasi diakui apabila terjadi perubahan nilai wajar aset dan liabilitas Bank Indonesia dan/atau perubahan nilai Rupiah dari aset dan liabilitas Bank Indonesia dalam valuta asing, dan/atau terjadi keuntungan dan kerugian dari transaksi unik Bank Indonesia yang substansi tujuan ekonominya belum tercapai pada saat transaksi tersebut dilaksanakan, seperti selisih penjabaran mata uang sebagai dampak penyesuaian komposisi aset valuta asing. Selisih revaluasi direalisasi menjadi penghasilan atau beban tahun berjalan ketika tujuan akhir atau substansi tujuan ekonominya telah tercapai.

B.20. Modal dan Cadangan

B.20.1. Modal

Modal diakui dan disajikan sebesar modal Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B.20.2. Cadangan

Penambahan dan pengurangan Cadangan Umum, Cadangan Tujuan, serta Alokasi Surplus/Defisit periode berjalan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B.21. Pendapatan dan Beban Bunga

Untuk menampung pendapatan dan beban yang bersifat bunga Rupiah maupun valuta asing yang merupakan implikasi dari pelaksanaan kebijakan moneter berbasis konvensional. Termasuk dalam pos ini antara lain beban bunga dari instrumen

B.18. Other Liabilities

Bank Indonesia has various liabilities that are not related to policy implementation, such as demand deposit of international financial institutions, tax payables, and employee benefit liabilities.

B.19. Revaluation Reserves

Revaluation reserves reflect the cumulative change in the fair value of Bank Indonesia's assets and liabilities as an impact of Bank Indonesia's unique transactions which have not met their ultimate objectives.

Revaluation reserves are recognized when changes occurs in the fair value of assets and liabilities of Bank Indonesia and/or changes in the Rupiah's value of assets and foreign currency-denominated Bank Indonesia's liabilities, and/or gain or loss on Bank Indonesia's unique transaction where its substantive economic objective has not been achieved at the time when the transaction is executed, such as the impact of currency conversion differences due to composition shifting of foreign currency assets. Revaluation reserves are recognized as revenue or expense when the substantive economic objective have been achieved.

B.20. Capital and Reserves

B.20.1 Capital

Bank Indonesia's capital is recognized and presented in the amount stated within the regulations.

B.20.2. Reserves

The increase and decrease of the General Reserves, Statutory Reserves, as well as surplus/deficit allocation on current period are calculated based on the Act.

B.21. Interest Revenue and Expenses

This post is intended to accommodate both interest revenue and expenses denominated in Rupiah and foreign currency as a result from the implementation of monetary policies. It includes interest of policy-related debt instrument, remuneration expenses

keuangan kebijakan yang berbasis utang, beban remunerasi atas giro wajib minimum bank umum dan penerimaan bunga dari surat berharga yang dimiliki.

Pendapatan dan beban bunga diakui dalam Laporan Surplus Defisit secara basis akrual.

B.22. Pendapatan dan Beban Imbalan

Untuk menampung pendapatan dan beban imbalan dalam Rupiah maupun valuta asing yang merupakan implikasi dari pelaksanaan kebijakan moneter berbasis syariah. Termasuk dalam pos ini antara lain imbalan atas instrumen keuangan kebijakan berbasis syariah, dan penerimaan bagi hasil surat berharga syariah yang dimiliki.

Pendapatan dan beban imbalan diakui dalam Laporan Surplus Defisit secara basis akrual, kecuali imbalan dari SBIS dan FASBIS yang diakui secara basis kas.

B.23. Transaksi Aset Keuangan

Untuk menampung pendapatan yang bersifat keuntungan/*capital gain* (*netto* setelah memperhitungkan kerugian), antara lain keuntungan dari transaksi penjualan emas, surat berharga, dan transaksi derivatif.

B.24. Selisih Kurs Transaksi Valuta Asing

Untuk menampung pendapatan yang bersifat keuntungan selisih kurs (*netto* setelah memperhitungkan kerugian) yang berasal dari keuntungan transaksi valuta asing yang telah mencapai tujuan akhir.

B.25. Penghasilan dan Beban Pengelolaan Sistem Pembayaran

Untuk menampung pendapatan dan beban dari pengelolaan sistem pembayaran tunai dan non tunai.

Pendapatan pengelolaan sistem pembayaran antara lain berasal dari pengenaan biaya tunai dan transfer non tunai, termasuk pengenaan sanksi administratif.

Beban pengelolaan sistem pembayaran antara lain berasal dari pengadaan bahan uang, biaya cetak dan pagedaran uang Rupiah, serta biaya penyelenggaraan sistem pembayaran non tunai. Tidak termasuk beban depresiasi mesin dan amortisasi *software*.

from GWM, and interests gained from marketable securities owned.

Interest revenue and expenses are recognized on an accrued basis in the Statement of Surplus Deficit.

B.22. Sharia-based Transaction Revenue and Expenses

This post is intended to accommodate revenue and expenses derived from Sharia-based transactions in order to implement Sharia-based monetary policy. It includes profit sharing from Sharia-based financial instruments and fees from Sharia-based securities.

Revenue and expenses are recognized on an accrual basis in the Statement of Surplus Deficit, except profit sharing revenue derived from Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS) and Bank Indonesia Sharia Facilities (FASBIS) which are recognized on a cash basis.

B.23. Revenue From Financial Transaction

This post is intended to accommodate capital gain from the sales of gold, marketable securities, and derivative transactions.

B.24. Foreign Currency Transactions

This post is intended to accommodate net capital gain derived from foreign currency transactions that have achieved their ultimate objective.

B.25. Revenue and Expenses from Payment System Services

This post is intended to accommodate revenue and expenses of payment system services.

Payment System Services revenue consists of transfer fees and administrative charges.

Meanwhile, Payment System Services expenses consist of procurement for currency materials, currency printing and circulation, as well as clearing system/RTGS expenses. However, machineries depreciation and software amortization expenses are excluded.

B.26. Penghasilan dan Beban Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

Untuk menampung penghasilan dan beban berasal dari pengaturan kebijakan makroprudensial, perluasan akses keuangan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta *surveillance* sistem keuangan.

Penghasilan pengaturan dan pengawasan makroprudensial berasal dari pengenaan sanksi kepada bank yang melanggar ketentuan makroprudensial.

Beban pengaturan dan pengawasan makroprudensial antara lain berasal dari pengaturan kebijakan makroprudensial dan stabilitas sistem keuangan.

B.27. Pendapatan dari Penyediaan Pendanaan

Untuk menampung pendapatan dari fungsi Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort*, serta pemberian kredit/pinjaman kepada perbankan dan Pemerintah berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

B.28. Beban Remunerasi kepada Pemerintah

Untuk menampung beban bunga (jasa giro) yang diberikan atas giro Pemerintah dalam Rupiah maupun valuta asing.

B.29. Imbalan Kerja

Bank Indonesia menyelenggarakan program imbalan kerja untuk pegawai yang terdiri dari imbalan kerja dan imbalan pascakerja. Imbalan kerja terdiri dari imbalan kerja jangka pendek dan jangka panjang. Imbalan pascakerja terdiri dari program pensiun dan imbalan pascakerja lainnya. Mulai 1 Januari 2015, Bank Indonesia memiliki dua jenis program pensiun yaitu program imbalan pasti untuk semua pegawai yang telah terdaftar sebagai peserta program pensiun imbalan pasti dan program pensiun iuran pasti untuk semua pegawai baru yang diangkat mulai 1 Januari 2015. Tidak ada kepesertaan ganda pada kedua program pensiun tersebut. Bank Indonesia menerapkan PSAK 24 (Revisi 2013) tentang imbalan kerja untuk pencatatan dan pelaporan program imbalan kerja.

B.26. Revenue and Expenses of Macroprudential Regulation and Supervision

This post is intended to accommodate revenue and expenses of macroprudential regulation and supervision, expanding financial access and Small, and Medium Enterprises (SME), as well as for financial surveillance system.

The revenue is derived from charges imposed on banks that violate macroprudential regulations.

Meanwhile, the expenses incur from, macroprudential policy formulation and financial system stability.

B.27. Revenue from Providing Fund

This post is intended to accommodate interest income received by Bank Indonesia as the lender of the last resort, for loans to banks and the Government in accordance with Act Number 13 of 1968 on the Central Bank.

B.28. Remuneration on Government Demand Deposits

This post is intended to accommodate interest expense on Government's demand deposits denominated both in Rupiah and foreign currency.

B.29. Employee Benefits

Bank Indonesia provides benefit program for its employees that cover employment benefits and post-employment benefits. Employment benefits consist of short-term and long-term benefits. Post-employment benefits consist of pension program and other benefits. As of January 1, 2015, Bank Indonesia has two schemes of pension programs, which are fixed employment program for all employees that had been registered as participants of the fixed pension benefit program and contribution pension program for all new employees that were inducted starting from January 1, 2015. There is no dual participation in these two pension programs. Bank Indonesia applies the PSAK 24 (2013 Revision) on Employee Benefits for recording and reporting of employee benefits program.

Jumlah beban dan liabilitas imbalan kerja dihitung berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan secara berkala. Beban dan liabilitas imbalan kerja ditentukan secara terpisah untuk masing-masing program dengan menggunakan metode penilaian aktuaris *projected unit credit*. Estimasi liabilitas imbalan kerja disajikan di pos Kewajiban Non Kebijakan dalam Laporan Posisi Keuangan. Keuntungan/kerugian aktuarial disajikan di pos Selisih Revaluasi dalam Laporan Posisi Keuangan.

B.30. Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf s Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, surplus Bank Indonesia merupakan objek Pajak Penghasilan (PPH). Oleh karena itu, sejak tanggal 1 Januari 2009 Bank Indonesia menjadi Wajib Pajak.

Pengaturan pengenaan PPh atas surplus Bank Indonesia diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan, sebagai berikut:

1. Surplus Bank Indonesia yang merupakan objek pajak penghasilan adalah surplus Bank Indonesia menurut laporan keuangan audited setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan Undang Undang Pajak Penghasilan dengan memperhatikan karakteristik Bank Indonesia.
2. Ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pembayaran pajak penghasilan atas surplus Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 100/PMK.03/2011 tanggal 11 Juli 2011 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 86/PMK.010/2015 tanggal 27 April 2015

Periodically, employment benefit expenses and liabilities are calculated based on the calculations made by an independent actuary. The expenses and liabilities are separately set for each plan by using projected unit credit method. The estimated liability for employment benefits is presented in the Other Liabilities post within the Statement of Financial Position. Actuarial gains/losses are presented in Revaluation Reserves post in the Statement of Financial Position.

B.30. Income Tax

Based on Article 4 section (1) letter s of Act Number 36 of 2008 on the Fourth Amendment to Act Number 7 of 1983 on Income Tax, Bank Indonesia's surplus is subject to Income Tax (PPH). Accordingly, Bank Indonesia has been registered as taxpayer since January 1, 2009.

The governing of the imposition of Income Tax on Bank Indonesia's surplus is prescribed further in Article 7 of Government Regulation Number 94 of 2010 dated December 30, 2010 on Taxable Income Calculation and Income Tax Settlement for the Current Year as follow:

1. *Bank Indonesia's surplus, which is an income tax object, represents Bank Indonesia's surplus as presented in the (Audited) Annual Financial Statement after fiscal adjustments or corrections in accordance with the Income Tax Laws by taking Bank Indonesia's characteristics into consideration.*
2. *Procedures for income tax calculation and payment over Bank Indonesia's surplus as mentioned in Article 7 (1) are regulated in the Minister of Finance's Regulation (PMK) Number 100/PMK.03/2011 dated July 11, 2011 as revised through PMK Number 86/PMK.010/2015 dated April 27, 2015 on Changes to the Minister of Finance's Regulation Number 100/*

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Surplus Bank Indonesia.

PMK.03/2011 on Procedures for Tax Calculation and Payment Over Bank Indonesia's Surplus.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan disebutkan bahwa karakteristik Bank Indonesia terkait surplus antara lain berupa selisih kurs, penyisihan penurunan nilai aset, dan penyusutan aset tetap.

Subsequently, within the notes for Article 7 Government Regulation Number 94 of 2010 dated December 30, 2010 on Taxable Income Calculation and Income Tax Settlement for the Current Year, it is stipulated that Bank Indonesia's characteristics related to surplus include the exchange rate differences, allowance for impairment of financial assets, and fixed assets depreciation.

Pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diakui sebesar jumlah pajak terutang, yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak (peraturan pajak) yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal Laporan Posisi Keuangan.

Current tax for both current and previous periods is recognized as the amount of tax payable, calculated based on the prevailing tax rate (tax regulation) or the substantively effective rate on the date of the Statement of Financial Position.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan atau banding, pada saat keputusan atas keberatan atau banding tersebut telah ditetapkan.

Tax return is recognized once the tax assessments are received or a decision over the objection or appeal has been reached.

Bank Indonesia telah mengadopsi PSAK 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Berdasarkan PSAK 46, entitas menyajikan dampak pajak penghasilan baik kini maupun tangguhan terhadap surplus defisit tahun berjalan.

Bank Indonesia refers to PSAK 46 on Income Tax Accounting. In accordance with PSAK 46, income tax is calculated based on the accounting surplus (deficit) for the current year.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif pajak (peraturan pajak) yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal Laporan Posisi Keuangan. Semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk pelaporan keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan Metode Aset dan Liabilitas. Metode ini juga mengatur untuk mengakui manfaat pajak tangguhan atas kompensasi rugi fiskal.

Deferred tax is calculated based on the prevailing tax rate at the time of asset recovery or liability retirement, using the prevailing or substantive tax rate on the date of the Statement of Financial Position. All temporary discrepancies between the recorded assets and liabilities and respective tax treatments are recognized as deferred taxes using the Asset and Liability Method. This method also recognizes deferred tax benefits over tax loss compensation.

C. MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko di lingkungan Bank Indonesia dilaksanakan secara *Enterprise Wide Risk Management* (EWRM) mencakup tugas pokok Bank Indonesia. Tugas pokok tersebut meliputi bidang moneter, sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan, dan kegiatan operasional pendukung (*enabler*). Pelaksanaan tugas pokok dilakukan secara terintegrasi dalam rangka menjaga kredibilitas kebijakan dan kesinambungan keuangan Bank Indonesia. Implementasi manajemen risiko mengacu pada kerangka kerja (*framework*) yang digunakan secara luas secara internasional (*best practices*).

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan manajemen risiko, kerangka kerja tersebut menerapkan prinsip jenjang pengaman risiko melalui konsep *three lines of defense*. Pengendalian pertama dilakukan secara langsung oleh unit kerja yang melaksanakan proses bisnis. Pengaman kedua dilakukan unit kerja yang memiliki fungsi manajemen risiko secara independen dari unit kerja pelaksana proses bisnis. Pengaman terakhir dilakukan unit kerja yang melaksanakan fungsi audit intern sebagai *quality assurance* bahwa pengendalian risiko dapat dilaksanakan dengan efektif.

Penerapan manajemen risiko berdasarkan kerangka kerja di atas dilakukan melalui beberapa tahapan pengendalian risiko. Pertama, penilaian lingkungan internal berkaitan dengan filosofi, kode etik, dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) sebagai kondisi yang mendasari proses bisnis. Kedua, penetapan tujuan strategis berdasarkan preferensi risiko (*risk appetite*). Ketiga, tahapan pada proses bisnis mencakup identifikasi risiko, asesmen tingkat risiko, respon risiko, dan pengendalian risiko. Keempat, pemantauan kegiatan manajemen risiko berdasarkan sistem informasi manajemen risiko.

Berdasarkan tugas pokok Bank Indonesia, kegiatan pengelolaan moneter menghadapi risiko berupa tingginya ketidakpastian di pasar internasional. Beberapa peristiwa tidak dapat diantisipasi dengan baik oleh pelaku pasar seperti hasil referendum

C. RISK MANAGEMENT

Bank Indonesia applies Enterprise Wide Risk Management (EWRM) that encompasses Bank Indonesia's main duty. It cover the areas of monetary, payment system, financial system stability, and supporting activities (enabler). The duties are implemented in an integrated manner in order to maintain Bank Indonesia's policy credibility and financial sustainability. BI risk management is based on the generally-accepted practices.

To improve risk management effectiveness and efficiency, the framework applies three lines of defense concept, carried out by the department running the business process, an independent risk management function, and an internal audit function as quality assurance to ensure an effective risk control.

Risk management is applied based on a framework through a number of control stages. First, the internal environment assessment which covers the philosophy, ethics code, and human resource competency as conditions of the underlying business process. Second, strategic goals based on risk appetite. Third, stages on the business process that cover identification, level assessment, risk response, and risk control. Fourth, monitoring based on risk management information system.

Based on Bank Indonesia's main duties, monetary management activities are exposed to risks such as volatility in the international markets. A number of events cannot be adequately anticipated by market practitioners, for instance Brexit referendum result

keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa (*Brexit*) dan hasil pemilihan presiden AS. Peristiwa tersebut menimbulkan tekanan cukup besar di pasar domestik sehingga volatilitas Rupiah mengalami peningkatan. Selain itu, kondisi politik domestik sempat menghangat terkait Pilkada Jakarta yang menyebabkan pasar keuangan dalam negeri rentan terhadap pembalikan modal asing (*capital reversal*). Mitigasi risiko dilakukan melalui bauran kebijakan moneter yang kredibel dan upaya di pasar valas domestik untuk mengurangi volatilitas Rupiah yang berlebihan.

Dalam pengelolaan devisa, Bank Indonesia menerapkan prinsip keamanan (*security*), prinsip kesiagaan memenuhi kewajiban segera (*liquidity*), tanpa mengabaikan prinsip untuk memperoleh pendapatan yang optimal (*profitability*). Tiga prinsip tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara optimalisasi pengelolaan devisa dan terpenuhinya kebutuhan likuiditas. Optimalisasi pengelolaan devisa dilakukan melalui kebijakan strategis *Strategic Asset Allocation* yang ditetapkan Dewan Gubernur. Sementara, pemenuhan kebutuhan likuiditas dilakukan dengan mencadangkan jumlah Cadangan Devisa untuk mengantisipasi kebutuhan valas pemerintah dan upaya stabilitas nilai tukar Rupiah.

Kegiatan pengelolaan devisa menghadapi beberapa risiko, terutama risiko pasar dan risiko kredit. Risiko pasar timbul akibat kenaikan yield pada surat utang pemerintah AS dan pelemahan mata uang non USD di pasar keuangan internasional sejalan dengan hasil pemilihan presiden AS yang meningkatkan ketidakpastian arah kebijakan AS, pemulihan ekonomi dunia yang masih lemah sejalan dengan perlambatan ekonomi negara-negara maju selain AS, serta masih lambatnya rebalancing ekonomi dan penyehatan sektor keuangan di Tiongkok. Mitigasi risiko pasar dilakukan melalui pelaksanaan strategi taktikal secara disiplin dalam Forum Investasi yang dilakukan secara periodik. Risiko kredit berpotensi muncul akibat penurunan kemampuan penerbit SSB atau penurunan kinerja counterparty. Pengendalian dilakukan melalui penetapan kriteria issuer SSB dan pemantauan terhadap *credit rating counterparty* secara ketat.

which led the United Kingdom to exit from the EU and the US presidential election result. These events hit the domestic market, thereby increasing the Rupiah's volatility. In addition, political condition related to Jakarta Governor elections has exacerbated to a capital reversal. Risk mitigation is carried out by a credible monetary policy and efforts in the foreign exchange market to reduce excessive Rupiah volatility.

In managing foreign currency reserves, Bank Indonesia applies the principles of security and liquidity, while keeping the principles of optimum profitability. These three principles are carried out to maintain a balance between optimizing foreign currency management and meeting liquidity needs. Reserves management is carried out through Strategic Asset Allocation set by the Board of Governors. Meanwhile, Bank Indonesia allocates some parts of its foreign currency reserves in anticipation of the government's foreign currency demands and the stabilization of Rupiah's exchange rate.

Reserves management bears a number of risks, particularly market risk and credit risk. Market risk arises from increases on US government bond yields and the depreciation of non-USD currency following the US presidential election result which heightened uncertainty on US policy direction, weakening global economic recovery due to the slowdown in the developed economies except for the US, as well as the continued delays in the economic rebalancing and the recovery of China's financial sector. Market risk mitigation is applied by implementing periodic tactical strategy within the Investment Forum. Credit risk arises as a result of the performance of SSB issuers or counterparty. Control is carried out by setting SSB issuer criteria and closely monitoring of counterparty's credit rating.

Risiko operasional terutama muncul akibat potensi gangguan terkait sistem informasi sebagai pendukung kegiatan operasi moneter dan sistem pembayaran. Mitigasi risiko antara lain dilakukan melalui penyediaan *back up* sistem dan kesiapan genset untuk mengantisipasi gangguan operasional. Untuk menjaga kesiapan sistem cadangan, secara periodik dilakukan pelatihan pemulihan tugas pada *Disaster Recovery Center* dengan lokasi terpisah dari pusat data center.

Melanjutkan arahan Dewan Gubernur untuk memperkuat implementasi manajemen risiko, penguatan *Internal Control Officers* (ICO) dilakukan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Penguatan ICO dilakukan secara merata dan bertahap berdasarkan wilayah sebagai pelaksanaan *good governance* dalam mencapai sasaran strategis Bank Indonesia. Penguatan ICO bertujuan meningkatkan budaya *risk awareness* pada seluruh Satuan Kerja dengan koordinator ICO. Kerja sama antara ICO dan *Risk Officers* dari satuan kerja yang menjalankan fungsi manajemen risiko diharapkan memperkuat *governance* dalam mendukung proses bisnis pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Penguatan manajemen risiko juga dilanjutkan melalui integrasi antara Manajemen Risiko Bank Indonesia (MRBI) dan Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia (MKTBI). MKTBI diperlukan untuk menjamin kelangsungan tugas operasional Bank Indonesia yang bersifat prioritas. Pelaksanaan MKTBI tersebut memastikan agar tugas operasional pokok Bank Indonesia dapat berlangsung secara lancar.

D. PERINCIAN POS LAPORAN KEUANGAN

D.1. Emas

Saldo emas per 31 Desember 2016 sebesar TOZ2,510,020.6700 atau setara dengan Rp39.090.228 juta dan 31 Desember 2015 sebesar TOZ2,510,019.6096 atau setara dengan Rp36.781.172 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Operational risk is a result of potential disruption involving the information system which support monetary operations and payment system activities. Mitigation is carried out by, among others, providing a back up system to anticipate operational disruptions. To maintain discovery recovery readiness, simulation is periodically exercised at locations away from the data center.

In pursuit of the Board of Governors policy to strengthen risk management implementation, Internal Control Officers (ICO) empowerment is carried out to support the decision making process. The empowerment is gradually organized for all region as part of good governance implementation. ICO empowerment also raises risk awareness culture throughout the organization. Coordination between ICO and Risk Department may strengthen Bank Indonesia's business governance.

The process also integrates Bank Indonesia's Risk Management (MRBI) and Bank Indonesia Business Continuity Management (MKTBI). MKTBI is needed to ensure the continuity of Bank Indonesia's critical operations. The implementation of MKTBI ensures an uninterrupted performance of Bank Indonesia's main operations.

D. FINANCIAL STATEMENTS DETAILS

D.1. Gold

Gold balance as of December 31, 2016 and December 31, 2015 were TOZ2,510,020.6700 or equivalent to IDR39,090,228 million and TOZ2,510,019.6096 or equivalent to IDR36,781,172 million respectively, with details as follows:

Uraian	2016 Rp Juta IDR Million	2015 Rp Juta IDR Million	Description
Emas	36,554,393	34,395,143	Gold
Hak kontraktual atas emas batangan:			Gold Receivables
Deposito Berjangka Emas	2,535,835	2,386,029	Gold Deposits
Dikurangi :			Less :
Penyisihan penurunan nilai aset	0	0	Allowance for Impairment of Financial Assets
Jumlah Emas	39,090,228	36,781,172	Total Gold

Harga emas batangan di pasar emas London per tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar USD1,159.10 per troy ounce (TOZ) dan USD1,062.25 per TOZ.

Gold bullion prices in London gold market as of December 31, 2016 and December 31, 2015 were USD1,159.10 per troy ounce (TOZ) and USD1,062.25 per TOZ respectively.

D.2. Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter

Surat berharga yang dimiliki oleh Bank Indonesia diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi, sedangkan tagihan karena transaksi repo dan tagihan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp1.657.786.926 juta dan Rp1.573.395.660 juta dengan rincian sebagai berikut:

D.2. Financial Assets Related to Monetary Policy Implementation

Securities held by Bank Indonesia are calculated based on fair value through revaluation reserves, while claims derived from repo transaction and other claims are calculated at amortized cost. Financial Assets Related to Monetary Policy Implementation as of December 31, 2016 and December 31, 2015 were IDR1,657,816,869 million and IDR1,573,395,660 million respectively, as follows:

Uraian	2016 Rp Juta IDR Million	2015 Rp Juta IDR Million	Description
Surat Berharga dan Tagihan dalam Rupiah	159,559,984	153,628,086	Securities Held and Claims Denominated in Rupiah
Surat Berharga dan Tagihan berbasis Syariah dalam Rupiah	4,472,827	2,327,535	Sharia-based Securities Held and Claims Denominated in Rupiah
Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing	1,493,754,115	1,417,440,039	Securities Held and Claims Denominated in Foreign Currency
Jumlah Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter	1,657,786,926	1,573,395,660	Total Financial Assets Related to Monetary Policy Implementation

D.2.1. Surat Berharga dan Tagihan dalam Rupiah

Uraian	2016 Rp Juta IDR Million	2015 Rp Juta IDR Million	Description
Surat Utang Negara (SUN)	158,316,729	144,573,893	Government Securities
Tagihan kepada Bank karena Transaksi Repo Surat Berharga	0	6,970,248	Claim on Banks Arising from Repo Operation
Tagihan Lainnya	1,243,255	2,083,945	Other Claims
Dikurangi : Penyisihan Penurunan Nilai Aset	0	0	Less : Allowance for Impairment of Financial Assets
Jumlah Surat Berharga dan Tagihan dalam Rupiah	159,559,984	153,628,086	Total Securities Held and Claims Denominated in Rupiah

Tagihan Lainnya sebesar Rp1.243.255 juta merupakan tagihan derivatif.

D.2.1. Securities Held and Claims Denominated in Rupiah

Other Receivable amounted to IDR1.243.255 million which was the receivable from derivatives.

D.2.2. Surat Berharga dan Tagihan Berbasis Syariah dalam Rupiah

Saldo Surat Berharga dan Tagihan Berbasis Syariah dalam Rupiah per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp4.472.827 juta dan Rp2.327.535 juta yang merupakan Surat Berharga Syariah Negara.

D.2.2. Sharia-based Securities Held and Claims Denominated in Rupiah

The balance of Sharia-based Securities Held and Claims Denominated in Rupiah as of December 31, 2016 and December 31, 2015 were IDR4,472,427 million and IDR2,327,535 million respectively, in the form of Sharia-based Government Securities.

D.2.3. Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing

Uraian	2016 Rp Juta IDR Million	2015 Rp Juta IDR Million	Description
Penempatan dana di luar negeri	300,187,929	312,097,336	Balances with Banks and Portfolio Managers Outside Indonesia
Surat Berharga	1,193,135,021	1,105,306,174	Securities
Tagihan	431,165	36,529	Claims
Dikurangi : Penyisihan Penurunan Nilai Aset	0	0	Less : Allowance for Impairment of Financial Assets
Jumlah Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing	1,493,754,115	1,417,440,039	Total Securities Held and Claims Denominated in Foreign Currency

D.2.3. Securities Held and Claims Denominated in Foreign Currency

- | | |
|--|---|
| <p>1. Penempatan dana di luar negeri terdiri dari Giro, Deposito, Penempatan pada <i>External Portfolio Manager</i>, dan Reinvestasi <i>Cash Collateral</i>. Penempatan dana di luar negeri dalam bentuk deposito di antaranya pada IMF berupa Deposito <i>Poverty Reduction and Growth Facility</i> (PRGF) sebesar SDR25,000,000.00 atau setara dengan Rp450.136 juta pada tanggal 31 Desember 2016 dan setara dengan Rp478.293 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Selain itu terdapat <i>Trust for Special PRGF Operations for the Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) and PRGF Subsidy Operations ("The Trust")</i> sebesar SDR4,850,030.00 atau setara dengan Rp87.327 juta pada tanggal 31 Desember 2016 dan setara dengan Rp92.789 juta pada tanggal 31 Desember 2015.</p> <p>2. Dalam SSB Valas yang dimiliki oleh Bank Indonesia per 31 Desember 2016, termasuk alokasi penempatan pada <i>Third Party Securities Lending</i> (TPSL) sebesar Rp81.208.922 juta. Dari jumlah alokasi tersebut yang telah dipinjamkan adalah sebesar Rp77.515.332 juta dan Bank Indonesia menerima agunan (<i>collateral</i>) dalam bentuk non tunai (<i>non cash</i>) sebesar Rp76.966.240 juta yang ditatausahakan secara <i>extra comptable</i> dan bentuk tunai (<i>cash</i>) sebesar Rp6.320.347 juta yang direinvestasikan oleh agen.</p> <p>3. Tagihan kepada lainnya sebesar Rp430.737 juta, diantaranya sebesar Rp416.743 juta merupakan SSB valas dan kupon yang telah jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2016, namun belum diterima pembayarannya dari counterpart.</p> | <p>1. <i>Overseas balances consisted of Demand Deposits, Term Deposits, Investments with External Portfolio Managers, and Cash Collateral Reinvestments. They comprised term deposits at the IMF in Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF) deposits of SDR25,000,000.00 or equivalent to IDR450,136 million on December 31, 2016 or IDR478,293 million on December 31, 2015. Moreover, Trust for Special PRGF Operations for the Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) and PRGF Subsidy Operations ("The Trust") was recorded at SDR4,850,030.00 or equivalent to IDR87,327 million on December 31, 2016 and equivalent to IDR92,789 million on December 2015.</i></p> <p>2. <i>Securities held by Bank Indonesia denominated in foreign currency as of December 31, 2016 included the allocation of participations in Third Party Securities Lending (TPSL) was IDR81,208,922 million. Of this allocation, IDR77,515,332 million was drawn down and Bank Indonesia received non-cash collateral amounting to IDR76,966,240 million which was administered as as extra comptable, and IDR6,320,347 million in cash that was reinvested by the agents.</i></p> <p>3. <i>Other claims of IDR430.737 million included IDR416.743 million in Marketable Securities denominated in foreign currency and coupons that matured on December 30, 2016 but have yet to be paid by the counterpart.</i></p> |
|--|---|

D.3. Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional

Saldo Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp34.323.368 juta dan Rp36.473.988 juta dengan rincian sebagai berikut:

D.3. Receivables from the IMF

The balance of Receivables from the IMF as of December 31, 2016 and December 31, 2015 were IDR34,323,368 million and IDR36,473,988 million respectively, with details as follows:

Uraian	2016 Rp Juta IDR Million	2015 Rp Juta IDR Million	Description
Quota:	83,696,534	39,780,606	Quota:
Dikurangi: Promissory Notes IMF Account No.1	71,244,358 1,004,266	34,180,099 1,005,066	Less: Promissory Notes IMF Account No.1
Perkiraan penyesuaian nilai quota dalam Rupiah	(2,737,080)	1,811,799	Estimated quota value adjustment in Rupiah
RTP	14,184,990	2,783,642	RTP
SDR Holdings	20,138,378	33,690,346	SDR Holdings
Dikurangi: Penyisihan Aset	0	0	Less: Allowance for Bad Debt
Jumlah Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional	34,323,368	36,473,988	Receivables from the IMF

Saldo kuota NKRI di IMF per 31 Desember 2015 sebesar SDR2,079,300,000.00 ekuivalen Rp39.780.606 juta meningkat menjadi sebesar SDR4,648,400,000.00 ekuivalen Rp83.696.534 juta per 31 Desember 2016, sedangkan saldo Reserve Tranche Position (RTP) per 31 Desember 2015 sebesar SDR145,498,709.00 ekuivalen Rp2.783.642 juta meningkat menjadi sebesar SDR787,816,457.00 ekuivalen Rp14.184.990 juta per 31 Desember 2016.

Indonesian quota at IMF as of December 31, 2015 was SDR2,079,300,000.00 or equivalent to IDR39.780.606 million, and increased to SDR4,648,400,000.00 or equivalent to IDR83.696.534 million as of December 31, 2016. Meanwhile, Reserve Tranche Position (RTP) as of Desember 31, 2015 was SDR145,498,709.00 or equivalent to IDR2.783.642 million, and increased to SDR787,816,457.00 or equivalent to IDR14.184.990 million as of December 31, 2016.

Peningkatan kuota NKRI di IMF berdasarkan Kesepakatan 14th General Review of Quotas IMF yang berlaku efektif pada tanggal 26 Januari 2016 dan sesuai dengan Resolusi IMF Nomor 66-2. Berdasarkan kesepakatan dan resolusi IMF, seluruh negara anggota IMF diminta untuk membayarkan kenaikan kuota dalam 30 hari sejak tanggal efektif tersebut.

Indonesian quota increased at the IMF was based on the agreement made on the 14th IMF General Review of Quotas which came into effect on January 26, 2016 and IMF Resolutions Number 66-2. Based on the agreement and resolution with the IMF, all IMF members were requested to pay the quota increase within 30 days.

Berdasarkan Undang Undang Bank Indonesia (Pasal 57 dan Pasal 13) dan Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 (Pasal 2), Bank Indonesia telah melakukan pembayaran kenaikan kuota NKRI di IMF pada tanggal valuta 24 Februari 2016 sebesar SDR2,569,100,000.00 dengan rincian sebagai berikut:

Based on the Bank Indonesia Act (Article 57 and Article 13) and Government Regulation Number 98 of 2015 dated December 28, 2015 (Article 2), Bank Indonesia has paid Indonesia's quota increases on February 24, 2016 amounting to SDR2,569,100,000.00, as follow:

1. Dalam Valas: 25% dari nilai kuota yaitu sebesar SDR642,275,000.00
2. Dalam Rupiah: 75% dari nilai kuota yaitu sebesar SDR1,926,825,000.00 dengan menerbitkan Promissory Note Bank Indonesia dalam ekuivalen Rupiah sebesar Rp35.058.232 juta.

1. *In Foreign Currency: 25% of the quota's value of SDR642,275,000.00*
2. *In Rupiah: 75% of the quota's value of SDR1,926,825,000.00 by issuing Bank Indonesia in Rupiah-denominated Promissory Note equivalent of IDR35,058,232 million.*

Dengan telah dilakukannya pembayaran kenaikan kuota maka terdapat kenaikan pangsa kuota dari 0,872% menjadi 0,974%. Peningkatan tersebut telah menambah voting power Indonesia di IMF dan memberikan ruang yang lebih besar bagi Indonesia untuk memanfaatkan jaring pengaman keuangan global yang bersumber dari IMF jika diperlukan.

Rekening IMF dalam Rupiah disesuaikan nilainya berdasarkan kurs IMF tanggal 30 April. Per 31 Desember 2016, Bank Indonesia telah melakukan perkiraan penyesuaian untuk *Quota Subscription* dan rekening IMF dalam Rupiah sebesar Rp2.737.080 juta.

D.4. Tagihan

Saldo Tagihan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp197.920.303 juta dan Rp223.129.030 juta dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2016 Rp Juta IDR Million	2015 Rp Juta IDR Million	Description
Tagihan Kepada Pemerintah			Claims on the Government
Surat Utang yang tidak dapat Dipindahtangankan:			Non-Tradable Government Securities:
SUP Nomor SU-002/MK/1998	14,460,595	15,501,145	SUP Number SU-002/MK/1998
SUP Nomor SU-004/MK/1999	39,781,877	42,411,261	SUP Number SU-004/MK/1999
SUP Nomor SU-007/MK/2006	38,019,917	40,532,844	SUP Number SU-007/MK/2006
Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003	105,284,521	124,196,975	Treasury Bond Series SRBI-01/MK/2003
Tagihan:			Claims:
Tagihan bunga SUP dan Subsidi Bunga Kredit Program	66,773	77,889	Claims due to Loan Interest
Tagihan Kepada Bank			Claims on Banks
Tagihan dalam Rangka Penyaluran Kredit Sebelum Tahun 1999	362,202	464,498	Claims arising from credit to banks prior 1999
Dikurangi :			Less :
Penyisihan Penurunan Nilai Aset	55,582	55,582	Allowance for Impairment of Financial Assets
Jumlah Tagihan	197,920,303	223,129,030	Total Claims

D.4.1. Tagihan Kepada Pemerintah

D.4.1.1. SUP Nomor SU-002/MK/1998 (SU-002)

SU-002 diterbitkan tanggal 23 Oktober 1998 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri dalam Bentuk Surat Utang jo. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT

This quota payment has brought Indonesia's total quota from 0.872% to 0.974%. This increase has expanded Indonesia's voting power at the IMF and provided a bigger room for Indonesia to utilize the global financial guarantee network derived from the IMF when needed.

The value of IMF account denominated in Rupiah was adjusted based on the IMF's exchange rate as of April 30. As of December 31, 2016, Bank Indonesia made projected adjustments in its IMF membership participation in Rupiah of IDR2,737,080 million.

D.4. Claims

Claims balance as of December 31, 2016 and December 31, 2015 were IDR197,920,303 million and IDR223,129,030 million respectively, as follows:

D.4.1. Claims On the Government

D.4.1.1. SUP Number SU-002/MK/1998 (SU-002)

SU-002 was issued on October 23, 1998 based on Presidential Decree Number 55 of 1998 on Domestic Loans in Debt Securities in conjunction with Government Regulation Number 60 of 1998 on Additional Equity Participations of the Republic of Indonesia in PT Bank Ekspor Impor Indonesia. The nominal value of the non-tradeable and

Bank Ekspor Impor Indonesia. Nilai nominal SU-002 adalah sebesar Rp20.000.000 juta yang tidak dapat dipindahtangankan dan diperjualbelikan.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, Menteri Keuangan telah menerbitkan addendum kelima SU-002 yang mengubah suku bunga dari 1,0% menjadi 0,1% per tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009. Baki debit SU-002 per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp14.460.595 juta.

D.4.1.2. SUP Nomor SU-004/MK/1999 (SU-004)

SU-004 diterbitkan tanggal 28 Mei 1999 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri dalam Bentuk Surat Utang jo. Persetujuan Bersama Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 6 Februari 1999. Nilai nominal SU-004 adalah sebesar Rp53.779.500 juta yang tidak dapat dipindahtangankan dan diperjualbelikan.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, Menteri Keuangan telah menerbitkan addendum kelima SU-004 yang mengubah suku bunga dari 3,0% menjadi 0,1% per tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009. Baki debit SU-004 per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp39.781.877 juta.

D.4.1.3. SUP Nomor SU-007/MK/2006 (SU-007)

SU-007 diterbitkan tanggal 24 November 2006 berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tentang Restrukturisasi Surat Utang Nomor SU-002/MK/1998 dan SU-004/MK/1999

non-transferable SU-002 was IDR20,000,000 million.

Pursuant to Act Number 41 of 2008 dated November 10, 2008 on State Budget for the Fiscal Year 2009, the Minister of Finance issued the fifth addendum of SU-002 amending the interest rate from 1.0% to 0.1% per year that came into effect on January 1, 2009. The nominal value of SU-002 as of December 31, 2016 was IDR14,460,595 million.

D.4.1.2. SUP Number SU-004/MK/1999 (SU-004)

SU-004 was issued on May 28, 1999 based on Presidential Decree Number 55 of 1998 on Domestic Loans in Debt Securities in conjunction with the Joint Approval between the Government and Bank Indonesia dated February 6, 1999. The face value of the non-transferable and non-tradeable SU-004 was IDR53,779,500 million.

Pursuant to Act Number 41 of 2008 dated November 10, 2008 on State Budget for the Fiscal Year 2009, the Minister of Finance issued the fifth addendum of SU-004 amending the annual interest rate from 3.0% to 0.1% per year that came into effect from January 1, 2009. The outstanding balance of SU-004 as of December 31, 2016 was IDR39,781,877 million.

D.4.1.3. SUP Number SU-007/MK/2006 (SU-007)

SU-007 was issued on November 24, 2006 based on Act Number 24 of 2002 on Government Bonds and the Joint Agreement between the Minister of Finance and Bank Indonesia Governor on Restructuring of Government Bonds Number SU-002/MK/1998 and SU-004/MK/1999 dated April

tanggal 18 April 2006. Nilai nominal SU-007 adalah sebesar Rp54.862.150 juta dan tidak dapat diperdagangkan.

SU-007 diterbitkan untuk mendudukkan tunggakan bunga dan hasil indeksasi SU-002 dan SU-004 s.d. tanggal 31 Desember 2005 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tunggakan bunga SU-002 sebesar Rp4.637.583 juta.
2. Tunggakan bunga SU-004 sebesar Rp12.291.887 juta.
3. Hasil indeksasi SU-002 sebesar Rp11.231.072 juta.
4. Hasil indeksasi SU-004 sebesar Rp26.701.608 juta.

Adapun persyaratan Surat Utang ini adalah sebagai berikut:

1. SU-007 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006 dan jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2025.
2. Bunga SU-007 sebesar 0,1% per tahun yang dihitung dari sisa pokok dan dibayar secara tunai oleh Pemerintah kepada Bank Indonesia setiap enam bulan sekali, yaitu pada tanggal 1 Februari dan 1 Agustus. Pembayaran bunga pertama kali dilakukan pada tanggal 1 Desember 2006 untuk pembayaran bunga yang jatuh tempo tanggal 1 Februari 2006 dan tanggal 1 Agustus 2006.
3. Pokok SU-007 diangsur sebanyak 38 kali. Angsuran pertama jatuh tempo dan dibayar tanggal 1 Februari 2007 dan angsuran berikutnya jatuh tempo dan dibayar setiap tanggal 1 Agustus dan 1 Februari setiap tahunnya sehingga angsuran terakhir jatuh tempo dan dibayar pada tanggal 1 Agustus 2025. Pembayaran angsuran pokok dilakukan secara tunai atau dibayar dengan Surat Utang Negara yang dapat diperdagangkan.

Baki debit SU-007 per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp38.019.917 juta.

18, 2006. The face value of the non-tradeable SU-007 was IDR54,862,150 million.

SU-007 was issued to state interest arrears and indexation arrears resulting from SU-002 and SU-004 up to December 31, 2005, as follow:

1. SU-002 interest arrears amounting to IDR4,637,583 million.
2. SU-004 interest arrears amounting to IDR12,291,887 million.
3. SU-002 indexation arrears amounting to IDR11,231,072 million.
4. SU-004 indexation arrears amounting to IDR26,701,608 million.

The terms and conditions for this Bond are as follows:

1. SU-007 came into effect on January 1, 2006 and matures on August 1, 2025.
2. SU-007 bears an annual interest of 0.1% per year which is calculated on the outstanding principal and paid in cash by the Government of Indonesia to Bank Indonesia every six months on February 1 and August 1. The first interest payment was made on December 1, 2006 for interests due on February 1, 2006 and on August 1, 2006.
3. Principal repayment on SU-007 was divided into 38 installments. The first installment was due on and paid on February 1, 2007 and the following installments are due and to be paid on August 1 and February 1 each year with the final installment due on August 1, 2025. Principal repayments are settled either in cash or with tradable Government Securities.

The outstanding balance of SU-007 as of December 31, 2016 was IDR38,019,917 million.

D.4.1.4. Obligasi Negara Seri SRBI-01/ MK/2003 (SRBI-01)

SRBI-01 diterbitkan sebagai pengganti SUP Nomor SU-001/MK/1998 dan Nomor SU-003/MK/1999 dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah dan Bank Indonesia mengenai Penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) serta Hubungan Keuangan Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 1 Agustus 2003 (SKB Tahun 2003). Nilai nominal SRBI-01 adalah sebesar Rp144.536.094 juta.

Pada tanggal 31 Juli 2012 telah ditandatangani revisi SKB Tahun 2003 oleh Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Menteri Koordinator Perekonomian yang antara lain memuat restrukturisasi Obligasi Negara Nomor Seri SRBI-01/MK/2003 dari semula pembayaran sekaligus (bullet payment) pada saat jatuh tempo tahun 2033 dengan sistem self-liquidating, menjadi pembayaran dengan metode cicilan (amortized) s.d. jatuh tempo tahun 2043, sehingga persyaratan SRBI-01 mengalami perubahan sebagai berikut:

1. SRBI-01 mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2003, dan jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2043.
2. SRBI-01 dikenakan bunga tahunan sebesar 0,1% dari sisa pokok, yang dibayar oleh Pemerintah setiap enam bulan sekali, yaitu pada bulan Februari dan Agustus.
3. Pokok SRBI-01 dibayar setiap tanggal 1 Februari dan 1 Agustus setiap tahunnya sehingga angsuran terakhir jatuh tempo dan dibayar tanggal 1 Agustus 2043. Pembayaran angsuran pokok dilakukan secara tunai atau dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah.

Pada tahun 2016, Pemerintah melakukan pembayaran angsuran pokok SRBI-01 sebesar Rp18.155.937 juta yang berasal dari sisa surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah. Baki debet SRBI-01 per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp105.284.521 juta.

D.4.1.4. Treasury Bond Series SRBI-01/ MK/2003 (SRBI-01)

SRBI-01 was issued to replace SUP Number SU-001/MK/1998 and Number SU-003/MK/1999 in relation to the implementation of the Joint Agreement between the Government and Bank Indonesia on the Settlement of the Bank Indonesia (BLBI) as well as the Financial Relationship between the Government and Bank Indonesia dated August 1, 2003 (SKB of 2003). The nominal value of SRBI-01 was IDR144,536,094 million.

On July 31, 2012, a revision to the SKB of 2003 was signed by the Governor of Bank Indonesia, the Minister of Finance, and the Coordinating Minister for the Economy, stipulating the restructuring of Treasury Bond Series Number SRBI-01/MK/2003 from the bullet payment on maturity due in 2033 with a self-liquidating system, to installment payment (amortized) which matures in 2043, with amended terms and conditions of SRBI-01 as follows:

1. SRBI-01 came into effect on August 1, 2003, and matures on August 1, 2043.
2. SRBI-01 bears an annual interest at 0.1% of the outstanding principal, which is paid by the Government once every six months, on February and August.
3. SRBI-01 Principal is paid on February 1, and August 1 of each year with the last installment is due and payable on August 1, 2043. Principal installments are paid in cash or from Bank Indonesia's surplus which have been allocated for the Government.

In 2016, the Government paid principal installments for SRBI-01 of IDR18,155,937 million from the Government's part of Bank Indonesia's surplus. The outstanding balance of SRBI-01 as of December 31, 2016 was IDR105,284,521 million.

D.4.2. Tagihan kepada Bank

Tagihan Kepada Bank merupakan tagihan dalam rangka Penyaluran Kredit Sebelum Tahun 1999 antara lain terdiri atas Tagihan kepada Bank berupa SOL dan KLBI yang diberikan berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, saldo SOL dan KLBI masing-masing sebesar Rp362.202 juta dan Rp464.498 juta. Penurunan saldo SOL dan KLBI tersebut terutama karena adanya pelunasan KLBI Skim KPRS/RSS sebesar Rp341 juta.

D.4.2. Claims From Loans

Claims on Banks are Claims from loan to banks prior to 1999 which comprised Subordinated Loan and KLBI disbursed in accordance with Act Number 13 of 1968 on the Central Bank. As of December 31, 2016 and December 31, 2015, the balances of the SOL and KLBI were IDR362,202 million and IDR464,498 million respectively. The decreased SOL and KLBI balances was mainly due to the repayment of KLBI KPRS/RSS scheme amounting to IDR341 million.

D.5. Aset Non Kebijakan

Aset Non Kebijakan Bank Indonesia per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp26.729.367 juta dan Rp36.413.967 juta dengan rincian sebagai berikut:

D.5. Other Assets

Bank Indonesia's Other Assets as of December 31, 2016 and December 31, 2015 were IDR26,729,367 million and IDR36,413,967 million respectively, with details as follows:

Uraian	2016 Rp Juta IDR Million	2015 Rp Juta IDR Million	Description
Penyertaan	824,381	873,541	Participation
Bank for International Settlements	757,201	804,566	Bank for International Settlements
International Islamic Liquidity Management	67,180	68,975	International Islamic Liquidity Management
Dikurangi : Penyisihan Penurunan Nilai Aset	0	0	Less : Allowance for Impairment of Financial Assets
Aset Keuangan	1,655,046	2,107,250	Other Financial Assets
Uang asing dan giro dalam valuta asing	33,307	20,910	Foreign Currency Banknotes and Demand Deposit
Tagihan kepada non bank di dalam negeri	7,448,862	7,919,060	Claims on Domestic Non Bank
Tagihan kepada non bank di luar negeri	1,202,490	1,228,416	Claims on Foreign Non Bank
Dikurangi : Penyisihan Penurunan Nilai Aset	7,029,613	7,061,136	Less : Allowance for Impairment of Financial Assets
Aset Tetap dan Lainnya	24,249,940	33,433,176	Property and Equipment
Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud	16,333,936	16,192,473	Tangible and Intangible Fixed Assets
Aset Lainnya	7,916,004	17,240,703	Others
Jumlah Aset Non Kebijakan	26,729,367	36,413,967	Total Other Assets

D.5.1. Penyertaan**D.5.1.1. Penyertaan pada Bank for International Settlements (BIS)**

Tujuan penyertaan pada BIS adalah untuk memperoleh akses lebih besar terhadap kegiatan BIS dalam pengambilan keputusan, memanfaatkan fasilitas yang disediakan, meningkatkan kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia,

D.5.1. Participation**D.5.1.1. Participation in Bank for International Settlements (BIS)**

The purpose of the equity participation is to gain more access in BIS decision-making activities, to utilize the provided facilities, to increase international confidence on Indonesia, and to improve cooperation in Central Banking pertaining to monetary

meningkatkan kerja sama di bidang kebanksentralan yang berkaitan dengan kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran. Bank Indonesia membeli 3.000 lembar saham (0,55% dari total saham yang beredar) pada tanggal 29 September 2003 dengan nilai nominal SDR5,000.00/saham dengan total harga perolehan SDR42,054,000.00 atau setara dengan Rp757.201 juta per 31 Desember 2016.

D.5.1.2. International Islamic Liquidity Management (IILM)

Tujuan dibentuknya IILM adalah untuk menyediakan instrumen keuangan syariah jangka pendek yang berkualitas tinggi, likuid dan dapat diperdagangkan secara internasional dengan rating tinggi terutama untuk mendukung pengelolaan likuiditas oleh lembaga keuangan syariah. Keanggotaan Bank Indonesia direpresentasikan dengan kepemilikan saham IILM per 31 Desember 2016 sebesar 6,67% atau senilai USD5,000,000.00 setara dengan Rp67.180 juta.

D.5.2. Aset Keuangan Non Kebijakan Lainnya

D.5.2.1. Uang Asing dan Giro dalam Valuta Asing

Uang asing dan Giro dalam Valuta Asing terdiri dari Bilyet Uang Kertas Asing yang dimiliki oleh Bank Indonesia dan Giro dalam Valuta Asing yang dikelola oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Luar Negeri yang digunakan untuk kegiatan operasional Bank Indonesia.

D.5.2.2. Tagihan Kepada Non Bank di Dalam Negeri

Termasuk dalam tagihan kepada non bank di dalam negeri, antara lain:

1. Tagihan karena pemberian kredit channeling sebesar Rp5.828.444 juta, yang merupakan tagihan atas KLBI yang disalurkan melalui bank sebagai channeling agent namun hingga jatuh tempo tagihan tersebut masih belum terselesaikan. Termasuk dalam tagihan

policy, financial system stability, and payment systems. Bank Indonesia purchased 3,000 shares (0.55% of total issued shares) on September 29, 2003 with a nominal value of SDR5,000.00/share and a total acquisition cost of SDR42,054,000.00 or equivalent to IDR757,201 million as of December 31, 2016.

D.5.1.2. International Islamic Liquidity Management (IILM)

IILM's objective is to provide high-quality liquid and internationally tradeable short-term Sharia-based financial instruments with high ratings, used mainly to support liquidity management by Islamic financial institutions. Bank Indonesia's membership is represented by shares in IILM that as of December 31, 2016 amounted to 6.67% or valued at USD5,000,000.00 or equivalent to IDR67,180 million.

D.5.2. Other Financial Assets

D.5.2.1. Foreign Currency and Demand Deposit Denominated in Foreign Currency

Foreign Currency and Demand Deposit Denominated in Foreign Currency consist of Foreign Bank Notes held by Bank Indonesia and Demand Deposit denominated in Foreign Currency under the management of Bank Indonesia Overseas Representative Offices used for Bank Indonesia operations.

D.5.2.2. Claims on Non-Banks

Claims on domestic Non-Banks consisted of:

1. *Claims on domestic non-banks consisted of claims on disbursed loan amounting to IDR5,828,444 million which represents claims on KLBI through banks as channeling agents but have not been paid off as per due date, as well as arrears derived from*

karena pemberian kredit channeling adalah tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT) sebesar Rp5.699.858 juta.

Dalam rangka membahas penyelesaian risk sharing KUT tersebut, Bank Indonesia telah melakukan beberapa kali pembahasan dengan kementerian terkait (Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta Perum Jamkrindo), pembahasan terakhir dilakukan pada tanggal 14 November 2016.

2. Tagihan pinjaman dan pembiayaan multiguna kepada pegawai dan Anggota Dewan Gubernur per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.573.157 juta.

D.5.2.3. Tagihan Kepada Non Bank di Luar Negeri

Tagihan kepada Non Bank di luar Negeri antara lain merupakan tagihan Bank Indonesia kepada pihak ketiga yang terdiri dari USD48,797,259.98 atau setara dengan Rp655.640 juta dan EUR4,987,667.93 atau setara dengan Rp70.633 juta per 31 Desember 2016 (Lihat Catatan butir F.2.a).

Selain itu, terdapat tagihan Bank Indonesia kepada Indo Plus B.V (IPBV) sebesar USD33.298.104,78 atau setara dengan Rp447.393 juta sehubungan dengan pengelolaan NPL eks Indover Bank yang sudah seluruhnya dijual, dan saat ini masih dalam proses review oleh Bank Indonesia. Sementara itu, terdapat tagihan lainnya kepada IPBV sebesar USD738.033,63 atau setara dengan Rp9.916 juta dan EUR244.418,50 atau setara dengan Rp3.461 juta.

D.5.3. Aset Tetap dan Lainnya

D.5.3.1. Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud
Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp16.333.936 juta dan Rp16.192.473 juta dengan rincian sebagai berikut:

the Agricultural Enterprise Loan (KUT) amounting to IDR5,699,858 million.

In its endeavour to resolve KUT risk sharing, Bank Indonesia held a number of discussions with the related ministries (Coordinating Ministry for the Economy, Ministry of Finance, State Ministry of Cooperatives, and Small and Medium Enterprises, as well as with Jamkrindo). The last discussion was held on November 14, 2016.

2. *Claims on loans and multipurpose financing to employees and the Board of Governor Members as of December 31, 2016 was IDR1,573,157 million.*

D.5.2.3. Claims on Overseas Non-Banks

Claims on Overseas Non-Banks included Bank Indonesia's claims to the third party which comprised USD48,797,259.98 or equivalent to IDR655,640 million and EUR4,987,667.93 or equivalent to IDR70.633 million as of December 31, 2016. (See note F.2.a)

Additionally, Bank Indonesia also has a claim to Indo Plus B.V (IPBV) amounting to USD33,298,104.78 or equivalent to IDR447,393 million from the sales of Ex Indover Bank's NPL which is currently under Bank Indonesia review. There are also other claims to IPBV comprising USD738.033,63 or equivalent to IDR9.916 million and EUR244.418,50 or equivalent to IDR 3.461 million.

D.5.3. Property and Equipments

D.5.3.1. Tangible and Intangible Fixed Assets

Tangible and Intangible Fixed Assets as of December 31, 2016 and December 31, 2015 were IDR16,333,936 million and IDR16,192,473 million respectively, as follows:

Uraian	2016 Rp Juta IDR Million	2015 Rp Juta IDR Million	Description
Harga Perolehan			Acquisition Cost
Aset Tetap:			Fixed Assets
• Tanah dan Bangunan	16,477,601	16,205,768	• Lands and Buildings
• Selain Tanah dan Bangunan	3,478,556	2,988,641	• Non Lands and Buildings
Aset Tidak Berwujud	581,767	496,296	Intangible Assets
	20,537,924	19,690,705	
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi			Accumulated Depreciation and Amortization
Aset Tetap:			Fixed Assets
• Tanah dan Bangunan	(1,539,395)	(1,232,194)	• Lands and Buildings
• Selain Tanah dan Bangunan	(2,269,044)	(1,955,111)	• Non Lands and Buildings
Aset Tidak Berwujud	(395,549)	(310,927)	Intangible Assets
	(4,203,988)	(3,498,232)	
Nilai Buku	16,333,936	16,192,473	Book Value

D.5.3.2. Aset Lainnya

Aset Lainnya sebesar Rp7.916.004 juta antara lain berasal dari pajak dibayar di muka sebesar Rp5.910.500 juta dan persediaan bahan uang sebesar Rp654.711 juta.

D.5.3.2 Other Assets

Other Assets amounted to IDR7,916,004 million, consisted of prepaid taxes of IDR5,910,500 million and currency material inventory of IDR654,711 million.

D.6. Uang Dalam Peredaran

Uang dalam Peredaran merupakan alat pembayaran yang sah dan tidak berada dalam penguasaan Bank Indonesia dengan posisi per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp612.557.609 juta dan Rp586.775.262 juta dengan rincian sebagai berikut:

D.6. Currency in Circulation

Currency in Circulation are legal payment tender and are not under the possession of Bank Indonesia. The balance as of December 31, 2016 and December 31, 2015 were IDR612,557,609 million and IDR586,775,262 million respectively, with details as follows:

Uraian	2016 Rp Juta IDR Million	2015 Rp Juta IDR Million	Description
Uang yang dicetak	839,940,499	877,090,452	Printed Money
Dikurangi: Uang dalam Penguasaan Bank Indonesia	227,382,890	290,315,190	Less: Currency in Vault
Jumlah Uang Dalam Peredaran	612,557,609	586,775,262	Total Currency in Circulations

Dalam upaya menjaga ketersediaan uang layak edar untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, Bank Indonesia senantiasa menyediakan uang layak edar dalam jumlah yang cukup dan menarik uang yang tidak layak edar (clean money policy).

To ensure the availability of currency in circulation throughout Indonesia, Bank Indonesia constantly provides currency in circulation in sufficient quantity and withdraws the unfit ones from the circulation (clean money policy).

Sesuai Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Mata Uang (Undang Undang Mata Uang), Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah dalam kegiatan pemusnahan

In accordance with Act Number 7 of 2011 dated June 27, 2011 on Currencies (the Currency Act), Bank Indonesia shall coordinate with the Government in Rupiah currency culling. The coordination is based

Rupiah. Koordinasi dilaksanakan berdasarkan nota kesepahaman kedua belah pihak yang antara lain mengatur tata cara pemusnahan Rupiah, termasuk pembuatan berita acara pemusnahan Rupiah, serta penyampaian informasi setiap periode tiga bulan. Selain itu, juga diatur bahwa jumlah dan nilai nominal Rupiah yang dimusnahkan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Terkait dengan kewajiban penyampaian laporan pemusnahan, selama periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016, Bank Indonesia telah melakukan pemusnahan uang Rupiah kertas senilai Rp210.518.599 juta atau sebanyak 6.875 juta lembar, sedangkan untuk Rupiah logam tidak terdapat pemusnahan pada periode laporan.

Uang Rupiah yang dimusnahkan tersebut di atas, terdiri dari uang Rupiah yang tidak layak edar yang masuk ke Bank Indonesia dan uang Rupiah yang sudah dicabut/ditarik dari peredaran atau dinyatakan tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, dan telah ditukarkan oleh masyarakat ke Bank Indonesia.

D.7. Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter

Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp923.674.447 juta dan Rp800.877.864 juta dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2016 Rp Juta IDR Million	2015 Rp Juta IDR Million	Description
Giro Bank	369,392,400	392,784,697	Bank Demand Deposits
Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Dalam Rupiah	375,818,124	171,340,038	Securities Issued and Liabilities Denominated in Rupiah
Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Berbasis Syariah Dalam Rupiah	38,895,196	24,650,570	Sharia-based Securities Issued and Liabilities Denominated in Rupiah
Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Dalam Valas	139,152,054	207,260,164	Securities Issued and Liabilities Denominated in Foreign Currency
Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Berbasis Syariah Dalam Valas	416,673	4,842,395	Sharia-based Securities Issued and Liabilities Denominated in Foreign Currency
Jumlah Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter	923,674,447	800,877,864	Total Financial Liabilities Related to Monetary Policy Implementation

on a memorandum of understanding between both parties that governs the procedures for currency culling, including issuing official announcements for currency culling, as well as providing quarterly information. Moreover, it also stipulates that the amount and the nominal value of currency for culling shall be announced in the Official Gazette of the Republic of Indonesia.

Throughout the period of January 1 to December 31, 2016, Bank Indonesia has culled bank notes with a value of IDR210,518,599 million or 6,875 million sheets, while no coins were culled within this reporting period.

The culled bank notes were the unfit bank notes held by Bank Indonesia and bank notes that were removed from circulation or declared no longer valid as legal tender and had been exchanged by the public to Bank Indonesia.

D.7. Financial Liabilities Related to Monetary Policy

Financial liabilities related to Monetary Policy as of December 31, 2016 and December 31, 2015 were IDR923,674,447 million and IDR800,877,864 million respectively, with details as follows:

D.7.1. Giro Bank

D.7.1. Bank Demand Deposits

Uraian	2016 Rp Juta IDR Million	2015 Rp Juta IDR Million	Description
Giro Bank Umum			Conventional Bank Demand Deposits
Dalam Rupiah	273,617,074	297,119,031	In Rupiah
Dalam Valas	80,333,037	83,757,137	In Foreign Currency
Giro Bank Syariah			Sharia Bank Demand Deposits
Dalam Rupiah	15,207,365	11,637,041	In Rupiah
Dalam Valas	234,924	271,488	In Foreign Currency

D.7.2. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Rupiah

D.7.2. Securities Issued and Liabilities Denominated in Rupiah

Uraian	2016 Rp Juta IDR Million	2015 Rp Juta IDR Million	Description
Sertifikat Bank Indonesia	92,062,276	31,108,304	Bank Indonesia Certificates
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	46,540,424	41,126,560	Bank Indonesia Certificates of Deposits
Penempatan Dana	196,730,923	94,517,539	Deposit Facilities
Penempatan Berjangka	23,163,524	0	Term Deposit
Liabilitas Kepada Bank Karena Transaksi Repo Surat Berharga	17,067,679	4,405,105	Liabilities to Banks Due to Repo Operations
Lainnya	253,298	182,530	Others
Jumlah Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Dalam Rupiah	375,818,124	171,340,038	Total Securities Issued and Liabilities Denominated in Rupiah

D.7.3. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Berbasis Syariah dalam Rupiah

D.7.3. Sharia-based Securities Issued and Liabilities Denominated in Rupiah

Uraian	2016 Rp Juta IDR Million	2015 Rp Juta IDR Million	Description
Sertifikat Bank Indonesia Syariah	10,787,600	6,280,000	Bank Indonesia Sharia Certificates
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	23,923,500	18,001,600	Bank Indonesia Sharia Deposit Facility
Liabilitas Kepada Bank Karena Transaksi Repo Syariah Surat Berharga	4,184,096	368,970	Liabilities to Banks Due to Sharia-based Repo Operation
Jumlah Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Berbasis Syariah Dalam Rupiah	38,895,196	24,650,570	Total Sharia-based Securities Issued and Liabilities Denominated in Rupiah

D.7.4. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Valuta Asing

D.7.4. Securities Issued and Liabilities Denominated in Foreign Currency

Uraian	2016 Rp Juta IDR Million	2015 Rp Juta IDR Million	Description
Penempatan Berjangka dalam Valuta Asing	92,528,576	168,450,337	Term Deposits in Foreign Currency
Surat Berharga Bank Indonesia Valas	38,307,203	6,866,034	Bank Indonesia Securities Denominated in Foreign Currency
Pinjaman Luar Negeri	1,929,464	2,624,289	Foreign Borrowings
Lainnya	6,386,811	29,319,504	Others
Jumlah Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Dalam Valas	139,152,054	207,260,164	Total Securities Issued and Liabilities Denominated in Foreign Currency

- Pinjaman Luar Negeri merupakan pinjaman sindikasi dari kreditur luar negeri dengan The Mizuho Corporate Bank, Ltd., Singapore Branch yang bertindak sebagai agent, dengan jumlah pinjaman sebesar USD500,000,000.00 yang ditandatangani pada tanggal 14 Juni 1995. Dalam kesepakatan *London Club III* telah dilakukan amandemen kedua tanggal 6 September 2002, yakni untuk menjadwalkan ulang pokok pinjaman sebesar USD300,000,000.00 untuk periode pembayaran 14 Desember 2008 s.d. 14 Desember 2019.

Saldo per 31 Desember 2016 adalah sebesar USD116,582,400.00 atau setara dengan Rp1.566.401 juta dan JPY3,131,388,224.00 atau setara dengan Rp361.377 juta dan bunga pinjaman yang masih harus dibayar sebesar Rp1.686 juta.

- Pada subpos Lainnya per 31 Desember 2016 terdapat kewajiban *Cash Collateral* dalam rangka TPSL yang terdiri dari beberapa valuta asing sebesar ekuivalen USD470,403,898.82 atau setara dengan Rp6.320.347 juta.

- D.7.5. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang berbasis Syariah dalam Valuta Asing
Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang berbasis Syariah dalam Valuta Asing per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp416.673 juta dan Rp4.842.395 juta merupakan Penempatan Dana Valuta Asing berbasis Syariah (*Term Deposit Valas Syariah*) bank di Bank Indonesia.

- Foreign loans are syndicated loans from foreign creditors with The Mizuho Corporate Bank, Ltd., Singapore Branch as the agent, amounting to USD500,000,000.00 that was signed on June 14, 1995. In London Club III agreement, a second amendment dated September 6, 2002 to reschedule the loan's principal repayment of USD300,000,000.00 for the period of December 14, 2008 to December 14, 2019.*

The balance as of December 31, 2016 was USD116,582,400.00 or equivalent to IDR1,566,401 million and JPY3,131,388,224.00 or equivalent to IDR361,377 million with payable interest of IDR1,686 million.

- Cash Collateral in Third Parties Securities Lending (TPSL) presented in other sub-account as of December 31, 2016 consisted of various foreign currencies amounting to USD470,403,898.82 or equivalent to Rp6.320.347 million.*

- D.7.5. *Sharia-based Securities Issued and Liabilities Denominated in Foreign Currency*
Sharia-based Securities Issued and Liabilities Denominated in Foreign Currency issued as of December 31, 2016 were IDR416,673 million and as of December 31, 2015 were IDR4,842,395 million, which were sharia-based Term Deposit denominated in foreign currency in Bank Indonesia.

D.8. Alokasi Hak Tarik Khusus dari Lembaga Keuangan Internasional

Alokasi Hak Tarik Khusus dari Lembaga Keuangan Internasional (*SDR allocations*) per 31 Desember 2016 dan per 31 Desember 2015 sebesar SDR1,980,438,720.00 atau masing-masing setara dengan Rp35.658.690 juta dan Rp37.889.219 juta.

D.9. Liabilitas Keuangan Kepada Pemerintah

Liabilitas Keuangan Kepada Pemerintah per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp127.621.299 juta dan Rp151.106.418 juta dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2016 Rp Juta IDR Million	2015 Rp Juta IDR Million	Description
Giro Pemerintah: Dalam Rupiah Dalam Valas	76,004,731 51,581,688	94,338,745 56,718,841	Government Demand Deposit: In Rupiah In Foreign Currency
Pinjaman dari Pemerintah	34,880	48,832	Borrowings from Government
Jumlah Liabilitas Keuangan Kepada Pemerintah	127,621,299	151,106,418	Total Liabilities to the Government

D.9.1. Giro Pemerintah

Dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai pemegang Kas Pemerintah, Bank Indonesia melakukan pengelolaan Giro Pemerintah. Dari total Giro Pemerintah per 31 Desember 2016 sebesar Rp127.586.419 juta, terdapat Giro Pemerintah yang memperoleh remunerasi sebesar Rp124.163.169 juta dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2016 Rp Juta IDR Million	2015 Rp Juta IDR Million	Description
Giro Pemerintah dalam Rupiah	75,975,539	94,061,662	Government Demand Deposit in Rupiah
Giro Pemerintah dalam Valas	48,187,630	55,139,138	Government Demand Deposit in Foreign Currencies
Jumlah Giro Pemerintah yang memperoleh Remunerasi	124,163,169	149,200,800	Total Government Demand Deposit Earning Remuneration

Dalam giro valas Pemerintah antara lain terdapat jaminan pembukaan *Letter of Credit* Pemerintah sebesar Rp373.555 juta.

D.8. Counterpart of Special Drawing Rights Allocated by the IMF

Counterpart of Special Drawing Rights Allocated by the IMF as of December 31, 2016 was SDR1,980,438,720.00 or equivalent to IDR35,658,690 million and as of December 31, 2015 was equivalent to IDR37,889,219 million.

D.9. Liabilities to the Government

The balance of liabilities to the Government as of December 31, 2016 and December 31, 2015 were IDR127,621,299 million and IDR151,106,418 million respectively, as follows:

D.9.1. Government Demand Deposits

In its capacity as the holder of the Government's Cash, Bank Indonesia manages Government Demand Deposits. The total Government Demand Deposits as of December 31, 2016 was IDR127,586,419 which included the Government Demand Deposits Earning Remuneration of IDR124,163,169 million, as follows:

Government Demand Deposits denominated in foreign currency included guarantee to open a Government Letter of Credit amounting to IDR373,555 million.

D.9.2. Pinjaman

Pinjaman dari Pemerintah dalam Rupiah adalah pinjaman Pemerintah dalam rangka program *Two Step Loan* (TSL) yang berasal dari *ASEAN Japan Development Fund for Indonesia* dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 20 April 2019. Pinjaman tersebut diteruskanpinjamkan oleh Bank Indonesia kepada bank pelaksana untuk Perkebunan Besar Swasta Nasional.

Pinjaman Pemerintah dalam Rupiah per tanggal 31 Desember 2016 terdiri dari pokok pinjaman sebesar Rp34.371 juta, consulting service sebesar Rp303 juta dan bunga sebesar Rp206 juta, sedangkan per 31 Desember 2015 terdiri dari pokok pinjaman sebesar Rp48.119 juta, consulting service sebesar Rp424 juta dan bunga sebesar Rp289 juta.

D.10. Kewajiban Non Kebijakan

Kewajiban Non Kebijakan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp14.612.775 juta dan Rp29.589.632 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2016 Rp Juta IDR Million	2015 Rp Juta IDR Million	Description
Giro Lembaga Domestik dan Internasional	426,120	425,533	Demand Deposit from Domestic and International Institutions
Imbalan Kerja	7,602,185	7,639,911	Employee Benefits
Lainnya	6,584,470	21,524,188	Others
Jumlah Kewajiban Non Kebijakan	14,612,775	29,589,632	Total Other Liabilities

D.10.1. Kewajiban Imbalan Kerja

Kewajiban imbalan kerja sebesar Rp7.602.185 juta terdiri dari kewajiban imbalan jangka panjang dan pascakerja. Kewajiban imbalan kerja dicatat berdasarkan perhitungan aktuaris independen pada posisi 31 Desember 2016 dengan menggunakan PSAK 24 (Revisi 2013). Asumsi yang digunakan dalam perhitungan aktuaris antara lain: asumsi tingkat mortalitas menggunakan *Group Annual Mortality* (GAM) tahun 1983, loading pajak imbalan kerja sebesar 15% s.d. 30%, dan tingkat diskonto sebesar 6,77% s.d. 9,15%.

D.9.2. Loans

Loans from the Government denominated in Rupiah are the government loans received from the *Two Step Loan* (TSL) program granted by the *ASEAN Japan Development Fund for Indonesia* which matures on April 20, 2019. These loans are subsequently loaned by Bank Indonesia to the executing banks for the *Large Privately-owned National Plantations*.

Loans from the Government denominated in Rupiah as of December 31, 2016 consisted of IDR34,371 million in principal, IDR303 million for consulting services and IDR206 million in interests, while as of December 31, 2015 consisted of IDR48,119 million for principal, IDR424 million for consulting services and IDR289 million for interests.

D.10. Other Liabilities

Other liabilities as of December 31, 2016 and December 31, 2015 were IDR14,612,775 million and IDR29,589,632 million respectively, as follows:

D.10.1 Employee Benefits Liabilities

Employee benefits liabilities of IDR7,602,185 million consisted of long-term and post-employment benefits. Employee benefits liabilities are recorded based on the independent actuary's calculations as of December 31, 2016 by using PSAK 24 (2013 Revision). The assumptions used in the actuary's calculations include mortality rate using the 1983 Group Annual Mortality (GAM), employee benefit tax loading of 15% to 30%, and discount rate of 6.77% up to 9.15%.

Mutasi aset, liabilitas, dan beban imbalan kerja pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Movements of employee benefit asset, liabilities, and expenses as of January 1 to December 31, 2016 were as follows:

Uraian	Manfaat Pensiun Pension Benefits	Tunjangan Pemilikan Rumah Housing Allowance	Tunjangan Kesehatan hari Tua Retirement Benefit Program	Imbalan Pascakerja Post Employment Benefits	Imbalan Kerja Jangka Panjang Long-Term Benefits	Pajak Imbalan Pasca kerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Tax on Post Employment Benefit and Long-Term Employment Benefits	Jumlah Total	Description
	Rp Juta IDR Million	Rp Juta IDR Million	Rp Juta IDR Million	Rp Juta IDR Million	Rp Juta IDR Million	Rp Juta IDR Million	Rp Juta IDR Million	
Saldo Aset/ (Kewajiban) 31 Desember 2015	2,123,394	0	(2,558,255)	(580,065)	(1,885,441)	(492,756)	(7,639,911)	Asset/(Liabilities) Balance as per Desember 31, 2015
Beban Imbalan Kerja	(231,733)	183,468	(299,706)	11,840	(213,883)	(111,075)	(661,089)	Employment Benefit Expenses
Beban/ (pendapatan) Selisih Revaluasi	(205,078)	(264,307)	(486,056)	(84,484)	0	(14,596)	(1,054,521)	Revaluation Reserves Expenses/ (Revenues)
Pendanaan Bank Indonesia	864,509	80,839	97,851	0	0	0	1,043,199	Bank Indonesia's Contribution
Pembayaran Manfaat	0	0	0	169,734	406,221	134,182	710,137	Benefit Payment
Saldo Aset/ (Kewajiban) 31 Desember 2016	(1,695,696)	0	(3,246,166)	(482,975)	(1,693,103)	(484,245)	(7,602,185)	Asset/(Liabilities) Balance as per Desember 31, 2016

Kewajiban imbalan kerja dihitung berdasarkan jumlah peserta yaitu pegawai Bank Indonesia. Per 31 Desember 2016 kewajiban imbalan kerja telah memperhitungkan pengurangan jumlah peserta karena pemberhentian pegawai Bank Indonesia yang berpindah ke OJK.

Employee benefits liabilities are calculated based on the number of participants which are Bank Indonesia's employees. As of December 31, 2016 employee benefits liabilities has calculated a reduction of the participant numbers following the termination of Bank Indonesia's employees who moved to OJK.

Komposisi investasi aset program terdiri dari:

The investment portfolio of asset program are as follows:

Uraian	2016 Nilai Investasi Investment Value %	2015 Nilai Investasi Investment Value %	Description
Kas dan Setara Kas	16	22	Cash or Cash Equivalent
Surat Berharga	74	66	Securities
Lainnya	10	12	Others
	100	100	

D.10.2. Lainnya

Kewajiban Non Kebijakan Lainnya sebesar Rp6.584.470 juta antara lain terdiri dari kewajiban perpajakan Bank Indonesia sebesar Rp6.226.794 juta.

D.10.2. Others

Other NonPolicy-Related Liabilities was IDR6,584,470 million, included tax payable of IDR6,226,794 million.

D.11. Selisih Revaluasi

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp62.726.901 juta dan Rp119.877.899 juta yang terdiri atas:

D.11. Revaluation Reserves

Unrealized gains or losses as of December 31, 2016 and December 31, 2015 were IDR62,726,901 million and IDR119,877,899 million respectively, as follows:

Uraian	2016 Rp Juta IDR Million	2015 Rp Juta IDR Million	Description
Selisih Revaluasi Emas	35,831,277	33,522,240	Gold Revaluation
Selisih Revaluasi Valuta Asing:			Foreign Currency Revaluation:
Selisih Revaluasi Penjabaran Valuta Asing	1,792,160	45,981,039	Foreign Currency Definition Revaluation
Selisih Revaluasi Transaksi Valuta Asing	28,839,124	40,328,869	Foreign Currency Transaction Revaluation
Selisih Revaluasi Instrumen Keuangan	(13,444,558)	(10,731,731)	Financial Instrument Revaluation
Selisih Revaluasi Lainnya	9,708,898	10,777,482	Other Revaluation
Jumlah Selisih Revaluasi	62,726,901	119,877,899	Total Revaluation Reserves

Selisih Revaluasi Lainnya sebesar Rp9.708.898 juta terdiri dari selisih revaluasi aktiva tetap Rp14.121.816 juta dan selisih negatif kewajiban aktuarial sebesar Rp4.412.918 juta.

Other revaluation reserves were IDR9,708,898 million which comprised reservation reserve of Fixed Asset amounting to IDR14,121,816 and negative reserve of Actuarial Liability amounting to IDR4,412,918 million.

D.12. Modal

Jumlah Modal dan Kewajiban Moneter yang diperhitungkan dalam perhitungan Rasio Modal per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, sebagai berikut:

D.12. Capital

The amount of the Capital and Monetary Liabilities used in calculating Capital Ratio as of December 31, 2016 and December 31, 2015, were as follows:

Uraian	2016 Rp Juta IDR Million	2015 Rp Juta IDR Million	Description
a. Modal			a. Capital
Modal	3,726,349	3,726,349	Capital
Revaluasi Aset Tetap	14,121,816	14,135,880	Revaluation of Fixed Assets
Cadangan Umum	134,072,619	95,818,969	General Reserves
90% Surplus Tahun Berjalan (setelah pajak)	15,369,197	55,192,929	90% Current Year Surplus (after tax)
Jumlah	167,289,981	168,874,127	Total
a. Kewajiban Moneter			b. Monetary Liabilities
Uang dalam Peredaran	612,557,609	586,775,262	Currency in Circulation
Giro Pemerintah	127,586,419	151,057,586	Government Demand Deposits
Giro Bank	369,392,400	392,784,697	Bank Demand Deposits
Giro Penduduk Lainnya	361,690	366,147	Other Demand Deposits
Surat Berharga yang Diterbitkan	545,965,772	376,149,373	Securities Issued
Pinjaman dari Pemerintah	34,880	48,832	Borrowings from the Government
Jumlah	1,655,898,770	1,507,181,897	Total
c. Rasio Modal	10.10%	11.20%	c. Capital Ratio

Berdasarkan Undang Undang Bank Indonesia diatur bahwa dalam hal rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia di atas 10%, maka Bank Indonesia menyetorkan sisa surplus yang merupakan bagian Pemerintah. Sisa surplus yang merupakan bagian Pemerintah tersebut terlebih dahulu harus digunakan untuk membayar kewajiban Pemerintah kepada Bank Indonesia. Rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia per 31 Desember 2016 sebesar 10,10%.

According to Bank Indonesia Act, in the event that the capital ratio reaches over 10%, Bank Indonesia has to allocate the surplus balance that is part of the Government. The government's surplus allocation will be used to pay government's liability to Bank Indonesia. Bank Indonesia's capital ratio as of December 31, 2016 was 10.10%.

D.13. Akumulasi Surplus/Defisit

Saldo Akumulasi Surplus/Defisit per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp175.272.122 juta dan Rp176.351.174 juta dengan rincian sebagai berikut:

D.13. Accumulated Surplus/Deficit

The Accumulated Surplus/Deficit as of December 31, 2016 and December 31, 2015 amounted to IDR175,272,122 million and IDR176,351,174 million respectively, with details as follows:

Uraian	2016 Rp Juta IDR Million	2015 Rp Juta IDR Million	Description
Cadangan Umum	134,072,619	95,818,968	General Reserves
Cadangan Tujuan	24,122,618	19,206,729	Statutory Reserves
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	17,076,885	61,325,477	Current Year Surplus (Deficit)
Jumlah Akumulasi Surplus/Defisit	175,272,122	176,351,174	Total Accumulated Surplus/Deficit

Peningkatan Cadangan Umum sebesar Rp38.253.651 juta antara lain karena adanya alokasi surplus Bank Indonesia tahun 2015 sebesar Rp37.036.992 juta dan penggunaan Cadangan Tujuan sebesar Rp4.915.889 juta.

The increase of General Reserves amounting to IDR38,253,651 million was due to Bank Indonesia's surplus allocation in 2015 of IDR37,036,992 million and the use of Statutory Reserves amounting to IDR4,915,889 million.

Peningkatan Cadangan Tujuan sebesar Rp4.915.889 juta antara lain karena adanya alokasi surplus Bank Indonesia tahun 2015 sebesar Rp6.132.548 juta dan penggunaan Cadangan Tujuan periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2016 sebesar Rp1.216.659 juta dengan rincian sebagai berikut:

The increase in Statutory Reserves amounting to IDR4,915,889 million was due to Bank Indonesia's surplus allocation in 2015 amounting to IDR6,132,548 million and the use of Statutory Reserves for the period of January 1 to December 31, 2016 amounting to IDR1,216,659 million, as follows:

- 1) Pembaruan/penggantian aset tetap sebesar Rp1.182.023 juta.
- 2) Pengembangan Organisasi dan SDM sebesar Rp34.636 juta.

- 1) *Renewal/replacement of fixed assets amounting to IDR1,182,023 million.*
- 2) *Organizational and Human Resource Development amounting to IDR34,636 million.*

D.14. Pajak Penghasilan

D.14 Income Tax

D.14.1. Pendapatan (Beban) Pajak Penghasilan

D.14.1. Income Tax Revenues (Expenses)

Uraian	2016 Rp Juta IDR Million	2015 Rp Juta IDR Million	Description
Pajak Kini	(6,007,471)	(21,193,568)	Current Tax
Pajak Tangguhan :			Deffered Tax:
Pendapatan Pajak Tangguhan	0	165,167	Deffered Tax Income
Beban Pajak Tangguhan	(326,997)	0	Deffered Tax Expenses
Jumlah Pendapatan (Beban) Pajak Penghasilan	(6,334,468)	(21,028,401)	Total Deffered Tax Income (Expenses)

D.14.2. Rekonsiliasi

Bank Indonesia melakukan rekonsiliasi antara Surplus (Defisit) sebelum pajak penghasilan dan Pendapatan (Beban) pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

D.14.2. Reconciliation

Bank Indonesia reconciles its Surplus (Deficit) before income tax and income tax revenues (expenses) in accordance with the prevailing tax regulations.

Pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, Bank Indonesia mencatat surplus fiskal sebesar Rp24.029.886 juta. Pajak penghasilan sampai dengan 31 Desember 2016 atas surplus fiskal tersebut adalah sebesar Rp6.007.471 juta, namun Bank Indonesia memiliki kredit pajak sebesar Rp5.909.233 juta, sehingga pajak penghasilan kurang bayar menjadi sebesar Rp98.238 juta.

For the period ended December 31, 2016, Bank Indonesia recorded a fiscal surplus of IDR24,029,886 million. Income tax as of December 31, 2016 on this fiscal surplus was IDR6,007,471 million. Meanwhile, Bank Indonesia held a tax credit of IDR5,909,233 million, thereby the income tax payable was IDR98,238 million.

D.14.3. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2016, Bank Indonesia memiliki liabilitas pajak sebagai berikut:

Uraian	2016 Rp Juta IDR Million	2015 Rp Juta IDR Million	Description
PPh Pasal 17	6,007,471	21,193,568	Article 17
PPh Pasal 21	170,547	42,776	Article 21
PPh Pasal 22	1	0	Article 22
PPh Pasal 23	5,461	17,411	Article 23
PPh Pasal 25	0	0	Article 25
PPh Pasal 26	104	123	Article 26
PPh Pasal 4 ayat 2	39,095	39,410	Article 4 (2)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	4,115	3,509	Value Added Tax (VAT)
Total	6,226,794	21,296,797	Total

D.14.3. Tax Liabilities

Bank Indonesia's tax liabilities as of December 31, 2016 were as follow:

D.14.4. Pajak Dibayar Dimuka

Bank Indonesia melakukan rekonsiliasi antara Surplus (Defisit) sebelum pajak penghasilan dan Pendapatan (Beban) pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

D.14.4. Prepaid Taxes

Bank Indonesia reconciles its Surplus (Deficit) before income tax and income tax revenues (expenses) in accordance with the prevailing tax regulations.

Uraian	2016 Rp Juta IDR Million	2015 Rp Juta IDR Million	Description
PPh Pasal 22	44,712	59,639	Article 22
PPh Pasal 23	55	161	Article 23
PPh Pasal 25	5,864,466	15,196,623	Article 25
PPN	1,267	172	Value Added Tax (VAT)
Total	5,910,500	15,256,595	Total

D.15. Penghasilan Pelaksanaan Kebijakan Moneter

Penghasilan Pelaksanaan Kebijakan Moneter pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2016 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2015, terdiri atas:

D.15. Income from Monetary Policy Implementation

Income from Monetary Policy Implementation for the period of January 1 to December 31, 2016 and January 1 to December 31, 2015 were as follows:

Uraian	2016 Rp Juta IDR Million	2015 Rp Juta IDR Million	Description
Pendapatan Bunga	32,143,213	31,754,228	Interest Income
Pendapatan Imbalan	53,453	36,271	Income from Sharia-based Transaction
Transaksi Aset Keuangan	15,695,930	4,792,850	Net Result on Financial Transaction
Selisih Kurs Transaksi Valas	11,614,826	80,670,317	Net Result on Foreign Currency Transaction
Lainnya	269,949	315,842	Others
Jumlah Penghasilan Pelaksanaan Kebijakan Moneter	59,777,371	117,569,508	Total Income from Monetary Policy Implementation

Pendapatan Selisih Kurs Transaksi Valas untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2016 sebesar Rp11.614.826 juta merupakan dampak penjabaran transaksi valas ke Rupiah dalam rangka pengelolaan devisa dan pelaksanaan kebijakan moneter. Penurunan pendapatan tersebut merupakan dampak atau implikasi dari pelaksanaan kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dalam rangka menjaga kestabilan nilai Rupiah.

The net result of foreign currency transactions for the period of January 1 to December 31, 2016 was IDR11,614,826 million which was derived from the implementation of foreign currency transactions to Rupiah under reserve management and monetary policy implementation. This decreased revenue was the impact of policy implementation by Bank Indonesia in maintaining the stability of Rupiah's value.

D.16. Penghasilan Pengelolaan Sistem Pembayaran
Penghasilan Pengelolaan Sistem Pembayaran pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2016 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2015, terdiri atas:

D.16. Income from the Payment System Services
Income from Payment System Services for the period of January 1 to December 31, 2016 and January 1 to December 31, 2015 consisted of:

Uraian	2016 Rp Juta IDR Million	2015 Rp Juta IDR Million	Description
Sistem Pembayaran Tunai	9,277	39,178	Cash Payment Systems
Sistem Pembayaran Non Tunai			Non-cash Payment Systems
Pendapatan Jasa Penyelenggaraan	244,529	193,288	Fees and Commissions from Payment System Services
Pendapatan Jasa Pengelolaan Rekening	85,105	97,370	Fees and Commissions from Account Management Services
Jumlah Penghasilan Pengelolaan Sistem Pembayaran	338,911	329,836	Total Income from Payment System Services

D.17. Penghasilan Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial
Penghasilan dan Pengawasan Makroprudensial pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2016 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2015, masing-masing sebesar Rp173 juta dan Rp268 juta.

D.17. Income from Macroprudential Regulation and Supervision
Income from Macroprudential Regulation and Supervision for the period of January 1 to December 31, 2016 and January 1 to December 31, 2015 amounted to IDR173 million and IDR268 million respectively.

D.18. Pendapatan dari Penyediaan Pendanaan

Pendapatan dari Penyediaan Pendanaan pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2016 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2015, terdiri atas:

Uraian	2016 Rp Juta IDR Million	2015 Rp Juta IDR Million	Description
Pendapatan bunga dari surat utang yang diterbitkan Pemerintah namun tidak dapat dipindahtangankan	201,208	227,366	Interest Income from non-tradable Government Securities
Pendapatan bunga dari kredit yang diberikan kepada bank sebelum tahun 1999	12,814	17,231	Interest Income from Credits to Banks Prior to 1999
Lainnya	0	578	Others
Jumlah Pendapatan dari Penyediaan Pendanaan	214,022	245,175	Total Income from Providing Fund

D.18. Income from Providing Fund

Income from Providing Fund for the period of January 1 to December 31, 2016 and January 1 to December 31, 2015 consisted of:

D.19. Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2016 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2015, masing-masing sebesar Rp179.201 juta dan Rp3.036.599 juta.

D.19. Other Income

Other income for the period of January 1 to December 31, 2016 and January 1 to December 31, 2015, were IDR179,201 million and IDR3,036,599 million respectively.

D.20. Beban Pelaksanaan Kebijakan Moneter

Beban Pelaksanaan Kebijakan Moneter pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2016 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2015, terdiri atas:

D.20. Monetary Policy Implementation Expenses

Monetary Policy Implementation Expenses for the period of January to December 31, 2016 and January 1 to December 31, 2015 were as follow:

Uraian	2016 Rp Juta IDR Million	2015 Rp Juta IDR Million	Description
Beban Bunga:	19,548,880	20,424,692	Interest Expenses:
Sertifikat Bank Indonesia	5,065,805	4,113,721	Bank Indonesia Certificates
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	4,980,763	5,101,225	Bank Indonesia Certificates of Deposit
Surat Berharga Bank Indonesia Valas	355,562	2,499	Bank Indonesia's Securities Denominated in Foreign Currency
Penempatan Berjangka Dalam Rupiah dan Valuta Asing	1,074,855	213,780	Term Deposits Denominated in Rupiah and Foreign Currency
Penempatan Dana	3,123,726	5,047,836	Deposit Facilities
Liabilitas Kepada Bank Karena Transaksi Repo Surat Berharga	3,908,701	4,185,259	Liabilities to Banks Due to Repo Operation
Pinjaman Luar Negeri	36,877	35,372	Foreign Borrowings
Jasa Giro Bank Rupiah	1,002,591	1,725,000	Rupiah Denominate Bank Current Account Service
Beban Imbalan:	1,306,137	1,391,901	Interest Expenses:
Sertifikat Bank Indonesia Syariah	472,174	595,582	Sharia-based Bank Indonesia Certificates
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	686,912	742,139	Bank Indonesia Sharia Deposit Facility
Liabilitas Repo SSB Berbasis Syariah	132,017	52,231	Sharia-based Securities Repo Liabilities
Penempatan Berjangka Syariah Valuta Asing	15,034	1,949	Sharia-based Term Deposits Denominated in Foreign Currency
Lainnya	618,838	529,579	Other Expenses
Jumlah Beban Pelaksanaan Kebijakan Moneter	21,473,855	22,346,172	Total Monetary Policy Implementation Expenses

D.21. Beban Pengelolaan Sistem Pembayaran

Beban Pengelolaan Sistem Pembayaran pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2016 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2015, terdiri atas:

Uraian	2016 Rp Juta IDR Million	2015 Rp Juta IDR Million	Description
Sistem Pembayaran Tunai:	3,022,922	3,663,295	Cash Payment Systems:
Perencanaan, Pengadaan dan Pencetakan Uang	2,874,474	3,542,802	Currency Planning, Procurement, and Printing
Distribusi Uang, Layanan kas dan Penanggulangan Uang Palsu	148,448	120,493	Currency Distribution, Cash Services and Destruction of Counterfeit Currency
Sistem Pembayaran Non Tunai	73,111	78,787	Non-Cash Payment Systems
Jumlah Beban Pengelolaan Sistem Pembayaran	3,096,033	3,742,082	Total Payment System Services Management Expenses

D.22. Beban Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

Beban Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2016 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2015, masing-masing sebesar Rp138.466 juta dan Rp113.531 juta.

D.23. Beban Remunerasi kepada Pemerintah

Beban remunerasi atas rekening giro milik Pemerintah untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2016 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp4.177.108 juta dan Rp4.253.586 juta.

D.24. Beban Umum dan Lainnya

Beban Umum dan Lainnya pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2016 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2015, terdiri atas:

Uraian	2016 Rp Juta IDR Million	2015 Rp Juta IDR Million	Description
SDM, Organisasi dan Logistik	8,079,659	8,222,789	Human Resource (Salaries), Organization, and Logistic
Lainnya	133,204	149,348	Other Expenses
Jumlah Beban Umum dan Lainnya	8,212,863	8,372,137	Total Expenses

Dalam beban SDM, Organisasi, dan Logistik termasuk juga Tunjangan Hari Tua (THT) berupa Tunjangan Pemilikan Rumah (Tuperum) dan Tunjangan Kesehatan Hari Tua (TKHT) serta kepesertaan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagaimana diwajibkan oleh Undang

D.21. Payment System Expenses

Payment System Expenses for the period of January 1 to December 31, 2016 and January 1 to December 31, 2015 were as follow:

D.22. Macroprudential Regulation and Supervision Expenses

Macroprudential Regulation and Supervision Expenses for the period of January 1 to December 31, 2016 and January 1 to December 31, 2015 were IDR138,466 million and IDR113,531 million respectively.

D.23. Remuneration on Government General Deposits Expenses

Remuneration on Government Demand Deposits for the period of January 1 to December 31, 2016 and January 1 to December 31, 2015 were IDR4,177,108 million and IDR4,253,586 million respectively.

D.24. General and Administrative Expenses

General and Administrative Expenses for the period of January 1 to December 31, 2016 and January 1 to December 31, 2015 consisted of:

Human Resource, Organizational, and Logistic expenses included Retirement Benefits (THT) in the form of Home Ownership Benefits (Tuperum) and Retirement Health Benefits (TKHT) as well as participation in the Social Security Agency (BPJS) as mandated by Act Number 24 of 2011 on the Social

Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua. Dalam beban SDM, Organisasi, dan Logistik, termasuk pengalihan dana THT ke Yayasan Kesejahteraan Pegawai OJK sebesar Rp94.495 juta bagi pegawai yang pindah ke OJK namun belum memenuhi persyaratan usia dan masa dinas.

Security Agency, namely health insurance, work accident insurance, life insurance, and retirement insurance. Human Resource, Organizational, and Logistic expenses included the reallocation of THT expenses to the OJK Employees Welfare Foundation amounted to IDR94,495 million for the employees who moved to OJK but have not met the required age limit and terms of service.

E. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Bank Indonesia melakukan transaksi dengan pihak berelasi terkait dengan Pemerintah, pengelolaan imbalan kerja, dana pensiun, dan kepegawaian sebagai berikut:

E. RELATED PARTY TRANSACTIONS

Bank Indonesia conducts transactions with related parties associated with the Government, management of employee benefits, pension fund, and employees as follows:

Pihak Berelasi <i>Related Party</i>	Sifat hubungan <i>Nature of Relations</i>	Sifat dari transaksi <i>Nature of Transactions</i>
Pemerintah <i>Government</i>	a. Pemilik Dana <i>Depositor</i> b. Debitur <i>Debtor</i>	a. Pengelolaan rekening Giro Pemerintah <i>Government Demand Deposit Management</i> b. Penyelesaian SUP <i>SUP Settlement</i>
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia <i>Bank Indonesia Employee Welfare Foundation</i>	Pengelola program THT <i>Post-Employment Benefit Program Management (THT)</i>	Kontribusi iuran THT <i>Contribution to Post-Employment Benefit Program (THT)</i>
Dana Pensiun Bank Indonesia <i>Bank Indonesia Pension Fund</i>	Dana pensiun pemberi kerja <i>Employer's Pension Fund</i>	Kontribusi dana pensiun <i>Contribution to Pension Fund</i>
Personil manajemen kunci <i>Key Management</i>	Dewan Gubernur <i>Board of Governors</i>	Fasilitas pinjaman <i>Loan Facility</i>
Pegawai <i>Employees</i>	Pegawai <i>Employees</i>	Fasilitas pinjaman <i>Loan Facility</i>

F. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal 31 Desember 2016, Bank Indonesia memiliki komitmen dan kontinjensi sebagai berikut:

F.1. Komitmen

Kerjasama Ekonomi Keuangan Regional

- Bank Indonesia memiliki Fasilitas *currency swap* dalam kerangka kerja sama keuangan regional, yaitu ASEAN Swap Arrangement (ASA) dengan negara-negara ASEAN, Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) dengan negara ASEAN beserta Cina, Korea, dan Jepang

F. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

As of December 31, 2016, Bank Indonesia's commitments and contingencies consist of:

F.1. Commitments

Regional Financial Economics Cooperation

- Bank Indonesia has a currency swap facility within the framework of regional cooperation, including the ASEAN Swap Arrangement (ASA) with ASEAN member countries, the Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) with ASEAN member countries along with China, Korea,*

(ASEAN + 3) dan *Bilateral Swap Arrangement* (BSA) antara Bank Indonesia dengan Bank of Japan (BoJ) sebagai agen dari Kementerian Keuangan Jepang. Kerja sama tersebut bertujuan untuk membantu mengatasi masalah neraca pembayaran dan atau kesulitan likuiditas jangka pendek.

- Selain itu, Bank Indonesia juga memiliki Fasilitas *currency swap* dalam bentuk perjanjian *Bilateral Currency Swap Arrangement* (BCSA), yaitu dengan Bank of Korea dan Reserve Bank of Australia yang keduanya bertujuan untuk mendukung perdagangan kedua Negara dan BCSA dari People's Bank Of China.

Bank Indonesia memiliki tagihan komitmen sebesar fasilitas *currency swap* yang belum dicairkan dalam kerangka kerjasama ASA, CMIM, BSA dan BCSA. Selain itu, Bank Indonesia juga memiliki kewajiban komitmen sebesar fasilitas *currency swap* yang belum dicairkan oleh negara mitra kerjasama dalam kerangka kerjasama ASA, CMIM dan BCSA.

F.2. Kontinjensi

Perkara Hukum yang Ditangani Bank Indonesia

- Perkara hukum di luar negeri
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, Bank Indonesia menangani 2 (dua) perkara perdata yang berada di luar negeri terkait penyelesaian kewajiban Indover Bank Amsterdam di Pengadilan Distrik Amsterdam.

Salah satu perkara tersebut yaitu gugatan kepada Bank Indonesia sebagai pemegang saham tunggal Indover Bank Amsterdam menghadapi tuntutan hukum dari *Trustee* untuk bertanggung jawab atas semua kerugian yang timbul akibat proses likuidasi Indover Bank.

Tuntutan hukum tersebut bermula ketika Bank Indonesia sebagai kreditur telah mengajukan gugatan (*statement of claim*) atas deposito dan giro Bank Indonesia di Indover Bank ke Pengadilan Distrik Amsterdam. Atas klaim Bank Indonesia tersebut, pada bulan April

and Japan (ASEAN + 3) and the *Bilateral Swap Arrangement* (BSA) between Bank Indonesia with the Bank of Japan (BoJ) as agent of Japan's Ministry of Finance. This cooperation seeks to assist in resolving the balance of payment issues and/or short-term liquidity issues.

- Bank Indonesia also has *Bilateral Currency Swap Arrangement* (BCSA) with Bank of Korea and Reserve Bank of Australia to support trade of both nations and BCSA from People's Bank of China.

Bank Indonesia has unrealized commitment claims amounting to the *currency swap* facility's amount related to the cooperation with ASA, CMIM, BSA and BCSA. Additionally, Bank Indonesia also has commitment charges amounting to the *currency swap* facility that has not been drawn by partners related to the ASA, CMIM and BCSA cooperation.

F.2. Contingencies

Legal Matters Handled By Bank Indonesia

- Overseas Legal Matters
As of December 31, 2016, Bank Indonesia faced 2 (two) overseas legal cases pertaining to the Indover Bank bankruptcy settlement in the Amsterdam District Court.

One of these cases was a legal suit from the Trustees to Bank Indonesia, as the sole shareholder of Indover Bank Amsterdam, for all losses incurred resulting from Indover's liquidation process.

The legal suit began when Bank Indonesia, as the creditor, submitted a statement of claim over Bank Indonesia's term deposits and demand deposits in Indover Bank to the Amsterdam District Court. In response to Bank Indonesia's claims, the Trustees submitted a

2010 *Trustee* menyampaikan gugatan balik (*statement of counterclaim*) di Pengadilan Distrik Amsterdam yang mendalilkan bahwa Bank Indonesia sebagai pemegang saham tunggal Indover Bank berkewajiban untuk menanggung defisit Indover Bank dan men-set off tagihan Bank Indonesia yang ada di Indover Bank. Dalam hal ini, Bank Indonesia tetap berpendirian bahwa sesuai hukum perusahaan, tanggung jawab Bank Indonesia sebagai pemegang saham tunggal pada Indover Bank hanya sebatas penyertaan Bank Indonesia pada Indover Bank.

Pada tanggal 27 Agustus 2014 Pengadilan Distrik Amsterdam memutuskan mengabulkan gugatan Bank Indonesia dan menolak gugatan balik (*statement of counterclaim*) *Trustee*. Atas putusan Pengadilan Distrik Amsterdam dimaksud, pada tanggal 26 November 2014 *Trustee* mengajukan pernyataan banding, dan pada tanggal 23 Juni 2015 *Trustee* mengajukan Memori Banding.

Selanjutnya, terhadap Memori Banding *Trustee* dimaksud Bank Indonesia telah menyampaikan *Statement of Defence* dan *Cross Appeal* pada tanggal 22 Maret 2016. Atas *Cross Appeal* Bank Indonesia, *Trustee* telah menyampaikan *Statement of Reply* pada tanggal 5 Juli 2016.

Bank Indonesia secara intensif melakukan koordinasi dengan penasehat hukum Bank Indonesia di Belanda dalam rangka mempersiapkan bukti tambahan, serta menyusun *pleading notes* yang akan disampaikan dalam *Oral Hearing* yang dijadwalkan tanggal 24 Januari 2017.

2. Perkara hukum di dalam negeri
Selain menghadapi perkara hukum di luar negeri, Bank Indonesia juga menangani 246 (dua ratus empat puluh enam) perkara di dalam negeri yang terdiri atas perkara perdata

statement of counterclaim in April 2010 with the Amsterdam District Court defying that as the sole shareholder of Indover Bank, Bank Indonesia is obliged to bearing Indover Bank's deficit and off-setting Bank Indonesia's assets in Indover Bank. In this regard, Bank Indonesia firmly believes that in accordance with corporate law, Bank Indonesia's responsibility as a sole shareholder in Indover Bank is limited only to Bank Indonesia's investment in Indover Bank.

On August 27, 2014, the Amsterdam District Court has ruled in favor of Bank Indonesia and refused the Trustee's statement of counterclaim. For this result, the Trustees submitted a statement of appeal on November 26, 2014 and a Memorandum of Appeal on June 23, 2015.

Subsequently, in regards to the Trustee's Memorandum of Appeal, Bank Indonesia submitted a Statement of Defence and Cross Appeal on March 22, 2016. In response to Bank Indonesia's Cross Appeal, the Trustee submitted a Statement of Reply on July 5, 2016.

Bank Indonesia had been intensively coordinating with its legal advisors in the Netherlands in preparing additional evidence and pleading notes to be submitted in the Oral Hearing that was scheduled on January 24, 2017.

2. *Domestic Legal Cases*
In addition to overseas legal cases, Bank Indonesia were also faced with 246 (two hundred and forty six) domestic legal cases, comprising 237 (two hundred and thirty seven)

sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) perkara, perkara Tata Usaha Negara sebanyak 7 (tujuh) perkara, dan perkara lainnya sebanyak 2 (dua) perkara.

Dari perkara-perkara tersebut, sebanyak 30 (tiga puluh) perkara telah diputus oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

civil cases, 7 (seven) administrative cases, and 2 (two) other cases.

*Of these legal cases, 30 (thirty) cases have been decided by the court with permanent and legally binding effects (*inkracht van gewijsde*).*

G. INFORMASI LAIN

Tagihan Bunga Fasilitas Saldo Debit (FSD) eks. Bank Take Over PT Bank Danamon Indonesia
Pada tahun 1998/1999 Bank Indonesia telah memberikan BLBI kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1998 di Indonesia sebesar Rp144.536.094 juta.

Sebagai tindak lanjut Persetujuan Bersama antara Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan tanggal 6 Februari 1999, telah dilakukan pengalihan BLBI posisi tanggal 29 Januari 1999 dari Bank Indonesia kepada Pemerintah c.q. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebesar Rp144.536.094 juta dengan Akta Penyerahan dan Pengalihan Hak (Akta Cessie) tanggal 22 Februari 1999, dan di sisi lain Pemerintah menerbitkan Surat Utang SU-001/MK/1998 sebesar Rp80.000.000 juta dan SU-003/MK/1999 sebesar Rp64.536.094 juta.

Dari total BLBI yang telah dialihkan kepada Pemerintah c.q. BPPN sebesar Rp144.536.094 juta, termasuk di dalamnya FSD sebesar Rp54.460.896 juta. Dalam jumlah FSD tersebut terdapat FSD eks. Bank Take Over (BTO) PT Bank Danamon Indonesia (PT BDI) yang terdiri dari PT Bank Danamon Tbk., PT Bank PDFCI Tbk., dan PT Bank Tiara Asia Tbk., sebesar Rp20.129.741 juta. Terhadap FSD sebesar Rp20.129.741 juta tersebut terdapat beban bunga FSD sebesar Rp5.322.248 juta dengan rincian sebagai berikut:

G. OTHER INFORMATION

Overdraft Facility (FSD) Interest Claims
In 1998/1999, Bank Indonesia provided BI Liquidity Assistance (BLBI) to banks that encountered liquidity problems following the Indonesian monetary crisis in 1998, amounting to IDR144,536,094 million.

Following the Joint Agreement between the Governor of Bank Indonesia and the Minister of Finance dated February 6, 1999, the BLBI position as of January 29, 1999 was handed over from Bank Indonesia to the Indonesian Government c.q. Indonesian Bank Restructuring Agency (BPPN) amounting to IDR144,536,094 million based on the Deed of Surrender and Transfer of Title (Cessie Deed) dated February 22, 1999, and for its part, the Government issued Treasury Bond SU-001/MK/1998 amounting to IDR80,000,000 million and SU-003/MK/1999 amounting to IDR64,536,094 million.

Included in the total amount of BLBI handed over to the Government c.q. BPPN of IDR144,536,094 million was IDR54,460,896 million of FSD. The FSD included FSD of ex-Bank Take Over (BTO) of PT Bank Danamon Indonesia (PT BDI), comprising PT Bank Danamon Tbk., PT Bank PDFCI Tbk., and PT Bank Tiara Asia Tbk., with total amount of IDR20,129,741 million. Included in this FSD of IDR20,129,741 million was FSD's accrued interest of IDR5,322,248 million, with the following details:

Uraian	Pokok FSD FSD Principal Rp Juta IDR Million	Bunga FSD FSD Interest Rp Juta IDR Million	Description
PT Bank Danamon Tbk.	16,691,825	4,379,861	PT Bank Danamon Tbk.
PT Bank PDFCI Tbk.	1,995,000	534,959	PT Bank PDFCI Tbk.
PT Bank Tiara Asia Tbk.	1,442,916	407,428	PT Bank Tiara Asia Tbk.
Jumlah	20,129,741	5,322,248	Total

Berdasarkan Persetujuan Bersama antara Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan tanggal 6 Februari 1999, tagihan bunga sebesar Rp5.322.248 juta tidak ikut dialihkan kepada Pemerintah. Namun Menteri Keuangan (Menkeu) dengan surat Nomor SR-176/MK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999 perihal Surat Kuasa Umum dalam rangka Pembayaran Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Bank menyatakan bahwa bunga FSD termasuk dalam angka sementara rincian kewajiban bank yang dapat dibiayai penjaminan Pemerintah dengan catatan pelaksanaan pembayaran masih akan dibicarakan kembali. Dalam rangka penyelesaian tagihan bunga FSD eks. BTO PT BDI, Bank Indonesia telah melakukan upaya penyelesaian sebagai berikut:

1. Menyampaikan surat tagihan kepada eks. BTO PT BDI masing-masing dengan surat Nomor 1/124/UK, Nomor 1/122/UK dan Nomor 1/123/UK tanggal 6 Juli 1999 perihal Pembebanan Bunga Fasilitas Saldo Debet. Eks. BTO PT BDI masing-masing dengan surat Nomor B.0741-DIR tanggal 12 Juli 1999 perihal Pembebanan Bunga Fasilitas Saldo Debet, Nomor BI-015/FA25/0799 tanggal 13 Juli 1999 perihal Tagihan Bunga Fasilitas Saldo Debet/BLBI sebesar Rp527.519 juta dan Nomor 238/BTA-CS/VII/99 tanggal 12 Juli 1999 perihal Pembebanan Bunga Fasilitas Saldo Debet menyatakan bahwa bunga FSD telah diperhitungkan dalam rekapitalisasi yang dilakukan oleh BPPN dan meminta agar Bank Indonesia tidak melakukan pendebetan giro eks. BTO PT BDI di Bank Indonesia untuk pembayaran bunga FSD serta meminta Bank Indonesia melakukan konfirmasi dengan BPPN.

Based on the Joint Agreement between the Governor of Bank Indonesia and Minister of Finance dated February 6, 1999, the claims of on interest amounting to IDR5,322,248 million were not transferred to the Government, However, the Minister of Finance through Letter Number SR-176/MK.01/1999 dated May 31, 1999 on General Letter of Authorization in regards to Government Guarantee Payment to Bank Liabilities stated that the FSD Interest was included in the interim bank liabilities that were entitled to be financed by the Government guarantees, subject to further discussion on the payment.

In resolving the FSD interest claims arising from the ex. BTO PT BDI, Bank Indonesia has taken some settlement efforts such as the following:

1. *Submitting claims letter to the ex. BTO PT BDI respectively through Letter Number 1/124/UK, Number 1/122/UK and Number 1/123/UK dated July 6, 1999 on FSD Interest Claims on Ex. BTO PT BDI respectively through Letter Number B.0741-DIR dated July 12, 1999 on FSD Interest Liabilities, Number BI-015/FA25/0799 dated July 13, 1999 on FSD/BLBI Claims amounting to IDR527,519 million and Number 238/BTA-CS/VII/99 dated July 12, 1999 on FSD Interest Liabilities, stating that the FSD Interest was incorporated into the recapitalization amount carried out by BPPN and requested Bank Indonesia not to debit the Ex. BTO PT BDI in Bank Indonesia for payment of the FSD Interest as well as request Bank Indonesia to confirm with BPPN.*

- | | |
|---|--|
| <p>2. Menyampaikan surat kepada BPPN mengenai penyelesaian tagihan bunga FSD eks. BTO PT BDI, terakhir surat Nomor 6/63/BKr tanggal 10 Maret 2004 perihal Kewajiban Bunga Fasilitas Saldo Debet PT Bank Danamon Indonesia.</p> <p>3. Memasukkan permasalahan bunga FSD dalam agenda yang dibahas antara Pemerintah dan Bank Indonesia melalui Tim Kerja yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menkeu dengan GBI Nomor 7/23/KEP.GBI/2005 tanggal 29 April 2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelesaian Beberapa Permasalahan di Bidang Keuangan Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Namun sampai dengan SKB dimaksud berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, belum diperoleh penyelesaian atas permasalahan bunga FSD tersebut.</p> <p>4. Meminta data/dokumen rekapitalisasi eks. BTO oleh BPPN kepada PT BDI melalui surat Nomor 12/166/DKBU tanggal 23 Februari 2010 dan Nomor 12/248/DKBU tanggal 5 April 2010 masing-masing perihal Permasalahan Tagihan Bunga Fasilitas Saldo Debet Bank Indonesia kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk., PT Bank Tiara Asia Tbk., dan PT Bank PDFCI Tbk.</p> <p>5. Menyampaikan surat kepada Menkeu mengenai penyelesaian tagihan bunga FSD eks. BTO PT BDI, terakhir surat Nomor 18/8/DpG-DOTP/Srt/B tanggal 5 Desember 2016 perihal Tagihan Bunga Fasilitas Saldo Debet Bank Indonesia kepada Eks Bank Take Over (BTO) PT Bank Danamon sebesar Rp5,32 triliun.</p> | <p>2. <i>Submitting a Letter to BPPN pertaining to the resolution of FSD claims ex. BTO PT BDI, through Letter Number 6/63/BKr dated March 10, 2004 on FSD Interest Liabilities of PT Bank Danamon Indonesia.</i></p> <p>3. <i>Entering FSD Interest issue in the agenda of discussions between the Government of Indonesia and Bank Indonesia through the Committee that was established by the Joint Decision of the Minister of Finance with GBI Number 7/23/KEP.GBI/2005 dated April 29, 2005 on the Establishment of a Coordinating Team on Settlement of Financial Issues between Bank Indonesia and Ministry of Finance. However, no resolution to this FSD Interest was made until the Joint Decision's expiry date on December 31, 2005.</i></p> <p>4. <i>Requesting data/documents pertaining to the recapitalization of ex. BTO by BPPN to PT BDI through Letter Number 12/166/DKBU dated February 23, 2010 and Number 12/248/DKBU dated April 5, 2010 respectively on Bank Indonesia's FSD Interest Claims to PT Bank Danamon Indonesia Tbk., PT Bank Tiara Asia Tbk., and PT Bank PDFCI Tbk.</i></p> <p>5. <i>Submitting letters to the Minister of Finance pertaining to the Settlement of FSD Interest Claims for ex. BTO PT BDI, with the most recent being Letter Number 18/8/DpG-DOTP/Srt/B dated December 5, 2016 on Bank Indonesia's FSD Interest Claims to PT Bank Danamon amounting to IDR5.32 trillion.</i></p> |
|---|--|

Bank Indonesia tetap melanjutkan tugas pengelolaan tagihan bunga FSD eks. BTO termasuk upaya penagihan, dengan mempertimbangkan bahwa tagihan tersebut merupakan aset yang masih memerlukan tindak lanjut yang komprehensif.

Bank Indonesia continued to manage this FSD Interest Claims, including collection efforts, since these claims constitute assets that require a comprehensive resolution.

PEMIMPIN SATUAN KERJA

Department Heads

No	Satuan Kerja Business Unit	Nama Pemimpin Satker Head of Business Unit
Moneter Monetary		
1	Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter <i>Economic and Monetary Policy Department</i>	Juda Agung
2	Departemen Pengelolaan Moneter <i>Monetary Management Department</i>	Doddy Zulverdi
3	Departemen Pengelolaan Devisa <i>Reserve Management Department</i>	Budianto
4	Departemen Statistik <i>Statistics Department</i>	Hendy Sulistyowati
5	Departemen Pengembangan Pasar Keuangan <i>Financial Market Development Department</i>	Nanang Hendarsah
6	Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah <i>Sharia Financial and Economy Department</i>	Muh. Anwar Bashori
Makroprudensial Macprudential		
7	Departemen Kebijakan Makroprudensial <i>Macprudential Policy Department</i>	Filianingsih Hendarta
8	Departemen Surveilans Sistem Keuangan <i>Financial System Surveillance Department</i>	Agusman
9	Departemen Pengembangan UMKM <i>MSME Development Department</i>	Yunita Resmi Sari
Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Payment System and Rupiah Management		
10	Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran <i>Payment System Policy and Oversight Department</i>	Eni V. Panggabean
11	Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran <i>Payment System Management Department</i>	Bramudija Hadinoto
12	Departemen Pengelolaan Uang <i>Currency Management Department</i>	Suhaedi
Pendukung Kebijakan Policy Support		
13	Departemen Internasional <i>International Department</i>	Aida S. Budiman
14	Departemen Operasional dan Treasuri <i>Debt and Treasury Operation Department</i>	Dyah N.K. Makhijani
15	Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan <i>Management and Compliance Reporting Department</i>	Wahyudi Santoso
16	Departemen Riset Kebanksentralan <i>Central Banking Research Department</i>	Darsono
17	Departemen Komunikasi <i>Communications Department</i>	Tirta Segara
18	Departemen Manajemen Risiko <i>Risk Management Department</i>	Hariyadi Ramelan

No	Satuan Kerja Business Unit	Nama Pemimpin Satker Head of Business Unit
Pendukung Organisasi Organization Support		
19	Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola Strategic Management and Governance Department	Dody Budi Waluyo
20	Departemen Hukum Legal Affairs Department	Rosalia Suci H.
21	Departemen Sumber Daya Manusia Human Resource Department	Damayanti Johan
22	Departemen Pengelolaan Sistem Informasi Information System Management Department	Diah Purnama Bulan Azhar L. Siregar
23	Departemen Keuangan Finance Department	Mubarakah
24	Departemen Pengadaan Strategis Strategic Procurement Department	Heru Pranoto
25	Departemen Audit Intern Internal Audit Department	D. Virgoana Gandhi
26	Departemen Pengelolaan Logistik dan Fasilitas Logistic and Facilities Management Department	Dewi Setyowati
27	Institut Bank Indonesia Bank Indonesia Institute	Solikin M. Juhro
28	Pusat Program Transformasi Bank Indonesia Bank Indonesia Transformation Office	Onny Widjanarko
Jaringan Kantor Representative Offices		
Dalam Negeri Domestic		
29	Regional I	-
30	Provinsi Aceh Aceh Province	Ahmad Farid
31	Lhoksumawe	Yufrizal
32	Provinsi Sumatera Utara North Sumatera Province	Difi Ahmad J.
33	Pematang Siantar	Elly Tjan
34	Sibolga	Mohannad Junaifin
35	Provinsi Sumatera Barat West Sumatera Province	Puji Atmoko
36	Provinsi Riau Riau Province	Ismet Inono
37	Provinsi Kepulauan Riau Riau Islands Province	Gusti Raizal Eka P.

No	Satuan Kerja Business Unit	Nama Pemimpin Satker Head of Business Unit
38	Provinsi Jambi <i>Jambi Province</i>	V. Carlusa
39	Provinsi Sumatera Selatan <i>South Sumatera Province</i>	Hamid Ponco Wibowo
40	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung <i>Bangka Belitung Islands Province</i>	Bayu Martanto
41	Provinsi Bengkulu <i>Bengkulu Province</i>	Endang Kurnia Saputra
42	Provinsi Lampung <i>Lampung Province</i>	Arief Hartawan
43	Regional II	Dwi Pranoto
44	Provinsi Banten <i>Banten Province</i>	Budiharto Setyawan
45	Provinsi Jawa Barat <i>West Java Province</i>	Rosmaya Hadi K.
46	Provinsi DKI Jakarta <i>Jakarta Capital Special Region</i>	Doni Primanto Joewono
47	Cirebon	Mohamad Abdul Majid Ikram
48	Tasikmalaya	Wahyu Purnama A.
49	Tegal	Joni Marsius
50	Purwokerto	Ramdan Denny Prakoso
51	Solo	Bandoe Widiarto
52	Provinsi D.I Yogyakarta <i>Special Region of Yogyakarta</i>	Arief Budi Santoso
53	Provinsi Jawa Tengah <i>Central Java Province</i>	Iskandar Simorangkir
54	Provinsi Jawa Timur <i>East Java Province</i>	Benny Siswanto
55	Jember	Achmad Bunyamin
56	Kediri	Djoko Raharto
57	Malang	Dudi Herawadi
58	Regional III	
59	Balikpapan	Suharman Tabrani
60	Provinsi Bali <i>Bali Province</i>	Causa Iman Karana
61	Provinsi Gorontalo <i>Gorontalo Province</i>	Suryono

No	Satuan Kerja Business Unit	Nama Pemimpin Satker Head of Business Unit
62	Provinsi Kalimantan Barat West Kalimantan Province	Dwi Suslamanto
63	Provinsi Kalimantan Selatan South Kalimantan Province	Harymurthy Gunawan
64	Provinsi Kalimantan Tengah Central Kalimantan Province	-
65	Provinsi Kalimantan Timur East Kalimantan Province	Muhamad Nur
66	Provinsi Maluku Maluku Province	Wuryanto
67	Provinsi Maluku Utara North Maluku Province	Dwi Tugas Waluyanto
68	Provinsi Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara Province	Prijono
69	Provinsi Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara Province	Naek Tigor Sinaga
70	Provinsi Papua Papua Province	Joko Supratikto
71	Provinsi Papua Barat West Papua Province	Agus Hartanto
72	Provinsi Sulawesi Barat West Kalimantan Province	Asep Budi Brata
73	Provinsi Sulawesi Selatan South Sulawesi Province	Wiwiek Sisto W.
74	Provinsi Sulawesi Tengah Central Sulawesi Province	Miyono
75	Provinsi Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi Province	Dian Nugraha
76	Provinsi Sulawesi Utara North Sulawesi Province	Soekowardojo
Luar Negeri Overseas		
77	London	Endy Dwi Tjahjono
78	New York	Erwin Haryono
79	Singapura	Bambang Kusmiarso
80	Tokyo	Reza Anglingkusumo

DAFTAR ISTILAH

Daftar Istilah

Administered prices

Komponen inflasi berupa harga-harga barang dan jasa yang diatur Pemerintah, misalnya harga bahan bakar minyak dan tarif tenaga listrik.

Administered prices

Inflation component consists of goods and services price regulated by the Government, such as fuel oil price and electricity tariff.

BI Rate

Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter Bank Indonesia.

BI Rate

policy rate reflecting the stance of Bank Indonesia monetary policy.

BI 7 Days Reverse Repo Rate (BI1DRRR)

Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter Bank Indonesia dengan acuan transaksi reverse repo rate tenor 7 hari. BI 7 Days reverse repo rate merupakan suku bunga acuan baru hasil penguatan kerangka operasi moneter yang memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, bersifat transaksional, dan mendorong pendalaman pasar keuangan.

BI 7 Days Reverse Repo Rate (BI1DRRR)

policy rate reflecting the stance of Bank Indonesia monetary policy with reference to reverse repo rate with 7 days tenor. BI 7 Days reverse repo rate is a new policy rate to enhance stronger relationship in money market rates, become transactional, and encourage financial market deepening.

Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement (BI-RTGS)

sistem transfer dana secara elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement (BI-RTGS)

Electronic fund transfer system between among its members which settle the transaction in a real time basis and individually.

Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS)

sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara Peserta, Penyelenggara dan Sistem BI-RTGS.

Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS)

Means of transaction with Bank Indonesia including its administration and securities administration electronically which is connected directly between the participants, organizers, and BI RTGS system.

Cadangan Devisa

Cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia yang tercatat pada sisi aktiva neraca Bank Indonesia, yang antara lain berupa emas, uang kertas asing, dan tagihan dalam bentuk giro, deposito berjangka, wesel, surat berharga luar negeri dan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri.

Foreign reserve

State foreign reserve controlled by Bank Indonesia and registered on the Bank Indonesia's balance sheet assets inter alia gold, foreign currency, and bills in the form of giro, term deposit, money orders, foreign securities, and other foreign instrument which are used as a means of foreign payment.

Capital Adequacy Ratio	Rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank.
<i>Capital Adequacy Ratio</i>	<i>Capital Adequacy Ratio which measures the risk of loss that may be encountered by the Bank.</i>
Countercyclical Buffer	Tambahan modal yang berfungsi untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.
<i>Countercyclical Buffer</i>	<i>Additional fund to anticipate loss during the excessive growth of credit which may disrupt the financial system stability.</i>
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
<i>Third Party Fund</i>	<i>Fund entrusted by third party to be deposited at the bank according to bank deposit agreement in the form of giro, deposit, certificate of deposit, saving, and other financial instruments.</i>
Defisit Transaksi Berjalan	Kondisi ketika sebuah negara mengimpor lebih banyak barang dan jasa daripada ekspor, atau selisih antara defisit/surplus pada neraca perdagangan dengan defisit/surplus pada neraca jasa-jasa.
<i>Current account deficit</i>	<i>The condition in which a country's import exceeds its exports.</i>
Deflasi	Penurunan harga-harga barang dan jasa secara umum.
<i>Deflation</i>	<i>a decrease in the general price of goods and services.</i>
Deposit Facility	Fasilitas penempatan dana perbankan di Bank Indonesia dalam rangka operasi moneter.
<i>Deposit Facility</i>	<i>Bank facility instrument as a part of the monetary operation</i>
Devisa Hasil Ekspor	Devisa yang diterima eksportir dari hasil kegiatan ekspor.
<i>Income of Foreign Exchange Derived from Export</i>	<i>Income of Foreign Exchange Derived from Export activity.</i>
Emerging market	Kelompok negara-negara dengan ekonomi yang berkembang pesat yang antara lain tercermin dari perkembangan pasar keuangan dan industrialisasi.
<i>Emerging market</i>	<i>A group of countries that is progressing toward becoming advanced which is reflected from its market and industrialization growth.</i>
Financial Inclusion/ (Keuangan Inklusif)	Pemberian layanan keuangan dengan biaya terjangkau untuk bagian segmen masyarakat yang berpenghasilan rendah.
<i>Financial Inclusion</i>	<i>Financial services with affordable cost for the poor segment.</i>

**Forum Koordinasi Stabilitas
Sistem Keuangan**

Forum yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar lembaga dalam memelihara stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta memperkuat ketahanan dalam menghadapi gejolak ekonomi. Lembaga yang menjadi anggota forum dimaksud yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Financial System Stability Forum

Forum which function to strengthen the coordination between institutions in order to maintain financial system stability thus the sustainability economic growth and economic resilience can be achieved. The member of this forum is the Ministry of Finance, Bank Indonesia, Deposit Insurance Corporation, and Financial Services Authority,

Giro Wajib Minimum

Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.

Statutory reserve requirement

a certain percentage of third party fund which shall be maintained by the Bank as regulated by Bank Indonesia.

Produk Domestik Bruto (PDB)

Indikator ekonomi yang mencerminkan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu.

Gross Domestic Product (GDP)

Economy indicator reflected the quantity of goods and services resulting from all economic units in a country and in a certain time.

Lindung nilai

Penggunaan instrumen derivatif atau instrumen keuangan lainnya untuk melindungi perusahaan dari risiko terkait perubahan nilai wajar (*fair value*) asset atau kewajiban.

Hedging

Derivative instrument or other financial instruments to protect corporation risks related to the fluctuation of assets and liability fair value.

Indeks Stabilitas Sistem Keuangan

Indikator kinerja stabilitas sistem keuangan Indonesia secara keseluruhan yang mencakup perbankan, pasar saham dan pasar obligasi, dan membantu mengidentifikasi potensi tekanan di sistem keuangan.

Financial system stability Index

Financial system stability performance indicator consists of banking, stock and obligation market in order to identified the potential pressure in financial system.

Inflasi

Keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga barang dan jasa secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli. Terdapat dua jenis sumber inflasi, yaitu inflasi yang disebabkan oleh dorongan biaya (*cost-push*) dan inflasi karena meningkatnya permintaan (*demand-pull*).

Inflation

Sustained and significant increase in the general price of goods and services which impacts in the decreasing of purchasing power. There are two kinds of inflation namely costpush inflation and demand pull inflation.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK)	Kenaikan harga barang yang diukur dari perubahan indeks konsumen, yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat luas.
<i>Consumer price Index</i>	<i>An increase of goods and services price which is measured by consumer index. It depicts the general changes of goods and services price.</i>
Inflasi inti	Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang dan ekspektasi inflasi. Inflasi inti diperoleh dari angka inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen volatile foods dan administered prices.
<i>Core inflation</i>	<i>Inflation componen that tends to stay or persist in inflation and affected by fundamental factor, such as demand-supply interaction, exchange rate, international commodity prices, trade partner inflation and inflation expectation. Core inflation is derived from CPI inflation after excluding volatile foods and administered prices components.</i>
Inflation Targeting Framework	Kerangka kebijakan moneter forward-looking yang secara transparan dan konsisten diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi beberapa tahun ke depan yang secara eksplisit ditetapkan dan diumumkan kepada publik.
<i>Inflation Targeting Framework</i>	<i>Forward-looking monetary policy framework that is transparent and consistent geared to achieve inflation target for several years ahead that are explicitly stated and announced to the public.</i>
Investment grade <i>Investment grade</i>	Peringkat layak investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat. <i>Investment worth rating conveyed by the Credit Rating Corporation.</i>
Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) <i>Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR)</i>	Suku bunga indikasi penawaran dalam transaksi Pasar Uang Antar Bank di Indonesia yang berasal dari kontributor JIBOR. <i>Reference rate at the interbank money market transaction in Indonesia which is derived from JIBOR contributor.</i>
Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) <i>Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR)</i>	Kurs referensi harga USD/IDR berdasarkan kurs transaksi valuta asing terhadap Rupiah antarbank di pasar domestik secara real time. <i>Reference rate for USD/IDR according to inter bankforeign transaction rate to Rupiah in domestic market and real time.</i>
Kliring	Perhitungan utang piutang antara para peserta kliring secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan (<i>clearing</i>).
<i>Cliring</i>	<i>Centralized Calculation of debt and account receivable between cliring participants through providing securities and trade securities which has been set to be calculated.</i>

Layanan Keuangan Digital (LKD)

kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile maupun berbasis web dalam rangka keuangan inklusif.

Digital Financial Services

Financial and payment system services conducted through cooperation with third party by using mobile and web basis of technology device in relation to inclusiv economy.

Lender of The Last Resort

Salah satu fungsi utama bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem perekonomian yakni dengan pemberian kredit atau pembiayaan kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh terjadinya mismatch dalam pengelolaan dana.

Lender of The Last Resort

One of the core function of central bank to maintain economy system stability through credit lending and financing to the bank which suffer short-term liquidity as an impact of mismatch in fund management.

Lending facility

Fasilitas penyediaan dana Rupiah dari Bank Indonesia kepada Bank dalam rangka operasi moneter.

Lending facility

Lending facility from Bank Indonesia to the Bank in relation to monetary operation.

Loan to Deposit Ratio (LDR)

Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank umum.

Loan to Deposit Ratio (LDR)

Funding ratio against third party funding received by the bank

Loan to Funding Ratio (LFR)

Rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain terhadap: (i) dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan dan deposito dalam Rupiah dan valas, tidak termasuk dana antar bank, dan (ii) surat-surat berhagra dalam Rupiah dan valas yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterbitkan oleh bank untuk memperoleh sumber pendanaan.

Loan to Funding Ratio (LFR)

Credit ratio granted to the third party in Rupiah and Foreign currency, not including credit to the other bank to the: (i) third party funding including giro, saving, and deposit in Rupiah and Foreign Currency, not including funding between banks, and (ii) securities in Rupiah and Foreign currency issued by the Bank in order to obtain the funding.

Likuiditas

Kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat; sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya (*liquidity*).

Liquidity

Ability to pay off all liabilities in short period of time. A company classified as liquid when it has liquid assets more than the sum of all liabilities.

Makroprudensial

Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara keseluruhan.

Macroprudential

Financial regulation approach for the purpose of mitigating financial system risk.

Mikroprudensial	Pendekatan regulasi keuangan yang terkait dengan pengelolaan lembaga keuangan secara individu agar tidak membahayakan kelangsungan usahanya.
<i>Microprudential</i>	<i>Financial regulation approach related to the management of individual financial institution thus it will not harm the business continuity.</i>
Neraca Pembayaran Indonesia (NPI)	Suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial.
<i>Indonesia Balance of Payment</i>	<i>Summary of transaction between resident within the country to the residents of other country in certain period of time. Balance of payment includes purchase and sale of goods and services, grant from a person and foreign government, and financial transaction. Generally, balance of payment consists of current account balance and financial and capital account balance, and financial items.</i>
Neraca transaksi berjalan	Bagian dari neraca pembayaran yang mencatat lalu lintas barang dan jasa suatu negara.
<i>Current account balance</i>	<i>Part of the balance of payment which register the flow of goods and services within the countries.</i>
Non Performing Loan (NPL)	Kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
<i>Non Performing Loan (NPL)</i>	<i>Non Performing Loan consists of special mention credit, doubtful credit, and loss credit.</i>
Non Performing Financing (NPF)	Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah.
<i>Non Performing Financing (NPF)</i>	<i>Non performing loan term earmarked to the conventional bank, meanwhile nonperforming financing earmarked to the sharia bank.</i>
Operasi Moneter	Pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan Koridor Suku Bunga (<i>Standing Facilities</i>).
<i>Monetary operation</i>	<i>Implementation of monetary operation by the Bank Indonesia in relation to monetary control through open market operation and interest rate corridor (standing facilities).</i>
Pasar Uang Antar Bank (PUAB O/N)	Kegiatan pinjam meminjam dalam Rupiah dan/atau valuta asing antar Bank Konvensional dengan jangka waktu satu hari (<i>overnight</i>).
<i>Interbank money market (overnight IMM)</i>	<i>Borrow and lend money in Rupiah and Foreign currency between conventional banks in one day (overnight).</i>

Repurchase Agreement (Repo)

Transaksi penjualan instrumen keuangan antara dua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari akan dilaksanakan pembelian kembali atas instrumen keuangan yang sama dengan harga tertentu yang disepakati.

Repurchase Agreement (Repo)

Financial instrument purchasing between both parties according to the contract in which the parties agree that in a certain date, each party will repurchase such financial instrument at an agreed price.

**Sistem Kliring Nasional
Bank Indonesia
Bank Indonesia National
Clearing House**

Sistem transfer dana elektronik yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional.
Electronic fund transfer system including debit clearing and credit clearing through national transaction settlement.

Stress test

Estimasi potensi kerugian terhadap eksposur kredit dan likuiditas yang dihasilkan dari beberapa skenario perubahan harga dan volatilitas.

Stress test

The estimation of potential loss against credit and liquidity exposure based on various scenarios of changes in prices and volatility.

Surat Utang Negara (SUN)

Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang yang berlaku.

Government Obligation

Securities in form of obligation in Rupiah as well as foreign currency with payment of principal and interest guaranteed by the Republic of Indonesia, according to the term payment, as stated in the prevailing law.

Surat Berharga Negara (SBN)

Surat berharga yang terdiri dari Surat Utang Negara dalam mata uang Rupiah dan Surat Berharga Negara Syariah dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Government Securities

Securities that are consisted of government obligations in Rupiah and shariah government securities in Rupiah that are issued by the Government of the Republic of Indonesia.

Sovereign Credit Rating

Peringkat hutang dari suatu lembaga negara yang berdaulat yaitu pemerintah. *Sovereign Credit Rating* mengindikasikan tingkat resiko dari sebuah lingkungan investasi dari suatu negara dan digunakan oleh investor asing yang ingin berinvestasi di negara tersebut.

Sovereign Credit Rating

Debt rating of a country's government. Sovereign Credit Rating indicated the level of risks of investment in a country that is used by foreign investor that wants to invest in the country.

Suku bunga dasar kredit (SBDK)

Suku bunga yang digunakan dalam menentukan suku bunga kredit yang terdiri atas tiga komponen utama, yaitu rata-rata harga pokok dana untuk kredit, biaya overhead yang dikeluarkan bank dalam proses pemberian kredit, serta margin keuntungan yang ditetapkan bank untuk aktivitas perkreditan.

Prime Lending Rate

Interest rate used to determine lending rate that is consisted of three main components, which are average of lending costs, overhead costs, and allocated profit margin in lending.

Swap	Transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian atau penjualan tunai (spot) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan pihak yang sama dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
Swap	<i>Foreign exchange transaction through simultaneous buying or selling in cash (spot) and buy or sell back provision in a periode of time with the same party and at a premium or discounted rate that is agreed upon on the date of transaction.</i>
Systemically Important Bank	Suatu bank yang karena ukuran aset, modal, kewajiban, dan luas jaringan, atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan, serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, apabila bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.
Systemically Important Bank	<i>Bank which size of asset, capital, liabilities, and network, or complexity in bank services transaction, and interconnectedness with other financial sector can cause failure in part or whole of other banks or financial services sector, in operational or financial terms, if the bank experience disruption or failure.</i>
Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Tim lintas instansi yang melakukan pemantauan perkembangan inflasi daerah dan mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait pengendalian inflasi.
Regional Inflation Control Team	<i>Cross institutional team that monitor the development of regional inflation and identify various problems related to inflation control.</i>
Transaksi Reverse Repo	Transaksi pembelian Surat Berharga oleh peserta Operasi Pasar Terbuka (OPT) dari Bank Indonesia, dengan kewajiban penjualan kembali oleh peserta OPT sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
Reverse Repo Transaction	<i>Securities buying transaction by Open Market Operation (OMO) participants from Bank Indonesia, with the obligation to sell back by OMO participants according to agreed price and timeframe.</i>
Uang Kartal	Uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia.
Paper Currency	<i>Paper currency and coins that are issued and circulated by Bank Indonesia and used as legitimate payment instrument in the Republic of Indonesia.</i>
Uang Kartal Yang Diedarkan	Uang yang berada di masyarakat dan di khazanah perbankan.
Circulating Money	<i>Moneheld by the people and cash-in-vault.</i>

Wajar Tanpa Pengecualian

Pendapat wajar tanpa pengecualian, diberikan auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam penyusunan laporan keuangan, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Unqualified Opinion

Unqualified opinion is issued by auditor if there is no limitation in audit coverage and no significant exception in fairness and application of general accounting principles, as well as sufficient disclosure in financial report. The financial report fairly present the financial position and business outcomes of an organization, according to generally accepted accounting principles.

Volatile food

Komponen inflasi IHK yang dominan dipengaruhi oleh kejutan dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun internasional.

Volatile food

CPI inflation component that is significantly affected by shocks in the food sector such as harvest, natural disruption, or domestic and international food commodity prices.

Volatilitas

Standar deviasi dari perubahan nilai suatu instrumen keuangan dengan jangka waktu spesifik; digunakan untuk menghitung risiko dari instrumen keuangan pada suatu periode waktu umumnya secara tahunan.

Volatility

Changes in standard of deviation of financial instrument in a specific timeframe; used to calculate risks of financial instrument in a time period, in general is annually.

DAFTAR SINGKATAN*List of Abbreviation and Acronym*

ADG	Anggota Dewan Gubernur <i>Board of Governor's Member</i>	DPK	Dana Pihak Ketiga <i>Third Party Fund</i>
AFSBI	Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia <i>Bank Indonesia Strategic Functions Architecture</i>	DPR-RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia <i>The House of Representatives of the Republic of Indonesia</i>
APMK	Alat Pembayaran Menggunakan Kartu <i>Card-Based Payment Instruments</i>	EMEAP	Executives' Meeting of East Asia Pacific Central Banks <i>Executives' Meeting of East Asia Pacific Central Banks</i>
ASEAN	The Association of Southeast Asian Nations <i>The Association of Southeast Asian Nations</i>	FGD	Focus Group Discussion <i>Focus Group Discussion</i>
ATM	Anjungan Tunai Mandiri <i>Automated Teller Machine</i>	Fintech	Financial Technology <i>Financial Technology</i>
BI	Bank Indonesia <i>Bank Indonesia</i>	GDP	Gross Domestic Product <i>Gross Domestic Product</i>
BI-RTGS	Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement <i>Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement</i>	GNNT	Gerakan Nasional Non-Tunai <i>Non-Cash National Movement</i>
BI-SSSS	Bank Indonesia-Scripless Security Settlement System <i>Bank Indonesia-Scripless Security Settlement System</i>	GWM	Giro Wajib Minimum <i>Bank Minimum Reserve Requirements</i>
BPS	Badan Pusat Statistik <i>Central Bureau of Statistics</i>	IDB	Islamic Development Bank <i>Islamic Development Bank</i>
bps	Basis Point <i>Basis Point</i>	IHK	Indeks Harga Konsumen <i>Consumer Price Index</i>
Brexit	British Exit <i>British Exit</i>	JCI	Indeks Harga Saham Gabungan <i>Jakarta Composite Index</i>
BSA	Bilateral Swap Arrangement <i>Bilateral Swap Arrangement</i>	IMF	International Monetary Fund <i>International Monetary Fund</i>
BSBI	Badan Supervisi Bank Indonesia <i>Bank Indonesia Supervisory Body</i>	IRU	Investor Relations Unit <i>Investor Relations Unit</i>
CAR	Capital Adequacy Ratio <i>Capital Adequacy Ratio</i>	ISEF	Indonesia Shari'a Economic Festival <i>Indonesia Shari'a Economic Festival</i>
CCB	Countercyclical Buffer <i>Countercyclical Buffer</i>	ITF	Inflation Targeting Framework <i>Inflation Targeting Framework</i>
CeBM	Central Bank Money <i>Central Bank Money</i>	JIBOR	Jakarta Interbank Offered Rate <i>Jakarta Interbank Offered Rate</i>
CMIM	Chiang Mai Initiative Multilateralisation <i>Chiang Mai Initiative Multilateralisation</i>	KPwDN BI	Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia <i>Bank Indonesia Regional Offices</i>
CoE	Center of Excellence <i>Center of Excellence</i>	KPwLN BI	Kantor Perwakilan Luar Negeri Bank Indonesia <i>Bank Indonesia Representative Offices</i>
DF	Deposit Facilities <i>Deposit Facilities</i>	KUPVA BB	Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank <i>Non-Bank Money Changer Activities</i>

KUR	Kredit Usaha Rakyat <i>People's Business Credit</i>	PMA	Penanaman Modal Asing <i>Foreign Investment</i>
LDR	Loan to Deposit Ratio <i>Loan to Deposit Ratio</i>	PP/FC	Perusahaan Pembiayaan <i>Financial Company</i>
LFR	Loan to Funding Ratio <i>Loan to Funding Ratio</i>	PSBI	Program Sosial Bank Indonesia <i>Bank Indonesia Social Program</i>
DFS	Layanan Keuangan Digital <i>Digital Finance Service</i>	PTD BB	Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank <i>Non-Bank Fund Transfer Organizer</i>
BI FS	Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia <i>Bank Indonesia Annual Financial Statement</i>	O/N MMI	Pasar Uang Antar Bank Overnight <i>Overnight Interbank Money Market</i>
DIC	Lembaga Penjamin Simpanan <i>Deposit Insurance Corporation</i>	qtq	quarter to quarter <i>quarter to quarter</i>
LTV	Loan to Value <i>Loan to Value</i>	RDG	Rapat Dewan Gubernur <i>Board of Governor Meeting</i>
MoU	Nota Kesepahaman <i>Memorandum of Understanding</i>	Repo	Repurchase Agreement <i>Repurchase Agreement</i>
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia <i>The Unitary State of the Republic of Indonesia</i>	RUU	Rancangan Undang Undang <i>Bill</i>
NPG	National Payment Getaway <i>National Payment Getaway</i>	SBN	Surat Berharga Negara <i>Government Bond</i>
BoP	Neraca Pembayaran Indonesia <i>Indonesia Balance of Payment</i>	SE	Surat Edaran <i>Circulation Letter</i>
NPL	Non Performing Loan <i>Non Performing Loan</i>	SEACEN	The South East Asian Central Banks <i>South East Asian Central Banks</i>
NSICCS	National Standar Indonesia Chip Card Specification <i>National Standar Indonesia Chip Card Specification</i>	SF	Standing Facilities <i>Standing Facilities</i>
FSA	Otoritas Jasa Keuangan <i>Financial Service Authority</i>	SID	Sistem Informasi Debitur <i>Debtor Information System</i>
MO	Operasi Moneter <i>Monetary Operation</i>	SKNBI	Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia <i>Bank Indonesia National Clearing System</i>
OPT	Operasi Pasar Terbuka <i>Open Market Operation</i>	SOP	Standard Operating Procedure <i>Standard Operating Procedure</i>
PBI	Peraturan Bank Indonesia <i>Bank Indonesia Regulation</i>	SSK	Stabilitas Sistem Keuangan <i>Financial System Stability</i>
PDG	Peraturan Dewan Gubernur <i>Board of Governor Regulation</i>	TD	Term Deposit <i>Term Deposit</i>
Perpu	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang <i>Government Regulation in Lieu of Law</i>	TD BB	Transfer Dana Bukan Bank <i>Non Bank Fund Transfer</i>
PIHPS	Pusat Informasi Harga Pangan Strategis <i>Strategic Food Price Information Centre</i>	TPI	Tim Pengendali Inflasi <i>Inflation Control Team</i>
Initiative WP	Program Kerja Inisiatif <i>Initiative Work Program</i>	TPID	Tim Pengendali Inflasi Daerah <i>Regional Inflation Control Team</i>
PLN	Pinjaman Luar Negeri <i>Foreign Borrowings</i>	UKM	Usaha Kecil dan Menengah <i>Small and Medium Enterprise</i>
		ULE	Uang Layak Edar <i>Fit for Circulation Money</i>
		ULN	Utang Luar Negeri <i>Foreign Debt</i>

UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah <i>Micro, Small, and Medium Enterprise</i>
UPB	Uang Pecahan Besar <i>Large Denomination</i>
UPK	Uang Pecahan Kecil <i>Small Denomination</i>
UTLE	Uang Tidak Layak Edar <i>Unfit or Soiled Notes</i>
UU	Undang Undang <i>Act</i>
UYD	Uang Kartal yang Diedarkan <i>Currency in Circulation</i>
Valas	Valuta Asing <i>Foreign Exchange</i>
YoY	year on year <i>Year on Year</i>

DAFTAR TABEL

List of Table

Tabel 1. Kerjasama Swap Arrangement

Table 1. Swap Arrangement Cooperation

Tabel 2. Komposisi SDM berdasarkan pangkat

Table 2. Human Resource Composition Based on Position

Tabel 3. Komposisi SDM Berdasarkan Gender

Table 3. Human Resource Composition Based on Gender

Tabel 4. Komposisi SDM berdasarkan rentang jenjang pendidikan

Table 4. Human Resource Composition Based on Education

Tabel 5. Penghargaan BICARA

Table 5. BICARA Achievement Award

Tabel 6. Kehadiran Anggota Dewan Gubernur dalam RDG Bulanan dan Mingguan

Table 6. Attendance of Board of Governors Members in Monthly and Weekly Board of Governors Meeting

DAFTAR GRAFIK

List of Graphic

Grafik 1. Harga Komoditas

Graph 1. Commodity prices

Grafik 2. Inflasi

Graph 2. Inflation

Grafik 3. Pergerakan Sovereign Credit Rating Indonesia

Graph 3. Movement of Indonesia Sovereign Credit Rating

Grafik 4. Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK)

Graph 4. Financial System Stability Index

Grafik 5. Transaksi Valas Antar Penduduk Per Jenis Transaksi

Graph 5. Foreign Exchange Transaction by Type of Transaction

Grafik 6. Tingkat Keyakinan Stakeholders terhadap Governance Bank Indonesia

Graph 6. Stakeholders Confidence Level on Bank Indonesia Governance

Grafik 7. Tingkat Keyakinan Stakeholders terhadap Bank Indonesia Berdasarkan Prinsip Tata Kelola

Graph 7. Stakeholders Confidence Level on Bank Indonesia Governance Based on Governance Principles

DAFTAR INFOGRAFIS

List of Infographic

Jalur Transmisi Pengaruh Ekonomi Global Terhadap Ekonomi Domestik

The Transmission path of global economic influence on the domestic economy

Kerangka Pengawasan Makroprudensial Bank Indonesia

Bank Indonesia Macroprudential Supervision Framework

Roadmap National Standard Indonesia Chip Card Specification (NSICCS) dan National Payment Gateway (NPG)

Roadmap on The National Standard Indonesia Chip Card Specification (NSICCS) and National Payment Gateway (NPG)

Program Elektronifikasi dan Keuangan Inklusif

Electronification and Financial Inclusion Program

Sentralisasi Jaringan Distribusi Uang

Centralized Cash Network

Uang Rupiah Tahun Emisi 2016

Rupiah Currency Emission Year 2016

Peta Wilayah Klaster UMKM Binaan Bank Indonesia

Map of MSMEs Cluster of Bank Indonesia-led

Voyage to Indonesia

Voyage to Indonesia

Pengawasan BSBI terhadap Bank Indonesia

BSBI Supervision to Bank Indonesia

Keterkaitan Kode Etik, Disiplin Pegawai dan WBS

Linkages between Code of Ethics, Employee Discipline and WBS

Proporsi Program Kepedulian Sosial

Proportion of Social Care Program

Perjalanan Program Transformasi Bank Indonesia

Journey of Bank Indonesia Transformation Program

DAFTAR GAMBAR

List of Picture

Gambar 1. Segmen Pasar Keuangan

Picture 1. Segments in a Financial Market

Gambar 2. Mekanisme *Central Clearing Counterparty* (CCP)

Picture 2. Central Clearing Counterparty Mechanism

Gambar 3. Tahapan Pengembangan sistem BIG-eB

Picture 3. Stages of BIG-eB System Development

Gambar 4. Hubungan Bank Indonesia, DPR dan BSBI

Picture 4. Relationship between Bank Indonesia, House of Representative and Bank Indonesia Supervisory Board

Gambar 5. Kerangka Perencanaan Strategis, Anggaran, dan Manajemen Kinerja

Picture 5. Framework on Strategic Planning, Budget, and Performance Management

Gambar 6. Konsep Tiga Lini Pengendalian

Picture 6. Three Lines of Defense

Gambar 7. Kerangka Tata Kelola Bank Indonesia

Picture 7. Bank Indonesia Governance Framework

DAFTAR BOX

List of Box

Penguatan Efektifitas Transmisi Kebijakan Moneter

Strengthening the Effectiveness of Monetary Policy Transmission

Membangun Benteng Kestabilan Sistem Keuangan Indonesia

Building Financial System Stability in Indonesia

Memperkuat Sinergi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Strengthening the Synergy for Sharia Economic & Financial Development

Bank Indonesia Financial Technology Office (BI-FTO)

Bank Indonesia Financial Technology Office (BI-FTO)

Menegaskan Kedaulatan Uang Rupiah

Asserting the Sovereignty of Rupiah Currency

Inovasi Usaha Tani Sebagai Faktor Sukses Kluster Sapi Pedaging Binaan Bank Indonesia

Innovation of Farming Venture as the Successful Factor of Bank Indonesia-led Cattle Breeding Cluster

Kerjasama Penyelesaian Transaksi Perdagangan Bilateral

Bilateral Trade Deal Settlement Cooperation

Menjadi Organisasi yang Andal

Becoming a Reliable Organization

Aktualisasi Potensi Perempuan Menuju Kemandirian Ekonomi

Actualization of Women's Potential Towards Economic Independence



BANK INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT

2016

BANK INDONESIA

Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350

Contact Center BICARA : (62 21) 131
Fax : (62 21) 386-4884
e-mail : bicara@bi.go.id
Twitter : [@Bank_Indonesia](https://twitter.com/Bank_Indonesia)
YouTube : [BankIndonesiaChannel](https://www.youtube.com/BankIndonesiaChannel)